SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan RKPD merupakan instrumen untuk memastikan bahwa arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, dan subkegiatan tetap selaras dengan dinamika perkembangan kondisi daerah, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, penambahan dan pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan baru, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuian dengan perkembangan keadaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 15);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat P-PPAS adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD, adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah sampai akhir tahun anggaran.

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2026 sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.
(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk digunakan sebagai:
    a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah;
    b. pedoman penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS; dan
    c. bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2026.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD tahun 2026 disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
    a. bab i : pendahuluan;
    b. bab ii : evaluasi hasil triwulan II tahun berkenan;
    c. bab iii kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. bab iv : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. bab v : rencana kerja dan pendanaan Daerah;
f. bab vi : kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
g. bab vii : penutup.

(2) Dokumen perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 juli 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 juli 2026

KOTA MAKASSAR,

Ttd.

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .. III-1

3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional III-2

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan..... III-4

3.1.3. Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro..... III-5

3.2. Tantangan Perekonomian Daerah III-19

3.2.1. Aspek Eksternal III-21

3.2.2. Aspek Internal III-22

3.2.3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah..... III-24

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-27

3.3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-27

3.3.2. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2026 ..... III-27

3.3.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah III-31

3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-37

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026 ..... IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026..... IV-2

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026..... IV-6

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026..... IV-7

4.2.2. Tema dan Sasaran Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan IV-8

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2026 …….. IV-10

4.2.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Makassar..... IV-13

4.2.4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Makassar IV-24

4.2.4.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2026 ..... IV-36

4.2.5. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional Tahun 2026 ..... IV-64

4.2.6. Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknik Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang Tahun 2025 dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Makassar Tahun 2026..... IV-85

4.2.7. Keselarasan Dukungan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kota Makassar Terhadap Kegiatan Prioritas Utama IV-98

4.2.8. Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan IV-110

4.3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar IV-125

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026 ..... V-1

5.1. Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... V-1

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 ..... V-4

5.3. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... V-54

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1

6.1. Indikator Kinerja Makro VI-1

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-2

6.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) VI-5

6.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) VI-10

6.5. Standar Pelayanan Minimal SPM) VI-17

6.6. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) VI-23

6.6.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan VI-23

6.6.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan VI-29

6.6.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera VI-32

6.6.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas VI-38

6.6.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender VI-44

6.6.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak VI-48

6.6.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau VI-54

6.6.8. Tujuan 8 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan serta Pekerjaan Layak untuk Semua VI-58

6.6.9. Tujuan 9, Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi VI-66

6.6.10. Tujuan 10, Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara VI-70

6.6.11. Tujuan 11, Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan VI-75

6.6.12. Tujuan 12, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab VI-81

6.6.13. Tujuan 13, Penanganan Perubahan Iklim VI-87

6.6.14. Tujuan 16, Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh VI-89

6.6.15. Tujuan 17, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan..... VI-98

BAB VII PENUTUP VII-1

7.1. Kaidah Pelaksanaan VII-1

7.2.Kesimpulan VII-3

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha (Juta Rupiah) Tahun 2021-2025.	II-3
Tabel II.2	PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha (Juta Rupiah) Tahun 2021-2025.	II-5
Tabel II.3	Pertumbuhan Ekonomi ADHK Kota Makassar Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2021-2025. (%)	II-7
Tabel II.4	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2021-2025.	II-18
Tabel II.5	Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar Dengan Daerah Setara Dikawasan Tahun 2021-2025.	II-19
Tabel II.6	Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar Dengan Daerah Setara Tahun 2021-2025.	II-19
Tabel II.7	Garis Kemiskinan Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2021-2025.	II-20
Tabel II.8	Garis Kemiskinan Di Kota Makassar Dan Kota Setaranya diluar Kawasan Tahun 2021-2025	II-20
Tabel II.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Makassar, Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2021 – 2025.	II-20
Tabel II.10	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Makassar dengan Daerah Setaranya Tahun 2021 – 2025.	II-21
Tabel II.11	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Makassar Dengan Daerah Setaranya Diluar Kawasan Tahun 2021 – 2025 .	II-21
Tabel II.12	Perbandingan Indeks Gini Tahun 2021-2025 Kota Makassar , Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional .	II-22
Tabel II.13	Capaian Gini Ratio Kota Makassar dengan Wilayah Setaranya Tahun 2021-2025 .	II-22
Tabel II.14	Komponen Pembentuk IPM Kota Makassar Tahun 2021-2025	II-23
Tabel II.15	Nilai SAKIP Kota Makassar 2021-2025	II-26
Tabel II.16	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Kota Makassar Tahun 2026.	II-27
Tabel II.17	Capaian Kinerja Indokator Utama Pembangunan (IUP) Kota Makassar Tahun 2025.	II-29
Tabel II.18	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Kota Makassar Tahun 2025	II-36
Tabel II.19	Capaian Realisasi SDGs Kota Makassar Tahun Anggaran 2025	II-50
Tabel II.20	Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kota Makassar Tahun 2026 Hingga Triwulan II	II-80
Tabel II.21	Tabel Rekapitulasi Capaian berdasarkan Kinerja Triwulan II Level Program	II-82

Tabel II.22	Tabel Rekapitulasi Capaian berdasarkan Kinerja Triwulan II Level Kegiatan.....	II-84
Tabel II.23	Evaluasi Pencapaian SPM Kota Makassar Triwulan Tahun 2026	II-87
Tabel II.24	Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2026 (Triwulan II)	II-91
Tabel II.25	Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 (Triwulan II)	II-93
Tabel II.26	Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pemadam Keakaran Tahun 2026 (Triwulan II)	II-94
Tabel III.1	Realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Nasional	III-6
Tabel III.2	Realisasi dan target Pertumbuhan Sulawesi Selatan	III-6
Tabel III.3	Realisasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Makassar	III-7
Tabel III.4	Realisasi dan Target PDRB Per Kapita Kota Makassar	III-8
Tabel III.5	Realisasi dan Target Inflasi Kota Makassar.....	III-9
Tabel III.6	Realisasi dan Target Tingkat Pengangguran Tingkat Terbuka Kota Makassar	III-11
Tabel III.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar Prov. SulSel dan Nasional Tahun 2021 s.d 2025.....	III-18
Tabel III.8	Target Perubahan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.....	III-30
Tabel III.9	Target Perubahan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.....	III-35
Tabel III.10	Belanja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.....	III-36
Tabel III.11	Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Makassar Tahun 2026	III-39
Tabel IV.1	Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2026.....	IV-4
Tabel IV.2	Sasaran Indikator Makro Pembagunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Perubahan RKPD Tahun 2026	IV-10
Tabel IV.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2026	IV-11
Tabel IV.4	Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota Pada Kawasan Pembangunan Makassar Tahun 2026.....	IV-13
Tabel IV.5	Sasaran Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Makassar Perubahan RKPD Tahun 2026.....	IV-14

Tabel IV.6 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2026 ..... IV-15
Tabel IV.7 Hubungan Permasalahan Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026..... IV-21
Tabel IV.8 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026 ..... IV-25
Tabel IV.9 Program Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026 IV-37
Tabel IV.10 Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja RPJMD Dalam Pencapaian Janji Politik Kota Makassar Tahun 2025-2029… IV-49
Tabel IV.11 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kota Makassar Tahun 2025-2029 ..... IV-59
Tabel IV.12 Keselarasan Tema RKPD Kota Makassar tahun 2026 dengan Tema RKPD Provinsi Sul-Sel dan Tema RKP Nasional Tahun 2026 ..... IV-64
Tabel IV.13 Keselarasan Indikator Makro RKP, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar Tahun 2026..... IV-64
Tabel IV.14 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi-Selatan dan Prioritas Nasional/Asta Cita terhadap Sasaran Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026 ..... IV-65
Tabel IV.15 Keselarasan Asta Cita/Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026 ..... IV-70
Tabel IV.16 Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi-Selatan dengan Tujuan/Sasaran dan Program Prioritas Kota Makassar Tahun 2026..... IV-72
Tabel IV.17 Keselarasan Rekorterenbang Tahun 2025 terhadap P-RKPD Kota Makassar Tahun 2026 Outcome Kode Kode Target..... IV-86
Tabel IV.18 Kegiatan Prioritas Utama dan Dukungan Program/Sub Kegiatan Kota Makassar Tahun 2026 ..... IV-99
Tabel IV.19 Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan RKP Tahun 2026 dan Dukungan Program/Subkegiatan Kota Makassar Tahun 2026 ..... IV-111
Tabel IV.20 Pokok - Pokok Pikiran DPRD Kota Makassar Tahun 2026 (Semester I)..... IV-126

Tabel V.1 Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2026. V-1
Tabel V.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada Perubahan RKPD 2026 ..... V-5
Tabel VI.1 Indikator Makro Kota Makassar Tahun 2026..... VI-1
Tabel VI.2 Indikator Kinerja Utama Kota Makassar Tahun 2026 ..... VI -2
Tabel VI.3 Realisasi dan Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Makassar Tahun 2026..... VI -5
Tabel VI.4 Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kunci Kota Makassar Tahun 2026 ..... VI -10

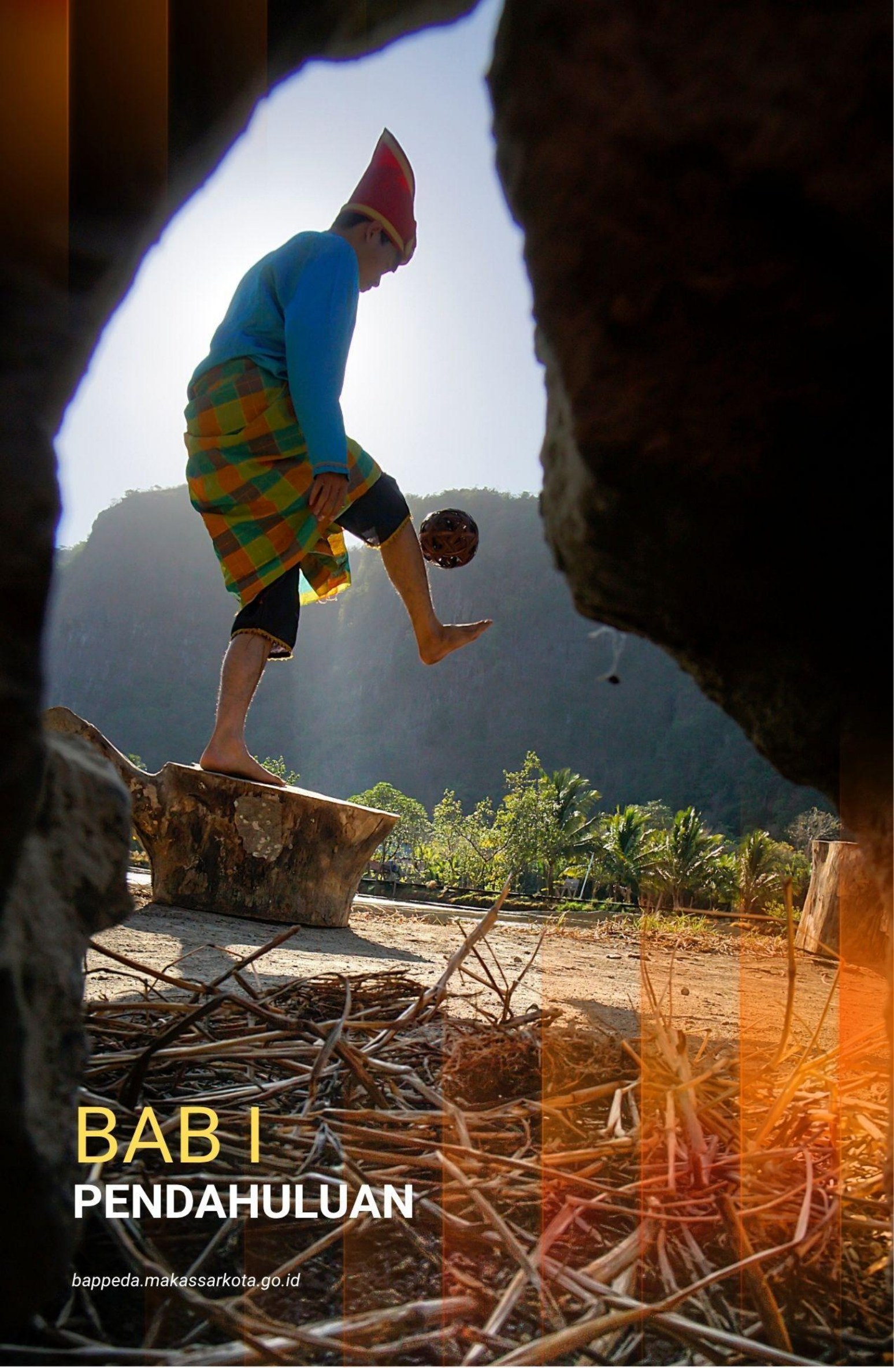
Tabel VI.5 Realisasi dan Target SPM Kota Makassar Tahun 2026 ..... VI -17
Tabel VI.6 Target Pencapaian Indikator TPB Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun Kota Makassar VI -25
Tabel VI.7 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan ..... VI -30
Tabel VI.8 Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGS 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia..... VI -34
Tabel VI.9 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua ..... VI -40
Tabel VI.10 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan... VI-46
Tabel VI.11 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan VI-50
Tabel VI.12 Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGS 7 Energi Bersih dan Terjangkau VI-50
Tabel VI.13 Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGS 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua..... VI-61
Tabel VI.14 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan,serta Mendorong Inovasi VI-68
Tabel VI.15 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara VI-72
Tabel VI.16 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 11, Membangun Kota dan Pemukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan VI-77
Tabel VI.17 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab VI-83
Tabel VI.18 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim VI-88
Tabel VI.19 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh..... VI-91
Tabel VI.20 Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 17, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan..... VI-100

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2021 – 2025 dan Triwulan I 2026	II-2
Grafik II.2	Pertumbuhan PDRB pada 5 (Lima) Jenis Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi Pada Tahun 2025.....	II-8
Grafik II.3	Perbandingan capaian pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar, Maros, Pangkep dan Gowa Tahun 2021-2025	II-9
Grafik II.4	Perbandingan PDRB Perkapita Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar, Maros,Pangkep dan Gowa Tahun 2021-2025	II-10
Grafik II.5	Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi dengan Kota Setara Tahun 2021-2025.....	II-12
Grafik II.6	Inflasi Tahunan Kota Makassar 2021-2025 dan 2026 (TW.II)	II-13
Grafik II.7	Tingkat inflasi Kota Makassar Bulan April Year Date (YtD) 2025..... .	II-14
Grafik II.8	Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Orang Bekerja di Kota Makassar Tahun 2021-2025 (jiwa).	II-15
Grafik II.9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Makassar Tahun 2021-2025 (persen).....	II-16
Grafik II.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Makassar Tahun 2021-2025 (persen)	II-17
Grafik II.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar Prov. SulSel dan Nasional Tahun 2021 s.d 2025	II-24
Grafik II.12	Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.....	II-25
Grafik III-1	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2025, Perkiraan Capaian 2026 dan Proyeksi Tahun 2027.	III-14
Grafik III-2	Perkembangan Gini Rasio Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025.	III-15
Grafik III-3	Gini Rasio Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2025, Perkiraan Capaian 2026 dan Proyeksi Tahun 2027.....….	III-16

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Hubungan Antar Dokumen RKPD Kota Makassar..... I-7
Gambar IV.1 Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026. ..... IV-7
Gambar IV.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-8
Gambar IV.3 Prioritas Nasional..... IV-8
Gambar IV.4 Sasaran Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan..... IV-9
Gambar IV.5 Lokasi Prioritas Pembangunan Wilayah. IV-9



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang dinamis dan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan permasalahan serta isu-isu strategis terkini termasuk dinamika dan perkembangan kondisi perekonomian Kota Makassar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, sampai dengan triwulan kedua Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di angka 5,89 persen. Selanjutnya, tingkat kemiskinan pada Tahun 2024 sebesar 4,97 persen mengalami penurunan menjadi 4,43 persen di Tahun 2025. Penurunan angka kemiskinan ini dipandang sebagai hasil dari berbagai kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM dan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Penurunan angka kemiskinan Kota Makassar juga didorong oleh membaiknya pasar tenaga kerja dan pengendalian inflasi yang efektif. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar juga mengalami penurunan menjadi 9,60 persen dari angka 9,71 persen di Tahun 2024. Angka gini rasio di Kota Makassar pada Tahun 2025 sebesar 0,391 sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2024.

Indeks pembangunan manusia Kota Makassar Tahun 2025 mencapai 85,66 yang menunjukkan bahwa Kota Makassar tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sulawesi Selatan tetapi juga sekaligus menempati peringkat ke-tujuh IPM tertinggi se-Indonesia. Indikator-indikator komposit IPM yang terdiri dari usia harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta pengeluaran per kapita, yang mendukung capaian IPM Makassar semuanya menunjukkan angka yang melebihi capaian IPM nasional. Usia Harapan Hidup Kota Makassar mencapai 75,60 melebihi capaian nasional yang hanya 74,67. Demikian pula harapan lama sekolah mencapai 15,63 melebihi capaian nasional 13,30 dan rata-rata lama sekolah di Kota Makassar 11,59 melebihi capaian nasional yang hanya 9,07. Demikian pula pengeluaran per kapita Kota Makassar sebesar 18.878.000 rupiah per tahun melampaui capaian nasional yang hanya 12.802.000 rupiah per tahun. Peningkatan IPM Kota Makassar yang konsisten selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar, telah berada pada jalur yang tepat.

Selama periode 2021–2025, sektor Perdagangan secara konsisten menjadi sektor yang paling menonjol dengan nilai PDRB terbesar setiap tahunnya. Pada tahun 2025, sektor Perdagangan kembali menjadi sektor paling menonjol dengan nilai PDRB sebesar Rp 30.968,88 miliar, sekaligus menjadi nilai tertinggi selama periode 2021–2025. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan terus berkembang dan mampu mempertahankan perannya sebagai sektor utama perekonomian Kota Makassar. Kinerja tersebut juga mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta daya beli masyarakat yang semakin membaik Dominasi sektor ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Makassar masih sangat bertumpu pada aktivitas perdagangan dan distribusi, yang didukung oleh posisi strategis Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di kawasan Indonesia Timur.

Perubahan dan dinamika yang terjadi memerlukan penyesuaian dalam perencanaan pembangunan, karena berimplikasi pada arah, prioritas, dan strategi

pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang relatif stabil bahkan cenderung meningkat adalah syarat penting, meskipun belum cukup. Jika pertumbuhan tinggi namun kemiskinan dan ketimpangan tetap besar, maka indikator utama pembangunan (kesejahteraan, pemerataan) belum tercapai. Sehingga meskipun capaian indikator makro menunjukkan arah positif, tetapi untuk benar-benar mencapai indikator utama pembangunan (kesejahteraan, pemerataan, kualitas hidup), maka fokus kebijakan harus memastikan pertumbuhan ekonomi inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Namun demikian, munculnya beberapa perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Kebijakan Pemerintah Pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN Tahun 2026 sebagaimana dijelaskan pada Lampiran V Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya termasuk salah satu dinamika yang mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan berdampak langsung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan.

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perubahan RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi : (a). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan/atau (b). Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026.

Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2026. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan untuk mengindentifikasi kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, dengan mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah. Penyusunan P-RKPD Kota Makassar Tahun 2026 juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang menjadi dasar penyesuaian arah kebijakan, prioritas, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P–APBD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 345, Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:

a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
c. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD.

Perubahan RKPD Tahun 2026 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang akan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut dilakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja melalui pergeseran anggaran dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran APBD TA 2026 dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perubahan APBD TA 2026. Dokumen Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2026 yang akan akan disepakati bersama antara Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2026 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam Perubahan RKPD Kota Makassar adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
13. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
25. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;
26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 259 Tahun 2020, Lembaran Lepas Sekretaris Negara Nomor 27);
28. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
29. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
30. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
31. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
32. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
39. Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);

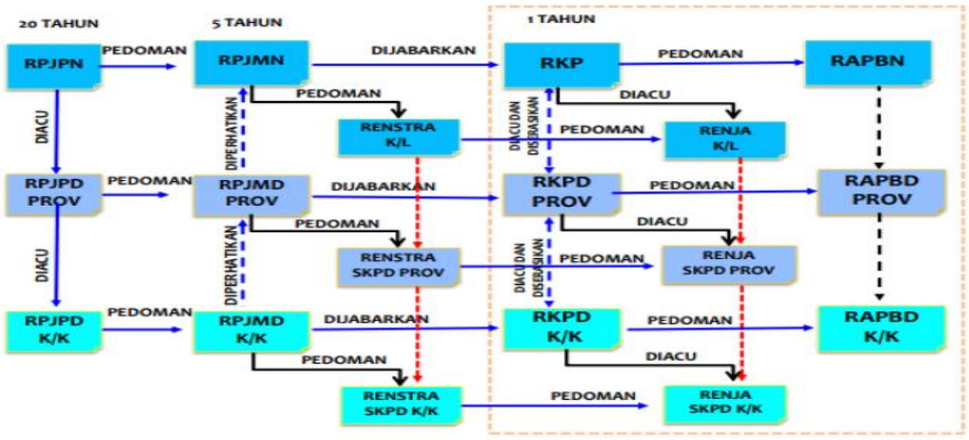
40. Peraturan Menteri Dalam Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
47. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
53. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
54. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 12);
55. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Nomor 18);
56. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

57. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
58. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2025-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 7);
59. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3).

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Siklus manajemen pembangunan meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Gambar I. 1
Hubungan Antar Dokumen RKPD Kota Makassar



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Diolah

Hubungan Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a) Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKP Tahun 2026 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas program dan kegiatan. Selain itu keterkaitan Perubahan RKPD dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKP Tahun 2026 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung pembangunan baik regional maupun nasional;
b) Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 dan dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran yang lebih nyata, operasional dan terukur,yang merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029.
c) Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah satu kesatuan yang memuat

kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RENJA-PD,setiap program dan kegiatan tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RENJA-PD Tahun 2026.

1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan gambaran perubahan arah pembangunan tahunan yang disebabkan adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan serta penganggaran, dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah dan rencana program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi triwulan kedua;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh persetujuan DPRD;
3. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P);
4. Sebagai pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026;
2. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
3. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan Tahun 2026;
4. Sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2026; memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2026 dan Realisasi RPJMD 2025-2029, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH; memaparkan rancangan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; menguraikan tentang Sasaran Pembangunan Daerah serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; memuat rincian program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan indikator kinerja yaitu capaian program daerah, keluaran kegiatan, hasil kegiatan disertai pagu indikatifnya.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; menggambarkan penatapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan.

BAB VII PENUTUP; menjelaskan poin-poin yang menegaskan bahwa perubahan RKPD merupakan acuan penyusunan kebijakan publik dan harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026.



BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II

Sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD, terutama dalam melakukan penyesuaian terhadap target kinerja, prioritas pembangunan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, pagu indikatif, serta arah kebijakan pembangunan daerah apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan awal.

Evaluasi pada bab ini tidak hanya menggambarkan capaian pelaksanaan pembangunan dari aspek makro, tetapi juga menelaah kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian indikator kinerja daerah, realisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta perkembangan pelaksanaan pendanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pembangunan Kota Makassar sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 serta menjadi dasar yang objektif dalam merumuskan kebijakan dan strategi percepatan pencapaian target pembangunan pada sisa tahun anggaran.

Selanjutnya, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II diuraikan secara sistematis melalui analisis terhadap indikator kinerja makro, capaian indikator pembangunan daerah, pelaksanaan program prioritas, realisasi keuangan dan fisik, serta berbagai faktor pendukung dan penghambat Upaya pencapaian yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah.

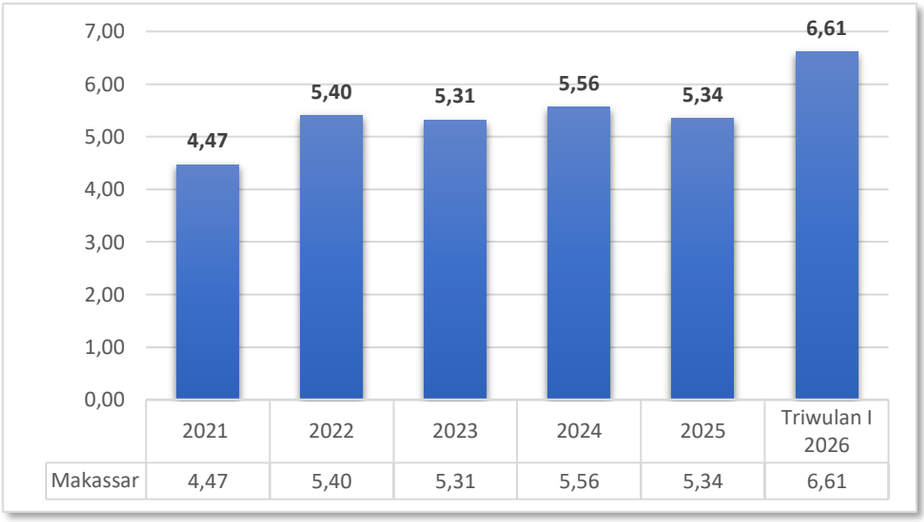
2.1. Indikator Kinerja Makro

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II ini didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 348 PMDN Nomor 86 Tahun 2017 dan PMDN Nomor 10 Tahun 2025, yang ditujukan untuk mengendalikan serta mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah pada tahun berkenaan. Analisis capaian hingga periode triwulan kedua ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memetakan progres realisasi, mengidentifikasi kendala pelaksanaan secara dini, serta merumuskan langkah-langkah korektif yang diperlukan demi memastikan seluruh target pembangunan makro dan sektoral dapat tercapai secara optimal, khusus untuk indikator makro ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi dan struktur PDRB, analisis capaian sampai dengan Triwulan II belum dapat disajikan secara faktual. Hal ini dikarenakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sektoral masih dalam proses penghitungan kumulatif terhadap seluruh lapangan usaha dan subsektor pembentuk PDRB Kota Makassar, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Guna menjaga validitas dokumen, potret indikator makro ekonomi pada laporan ini dianalisis dengan memanfaatkan data rilis resmi terakhir bersumber dari BPS serta *leading indicators* (indikator antara) yang relevan. Gambaran perkembangan kondisi makro dengan gambaran evaluasi yang dijabarkan sebagai berikut:

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kota Makassar merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia yang menunjukkan kinerja ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Setelah pulih dari dampak pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar terus berada pada kisaran di atas 5 persen. Pada tahun 2025, ekonomi Kota Makassar tumbuh sebesar 5,34 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 5,56 persen, namun tetap mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang didukung oleh aktivitas sektor jasa, perdagangan, dan sektor produktif lainnya. Meskipun pertumbuhan tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, kinerja ekonomi Kota Makassar tetap menunjukkan kondisi yang kondusif dan berkelanjutan.

Grafik II.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar
Tahun 2021 – 2025 dan Triwulan I 2026



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan kinerja yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Setelah tumbuh sebesar 5,56 persen pada tahun 2024, laju pertumbuhan sedikit melambat menjadi 5,34 persen pada tahun 2025. Meskipun mengalami perlambatan, capaian tersebut masih mencerminkan kondisi perekonomian yang tetap kuat dan didukung oleh meningkatnya aktivitas pada berbagai lapangan usaha. Memasuki awal tahun anggaran berjalan, performa perekonomian Kota Makassar pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan akselerasi yang signifikan dengan tumbuh sebesar 6,61 persen *(year on year)*. Capaian positif pada triwulan pertama ini mengindikasikan kuatnya momentum pemulihan dan penguatan ekonomi daerah, yang sekaligus menjadi basis indikator antara *(leading indicators)* mengingat data penghitungan PDRB riil untuk periode Triwulan II masih dalam proses konsolidasi sektoral oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada tahun 2025, struktur ekonomi Kota Makassar masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB. Kondisi ini menunjukkan peran strategis Kota Makassar sebagai pusat perdagangan dan distribusi barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia. Tingginya aktivitas perdagangan didukung oleh berkembangnya jaringan distribusi, konsumsi masyarakat, serta meningkatnya aktivitas sektor jasa yang menjadi penggerak utama perekonomian kota. Sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar berikutnya terhadap PDRB Kota Makassar. Peran sektor ini cukup

penting dalam menciptakan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan hasil produksi, terutama industri makanan dan minuman. Di sisi lain, sektor konstruksi juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDRB, seiring dengan terus berlangsungnya pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan tetap menunjukkan kinerja yang positif sebagai penunjang aktivitas perdagangan, logistik, dan mobilitas masyarakat. Dilihat dari sisi pertumbuhan lapangan usaha, sektor jasa menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025. Sektor Jasa Lainnya tumbuh sebesar 10,93 persen, diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,54 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,77 persen, Jasa Perusahaan sebesar 7,02 persen, serta Jasa Pendidikan sebesar 4,18 persen. Kondisi ini menunjukkan semakin besarnya peran sektor jasa dalam mendorong aktivitas ekonomi Kota Makassar seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Ke depan, upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi perlu difokuskan pada penguatan sektor-sektor unggulan melalui peningkatan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pengembangan industri pengolahan dan sektor jasa modern. Selain itu, transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekosistem usaha dan UMKM menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Dengan strategi tersebut, Kota Makassar diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin memperkuat perannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Tabel II.1.
PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020 – 2025

No	Kategori/Subkategori	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	905,358.84	1.007.223,84	998,207.55	985,211.15	1,085,709.21
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	34,200,058.66	38.892.736,95	42,720,208.33	46,173,309.56	49,912,853.06
4	Pengadaan Listrik & Gas	57,153.84	63.190,34	69,809.43	74,787.16	81,352.97
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	341,524.51	368.879,31	379,151.33	394,097.02	415,006.49
6	Konstruksi	36,131,952.00	38.870.358,63	41,301,428.53	42,041,493.30	44,194,992.05
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	37,753,710.41	41.997.947,49	45,443,609.51	48,680,750.11	52,022,548.41
8	Transportasi dan Pergudangan	4,323,529.30	5.480.408,04	6,565,492.12	7,226,861.12	7,705,988.54
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,407,193.29	4.233.262,63	4,863,291.93	5,294,278.65	5,750,404.48
10	Informasi & komunikasi	19,207,635.32	20.159.257,80	22,206,263.19	23,881,099.82	26,074,602.90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,636,609.11	11.514.824,70	12,326,414.63	13,711,976.00	15,224,025.69

No	Kategori/Subkategori	2021	2022	2023	2024	2025
12	Real Estate	6,628,571.96	7.088.392,64	7,519,356.03	8,076,836.96	8,625,008.45
13	Jasa Perusahaan	2,104,351.32	2.513.066,71	2,848,985.17	3,131,554.67	3,420,374.05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	6,516,963.87	6.733.069,62	7,355,079.95	7,506,251.28	7,710,815.23
15	Jasa Pendidikan	16,859,342.75	17.439.125,09	18,260,203.32	19,574,577.85	21,023,026.76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,387,493.46	7.054.410,76	7,772,842.35	9,033,616.27	9,900,062.66
17	Jasa lainnya	4,856,616.65	5.519.697,75	6,272,445.50	7,283,590.78	8,228,923.49
	PDRB Total	**190,318,065.29**	**208.935.852,30**	**226,902,788.87**	**243,070,291.69**	**261,375,694.45**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2026

Memperhatikan Tabel II.1 data PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada periode tahun 2021 hingga 2025, struktur perekonomian daerah secara nominal masih konsisten didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta konstruksi. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memimpin struktur ekonomi dengan nilai nominal yang melaju pesat dari Rp37,75 triliun pada tahun 2021 hingga menembus Rp52,02 triliun pada tahun 2025. Dominasi ini mencerminkan tingginya perputaran uang, penguatan konsumsi domestik, serta masifnya perkembangan UMKM di Kota Makassar pasca-pandemi. Diikuti oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh signifikan dari Rp34,20 triliun menjadi Rp49,91 triliun, serta sektor konstruksi yang naik dari Rp36,13 triliun menjadi Rp44,19 triliun pada tahun 2025. Skala ekonomi nominal yang besar pada ketiga sektor ini menegaskan perannya sebagai motor penggerak utama dalam pembentukan kue perekonomian Kota Makassar secara keseluruhan.

Sebagai kota metropolitan yang bertumpu pada sektor jasa, nilai nominal sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara ADHB juga mencatatkan pergerakan naik dari Rp905,35 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1,08 triliun pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami fluktuasi minor pada tahun 2023 dan 2024. Walau nilainya secara nominal melewati angka satu triliun, sektor primer ini secara struktural tetap bermargin kecil dan membutuhkan perhatian intervensi kebijakan yang lebih terarah. Pemanfaatan teknologi modern menjadi sangat penting untuk memitigasi risiko fluktuasi harga pasar, sehingga sektor ini tetap mampu berkontribusi optimal terhadap penciptaan lapangan kerja dan menjaga stabilitas pasokan komoditas lokal di tingkat pedagang eceran.

Selain itu, sektor-sektor penunjang kota seperti pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (Rp415,00 miliar pada 2025) serta real estate (Rp8,62 triliun pada 2025) secara nominal terus menunjukkan ekspansi yang stabil. Fokus pada penguatan nilai nominal sektor-sektor ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan total PDRB ADHB Kota Makassar yang melonjak drastis dari Rp190,31 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp261,37 triliun pada tahun 2025. Dengan demikian, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan nilai tambah pada sektor-sektor kecil ini sembari menjaga stabilitas omzet pada sektor dominan. Pendekatan ini akan menciptakan keseimbangan dalam struktur ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar secara makro.

Tabel II.2.
PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2021 – 2025

No	Kategori/Subkategori	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	518,307.32	532,418.47	537,795.30	564,158.74	589,340.34
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	22,678,921.08	24,726,635.65	25,610,983.94	26,839,531.75	28,427,655.66
4	Pengadaan Listrik & Gas	54,003.24	58,661.56	61,215.00	63,025.80	63,376.59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	244,658.55	256,915.94	261,231.45	273,257.51	285,927.26
6	Konstruksi	21,101,287.57	21,371,122.85	22,025,079.21	22,260,256.12	23,154,903.91
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	25,119,554.41	26,747,838.19	28,032,656.01	29,532,422.76	30,968,875.82
8	Transportasi dan Pergudangan	2,641,163.22	3,138,086.46	3,470,424.92	3,687,605.64	3,885,915.97
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,326,299.49	2,791,541.59	3,138,850.25	3,346,791.00	3,545,068.66
10	Informasi & komunikasi	17,525,169.34	18,129,787.68	19,770,533.47	21,104,445.03	22,219,857.05
11	Jasa Keuangan & Asuransi	6,282,853.94	6,290,475.81	6,535,842.71	7,122,772.76	7,731,044.51
12	Real Estate	3,949,175.28	4,100,604.00	4,290,049.48	4,516,166.84	4,767,156.17
13	Jasa Perusahaan	1,266,825.77	1,447,494.38	1,582,685.90	1,700,690.97	1,820,091.44
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,917,663.86	4,016,180.04	4,311,622.72	4,307,363.08	4,337,819.96
15	Jasa Pendidikan	11,695,481.34	11,881,439.49	12,224,813.09	13,130,231.48	13,679,193.70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,952,682.98	4,323,444.64	4,676,237.73	5,321,210.54	5,734,594.14
17	Jasa lainnya	3,038,780.28	3,319,951.38	3,667,882.29	4,223,269.96	4,684,746.71
PDRB		**126,312,827.67**	**133,132,598.14**	**140,197,903.47**	**147,993,199.97**	**155,895,567.88**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2026

Sedangkan pada Tabel II.2 Jika merujuk pada Data BPS Tahun 2025 mengenai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Makassar tahun 2021–2025, sektor-sektor yang mendominasi perekonomian daerah antara lain Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, serta Konstruksi. Perdagangan terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh tingginya permintaan barang dan jasa serta perkembangan sektor UMKM. Sektor Industri Pengolahan juga tumbuh stabil berkat optimalisasi hilirisasi komoditas yang didukung penerapan teknologi. Informasi dan Komunikasi mengalami perkembangan pesat, mencerminkan transformasi digital yang mengubah hampir semua sektor perekonomian. Sementara itu, Konstruksi terus berkembang seiring dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah. Untuk mempertahankan pertumbuhan sektor-sektor ini, perlu dilakukan digitalisasi, inovasi teknologi, serta penguatan sistem logistik dan rantai pasok kota.

Di sisi lain, sektor-sektor dengan kontribusi lebih kecil seperti Pertanian, Pertambangan, dan Jasa Keuangan memerlukan perhatian lebih. Pertanian masih menghadapi tantangan produktivitas akibat keterbatasan lahan urban, yang dapat diatasi dengan penerapan teknologi pertanian modern (*urban farming*) dan peningkatan akses pasar. Sektor Jasa Keuangan, meskipun memiliki peran penting dalam intermediasi modal, kontribusi riilnya masih memerlukan perluasan akses keuangan digital serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Dengan penguatan sektor-sektor yang kurang dominan ini, dapat tercipta pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Peningkatan nilai PDRB-ADHK Kota Makassar selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan pemulihan yang solid dan penguatan struktur ekonomi riil. Kenaikan total volume ekonomi dari Rp126.312,83 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp155.895,57 miliar di tahun 2025 didorong oleh kinerja positif dari lima sektor dominan yang menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi kota. Adapun kelima sektor tersebut adalah:

1. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Sektor ini tetap menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PDRB ADHK. Peningkatan aktivitas perdagangan mencerminkan pulihnya daya beli masyarakat serta mobilitas ekonomi secara berkelanjutan. Tercatat kontribusi sektor ini terus melejit dari Rp25.119,55 miliar di tahun 2021 hingga mencapai Rp30.968,88 miliar di tahun 2025, menegaskan peran vital sektor ritel dan grosir dalam menggerakkan sirkulasi ekonomi lokal.
2. Sektor Perdagangan / Industri Pengolahan Sebagai salah satu pusat manufaktur di Kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar sangat diuntungkan oleh keberadaan aktivitas pengolahan sekunder, termasuk di kawasan strategis seperti Kawasan Industri Makassar (KIMA). Peningkatan produksi riil dan efisiensi operasional mendorong pertumbuhan sektor ini secara konsisten dari Rp22.678,92 miliar pada tahun 2021 hingga menyumbang Rp28.427,66 bias riil pada tahun 2025. Industri ini berkontribusi besar dalam menciptakan nilai tambah komoditas dan memperkuat kapasitas ekspor regional.
3. Sektor Konstruksi Aktivitas pembangunan infrastruktur, termasuk hunian, fasilitas umum, dan penyelesaian proyek strategis daerah, mendorong performa sektor konstruksi tetap stabil. Pada rentang periode analisis, sektor ini memberikan kontribusi yang meningkat dari Rp21.101,29 miliar (2021) menjadi Rp23.154,90 miliar pada tahun 2025. Keberlanjutan proyek fisik pasca-pandemi menjadi faktor pendorong utama penyerapan tenaga kerja di sektor ini.
4. Sektor Informasi dan Komunikasi Transformasi digital yang semakin masif menempatkan sektor informasi dan komunikasi sebagai salah satu growth driver yang tumbuh paling akseleratif. Peningkatan akses terhadap teknologi informasi, penggunaan internet, serta penguatan infrastruktur TIK kota membuat sektor ini berkembang pesat dari Rp17.525,17 miliar pada 2021 menjadi Rp22.219,86 miliar pada tahun 2025.
5. Sektor Jasa Pendidikan Sebagai salah satu barometer dan kota pelajar di Indonesia Timur, sektor pendidikan memegang peranan strategis jangka panjang. Seiring normalisasi penuh aktivitas akademik serta peningkatan investasi pada kualitas pendidikan formal dan non-formal, kontribusi sektor ini merangkak naik dari Rp11.695,48 miliar di tahun 2021 menjadi Rp13.679,19 miliar pada tahun 2025, yang sekaligus mendukung agenda penguatan sumber daya manusia (SDM) daerah.

Tabel II.3.
Pertumbuhan Ekonomi ADHK Kota Makassar
Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (%)

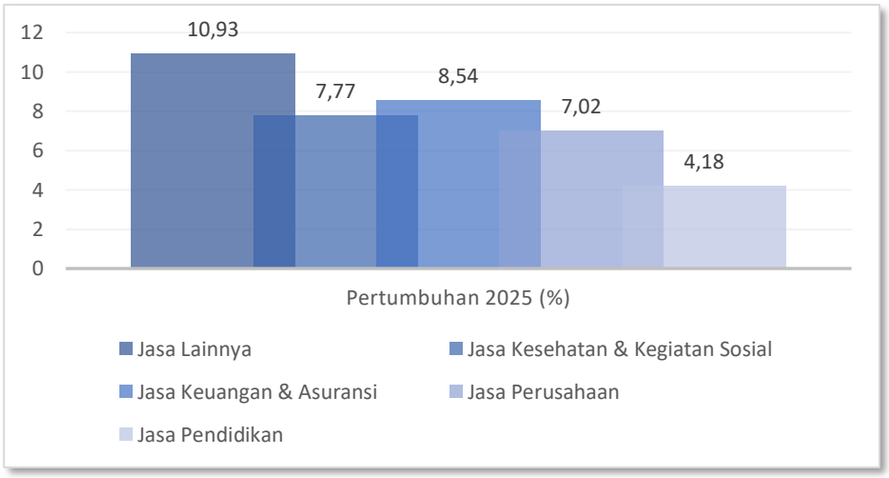
No.	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jasa lainnya	7,65	9,25	10,48	15,14	10,93
2	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,40	9,38	8,16	13,77	7,77
3	Jasa Pendidikan	3,47	1,59	2,89	7,40	4,18
4	Jasa Perusahaan	5,52	14,26	9,34	7,47	7,02
5	Informasi dan Komunikasi	6,30	3,45	9,05	6,76	5,29
6	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,82	20,00	12,44	6,62	5,92
7	Transportasi dan Pergudangan	6,67	18,81	10,59	6,28	5,38
8	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,64	6,48	4,80	5,35	4,86
9	Real Estate	2,87	3,83	4,62	5,27	5,56
10	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,84	2,72	1,01	4,90	4,46
11	Industri Pengolahan	4,19	9,03	3,58	4,80	5,92
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	-3,08	0,12	3,90	8,98	8,54
13	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,66	5,01	1,68	4,60	4,64
14	Pengadaan Listrik dan Gas	4,83	8,63	4,35	2,96	0,56
15	Konstruksi	4,29	1,28	3,06	1,07	4,02
16	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,34	2,51	7,36	-0,10	0,71
17	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PDRB Total (ADHK)	**4,47**	**5,40**	**5,31**	**5,56**	**5,34**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan kinerja yang stabil selama periode 2021–2025. Setelah tumbuh 4,47% pada 2021, pertumbuhan meningkat menjadi 5,40% pada 2022, 5,31% pada 2023, mencapai 5,56% pada 2024, dan sedikit melambat menjadi 5,34% pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Makassar tetap tumbuh positif dengan didukung oleh pemulihan berbagai lapangan usaha pascapandemi.

Pada tahun 2025, sektor jasa masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,93%, diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi (8,54%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,77%), serta Jasa Perusahaan (7,02%). Sementara itu, sektor-sektor utama seperti Perdagangan, Industri Pengolahan, Real Estate, dan Pertanian juga tetap tumbuh positif sehingga mendukung stabilitas perekonomian Kota Makassar. Secara keseluruhan, struktur ekonomi Makassar semakin didominasi oleh sektor jasa dengan tetap ditopang oleh sektor-sektor produktif lainnya.

Grafik II.2.
Pertumbuhan PDRB pada 5 (Lima) Jenis Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi Pada Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2026

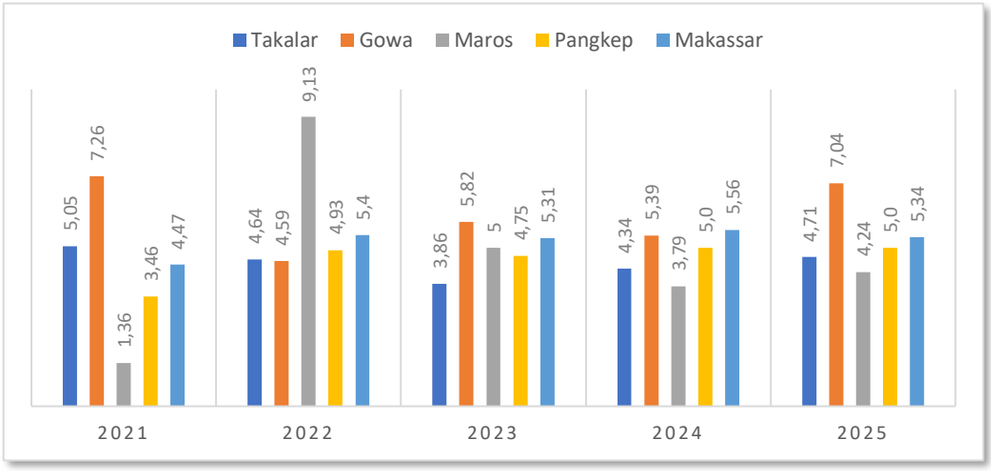
Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar secara makro mencatat capaian sebesar 5,34%, dengan sektor jasa struktural tetap mendominasi sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian daerah. Berdasarkan data taksonomi lapangan usaha, 5 (lima) jenis lapangan usaha yang mencatatkan akselerasi pertumbuhan tertinggi dipimpin oleh Sektor Jasa Lainnya sebesar 10,93%. Posisi selanjutnya diikuti berturut-turut oleh Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,54%, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,77%, Sektor Jasa Perusahaan sebesar 7,02%, serta Sektor Jasa Pendidikan sebesar 4,18%.

Tren positif dari kelima sektor tersebut menegaskan solidnya peran sektor tersier/jasa dalam menopang aktivitas ekonomi perkotaan melalui penyediaan layanan bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa transformasi struktur perekonomian Kota Makassar kian berbasis pada ekonomi jasa modern (*service-based economy*) yang didorong oleh peningkatan kualitas pelayanan serta dinamika aktivitas ekonomi masyarakat.

Perbandingan Capaian Indikator Makro dan PDRB Per Kapita Kota Makassar dengan Kabupaten Maros, Pangkep, Takalar dan Gowa

Jika dibandingkan dengan empat kabupaten yang berada dalam kawasan strategis Mamminasata, Kota Makassar masih menunjukkan posisi yang sangat kuat sebagai pusat aktivitas ekonomi regional. Selama periode 2021–2025, pertumbuhan ekonomi Makassar relatif stabil dan mampu dipertahankan pada level di atas 5 persen dalam empat tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Makassar memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap berbagai dinamika ekonomi baik di tingkat nasional maupun global.

Grafik II.3.
Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar, Maros, Pangkep dan Gowa
Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2026

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tercatat sebesar 5,34 persen. Capaian tersebut memang sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 5,56 persen, namun masih berada pada level yang cukup tinggi dibandingkan sebagian besar daerah lain di kawasan Mamminasata. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi kota tetap berlangsung secara dinamis meskipun menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global dan penyesuaian permintaan domestik.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Takalar, pertumbuhan ekonomi Makassar pada tahun 2025 lebih tinggi sebesar 0,63 poin persentase. Kabupaten Takalar hanya tumbuh sebesar 4,71 persen. Perbedaan ini mencerminkan adanya perbedaan struktur ekonomi, dimana Makassar lebih ditopang oleh sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan aktivitas bisnis yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan sektor primer yang masih dominan di Takalar.

Sementara jika ibandingkan dengan Kabupaten Maros, keunggulan Makassar juga terlihat cukup jelas. Pada tahun 2025, Maros hanya mampu tumbuh sebesar 4,24 persen. Setelah mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2022 sebesar 9,13 persen, kinerja ekonomi Maros cenderung mengalami moderasi dalam beberapa tahun berikutnya. Sementara itu, Makassar menunjukkan pola pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan sehingga mampu menjaga momentum pembangunan ekonomi secara lebih konsisten.

Selain itu Jika dibandingkan dengan Kabupaten Pangkep, capaian Makassar masih berada pada posisi yang lebih baik. Pangkep mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen pada tahun 2025. Meskipun selisihnya tidak terlalu besar, hal ini menunjukkan bahwa Makassar tetap mampu mempertahankan perannya sebagai penggerak utama ekonomi kawasan metropolitan. Aktivitas perdagangan antarwilayah, jasa keuangan, dan sektor transportasi menjadi faktor yang terus memperkuat kinerja ekonomi Kota Makassar.

Di sisi lain, Kabupaten Gowa mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2025 sebesar 7,04 persen. Capaian ini melampaui Makassar dan menunjukkan bahwa Gowa sedang mengalami akselerasi pembangunan yang cukup pesat. Namun

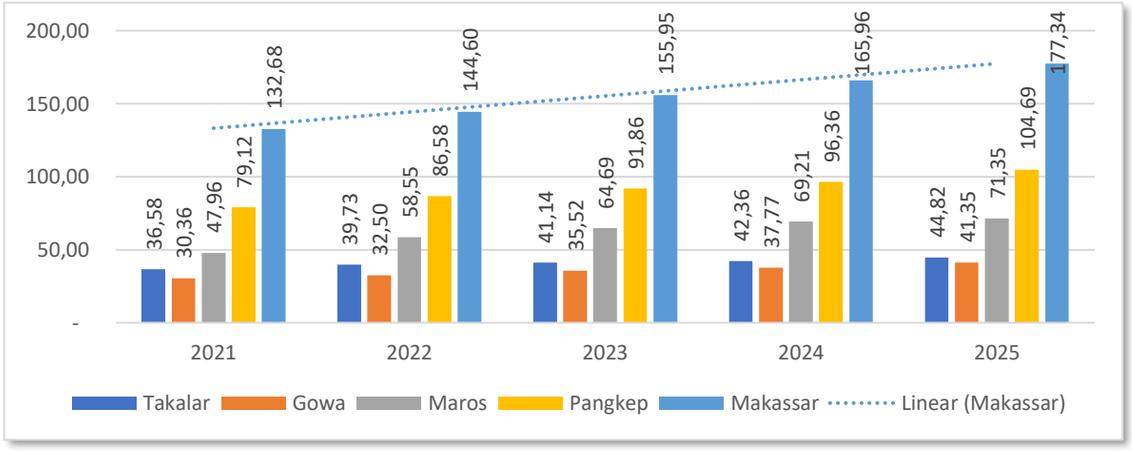
demikian, pertumbuhan tinggi tersebut perlu dilihat secara hati-hati karena belum tentu mencerminkan ukuran ekonomi yang lebih besar. Dalam konteks ekonomi regional, Makassar tetap menjadi pusat ekonomi utama dengan kapasitas produksi dan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan daerah penyangga lainnya.

Secara keseluruhan, pola pertumbuhan ekonomi kawasan Mamminasata menunjukkan bahwa terdapat dinamika pembangunan yang semakin merata antarwilayah. Kehadiran Makassar sebagai pusat pertumbuhan telah memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya melalui peningkatan konektivitas ekonomi, mobilitas tenaga kerja, perdagangan regional, dan investasi.

Ke depan, tantangan utama Kota Makassar adalah menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya tinggi secara agregat, tetapi juga mampu mendorong peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan manfaat pembangunan. Dengan mempertahankan pertumbuhan di atas rata-rata kawasan, Makassar berpotensi terus memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Kawasan Timur Indonesia

Selain pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita menjadi salah satu indikator penting untuk melihat tingkat produktivitas ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam menciptakan nilai tambah. Dibandingkan dengan kabupaten lain di kawasan Mamminasata, Kota Makassar menunjukkan posisi yang sangat dominan selama periode 2021–2025. PDRB per kapita Makassar terus meningkat dari Rp132,68 juta pada tahun 2021 menjadi Rp177,34 juta pada tahun 2025.

Grafik II.4.
Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar, Maros, Pangkep dan Gowa
Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2026

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang berlangsung di Kota Makassar mampu menghasilkan nilai tambah yang semakin besar dari tahun ke tahun. Kenaikan PDRB per kapita juga mencerminkan meningkatnya produktivitas ekonomi yang didukung oleh sektor perdagangan, jasa perusahaan, transportasi, komunikasi, serta aktivitas keuangan yang berkembang pesat.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Takalar, kesenjangan PDRB per kapita masih sangat lebar. Pada tahun 2025, PDRB per kapita Takalar tercatat sebesar

Rp44,82 juta, atau hanya sekitar seperempat dari capaian Makassar. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan kapasitas ekonomi yang cukup signifikan antara kota inti dan daerah hinterland.

Perbandingan dengan Kabupaten Gowa juga memperlihatkan dominasi Makassar yang cukup kuat. Pada tahun 2025, PDRB per kapita Gowa sebesar Rp41,35 juta. Meskipun Gowa menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, nilai tambah ekonomi per penduduk masih jauh berada di bawah Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan produktivitas ekonomi yang setara dengan Kota Makassar.

Sementara jika dibandingkan dengan Kabupaten Maros, kesenjangan yang terjadi juga masih cukup besar. Pada tahun 2025, PDRB per kapita Maros mencapai Rp71,35 juta. Meskipun lebih tinggi dibanding Takalar dan Gowa, nilai tersebut masih kurang dari separuh capaian Makassar. Hal ini mengindikasikan bahwa Makassar masih menjadi pusat konsentrasi aktivitas ekonomi bernilai tinggi di kawasan metropolitan.

Kabupaten Pangkep merupakan daerah dengan capaian PDRB per kapita tertinggi setelah Makassar. Pada tahun 2025, PDRB per kapita Pangkep mencapai Rp104,69 juta. Meskipun demikian, angka tersebut masih berada sekitar Rp72,65 juta di bawah capaian Makassar. Keunggulan Pangkep banyak didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan, namun secara keseluruhan struktur ekonomi Makassar masih lebih beragam dan kompleks.

Melihat Tren peningkatan PDRB per kapita Makassar yang konsisten juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya meningkatkan output regional secara agregat, tetapi juga meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap penduduk. Kondisi ini menjadi indikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing ekonomi daerah.

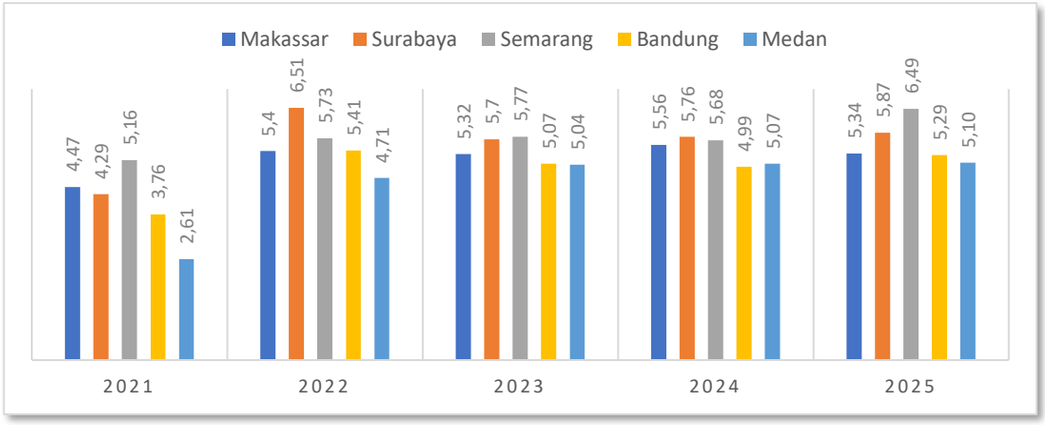
Dari perspektif pembangunan wilayah, tingginya PDRB per kapita Makassar sekaligus menunjukkan perlunya penguatan integrasi ekonomi regional. Sebagai pusat pertumbuhan, Makassar perlu terus memperluas konektivitas ekonomi dengan daerah sekitarnya sehingga manfaat pembangunan dapat menyebar secara lebih merata ke seluruh kawasan Mamminasata. Dengan demikian, kesenjangan produktivitas antarwilayah dapat dikurangi secara bertahap dan pembangunan regional menjadi lebih inklusif.

Perbandingan Capaian Indikator Makro Kota Makassar dengan Kota Setara

Jika dibandingkan dengan beberapa kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Semarang, Bandung, dan Medan, kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan daya saing yang cukup kuat. Selama periode 2021–2025, Makassar mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen dan menunjukkan stabilitas yang relatif baik dibandingkan kota setara dengan Makassar.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tercatat sebesar 5,34 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Kota Medan yang tumbuh sebesar 5,10 persen dan Kota Bandung sebesar 5,29 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Makassar masih memiliki kemampuan yang baik dalam menjaga aktivitas ekonomi dan mempertahankan momentum pertumbuhan pasca pandemi.

Grafik II.5.
Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi dengan Kota Setara Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2026

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Makassar masih berada di bawah Kota Surabaya yang mencapai 5,87 persen dan Kota Semarang yang mencapai 6,49 persen pada tahun 2025. Kedua kota tersebut memperoleh dukungan dari basis industri manufaktur yang relatif lebih kuat dan jaringan ekonomi yang terintegrasi dengan pusat-pusat ekonomi nasional. Apabila dilihat dari tren lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Makassar menunjukkan pola yang cukup stabil. Setelah tumbuh sebesar 4,47 persen pada tahun 2021, ekonomi Makassar meningkat menjadi 5,40 persen pada tahun 2022 dan mampu bertahan di atas 5 persen hingga tahun 2025. Pola ini menunjukkan adanya fondasi ekonomi yang relatif kuat dan tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi ekonomi jangka pendek.

Kota Surabaya memperlihatkan dinamika yang berbeda. Setelah tumbuh 4,29 persen pada tahun 2021, pertumbuhan meningkat tajam menjadi 6,51 persen pada tahun 2022 dan tetap berada pada level tinggi hingga tahun 2025. Hal ini menunjukkan kuatnya peran sektor industri pengolahan, perdagangan besar, dan logistik dalam mendukung perekonomian kota tersebut. Sementara kota Semarang menjadi kota dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2025. Kinerja ini menunjukkan keberhasilan Semarang dalam memperkuat basis ekonomi perkotaan yang didukung oleh sektor industri, perdagangan, dan investasi. Peningkatan konektivitas dan pengembangan kawasan industri turut memberikan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi kota tersebut.

Kota Bandung dan kota Medan menunjukkan pola pertumbuhan yang relatif mirip dengan Makassar. Kedua kota tersebut tumbuh secara stabil pada kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, Makassar tetap memiliki keunggulan strategis sebagai pusat ekonomi terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang berfungsi sebagai hub perdagangan dan jasa bagi wilayah sekitarnya.

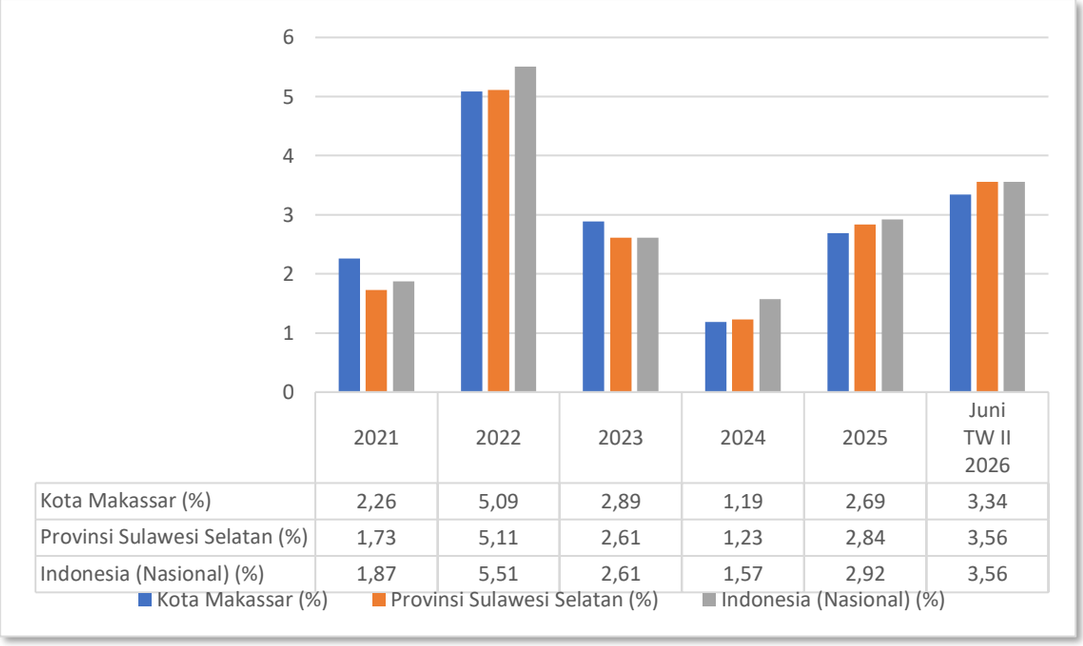
Secara keseluruhan, perbandingan dengan kota-kota setara menunjukkan bahwa Kota Makassar masih berada dalam kelompok kota besar dengan kinerja ekonomi yang kompetitif di tingkat nasional. Tantangan ke depan adalah meningkatkan produktivitas sektor unggulan, memperkuat investasi, serta memperluas transformasi ekonomi berbasis inovasi agar mampu mengejar bahkan melampaui kinerja kota-kota besar lainnya. Dengan strategi pembangunan yang tepat,

Makassar berpotensi memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin berdaya saing.

2.1.3. Inflasi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja perekonomian suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan aktivitas produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif stabil dan didukung oleh perkembangan berbagai lapangan usaha. Analisis terhadap pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah, sektor-sektor yang menjadi penggerak utama, serta arah perkembangan ekonomi Kota Makassar sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Grafik II.6.
Inflasi Tahunan Kota Makassar 2021-2025 dan 2026 (TW.II)



	2021	2022	2023	2024	2025	Juni TW II 2026
Kota Makassar (%)	2,26	5,09	2,89	1,19	2,69	3,34
Provinsi Sulawesi Selatan (%)	1,73	5,11	2,61	1,23	2,84	3,56
Indonesia (Nasional) (%)	1,87	5,51	2,61	1,57	2,92	3,56

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2026

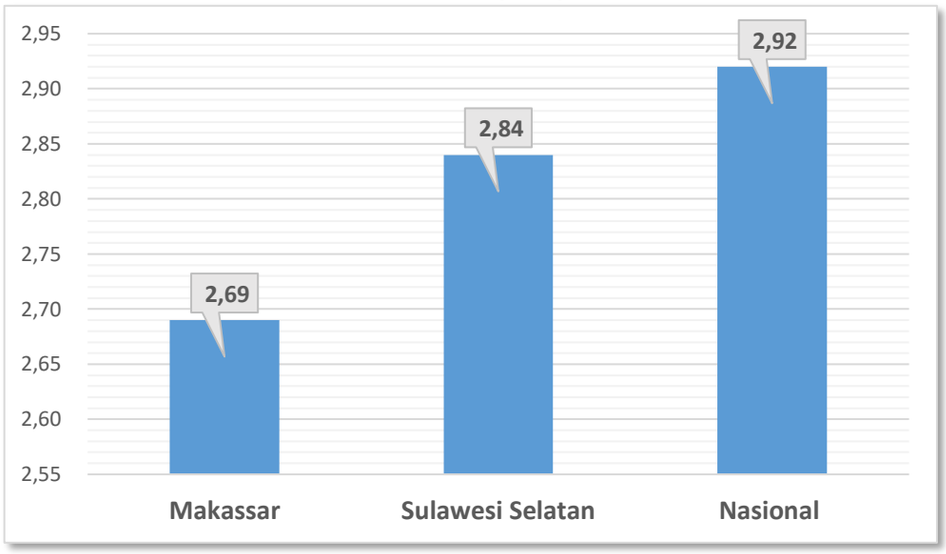
Inflasi Kota Makassar menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 2,13 persen, kemudian meningkat menjadi 2,26 persen pada tahun 2021. Puncak inflasi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 5,81 persen, seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi dan meningkatnya tekanan harga global. Setelah itu, inflasi mulai melandai pada tahun 2023 menjadi 2,89 persen, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 1,19 persen.

Penurunan inflasi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tekanan harga di Kota Makassar relatif terkendali. Kondisi ini mengindikasikan efektivitas pengendalian inflasi melalui stabilitas pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok, serta peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan harga di daerah.

Secara keseluruhan, tren inflasi 2020–2024 memperlihatkan pola yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan domestik, dengan lonjakan signifikan pada masa pemulihan pascapandemi dan kembali stabil pada tahun-tahun berikutnya.

Stabilnya inflasi pada 2023–2024 menjadi sinyal positif bagi daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi Kota Makassar.

Grafik II.7.
Tingkat Inflasi Kota Makassar Bulan April
***Year to* Date (YtD) 2025**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2026

Tingkat inflasi Kota Makassar pada Triwulan I 2025 menunjukkan kondisi yang masih relatif terkendali dengan tekanan utama berasal dari kelompok bahan pangan. Secara kumulatif (year to date), inflasi tercatat sebesar 1,09 persen. Tekanan inflasi mulai meningkat sejak awal tahun dan mencapai puncaknya pada bulan Maret dengan inflasi month to month sebesar 0,41 persen.

Kenaikan inflasi tersebut terutama dipicu oleh meningkatnya harga komoditas pangan strategis seperti beras, cabai rawit, telur ayam ras, dan bawang putih. Peningkatan permintaan menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga, yang diperkuat oleh gangguan distribusi dan tekanan biaya logistik.

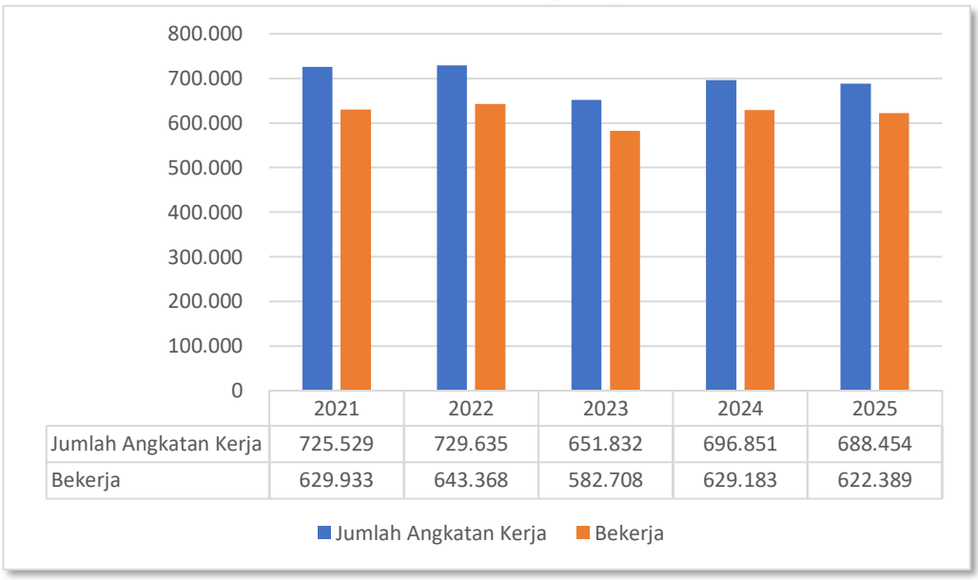
Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi Kota Makassar masih sangat dipengaruhi oleh faktor musiman dan dinamika harga pangan. Sebagai kota dengan tingkat konsumsi yang tinggi, Makassar memiliki sensitivitas harga yang cukup besar, sehingga penguatan peran TPID serta stabilisasi pasokan pangan menjadi penting dalam menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran yang terkendali.

2.1.4. Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja

Dinamika ketenagakerjaan di Kota Makassar selama periode lima tahun terakhir menunjukkan pergerakan yang sangat adaptif terhadap perkembangan ekonomi regional. Sebagai pusat pertumbuhan dan episentrum aktivitas ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, kapasitas pasar kerja di kota ini terus mengalami penyesuaian yang dipengaruhi oleh faktor mobilitas penduduk, perubahan regulasi, serta pemulihan sektor-sektor produktif pasca-pandemi. Fluktuasi serta tren perkembangan jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II.8.
Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Orang Bekerja di Kota Makassar Tahun 2021-2025 (jiwa)



	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Angkatan Kerja	725.529	729.635	651.832	696.851	688.454
Bekerja	629.933	643.368	582.708	629.183	622.389

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan indikator ketenagakerjaan di Kota Makassar dari tahun ke tahun memperlihatkan fluktuasi yang dinamis. Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 725.529 orang dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 629.933 orang, yang kemudian tumbuh positif pada tahun 2022 menjadi 729.635 orang angkatan kerja (643.368 orang bekerja) seiring kokohnya pemulihan ekonomi kota.

Meskipun pasar kerja sempat mengalami kontraksi signifikan pada tahun 2023 akibat penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk yang menekan angka angkatan kerja hingga ke posisi 651.832 orang kondisi tersebut segera menunjukkan resiliensi yang kuat pada tahun 2024 dengan melonjak kembali ke angka 696.851 orang angkatan kerja dan 629.183 orang bekerja.

Memasuki tahun 2025, pasar kerja kembali mengalami normalisasi dan koreksi tipis, di mana jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 688.454 orang (berkurang sekitar 8.397 orang dari tahun sebelumnya) dengan jumlah penduduk yang bekerja berada di angka 622.389 orang. Secara keseluruhan, tren periode 2021–2025 ini mencerminkan elastisitas dan kapasitas pasar kerja yang tetap terjaga dalam menopang aktivitas ekonomi makro di Kota Makassar.

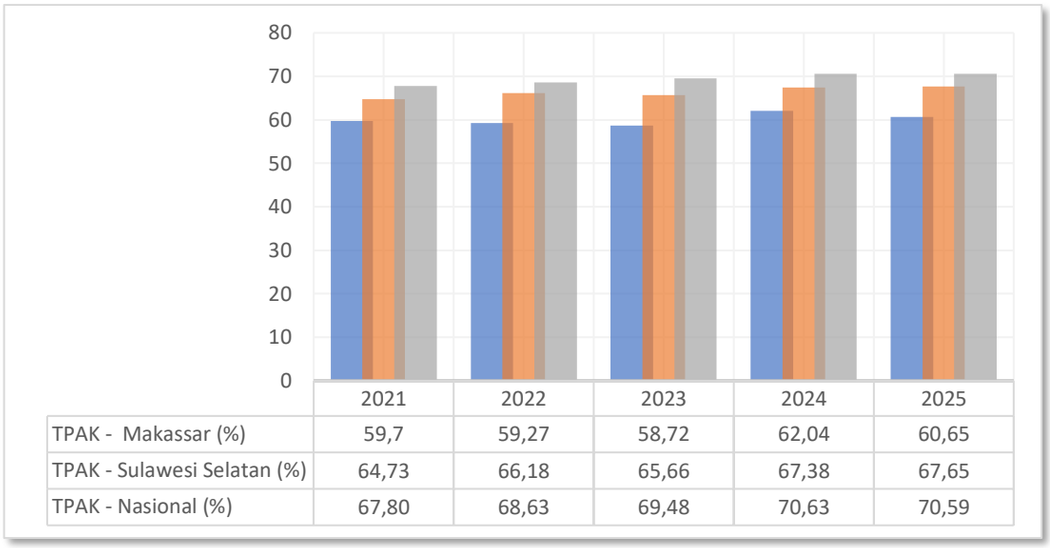
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Makassar menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2021–2025. Setelah mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2022 (59,27%) dan 2023 (58,72%), TPAK Makassar sempat melonjak signifikan pada tahun 2024 hingga mencapai 62,04%. Namun, memasuki tahun 2025, angka ini kembali mengalami koreksi dan turun ke level 60,65%.

Meskipun menunjukkan daya lentur yang dinamis, capaian TPAK Kota Makassar sepanjang lima tahun terakhir secara konsisten masih tertinggal cukup jauh jika dibandingkan dengan rata-rata TPAK Provinsi Sulawesi Selatan (67,65% pada 2025) maupun rata-rata Nasional (70,59% pada 2025). Ketertinggalan yang persisten

ini menandakan masih adanya hambatan struktural dalam mengoptimalisasi penyerapan tenaga kerja usia produktif di ibu kota provinsi ini. Beberapa faktor determinan utamanya meliputi terbatasnya ketersediaan lapangan kerja sektor formal, adanya *mismatch* (ketidaksesuaian) keterampilan antara lulusan dan kebutuhan pasar, serta belum optimalnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, sebagaimana dicatat dalam *Labour Force Situation in Indonesia* (BPS).

Grafik II.9.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Makassar
Tahun 2021-2025 (persen)



	2021	2022	2023	2024	2025
TPAK - Makassar (%)	59,7	59,27	58,72	62,04	60,65
TPAK - Sulawesi Selatan (%)	64,73	66,18	65,66	67,38	67,65
TPAK - Nasional (%)	67,80	68,63	69,48	70,63	70,59

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2026

Lonjakan TPAK Makassar yang sempat terjadi pada tahun 2024 mencerminkan dampak langsung dari pemulihan aktivitas ekonomi pasca-pandemi COVID-19, ekspansi UMKM lokal, serta penguatan berbagai program pelatihan kerja yang digencarkan melalui sinergi pemerintah daerah dan pusat. Berdasarkan data BPS, peningkatan tersebut banyak ditopang oleh sektor informal dan usaha mandiri yang menjadi penyumbang utama perluasan lapangan kerja. Namun, penurunan kembali pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa stimulus sektor informal tersebut belum sepenuhnya kokoh untuk menjaga stabilitas partisipasi kerja jangka panjang.

Kondisi fluktuatif ini mempertegas urgensi arah kebijakan ketenagakerjaan Kota Makassar yang lebih berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu berfokus pada strategi transformasi ke arah penciptaan kerja layak (*decent work*), peningkatan kualitas SDM melalui standardisasi pelatihan berbasis kebutuhan industri modern, serta pemberian insentif bagi industri padat karya yang memiliki daya serap tinggi. Dengan pendekatan struktural dan integratif ini, kesenjangan partisipasi tenaga kerja antara Kota Makassar, tingkat provinsi, dan level nasional dapat dikurangi secara terukur dan berkelanjutan.

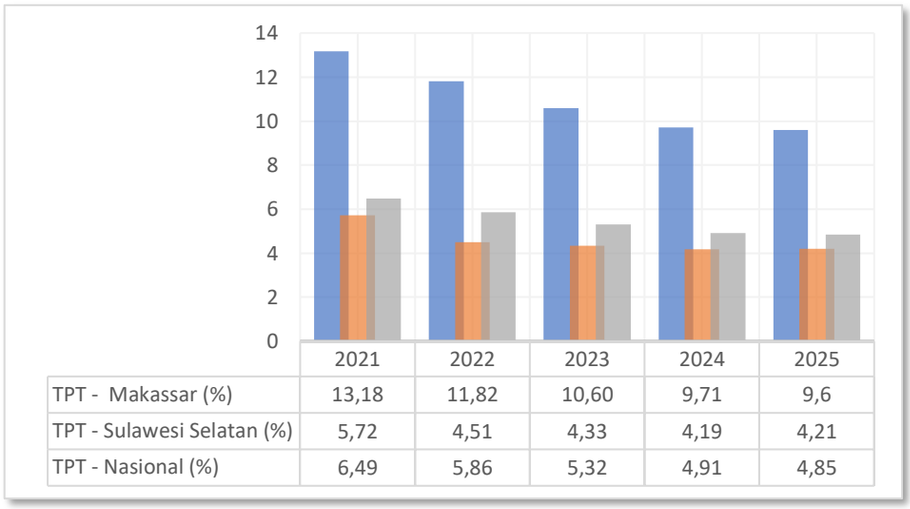
Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Makassar selama periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten, mencerminkan pemulihan bertahap pada pasar tenaga kerja domestik. Setelah melewati tekanan berat akibat dampak pandemi pada masa-masa sebelumnya, angka TPT Makassar pada tahun 2021 tercatat sebesar 13,18 persen. Seiring dengan akselerasi pemulihan ekonomi

nasional dan lokal, penyerapan tenaga kerja di kota ini terus membaik, yang ditunjukkan oleh penurunan TPT menjadi 11,82 persen pada tahun 2022, kemudian turun lagi ke angka 10,60 persen di tahun 2023.

Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan TPT sebesar 9,71 persen dan mencapai titik terendah pada tahun 2025 di angka 9,6 persen. Penurunan bertahap ini mengindikasikan adanya perbaikan struktural dalam ketenagakerjaan perkotaan, didorong oleh pulihnya sektor-sektor produktif utama serta meningkatnya aktivitas UMKM. Sebagai episentrum dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar tetap memiliki daya tarik tinggi bagi pencari kerja dan investor. Namun, hal ini sekaligus menghadirkan tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga momentum penurunan TPT agar lebih progresif, mengingat angka pengangguran di Kota Makassar masih berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Grafik II.10.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Makassar
Tahun 2021-2025 (persen)



	2021	2022	2023	2024	2025
TPT - Makassar (%)	13,18	11,82	10,60	9,71	9,6
TPT - Sulawesi Selatan (%)	5,72	4,51	4,33	4,19	4,21
TPT - Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2026

Meskipun TPT di Kota Makassar menunjukkan tren penurunan dari 13,18% (2021) menjadi 9,6% (2025), grafik memperlihatkan bahwa laju penurunan tersebut cenderung melambat dalam dua tahun terakhir (hanya berkurang 0,11% sepanjang periode 2024–2025). Perlambatan ini menjadi sinyal penting bahwa kapasitas penciptaan lapangan kerja formal belum cukup kuat untuk mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja baru secara ideal. Selain itu, terdapat jarak (gap) yang cukup lebar di mana TPT Kota Makassar secara konsisten berada jauh di atas rata-rata TPT Provinsi Sulawesi Selatan (4,21% pada 2025) dan TPT Nasional (4,85% pada 2025). Karakteristik Makassar sebagai kota metropolitan berbasis sektor jasa menyebabkan sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan dinamika pasar kerja.

Oleh karena itu, diperlukan strategi intervensi yang lebih terarah dan inklusif untuk memastikan penurunan TPT berjalan berkelanjutan. Guna menjawab tantangan tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menjalankan program prioritas strategis yang diimplementasikan melalui lima komponen utama berikut:

- ***Link and Match* Ketenagakerjaan:** Menyelaraskan output dunia pendidikan dengan kebutuhan riil pasar kerja melalui pemetaan sektor prioritas, serta

memfasilitasi 50 perusahaan dalam menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro demi identifikasi kompetensi yang lebih adaptif.

- **Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja:** Mengakselerasi peningkatan kompetensi bagi 1.190 pencari kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan, sertifikasi, serta pembinaan terhadap 80 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) agar standar pelatihan sesuai kebutuhan pasar.
- **Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja:** Menyediakan fasilitas perantara pasar kerja melalui penyelenggaraan *job fair*, optimalisasi Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK/Universitas, serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru berbasis kelompok swadaya lewat program kewirausahaan, padat karya infrastruktur, dan pelatihan inklusif bagi penyandang disabilitas.
- **Pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi:** Membangun sinergi lintas sektor dengan industri berskala besar (seperti kerja sama dengan PT IHIP Morowali), Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperluas jejaring penempatan kerja.
- **Peningkatan Hubungan Industrial yang Kondusif:** Menjaga iklim investasi dan produktivitas usaha melalui pembinaan serikat pekerja, penguatan Forum Tripartit, dialog ketenagakerjaan, serta pengawasan jaminan sosial dan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) yang berkeadilan guna menjamin stabilitas perekonomian kota.

2.1.5. Kemiskinan

Garis kemiskinan di Kota Makassar berada di angka Rp 610.536 per kapita per bulan. Angka ini merupakan standar pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan dan non-makanan agar seseorang dapat hidup layak, di mana penduduk dengan pengeluaran di bawah batas tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rincian indikator kemiskinan terbaru di Kota Makassar meliputi: Garis Kemiskinan (Per kapita/Bulan): Rp610.536 Persentase Penduduk Miskin: 4,43% dari total populasi Jumlah Penduduk Miskin

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Kota Makassar pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,49 dari 95,42 turun menjadi 94,93 % pada Tahun 2023 dan tahun 2024 naik menjadi 95,03% artinya persentase penduduk miskin Kota Makassar mengalam penurunan 0,1%. Sedangkan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan lebih rendah dibandingkan Kota Makassar sebesar 92,23% atau selisih 2,8%. Tahun 2025 persentase penduduk diatas garis kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 95,57, demikian pula Sulawesi Selatan dan Nasional mengalami penambahan 92,57 dan 91,75.

Tabel II.4.
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan
Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nasional Tahun 2021 - 2025

Uraian	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
Kota Makassar	95,46	95,42	94,93	95,03	95,57
Prov.Sulawesi Selatan	91,04	91,37	91,30	92,23	92,57
Nasional	90,45	90,64	90,97	91,43	91,75

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026

Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Tabel II.5.
Persentase penduduk miskin Kota Makassar
dengan daerah setara dikawasan
Tahun 2021 - 2025

Uraian	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
Kota Makassar	4,82	4,58	5,07	4,97	4,43
Gowa	7,54	7,36	7,42	6,85	6,64
Takalar	8,25	8,25	8,29	7,75	7,27
Maros	9,57	9,43	9,65	9,32	8,90
Pangkep	14,28	13,92	13,40	12,41	11,60

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026

Persentase penduduk miskin Kota Makassar bila dibandingkan dengan 4 kabupaten dikawasan yang sama, Kota Makassar merupakan paling rendah selama 5 tahun berturut-turut namun fluktuatif dan tertinggi tahun 2023 sebesar 5,07%. Untuk tahun 2024 turun menjadi 4,97%, sementara 4 kabupaten setara dikawasan juga mengalami penurunan di tahun 2024 yaitu Kabupaten Gowa 6,85%, Kabupaten Takalar 7,75%, Kabupaten Maros 9,32% dan Kabupaten Pangkep 12,41%.

Tabel II.6.
Persentase penduduk miskin Kota Makassar
Dengan Daerah Setara Tahun 2021 - 2025

Uraian	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
Kota Makassar	4,82	4,58	5,07	4,97	4,43
Kota Bandung	4,37	4,25	3,96	3,87	3,78
Kota Palembang	11,34	10,48	10,22	10,90	9,04
Kota Surabaya	5,23	4,72	4,65	3,96	3,56

Sumber: BPS RI, Tahun 2026

Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar mengalami penurunan 0,1 dengan jumlah penduduk miskin 79,53 ribu bandingkan 3 (tiga) Kota Lainnya hanya Kota Palembang yang mengalami kenaikan dari 10,22% menjadi 10,90% sementara dua Kota lainnya mengalami penurunan di tahun 2024. Kota Bandung pada 2023 sebesar 3,96% menjadi 3,87% atau turun 0,09% di Tahun 2024 Kota Palembang dari angka 10,22% di Tahun 2023 naik menjadi 10,99% di Tahun 2024, Untuk Kota Surabaya turun 2,49% sehingga di Tahun 2024 menjadi 3,96%.

Tabel II.7.
Garis kemiskinan di Kota Makassar, SulawesiSelatan dan Nasional Tahun 2021 - 2025

Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Kota Makassar	475.444	511.081	570.286	592.753	610.536
Prov.Sulawesi Selatan	384.455	422.952	436 025	459.226	514.958
Nasional	486.168	505.469	550.458	595.242	641.000

Sumber: BPS RI, Tahun 2026

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan non makanan yang harus dipenuhi. Untuk garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebesar Rp. 459.226 per kapita per bulan, lebih rendah dibandingakan garis kemiskinan Kota Makassar dengan nilai minimum pengeluaran Rp. 592.753 per kapita per bulan. Dan untuk nasional garis kemiskinan sebesar Rp. 550.458,-. Lebih tinggi dari Kota Makassar.

Tabel II.8.
Garis kemiskinan di Kota Makassar dan Kota Setaranya di Luar Kawasan Tahun 2021 - 2025

Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Kota Makassar	475.444	511.081	570.286	592.753	610.536
Kota Bandung	515.396	545.675	591 124	614.707	644.417
Kota Palembang	567.518	597.136	643.356	660.932	*699.920*
Kota Surabaya	611.466	460.909	718.370	742.678	**775.597**

Sumber: BPS RI, Tahun 2026

Untuk garis kemiskinan Kota Makassar Tahun 2024 berada pada Rp 592.753 perkapita perbulan mengalami kenaikan sebesar Rp 22,467 dari tahun 2023. Bila dibandingkan dengan tiga kota setara di luar kawasan Kota Makassar berada di urutan terendah setelah Kota Bandung sebesar Rp 614.707. Kota Surabaya adalah yang tertinggi yaitu sebesar Rp 742.678.

Tabel II.9.
Indeks Kedalaman kemiskinan Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 - 2025

Uraian	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
Kota Makassar	0.76	0.80	0,62	0,81	0,52
Prov.Sulawesi Selatan	1,40	1,50	1,57	1,39	1,40
Nasional	1,67	1,56	1,53	1,46	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Untuk Indeks kedalam kemiskinan Kota Makassar pada tahun 2023 sebesar 0,62 turun menjadi 0,81%, Indeks kedalaman kemiskinan Kota Makassar 5 tahun terakhir jauh lebih kecil dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Tahun 2024 Indeks Kedalam kemiskinan Kota Makassar berada pada 0,81, Sulawesi Selatan 1,39 dan Nasional berada pada 1,46. Bila dibandingkan dengan kota setara kawasan, maka Kota Makassar merupakan terkecil kedua setelah Gowa (0,67). Dan tertinggi adalah Pangkep sebesar 1,78.

Tabel II.10.
Indeks Kedalaman kemiskinan
Kota Makassar dengan daerah setaranya Tahun 2021 - 2025

Uraian	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
Kota Makassar	0,76	0,80	0,62	0,81	0,52
Gowa	1,38	1,13	0,72	0,67	1,09
Takalar	1,03	1,88	0,81	1,22	0,82
Maros	1,61	1,77	1,89	1,06	1,54
Pangkep	2,78	2,09	2,15	1,78	1,08

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026

Tabel II.11.
Indeks Kedalaman kemiskinan
Kota Makassar dengan daerah setaranya di luar Kawasan Tahun 2021 - 2025

Uraian	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
Kota Makassar	0,76	0,80	0,62	0,81	0,52
Kota Bandung	0,78	0,78	0,57	0,61	0,59
Kota Palembang	1,86	2,25	2,06	2,06	1,40
Kota Surabaya	0,75	0,69	0,71	0,65	0,41

Sumber: BPS RI, Tahun 2026

Indeks kedalaman kemiskinan Kota Makassar dan 3 Kota besar lainnya Tahun 2024 merupakan urutan ke 2 terbesar. Terkecil adalah Kota Bandung dari 0,57 pada Tahun 2023 menjadi 0,61 tahun 2024. Kota Palembang indeks kedalam kemiskinan turun dari 2,25 Tahun 2022 menjadi 2,06 Tahun 2023 atau turun sebesar 0.19%, bertahan di 2,06 Tahun 2024. Sementara Kota Surabaya Tahun 2023 diangka 0,71 turun menjadi 0,65 % dan Kota Makassar dari 0,62 tahun 2023 menjadi 0,81 Tahun 2024.

2.1.6. Gini Rasio

Selama periode 2021–2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kota Makassar menunjukkan tren membaik. Gini Rasio menurun dari 0,400 pada tahun 2021 menjadi 0,372 pada tahun 2024. Namun Tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 0,391, nilai indeks gini Kota Makassar juga lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi mulai terdistribusi lebih merata kepada masyarakat. Meskipun demikian, ketimpangan antar kelompok pendapatan masih menjadi tantangan yang memerlukan penguatan kebijakan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, serta peningkatan efektivitas program perlindungan sosial.

Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jika peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio, Indeks Williamson, dan Kriteria Bank Dunia. Koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada gini ratio menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai gini ratio, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk.

Tabel II.12.
Perbandingan Indeks Gini Tahun 2021 - 2025
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Makassar	0,400	0,395	0,387	0,372	0,791
Prov.Sulawesi Selatan	0,377	0,365	0,377	0,360	0,363
Nasional	0,381	0,381	0,388	0,381	0,375

Sumber: BPS RI, Tahun 2026

Tabel II.13.
Capaian Gini Ratio Kota Makassar dengan Wilayah Setaranya
Tahun 2021 s.d 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Makassar	0,400	0,395	0,387	0,372	0,391
Kota Bandung	0,427	0,370	0,370	0,445	0,420
Kota Surabaya	0,350	0,371	0,423	0,381	0,369

Sumber: BPS RI, Tahun 2026

Berdasarkan data capaian gini rasio Kota Makassar dengan kota setaranya Tahun 2021 sebesar 0,400 untuk Kota Bandung sebesar 0,427 Kota Bandung dan lebih dari Kota Surabaya 0,350. Demikian pula pada tahun 2023 tingkat ketimbangan Kota Makassar masih lebih rendah dari Kota Surabaya dan lebih tinggi dari Kota bandung. Tahun 2025 Kota Makassar lebih rendah dari kota Bandung dan lebih tinggi dari Kota Surabaya.

2.1.7. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum untuk mengukur capaian kesejahteraan penduduk dapat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia, dimana komponen yang digunakan sangat berbasis dengan komponen kualitas hidup misalnya Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi. Pendekatan yang digunakan oleh IPM melalui 3 dimensi dasar seperti: 1). Umur yang Panjang dan sehat; 2) Pengetahuan dan 3) kehidupan yang layak. Dimensi Kesehatan di ukur menggunakan Usia Harapan Hidup (UHH), Dimensi Pendidikan digunakan menggunakan indikator Harapan Lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama Sekolah (RLS) Sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak

digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel II.14.
Komponen Pembentuk IPM Kota Makassar Tahun 2021 s.d 2025

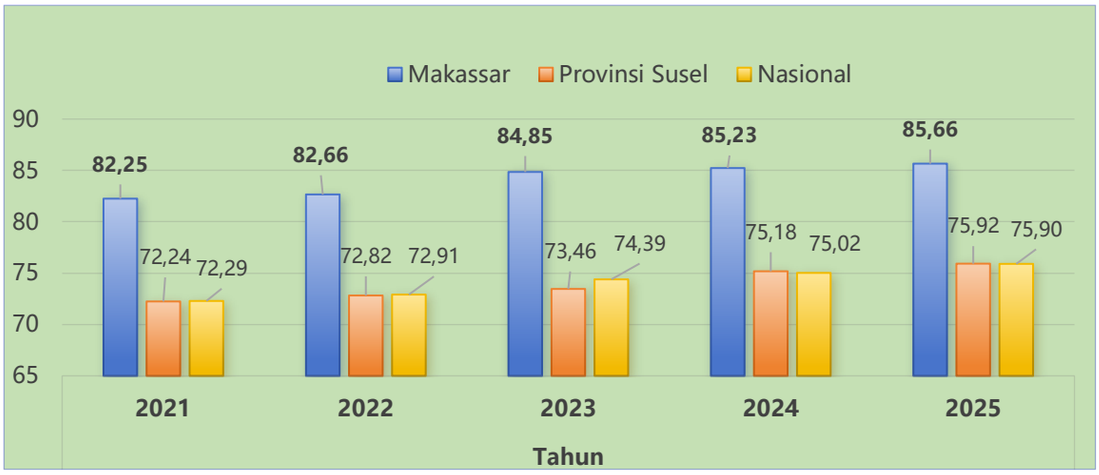
Indiaktor satuan	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
PENDIDIKAN						
Harapan lama sekolah	Tahun	15,58	15,59	15,61	15,62	15,63
Rata-rata Lama sekolah	Tahun	11,43	11,55	11,56	11,57	11,59
KESEHATAN						
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,13	72,40	75.15	75,33	75,60
STANDAR HIDUP LAYAK						
Pengeluaran per kapita	Rp/Orang	17.0978	17.406	17.889	18,386	18.878
Indek Pembangunan Manusia		**82,25**	**82,66**	**84,85**	**85,23**	**85,66**

Sumber : BPS Kota Makassar, Tahun 2026

IPM Makassar secara konsisten mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dimana tahun 2021 mencapai 82,25 dan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 85,66 atau mengalami pertumbuhan 3,41 dalam lima tahun. Pertumbuhan IPM Kota Makassar juga lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebesar 72,24 meningkat menjadi 75,18 pada tahun 2024, artinya pertumbuhan IPM provinsi Sulawesi Selatan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,25 dalam lima tahun. Demikian pula secara nasional IPM pada tahun 2020 berada pada angka 71,94 menjadi 75,02 di Tahun 2024 atau meningkat hanya 3,08 dalam lima tahun. Program program di sektor Pendidikan, kesehatan maupun upaya peningkatan pendapatan masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan IPM suatu daerah.

Analisis komparasi dengan tingkat nasional dan Provinsi Sulawesi selatan, menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kota Makassar mengalami peningkatan dengan nilai yang lebih tinggi dari IPM tingkat nasional dan Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Makassar relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Sebagai kota metropolitan, maka sudah selayaknya IPM Kota Makassar berada di atas level provinsi dan nasional. Berikut Gambar grafik Indeks Pembangunan Manusia 2020-2024 dan gambar grafik dengan IPM Wilayah kabupaten Kota Se wilayah Sulawesi Selatan yang menunjukkan bahwa posisi Kota Makassar masih berada pada posisi yang pertama jika dibanding dengan 23 Kab/Kota lainnya. Perbandingan Indek Pembangunan Manusia Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2021-2025, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II.11.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Makassar Prov.SulSel dan Nasional Tahun 2021 s.d 2025

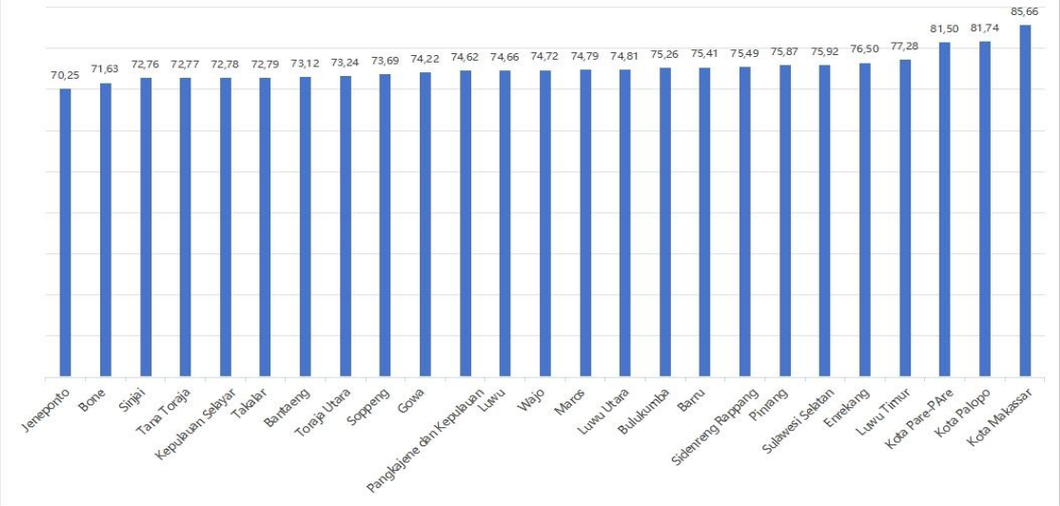


Sumber: BPS Kota Makassar, Tahun 2026

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rat-rata geometrik dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan indeks paritas daya beli (PPP). IPM Makassar secara konsisten mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir, dimana tahun 2023 telah mencapai 84,85. IPM Makassar lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan maupun secara nasional yang masih pada angka 73,46. Program-program disektor Pendidikan, kesehatan maupun upaya peningkatan pendapatan masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan IPM suatu daerah.

Analisis komparasi dengan tingkat nasional dan Provinsi Sulawesi selatan, menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kota Makassar mengalami peningkatan dengan nilai yang lebih tinggi dari IPM tingkat nasional dan Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Makassar relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Sebagai kota metropolitan, maka sudah selayaknya IPM Kota Makassar berada di atas level provinsi dan nasional. IPM Kota Makassar juga lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut grafik Indeks Pembangunan Manusia 2021 - 2025 Wilayah kabupaten Kota Se wilayah Sulawesi Selatan yang menunjukkan bahwa posisi Kota Makassar masih berada pada posisi yang pertama jika dibanding dengan 23 Kab/Kota lainnya.

Grafik II.12.
Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025



Sumber : Provinsi Sulsel dalam angka, Tahun 2026

Pencapaian IPM Makassar yang berada pada kategori tinggi bahkan tertinggi di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar, telah berada pada jalur yang tepat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar menunjukkan dinamika yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Memasuki tahun 2021, IPM mulai menunjukkan tren positif dengan meningkat menjadi 82,25 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 hingga mencapai 82,66. Capaian tersebut semakin menguat pada tahun 2023, di mana IPM Kota Makassar berhasil menembus angka 84,85, Meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 85,23, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun 2025, IPM Kota Makassar melonjak secara signifikan hingga mencapai 85,66 Dengan capaian 85,66 persen tersebut, Kota Makassar tidak hanya berhasil mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sulawesi Selatan, tetapi juga menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan menempati peringkat ketujuh IPM tertinggi se-Indonesia.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar secara berkelanjutan melalui perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang harus diupayakan untuk dapat tetap mempertahankan tingkat daya saing yang semakin dinamis. UNDP adalah jaringan pembangunan global PBB yang bekerja untuk membantu negara-negara mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). UNDP bekerja di berbagai bidang, termasuk pemberantasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. serta IPM 60-69 kategori sedang. Berdasarkan standar ini maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar berada pada kategori sangat tinggi sedangkan provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masih berada pada kategori tinggi.

Tahun 2025 menjadi momentum penting, di mana kualitas hidup masyarakat Makassar kian membaik, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta perbaikan angka harapan hidup warga berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, IPM Kota Makassar resmi berstatus

sangat tinggi, bahkan mencatatkan diri sebagai yang tertinggi dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Dengan capaian angka 85,66 persen, Makassar tidak hanya memimpin di tingkat provinsi, tetapi juga berhasil menembus peringkat ketujuh nasional dalam daftar IPM se-Indonesia.

2.1.8. Nilai SAKIP Kota Makassar

SAKIP merupakan rangkaian sistematik yang digunakan oleh instansi pemerintah dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan untuk mengelola, pengukuran, pengumpulan data, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar. Dengan demikian, nilai SAKIP dapat menjadi indikator untuk melihat seberapa baik suatu pemerintah daerah atau instansi pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerjanya. Adapun capaian SAKIP Kota Makassar dari tahun 2021-2025 selengkapnya terlihat pada table berikut:

Tabel II.15.
Nilai SAKIP Kota Makassar 2021-2025

Indikator	Satuan	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
Nilai SAKIP Kota Makassar	Huruf/Angka	B (69.28)	B (69.61)	B (69.64)	B (69.69)	B (68.94)

Sumber: KemenPANRB, tahun 2025

Berdasarkan tabel Nilai SAKIP Kota Makassar tahun 2021–2025, capaian kinerja pemerintah Kota Makassar menunjukkan relatif stabil dengan predikat tetap berada pada kategori **B** setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Nilai SAKIP Kota Makassar tercatat sebesar **69,28** dengan predikat B. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi **69,61**, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pada tahun 2023, nilai tersebut kembali meningkat meskipun tidak terlalu signifikan, yakni menjadi **69,64**. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian sebesar **69,69** yang merupakan nilai tertinggi selama periode lima tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pemerintahan. Namun demikian, pada tahun 2025 Nilai SAKIP Kota Makassar mengalami penurunan menjadi **68,94,** meskipun masih berada dalam kategori predikat **B.** Penurunan ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan program dan kinerja perangkat daerah agar kualitas akuntabilitas kinerja dapat kembali meningkat pada periode berikutnya. Secara umum, capaian SAKIP Kota Makassar selama tahun 2021–2025 menunjukkan kondisi yang cukup baik dan konsisten dalam mempertahankan predikat B. Adapun komponen Penilaian antara lain, tersebut diatas menunjukkan Tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran denga capaian kinerja Pemerintah Kota Makassar.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja

2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Makassar merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 terdiri dari 12 indikator tujuan dan 39 indikator sasaran. Untuk melihat realisasi kinerja tahun 2025 sampai pada triwulan II (dua) tahun berjalan tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.16.
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Kota Makassar Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi triwulan II Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	(%)	5,34	6,43	Belum Rilis
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	(%)	**19,50**	19,46	Belum Rilis
3	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	(%)	**20,35**	20,30	Belum Rilis
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	(%)	9,60	9,53	Belum Rilis
5	PDRB Per Kapita	(Juta Rupiah Per Kapita/ Tahun)	176.28	186.75	Belum Rilis
6	Indeks Daya Saing Daerah	(Skor)	4,17	4,23	Belum Rilis
7	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	(%)	0,67	0,61	0,55 (TW. I)
8	Tingkat Inflasi	(%)	2,69	1,77	3,00 (TW. I)
9	Indeks Ketahanan Pangan	(Skor)	76,42	88,05	Belum Rilis
10	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	(%)	**26,57**	8,85	Belum Rilis
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	(Nilai)	85,66	85,86	Belum Rilis
12	Indeks Pendidikan	(Nilai)	**82,05***	82,10	Belum Rilis
13	Usia Harapan Hidup	(Tahun)	**75,60**	75,66	Belum Rilis
14	Pengeluaran Per Kapita	(Juta Rupiah Per Kapita/ Tahun)	**22,105**	20.543	Belum Rilis
15	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	80,51	79,46	Belum Rilis
16	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	Nilai	93,40	84,45	Belum Rilis
17	Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan	Nilai	**26,89**	27,35	Belum Rilis
18	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	%	10	25	65%
19	Indeks Inovasi Daerah	Skor	61,75	79,23	Belum Rilis
20	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	4,50	4,56	Belum Rilis
21	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah	%	**6,93**	4	Belum Rilis
22	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Terhadap PDRB	%	2,20	2,28	Belum Rilis
23	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	(Orang)	6.268.077	5.634.009	Belum Rilis

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi triwulan II Tahun 2026
24	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	(Hari)	2,47	1,65	Belum Rilis
25	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Tak benda	(%)	13,33	13,33	Belum Rilis
26	Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan	(%)	**19,44**	16,66	Belum Rilis
27	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif)	(Industri)	5,081	4.831	Belum Rilis
28	Persentase Industri Ekonomi Kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital	(%)	10,73	15,43	Belum Rilis
29	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80,52	81,31	Belum Rilis
30	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	(Nilai)	68,94	70,50	Belum Rilis
31	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	(Nilai)	NA	4,03	Belum Rilis
32	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	(Nilai)	84,20	87,98	Belum Rilis
33	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(Nilai)	72,99	77	Belum Rilis
34	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani	(%)	66,30	56,02	Belum Rilis
35	Indeks Kota Toleran	Skor	4,834	4,862	Belum Rilis
36	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	**64,90**	63,15	Belum Rilis
37	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,275	0,177	Belum Rilis
38	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	**67,93***	70,60	Belum Rilis
39	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	67,17	61,00	Belum Rilis
40	Indeks Pembangunan Keolahragaan	Skor	0,542	0,518	Belum Rilis
41	Tingkat Kemiskinan	%	4,43	3,46	Belum Rilis
42	Gini Rasio	Nilai	0,391	0,359	Belum Rilis
43	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	**0,043***	42,51	Belum Rilis
44	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	66,28	66,38	Belum Rilis
45	Indeks Kualitas Air	Nilai	74,17	74,15	Belum Rilis
46	Indeks Kualitas Udara	Nilai	73,63	75,52	Belum Rilis
47	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	39,17	36,13	Belum Rilis
48	Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	1,53	10	Belum Rilis
49	Indeks Risiko Bencana	Skor	91,44	107	Belum Rilis
50	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,48	0,48	Belum Rilis
51	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	**NA**	34,98	Belum Rilis

Sumber: RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 (data diolah), tahun 2026

Capaian indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Makassar pada triwulan II (dua) rata-rata belum dapat disajikan disebabkan perhitungan realisasi kinerja indikator tersebut dilakukan pada akhir tahun anggaran 2026, adapun data yang terisi masih bersifat sementara

2.2.2. Capaian Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Sub bab Capaian Indikator Utama Pembangunan merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan pembangunan berdasarkan indikator makro dan indikator strategis yang merepresentasikan kondisi kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, kualitas pelayanan publik, serta keberlanjutan pembangunan.

Indikator Utama Pembangunan (IUP) ini disusun dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029. Dimana Penyusunan IUP telah memperhatikan keselarasan dengan kebijakan Pembangunan nasional dan provinsi dengan pengelompokan ke dalam 4 (empat) aspek Pembangunan yaitu Geografi, Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah, dan Pelayanan Umum.

Capaian Indikator Utama Pembangunan kota Makassar tahun 2025 sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel II.17.
Capaian Kinerja Indokator Utama Pembangunan (IUP)
Kota Makassar Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1.1	**Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan**				
1	Konsumsi Listrik Per-kapita	KwH	1627	3035	>
2	Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	3,96	6,84	<
3	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	88,00	76,42	<
4	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	89,74	91,70	>
5	Kapasitas Air Baku	M^3/detik	4,04	3,57	<
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	66,38	62,57	<
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,64	0,38	>
8	Rasio Penduduk (Rasio Jenis Kelamin)	%	99,09	98,58	>
9	Kepadatan Penduduk	Org/Km2	8.385	8.448	>
1.2	**Lingkungan Hidup Berkualitas**				
10	Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia	%	13,66	8,90	<
11	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1559	1,56	=
12	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	48,74	33,25	<
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,17	66,28	>
14	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,67	7,77	<
15	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	6	1,53	<
16	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	6,00	4,63	<

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
17	Indeks Resiko Bencana	Indeks	110	91,44	>
18	Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	%	1,17	Belum rilis	
19	Penurunan Intesitas Emisi GRK	%	32,46	Belum rilis	
20	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Kumulatif)	%	0,23	Belum rilis	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
2.1	**Kesejahteraan Ekonomi**				
21	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,34	<
22	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	Juta Rupiah	175,46	176,28	>
23	PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	Triliun	265,79	269,36	>
24	Pengeluaran Perkapita	Juta Rupiah	19,301	22.105	>
2.2	**Kesehatan Untuk Semua**				
25	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,51	75,30	<
26	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	69,09	50,92	>
27	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	100	100	=
28	Prevalensi Stunting pada Balita	%	18,8	3,65	>
29	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis	%	82	86,66	>
30	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	%	82,5	80,67	<
31	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100	99,45	<
2.3	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**				
32	Literasi	%	SD = 65,36 SMP = 72,76	SD = 67,24 SMP = 80,95	**SD = >** **SMP = >**
33	Numerasi	%	SD = 57,28 SMP = 64,35	SD = 57,33 SMP = 53,77	**SD = >** **SMP = <**
34	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 Tahun	Tahun	11,58	11,56	<
35	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,63	15,63	=
36	Proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	22,91	32,14	>
37	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	%	29,63	26,76	<
38	Angka Putus Sekolah	%	1,29	0,95	>
2.4	**Perlindungan Sosial yang Adaptif**				
39	Tingkat Kemiskinan	%	3,62	4,43	<
40	Indeks Gini	Nilai	0,366	0,391	<
41	Persentase penyandang Disabilitas bekerja di sektor formal	%	41,81	0,043	<
42	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	61,81	53,34	<
2.5	**Beragama Maslahat dan Berkebudayaan maju**				
43	Indeks Kota Toleran	Skor	4,688	4,834	>
44	Persentase Benda Bangunan Struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	14,51	21,78	>
45	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapat dukungan fasilitasi	%	0,50	0,06	<

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
2.6	**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**				
46	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	63,14	64,90	>
47	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	69,44	Belum Rilis	
48	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	95,18	95,97	>
49	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	79,14	71,04	<
50	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,179	0.275	<
51	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	59	67,17	>
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
3.1	**Daya Saing Sumber Daya Manusia**				
52	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	85,46	85,46	=
53	Angka Ketergantungan	%	42,49	33,03	<
3.2	**Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi**				
54	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	19,29	19,24	<
55	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,23	2,20	<
56	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik	Orang	5.531.025	6.189.997	>
57	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	95.632	78.080	<
58	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif	Industri	4.515	5.081	>
59	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar	Industri	24.915	8.301	<
60	Persentase Koperasi Sehat Kota Makassar	%	27,24	16,18	<
61	Return on Assets (ROA) BUMD	Nilai	1,60	2,11	>
62	Produktivitas Padi	Ton/Ha	6,77	5,02	<
63	Produktivitas Perikanan Tangkap	Ton	1,25	1,52	>
64	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,62	9,60	>
65	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	62,27	60,65	<
66	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	47,23	44,26	<
67	Indeks Kapabiltas Inovasi	Skor	4,51	4,50	<
3.3	**Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru**				
68	Indeks Ekonomi Hijau	Nilai	51,4	28,80	<
69	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Nilai	101,4	Belum rilis	
3.4	**Transformasi Digital**				
70	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	49,25	49,25	=
3.5	**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**				
71	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	%	90	15,50	<
72	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	45,11	44,23	<
73	Net Ekspor Barang dan Jasa	US $	47.488.263,30	-7.983,69	
3.6	**Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**				
74	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap PDB Nasional	%	1,12	1,10	<
75	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan	%	35,04	34,68	<
76	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan	%	81,63	75,29	<

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
77	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Nilai	78,69	80,51	>
3.7	**Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**				
78	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,59	0,67	>
79	Tingkat Inflasi Gabungan	%	1,52	2,69	>
80	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	8,75	26,57	>
81	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	B	B	=
82	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	6,02	6,53	>
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
4.1	**Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif**				
83	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,02	97,24	<
84	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,02	4,01	<
85	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	79,97	80,52	>
86	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,28	3,44	<
87	Indeks Survey Penilaian Integritas	Indeks	75,55	67,93	<
88	Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK	Nilai	87,48	84,20	<
89	Indeks Maturitas SPIP	Indeks	3,42	3,011	<
4.2	**Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh Serta Demokrasi Substansial**				
90	Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	=
91	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	100	=
92	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani	%	55,03	66,30	>
93	Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD	%	16,00	16	=
94	Proporsi Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD (Perda)	Perda	9	5	<
95	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	%	31,6	11,11	<
4.3	**Daya Saing Daerah Tinggi**				
96	Jumlah Kerja Sama Dengan Pemerintah Daerah Lainnya (Sister City) (PKS)	PKS	1	0	<
97	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,17	4,17	=
98	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	77,59	61,75	<

Sumber: RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029, data diolah tahun 2026

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kota Makassar Tahun 2025, secara umum capaian pembangunan daerah menunjukkan perkembangan yang beragam pada aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum. Keragaman capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Kota Makassar telah menghasilkan sejumlah kemajuan pada indikator ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan kapasitas fiskal daerah, namun masih terdapat beberapa indikator strategis yang memerlukan penguatan intervensi kebijakan, terutama pada aspek ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan sosial, produktivitas ekonomi, kualitas pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan.

Pada aspek **geografi dan demografi**, capaian menunjukkan adanya kemajuan pada beberapa indikator ketahanan dasar, antara lain konsumsi listrik per kapita yang mencapai 3.035 kWh atau lebih tinggi dibandingkan target 1.627 kWh, Skor Pola Pangan Harapan sebesar 91,70 yang melampaui target 89,74, serta laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,38 persen yang berada di bawah target 0,64 persen. Namun demikian, kondisi ketahanan pangan masih menjadi perhatian karena prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mencapai 6,84 persen dibandingkan target 3,96 persen dan Indeks Ketahanan Pangan baru mencapai 76,42 dari target 88,00. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi dan ketersediaan pangan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keterjangkauan dan kecukupan konsumsi pangan masyarakat.

Pada dimensi **air, sanitasi, persampahan, dan lingkungan hidup**, masih terdapat kesenjangan yang cukup nyata. Kapasitas air baku baru mencapai 3,57 m^3/detik dari target 4,04 m^3/detik, sedangkan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan mencapai 62,57 persen dari target 66,38 persen. Di sisi lain, indikator pengelolaan sampah menunjukkan capaian yang relatif rendah, yaitu timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah hanya sebesar 1,53 persen dari target 6 persen dan proporsi rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah sebesar 4,63 persen dari target 6 persen. Akses sanitasi aman juga baru mencapai 7,77 persen dari target 8,67 persen. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah sedikit melampaui target, kondisi tersebut perlu dibaca secara komprehensif karena masih terdapat tekanan pada sistem persampahan dan sanitasi perkotaan.

Capaian **kesejahteraan ekonomi** memperlihatkan fondasi ekonomi daerah yang relatif positif. PDRB per kapita mencapai Rp176,28 juta, melampaui target Rp175,46 juta, PDRB berdasarkan lapangan usaha mencapai Rp269,36 triliun dari target Rp265,79 triliun, dan pengeluaran per kapita juga berada di atas target. Namun, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 persen masih berada di bawah target 5,73 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh akselerasi pertumbuhan sesuai dengan tingkat yang ditargetkan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga pada penguatan sektor-sektor produktif yang mampu menghasilkan pertumbuhan lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada aspek **kesehatan**, terdapat sejumlah capaian yang menunjukkan perbaikan signifikan. Angka kematian ibu tercatat 50,92 per 100.000 kelahiran hidup, lebih baik dibandingkan target 69,09, sementara persalinan di fasilitas kesehatan telah mencapai 100 persen. Prevalensi stunting pada balita juga tercatat 3,65 persen dibandingkan target 18,8 persen, dan cakupan penemuan serta pengobatan kasus tuberkulosis mencapai 86,66 persen dari target 82 persen. Meskipun demikian, usia harapan hidup masih sedikit di bawah target, yaitu 75,30 tahun dibandingkan 75,51 tahun. Selain itu, angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis sebesar 80,67 persen dan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 99,45 persen masih berada di bawah target. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan kesehatan tidak hanya terletak pada perluasan akses, tetapi juga pada peningkatan kualitas, keberlanjutan layanan, dan efektivitas intervensi kesehatan masyarakat.

Dalam bidang **pendidikan**, capaian menunjukkan perkembangan positif terutama pada literasi, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi, serta angka putus sekolah. Literasi tingkat SD dan SMP masing-masing mencapai 67,24 persen dan 80,95 persen, sementara proporsi penduduk dengan pendidikan tinggi mencapai 32,14 persen dari target 22,91 persen. Akan tetapi,

rata-rata lama sekolah masih sebesar 11,56 tahun dibandingkan target 11,58 tahun, dan numerasi tingkat SMP masih berada di bawah target, yaitu 53,77 persen dibandingkan 64,35 persen. Selain itu, persentase penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi juga masih berada di bawah target. Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperkuat keterhubungan antara peningkatan kualitas pendidikan, kompetensi numerasi, pendidikan tinggi, dan relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada aspek **perlindungan sosial dan inklusivitas**, capaian masih menunjukkan tantangan yang cukup besar. Tingkat kemiskinan meningkat menjadi 4,43 persen dibandingkan target 3,62 persen, sedangkan Indeks Gini mencapai 0,391 dari target 0,366. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baru mencapai 53,34 persen dari target 61,81 persen, sementara indikator penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal juga masih sangat rendah dibandingkan target. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan agregat belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan perlindungan sosial adaptif, perluasan kesempatan kerja inklusif, peningkatan keterampilan kelompok rentan, dan integrasi program pengentasan kemiskinan menjadi penting dalam periode pembangunan berikutnya.

Pada dimensi **keluarga, gender, pemuda, toleransi, dan kebudayaan**, terdapat capaian yang relatif positif. Indeks Kota Toleran mencapai 4,834 dari target 4,688, persentase penetapan benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya mencapai 21,78 persen dari target 14,51 persen, Indeks Pembangunan Keluarga mencapai 64,90 dari target 63,14, serta Indeks Pembangunan Pemuda mencapai 67,17 dari target 59. Demikian pula Indeks Pembangunan Gender telah mencapai 95,97. Namun, Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender masih memerlukan perhatian karena belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan capaian pembangunan perempuan secara umum, tetapi juga memastikan peningkatan partisipasi, akses, kontrol, dan manfaat pembangunan yang lebih setara.

Pada aspek **daya saing sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi**, Indeks Pembangunan Manusia berada pada posisi sesuai target, yaitu 85,46. Namun, struktur produktivitas ekonomi menunjukkan sejumlah tantangan. Rasio PDRB industri pengolahan, kontribusi sektor akomodasi dan makan minum, produktivitas padi, jumlah industri kecil dan menengah, serta persentase koperasi sehat masih berada di bawah target. Sebaliknya, jumlah wisatawan domestik, industri ekonomi kreatif, ROA BUMD, dan produktivitas perikanan tangkap menunjukkan capaian yang lebih baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Makassar memiliki modal ekonomi kreatif, pariwisata, dan sektor jasa yang potensial, tetapi masih membutuhkan penguatan struktur industri, produktivitas UMKM/IKM, koperasi, serta keterkaitan antarsektor agar pertumbuhan ekonomi lebih kuat dan memiliki daya ungkit terhadap penciptaan lapangan kerja.

Dari perspektif **ketenagakerjaan**, tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,60 persen dibandingkan target 9,62 persen, yang secara nominal menunjukkan capaian sedikit lebih baik. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja masih 60,65 persen dari target 62,27 persen dan partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 44,26 persen dari target 47,23 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan Kota Makassar tidak hanya terkait dengan pengurangan pengangguran, tetapi juga

peningkatan partisipasi penduduk usia kerja, khususnya perempuan, serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Pada aspek **ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, dan integrasi ekonomi**, capaian masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Indeks Ekonomi Hijau hanya mencapai 28,80 dari target 51,40, sedangkan indikator ekonomi biru belum tersedia karena masih menunggu rilis data. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi telah sesuai target sebesar 49,25 persen. Namun, indikator pembentukan modal tetap bruto masih sedikit di bawah target dan net ekspor barang dan jasa menunjukkan nilai negatif. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan transformasi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan, peningkatan investasi produktif, serta penguatan kapasitas ekonomi daerah dalam menghasilkan nilai tambah dan memperluas keterhubungan dengan pasar domestik maupun global.

Pada dimensi **perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi**, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur telah mencapai 80,51 dari target 78,69. Namun, proporsi kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap PDB nasional maupun terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan masih sedikit di bawah target. Akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan juga baru mencapai 75,29 persen dari target 81,63 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan akses hunian layak dan penguatan kontribusi ekonomi kota. Oleh karena itu, pembangunan perkotaan perlu semakin diarahkan pada integrasi antara infrastruktur, perumahan, konektivitas, produktivitas ekonomi, dan kualitas lingkungan hidup.

Pada aspek **stabilitas ekonomi makro daerah**, terdapat sejumlah capaian yang cukup kuat. Rasio pajak daerah terhadap PDRB mencapai 0,67 persen dibandingkan target 0,59 persen, peningkatan investasi daerah mencapai 26,57 persen dari target 8,75 persen, serta Indeks Akses Keuangan Daerah mencapai 6,53 dari target 6,02. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah juga berada pada kategori B sesuai target. Namun, tingkat inflasi gabungan tercatat 2,69 persen dibandingkan target 1,52 persen. Dengan demikian, penguatan kapasitas fiskal dan investasi perlu diiringi dengan kebijakan pengendalian inflasi, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi rantai pasok daerah.

Sementara itu, pada aspek **pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan**, capaian menunjukkan adanya kontradiksi antara kemajuan reformasi birokrasi dengan sejumlah indikator kualitas tata kelola lainnya. Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 80,52 dari target 79,97, tetapi Indeks Reformasi Hukum, SPBE, Indeks Pelayanan Publik, Survei Penilaian Integritas, MCP KPK, dan Indeks Maturitas SPIP masih berada di bawah target. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi secara agregat belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas, efektivitas pengendalian internal, dan kematangan tata kelola digital. Oleh sebab itu, agenda perbaikan ke depan perlu menekankan penguatan kualitas layanan yang berorientasi pada masyarakat, interoperabilitas sistem digital, pengendalian internal, manajemen risiko, serta pencegahan korupsi secara lebih sistematis.

Pada aspek **ketertiban, keamanan, dan demokrasi**, capaian relatif baik terlihat dari 100 persen gangguan ketertiban umum yang dapat diselesaikan, 100 persen penegakan hukum terhadap peraturan daerah, serta persentase tindak kriminal yang ditangani sebesar 66,30 persen dari target 55,03 persen. Namun, proporsi perda yang merupakan inisiatif DPRD baru mencapai 5 perda dari target 9 perda dan persentase

perempuan pengurus partai politik masih sebesar 11,11 persen dari target 31,6 persen. Sementara itu, pada dimensi daya saing daerah, Indeks Daya Saing Daerah telah sesuai target 4,17, tetapi Indeks Inovasi Daerah baru mencapai 61,75 dari target 77,59 dan kerja sama sister city belum terealisasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan ekosistem inovasi daerah dan jejaring kerja sama antardaerah maupun internasional sebagai instrumen peningkatan daya saing Makassar.

Secara keseluruhan, capaian IUP Kota Makassar Tahun 2025 menunjukkan bahwa **kinerja pembangunan telah menghasilkan sejumlah kemajuan penting, tetapi belum sepenuhnya merata antarbidang**. Kekuatan utama terlihat pada peningkatan PDRB per kapita dan pengeluaran per kapita, capaian kesehatan ibu dan anak, penurunan prevalensi stunting, peningkatan literasi, perkembangan ekonomi kreatif dan wisatawan domestik, peningkatan investasi daerah, kualitas infrastruktur, serta beberapa indikator reformasi birokrasi dan ketertiban umum. Di sisi lain, masih terdapat isu strategis yang membutuhkan perhatian lebih kuat, terutama ketahanan pangan, air baku dan air minum, persampahan dan sanitasi, kemiskinan dan ketimpangan, partisipasi angkatan kerja, produktivitas IKM dan koperasi, ekonomi hijau, hunian layak, pengendalian inflasi, kualitas pelayanan publik, integritas pemerintahan, inovasi daerah, dan inklusivitas gender serta kelompok rentan.
Dengan mempertimbangkan pola capaian tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kota Makassar pada periode selanjutnya perlu bergeser dari sekadar peningkatan capaian indikator menuju penguatan kualitas dan pemerataan hasil pembangunan. Intervensi pembangunan perlu difokuskan pada indikator yang masih memiliki kesenjangan besar terhadap target, dengan memastikan keterpaduan antara kebijakan sektoral, kewilayahan, penganggaran, dan pelaksanaan program prioritas. Selain itu, indikator yang telah melampaui target perlu dipertahankan keberlanjutannya agar tidak mengalami penurunan capaian pada tahun berikutnya.

2.2.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Indikator Kinerja Kunci merupakan salah satu instrumen utama dalam mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah. Indikator ini menggambarkan hasil pembangunan yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah serta menjadi dasar dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan secara menyeluruh. Selain mencerminkan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik, capaian indikator kinerja kunci juga menunjukkan sejauh mana sasaran pembangunan daerah telah diwujudkan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel II.18.
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci
Kota Makassar Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci / Urusan	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Interpretasi Belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
1	**Pendidikan**				
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	98,02	<

No	Indikator Kinerja Kunci / Urusan	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Interpretasi Belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	99,45	<
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	97,34	<
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	14,66	<
2	**Kesehatan**				
2.1	Rasio daya tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1 : 207	1 : 214	>
2.2	Persentase RS Rujukan Kota Makassar yang terakreditasi	%	100	100	=
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	=
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	=
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	=
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	=
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	=
2.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	98,12	<
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	=
2.10	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	90,72	<
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	=
2.12	Persentase ODGJ berat Yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	=
2.13	Persentase orang terduga TBC Mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	=
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	=
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Makassar	%	52,47	100	>

No	Indikator Kinerja Kunci / Urusan	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Interpretasi Belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Makassar	%	55,64	55,64	=
3.3	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota Makassar	%	83,66	83,17	<
3.4	Persentase Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	91,48	98,45	>
3.5	Rasio kepatuhan IMB Kota Makassar	%	100	100	=
3.6	Tingkat Kemantapan Jalan kota Makassar	%	87,87	98,03	>
3.7	Rasio Tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi	%	33,44	100	>
3.8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	=
4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**				
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kota Makassar	%	100	100	=
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota Makassar	%	100	0	<
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kota Makassar yang ditangani	%	10	0,94	<
4.4	Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	3,69	0,11	<
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	=
5	**Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	=
5.2	Persentase Perda dan Perkada Yang ditegakkan	%	100	100	=
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana	%	100	100	=
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	=
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	=
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi	%	100	100	=

No	Indikator Kinerja Kunci / Urusan	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Interpretasi Belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	korban kebakaran				
5.7	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran (menit)	Menit	15	15	=
6	**Sosial**				
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang terpenuhi dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	=
6.2	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	=
7	**Tenaga Kerja**				
7.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	97,50	100	>
7.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1,45	1,58	>
7.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	24,05	25,05	>
7.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	40,50	31,1	<
7.5	Persentase Tenaga kerja Yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar	%	60,50	64,08	>
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	75	75	=
8.2	Persentase anak korban kekerasan Yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	=
8.3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 Penduduk perempuan)	%	1,04	1,04	=
9	**Pangan**				
9.1	Persentase ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	90	78,79	<
10	**Pertanahan**				
10.1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	90	0	<
11	**Lingkungan Hidup**				
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar	Nilai	66,17	66,28	>
11.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota Makassar	%	3	1,53	<

No	Indikator Kinerja Kunci / Urusan	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Interpretasi Belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
11.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar	%	69,20	54,55	<
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
12.1	Perekaman KTP Elektronik	%	96,2	95,97	<
12.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA kepemilikan akta kelahiran	%	74,3	74,63	>
12.3	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	98,99	98,92	<
12.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	20	6	<
13	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
13.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,010	2,010	=
13.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern *(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)*	%	59,80	64,52	>
13.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	%	12	57,88	<
14	**Perhubungan**				
14.1	Rasio Konektivitas Kota Makassar	Rasio	0,64	0,63	<
14.2	Kinerja lalu lintas Kota Makassar	Kinerja	0,47	0,47	=
15	**Komunikasi dan Informatika**				
15.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	=
15.2	Persentase Layanan Publik Yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	49,25	32,14	<
15.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Makassar	%	85,00	83,11	<
16	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				
16.1	Meningkatnya Koperasi Yang berkualitas	%	10,97	11,16	>
16.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	3,37	12,02	>
17	**Penanaman Modal**				
17.1	Persentase peningkatan investasi di Kota Makassar	%	8,75	38,3	>
18	**Kepemudaan dan Olahraga**				
18.1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	17,44	54,32	>
18.2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	12,69	14,5	>
18.3	Peningkatan prestasi olahraga	%	6,20	6,20	=

No	Indikator Kinerja Kunci / Urusan	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Interpretasi Belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
19	**Statistik**				
19.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	88,23	<
19.2	Persentase OPD yang menggunakan Data statistik Dalam melakukan Evaluasi pembangunan daerah	%	100	88,23	<
20	**Persandian**				
20.1	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	%	46	46,19	>
21	**Kebudayaan**				
21.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	20	22	>
22	**Perpustakaan**				
22.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	84,60	59,04	<
22.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	81,10	10,24	<
23	**Kearsipan**				
23.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	99,24	99,00	<
23.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	=
24	**Kelautan dan Perikanan**				
24.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota Makassar	Ton	22.960	22.476	<
25	**Pariwisata**				
25.1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	%	5	-18,32	<
25.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Makassar	%	2	12,06	>
25.3	Tingkat hunian Akomodasi (Hari)	Hari	56,27	55,48	<
25.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,15	2,23	>
25.5	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	25,55	19,43	<
26	**Pertanian**				
26.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	12,47	15,11	>
26.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	65	48,62	<
29	**Perdagangan**				
29.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	80	87,84	>
29.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100	100	=

No	Indikator Kinerja Kunci / Urusan	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Interpretasi Belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
29.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	90	90	=
30	**Perindustrian**				
30.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Makassar (Industri)	Industri	24.915	25.010	>
30.2	Persentase pencapaian Sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	40	40	=
30.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	1,05	0,33	<
30.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	=
30.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota Makassar	%	100	100	=
30.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	=
32	**Perencanaan dan Keuangan**				
32.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	9,51	12	>
32.2	Rasio PAD	%	44,46	40,65	<
32.3	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	=
32.4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	=
32.5	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	=
32.6	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	69,88	78,47	>
33	**Pengadaan**				
33.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	2	1	<
33.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	55,24	75	>
33.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	61,91	46	<

No	Indikator Kinerja Kunci / Urusan	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Interpretasi Belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
34	**Kepegawaian**				
34.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80	70,57	<
34.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	73,5	18,81	<
34.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	26,5	50,18	>
35	**Manajemen Keuangan**				
35.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-23	-24	<
35.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	-25,00	-83,09	<
35.3	Manajemen Aset	Ya/tidak	Ya	Ya	=
35.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	4,75	3,99	>
36	**Transparansi dan Partisipasi Publik**				
36.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	=
36.2	Akses publik terhadap informasi Keuangan daerah	%	100	100	=

Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2026. data diolah

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Makassar Tahun 2025 menunjukkan tingkat kinerja pembangunan daerah yang relatif beragam antarurusan pemerintahan. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 113 indikator, terdapat 44 indikator atau sebesar 38,94 persen yang telah sesuai dengan target, 28 indikator atau 24,78 persen yang melampaui target, dan 41 indikator atau 36,28 persen yang belum mencapai target. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa secara agregat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah menunjukkan hasil yang cukup positif, namun masih terdapat kesenjangan capaian pada sejumlah indikator strategis yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Pada urusan pendidikan, seluruh indikator yang diukur masih berada di bawah target. Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun dalam PAUD mencapai 98,02 persen, partisipasi usia 7–12 tahun dalam pendidikan dasar sebesar 99,45 persen, serta partisipasi usia 13–15 tahun dalam pendidikan menengah pertama sebesar 97,34 persen. Sementara itu, partisipasi penduduk usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan baru mencapai 14,66 persen dari target 100 persen. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya penguatan akses, pemerataan layanan pendidikan, penanganan anak tidak sekolah, serta perluasan cakupan pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Makassar.

Pada urusan kesehatan, capaian kinerja secara umum relatif baik. Sebagian besar indikator pelayanan kesehatan dasar telah mencapai target 100 persen, antara

lain akreditasi rumah sakit rujukan, pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin, pelayanan bayi baru lahir, balita, anak usia pendidikan dasar, pelayanan bagi penduduk lanjut usia, penderita diabetes melitus, ODGJ berat, terduga TBC, serta pelayanan deteksi dini HIV. Namun demikian, masih terdapat capaian yang belum optimal pada skrining kesehatan usia 15–29 tahun sebesar 98,12 persen dan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 90,72 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan kesehatan tidak lagi semata-mata berkaitan dengan ketersediaan layanan, tetapi juga pada peningkatan cakupan penjangkauan dan kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

Pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kinerja menunjukkan hasil yang cukup kuat. Perlindungan kawasan permukiman rawan banjir, pelayanan pengolahan air limbah domestik, tingkat kemantapan jalan, serta kompetensi tenaga operator/teknisi/analisis telah melampaui target. Sementara itu, perlindungan kawasan pantai rawan abrasi, erosi dan akresi serta kepatuhan terhadap ketentuan bangunan telah mencapai target. Meskipun demikian, akses rumah tangga terhadap air minum melalui SPAM baru mencapai 83,17 persen dibandingkan target 83,66 persen. Dengan demikian, agenda peningkatan kualitas infrastruktur dasar perlu tetap diarahkan pada perluasan akses air minum aman dan berkelanjutan, sekaligus mempertahankan capaian pada infrastruktur jalan, pengendalian banjir, dan sanitasi.

Pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, terdapat capaian yang masih perlu mendapat perhatian serius. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana serta penyediaan PSU telah mencapai target, namun fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi belum terealisasi, penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektare baru mencapai 0,94 persen dari target 10 persen, dan pengurangan jumlah rumah tidak layak huni baru mencapai 0,11 dari target 3,69. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas intervensi penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni secara lebih terintegrasi, berbasis lokasi dan sasaran penerima manfaat.

Pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial, seluruh indikator telah mencapai target. Penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada, pelayanan informasi dan kesiapsiagaan bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana maupun kebakaran, serta waktu tanggap penanganan kebakaran telah sesuai dengan target. Demikian pula pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta korban bencana telah mencapai target. Capaian tersebut menunjukkan relatif baiknya kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar dan perlindungan masyarakat pada urusan tersebut.

Pada urusan tenaga kerja, sebagian besar indikator menunjukkan capaian positif. Kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja, tenaga kerja bersertifikat kompetensi, tingkat produktivitas tenaga kerja, serta penempatan tenaga kerja telah melampaui target. Namun, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak baru mencapai 31,10 persen dari target 40,50 persen. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan, terutama dalam penerapan hubungan industrial, struktur dan skala upah, serta kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seluruh indikator telah mencapai target, termasuk penganggaran responsif gender,

penanganan anak korban kekerasan, serta rasio kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, pada urusan pangan, ketersediaan cadangan pangan baru mencapai 78,79 persen dari target 90 persen. Pada urusan pertanahan, penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum belum terealisasi dari target 90 persen. Kedua kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan intervensi lintas sektor, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan perkotaan dan mempercepat penyelesaian aspek pertanahan yang mendukung pembangunan fasilitas publik.

Pada urusan lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah melampaui target, yaitu mencapai 66,28 dibandingkan target 66,17. Namun, kinerja pengelolaan sampah baru mencapai 1,53 persen dari target 3 persen dan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan lingkungan hidup baru mencapai 54,55 persen dari target 69,20 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas lingkungan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kinerja pengelolaan sampah dan kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu ditempatkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan, terutama melalui penguatan pengurangan dan penanganan sampah dari sumber, peningkatan kapasitas layanan persampahan, serta pengawasan kepatuhan lingkungan.

Pada administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kinerja masih menunjukkan kesenjangan pada perekaman KTP elektronik, kepemilikan akta kelahiran, dan pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah berdasarkan perjanjian kerja sama. Di sisi lain, kepemilikan KIA/akta kelahiran bagi anak usia 0–7 tahun kurang satu hari telah sedikit melampaui target. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan integrasi layanan administrasi kependudukan sekaligus optimalisasi pemanfaatan data kependudukan sebagai basis perencanaan dan penargetan intervensi pembangunan daerah.

Pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, angka kelahiran total telah sesuai target dan pemakaian kontrasepsi modern telah melampaui target. Namun, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi masih jauh di atas target sebagaimana arah indikator yang ditetapkan. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan akses, kualitas konseling, keterjangkauan pelayanan, dan kesinambungan penggunaan kontrasepsi untuk memperkuat pengendalian pertumbuhan penduduk.

Pada urusan perhubungan dan komunikasi informatika, terdapat capaian yang perlu diperkuat dalam mendukung transformasi perkotaan berbasis digital. Rasio konektivitas Kota Makassar masih sedikit di bawah target, sedangkan kinerja lalu lintas telah sesuai target. Pada sisi digitalisasi pemerintahan, seluruh OPD telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, tetapi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi baru mencapai 32,14 persen dibandingkan target 49,25 persen. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas digital relatif telah tersedia, namun transformasi dari konektivitas menuju integrasi layanan publik digital masih memerlukan percepatan.

Pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, serta kepemudaan dan olahraga, capaian secara umum menunjukkan tren positif. Kualitas koperasi, peningkatan usaha mikro menjadi wirausaha, peningkatan investasi, partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, serta partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan telah melampaui target. Prestasi olahraga juga telah sesuai target. Capaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif

pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat dan partisipasi kelompok muda, yang perlu dipertahankan melalui penguatan ekosistem kewirausahaan, kemudahan investasi, dan peningkatan kapasitas pemuda.

Pada urusan statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, terdapat variasi capaian. Pemanfaatan data statistik oleh OPD dalam penyusunan dan evaluasi pembangunan masih mencapai 88,23 persen, sehingga belum sepenuhnya sesuai target. Sebaliknya, tingkat keamanan informasi pemerintah dan pelestarian cagar budaya telah melampaui target. Tantangan yang cukup menonjol terdapat pada urusan perpustakaan, khususnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan indeks pembangunan literasi masyarakat yang masih jauh dari target. Pada urusan kearsipan, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip telah mencapai target, sedangkan tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja masih sedikit di bawah target. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan budaya literasi, pemanfaatan data dalam evidence-based planning, serta tata kelola kearsipan yang mendukung akuntabilitas pemerintahan.

Pada urusan kelautan dan perikanan serta pariwisata, capaian menunjukkan beberapa tantangan. Produksi perikanan Kota Makassar mencapai 22.476 ton dari target 22.960 ton. Di sektor pariwisata, pertumbuhan wisatawan mancanegara mengalami capaian negatif sebesar -18,32 persen, tingkat hunian akomodasi mencapai 55,48 hari dari target 56,27 hari, dan kontribusi pariwisata terhadap PAD baru mencapai 19,43 persen dibandingkan target 25,55 persen. Di sisi lain, perjalanan wisatawan nusantara telah melampaui target dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB juga mencapai 2,23 persen dari target 2,15 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada peningkatan lama tinggal, belanja wisatawan, daya saing destinasi, serta konversi aktivitas pariwisata menjadi kontribusi ekonomi dan PAD yang lebih optimal.

Pada urusan pertanian, produktivitas pertanian per hektare telah melampaui target, tetapi penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular belum mencapai target. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya mempertahankan produktivitas sektor pertanian sekaligus meningkatkan aspek pengendalian penyakit hewan untuk menjaga keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan perkotaan. Pada urusan perdagangan, sebagian besar indikator telah mencapai atau melampaui target, termasuk persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan. Sementara itu, pada urusan perindustrian, pertambahan jumlah industri kecil dan menengah telah melampaui target dan sebagian besar indikator tata kelola industri telah mencapai target, meskipun indikator pemantauan dan pengawasan terhadap IUI kecil dan menengah masih berada di bawah target.

Pada aspek perencanaan, keuangan, pengadaan, kepegawaian dan manajemen keuangan daerah, capaian menunjukkan adanya kekuatan sekaligus area yang perlu mendapat perhatian. Opini laporan keuangan telah mencapai WTP, maturitas SPIP berada pada Level 3, peningkatan kapabilitas APIP berada pada Level 3, dan manajemen aset telah terlaksana sesuai target. Namun, rasio PAD masih berada di bawah target, rasio belanja pegawai berada di atas target, serta deviasi realisasi belanja dan PAD terhadap anggaran menunjukkan kinerja yang perlu dikendalikan. Dalam pengadaan, metode kompetitif telah melampaui target, tetapi masih terdapat indikator terkait proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya dan rasio nilai belanja melalui pengadaan yang belum mencapai target. Sementara itu, pada urusan kepegawaian, rasio pegawai dengan pendidikan tinggi/menengah dan

rasio pegawai fungsional masih di bawah target, meskipun proporsi jabatan fungsional bersertifikat kompetensi telah melampaui target.

Pada manajemen keuangan daerah, deviasi realisasi belanja dan PAD terhadap anggaran masih menjadi perhatian utama. Deviasi realisasi PAD tercatat sebesar -83,09 persen dibandingkan target -25 persen, yang mengindikasikan perlunya penguatan perencanaan target pendapatan, optimalisasi sumber-sumber PAD, serta peningkatan kualitas pengendalian realisasi pendapatan dan belanja. Di sisi lain, manajemen aset telah sesuai target dan rasio anggaran sisa terhadap total belanja tahun sebelumnya menunjukkan capaian yang lebih baik dari target.

Sementara itu, pada transparansi dan partisipasi publik, kedua indikator yang diukur telah mencapai target 100 persen, baik terkait informasi mengenai sumber daya yang tersedia untuk pelayanan maupun akses publik terhadap informasi keuangan daerah. Hal ini menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil capaian IKK Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja Kota Makassar telah memiliki fondasi yang relatif baik pada aspek pelayanan dasar kesehatan, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan ekonomi, investasi, serta tata kelola pemerintahan. Namun, masih terdapat sejumlah indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama pendidikan dan pendidikan kesetaraan, penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni, pengelolaan sampah dan kepatuhan lingkungan, ketahanan pangan, administrasi kependudukan, integrasi layanan publik digital, literasi masyarakat, pariwisata, optimalisasi PAD, serta penguatan kapasitas aparatur dan jabatan fungsional.

Dari perspektif perencanaan pembangunan, capaian tersebut perlu ditempatkan bukan sekadar sebagai hasil pengukuran kinerja, tetapi sebagai basis evidence dalam penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2026. Indikator yang belum mencapai target perlu ditindaklanjuti melalui identifikasi akar masalah, evaluasi efektivitas intervensi program dan kegiatan, serta penajaman target dan lokus intervensi. Sementara itu, indikator yang telah mencapai atau melampaui target perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya agar capaian kuantitatif dapat bertransformasi menjadi peningkatan outcome pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat.

Dengan demikian, hasil evaluasi IKK Tahun 2025 perlu menjadi salah satu dasar dalam penyusunan P-RKPD Tahun 2026, khususnya untuk memastikan adanya keterkaitan yang konsisten antara hasil evaluasi, permasalahan pembangunan, sasaran dan prioritas daerah, indikator kinerja, program dan kegiatan, serta dukungan penganggaran. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa perencanaan tahun 2026 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target administratif, tetapi mampu mengarahkan sumber daya pembangunan pada indikator yang masih memiliki kesenjangan capaian dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kota Makassar.

2.2.4. Capaian SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke

generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang memerlukan sinergi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan secara terpadu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip TPB/SDGs ke dalam seluruh proses pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pelaksanaan TPB/SDGs di Kota Makassar merupakan perwujudan komitmen jangka panjang Pemerintah Kota dalam menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan agenda pembangunan global sebagaimana tertuang dalam Agenda 2030.

Dalam implementasinya, pembangunan di Kota Makassar diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, pelestarian budaya, tata kelola pemerintahan yang baik, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seluruh dimensi pembangunan tersebut dilaksanakan secara terpadu sehingga mampu menciptakan pembangunan yang tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Makassar mengintegrasikan tujuan, sasaran, target, dan indikator TPB/SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Integrasi tersebut memastikan bahwa kebijakan, program, kegiatan, serta penganggaran daerah memiliki keterkaitan yang kuat dengan pencapaian target TPB/SDGs. Dengan demikian, setiap perangkat

daerah memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat implementasi TPB/SDGs secara terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat pencapaian target TPB/SDGs sekaligus mewujudkan Kota Makassar sebagai kota yang inklusif, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Adapun capaian target di Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II.19.
Capaian Realisasi SDGs Kota Makassar Tahun Anggaran 2025

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
TUJUAN 1 : MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN							
Target 1.2 : mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional							
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	%	4.24	4,43	Belum Tercapai	Secara umum mengalami kenaikan
1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
1.3.1(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	%	100	100	Tercapai	
1.3.1(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial	KK	24000	30000	Tercapai	
1.4 : Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi bau, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	%	100	100	Tercapai	Secara umum mengalami kenaikan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin.	DP2KB	%	68,45	64,18	Belum Tercapai	
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Dinas PU	%	100	83,6	Belum Tercapai	
1.4.1.(e)	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Dinas PU	%	56,7	84,9	Tercapai	Secara umum mengalami kenaikan
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	99,70	96,46	Akan Tercapai	
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	Dinas Pendidikan	%	91,29	78,45	Belum Tercapai	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.4.1.(j)	persentase penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Disdukcapil	%	100	98,92	Belum Tercapai	
1.5 : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Damkar	Kejadian	150	150	Tercapai	
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas Sosial	%	100	100	Tercapai	
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas Sosial	Jiwa	100	87	Tercapai	
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Dinas Ketahanan Pangan	Klp	50	50	Tercapai	Digantikan dengan Dapur B2SA

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
TUJUAN 2 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN							
2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi , terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	%	6,7	18,8	Belum Tercapai	
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	%	11,76	5,88	Tercapai	
2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang telah disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan	%	6,7	3,65	Tercapai	Indikator pindah Dinas Kesehatan
2.2.2	Prevalensi malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	Dinas Kesehatan	%	4,98	2,15	Tercapai	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	%	60	78,90	Tercapai	
2.2.2. (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai ; dan tingkat konsumsi ikan	Dinas Ketahanan Pangan	Skor	88	89,91	Tercapai	
2.c : Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.							
2.c.1	Indikator anomali harga pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Energi	Energi:2.700 Protein:128	Energi:2905 Protein: 88,16	Akan Tercapai	
2.3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang amandan sama terhadap lahan, sumberdaya produktif, dan input lainnya, pengetahuan,jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.							
2.3.1*	NilaiTambah Pertanian di bagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah pertenaga kerja).	Dinas Perikanan dan Pertanian	Ton	7,1 Ton Per Hektar Pertahun	6,5 Ton Perhektar Pertahun	Belum Tercapai	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.	Dinas Perikanan dan Pertanian	Ton	7,1 Ton Per Hektar Pertahun	6,5 Ton Perhektar Pertahun	Belum Tercapai	
TUJUAN 3 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA							
3.1 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup							
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	%		69	Tercapai	
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan	%	100	100	Tercapai	
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	100	100	Tercapai	
3.2 : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.2.1	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan			6,78	Belum Tercapai	
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan			6,78	Belum Tercapai	
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan			0,68	Tercapai	
3.3 : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya							
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Dinas Kesehatan		32	0,06	Tercapai	
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan		185	67	Tercapai	
3.3.3	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan		0,01	0,1	Belum Tercapai	
3.3.4.(a)	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan		634	634	Tercapai	
3.4 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Dinas Kesehatan		Data tidak tersedia dalam format pelaporan rutin	Data tidak tersedia dalam format pelaporan rutin	Data belum tersedia	
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan		2,4	20,28	Belum Tercapai	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas Kesehatan	data tidak tersedia dalam format pelaporan rutin	data tidak tersedia dalam format pelaporan rutin	data tidak tersedia dalam format pelaporan rutin	Data belum tersedia	
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan		1	1	Tercapai	
3.5 : Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan							
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Dinas Kesehatan	data tidak tersedia dalam format pelaporan rutin			Data belum tersedia	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.5.2	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Dinas Kesehatan	data tidak tersedia dalam format pelaporan rutin	100	99,1	Tercapai	
3.7 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DP2KB		68,45	55,82	Akan Tercapai	
3.8 : mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan askes terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang							
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan		100	100	Tercapai	
3.a : Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat							
3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	Dinas Kesehatan		19,59	0,36	Tercapai	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.b : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua							
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan		100	100	Tercapai	
3.c : Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil							
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan		1,51	0,07	Tercapai	
TUJUAN 4 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA							
4.1 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan		85	87,02	Tercapai	
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan		77,5	72,76	Belum Tercapai	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Dinas Pendidikan		100	105,81	Tercapai	
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Dinas Pendidikan		100	90,1	Belum Tercapai	
4.1.1.(f)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Pendidikan		12,2	11,59	Belum Tercapai	
4.2 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini,pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar							
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan		65,52	34,32	Belum Tercapai	
4.4 : Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.							
4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dispora		150	280	Tercapai	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4.5 : Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan							
4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	Dinas Pendidikan		100	SD/MI = 100,21 SMP/MTs = 106,43	Tercapai	
4.6 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi							
4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin	Dinas Perpustakaan	%	65	77,38	Tercapai	
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Pendidikan		100	98,34	Belum Tercapai	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Dinas Pendidikan		100	15-24=100	Tercapai	
4.a : Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dangender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.							
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dinas Pendidikan		(a) listrik=97% (b) internet untuk tujuan pengajaran=92%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran= 35%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=4, (e) air minum layak=83%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=70%,	(a) listrik=100% (b) internet untuk tujuan pengajaran=98,16%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran= 74,04%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=8,6%, (e) air minum layak=100%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=94,89%, (g) fasilitas cuci tangan	Tercapai	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				(g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=25%	(terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=100%		
4.c : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil							
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan		PAUD= 39.49% SD= 47.83% SMP= 47,88%	PAUD= 37,64% SD= 57,72% SMP= 59,76%	Tercapai	
TUJUAN 5 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN							
5.1 : mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimanapun							
5.1.1	Jumlah Kebijakan yang responsive gender mendukung pemberdayaan Perempuan	DP3A	%	95	100	Tercapai	
5.2 : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
5.2.1.a	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DP3A	%	100	100	Tercapai	
5.2.2	Proporsi Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	DP3A	%	100	100	Tercapai	
5.2.2.a	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DP3A	%	100	100	Tercapai	
5.5 : Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DP3A	%	31	25	Akan Tercapai	
5.6 : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
5.6.1	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	DP2KB		68,45	17,8	Belum Tercapai	
TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERAT PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA							
6.1 : Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua							
6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinas PU	%	100	83,6	Belum Tercapai	
6.1.1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Dinas PU	%	100	83,6	Belum Tercapai	
6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Dinas PU	%	100	83,6	Belum Tercapai	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
6.2 : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1.(a)	Proporsi Populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Dinas Kesehatan	%	100	92,24	Tercapai	
6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Dinas PU	%	56.7	84,9	Tercapai	
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan	%	100	N/A	Data belum Tersedia	
6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Dinas PU	%	56,7	84,9	Tercapai	
6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Dinas PU	%	56,7	84,9	Tercapai	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
6.3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6.3.1 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas PU	%	56,7	-	Data belum Tersedia	
6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Dinas PU	%	56,7	62,6	Tercapai	
6.3.2 (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	DLH		73,95	78,30	Tercapai	
TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang							
8.1.1	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	PTSP	%	100	90	Akan Tercapai	
8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan,kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro,kecil dan menengah,termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan							
8.3.1	Persentase tenaga kerja formal	Disnaker	%	70,50	63,88	Akan Tercapai	
8.3.1 (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah) ke layanan Keuangan	Dinas Koperasi &UKM	%	28,17	56,37	Tercapai	
8.5 : Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Disnaker	%	8,31	9,60	Belum Tercapai	
8.9 : Pada Tahun 2030, meyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Dinas Pariwisata	%	1,36	2,20	Tercapai	
8.9.1.(a)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata	Orang	36694	78080	Tercapai	
8.9.1.(b)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Dinas Pariwisata	Orang	2069040	6189997	Tercapai	
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Pariwisata	Orang	6.165	6.165	Tercapai	
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI							
9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dishub		10	2	Belum Tercapai	
9.5 : Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.							
9.5.1	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB	Balitbangda	%	100	0,0015	Belum Tercapai	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
9.5.2.	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.	Balitbangda	%	90	0,0010	Belum Tercapai	
9.b : Mendukung pengembangan teknologi domestic, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industry dan peningkatan nilai tambah komoditas							
9.b.1.	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah	Balitbangda	%	100	100	Tercapai	
TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN							
11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.							
11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan	%	100	47	Belum Tercapai	
11.1.1.(b)	jumlah Kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)	Dinas Pertanahan		75	N/A	Data belum tersedia	
11.2 : Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dishub	%	7	7	Tercapai	
11.4 : Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia							
11.4.1 (a)	Jumlah Kota Pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	dinas kebudayaan		100	50	Belum Tercapai	
11.5 : Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak , dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB Global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	%	100	100	Tercapai	
11.6 : Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
11.6.1 .(a)	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Kec. Panakukkang	%	90	75	Tercapai	
11.7 : Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
11.7.1 (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	DLH	-	-	1	Tercapai	
TUJUAN 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN							
12.4 : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	DLH		Limbah B3 = 9.690,62 Ton B3 = 1.690.624,0 0 Ton	6.079,31 ton	Belum Tercapai	
12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH		65.549	340,74	Tercapai	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
12.b : Mengembangan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal							
12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang telah disepakati	Dinas Pariwisata		1	1	Tercapai	
TUJUAN 13 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN							
13.2 : Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.							
13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	**DLH**		1	1	Tercapai	
TUJUAN 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
15.9 : Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.							
15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	**DLH**		2	2	Tercapai	
TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN							
16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.							
16.2.3.a	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	DP3A	%	100	100	Tercapai	
16.2.1.b	Prevalensi kekerasan terhadap anak lakilaki dan anak perempuan.	DP3A	%	100	100	Tercapai	
16.3 : Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	HUKUM & HAM	Perkara	12 Perkara		Data belum tersedia	
16.5 : Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.							
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Inspektorat	Laporan	21 Laporan	55	Tercapai	
16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
16.6.1.(A)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPKAD	WTP	WTP	WTP	Tercapai	
16.6.1.(C)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Bagian Organisasi	B	B	A	Tercapai	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
16.6.1. (D)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BKPSDMD	%	63	80,52	Tercapai	
16.7 : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Kesbangpol	%	-	-	Data Belum Tersedia	
16.9 : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil	Dukcapil	%	100	99,66	Akan Tercapai	
16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Dukcapil	%	100	96,67	Belum Tercapai	
16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Dukcapil	%	100	98,92	Belum Tercapai	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
16.10 : Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	DISKOMINFO		800	Ada	Tercapai	
16.b : Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Satpol PP	%	100%	100%	Tercapai	
TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	BAPENDA	Rp.	Rp 5.403.853.419.732	Rp 4.754.221.336.409,54	Belum Tercapai	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	TAHUN 2025		STATUS CAPAIAN	KET
				TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	BAPENDA	Rp.	Rp 2.125.300.000.000	Rp 1.746.930.777.312	Belum Tercapai	
17.5 : Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang							
17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang	PTSP		870 Investor dan Rp. 2.734.750.000.000	101 Investor PMA dan 881 Investor PMDN, Rp. 4,1 Triliun dan US$ 67,63 Juta	Tercapai	
17.17 : Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.							
17.17.1 (a)	Jumlah dokumen daftar rencana proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun	Dinas Kearsipan		250	250	Tercapai	

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kota Makassar Tahun 2025, dilakukan klasifikasi status indikator ke dalam empat kategori evaluasi, yaitu Tercapai, Akan Tercapai atau Membaik, Belum Tercapai, dan Data Belum Tersedia. Kategori “Akan Tercapai”, menunjukkan bahwa indikator telah menunjukkan tren positif dan berpotensi mencapai target pada periode berikutnya apabila intervensi kebijakan tetap dilanjutkan. Sementara itu, kategori “Belum Tercapai” menunjukkan indikator yang masih belum mencapai target dan memerlukan penguatan program, sinergi lintas sektor, serta optimalisasi dukungan pendanaan dan tata kelola.

Secara keseluruhan, dari total 115 indikator yang dievaluasi, terdapat 68 indikator (59,13%) dengan status Tercapai, yang menunjukkan bahwa hampir setengah indikator TPB di Kota Makassar telah memenuhi target pembangunan yang ditetapkan. Selanjutnya, sebanyak 7 indikator (6,09%) masuk kategori Akan Tercapai, yang mengindikasikan adanya perkembangan positif meskipun target belum sepenuhnya tercapai. Di sisi lain, masih terdapat 32 indikator (27,83%) dengan status Belum Tercapai, sehingga menjadi perhatian utama dalam penyusunan arah kebijakan RKPD Tahun 2027. Selain itu, sebanyak 8 indikator (6,95%) berada pada kategori Data Belum Tersedia, yang mencerminkan masih perlunya penguatan sistem data dan pelaporan pembangunan daerah.

Tren capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kota Makassar secara umum menunjukkan arah yang cukup positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator strategis yang memerlukan penguatan. Pada Tujuan 1: Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan, tren indikator menunjukkan peningkatan pada aspek perlindungan sosial seperti cakupan JKN, bantuan sosial, dan penanganan korban bencana yang telah mencapai target, namun tingkat kemiskinan, akses air minum layak, partisipasi pendidikan, dan kepemilikan akta kelahiran masih belum optimal. Pada Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, tren indikator memperlihatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan, pengendalian malnutrisi, dan penurunan stunting, meskipun kerawanan pangan dan kekurangan gizi balita masih menjadi tantangan. Selanjutnya, Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera menunjukkan capaian yang relatif baik dengan tercapainya indikator kesehatan ibu, cakupan layanan kesehatan, pengendalian penyakit menular, dan JKN, walaupun angka kematian neonatal, hipertensi, dan beberapa indikator penyakit tidak menular masih belum memenuhi target. Pada Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas, tren menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan melalui akreditasi sekolah, sertifikasi guru, serta akses teknologi pendidikan, namun APK, APM, pendidikan PAUD, dan rata-rata lama sekolah masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Sementara itu, Tujuan 5: Kesetaraan Gender memperlihatkan tren positif pada perlindungan perempuan dan anak serta kebijakan responsif gender, tetapi keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah. Pada Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, tren indikator menunjukkan perkembangan signifikan pada sanitasi dan pengelolaan limbah, meskipun akses air minum aman dan layanan air bersih belum sepenuhnya tercapai. Di sektor ekonomi, Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif khususnya pada sektor pariwisata dan kunjungan wisatawan, namun pengangguran, tenaga kerja formal, dan akses pembiayaan UMKM masih menjadi tantangan. Pada Tujuan 9: Infrastruktur, Industri, dan Inovasi, tren indikator masih relatif rendah terutama pada aspek riset, jumlah peneliti, dan pengembangan infrastruktur strategis. Selanjutnya, Tujuan 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan menunjukkan perbaikan pada transportasi umum dan penanganan bencana, namun hunian layak, pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau masih belum optimal. Pada Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan serta Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim, tren indikator relatif baik dengan tercapainya pengelolaan limbah B3, daur ulang sampah, strategi pariwisata

berkelanjutan, dan pelaporan emisi GRK. Selain itu, Tujuan 15: Ekosistem Daratan juga menunjukkan capaian positif melalui tersedianya dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati. Namun demikian, Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh masih menghadapi tantangan pada aspek transparansi, bantuan hukum, indeks demokrasi, perlindungan anak, dan kualitas data pembangunan. Sementara itu, Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah, penerimaan pajak, dan realisasi investasi masih perlu diperkuat meskipun indikator kerja sama pembangunan melalui dokumen KPBU telah mencapai target. Secara keseluruhan, tren TPB Kota Makassar menunjukkan adanya kemajuan pembangunan yang cukup baik pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, sanitasi, pariwisata, dan lingkungan hidup, namun masih membutuhkan percepatan pada aspek pendidikan, ekonomi inklusif, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan penguatan sistem data pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai bagian dari arah pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut tercermin melalui integrasi target TPB/SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah, serta upaya mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pembangunan guna memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan daerah selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai Triwulan ke II

Perubahan RKPD Tahun 2026 menggunakan data capaian kinerja dan pendanaan sampai dengan triwulan II pada tahun berjalan yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis pencapaian target anggaran dan kinerja. Dalam analisis ini menggunakan 3 (tiga) kategori capaian yaitu: Kategori Rendah dengan capaian dibawah 30 % (<30%) , Kategori Sedang dengan capaian 31 – 40 %, dan Kategori Tinggi yaitu lebih dari 40% (>40%)

2.3.1. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2026

Informasi Pada sub bab ini akan disajikan persentase realisasi pendanaan dan realisasi fisik sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 yang diurutkan mulai dari realisasi tertinggi hingga terendah.

Tabel II.20.
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kota Makassar
Tahun 2026 Hingga Triwulan II

No	Nama OPD	APBD (Rp)	Realisasi Keuangan		(%) Fisik
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Pendidikan	1.261.947.737.961,-	507.045.279.048,0	40,18	40,20
2	Dinas Kesehatan	631.790.065.029,-	226.846.860.336,0	35,91	33,54
3	Dinas Pekerjaan Umum	645.284.770.379,-	67.245.835.136,0	10,42	12,44
4	Dinas Penataan Ruang	36.722.655.920,-	6.932.933.606,0	18,88	18,88

No	Nama OPD	APBD (Rp)	Realisasi Keuangan		(%) Fisik
			(Rp)	(%)	
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	58.569.871.095,-	9.181.857.812,0	15,68	15,54
6	Satuan Polisi Pamong Praja	42.865.711.340,-	18.103.946.391,0	42,23	42,40
7	Dinas Pemadam Kebakaran	52.688.311.500,-	19.205.309.196,0	36,45	34,95
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.951.232.255,-	11.512.162.471,0	30,33	30,33
9	Dinas Sosial	24.449.147.880,-	7.946.474.492,0	32,50	38,27
10	Dinas Ketenagakerjaan	44.977.286.540,-	20.162.432.195,0	44,83	44,91
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.310.578.600,-	8.872.891.321,0	36,50	36,85
12	Dinas Ketahanan Pangan	20.590.125.093,-	5.865.209.610,0	28,49	40,26
13	Dinas Pertanahan	19.686.283.983,-	3.738.105.356,0	18,99	21,11
14	Dinas Lingkungan Hidup	152.018.056.170,-	28.102.400.863,0	18,49	18,58
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.457.725.857,-	9.016.055.992,0	35,42	35,42
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.365.682.090,-	9.427.478.088,0	25,92	26,07
17	Dinas Perhubungan	167.632.678.546,-	49.649.667.004,0	29,62	30,36
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	79.614.121.687,-	15.655.709.615,0	19,66	19,61
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22.487.802.890,-	7.352.989.874,0	32,70	33,51
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.934.399.391,-	8.005.460.394,0	36,50	36,68
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	119.926.703.280,-	27.553.524.398,0	22,98	22,97
22	Dinas Kebudayaan	26.650.866.525,-	8.147.773.885,0	30,57	40,20
23	Dinas Perpustakaan	10.020.525.007,-	3.606.983.021,0	30,57	30,64
24	Dinas Kearsipan	13.963.154.508,-	4.328.010.782,0	36,0	36,0
25	Dinas Perikanan dan Pertanian	56.481.789.263,-	10.302.481.967,0	31,0	31,0
26	Dinas Pariwisata	52.824.785.124,-	15.139.236.078,0	18,24	18,57
27	Dinas Perdagangan	28.928.197.133,-	7.870.881.898,0	28,66	33,61
28	Sekretariat Daerah	260.330.729.575,-	80.348.933.589,0	27,21	35,95
29	Sekretariat DPRD	182.314.622.500,-	65.857.735.446,0	30,86	29,49
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	33.512.050.613,-	12.852.012.911,0	36,12	36,12
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	66.314.704.936,-	14.962.759.824,0	38,35	38,46
32	Badan Pendapatan Daerah	125.463.228.025,-	36.558.028.323,0	22,56	22,43
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	35.383.252.925,-	10.746.028.896,0	29,14	29,14
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	14.956.719.529,-	5.376.799.968,0	30,37	30,48
35	Inspektorat Daerah	37.214.725.740,-	12.079.469.015,0	35,95	42,60
36	Kecamatan Biringkanaya	54.206.314.676,-	19.784.854.620,0	32,46	32,42
37	Kecamatan Bontoala	41.255.829.085,-	12.074.752.727,0	36,50	36,50
38	Kecamatan Makassar	51.891.302.250,-	16.760.556.830,0	29,27	29,27
39	Kecamatan Mamajang	46.914.346.296,-	14.116.788.077,0	32,30	32,30
40	Kecamatan Manggala	46.417.220.902,-	15.756.748.822,0	30,09	28,70
41	Kecamatan Mariso	35.122.097.660,-	10.846.581.918,0	33,95	33,95
42	Kecamatan Panakkukang	57.026.241.805,-	20.069.323.098,0	30,88	30,85
43	Kecamatan Rappocini	55.473.168.940,-	18.194.253.218,0	35,19	35,19

No	Nama OPD	APBD (Rp)	Realisasi Keuangan		(%) Fisik
			(Rp)	(%)	
44	Kecamatan Tallo	55.615.932.276,-	16.360.051.177,0	32,80	32,77
45	Kecamatan Tamalanrea	45.942.610.818,-	15.523.387.779,0	29,42	29,32
46	Kecamatan Tamalate	59.551.986.222,-	18.938.299.756,0	33,79	33,79
47	Kecamatan Ujung Pandang	42.267.451.720,-	14.446.329.316,0	31,80	31,67
48	Kecamatan Ujung Tanah	35.094.256.301,-	10.387.979.467,0	34,18	34,18
49	Kecamatan Wajo	34.459.058.000,-	9.658.019.549,0	29,60	29,72
50	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	16.024.930.200,-	5.017.769.068,0	28,03	28,03
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.209.438.960,-	13.253.682.900,0	31,31	30,79
JUMLAH		**5.185.102.485.000,-**	**1.586.789.097.123,-**	**30.60**	**30.71**

Sumber : E-monev Bappeda Kota Makassar, 2026.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Makassar tahun 2026 adalah sebesar Rp.5.185.102.485.000,- dengan total realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.586.789.097.123,- atau sebesar 30,60%.

Jika diukur berdasarkan 3 (tiga) kategori capaian realisasi (Rendah, Sedang, Tinggi) maka masing-masing perangkat daerah dapat dinilai sebagai berikut:

a. Kategori Rendah (SKPD dengan capaian realisasi sebesar < 30%) sebanyak 25 SKPD,
b. Kategori sedang (SKPD dengan capaian realisasi sebesar 31 – 40 %) sebanyak 24 SKPD, dan
c. Kategori Tinggi (SKPD dengan capaian realisasi sebesar >40%) sebanyak 3 SKPD

2.3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan RKPD Tahun 2026.

Pada sub bab ini akan dibahas tentang capaian kinerja pada masing-masing level program dan kegiatan yang terdapat pada masing-masing perangkat daerah. Persentase realisasi capaian kinerja dikategorikan menjadi 3 (Tiga) Kelompok yaitu : Kategori Rendah dengan capaian dibawah atau sama dengan 30 % (<30%), Kategori Sedang dengan capaian 31 – 40 %, dan Kategori Tinggi yaitu lebih dari 40% (>40%).

Kondisi ideal yang seharusnya dicapai adalah sebesar 50 persen, namun kondisi yang terjadi hingga triwulan II (dua) ini belum ada perangkat daerah yang realisasinya mencapai 25 persen, sehingga kategori tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada pada Kota Makassar. Berikut merupakan penjelasannya.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Evaluasi capaian kinerja pada level program dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel II.21.
Tabel Rekapitulasi Capaian berdasarkan Kinerja Triwulan II Level Program

No	Perangkat daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian		
			<30%	31 – 40 %	>40%
			(R)	(S)	(T)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Dinas Pendidikan	5	4	-	1
2	Dinas Kesehatan	5	3	2	-

No	Perangkat daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian		
			<30%	31 – 40 %	>40%
			(R)	(S)	(T)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
3	Dinas Pekerjaan Umum	9	7	1	1
4	Dinas Penataan Ruang	3	3	-	-
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5	5	-	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2	-	1	1
7	Dinas Pemadam Kebakaran	2	-	-	2
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	-	-
9	Dinas Sosial	5	2	-	3
10	Dinas Ketenagakerjaan	5	2	-	3
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	4	5	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	4	2	2	-
13	Dinas Pertanahan	4	2	1	1
14	Dinas Lingkungan Hidup	8	6	2	-
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	3	1	1
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	4	1	-
17	Dinas Perhubungan	3	2	1	-
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	4	1	-
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	5	1	2
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	5	1	-
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	3	2	1	-
22	Dinas Kebudayaan	6	4	1	1
23	Dinas Perpustakaan	3	2	-	1
24	Dinas Kearsipan	4	2	1	1
25	Dinas Perikanan dan Pertanian	11	8	1	2
26	Dinas Pariwisata	5	2	2	1
27	Dinas Perdagangan	10	9	1	-
28	Sekretariat Daerah	4	3	-	1
29	Sekretariat DPRD	2	-	2	-
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	1	1	1
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	2	1	-
32	Badan Pendapatan Daerah	2	1	1	-
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3	1	2	-
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	-	2	-

No	Perangkat daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian		
			<30%	31 – 40 %	>40%
			(R)	(S)	(T)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
35	Inspektorat Daerah	3	2	1	-
36	Kecamatan Biringkanaya	5	1	1	3
37	Kecamatan Bontoala	5	2	2	1
38	Kecamatan Makassar	5	1	2	2
39	Kecamatan Mamajang	5	2	2	1
40	Kecamatan Manggala	5	2	1	2
41	Kecamatan Mariso	5	1	3	1
42	Kecamatan Panakkukang	5	1	2	2
43	Kecamatan Rappocini	5	2	2	1
44	Kecamatan Tallo	5	2	2	1
45	Kecamatan Tamalanrea	5	1	-	4
46	Kecamatan Tamalate	5	1	4	-
47	Kecamatan Ujung Pandang	5	1	2	2
48	Kecamatan Ujung Tanah	5	1	4	-
49	Kecamatan Wajo	5	2	2	1
50	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	5	2	2	1
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	2	1	3
	Jumlah	**245**	**128**	**69**	**48**
	Total		**245**		

Sumber : E-monev Bappeda Kota Makassar, 2026

Tabel yang ada menunjukkan bahwa terdapat 245 jumlah program berdasarkan capaian kinerja keluaran kegiatan yang telah terealisasi, yang terdiri atas kategori rendah (<30%) yakni sebanyak 128 program, sementara untuk kategori sedang (31 – 40 %) yakni sebanyak 69 program dan untuk capaian yang dalam kategori tinggi (>40%) yakni sebanyak 48 program.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Kegiatan

Evaluasi capaian kinerja pada level kegiatan dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel II.22.
Tabel Rekapitulasi Capaian berdasarkan Kinerja Triwulan II Level Kegiatan

No	Perangkat daerah	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian		
			<30%	31 – 40 %	>40%
			(R)	(S)	(T)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Dinas Pendidikan	14	10	-	4
2	Dinas Kesehatan	24	17	-	7
3	Dinas Pekerjaan Umum	18	10	2	6
4	Dinas Penataan Ruang	12	7	2	3
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	18	16	1	1

No	Perangkat daerah	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian		
			<30%	31 – 40 %	>40%
			(R)	(S)	(T)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
6	Satuan Polisi Pamong Praja	10	5	2	3
7	Dinas Pemadam Kebakaran	12	10	-	2
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	7	1	3
9	Dinas Sosial	16	10	2	4
10	Dinas Ketenagakerjaan	20	11	2	7
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24	11	4	9
12	Dinas Ketahanan Pangan	13	10	1	2
13	Dinas Pertanahan	9	4	1	4
14	Dinas Lingkungan Hidup	17	12	2	3
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16	8	2	6
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17	13	2	2
17	Dinas Perhubungan	23	17	3	3
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	8	1	3
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15	5	4	6
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	9	4	1
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	14	8	1	5
22	Dinas Kebudayaan	15	11	2	2
23	Dinas Perpustakaan	11	7	-	4
24	Dinas Kearsipan	16	8	2	6
25	Dinas Perikanan dan Pertanian	30	16	3	11
26	Dinas Pariwisata	17	6	4	7
27	Dinas Perdagangan	23	20	1	2
28	Sekretariat Daerah	20	15	2	3
29	Sekretariat DPRD	18	13	3	2
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15	9	2	4
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	9	1	4
32	Badan Pendapatan Daerah	9	4	4	1
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12	8	3	1
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	10	4	4	2
35	Inspektorat Daerah	11	8	1	2
36	Kecamatan Biringkanaya	12	6	2	4

No	Perangkat daerah	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian		
			<30%	31 – 40 %	>40%
			(R)	(S)	(T)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
37	Kecamatan Bontoala	13	8	3	2
38	Kecamatan Makassar	14	9	3	2
39	Kecamatan Mamajang	11	7	3	1
40	Kecamatan Manggala	14	10	-	4
41	Kecamatan Mariso	12	7	2	3
42	Kecamatan Panakkukang	13	8	2	3
43	Kecamatan Rappocini	13	7	3	3
44	Kecamatan Tallo	13	8	1	4
45	Kecamatan Tamalanrea	13	6	4	3
46	Kecamatan Tamalate	14	9	4	1
47	Kecamatan Ujung Pandang	11	3	3	5
48	Kecamatan Ujung Tanah	13	7	5	1
49	Kecamatan Wajo	13	10	2	1
50	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	12	6	5	1
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13	6	2	5
	Jumlah	**754**	**463**	**113**	**182**
	Total		**754**		

Sumber : E-monev Bappeda Kota Makassar, 2026.

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa sesuai dengan kategori capaian yang di ukur dalam kategori Rendah (<30%, Sedang (31-40%) dan Tinggi (>40%), terdapat 463 kegiatan yang termasuk dalam kategori Rendah dan 113 kegiatan yang termasuk Kategori Sedang serta 182 Kegiatan yang termasuk dalam kategori tinggi.

Selain itu sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II, masih terdapat 108 kegiatan yang capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik sebesar 0,00 %.

2.3.3. Evaluasi Standar Pelayanan (SPM)

Evaluasi terhadap pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memberikan gambaran pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar menerapkan sebanyak 29 jenis pelayanan dasar yang terbagi dalam 6 bidang urusan dan dilaksanakan oleh 8 Perangkat Daerah yang terkait Pelayanan Dasar. Pencapaian penerapan SPM Kota Makassar hingga triwulan II Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.23.
Evaluasi Pencapaian SPM Kota Makassar Triwulan Tahun 2026

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Target RKPD 2026	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2026 (TW II)	SKPD Penanggung jawab
			Penerima Layanan (80%)		Mutu Minimal Layanan (20%)			
			Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi		
I	**Bidang Urusan Pendidikan**							
1	Pendidikan Dasar	100%	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	77,02%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	20%	**97,02%**	Dinas Pendidikan
		Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Literasi SD : 62,85 Literasi SMP : 71,65 Numerasi SD : 54,38 Numerasi SMP : 62,85		100%	**100%**	
2	Pendidikan Kesetaraan	100%	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	62,72%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	20%	**82,72%**	Dinas Pendidikan
		Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Literasi SD : 55,82 Literasi SMP : 58,34 Numerasi SD : 46,57 Numerasi SMP : 49,79		100%	**100%**	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	67,36%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	20%	**87,36%**	Dinas Pendidikan
II	**Bidang Urusan Kesehatan**							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	36,01	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	13,53	**49,54**	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Target RKPD 2026	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2026 (TW II)	SKPD Penanggung jawab
			Penerima Layanan (80%)		Mutu Minimal Layanan (20%)			
			Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	36,83	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	16,40	**53,23**	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	38,66	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	15,57	**54,23**	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	38,27	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	13,54	**51,81**	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	Jumlah anak pada usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	39,69	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	15,52	**55,21**	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	34,61	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	17,63	**52,24**	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	51,64	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	18,36	**70,00**	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	31,81	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	17,99	**49,80**	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%	Jumlah Warga Negara penderita *diabetes mellitus* usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	56,15	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	18,51	**74,66**	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	45,73	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	17,14	**62,87**	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Target RKPD 2026	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2026 (TW II)	SKPD Penanggung jawab
			Penerima Layanan (80%)		Mutu Minimal Layanan (20%)			
			Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi		
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	45,75	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	16,57	**62,32**	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	100%	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	31,65	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	16,37	**48,02**	Dinas Kesehatan
V	**Bidang Urusan Ketenteraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**							
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	100%	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Kabupaten/Kota	14.50%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	12.85%	**27.36%**	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan informasi rawan bencana	80%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	6.67%	**99.17%**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	80%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	13.21%	**97.92%**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	80%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	20%	**100%**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
VI	**Bidang Urusan Sosial**							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	7.53%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	30.73%	**13.63%**	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	36.24%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	80.23%	**52.28%**	Dinas Sosial

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Target RKPD 2026	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2026 (TW II)	SKPD Penanggung jawab
			Penerima Layanan (80%)		Mutu Minimal Layanan (20%)			
			Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi		
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	21.33%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	53.08%	**31.95%**	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	59.29%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	73.06%	**73.91%**	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	50.30%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	48.39%	**59.98%**	Dinas Sosial

Urusan SPM Bidang Pendidkan, capaian SPM terendah triwulan 1 pada pelayanan pendidikan anak usia dini dengan capaian 68,88%, dimana penduduk usia 5-6 yang berpartisipasi pada pendidikan usia dini yang harus terlayani sebesar 51.903 orang sementara yang belum terlayani sebesar 20.188 orang tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dan berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

SPM Bidang Kesehatan pada triwulan 1 untuk capaian tertinggi pada pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebesar 46,62 % dengan jumlah yang harus dilayani 26.974 orang dan yang sudah terlayani sebesar 10.033 orang. Sementara capaian terendah pada pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dengan capaian 18,36%. Jumlah ODGJ yang harus dilayani sebesar 3.380 orang dan yang baru terlayani sebesar 196 orang pada triwulan 1. Hal ini disebabkan karena sumberdaya tenaga kesehatan yang belum optimal berdasarkan jenis dan profesi serta system pencatatan dan pelaporan SPM yang belum terintegrasi.

Untuk pelayanan yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) capaian SPM 94,33% dengan jumlah yang terlani sebesar 299 0rang atau sebesar 100% dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kota Makassar. Hal ini di dukung dengan aktifnya satpol PP dalam melaksanakan patrol rutin di seluruh wilayah Kota Makassar untuk mengantisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Namun kendala yang dihadapi juga dalam melakukan pelayanan standar minimal ini tidak semua warga negara yang berada di radius 0-50 meter dari Lokasi penegakan perda yang memberikan data-data lengkap baik NIK dan KK.

Untuk SPM pada bidang penanggulangan bencana capaian tertinggi pada triwulan 1 yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan

capaian sebesar 99,39 % dimana jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 3.169 orang atau terlayani 100% Hal ini di dukung dengan adanya respon cepat darurat bencana, aktivasi system komando penanganan darurat bencana yang terorganisir dengan baik.

Untuk SPM Bidang Sosial, pada triwulan 2 capaian tertinggi pada rahabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang mencapai 73.91%, dengan jumlah total yang terlayani sebesar 63 orang dari jumalh target yang harus dilayani sebesar 85 orang. Faktor yang mempengaruhi capaian ini yaitu karena data masih berproses sehingga pelayanan rehabilitasi sosial pada PPKS lainnya dan perlindungan sosial penanganan bencana masih berjalan dan untuk memaksimalkan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar di tahun 2026, maka akan memperbaiki identifikasi permasalahan dan kebutuhan bagi anak terlantar terutama hasil penjangkauan.

Bidang Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum yang dimaksud meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 masih dalam kategori Belum Tuntas dengan total pencapaian sebesar 23,90% dari target 100% yang ditetapkan. Berdasarkan data yang telah diinput pada Aplikasi e-SPM Bangda Kemendagri, realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.24.
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2026 (Triwulan II)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2026 (Tw. II)
				Penerima Layanan Dasar (80%)		Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
				Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	**100%**	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	15,97%	Jumlah barang dan jasa	3,99%	**19,96%**
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	**100%**	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	23,35%	Jumlah barang dan jasa	4,48%	**27,83%**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Tahun 2026

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang berkaitan dengan layanan SPM pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 39.686.287.758,- dengan rincian sebagai berikut :

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp. 18.778.645.938,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 387.986.450,- atau 2,07%; dan
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar Rp.24.981.109.053,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar Rp.3.364.904.563,- atau 13,47%.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya data By Name By Address terkait jumlah warga Kota Makassar yang belum terakses Air Bersih dan Sanitasi aman;
2. Belum jelasnya status alas hak dari lokasi pemenuhan kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) maupun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman dan kurangnya lahan fasum yang tersedia untuk pembangunan SPAM maupun SPALD terpusat skala permukiman.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penyedotan lumpur tinja, kurangnya pemahaman resiko sanitasi buruk dan minimnya partisipasi dalam layanan sedot tinja terjadwal yang disebabkan oleh anggapan bahwa tangki septik hanya perlu disedot pada saat penuh.
4. Adanya penolakan dari warga yang tidak menyetujui penempatan sarana yang dibangun/ditingkatkan/diperluas pada lokasi yang telah disepakati sehingga dapat memperlambat pelaksanaan pekerjaan.

Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum perlu fokus pada indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian SPM sebagai berikut :

1. Pembangunan dan perluasan Jaringan Distribusi Utama (JDU), optmalisasi SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di wilayah pinggiran kota atau kawasan rawan air (seperti Makassar bagian utara dan timur).
2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di pemukiman padat penduduk, pengoperasian truk penyedot tinja (LLTT – Layanan Lumpur Tinja Terjadwal), serta sambungan rumah terhadap jaringan IPAL Losari (sistem terpusat skala perkotaan).

Bidang Perumahan Rakyat

Terdapat dua jenis layanan dasar bidang perumahan rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 masih dalam kategori Belum Tuntas dengan total pencapaian sebesar 8,81% dari

target 100% yang ditetapkan. Realisasi dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel II.25.
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 (Triwulan II)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2026 (Tw.II)
				Penerima Layanan Dasar (80%)		Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
				Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	**100%**	100%	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	13,33%	Jumlah barang dan jasa	4,29%	**17,62%**
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	**100%**	100%	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	0%	Jumlah barang dan jasa	0%	**0%**

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Tahun 2026

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar yang berkaitan dengan penerapan SPM pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 982.290.100,- pada Program Pengembangan Perumahan. Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp.12.944.196,- atau 1.90%.

Standar Pelayanan Minimum yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar belum terlaksana sepenuhnya dan belum tercapai sesuai target sasaran yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. Lokasi pendataan terkait rumah terdampak bencana didasarkan pada kejadian yang dikategorikan sebagai bencana yang ditetapkan melalui SK Penetapan Bencana oleh Pemerintah Kota Makassar, dimana tidak semua kejadian yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal masuk kategori dan memiliki penetapan/SK. Hal tersebut berdampak pada tahap perhitungan kebutuhan dan perencanaan;
2. Masih memerlukan dukungan anggaran penerapan dan pencapaian SPM.

Bidang Trantibumlinmas (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar mengacu pada urusan wajib pelayanan dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Hal ini selaras dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Pencapaian SPM pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2026 triwulan II sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.26.
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2026 (Triwulan II)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2026 (Tw.II)
				Penerima Layanan Dasar (80%)		Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		
				Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	**100%**	100%	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	40,00%	Jumlah barang dan jasa	9,85%	**49,85%**

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2026 (Triwulan II)

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar Tahun 2026 Triwulan II sebesar 49,85%. Terdiri dari 2 komponen yaitu *pertama* Penerima layanan ditargetkan sebanyak 3000 orang penerima layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, hingga triwulan II terlayani sebanyak 1500 orang, dengan capaian 40%. *Kedua* pencapaian mutu layanan sebagai akumulasi dari pemenuhan tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit; pemenuhan SOP penanganan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi; pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran; pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pmadam kebakaran dan penyelamatan; pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran, dengan capaian 9,85%.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan layanan SPM pada Tahun Anggaran 2026 melalui Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran sebesar Rp. 17.731.186.720 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 4.391.503.935 atau 24,77%.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar dalam pelaksanaan capaian SPM antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya personil dan peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki, sehingga terkadang penanganan penuh dengan resiko yang dihadapi oleh

petugas penyelamatan.

2. Masih minimnya jumlah mobil pemadam kebakaran sehingga tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang harus dicover dalam Wilayah Managemen Kebakaran (WMK). Serta kendaraan Pemadam Kebakaran yang ada sudah melebihi batas umur ekonomis/batas pemakaian yang tidak layak pakai.
3. Masih kurangnya Posko Pemadam di setiap Wilayah Kecamatan untuk memenuhi Quick Respon Time (QRT).

Untuk memastikan SPM terpenuhi 100%, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar perlu melaksanakan program strategis berupa :

- **Peningkatan SDM:** Sertifikasi kompetensi personel damkar dan tim *rescue* agar terstandarisasi secara nasional.
- **Penguatan Sarana dan Prasarana:** Penambahan armada (seperti mobil penembak, suplai, armada taktis lorong/motor pemadam) serta pemeliharaan hidran kota.
- **Edukasi & Pencegahan:** Sosialisasi berkala ke pemukiman padat penduduk serta inspeksi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung fasilitas publik.

2.4. Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 Triwulan II

Hambatan Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 Triwulan II:

Masih rendahnya realisasi belanja daerah pada beberapa Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa faktor yang menjadi penyebab kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran pada sebagian besar Perangkat Daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta belanja operasional rutin, sehingga pelaksanaan belanja pembangunan belum berjalan secara optimal.
2. Belum terselesaikannya status penguasaan dan legalitas lahan yang menjadi lokasi pembangunan infrastruktur, termasuk aset yang belum tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD), mengakibatkan beberapa kegiatan pembangunan belum dapat dilaksanakan.
3. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan teknis, seperti *Feasibility Study* (FS), *Detail Engineering Design* (DED), dokumen lingkungan, Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), serta dokumen pendukung lainnya, menyebabkan pelaksanaan kontrak pekerjaan fisik mengalami keterlambatan, termasuk pada kegiatan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
4. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, termasuk proses tender, mengalami keterlambatan akibat transisi penggunaan aplikasi Katalog Elektronik (e-Katalog) dari Versi 5 (V5) ke Versi 6 (V6) yang masih memerlukan penyesuaian sistem, serta perlunya penyesuaian pengalokasian rekening belanja agar sesuai dengan ketentuan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan penganggaran.
5. Pengajuan tagihan atas pelaksanaan pekerjaan masih terkonsentrasi pada akhir penyelesaian pekerjaan atau setelah progres fisik mencapai 100 persen, sehingga belum sepenuhnya menerapkan mekanisme pembayaran secara bertahap (*termin*) sebagaimana diatur dalam ketentuan kontrak.

6. Adanya kebijakan efisiensi belanja daerah serta penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan dan visi, misi, serta program strategis nasioanal dan prioritas Kepala Daerah mengakibatkan perlunya perubahan terhadap alokasi anggaran, rincian belanja, maupun ruang lingkup beberapa program, kegiatan, dan subkegiatan.
7. Kompetensi aparatur dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait penatausahaan, akuntansi, pelaksanaan anggaran, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, masih perlu ditingkatkan.
8. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan adanya perubahan kondisi dan dinamika pembangunan yang menyebabkan sebagian target, indikator kinerja, maupun rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan asumsi pada saat penyusunan RKPD. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian melalui Perubahan RKPD sebagai upaya menjaga konsistensi pencapaian sasaran pembangunan daerah serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan pada sisa tahun anggaran.

Upaya pencapaian Pelaksanaan RKPD 2026

Sebagai tindak lanjut atas hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, diperlukan berbagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada sisa periode pelaksanaan Tahun 2026. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, serta memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnakan, dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta regulasi yang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan guna menjamin kepastian proses dan pelaksanaan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja.
2. Percepatan penertiban administrasi dan sertifikasi aset milik Pemerintah Kota Makassar, termasuk penyelesaian penerbitan alas hak atas seluruh aset tidak bergerak serta percepatan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang kepada Pemerintah Kota Makassar guna mendukung optimalisasi pengelolaan aset daerah dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
3. Percepatan penyusunan dokumen perencanaan teknis, dokumen lingkungan, serta dokumen pendukung lainnya yang menjadi persyaratan pelaksanaan pembangunan fisik. Selain itu, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan kelengkapan administrasi pengadaan barang dan jasa, khususnya terhadap belanja daerah yang dilaksanakan melalui mekanisme tender maupun yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah (TKD), sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara tepat waktu.
4. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk percepatan penyesuaian penggunaan Katalog Elektronik (e-Katalog) Versi 6 (V6) serta peningkatan kesiapan perangkat daerah dalam implementasi sistem

pengadaan, sehingga proses tender dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

5. Peningkatan kualitas koordinasi, sinkronisasi, sinergi, dan konsultasi antar perangkat daerah, termasuk dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), guna mewujudkan keterpaduan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
6. Perkuat koordinasi dan pelibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang meliputi Inspektorat Kota Makassar, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta aparat pengawasan eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan, sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program dan kegiatan. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mencegah terjadinya penyimpangan administrasi, serta meminimalkan risiko hukum dalam pelaksanaan pembangunan.
7. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya aparatur yang melaksanakan fungsi pelayanan publik, tenaga teknis, serta aparatur perencana melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat), bimbingan teknis (Bimtek), dan program pengembangan kompetensi lainnya secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Peningkatan intensitas monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, terutama pada perangkat daerah yang melaksanakan program strategis dan mengelola pagu anggaran yang relatif besar, guna memastikan ketercapaian target kinerja, percepatan realisasi anggaran, serta penyelesaian berbagai permasalahan pelaksanaan secara tepat waktu.

Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2026

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, diperlukan beberapa langkah tindak lanjut sebagai upaya percepatan pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada akhir tahun anggaran. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pencapaian target pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Operasional Kegiatan (ROK), serta Rencana Arus Kas (RAK) yang telah ditetapkan, guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran, khususnya melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen utama dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan terintegrasi.
3. Mengoptimalkan pencapaian target indikator kinerja pembangunan daerah Tahun 2026 yang meliputi indikator kinerja makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen pengukuran keberhasilan pembangunan daerah sekaligus pemenuhan pelayanan dasar masyarakat Kota Makassar.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, khususnya yang menangani fungsi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, melalui

pelaksanaan bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur.

5. Membentuk tim terpadu yang melibatkan Pemerintah Kota Makassar, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta instansi terkait lainnya dalam rangka percepatan sertifikasi aset tetap berupa tanah dan aset tidak bergerak milik Pemerintah Kota Makassar, disertai upaya pengamanan administrasi maupun pengamanan fisik aset di lapangan.
6. Mengintegrasikan berbagai sistem informasi pendukung perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas proses perencanaan daerah, termasuk dalam penyusunan dan pemutakhiran Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Analisis Standar Belanja (ASB), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagai dasar penyusunan rincian komponen belanja dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
7. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi secara berkelanjutan dengan aparat pengawasan intern pemerintah, meliputi Inspektorat Kota Makassar, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta dengan lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan, khususnya dalam persiapan maupun pelaksanaan kegiatan strategis dan pekerjaan konstruksi guna meminimalkan potensi maladministrasi serta risiko hukum di kemudian hari.
8. Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja pembangunan daerah secara berkala terhadap pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, serta capaian pendapatan daerah melalui forum evaluasi yang dipimpin oleh Wali Kota Makassar dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Inspektorat, para Asisten Sekretariat Daerah, Tim Ahli Wali Kota, serta Perangkat Daerah terkait sebagai upaya memperkuat koordinasi, percepatan penyelesaian permasalahan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB. III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026 yang berpedoman pada RKP Nasional serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar Periode 2025-2029, saat ini dihadapkan pada tantangan makroekonomi global yang sangat dinamis. Eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran telah memberikan guncangan hebat terhadap stabilitas rantai pasok energi dan pasar keuangan dunia. Kondisi tersebut memicu pembengkakan harga minyak mentah internasional dan memperparah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat merosot tajam akibat tingginya ketidakpastian global. Dampak rambatan dari situasi global tersebut secara nyata memicu penyesuaian harga BBM nonsubsidi di dalam negeri. Bagi Kota Makassar kombinasi antara pelemahan kurs rupiah dan kenaikan biaya energi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan inflasi daerah, menaikkan biaya logistik, serta memengaruhi daya beli masyarakat lokal. Oleh karena itu, dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 harus dirancang secara adaptif dan realistis, dengan memprioritaskan strategi mitigasi dampak ekonomi, penguatan jaring pengaman sosial, serta efisiensi belanja daerah guna menjaga stabilitas fiskal dan kesinambungan pembangunan kota.

Dinamika global tersebut kian mempertegas pentingnya pencermatan terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sepanjang separuh pertama tahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Makassar pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026, realisasi kinerja program serta penyerapan anggaran secara umum telah berjalan relatif sesuai target, namun mulai menunjukkan tekanan pada efisiensi belanja akibat kenaikan operasional logistik. Sektor-sektor strategis, seperti intervensi pengendalian inflasi daerah (TPID) dan program perlindungan sosial, mencatatkan progres positif dalam menahan gejolak harga pangan awal tahun. Meski demikian, deviasi pencapaian pada beberapa kualifikasi indikator output menunjukkan perlunya penyesuaian target dan alokasi sumber daya agar instrumen APBD tetap responsif dalam merespons tekanan eksternal yang merambat ke tingkat lokal. Oleh karena itu, dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 harus dirancang secara adaptif dan realistis dengan menjadikan hasil evaluasi Triwulan I dan II sebagai basis penyesuaian kebijakan. Pemerintah Kota Makassar merumuskan strategi penajaman program prioritas yang difokuskan pada mitigasi dampak ekonomi, penguatan jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta optimalisasi efisiensi belanja daerah guna menjaga stabilitas fiskal. Melalui konsolidasi program pada dokumen Perubahan RKPD, arah kebijakan pembangunan Kota Makassar diharapkan tetap akuntabel, fleksibel dalam menghadapi risiko ketidakpastian global, serta berkesinambungan demi menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan (hub) utama di Sulawesi Selatan dirancang untuk memperkuat keterkaitan strategis antara dinamika lokal, regional, dan nasional. Sebagai simpul logistik, perdagangan, dan jasa di Kawasan Timur Indonesia, kinerja perekonomian Makassar berkolerasi langsung terhadap capaian prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sinkronisasi memastikan bahwa setiap penyesuaian agenda pembangunan daerah tidak berjalan secara terisolasi, melainkan menjadi penopang utama bagi target

transformasi ekonomi nasional, penguatan daya saing daerah, serta percepatan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Dalam kerangka RPJMD Kota Makassar Periode 2025–2029, arah pembangunan ditujukan untuk memperkokoh struktur ekonomi perkotaan yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Keterkaitannya dengan RKP 2026 dan RPJMD Provinsi diwujudkan melalui penyelarasan program prioritas, seperti penguatan iklim investasi, pemberdayaan UMKM berbasis digital, intervensi jaring pengaman sosial, serta optimalisasi rantai pasok daerah. Dengan mengintegrasikan prioritas tersebut, Pemerintah Kota Makassar memfokuskan alokasi sumber daya pada program-program pengungkit yang mampu meredam ketidakpastian global sekaligus menstimulasi sektor-sektor produktif lokal secara optimal. Penyelarasan kebijakan lintas tingkatan pemerintah secara langsung mendasari penyesuaian target indikator makro ekonomi daerah dalam dokumen Perubahan RKPD. Analisis komprehensif terhadap proyeksi laju pertumbuhan ekonomi (LPE), tingkat inflasi daerah, penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT), hingga reduksi angka kemiskinan dilakukan secara terukur dan realistis. Dengan demikian, redefinisi target indikator makro tidak hanya mencerminkan respons adaptif terhadap tekanan eksternal dan evaluasi kinerja semester I, tetapi juga menjamin kepastian bahwa arah kebijakan ekonomi Kota Makassar tetap berada pada jalur yang selaras dengan sasaran pembangunan makro Sulawesi Selatan dan Nasional.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Penyusunan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2026 menjadi jangkar utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan prioritas pembangunan yang selaras, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Melalui kombinasi pendekatan teknokratik yang berbasis data ilmiah, pendekatan politik guna mengomodasi visi kepemimpinan, serta pendekatan partisipatif melalui integrasi mekanisme *top-down* dan *bottom-up*, kebijakan dirancang untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang kokoh. Sinergi multidimensi sangat krusial untuk memastikan bahwa target makro nasional mampu ditranslasikan ke dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan di tingkat daerah yang menyentuh langsung kebutuhan riil masyarakat. Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2026 yang mengusung tema *“Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”* menjadi kompas strategis dalam menavigasi ketidakpastian global sekaligus mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif. Di tengah fluktuasi geopolitik dan dinamika pasar dunia yang dinamis, fokus pada ketiga pilar utama tersebut dirancang sebagai benteng pertahanan untuk memperkuat kemandirian domestik dan memutus ketergantungan pada rantai pasok eksternal yang rentan. Melalui pendekatan ini, pemerintah pusat memberikan kerangka kerja bagi daerah untuk merumuskan program-program taktis yang mampu mengoptimalkan potensi lokal, memperluas lapangan kerja berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dari tingkat akar rumput hingga ke pusat pertumbuhan wilayah.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan melalui delapan (8) strategi pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam dokumen Asta Cita, yaitu:

1. Ketahanan Pangan, melalui transformasi sektor pertanian dengan mekanisasi dan digitalisasi, pembangunan infrastruktur irigasi dan lumbung pangan, diversifikasi pangan lokal, serta penguatan cadangan dan stabilisasi harga.
2. Ketahanan Energi, melalui percepatan transisi energi baru dan terbarukan (EBT), peningkatan investasi energi bersih, penguatan jaringan listrik pedesaan, serta reformasi tata kelola subsidi energi.

3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui integrasi dukungan logistik dan pengadaan bahan pangan lokal untuk sekolah, yang sekaligus menggerakkan sektor pertanian dan UMKM pangan lokal.
4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, melalui peningkatan anggaran pendidikan, reformasi kurikulum vokasi, digitalisasi pembelajaran, dan insentif investasi pendidikan teknologi.
5. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, terutama di daerah tertinggal, serta penguatan belanja kesehatan, infrastruktur layanan dasar, dan industri farmasi dalam negeri.
6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM, melalui peningkatan dana desa, digitalisasi dan pembiayaan usaha mikro, serta penyederhanaan regulasi untuk mendorong ekosistem wirausaha lokal.
7. Pertahanan Semesta, melalui industrialisasi pertahanan nasional, peningkatan belanja pertahanan strategis, serta riset teknologi pertahanan.
8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global, melalui deregulasi, penyederhanaan perizinan, optimalisasi perjanjian perdagangan internasional, serta fasilitasi ekspor UMKM dan produk unggulan lokal.

Selaras dengan strategi jangka panjang tersebut, pemerintah juga menetapkan strategi jangka pendek tahun 2026 yang diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan stabilitas fiskal nasional. Strategi ini mencakup:

- Stabilisasi ekonomi, melalui pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan kolaborasi fiskal-moneter untuk menjaga keseimbangan makroekonomi;
- Perlindungan terhadap dunia usaha dan daya beli masyarakat, dengan pemberian insentif fiskal, reformasi ekonomi, serta penguatan program perlindungan sosial;
- Menjaga kesehatan APBN, melalui efisiensi belanja, pengendalian defisit, dan penguatan cadangan fiskal untuk menjaga fleksibilitas fiskal.

Untuk memastikan keterukuran arah kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan sasaran makro ekonomi nasional tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan pada kisaran 5,2% – 5,8%, yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan program strategis pemerintah;
2. Penurunan Tingkat Kemiskinan menuju rentang 6,5% – 7,5%, melalui penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke rentang 4,44% – 4,96%, seiring peningkatan kesempatan kerja dan investasi;
4. Perbaikan Rasio Gini menjadi 0,377 – 0,380, sebagai upaya pengurangan kesenjangan dan mewujudkan keadilan sosial melalui distribusi pembangunan yang merata.

Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2026 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen responsif dalam memitigasi gejolak global dan tantangan domestik, melainkan bertindak sebagai fondasi kokoh bagi transformasi ekonomi Indonesia yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan strategis ini memuat koridor makro yang menjadi rujukan mutlak bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan dokumen perencanaan mereka secara vertikal. Melalui sinkronisasi yang presisi, setiap target pembangunan yang dirumuskan di tingkat pusat dapat diturunkan menjadi sasaran program yang operasional di daerah, guna memastikan seluruh potensi nasional bergerak seirama dalam mempercepat perwujudan kedaulatan pangan, energi, dan kemandirian ekonomi.

Bagi Kota Makassar, kerangka kebijakan nasional menjadi panduan krusial dalam mempertajam prioritas program pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 agar tetap

adaptif di tengah dinamika ekonomi terkini. Penyelarasan diimplementasikan melalui penguatan struktur ekonomi lokal yang tangguh, perluasan lapangan kerja formal, serta pemerataan pembangunan inter-wilayah kota demi menekan ketimpangan. Dengan mengintegrasikan agenda pusat ke dalam lokomotif pembangunan daerah termasuk optimalisasi sektor jasa, perdagangan, dan pemberdayaan ekonomi komunitas Kota Makassar tidak hanya berkontribusi aktif terhadap capaian target makro nasional, tetapi juga memastikan bahwa hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata, adil, dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dirancang sebagai respons strategis terhadap kompleksitas dinamika global dan tantangan domestik, dengan menitikberatkan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berakhlak serta penguatan infrastruktur berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan tangguh. Selaras dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2025–2029, kebijakan ini menjadi fondasi krusial dalam memperkuat sinergi pembangunan lintas wilayah, di mana Kota Makassar menempati posisi sentral sebagai lokomotif dan pusat pertumbuhan ekonomi utama. Penyelarasan dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 dengan arah kebijakan provinsi dipastikan akan mempercepat hilirisasi program-program strategis daerah, mengoptimalkan konektivitas infrastruktur wilayah peri-urban, serta membangun ketahanan ekonomi kota yang adaptif terhadap risiko ketidakpastian makroekonomi ke depan. Fokus utama dari arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 meliputi:

1. Hilirisasi Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau dan Biru Provinsi Sulawesi Selatan mendorong transformasi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui pendekatan hilirisasi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah. Tidak hanya terbatas pada kegiatan produksi primer, hilirisasi juga mencakup pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran produk, guna memperkuat ketahanan pangan serta menjadikan Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan (ekonomi hijau) dan ekosistem pesisir serta laut (ekonomi biru).
2. Penguatan Ekonomi dan Fiskal Daerah yang Modern dan Kompetitif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong digitalisasi ekonomi melalui penguatan UMKM digital, e-commerce, dan sistem perpajakan berbasis teknologi. Selain itu, dilakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi layanan pajak dan retribusi, peningkatan tata kelola APBD secara efisien dan transparan, serta pemberian insentif fiskal strategis untuk menarik investasi lokal dan asing.
3. Pengembangan Ekonomi Perdesaan dan Wilayah Terpencil Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal, pengembangan usaha mikro dan koperasi, serta pembangunan infrastruktur ekonomi produktif di wilayah dengan akses terbatas. Hal ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan wilayah, menurunkan tingkat pengangguran, serta menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
4. Peningkatan Infrastruktur dan Transportasi yang Terintegrasi dan Ramah Lingkungan Pembangunan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara secara terintegrasi diupayakan untuk memperlancar arus barang dan jasa antarwilayah. Investasi diarahkan pada proyek-proyek padat karya yang mendukung pemulihan ekonomi, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di tengah pertumbuhan ekonomi.

5. Penguatan Mitigasi Risiko dan Ketahanan terhadap Bencana Dalam menghadapi berbagai risiko bencana alam maupun non-alam seperti banjir, gempa bumi, pandemi, dan krisis iklim, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif terhadap aspek ketahanan dan mitigasi risiko. Ini dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan bencana, pembangunan infrastruktur tangguh, penguatan UMKM pasca-bencana, serta diversifikasi ekonomi lokal sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Melalui kerangka kebijakan ekonomi yang adaptif dan berbasis keberlanjutan, Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen penuh untuk mempererat sinergi pembangunan yang harmonis dan terintegrasi antara jajaran pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota di bawahnya. Dalam konstelasi ini, Kota Makassar memegang peran krusial sebagai simpul utama pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia yang wajib mentranslasikan arah kebijakan strategis provinsi ke dalam instrumen perencanaan lokal melalui dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026. Dengan mengoptimalkan keunggulan kompetitifnya di sektor perdagangan, jasa, dan industri kreatif, Kota Makassar diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi guna mengakselerasi pencapaian target makroekonomi serta memperkokoh ketahanan wilayah Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2026.

3.1.3 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

Perkembangan ekonomi makro Kota Makassar pada tahun 2026 mencerminkan interaksi yang dinamis antarkomponen utama pembangunan wilayah. Pertumbuhan ekonomi kota diproyeksikan tetap terjaga stabil yang didorong oleh kuatnya aktivitas sektor tersier seperti perdagangan dan jasa, sehingga secara langsung mengerek nilai Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita masyarakat ke tingkat yang lebih sejahtera. Di sisi lain, stabilitas daya beli dijaga ketat melalui pengendalian inflasi daerah yang konsisten oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Keberhasilan ekspansi ekonomi dan terjaganya stabilitas pasar yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, diharapkan mampu menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Makassar secara bertahap. Kondisi dan perubahan ekonomi makro Kota Makassar dapat dilihat dari penjabaran indikator-indikator ekonomi makro sebagai berikut:

3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Penggunaan komponen harga konstan (ADHK) sebagai basis penghitungan sangat krusial dalam perencanaan daerah, karena berfungsi untuk mengeliminasi faktor fluktuasi harga atau inflasi yang terjadi di pasar. Dengan demikian, angka persentase pertumbuhan yang dihasilkan benar-benar merefleksikan perubahan riil dari volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di Kota Makassar, bukan sekadar kenaikan nominal akibat perubahan harga.

a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1.
Realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Realisasi		Target	
	2025	2026 (TWI)	RPJMN 2026	RKP 2026
Indonesia	5,11	5,61	6,30	5,30 - 5,60

Sumber : BPS Kota Makassar, Rancangan Akhir Perubahan RKPD Sulsel Tahun 2026

Ekonomi Indonesia menunjukkan performa yang solid sepanjang tahun 2025 dengan mencatatkan laju pertumbuhan sebesar 5,10 persen. Momentum positif ini bahkan terakselerasi kuat pada triwulan I tahun berjalan, di mana realisasi pertumbuhan ekonomi berhasil menyentuh angka 5,61 persen. Capaian awal tahun yang impresif mencerminkan kokohnya konsumsi domestik dan aktivitas investasi yang terus bergerak maju di tengah dinamika perekomian global yang dinamis. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sebesar 5,30 – 5,60 persen. Target RKP dipatok sebagai sasaran jangka pendek yang realistis namun tetap optimistis untuk menjaga keberlanjutan tren pemulihan. Fokus kebijakan pada tahun tersebut diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi, mendorong hilirisasi, dan meningkatkan produktivitas nasional agar target tahunan ini dapat tercapai secara optimal. Di sisi lain perspektif pembangunan jangka menengah, target RKP 2026 tersebut sekaligus menjadi pijakan penting menuju sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan sebesar 6,30 persen. Angka RPJMN merupakan visi jangka panjang yang membutuhkan lompatan struktural yang lebih besar serta reformasi ekonomi yang mendalam. Sinergi antara realisasi pertumbuhan saat ini, target RKP, dan sasaran RPJMN diharapkan mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle-income trap*).

b. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.2.
Realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Pertumbuhan Ekonomi	Realisasi		Target	
	2025	2026 (TWI)	RPJMD Sulsel 2026	RKPD Sulsel 2026
Sulawesi Selatan	5,43	6,88	5,20 – 6,50	5,90 - 6,50

Sumber : BPS Kota Makassar, Rancangan Akhir Perubahan RKPD Sulsel Tahun 2026

Perekonomian Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif yang sangat signifikan memasuki awal tahun 2026. Setelah berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,43% sepanjang tahun 2025, angka tersebut melonjak tajam pada triwulan I tahun 2026 hingga mencapai 6,88%. Akselerasi di awal tahun ini mengindikasikan adanya stimulasi ekonomi yang kuat, baik dari sektor domestik maupun peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah. Pencapaian luar biasa di triwulan pertama bahkan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan. Dalam dokumen perencanaan tersebut, target pertumbuhan ekonomi untuk periode tahun 2026 berada pada kisaran 5,20% hingga 6,50%. Lompatan ke angka 6,88% membuktikan bahwa realisasi lapangan usaha di Sulsel bergerak lebih dinamis dan agresif daripada proyeksi moderat yang telah dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Sulawesi Selatan tetap perlu menjaga konsistensi

dan stabilitas makroekonomi agar selaras dengan target tahunan 2026 yang dipatok pada angka 5,90% hingga 6,50%. Momentum pertumbuhan yang tinggi di awal tahun ini harus dikawal dengan kebijakan yang tepat agar tidak mengalami perlambatan di triwulan berikutnya. Fokus pada pemerataan pembangunan dan penguatan daya beli masyarakat akan menjadi kunci utama dalam memastikan target akhir tahun dapat tercapai atau bahkan dilampaui dengan aman.

c. Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar

Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.3.
Realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Makassar

Pertumbuhan Ekonomi	Realisasi				Target		
	2023	2024	2025	2026 (TW I)	RPJMD Makassar 2026	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
Kota Makassar	5,31	5,56	5,34	6,61	6,43	6,43	5,73

Sumber : BPS Kota Makassar, Rancangan Akhir Perubahan RKPD Sulsel Tahun 2026

Kota Makassar menunjukkan resiliensi dan tren penguatan yang signifikan memasuki tahun 2026. Setelah berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34% sepanjang tahun 2025, perekonomian kota langsung tancap gas di awal tahun baru. Pada Triwulan I Tahun 2026, laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar melonjak tajam hingga mencapai angka 6,61%, mencerminkan gairah aktivitas domestik dan pemulihan sektor-sektor andalan yang bergerak lebih cepat dari perkiraan. Angka riil di awal tahun ini bahkan melampaui batas bawah dari target jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2026, yaitu pada kisaran 6,43%. Keberhasilan melewati indikator acuan ini membuktikan bahwa strategi stimulasi ekonomi daerah berjalan cukup efektif pada awal tahun.

Mengawali tahun dengan catatan impresif tidak membuat Pemerintah Kota Makassar terlepas dari tantangan berat akibat gejolak perekonomian global. Eskalasi konflik geopolitik Amerika Serikat-Iran yang memicu lonjakan harga minyak mentah dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kenaikan biaya energi serta logistik memaksa pemerintah daerah mengambil sikap yang lebih terukur. Oleh karena itu, target pertumbuhan ekonomi pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 disesuaikan menjadi sebesar 5,73%. Penyesuaian penurunan target dari angka fantastis Triwulan I maupun target awal RKPD pokok ini merupakan bentuk kalkulasi yang realistis dan konservatif guna mengantisipasi transmisi risiko eksternal terhadap stabilitas ekonomi daerah sepanjang sisa tahun berjalan.

Penyesuaian target pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh dinamika faktor penghambat dan pendorong pada sektor-sektor pembentuk struktur utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar. Di satu sisi, sektor perdagangan, transportasi, dan konstruksi dihadapkan pada hambatan berupa kenaikan biaya operasional akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi, pembengkakan harga bahan baku impor, serta potensi tertundanya proyek swasta akibat kehati-hatian investor dalam situasi volatilitas tinggi. Di sisi lain, sektor jasa khususnya MICE dan pariwisata serta industri pengolahan tetap memiliki faktor pendorong yang kuat berkat daya tahan aktivitas ekonomi domestik, tingginya mobilitas masyarakat lokal, serta keberlanjutan program penguatan rantai pasok pasokan pangan dan produk UMKM daerah.

Dari sisi agregat permintaan, komponen konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi jangkar utama penahan ketidakpastian. Konsumsi rumah tangga tertekan oleh risiko kenaikan harga barang konsumen yang berpotensi menggerus daya beli, namun

tetap tersokong oleh kuatnya belanja masyarakat pada momen-momen puncak keagamaan dan ajang tahunan daerah. Sementara itu, kinerja investasi dihadapkan pada tantangan biaya modal (cost of capital) yang lebih mahal akibat ketatnya kebijakan moneter global dan domestik. Namun, ekspansi investasi di Kota Makassar masih tertolong oleh daya tarik kota sebagai simpul logistik dan pusat jasa kawasan timur Indonesia yang terus dilirik oleh investor domestik.

Guna memastikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,73% dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat tercapai pada Semester II Tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar mengoptimalkan serangkaian strategi intervensi yang terfokus. Strategi utama diarahkan pada penguatan jaring pengaman sosial dan operasi pasar murah secara masif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka inflasi pangan. Selain itu, pemerintah kota menggenjot efisiensi dan percepatan penyerapan belanja modal APBD untuk merangsang sektor konstruksi dan perdagangan lokal, meningkatkan efisiensi kemudahan berinvestasi, serta mendorong optimalisasi program pemberdayaan ekonomi berbasis rumah tangga atau kelompok.

3.1.3.2 Pendapatan (PDRB) Per Kapita

Tabel III.4.
Realisasi dan Target PDRB Per Kapita Kota Makassar

PDRB Per Kapita (juta)	Realisasi			Target			
	2023	2024	2025	RPJMD Sulsel 2026 (Rp. Juta)	RPJMD Makassar 2026	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
Kota Makassar	155,95	165,95	176,28	80,5-84,9	186,75	187,56	184,71 – 197,17

Sumber : BPS Kota Makassar, Rancangan Akhir Perubahan RKPD Sulsel Tahun 2026

Capaian pendapatan per kapita Kota Makassar pada tahun 2025 tercatat sebesar 176,28 juta rupiah yang mencerminkan fondasi ekonomi kota yang kuat sekaligus menjadi titik tolak penting bagi akselerasi pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai pusat pertumbuhan utama di Kawasan Timur Indonesia, realisasi menunjukkan efektivitas aktivitas ekonomi lokal, meskipun tantangan penyesuaian target pasca evaluasi tetap harus diantisipasi guna menjaga momentum tren positif tersebut. Merespons dinamika penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026 melakukan penyesuaian arah kebijakan fiskal dan target makro. Target pendapatan per kapita tahun 2026 yang semula dipatok tunggal pada angka 187,56 juta rupiah, kini disesuaikan menggunakan metode rentang kendali menjadi 184,71 hingga 197,17 juta rupiah. Perubahan tersebut memberikan fleksibilitas strategis bagi pemerintah kota dalam menghadapi fluktuasi ekonomi, sekaligus tetap optimis mengejar batas atas pertumbuhan.

Jika disandingkan dengan dokumen perencanaan jangka menengah, target intervensi pada RKPD 2026, berada pada jalur yang selaras untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Periode 2025–2029. Dengan target RPJMD Kota tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 186,75 juta rupiah, rentang target baru di RKPD justru mengitari angka tersebut secara proporsional. Batas bawah sebesar 184,71 juta rupiah diproyeksikan sebagai bantalan evaluatif apabila transmisi gejolak makroekonomi global menekan sektor domestik, sementara batas atas sebesar 197,17 juta rupiah menjadi pijakan akselerasi optimal jika pemulihan

ekonomi berjalan lebih agresif. Adopsi kerangka rentang ini memastikan efektivitas mitigasi risiko tanpa mengorbankan visi kesejahteraan masyarakat jangka menengah.

Dasar utama dari penyesuaian target Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mengakar pada akselerasi aktivitas ekonomi kota yang kembali melaju pasca evaluasi kinerja semester awal tahun 2026. Sebagai hub perdagangan dan logistik regional, peningkatan perputaran barang dan jasa secara langsung menggerakkan roda perekonomian lokal. Intensifikasi interaksi ekonomi domestik termasuk melalui penguatan daya beli dan kelancaran alur distribusi secara kumulatif menaikkan nilai tambah ekonomi daerah. Peningkatan agregat pembentukan PDRB yang bergerak lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk inilah yang mendasari optimisme penyesuaian batas atas target PDRB per kapita. Faktor pendorong substantif lainnya adalah peningkatan produktivitas masyarakat yang terstimulasi oleh penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif perkotaan. Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara terintegrasi seperti optimalisasi program pemberdayaan koridor lokal, program Urban Farming, hingga Makassar Creativ Hub (MCH) serta proses awal aktivasi Koperasi Kelurahan Merah Putih di tingkat kelurahan telah mendorong transformasi tenaga kerja informal menjadi lebih produktif dan bernilai tambah. Ketika efisiensi kerja dan kapabilitas pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah meningkat, dampak redistribusinya secara agregat memberikan kontribusi nyata terhadap kenaikan rerata pendapatan riil per kapita warga Kota Makassar.

Selain produktivitas internal, arus investasi yang masif turut memberikan daya dukung struktural terhadap pembentukan PDRB kota. Kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kota Makassar baik pada sektor properti, infrastruktur komersial, pergudangan, maupun industri pengolahan menciptakan efek pengganda yang luas. Masuknya investasi baru tidak hanya menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan, tetapi juga meningkatkan skala output barang dan jasa regional serta memacu efisiensi rantai pasok daerah. Sinergi antara belanja modal publik dan realisasi investasi swasta ini menjadi fondasi utama dalam memperluas basis ekonomi daerah yang berkualitas.

Seluruh faktor pendorong tersebut bermuara pada performa unggul sektor-sektor utama pembentuk PDRB Kota Makassar, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan dan pendidikan, transportasi dan pergudangan, serta industri pengolahan. Penguatan kinerja pada sektor-sektor kunci ini terbukti tangguh dalam meredam tekanan volatilitas harga energi dan biaya logistik global. Dengan mengeksekusi strategi penajaman program prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar optimistis bahwa dinamika peningkatan aktivitas ekonomi, produktivitas warga, iklim investasi yang kondusif, dan ekspansi sektor unggulan akan menjaga capaian PDRB per kapita tetap berada pada koridor target yang ditetapkan

3.1.3.3 Inflasi

Tabel III.5.
Realisasi dan Target Inflasi Kota Makassar

Inflasi (%)	Realisasi				Target		
	2023	2024	2025	2026 (Mei)	RPJMD Makassar 2026	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026 (YoY/Mei)
Kota Makassar	2,89	1,19	2,69	3,00	1,77	1,77	1,77

Sumber : BPS Kota Makassar, Rancangan Akhir Perubahan RKPD Sulsel Tahun 2026

Perkembangan inflasi di Kota Makassar menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 laju inflasi tercatat sebesar 2,89%, yang kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 1,19% pada tahun 2024. Penurunan tajam tersebut mencerminkan keberhasilan awal dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa di tingkat daerah. Namun, tekanan inflasi kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 2,69%, menandakan adanya pemulihan aktivitas ekonomi yang disertai dengan peningkatan permintaan masyarakat atau adanya dinamika disrupsi pasokan komoditas tertentu. Memasuki pertengahan tahun 2026, tepatnya pada bulan Mei, angka inflasi Kota Makassar melonjak cukup tinggi hingga menyentuh angka 3,00%. Lonjakan tersebut menunjukkan adanya tekanan harga yang semakin kuat di pasar, sehingga memerlukan intervensi pengendalian yang lebih intensif dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dilihat dari struktur pembentuknya, tekanan inflasi pada pertengahan tahun 2026 sangat dipengaruhi oleh komoditas penyumbang utama. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor dominan, terutama didorong oleh lonjakan harga beras, aneka cabai (cabai rawit dan cabai merah), bawang merah, serta daging dan telur ayam ras. Selain faktor cuaca dan dinamika iklim lokal yang memengaruhi produktivitas wilayah sentra produksi pasokan, tekanan harga juga tereskalasi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan kenaikan tarif logistik darat dan laut. Kombinasi interdependensi pasokan pangan dari luar daerah dan pembengkakan biaya distribusi inilah yang memicu transmisi kenaikan harga secara tajam hingga ke tingkat pengecer di pasar-pasar tradisional Kota Makassar.

Merespons tekanan tersebut, TPID Kota Makassar secara konsisten telah mengeksekusi berbagai program pengendalian berbasis strategi kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Hasil evaluasi kinerja TPID hingga pertengahan tahun 2026 mencatat pencapaian positif dalam meredam gejolak harga yang berpotensi melompat lebih tinggi. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah secara masif, fasilitasi distribusi pangan dari daerah penghasil, serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan terbukti efektif dalam menyerap gejolak ekspektasi harga di tingkat konsumen. Tanpa intervensi terstruktur dari TPID tersebut, angka inflasi Mei 2026 diproyeksikan berisiko melampaui batas atas koridor sasaran nasional.

Secara khusus, perkembangan harga pangan strategis di sejumlah pasar utama Kota Makassar seperti Pasar Terong, Pasar Pa'baeng-baeng, dan Pasar Daya menunjukkan pergerakan yang dinamis namun dapat dipetakan pola perubahannya. Meskipun komoditas utama seperti beras premium dan hortikultura sempat menyentuh Harga Eceran Tertinggi (HET) akibat pengetatan pasokan dari daerah penyangga, pergerakan harganya perlahan dapat distabilkan memasuki akhir Triwulan II. Pemantauan berkala terhadap stok gudang distributor dan pencatatan rantai pasok harian menjadi instrumen krusial bagi pemerintah kota untuk melakukan penetrasi pasar secara presisi sebelum kenaikan harga komoditas strategis memicu dampak rambatan ke sektor barang dan jasa lainnya.

Di sisi lain, dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik RPJMD Kota Makassar tahun 2026 maupun RKPD tahun 2026 termasuk dokumen Perubahan 2026, menetapkan target makro inflasi yang identik, yaitu sebesar 1,77%. Target ini mencerminkan optimisme awal pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi pada level yang sangat rendah dan terkendali guna melindungi daya beli masyarakat. Namun, melihat realisasi bulan Mei 2026 yang sudah mencapai 3,00%, terdapat celah (gap) yang cukup lebar jika dibandingkan dengan asumsi dasar perencanaan tersebut. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu

menyelaraskan analisis proyeksi dan memperkuat landasan argumen intervensi kebijakan agar target akhir tahun dapat didekati secara terukur dan realistis.

Guna menekan laju inflasi pada sisa tahun 2026 agar dapat kembali melandai mendekati koridor target, Pemerintah Kota Makassar bersama TPID menetapkan langkah-langkah penanganan konkret dan terintegrasi hingga akhir tahun. Strategi yang ditempuh meliputi penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah penyangga bahan pangan di Sulawesi Selatan, intensifikasi Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) penguatan kapasitas cold storage daerah untuk mengamankan stok komoditas mudah membusuk, serta akselerasi pemanfaatan program Urban Farming masyarakat lokal. Selain itu, optimalisasi jaringan pasar tradisonal difungsikan sebagai jejaring distribusi pangan murah langsung ke warga. Rangkaian langkah taktis ini memberikan dasar terukur bahwa laju inflasi Kota Makassar pada akhir tahun 2026 dapat dikendalikan secara efektif demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.

3.1.3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.6.
Realisasi dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Realisasi			Target			
	2023	2024	2025	RPJMD Sulsel 2026	RPJMD Makassar 2026	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
Kota Makassar	10,60	9,71	9,60	3,64 – 4,03	9,53	9,53	9,53

Sumber : BPS Kota Makassar, Rancangan Akhir Perubahan RKPD Sulsel Tahun 2026

Kota Makassar menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka pengangguran di Makassar tercatat cukup tinggi, yaitu sebesar 10,60%. Namun, lewat berbagai program perluasan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 9,71% pada tahun 2024. Tren perbaikan berlanjut hingga tahun 2025 dengan penurunan ke angka 9,60%, yang mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi perkotaan mulai mampu menyerap tenaga kerja secara bertahap meskipun tantangan struktural masih ada. Jika disandingkan dengan dokumen perencanaan, Pemerintah Kota Makassar menetapkan target TPT dalam RPJMD Tahun 2026 sebesar 9,53%, yang identik dengan sasaran dalam RKPD murni maupun Perubahan RKPD Tahun 2026. Angka 9,53% mencerminkan sikap kehati-hatian sekaligus komitmen realistis, di mana penurunan dari realisasi 2025 (9,60%) dirancang bertahap agar selaras dengan kapasitas pertumbuhan ekonomi dan program pemberdayaan yang sedang berjalan. Namun terdapat kontras yang mencolok apabila target TPT Kota Makassar dibandingkan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang berada pada kisaran 3,64% hingga 4,03%. Perbedaan lebar tersebut bersumber dari karakteristik Makassar sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi utama. Sebagai kota metropolitan, Makassar menjadi magnet pencari kerja dari berbagai daerah hinterland di sekitarnya. Aglomerasi angkatan kerja ini menumpuk di area perkotaan, yang secara akumulatif membuat angka TPT perkotaan selalu jauh lebih tinggi daripada rata-rata provinsi yang turut ditopang oleh penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di kabupaten-kabupaten lain.

Dilihat dari dinamika kondisi ketenagakerjaan, pertumbuhan angkatan kerja di Kota Makassar melaju pesat seiring tingginya laju migrasi masuk spontan dan bonus demografi. Komposisi angkatan kerja perkotaan dominan diisi oleh usia muda dan lulusan pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Kondisi tersebut memicu tantangan mismatch (ketidaksesuaian) antara kualifikasi pasokan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja yang berakibat durasi masa tunggu bagi pencari kerja pemula menjadi relatif panjang, yang menyumbang porsi terbesar pada tingginya angka TPT perkotaan. Meskipun demikian perkembangan kesempatan kerja di Kota Makassar terus menunjukkan sinyal pemulihan yang solid. Pertumbuhan investasi daerah, yang didominasi penanaman modal dalam negeri menjadi mesin utama pembukaan lowongan kerja baru. Ekspansi sektor swasta di bidang perdagangan, perhotelan, restoran, dan jasa keuangan terbukti mampu melonggarkan tekanan pasar kerja. Terlebih lagi, pertumbuhan ekonomi kreatif dan digitalisasi gelombang baru turut membuka peluang kerja non-formal yang fleksibel, seperti pekerja mandiri berbasis platform dan freelancer, yang efektif menampung sebagian angkatan kerja terdidik.

Struktur penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar masih sangat didominasi oleh sektor tersier atau jasa-jasa, diikuti oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan skala kecil menengah. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi termasuk program pemberdayaan masyarakat lokal berkontribusi sebagai pilar utama penyerapan tenaga kerja di tingkat akar rumput. Sektor informal dan usaha mikro tersebut terbukti memiliki daya tahan yang tinggi dalam menyerap tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah, sehingga menjadi katup pengaman sosial yang mencegah lonjakan pengangguran drastis saat terjadi gejolak ekonomi.

Dari sisi intervensi kebijakan, efektivitas program penciptaan lapangan kerja Pemerintah Kota Makassar terus dioptimalkan secara terpadu. Implementasi program padat karya pembangunan infrastruktur wilayah, penyelenggaraan bursa kerja (job fair) berkala, hingga pelatihan vokasi berbasis kompetensi telah memangkas jarak antara pencari kerja dan pemberi kerja. Selain itu, integrasi program pelatihan kewirausahaan dengan akses permodalan skala mikro berhasil mendorong penciptaan wirausaha baru, yang tidak hanya menyelesaikan masalah pengangguran individu tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja tambahan bagi lingkungan sekitarnya.

Melihat realisasi tahun 2025 yang berada di angka 9,60%, peluang Kota Makassar untuk mencapai target RPJMD dan RKPD Tahun 2026 sebesar 9,53% sangat terbuka lebar karena hanya membutuhkan penurunan sebesar 0,07%. Angka target ini sangat rasional dan perlu dipertahankan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai titik tumpu perencanaan yang terukur. Guna memastikan target tersebut tercapai pada akhir tahun anggaran, Pemerintah Kota Makassar perlu menjaga konsistensi efektivitas program padat karya, penguatan iklim investasi, peningkatan kapasitas keterampilan tenaga kerja lokal, serta intervensi berkelanjutan pada sektor UMKM sebagai pilar penyerap tenaga kerja utama.

3.1.3.5 Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kota Makassar tahun 2025 menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejalan dengan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Persentase penduduk miskin Kota Makassar tercatat sebesar 4,43%, atau mengalami penurunan sebesar 0,54 poin persentase dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,97%. Penurunan ini menegaskan efektivitas berbagai intervensi pemerintah daerah, meskipun Garis Kemiskinan (GK) terus merambat naik dari Rp.592.753,- per kapita/bulan pada tahun 2024 menjadi Rp.610.536,- per kapita/bulan pada tahun 2025. Tantangan utama yang masih membayangi adalah karakteristik kemiskinan perkotaan yang bersifat

struktural, kerentanan pekerja sektor informal, serta mendesaknya peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial. Untuk itu, strategi penanggulangan kemiskinan berfokus pada penciptaan lapangan kerja formal, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan kualitas SDM, serta optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Secara konseptual, kemiskinan menggambarkan ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat, yang diukur dari ketidakcukupan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan, sandang, perumahan, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Fenomena tersebut mencakup dua dimensi utama, yaitu kekurangan materiil berupa kelangkaan barang dan jasa dasar, serta kekurangan dimensi sosial seperti keterkucilan sosial, ketergantungan, dan keterbatasan partisipasi publik. Kenaikan Garis Kemiskinan Kota Makassar sendiri dipicu oleh dua komponen utama, yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Komponen makanan memberikan kontribusi paling dominan, sehingga dinamika harga bahan pokok di pasar perkotaan berpotensi secara langsung menggeser batasan garis kemiskinan dan memengaruhi daya beli kelompok masyarakat rentan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program pada semester pertama tahun 2026, tren penurunan angka kemiskinan di Kota Makassar terindikasi tetap berada di jalur yang positif. Stabilitas harga pangan utama dan berjalannya berbagai program stimulus ekonomi lokal sepanjang enam bulan pertama tahun 2026 terbukti mampu menahan guncangan inflasi di tingkat rumah tangga miskin. Evaluasi pertengahan tahun ini menunjukkan bahwa kombinasi intervensi bantuan sosial darurat dan program pemberdayaan ekonomi mulai memperkuat ketahanan ekonomi warga, sehingga menekan risiko masuknya kelompok rentan ke bawah garis kemiskinan. Hasil evaluasi semester satu menjadi fondasi penting untuk mempertahankan dan mempercepat penanganan kemiskinan pada sisa tahun anggaran 2026.

Dilihat dari persebaran wilayahnya, kemiskinan di Kota Makassar tidak terdistribusi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada kantong-kantong kemiskinan perkotaan. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, kawasan permukiman kumuh, daerah pesisir, serta pulau-pulau terluar menjadi area dengan konsentrasi warga miskin terbanyak. Ketimpangan akses infrastruktur dasar, sanitasi, air bersih, serta keterbatasan peluang usaha formal di wilayah-wilayah marginal tersebut memperkuat jebakan kemiskinan struktural. Oleh karena itu, pendekatan penanganan kemiskinan di Makassar tidak lagi dapat dilakukan secara merata melainkan berbasis spasial dan kewilayahan yang menyasar langsung titik-titik persebaran kantong kemiskinan tersebut.

Dalam hal efektivitas program perlindungan sosial, Pemerintah Kota Makassar telah mengoptimalkan skema bantuan berbasis pemanfaatan DTSEN agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan. Berbagai program perlindungan sosial untuk kelompok rentan, disabilitas, dan lansia, yang diintegrasikan dengan intervensi stunting serta peningkatan gizi keluarga, terbukti efektif menjadi jaring pengaman sosial. Jaring pengaman secara langsung menjaga konsumsi rumah tangga terpencil dan sangat miskin agar tidak makin terpuruk akibat lonjakan harga barang kebutuhan pokok, sekaligus menjaga indeks kesehatan dan akses pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu.

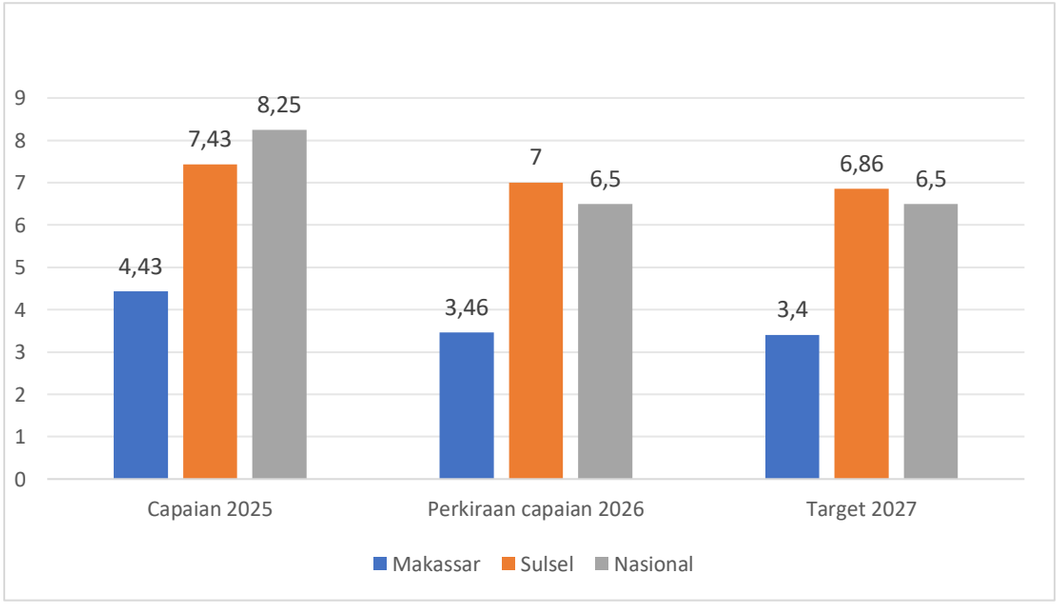
Sisi efektivitas pemberdayaan masyarakat, sinergi antara program pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan vokasi, penempatan tenaga kerja, hingga penataan kawasan kumuh menunjukkan dampak nyata terhadap kemandirian ekonomi warga. Pelatihan dan pendampingan usaha mikro terbukti meningkatkan produktivitas serta kapasitas pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah secara bertahap.

Transformasi dari penerima bantuan pasif menjadi pelaku usaha mandiri skala mikro menjadi kunci utama dalam memutus rantai ketergantungan bantuan sosial dan mempercepat pengentasan kemiskinan berbasis komunitas di tingkat kelurahan.

Perbandingan indikator makro menunjukkan posisi relatif kemiskinan Kota Makassar yang spesifik jika disandingkan dengan wilayah sekitarnya. Garis Kemiskinan Kota Makassar tahun 2025 sebesar Rp.610.536,- terhitung lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.514.958,- namun masih berada di bawah angka Nasional yaitu sebesar Rp.641.000,- sebuah cerminan dari tingginya biaya hidup di kawasan metropolitan. Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kota Makassar tahun 2025 mencatatkan angka yang sangat rendah yaitu 0,52%, jauh lebih baik jika dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 1,40%. Rendahnya nilai P_1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Makassar berada sangat dekat dengan garis kemiskinan, sehingga potensi mereka untuk keluar dari kemiskinan jauh lebih besar dan relatif lebih mudah diintervensi.

Sebagai langkah percepatan pencapaian target akhir tahun 2026 sebesar 3,46% yang dipasang lebih progresif dibanding target Provinsi Sulsel pada kisaran 6,5%–7,0% dan Nasional pada kisaran 7,0%–8,0%. Pemerintah Kota Makassar memfokuskan strategi pada tiga pilar utama. Pilar tersebut meliputi: (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial dan pemenuhan layanan dasar Pendidikan dan kesehatan, (2) peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan SDM diantaranya melalui Makassar Creative Hub serta (3) pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan lingkungan dan pemukiman secara terpadu. Dengan konsistensi eksekusi ketiga strategi ini pada Perubahan RKPD 2026, target penurunan kemiskinan Kota Makassar dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

Grafik III.1.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2025, Perkiran Capaian 2026 dan Proyeksi Tahun 2027



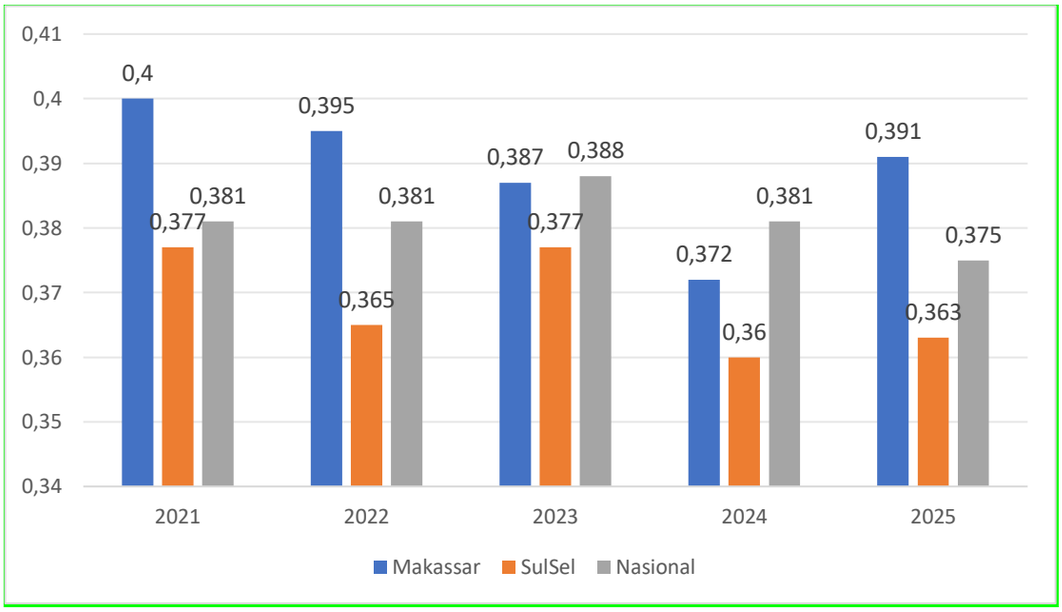
Sumber : BPS Kota Makassar, Rancangan Akhir Perubahan RKPD Sulsel Tahun 2026

3.1.3.6 Gini Ratio

Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di lapisan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat ketimpangan tersebut,

karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi. Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Grafik III.2.
Perkembangan Gini Rasio Kota Makassar,
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025

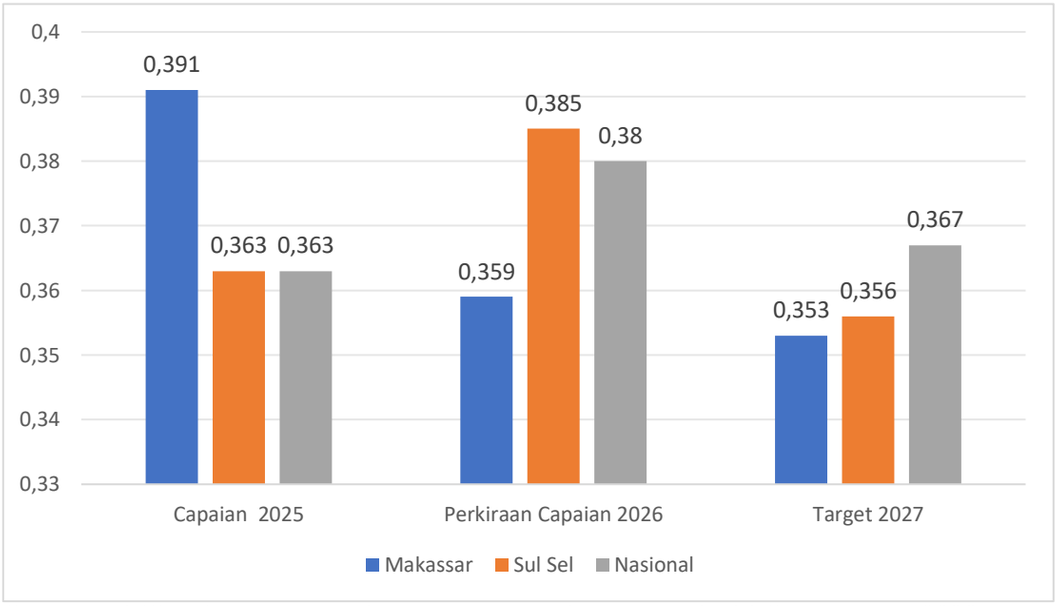


Sumber : BPS Kota Makassar, Rancangan Akhir Perubahan RKPD Sulsel Tahun 2026

Dinamika Gini Ratio di Kota Makassar mencerminkan fluktuasi ketimpangan distribusi pendapatan yang masih menjadi tantangan struktural bagi daerah. Pada tahun 2021, Gini Ratio tercatat sebesar 0,400, angka yang berada di atas capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,377. Memasuki tahun 2022, ketimpangan ini mengalami perbaikan dengan turun menjadi 0,395, meski posisinya masih lebih tinggi dibandingkan Gini Ratio Provinsi (0,365). Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 menjadi 0,387. Capaian tahun 2023 tersebut menempatkan Makassar pada posisi yang lebih baik dari rata-rata Nasional (0,388), namun masih tetap berada di atas capaian Sulawesi Selatan (0,377). Angka-angka ini mengindikasikan bahwa secara umum ketimpangan di Kota Makassar masih relatif tinggi, dan distribusi kesejahteraan belum sepenuhnya ideal.

Berdasarkan perkembangan data terbaru, tren perbaikan tersebut mengalami koreksi pada tahun 2025, di mana angka Gini Ratio Kota Makassar kembali merangkak naik ke posisi 0,391. Kenaikan ini mengkonfirmasi adanya anomali dalam praktik pembangunan ekonomi wilayah perkotaan; di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali tidak serta-merta diikuti oleh distribusi pendapatan yang inklusif. Isu ketimpangan pendapatan ini menjadi barometer krusial bagi kualitas keberhasilan pembangunan, karena pembangunan yang ideal mensyaratkan pertumbuhan tinggi yang dibarengi ketimpangan rendah. Menghadapi tantangan ini, Pemerintah Kota Makassar memproyeksikan upaya akseleratif yang serius, dengan menargetkan penurunan Gini Ratio secara signifikan hingga menyentuh angka 0,359 pada tahun 2026.

Grafik III.3.
Gini Rasio Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2025, Perkiraan Capaian 2026 dan Proyeksi Tahun 2027



Sumber : BPS Kota Makassar, Rancangan Akhir Perubahan RKPD Sulsel Tahun 2026

Tingginya angka ketimpangan di Kota Makassar sangat erat kaitannya dengan karakteristiknya sebagai kota metropolitan dan pusat pertumbuhan utama di Kawasan Timur Indonesia. Aglomerasi ekonomi dan derasnya arus modal cenderung menciptakan akumulasi kekayaan pada kelompok masyarakat kelas atas yang bergerak di sektor-sektor modern yang padat modal dan teknologi. Di sisi lain, kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang banyak terserap di sektor informal, perdagangan tradisional, dan usaha mikro mengalami pertumbuhan pendapatan yang jauh lebih lambat. Kesenjangan dalam kecepatan akumulasi aset antara kedua kelompok inilah yang terus mereproduksi ketimpangan yang lebih lebar dibandingkan rata-rata wilayah provinsi.

Perubahan fluktuatif Gini Ratio dari tahun ke tahun tersebut sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan ekonomi makro. Faktor pertama adalah tekanan inflasi pada kelompok barang kebutuhan pokok yang dampaknya dirasakan secara asimetris. Kenaikan harga pangan akan menggerus porsi daya beli dan pendapatan riil kelompok masyarakat bawah jauh lebih parah dibandingkan kelompok menengah ke atas. Faktor kedua adalah ketidakseimbangan kualifikasi tenaga kerja. Sektor-sektor yang berkontribusi tinggi terhadap PDRB seperti jasa keuangan, telekomunikasi, dan properti memberikan kompensasi upah yang tinggi, namun hanya dapat diakses oleh tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan dan keahlian spesifik. Selain itu faktor ketiga yang memengaruhi pergerakan Gini Ratio belakangan adalah proses transformasi digital dan pergeseran lanskap bisnis yang tidak merata. Pelaku usaha menengah dan besar yang memiliki akses permodalan perbankan dan adaptasi teknologi mampu menaikkan skala efisiensi dan memperluas pangsa pasar dengan sangat cepat. Sebaliknya, pelaku usaha ultra mikro, pedagang kecil, dan pekerja harian lepas seringkali terkendala oleh minimnya akses finansial dan literasi digital. Hambatan struktural di akar rumput inilah yang menyebabkan kue pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 belum sepenuhnya menetes ke bawah (trickle-down effect), sehingga memicu pelebaran kembali jarak pendapatan antar golongan.

Merespons akar permasalahan ketimpangan tersebut, kebijakan Pemerintah Kota Makassar dirancang dengan pendekatan afirmatif yang berfokus pada dua sisi: intervensi

pengeluaran dan intervensi pendapatan. Dari sisi intervensi pengeluaran, kebijakan difokuskan pada perluasan jaring pengaman sosial dan pemenuhan layanan dasar untuk meringankan beban hidup kelompok rentan. Hal ini diwujudkan melalui optimalisasi ketepatan sasaran bantuan sosial, perbaikan kualitas fasilitas kesehatan dasar, jaminan perlindungan bagi pekerja informal, serta memastikan akses pendidikan gratis yang berkualitas. Pengurangan beban pengeluaran mutlak diperlukan agar rumah tangga miskin memiliki ruang fiskal tambahan untuk menabung atau berinvestasi pada peningkatan gizi dan pendidikan anak.

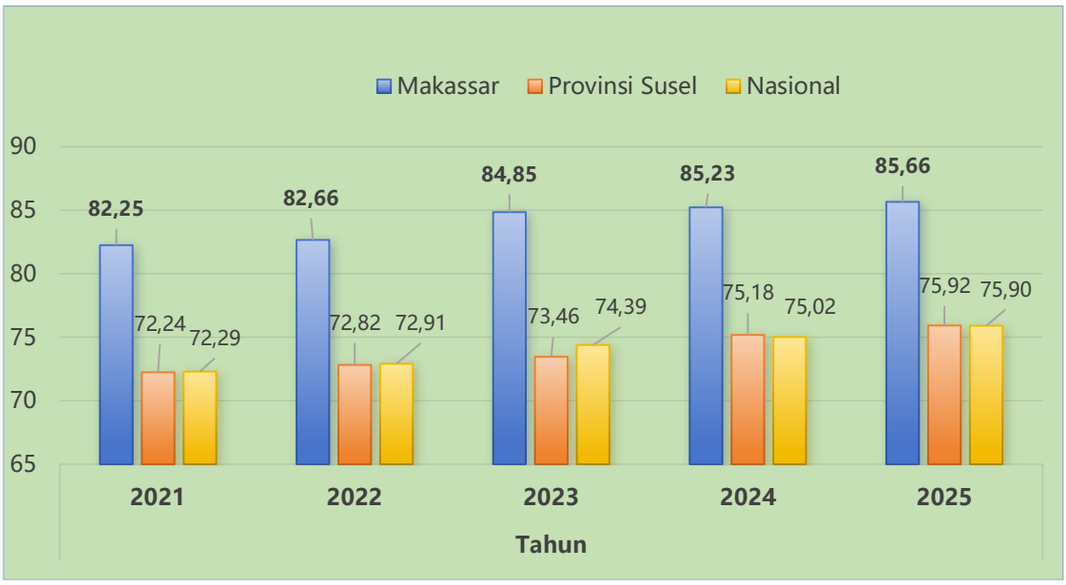
Pada sisi peningkatan pendapatan masyarakat, Pemerintah Kota Makassar mengandalkan strategi pemberdayaan ekonomi lokal yang inklusif untuk mengejar target ambisius 0,359 pada tahun 2026. Strategi ini dioperasionalkan melalui program-program unggulan seperti aktivasi ekonomi sirkular dan Urban Farming, serta penguatan akses permodalan kolektif melalui Perusahaan Daerah serta koperasi. Di samping itu, penyediaan ekosistem kolaborasi seperti Makassar Creative Hub dan masifnya pendampingan UMKM diharapkan dapat menaikkan daya saing usaha mikro. Melalui penguatan kemandirian ekonomi di tingkat komunitas ini, proporsi pendapatan kelompok terbawah akan meningkat, sehingga ketimpangan dapat ditekan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dapat terwujud.

3.1.3.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar yang konsisten berada pada kategori sangat tinggi bahkan menjadi yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah telah berada pada jalur yang tepat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM Kota Makassar merekam tren penguatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, IPM Makassar tercatat sebesar 82,25 dan terus merangkak naik menjadi 82,66 pada tahun 2022. Lompatan performa pembangunan manusia makin terakselerasi pada tahun 2023 hingga menembus angka 84,85, dilanjutkan dengan kenaikan konsisten menjadi 85,23 pada tahun 2024, dan menanjak ke angka 85,66 pada tahun 2025.

Capaian IPM sebesar 85,66 pada tahun 2025 tidak hanya mengukuhkan posisi Kota Makassar sebagai lokomotif pembangunan manusia di Sulawesi Selatan, tetapi juga menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan menempati peringkat ketujuh IPM tertinggi se-Indonesia. Keberhasilan tersebut mencerminkan tingginya efektivitas konvergensi program antar-Sektor dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Untuk mengawal capaian ini agar tetap berkesinambungan dan terakselerasi menuju target Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar 85,86, diperlukan analisis mendalam terhadap kontribusi dari empat indikator utama pembentuk IPM, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan.

Tabel III.7.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Makassar Prov.SulSel dan Nasional Tahun 2021 s.d 2025



Sumber : BPS Kota Makassar, Rancangan Akhir Perubahan RKPD Sulsel Tahun 2026

Dari dimensi kesehatan, indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir menjadi fondasi utama yang menggambarkan tingkat derajat kesehatan masyarakat Kota Makassar. Peningkatan UHH yang berkelanjutan disokong oleh makin meratanya akses layanan kesehatan dasar, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta keberhasilan intervensi penurunan angka stunting di tingkat kelurahan. Keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai, keterjangkauan program jaminan kesehatan daerah serta penguatan layanan promotif dan preventif di Puskesmas menjadi kunci penyokong utama yang menjaga kondisi fisik warga tetap sehat dan produktif sejak dini.

Pada dimensi pengetahuan, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mencerminkan jaminan akses pendidikan bagi generasi muda perkotaan untuk mengenyam jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Nilai HLS Kota Makassar yang tergolong tinggi didorong oleh kebijakan pembebasan biaya pendidikan dasar, penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai, serta pemberian beasiswa pendidikan bagi keluarga tidak mampu. Ketersediaan ragam lembaga pendidikan menengah hingga perguruan tinggi bereputasi di Makassar juga secara alami memotivasi anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang diploma dan sarjana, sehingga memperpanjang estimasi durasi sekolah anak-anak di Kota Makassar.

Masih dalam dimensi pengetahuan, indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan akumulasi modal manusia pada penduduk usia 25 tahun ke atas. Meningkatnya RLS di Kota Makassar menandakan perbaikan struktur tingkat pendidikan angkatan kerja perkotaan secara bertahap dari waktu ke waktu. Pemerintah Kota Makassar terus mengintervensi indikator ini melalui penguatan program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) untuk menekan angka putus sekolah di masa lalu, sekaligus memfasilitasi pelatihan vokasi berbasis kompetensi. Langkah ini efektif dalam menaikkan rata-rata tahun yang dihabiskan warga untuk menempuh pendidikan formal maupun informal.

Dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan, yang merefleksikan daya beli dan kapasitas ekonomi masyarakat. Kenaikan pengeluaran riil per kapita di Kota Makassar dipengaruhi oleh masuknya investasi, geliat pertumbuhan sektor industri jasa-perdagangan, serta keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang aktif memutar roda ekonomi lokal. Penguatan ekonomi

berbasis komunitas dan program pemberdayaan UMKM secara nyata meningkatkan pendapatan riil keluarga, sehingga memberikan ruang fiskal rumah tangga yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi non makanan yang lebih berkualitas.

Guna memastikan target IPM tahun 2026 sebesar 85,86 dapat terealisasi, Pemerintah Kota Makassar merumuskan strategi percepatan peningkatan kualitas SDM secara terintegrasi lintas sektor. Pada sektor kesehatan, strategi difokuskan pada optimalisasi integrasi layanan primer (ILP), pemenuhan gizi seimbang untuk pencegahan stunting lanjutan, dan peningkatan responsivitas penanganan penyakit menular maupun tidak menular. Di sektor pendidikan, strategi diarahkan pada pemerataan kualitas mutu sekolah, digitalisasi pembelajaran, penguatan sinergi antara kurikulum vokasi dengan kebutuhan industri lokal, serta intervensi khusus penanganan anak tidak sekolah (ATS) agar seluruh anak usia sekolah tertampung dalam sistem pendidikan.

Di sisi peningkatan standar hidup layak, Pemerintah Kota Makassar memperkuat strategi peningkatan daya beli melalui pengoperasian ekosistem bisnis inklusif, pendampingan akses permodalan UMKM, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas harga bahan pokok melalui sinergi TPID. Penguatan program perlindungan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional juga terus dioptimalkan agar kelompok masyarakat paling rentan tetap memiliki daya beli yang terjaga. Melalui kombinasi harmonis antara penguatan aspek kesehatan, perluasan akses pendidikan berkualitas, dan peningkatan pendapatan warga yang merata, target IPM Kota Makassar sebesar 85,86 pada akhir tahun 2026 optimistis dapat dicapai secara berkelanjutan.

3.2. Tantangan Perekonomian Daerah

Perekonomian Kota Makassar tidak berdiri terisolasi, melainkan sangat terintegrasi dengan lanskap geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Ketegangan geopolitik dunia yang memicu fragmentasi perdagangan, fluktuasi harga komoditas utama, serta ketatnya kebijakan moneter global menghadirkan risiko spillover berupa inflasi impor. Makassar sebagai kota metropolitan yang sangat bergantung pada kelancaran arus logistik, bahan baku industri pengolahan, dan pasokan barang konsumsi, gejolak ekonomi global berdampak langsung pada stabilitas harga internal. Dinamika tersebut menuntut respons kebijakan makro daerah yang agile dan adaptif agar guncangan eksternal tidak mentransmisikan kerentanan secara masif ke dalam perekonomian domestik.

Di tingkat nasional, dinamika dan pergeseran arah kebijakan fiskal memberikan implikasi langsung terhadap kapasitas ruang fiskal daerah. Penyesuaian skema Transfer ke Daerah (TKD) dan aturan tata kelola keuangan negara mengharuskan Pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal. Ketergantungan yang masih relatif tinggi terhadap dana transfer pusat menuntut daerah untuk melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara intensif tanpa merusak iklim usaha lokal. Selain itu, manajemen risiko fiskal daerah menjadi sangat krusial, di mana Pemerintah Kota Makassar harus cermat dalam melakukan alokasi anggaran belanja agar tetap memprioritaskan sektor-sektor produktif dan perlindungan sosial di tengah pembatasan serta reorientasi belanja negara.

Inflasi merupakan tantangan laten perekonomian perkotaan yang berdampak langsung pada tingkat kemiskinan dan daya beli masyarakat. Sebagai pusat konsumsi regional, inflasi di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh kelompok barang bergejolak, seperti beras, aneka cabai, dan daging, yang sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok dan dinamika cuaca. Kegagalan menekan laju inflasi dapat dengan cepat menggerus pendapatan riil masyarakat, terutama kelompok terbawah (marjinal), serta memicu kenaikan Garis Kemiskinan. Oleh karena itu, penguatan sinergi melalui Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta koordinasi pasokan antar-daerah menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas inflasi agar tetap berada pada koridor sasaran yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dari perspektif investasi dan kesempatan kerja, Kota Makassar dihadapkan pada persaingan ketat dalam menarik penanaman modal berorientasi padat karya. Meskipun realisasi investasi menunjukkan tren positif pada sektor perdagangan, real estate, dan jasa, sebagian besar investasi modern cenderung bersifat padat modal dan berteknologi tinggi. Kondisi tersebut menciptakan tantangan dalam penyerapan tenaga kerja lokal yang serapan utamanya masih didominasi oleh kualifikasi pendidikan menengah ke bawah. Guna mengantisipasi hambatan tersebut, Pemerintah Kota Makassar perlu mereformasi perizinan, memperkuat kepastian hukum, dan memberikan insentif kemudahan berinvestasi yang diimbangi dengan kewajiban kemitraan lokal guna mendorong penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan.

Dalam tataran spasial dan kewilayahan, kedudukan Makassar sebagai inti dari Kawasan Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar) menghadirkan tantangan integrasi dan aglomerasi yang kompleks. Sebagai pusat gravitasi ekonomi, Makassar menanggung beban eksternalitas negatif perkotaan, seperti alih fungsi lahan, kemacetan lalu lintas, peningkatan volume sampah, dan tingginya tekanan migrasi masuk pencari kerja dari kabupaten sekitar, namun integrasi tata ruang, konektivitas transportasi, dan tata kelola infrastruktur lintas batas wilayah dalam kerangka Mamminasata belum sepenuhnya berjalan padu. Mengatasi tantangan ini memerlukan penguatan kolaborasi inter pemerintah daerah guna menciptakan sinergi pembangunan wilayah yang saling menguntungkan.

Tantangan berikutnya bersumber dari akselerasi transformasi digital yang membawa disrupsi ganda pada lanskap ekonomi perkotaan. Di satu sisi, ekonomi digital membuka ruang tumbuhnya ekosistem kreatif, e-commerce, dan efisiensi transaksi keuangan daerah, namun di sisi lain ketidaksiapan literasi digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi di tingkat usaha mikro dapat memperlebar jurang kesenjangan. Pelaku UMKM konvensional yang lambat beradaptasi berisiko terlempar dari persaingan pasar global yang makin terintegrasi. Untuk itu, intervensi kebijakan melalui pendampingan digitalisasi usaha, digitalisasi pelayanan publik, serta penyediaan fasilitas pusat inovasi menjadi keharusan agar transformasi digital menjadi pendorong kesetaraan, bukan pemicu ketimpangan baru.

Perubahan iklim dan risiko bencana lingkungan menjadi tantangan non ekonomi yang berdampak sistemik terhadap kesinambungan pertumbuhan daerah. Fenomena cuaca ekstrem seperti El Niño dan La Niña berpotensi menimbulkan banjir rob, genangan di wilayah permukiman, hingga krisis pasokan air bersih dan gangguan rantai pasok pangan. Dampak fisik bencana ini tidak hanya merusak fasilitas umum dan menurunkan produktivitas ekonomi, tetapi juga secara langsung membebani anggaran daerah untuk penanggulangan darurat dan pemulihan infrastruktur. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Makassar harus mengintegrasikan prinsip pembangunan berketahanan iklim (climate resilience) dan mitigasi risiko ke dalam setiap perencanaan investasi publik demi menjaga ketahanan ekonomi daerah secara jangka panjang.

Di samping tantangan ekonomi makro dan lingkungan global, permasalahan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa Antang telah berkembang menjadi krisis ekologi dan beban fiskal yang sangat krusial bagi Kota Makassar. Kondisi TPA Antang yang kian mendekati ambang batas kapasitas penampungan tidak hanya memicu ancaman pencemaran lingkungan, penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar, dan risiko bencana kesehatan publik, tetapi juga berdampak langsung pada produktivitas ekonomi kota. Kegagalan tata kelola sampah

yang berkelanjutan berpotensi meningkatkan beban belanja daerah untuk penanganan dampak lingkungan, sekaligus memicu resistensi sosial yang mengganggu stabilitas iklim investasi dan pariwisata. Oleh karena itu, percepatan transformasi pengelolaan sampah dari sistem kumpul-angkut-buang menuju ekonomi sirkular, pemanfaatan teknologi pengolahan sampah modern berbasis energi seperti Waste-to-Energy/PSEL, serta optimalisasi bank sampah berbasis komunitas rumah tangga menjadi prioritas desakan yang mutlak dieksekusi guna menjaga daya dukung lingkungan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi perkotaan.

3.2.1. Aspek Eksternal

Perekonomian Kota Makassar sangat rentan terhadap transmisi dampak dari fenomena perlambatan ekonomi nasional. Sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pintu gerbang utama Kawasan Timur Indonesia, dinamika konsumsi serta aktivitas produksi di Kota Makassar berbanding lurus dengan tren ekonomi makro nasional. Ketika pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penyerapan yang melambat, daya beli masyarakat secara umum akan tertekan, yang pada gilirannya menekan volume permintaan barang dan jasa di tingkat lokal. Keterkaitan yang erat menyebabkan sektor-sektor unggulan perkotaan, seperti perdagangan eceran, transportasi, dan perhotelan, mengalami penurunan omzet yang berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja di sektor swasta.

Dinamika dan perubahan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat memberikan implikasi langsung yang sangat signifikan terhadap kapasitas belanja dan ruang gerak fiskal daerah. Penyesuaian skema Transfer ke Daerah (TKD), reorientasi prioritas anggaran nasional, serta kebijakan efisiensi belanja negara mengharuskan Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan penyesuaian postur APBD secara responsif. Ketergantungan daerah yang masih cukup besar terhadap dana transfer pusat menuntut optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur. Risiko fiskal dari pusat tersebut memaksa Pemrintah Kota Makassar untuk ekstra cermat dalam menetapkan skala prioritas pembangunan, agar efisiensi belanja negara tidak mengorbankan alokasi anggaran untuk program-program pemenuhan layanan dasar dan penanggulangan kemiskinan.

Tekanan inflasi pangan dari luar wilayah merupakan isu eksternal paling krusial yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi rumah tangga di Kota Makassar. Sebagai daerah otonom berkarakteristik penuh perkotaan dengan keterbatasan lahan pertanian, Makassar memiliki ketergantungan pasokan komoditas bahan pokok yang sangat tinggi dari daerah-daerah penyangga maupun impor antarpulau. Gangguan pasokan akibat faktor iklim di daerah produsen, kenaikan biaya logistik nasional, atau masalah distribusi antarwilayah akan memicu lonjakan harga pangan di pasar-pasar lokal Makassar. Kenaikan harga kebutuhan pokok berisiko langsung menggerus daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan menaikkan Garis Kemiskinan daerah.

Fluktuasi harga energi global dan nasional, seperti penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta tarif listrik, mentransmisikan guncangan ganda terhadap struktur biaya perekonomian kota. Dari sisi dunia usaha, kenaikan biaya energi secara otomatis meningkatkan biaya operasional industri pengolahan, penyedia jasa logistik, dan angkutan umum di Makassar, yang kemudian dibebankan kepada konsumen akhir melalui penyesuaian harga jual. Dari sisi rumah tangga, lonjakan biaya energi langsung mengurangi proporsi pendapatan riil warga yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan sekunder. Kondisi ini menuntut kecermatan Pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan kebijakan bantalan sosial guna memitigasi dampak penyesuaian harga energi nasional.

Dinamika perdagangan internasional dan antar-daerah turut membayangi kinerja sektor industri serta distribusi di Kota Makassar. Sebagai pusat pengumpulan (hub) komoditas ekspor unggulan Sulawesi Selatan seperti nikel, kakao, dan hasil laut, perubahan tarif perdagangan global, ketegangan rantai pasok dunia, serta fluktuasi nilai tukar mata uang asing berdampak langsung pada volume aktivitas di Pelabuhan Makassar (New Port). Penurunan permintaan pasar global terhadap produk ekspor regional akan menekan kinerja perusahaan eksportir yang beroperasi di Makassar, menurunkan aktivitas pergudangan, serta meredam laju pertumbuhan sektor jasa penunjang perdagangan di dalam kota.

Perkembangan dan pergeseran iklim investasi nasional memberikan tantangan tersendiri bagi daya saing Kota Makassar dalam menarik penanaman modal. Kebijakan moneter nasional, seperti fluktuasi suku bunga acuan yang memengaruhi biaya pinjaman, menjadi pertimbangan utama investor dalam melakukan ekspansi usaha. Di samping itu, adanya persaingan antar-wilayah di Indonesia dalam memperebutkan arus modal masuk menuntut Makassar untuk terus menjaga iklim investasi daerah agar tetap atraktif. Hambatan eksternal pada ketidakpastian iklim investasi dapat memperlambat masuknya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) baru yang sangat dibutuhkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Secara kumulatif, berbagai guncangan dari aspek eksternal tersebut bermuara pada peningkatan risiko fiskal dan ketidakpastian makro yang harus dikelola secara bijaksana oleh Pemerintah Kota Makassar. Kombinasi antara risiko penurunan penerimaan daerah dari TKD, potensi pembengkakan alokasi jaring pengaman sosial akibat inflasi pangan dan energi, serta perlambatan penyerapan tenaga kerja dari sektor swasta dapat mempersempit ruang gerak pembangunan. Oleh karena itu, dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar, mitigasi terhadap isu-isu eksternal ini harus diterjemahkan ke dalam penajaman alokasi belanja yang fleksibel, penguatan sinergi TPID, serta perlindungan ekstra terhadap sektor UMKM sebagai pilar penyangga ketahanan ekonomi kota.

3.2.2. Aspek Internal

Perkembangan indikator makro ekonomi Kota Makassar menunjukkan adanya tantangan berupa ketergantungan yang tinggi pada fluktuasi sektor-sektor tertentu serta ketimpangan antara laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasilnya. Meskipun pertumbuhan ekonomi kota secara absolut tercatat cukup tinggi, efektivitas penyerapan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menghadapi sumbatan. Ketimpangan antarwilayah kelurahan dan dinamika pergerakan angka Gini Ratio mencerminkan bahwa kue pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara inklusif. Kondisi ini menuntut penataan ulang struktur pertumbuhan agar lebih berkualitas dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dari perspektif kapasitas fiskal daerah Pemerintah Kota Makassar masih dihadapkan pada keterbatasan ruang gerak anggaran di tengah besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan perkotaan. Struktur APBD Kota Makassar masih menunjukkan ketergantungan yang relatif dominan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya teroptimalkan secara fleksibel akibat masih adanya kebocoran, keterbatasan digitalisasi transaksi retribusi di lapangan, serta basis data perpajakan daerah yang memerlukan pemutakhiran berkelanjutan. Keterbatasan kapasitas fiskal berimplikasi pada terbatasnya alokasi belanja modal yang bersifat transformatif dan jangka panjang.

Tantangan pada kualitas pelayanan publik internal masih diwarnai oleh isu efisiensi birokrasi, integrasi sistem digital, dan ketimpangan standar pelayanan antarwilayah. Meskipun berbagai inovasi pelayanan telah diluncurkan, fragmentasi aplikasi dan belum optimalnya interoperabilitas data antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kerap memicu iklim pelayanan yang lambat dan berbiaya tinggi. Masalah tata kelola sampah di TPA Tamangapa Antang yang mendekati ambang batas kapasitas (overcapacity), keterbatasan akses air bersih di wilayah pinggiran dan kepulauan, serta kemacetan lalu lintas merupakan cerminan dari tantangan pelayanan publik dasar yang membutuhkan penanganan sistemik dan terpadu.

Pada sektor investasi lokal, tantangan utama terletak pada belum optimalnya penciptaan ekosistem investasi yang kondusif bagi sektor-sektor padat karya. Sebagian besar arus modal masuk ke Kota Makassar masih terkonsentrasi pada sektor-sektor padat modal dan properti berteknologi tinggi yang memiliki daya serap tenaga kerja relatif terbatas. Hambatan prosedural, ketidakpastian tata ruang, serta belum maksimalnya integrasi layanan perizinan terpadu dengan kepastian hukum di tingkat lapangan menjadi kendala internal yang meredam minat investor skala menengah, kecil untuk melakukan ekspansi bisnis yang lebih masif. Sebagai tulang punggung PDRB Kota Makassar, produktivitas sektor jasa dan perdagangan menghadapi tantangan transformasi daya saing dan tingkat efisiensi. Sebagian besar pelaku usaha di sektor jasa masih didominasi oleh unit usaha berskala mikro dan informal dengan tingkat adopsi teknologi yang rendah, akses pembiayaan yang terbatas, serta manajemen usaha yang tradisional. Kondisi ini menyebabkan daya tahan dan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor jasa perkotaan belum optimal, sehingga rentan terhadap guncangan ekonomi dan ketatnya persaingan pasar digital yang kian masif.

Isu kemiskinan perkotaan di Kota Makassar memperlihatkan kompleksitas masalah yang bersifat struktural dan terpusat pada kantong-kantong pemukiman padat. Meskipun persentase penduduk miskin mengalami penurunan, keberadaan kemiskinan di kawasan kumuh, pesisir, dan pulau-pulau terluar masih diperberat oleh tingginya biaya hidup perkotaan. Hambatan internal seperti belum optimalnya pemutakhiran data sasaran bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di tingkat kelurahan menyebabkan beberapa program intervensi bantuan dan pemberdayaan masih menghadapi risiko exclusion dan inclusion error.

Tantangan pengangguran di Kota Makassar ditandai oleh tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang didominasi oleh angkatan kerja terdidik dan usia muda. Fenomena ini berakar dari masalah internal berupa mismatch (ketidaksesuaian) yang tajam antara kurikulum/keterampilan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan lokal dengan kualifikasi spesifik yang dibutuhkan oleh dunia industri dan pasar kerja perkotaan. Di samping itu, durasi masa tunggu pencari kerja pemula yang panjang serta belum optimalnya peran bursa kerja lokal menjadi sumbatan dalam penyaluran tenaga kerja secara efektif.

Dari aspek kualitas Sumber Daya Manusia Kota Makassar masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan antarwilayah. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia Makassar berada pada kategori tinggi, masalah laten seperti stunting pada anak, gizi buruk di kawasan padat penduduk, serta angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah di keluarga tidak mampu masih menjadi kerentanan serius. Tanpa perbaikan kualitas SDM yang merata, potensi bonus demografi perkotaan berisiko berubah menjadi beban sosial dibanding menjadi penggerak produktivitas ekonomi.

Secara keseluruhan, akumulasi dari berbagai permasalahan internal tersebut menegaskan perlunya reformasi tata kelola dan penajaman prioritas pembangunan

dalam Perubahan RKPD Kota Makassar. Konsolidasi perbaikan harus diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah, penyederhanaan birokrasi pelayanan publik, penguatan integrasi data kemiskinan dan ketenagakerjaan, serta peningkatan efektivitas belanja daerah. Hanya dengan menyelesaikan sumbatan-sumbatan internal tersebut Pemerintah Kota Makassar dapat memperkuat daya tahan daerah dan memastikan seluruh target indikator makro pembangunan dapat tercapai secara berkelanjutan.

3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Berdasarkan tantangan di atas, serta selaras dengan visi **"Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan"** dalam RPJMD 2025–2029, sinergi dengan Asta Cita Presiden dan RPJMN 2025–2029, arah kebijakan perekonomian Kota Makassar tahun 2026 disesuaikan sebagai berikut:

1. Penguatan Struktur Ekonomi dan Diversifikasi Sektor Bernilai Tambah

Kebijakan ini diambil untuk mengurangi risiko guncangan eksternal akibat perlambatan perdagangan global, dengan mengubah orientasi ekonomi dari sekadar "perdagangan" menjadi "produksi dan pengolahan". Hal ini sejalan dengan sasaran RPJMD untuk memperkuat struktur ekonomi yang beragam dan berdaya tahan. Langkah prioritas difokuskan pada hilirisasi komoditas unggulan Sulawesi Selatan, pengembangan ekonomi kreatif dan digital, serta mendorong UMKM naik kelas agar perannya dalam perekonomian semakin besar. Upaya konkret diantaranya:

- Transformasi ekonomi; dari sekadar pusat perdagangan menjadi **pusat produksi dan pengolahan**, dengan mempercepat hilirisasi komoditas unggulan Sulawesi Selatan (pertanian, perikanan, pertambangan) agar hasil daerah diolah di Makassar sebelum didistribusikan atau diekspor.
- Diversifikasi sektor unggulan: mengembangkan ekonomi kreatif, pariwisata budaya–bahari, dan ekonomi digital sebagai penggerak baru, serta mengintegrasikan rantai pasok antarwilayah Sulawesi untuk memperkuat posisi Makassar sebagai hub ekonomi kawasan.
- Peningkatan kelas UMKM: dukungan teknologi, manajemen, dan akses pasar agar UMKM mampu bersaing, berkontribusi besar pada PDRB, dan mengimbangi peran sektor formal.
- Optimalisasi potensi ekspor: peningkatan kualitas produk lokal sesuai standar internasional untuk menembus pasar luar negeri di tengah penurunan permintaan domestik.

2. Peningkatan Daya Saing Daerah dan Iklim Investasi yang Kondusif

Menyikapi keterbatasan anggaran daerah, investasi menjadi penggerak utama pembangunan. Kebijakan ini selaras dengan strategi RPJMD untuk menjadikan Makassar pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Fokus utamanya adalah menciptakan iklim usaha yang mudah, cepat, dan pasti, serta memberikan insentif bagi investasi yang menyerap tenaga kerja dan berorientasi ekspor, guna mengimbangi penurunan daya beli pasar domestik. Upaya konkret diantaranya :

- Penyederhanaan total perizinan berusaha berbasis sistem digital terintegrasi, dengan jaminan kepastian hukum dan transparansi untuk memangkas biaya serta waktu proses.
- Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal yang terarah bagi investasi di sektor prioritas: logistik terpadu, industri pengolahan bernilai tinggi, teknologi, dan pariwisata ramah lingkungan.

- Penataan ruang ekonomi terencana: penyediaan lahan usaha di kawasan strategis (pelabuhan, bandara, pusat distribusi) serta pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk menarik investasi besar dan penyerapan tenaga kerja.
- Promosi investasi yang agresif dan terpadu, menonjolkan keunggulan posisi geografis Makassar sebagai gerbang Kawasan Timur Indonesia.

3. Penguatan Kapasitas Fiskal dan Optimalisasi Keuangan Daerah

Kebijakan ini didasari kebutuhan menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan sumber daya, sesuai arah kebijakan keuangan daerah dalam RPJMD. Strategi utamanya adalah memaksimalkan pajak dan retribusi berbasis teknologi, mengelola aset secara produktif, melakukan kemitraan strategis, serta memprioritaskan anggaran pada program yang berdampak langsung pada ekonomi dan masyarakat, bukan belanja rutin yang kurang produktif. Upaya konkret diantaranya :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan: peningkatan akurasi data wajib pajak/retribusi berbasis teknologi, penggalian sumber pendapatan baru yang sah dan berkelanjutan, serta pengelolaan aset daerah secara produktif melalui kemitraan pemerintah–swasta.
- Efisiensi dan reposisi belanja: menekan belanja operasional tidak prioritas, mengalihkan alokasi ke program pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar yang berdampak langsung pada masyarakat.
- Pengelolaan utang dan keuangan yang akuntabel: menjaga batas aman utang, meningkatkan transparansi, dan memaksimalkan nilai manfaat setiap rupiah anggaran pembangunan.
- Target terukur: mengoptimalkan capaian PAD hingga mencapai Rp2,4 triliun pada tahun 2026.

4. Peningkatan Kualitas, Efisiensi, dan Keterjangkauan Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur adalah tulang punggung ekonomi. Kebijakan ini selaras dengan misi RPJMD untuk membangun infrastruktur yang terpadu dan berkeadilan. Fokus perubahan RKPD 2026 diarahkan pada penuntasan jalan utama, pengembangan pusat distribusi, serta pemerataan akses listrik dan air, dengan tujuan utama menurunkan biaya logistik dan mempercepat peredaran barang agar daya saing produk lokal meningkat. Upaya konkret diantaranya :

- Percepatan perbaikan jalan utama, jembatan, dan penerapan manajemen lalu lintas cerdas untuk kelancaran distribusi barang dan jasa.
- Pembangunan pusat distribusi terpadu dan jaringan logistik kota guna mengurangi ketergantungan pasokan antarpulau serta memotong rantai pasok yang panjang.
- Pemerataan akses infrastruktur dasar: listrik andal, air bersih, dan jaringan internet berkecepatan tinggi ke seluruh kawasan usaha dan permukiman untuk mendukung ekonomi digital dan industri.

5. Peningkatan Kualitas SDM, Produktivitas, dan Penyelarasan Pasar Kerja

Kualitas manusia adalah aset utama pembangunan sesuai visi RPJMD. Kebijakan ini bertujuan mengubah tantangan jumlah penduduk yang besar menjadi kekuatan ekonomi nyata. Penyesuaian dalam RKPD 2026 difokuskan pada penyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan sektor unggulan (industri, pariwisata, teknologi), kemitraan erat dengan dunia usaha, serta dukungan penuh terhadap kewirausahaan pemuda guna menciptakan lapangan kerja baru. Upaya konkret diantaranya:

- Penyelarasan kurikulum pendidikan dan pelatihan keterampilan dengan kebutuhan sektor unggulan (perdagangan, industri, jasa, pariwisata, teknologi), disertai sertifikasi kompetensi yang diakui nasional maupun internasional.
- Kemitraan erat pemerintah–dunia usaha–lembaga pendidikan untuk merancang program pelatihan yang tepat sasaran, serta menciptakan jalur penyerapan tenaga kerja terlatih.
- Pengembangan budaya kerja, manajemen usaha, dan daya inovasi melalui pendampingan teknis dan program peningkatan kualitas SDM berkelanjutan.
- Dukungan kewirausahaan pemuda dan ekonomi kreatif untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengubah kelebihan penduduk menjadi kekuatan produktif.

6. Pengendalian Inflasi, Ketahanan Pangan, dan Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Stabilitas harga dan kecukupan pangan adalah syarat mutlak pertumbuhan ekonomi inklusif. Kebijakan ini menjadi prioritas utama untuk menjawab tantangan daya beli yang melemah, sejalan dengan tujuan RPJMD menurunkan angka kemiskinan. Dalam perubahan RKPD 2026, penguatan peran TPID, pengembangan pertanian perkotaan, pemotongan rantai pasok, dan perlindungan sosial tepat sasaran menjadi program yang diperkuat alokasi dananya. Upaya konkret diantaranya :

- Penguatan kelembagaan TPID: pemantauan harga harian, pengamanan pasokan, dan intervensi pasar yang cepat dan tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
- Pengembangan pertanian perkotaan, perikanan budidaya, dan industri pangan lokal guna memperkuat ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan antarpulau, dan menekan biaya pangan.
- Revitalisasi pasar tradisional serta penyederhanaan rantai distribusi agar harga barang lebih terjangkau bagi masyarakat.
- Sinergi dengan program nasional (seperti Makan Bergizi Gratis) dan perlindungan sosial tepat sasaran bagi kelompok rentan, guna menjaga daya beli dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

7. Tata Kelola Ekonomi Berkelanjutan, Pengendalian Lingkungan, dan Ketahanan Bencana

Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan dan keselamatan, sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD. Kebijakan ini memasukkan aspek mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan ke dalam setiap rencana pembangunan infrastruktur dan kawasan ekonomi. Penyesuaian dalam RKPD 2026 menekankan pada pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan pesisir, ekonomi sirkular, dan pembangunan kawasan ekonomi yang aman dari risiko bencana. Upaya konkret diantaranya :

- Penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota sesuai RTRW, melindungi kawasan ekonomi dan pemukiman dari risiko banjir, genangan, dan abrasi pesisir.
- Pengintegrasian aspek mitigasi bencana dalam setiap perencanaan dan pembangunan infrastruktur serta kawasan ekonomi, agar pembangunan tahan goncangan.
- Penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi sirkular: mendorong usaha ramah lingkungan, pengelolaan sampah terpadu, dan pelestarian lingkungan pesisir sebagai aset pariwisata dan kenyamanan berusaha.
- Peningkatan penegakan peraturan daerah terkait lingkungan, tata ruang, dan persaingan usaha guna menciptakan iklim ekonomi yang tertib, sehat, dan berkelanjutan.

Dengan arah kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya merespons setiap tantangan eksternal dan internal secara spesifik, tetapi juga menjamin kesinambungan dengan tujuan jangka menengah daerah, sehingga pembangunan ekonomi Makassar tahun 2026 tumbuh lebih kuat, berdaya saing, merata, dan berkelanjutan.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai respons terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro, dinamika fiskal nasional dan daerah, serta hasil evaluasi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sampai dengan pertengahan tahun berjalan. Perubahan kebijakan dilakukan untuk memastikan target pendapatan daerah tetap realistis, terukur, dan mampu mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah secara optimal. Selain itu, pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2026 merupakan bagian dari implementasi awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2026–2029 yang telah ditetapkan sebagai pedoman pembangunan daerah. Seiring dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah, diperlukan penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan daerah agar selaras dengan kebutuhan pendanaan pembangunan serta mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah mempertimbangkan perkembangan realisasi penerimaan daerah, perubahan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan, serta berbagai faktor eksternal yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Hal ini dilakukan agar arah kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan transfer, serta penguatan sistem pengelolaan pendapatan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Makassar berupaya menjaga kesinambungan fiskal daerah, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, serta memastikan tersedianya sumber pendanaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

3.3.2. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2026

3.3.2.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Makassar pada semester pertama Tahun Anggaran 2026 menunjukkan performa yang cukup progresif, di mana per tanggal 30 Juni 2026, pemerintah kota berhasil membukukan capaian sebesar Rp.2.130.605.237.967,83, angka realisasi tersebut setara dengan 45,28% dari total target Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan pada APBD Pokok 2026 sebesar Rp.4.705.102.485.000,00.

Kinerja dan performa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar ditargetkan sebesar Rp.2.329.144.956.000,00 hanya mampu membukukan realisasi senilai Rp.913,223,042,857.29 atau 39,21%, dengan rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah mencapai senilai Rp.814.099.773.270,91 atau 39,64%, Pendapatan Retribusi Daerah mencapai senilai Rp.32.954.619.613,00 atau sebesar 18,74%. Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai senilai Rp.19.036.500.679,00 atau sebesar 38,07%, dan Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencapai senilai Rp.47.132.149.294,38 atau sebesar 95,58%. Melihat kondisi pencapaian tersebut, untuk

Perubahan Pendapatan Daerah pada Postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2026 mengalami beberapa penyesuaian dalam hal penetapan target. Penyesuaian target pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berdasarkan Realisasi Dividen yang telah diterima pada Tahun Anggaran 2026 atas Penyertaan Modal pada BUMD, BUMN dan Perusahaan Swasta. Penyesuaian target tersebut sesuai usulan Dividen dari beberapa BUMD atas Laba Tahun 2025 yang akan disetorkan pada Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian proyeksi pendapatan transfer antar daerah dilakukan berdasarkan dari nilai realisasi penerimaan yang telah diterima pada tahun anggaran 2026

Dalam Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026, Pendapatan Asli Daerah dilakukan penyesuaian dengan beberapa pertimbangan khususnya kemampuan realisasi pada Triwulan II di Tahun 2026. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari beberapa sumber mengalami penyesuaian. Pajak Daerah tetap sebesar Rp.2.053.987.697.000,00 dari target APBD Pokok Tahun 2026 sebesar Rp.2.053.987.697.000,00. Retribusi Daerah bertambah Rp.11.000.000.000,00 atau sebesar 6,26%, dari target APBD Pokok Tahun 2026 menjadi Rp.186.847.759.000,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menurun Rp.17.645.592.836,00 atau berkurang sebesar 35,29% dari target APBD Pokok Tahun 2026 menjadi Rp.32.354.407.164,00. Adapun untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tetap sebesar Rp.49.309.500.000,00 dari target APBD Pokok Tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi dan proyeksi realistis paruh pertama tersebut, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 disesuaikan secara rasional menjadi Rp.2.322.499.363.164,00. Formulasi baru ini merefleksikan kontraksi atau penurunan yaitu sebesar Rp.6.645.592.836,00 atau hanya berkurang 0,29% dari target awal pada APBD Pokok. Langkah penyesuaian volume ini diambil untuk menjaga kredibilitas perencanaan penganggaran serta memastikan ruang fiskal daerah tetap akuntabel dalam mendanai program prioritas hingga akhir tahun anggaran.

3.3.2.2. Perubahan Pendapatan Transfer

Pencapaian Pendapatan Transfer dibukukan hingga per tanggal 30 Juni 2026 senilai Rp.1.190.321.659.565,54 dari target sebesar Rp.2.375.957.529.000,00 dengan rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat senilai Rp.1.118.966.434.462,00 atau sebesar 55,17% dan Pendapatan Transfer antar Daerah senilai Rp.71.355.225.103,54 atau sebesar 20,52%. Dalam Perubahan APBD Kota Makassar tahun 2026, Pendapatan Transfer juga mengalami penurunan 5,50% atau sebesar Rp.130.027.677.000,00, walaupun Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat bertambah 0,69% atau sebesar Rp.13.963.665.000,00. Hal ini mencerminkan adanya ketetapan alokasi dana dari pusat untuk mendukung program dan kegiatan di Kota Makassar.

Pendapatan Transfer Antar Daerah mencakup dana yang ditransfer antara pemerintah daerah. Transfer Antar Daerah/Pemerintah Provinsi mengalami penurunan target pendapatan sebesar Rp.143.991.342.000,00 atau 41,41% menjadi Rp.203.708.658.000,00 dari Rp.347.700.000.000,00.

Selaras dengan penyesuaian tersebut, instrumen Pendapatan Transfer pada Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 juga mengalami koreksi menurun sebesar Rp.130.027.677.000,00 atau berkurang 5,50% dari pagu awal, hal ini menyesuaikan regulasi skema bagi hasil daerah. Penurunan volume transfer fiskal tersebut menuntut optimalisasi alokasi belanja daerah dan penajaman prioritas program

guna memitigasi dampak pengurangan kapasitas fiskal terhadap target pembangunan yang telah ditetapkan.

3.3.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ditargetkan dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2026–2029 karena karakteristik penerimaannya yang tidak rutin dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, baik pada Dokumen RKPD Tahun 2026 maupun Perubahan RKPD Tahun 2026 kelompok pendapatan ini tidak ditetapkan target penerimaannya. Target pajak daerah tidak mengalami perubahan karena telah mempertimbangkan realisasi sampai semester pertama dan potensi penerimaan pada semester kedua.

Rencana Perubahan Target Pendapatan Daerah, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel III.8.
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	TARGET RPJMD TAHUN 2026	APBD TAHUN 2026	PARSIAL III	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7 = (6-4)	8
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**2,206,350,556,000.00**	**2,329,144,956,000.00**	**2,329,144,956,000.00**	**2,322,499,363,164.00**	**(6,645,592,836.00)**	**(0.29)**
4.1.1	Pajak daerah	1,954,987,697,000.00	2,053,987,697,000.00	2,053,987,697,000	2,053,987,697,000.00	-	-
4.1.2	Retribusi daerah	174,847,759,000.00	175,847,759,000.00	175,847,759,000	186,847,759,000.00	11,000,000,000.00	6.26
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	27,205,600,000.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000	32,354,407,164.00	(17,645,592,836.00)	(35.29)
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	49,309,500,000	49,309,500,000.00	49,309,500,000	49,309,500,000.00	-	-
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2,695,751,271,000.00**	**2,365,993,864,000.00**	**2,375,957,529,000.00**	**2,235,966,187,000.00**	**(130,027,677,000.00)**	**(5.50)**
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2,528,751,271,000.00	2,018,293,864,000.00	2,028,257,529,000	2,032,257,529,000.00	13,963,665,000.00	0.69
4.2.2	Transfer Antar Daerah	167,000,000,000.00	347,700,000,000.00	347,700,000,000	203,708,658,000.00	(143,991,342,000.00)	(41.41)
4.3	**LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
4.3.3	Lain Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		**4,902,101,827,000.00**	**4,695,138,820,000.00**	**4,705,102,485,000.00**	**4,558,465,550,164.00**	**(136,673,269,836.00)**	**(2.91)**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar, Tahun 2026

3.3.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026 disusun sebagai Upaya strategis terhadap perkembangan kondisi fiskal daerah, evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan semester pertama tahun berjalan, penyesuaian ini dilakukan untuk melakukak akselerasi pemenuhan target – target pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2026–2029. Kebijakan ini juga mempertimbangkan dinamika ekonomi, sosial, dan kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang sehingga diperlukan penyesuaian alokasi anggaran agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Perubahan belanja daerah diarahkan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan belanja yang bersifat wajib *(mandatory spanding)* dan mengikat, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mendukung pelaksanaan program prioritas daerah yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perubahan belanja dilakukan sebagai bentuk optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan daerah dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan.

Sejalan dengan visi pembangunan Kota Makassar yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029, fokus utama kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 di arahkan pada prinsip efisiensi yang berkeadilan, efektivitas berbaisis dampak langsung dan keberpihakan pada Masyarakat (inkusivitas). Komitmen keberpihakan ini secara khusus diwujudkan melalui pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan mutu dan aksesibilitas layanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik yang ramah dan aman melalui infrastruktur kota yang ramah disabilitas.Oleh karena itu, penyesuaian belanja daerah dilakukan melalui realokasi anggaran terhadap kegiatan yang kurang optimal serta yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, dan juga penguatan pendanaan pada program-program strategis yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan Prioritas Nasional.

Untuk Arah Kebijakan Belanja Daerah, sesuai Peraturan Perundang-Undangan Kebijakan Belanja Daerah Kota Makassar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja wajib dan serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Belanja Prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat (Mandatory Spending): Menjamin alokasi anggaran secara penuh untuk pos belanja yang bersifat wajib dan mengikat, guna menjaga stabilitas operasional pemerintahan dan kepatuhan terhadap regulasi nasional;
2. Penganggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah;
3. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat;
4. Penajaman prioritas terhadap program dan kegiatan yang mendukung pengentasan kemiskinan, pemerataan jaminan kesehatan, serta penciptaan lingkungan kota yang aksesibel bagi penyandang disabilitas;
5. Belanja diprioritaskan juga pada Program/Kegiatan yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan kepada pelaku UMKMpengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan pendapatan, serta

penciptaan lingkungan yang kondusif;

6. Peningkatan Kapasitas Penyediaan Sarana Prasarana Infrastruktur perkotaan yang ramah disabilitas.

Proyeksi Belanja Daerah disusun untuk memberikan gambaran kebutuhan pendanaan yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Penyusunannya dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis belanja, mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat (mandatory spending), ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kemampuan keuangan daerah sehingga mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Menilik pada Kebijakan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan pencapaian target kinerja dari setiap program dan kegiatan, maka Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.5.258.317.800.074,96 atau naik 1,61% senilai Rp.83.178.980.074,96 dari target Belanja Daerah pada RKPD Pokok Tahun 2026 sebesar Rp 5,175.138.820.000,00.

Komponen Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026, terdiri dari Belanja Operasional naik sebesar 3,19% atau senilai Rp.133.325.588.483,66 dengan rincian yaitu Belanja Pegawai menurun senilai Rp.73.567.027.972,04 atau sebesar 3,87%, Belanja Barang dan Jasa naik 9,62% atau senilai Rp. 200.304.425.659,70, dan Belanja Hibah naik 3,31% atau senilai Rp. 6.588.190.796.00.

Sementara itu, Belanja Modal secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 5,14% atau senilai Rp.50.146.608.408,70 dimana hampir semua komponen Belanja Modal mengalami pertambahan. Belanja Modal Tanah bertambah 42,52% atau sebesar Rp.9.660.934.520,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah 4,55% atau sebesar Rp.10.811.340.399,00. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi bertambah 0,91% atau sebesar Rp.2.653.343.943,30. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah 0,88% atau sebesar Rp.113.466.900,00.

Adapun untuk dua komponen Belanja Modal lainnya mengalami kontraksi, yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurun senilai 17,62% atau senilai Rp.69.777.590.891,00. Belanja Modal Aset Lainnya menurun senilai 23,87% atau sebesar Rp.3.608.103.280,00.

Jika dilihat dari tabel proporsi Belanja Daerah dibawah, Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan fiskal yang sesuai dengan regulasi nasional. Hal ini tercermin dari alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik yang telah disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024, serta tetap memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Meskipun proporsi belanja pegawai dalam Perubahan APBD Tahun 2026 tercatat sebesar 29,92%, hal tersebut masih mencerminkan upaya penyesuaian yang rasional, mengingat perhitungan ini belum termasuk komponen tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, dan tunjangan profesi guru sebagaimana dikecualikan dalam ketentuan pasal 146 ayat (2).

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2026 diarahkan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran yang inklusif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat melalui fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja daerah diprioritaskan secara konsisten penyelarasan agenda dan mandat nasional melalui dukungan terhadap pencapaian Asta Cita, yang meliputi : a. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan

mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

2. Penganggaran belanja daerah diprioritaskan untuk pemenuhan urusan pemerintah berdasarkan undang- undang yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang meliputi: a.pendidikan, b.kesehatan, c.pekerjaan umum dan penataan ruang, d.perumahan rakyat dan kawaasan Pemukiman, e.ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, dan f. sosial. Serta Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar: a. tenaga kerja, b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, c. pangan, d. pertanahan, e. lingkungan hidup, f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, g. pemberdayaan masyarakat dan desa, h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana, i. perhubungan, j. komunikasi dan informatika, k. koperasi, usaha kecil dan menengah, l. penanaman modal, m. kepemudaan dan olahraga, n. statistik, o. persandiaan, p. kebudayaan, q. perpustakaan, dan r. Kearsiapan;
3. Penganggaran belanja daerah diprioritaskan untuk pemenuhan urusan pemerintah berdasarkan undang- undang Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar melalui penganggaran secara proporsional untuk bidang: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.
4. Penganggaran belanja daerah diprioritaskan untuk secara konsisten melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk urusan Pemerintahan Pilihan diselenggarakan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki meliput: a. kelautan dan perikanan, b. pariwisata, c. pertanian, d. perdagangan, dan e. perindustrian;
5. Penganggaran Belanja Daerah untuk mewujudkan Program Prioritas Kepala Daerah sesuai dengan target kinerja sasaran daerah pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2026-2029;
6. Penganggaran belanja daerah untuk kebutuhan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja perangkat daerah pada semester I;
7. Efesiensi Pengeluaran Belanja yang bersifat umum pada masing-masing kegiatan di Perangkat Daerah dengan memperhatikan target kinerja, besaran pagu, jumlah personil serta kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat;
8. Melakukan analisis dan pengendalian secara berkala terhadap Progres Belanja Modal pada masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhatikan

kesesuaian Dokumen pendukung utama khususnya dokumen Perencanaan, serta Rentan Waktu Pengadaan dan Pelaksanaan sehingga Kegiatan pada Belanja Modal pada masing-masing perangkat Daerah lebih optimal dan Efesiensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Melakukan analisis dan pengendalian secara berkala terhadap Progres Barang dan Jasa pada masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhatikan urgensitas, Efektivitas dan Efesiensi pada output dan target kegiatan serta yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat;
10. Mengalokasikan penganggaran belanja daerah untuk mendukung percepatan program strategis PSEL. Fokus anggaran diarahkan pada penguatan tata kelola persampahan dari hulu hingga hilir termasuk didalamnya penyesuaian belanja bahan bakar pada kendaraan operasioanl persampahan akibat kenaikan harga bahan bakar non subsidi, penyediaan infrastruktur penunjang, pembenahan sistem TPA Tamangapa menjadi *sanitary landfill,* serta fasilitasi kerja sama aglomerasi regional demi tercapainya target pengurangan sampah kota yang bersih dan berkelanjutan.
11. Pengembangan Program *Urban Farming* di 5 (lima) Lokasi yang bertujuan menjadi pusat edukasi, demonstrasi, dan pengembangan sektor pertanian yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan;
12. Membangun *Makassar Creative Hub* sebagai wadah kreatifitas, pengembangan *skill*, dan *Co-Working Space* bagi generasi muda;
13. Penganggaran Belanja Daerah untuk program Konektivitas dan layanan Kesehatan wilayah kepaulauan (pete–pete laut dan ambulans laut) bagi masyarakat pulau;
14. Penganggaran Belanja Daerah untuk pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh;
15. Penganggaran Belanja Daerah untuk mendukung Optimalisasi Sarana Prasarana Pelayanan Publik dan Olahraga melalui pembangunan stadion;
16. Penganggaran Belanja Daerah untuk mendukung program nasional Koperasi Merah Putih melalui penyediaan sarana dan prasarana Koperasi Merah Putih di 3 (tiga) lokasi, dan
17. Penyesuaian belanja gaji PPPK Paruh Waktu.

Hal diatas dapat kita lihat pada Tabel III.9 di bawah ini :

Tabel III.9.
Target Perubahan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	TARGET RPJMD TAHUN 2026	APBD TAHUN 2026	PARSIAL III	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026*	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7 = (6-4)	8
02.01	**BELANJA OPERASIONAL**	**4,116,788,735,646.90**	**4,184,978,930,437.00**	**4,187,768,601,841.00**	**4,318,304,518,920.66**	**133,325,588,483.66**	**3.19**
02.01.01	Belanja Pegawai	1,989,911,677,755.00	1,902,436,103,737.00	1,887,599,638,686	1,828,869,075,764.96	(73,567,027,972.04)	(3.87)
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1,969,020,391,226.90	2,083,243,981,900.00	2,100,870,118,355	2,283,548,407,559.70	200,304,425,659.70	9.62
02.01.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
02.01.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
02.01.05	Belanja Hibah	157,856,666,665.00	199,298,844,800.00	199,298,844,800	205,887,035,596.00	6,588,190,796.00	3.31
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
02.02	**BELANJA MODAL**	**959,672,876,353.10**	**975,159,889,563.00**	**982,333,883,159.00**	**925,013,281,154.30**	**(50,146,608,408.70)**	**(5.14)**
02.02.01	Belanja Modal Tanah	31,300,571,047.00	22,719,717,980.00	32,380,652,500	32,380,652,500.00	9,660,934,520.00	42.52
02.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141,972,138,033.00	237,760,439,354.00	238,805,302,246	248,571,779,753.00	10,811,340,399.00	4.55
02.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	431,188,612,930.00	396,020,592,940.00	393,098,664,626	326,243,002,049.00	(69,777,590,891.00)	(17.62)
02.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	343,337,089,061.10	290,694,949,121.00	290,101,945,619	293,348,293,064.30	2,653,343,943.30	0.91
02.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,941,498,942.00	12,847,318,168.00	12,847,318,168	12,960,785,068.00	113,466,900.00	0.88
02.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1,932,966,340.00	15,116,872,000.00	15,100,000,000	11,508,768,720.00	(3,608,103,280.00)	(23.87)
02.03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**30,000,000,000.00**	**15,000,000,000.00**	**15,000,000,000.00**	**15,000,000,000.00**	**-**	**-**
	Belanja Tidak Terduga	30,000,000,000.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	-	
02.04	**BELANJA TRANSFER**	-	**-**		**-**	**-**	**-**
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	-	**-**		**-**	**-**	**-**
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	**-**		**-**	**-**	**-**
JUMLAH BELANJA DAERAH		**5,106,461,612,000.00**	**5,175,138,820,000.00**	**5,185,102,485,000.00**	**5,258,317,800,074.96**	**83,178,980,074.96**	**1.61**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar, Tahun 2026

Tabel III.10.
Belanja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD
Kota Makassar Tahun Anggaran 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD TAHUN 2026	PARSIAL III	RKPD PERUBAHAN TAHUN 2026	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	Dinas Pendidikan	1.266.385.237.861,00	1.261.947.737.961,00	1.242.850.500.000,00	(23.534.737.861,00)	(1,86)
2	Dinas Kesehatan	632.800.000.000,00	631.790.065.029,00	665.640.400.000,00	32.840.400.000,00	5,19
3	Dinas Pekerjaan Umum	628.564.546.191,00	645.284.770.379,00	652.735.084.473,00	24.170.538.282,00	3,85
4	Dinas Penataan Ruang	37.905.917.680,00	36.722.655.920,00	33.466.400.000,00	(4.439.517.680,00)	(11,71)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	59.650.021.799,00	58.569.871.095,00	61.157.800.000,00	1.507.778.201,00	2,53
6	Satuan Polisi Pamong Praja	42.941.790.730,00	42.865.711.340,00	43.307.300.000,00	365.509.270,00	0,85
7	Dinas Pemadam Kebakaran	53.954.198.300,00	52.688.311.500,00	53.771.847.246,00	(182.351.054,00)	(0,34)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38.127.619.855,00	37.951.232.255,00	39.205.500.000,00	1.077.880.145,00	2,83
9	Dinas Sosial	25.074.008.600,00	24.449.147.880,00	26.550.800.000,00	1.476.791.400,00	5,89
10	Dinas Ketenagakerjaan	45.175.774.040,00	44.977.286.540,00	46.779.000.000,00	1.603.225.960,00	3,55
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perl. Anak	24.012.324.900,00	24.310.578.600,00	21.353.400.000,00	(2.658.924.900,00)	(11,07)
12	Dinas Ketahanan Pangan	20.963.781.793,00	20.590.125.093,00	20.270.300.000,00	(693.481.793,00)	(3,31)
13	Dinas Pertanahan	21.542.142.323,00	19.686.283.983,00	17.930.375.372,00	(3.611.766.951,00)	(16,77)
14	Dinas Lingkungan Hidup	120.000.000.000,00	152.018.056.170,00	158.782.848.367,00	38.782.848.367,00	32,32
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.903.187.998,00	25.457.725.857,00	30.921.200.000,00	5.018.012.002,00	19,37
16	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	28.307.972.580,00	36.365.682.090,00	35.052.200.000,00	6.744.227.420,00	23,82
17	Dinas Perhubungan	168.941.414.856,00	167.632.678.546,00	172.471.363.028,00	3.529.948.172,00	2,09
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	80.492.405.687,00	79.614.121.687,00	80.822.040.695,00	329.635.008,00	0,41
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.084.501.350,00	22.487.802.890,00	23.460.100.000,00	375.598.650,00	1,63
20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	22.394.902.191,00	21.934.399.391,00	23.393.200.000,00	998.297.809,00	4,46
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	120.749.807.202,00	119.926.703.280,00	80.310.300.000,00	(40.439.507.202,00)	(33,49)
22	Dinas Kebudayaan	26.399.997.585,00	26.650.866.525,00	31.112.100.000,00	4.712.102.415,00	17,85
23	Dinas Perpustakaan	10.147.570.907,00	10.020.525.007,00	10.321.400.000,00	173.829.093,00	1,71
24	Dinas Kearsipan	14.304.393.888,00	13.963.154.508,00	16.470.400.000,00	2.166.006.112,00	15,14
25	Dinas Perikanan dan Pertanian	59.199.999.503,00	56.481.789.263,00	48.853.400.000,00	(10.346.599.503,00)	(17,48)
26	Dinas Pariwisata	53.836.872.504,00	52.824.785.124,00	54.762.300.000,00	925.427.496,00	1,72
27	Dinas Perdagangan	30.634.843.100,00	28.928.197.133,00	28.867.500.000,00	(1.767.343.100,00)	(5,77)
28	Sekretariat Daerah	266.735.240.120,00	260.330.729.575,00	298.290.350.000,00	31.555.109.880,00	11,83
29	Sekretariat DPRD	184.516.207.900,00	182.314.622.500,00	225.327.497.813,00	40.811.289.913,00	22,12
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.547.454.335,00	33.512.050.613,00	35.510.902.000,00	(1.036.552.335,00)	(2,84)
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	70.880.000.000,00	66.314.704.936,00	57.967.000.000,00	(12.913.000.000,00)	(18,22)
32	Badan Pendapatan Daerah	126.229.879.925,00	125.463.228.025,00	120.848.900.000,00	(5.380.979.925,00)	(4,26)
33	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDMD	35.749.164.800,00	35.383.252.925,00	37.130.200.000,00	1.381.035.200,00	3,86
34	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	15.703.999.529,00	14.956.719.529,00	15.475.700.000,00	(228.299.529,00)	(1,45)
35	Inspektorat Daerah	38.362.985.900,00	37.214.725.740,00	36.555.600.000,00	(1.807.385.900,00)	(4,71)
36	Kecamatan Biringkanaya	54.798.911.076,00	54.206.314.676,00	54.293.832.437,00	(505.078.639,00)	(0,92)
37	Kecamatan Bontoala	41.313.855.500,00	41.255.829.085,00	39.697.376.526,00	(1.616.478.974,00)	(3,91)
38	Kecamatan Makassar	52.170.302.250,00	51.891.302.250,00	52.884.701.841,00	714.399.591,00	1,37
39	Kecamatan Mamajang	46.997.947.781,00	46.914.346.296,00	44.987.631.797,00	(2.010.315.984,00)	(4,28)
40	Kecamatan Manggala	46.619.078.302,00	46.417.220.902,00	47.178.365.212,00	559.286.910,00	1,20
41	Kecamatan Mariso	35.300.521.300,00	35.122.097.660,00	34.018.200.000,00	(1.282.321.300,00)	(3,63)
42	Kecamatan Panakkukang	57.247.258.000,00	57.026.241.805,00	57.503.289.232,00	256.031.232,00	0,45

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD TAHUN 2026	PARSIAL III	RKPD PERUBAHAN TAHUN 2026	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
43	Kecamatan Rappocini	55.784.314.000,00	55.473.168.940,00	55.299.640.963,00	(484.673.037,00)	(0,87)
44	Kecamatan Tallo	56.222.267.326,00	55.615.932.276,00	55.155.390.598,00	(1.066.876.728,00)	(1,90)
45	Kecamatan Tamalanrea	46.172.948.000,00	45.942.610.818,00	46.486.000.000,00	313.052.000,00	0,68
46	Kecamatan Tamalate	59.816.623.410,00	59.551.986.222,00	58.759.200.000,00	(1.057.423.410,00)	(1,77)
47	Kecamatan Ujung Pandang	42.386.002.620,00	42.267.451.720,00	42.035.645.395,00	(350.357.225,00)	(0,83)
48	Kecamatan Ujung Tanah	35.353.903.753,00	35.094.256.301,00	34.082.584.608,00	(1.271.319.145,00)	(3,60)
49	Kecamatan Wajo	34.653.758.000,00	34.459.058.000,00	33.322.415.372,00	(1.331.342.628,00)	(3,84)
50	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	17.365.741.240,00	16.024.930.200,00	16.552.757.047,00	(812.984.193,00)	(4,68)
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.715.221.510,00	36.209.438.960,00	38.335.560.052,96	1.620.338.542,96	4,41
TOTAL BELANJA		**5.175.138.820.000,00**	**5.185.102.485.000,00**	**5.258.317.800.074,96**	**83.178.980.074,96**	**0,54**

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Anggaran & Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA), Tahun 2026

Pada Tabel III.10 dapat dilihat proyeksi besaran Belanja Daerah pada Perangkat Daerah Kota Makassar pada Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 mengalami peningkatan senilai Rp.83.178.980.074,96 atau sebesar 0,54% dari jumlah Belanja Daerah pada RKPD Tahun 2026.

3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Ketentuan dalam Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat bersumber dari:

a. SILPA;
b. pencairan Dana Cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan Pinjaman Daerah;
e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.4.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk APBD perubahan Tahun 2026 dilakukan penyesuaian Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) sesuai dengan Perhitungan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar tahun 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 mencatatakan Penerimaan Pembiayaan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) senilai Rp.699,852,249,910.96 dan ini juga sekaligus merupakan

Pembiyaan Netto untuk Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026.

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang digunakan untuk menutup defisit atau mengelola surplus dalam anggaran. Pada APBD Perubahan Kota Makassar Tahun 2026, jumlah pembiayaan netto mengalami Peningkatan sebesar 45,80%, dari Rp.480,000,000,000.00 pada APBD Pokok menjadi Rp.699,852,249,910.96. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Bertambahnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), yang bertambah sebesar Rp.219,852,249,910.96. Tidak ada penerimaan dari sumber lain seperti pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, atau pinjaman daerah, sehingga pembiayaan netto sepenuhnya bergantung pada SILPA. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk penyesuaian anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih hati-hati untuk menjaga keseimbangan fiskal.

3.3.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Pada Perubahan APBD Kota Makassar Tahun 2026, defisit ini disesuaikan dengan Hasil Audit BPK-RI pada komponen pembiayaan sisa lebih pengunaan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) dari Rp 480,000,000,000.00 pada APBD Pokok menjadi Rp 699,852,249,910.96 pada APBD Perubahan, yang berarti peningkatan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 219,852,249,910.96 atau 45,80%.

Struktur Pembiayaan daerah pada APBD Kota Makassar pada P-RKPD Tahun 2026 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.11.
Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Makassar Tahun 2026

NO	URAIAN	TARGET RPJMD TAHUN 2026	APBD TAHUN 2026	PARSIAL III	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026*	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7=(6-4)	8
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	209.359.785.000,00	480.000.000.000,00	480.000.000.000,00	699.852.249.910,96	219.852.249.910,96	45,80
6.1.01	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)	209.359.785.000,00	480.000.000.000,00	480.000.000.000,00	699.852.249.910,96	219.852.249.910,96	45,80
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang udangan	-	-	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	-	-	-	-	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	-	-	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan	-	-	-	-	-	-
6.2.01	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PEMBIYAAN NETTO		204.359.785.000,00	480.000.000.000,00	480.000.000.000,00	699.852.249.910,96	219.852.249.910,96	45,80

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, 2026



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

bappeda.makassarkota.go.id

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026 merupakan periodisasi tahunan kedua dari RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa penyusunan RKPD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta sasaran dan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026, didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Permendagri 86 Tahun 2017 mengamanahkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud, menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2025, mengamanatkan, penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026 memperhatikan visi, misi, dan Program Kepala Daerah, serta hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Makassar Tahun 2026, dirumuskan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029 serta kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015- 2034. Perubahan RKPD Tahun 2026 mengacu kepada permasalahan pembangunan dan hasil evaluasi kinerja RKPD dan Renja SKPD Tahun 2025, dan menjabarkan kebijakan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta harus memperhatikan prioritas pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. RKP Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. RPJMD Provinsi Sulawesi-Selatan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 025-2029. Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Makassar tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, rah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagai penjabaran pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mewujudkan visi dan mendukung pelaksanaan misi Pembangunan daerah tahun 2025-2029. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kota Makassar tahun 2026 merupakan tahun kedua dari proses pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai visi pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 "**Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan**".

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar yang hendak dilaksanakan dinyatakan dalam rumusan 5 Misi, 12 Tujuan dan 25 Sasaran, sebagai berikut:

Misi 1: **"Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja",** dengan 2 (dua) Tujuan:

1.1. Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi.

Tujuan ini diturunkan ke dalam 2 (dua) Sasaran sebagai berikut:

1.1.1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah

1.1.2. Meningkatnya Kesempatan Kerja, dan Pendapatan Masyarakat

1.2. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah

Tujuan ini diturunkan ke dalam 3 (tiga) Sasaran sebagai berikut:

1.2.1. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah

1.2.2. Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan

1.2.3. Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar

Misi 2: **"Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing",**

dengan 1 (satu) Tujuan:

2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tujuan ini diturunkan ke dalam 3 (tiga) Sasaran sebagai berikut:

2.1.1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

2.1.2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

2.1.3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Misi 3: **"Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan".**

dengan 1 (satu) Tujuan:

3.1. Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata.

Tujuan ini diturunkan ke dalam 2 (dua) Sasaran sebagai berikut:

3.1.1. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi

3.1.2. Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Misi 4: **"Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata".**

dengan 2 (dua) Tujuan:

4.1. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Tujuan ini diturunkan ke dalam 2 (dua) Sasaran sebagai berikut:

4.1.1. Meningkatnya Penguasaan IPTEK
4.1.2. Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan
4.2. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata
Tujuan ini diturunkan ke dalam 3 (tiga) Sasaran sebagai berikut:
4.2.1. Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan
4.2.2. Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya
4.2.3. Meningkatnya Kuantitas dan Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif

Misi 5: "Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum".

dengan 2 (dua) Tujuan:
5.1. Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif
Tujuan ini diturunkan ke dalam 1 (satu) Sasaran sebagai berikut:
5.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah
5.2. Meningkatnya Kualitas Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban umum.
Tujuan ini diturunkan ke dalam 2 (dua) Sasaran sebagai berikut:
5.2.1. Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat
5.2.2. Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat

Misi 6: "Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga".

dengan 2 (dua) Tujuan:
6.1. Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender
Tujuan ini diturunkan ke dalam 3 (tiga) Sasaran sebagai berikut:
6.1.1. Menurunnya Ketimpangan Gender.
6.1.2. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak
6.1.3. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga
6.2. Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran
Tujuan ini diturunkan ke dalam 2 (dua) Sasaran sebagai berikut:
6.2.1. Menurunnya Disparitas Pendapatan
6.2.2. Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas

Misi 7: "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana".

dengan 2 (dua) Tujuan:
7.1. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari
Tujuan ini diturunkan ke dalam 1 (satu) Sasaran sebagai berikut:
7.1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
7.2. Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Tujuan ini dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran sebagai berikut:
7.2.1. Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Tujuan dan sasaran Pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program Pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan program Pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran tercapainya indikator, dalam rangka mencapai misi. Tujuan dan sasaran Pembangunan menjadi dasar dalam mengukur kinerja Pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran Pembangunan pada tahun 2026 sesuai RPJMD 2026-2029 adalah sebagai berikut :

Dari *cascading* visi dan misi menjadi tujuan dan sasaran, dapat diketahui bahwa

visi dan misi pemerintah Kota Makassar diturunkan menjadi 12 (dua belas) tujuan dengan 12 (dua belas) indikator tujuan dan 25 (dua puluh lima) sasaran dengan 38 (tiga puluh delapan) indikator sasaran. Adapun *Cascading* tujuan, sasaran dan indikator serta target pembangunan daerah tahun 2026, disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.1.
Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2026

Visi: Makassar Unggul, Inklusif, Amanah, dan Bekelanjutan		
No	**Misi/Tujuan/ Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD**
Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja		
1.1	Tujuan: Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1.1.1	Sasaran: Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (%)
1.1.2	Sasaran: Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
		PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)
1.2	Tujuan: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah
1.2.1	Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)
1.2.2	Sasaran: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Tingkat Inflasi (%)
		Indeks Ketahanan Pangan
1.2.3	Sasaran: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
2.1	Tujuan: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2.1.1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan
2.1.2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)
2.1.3	Sasaran: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan.		
3.1	Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata	Indeks Layanan Infrastruktur

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD
3.1.1	Sasaran: Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan
		Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan
3.1.2	Sasaran: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%)
Misi 4 : Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata		
4.1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah
4.1.1	Sasaran: Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi
4.1.2	Sasaran: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah (%)
4.2	Tujuan: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB (%)
4.2.1	Sasaran: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara
		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan
4.2.2	Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Takbenda (%)
		Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan (%)
4.2.3	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif (Industri)
		Persentase Industri Ekonomi Kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital (%)
Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum		
5.1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi
5.1.1	Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK
5.2	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.2.1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)

No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD
5.2.2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kota Toleran
Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan Dan Perlindungan Perempuan, Anak, Dan Penyandang Disabilitas, serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga		
6.1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga
6.1.1	Sasaran: Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender
6.1.2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak
6.1.3	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda
		Indeks Pembangunan Keolahragaan
6.2	Tujuan: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran	Tingkat Kemiskinan%
6.2.1	Sasaran: Menurunnya Disparitas Pendapatan	Gini Rasio
6.2.2	Sasaran: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Misi 7 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana		
7.1	Tujuan: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
7.1.1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air
		Indeks Kualitas Udara
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan
		Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
7.2	Tujuan: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana
7.2.1	Sasaran: Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kota Makassar Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Strategi dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2026-2029 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Kementerian

Dalam Negeri juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, yang juga perlu dipedomani dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2026.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2026 adalah **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".** Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

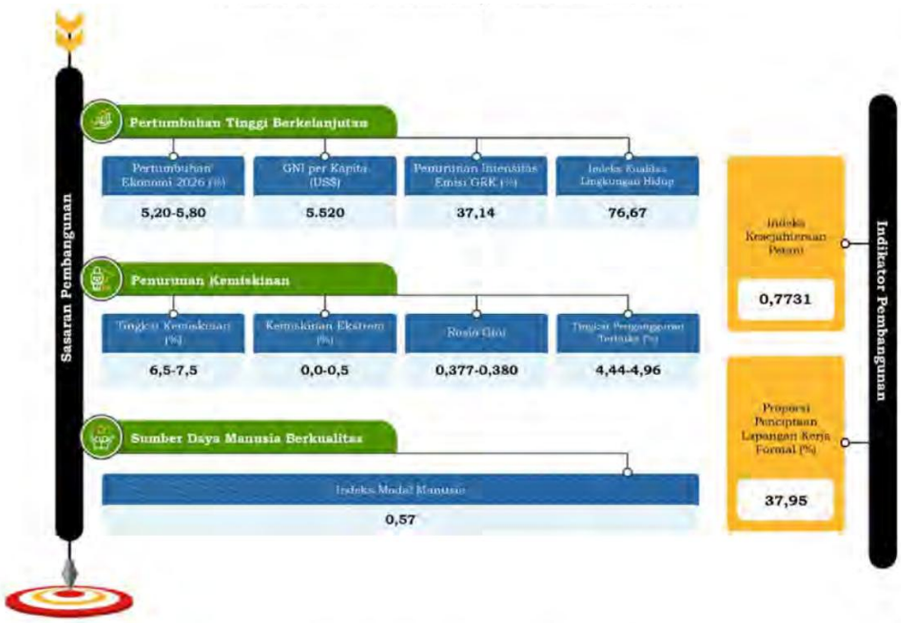
Gambar IV.1.
Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026



Sumber: Rencana Kerja Pemrintah Tahun 2026.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2026 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut:

Gambar IV.2.
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026



Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

Gambar IV.3.
Prioritas Nasional



Sumber: : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

4.2.2. Tema dan Sasaran Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan

Tahun 2026 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas

2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia - Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan, sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

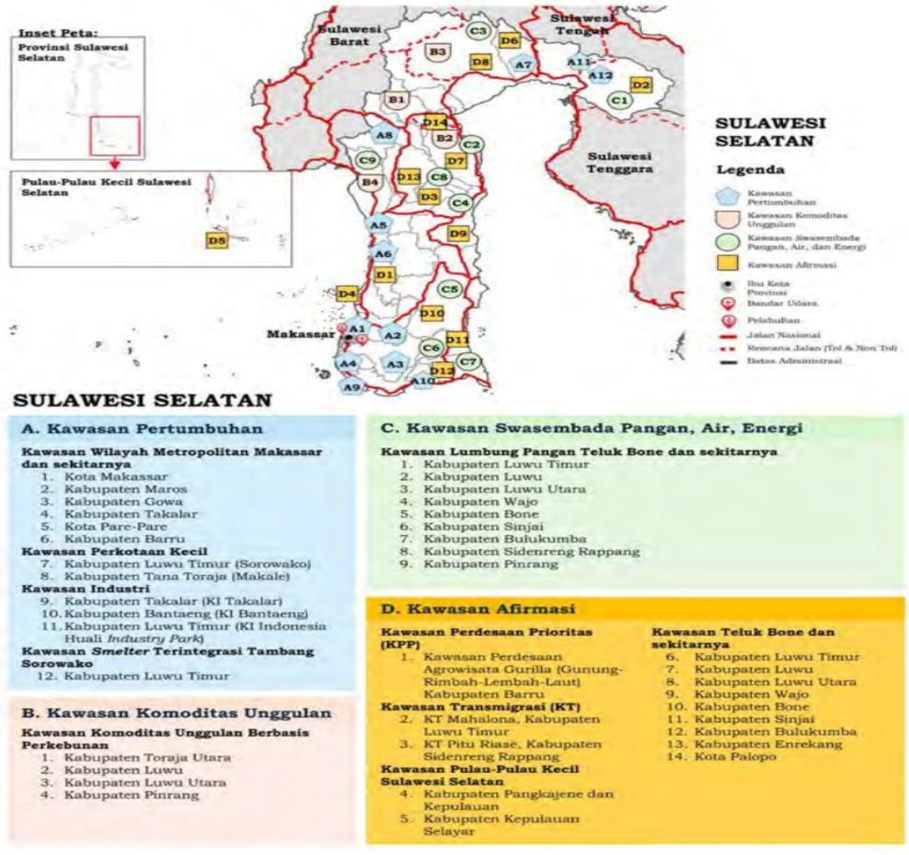
Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan tema, target pertumbuhan dan kontribusi per wilayah pulau untuk Tahun 2026 sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini. Penetapan ini menjadi landasan strategis dalam membangun fondasi yang kokoh bagi Indonesia Emas 2045.

Gambar IV.4.
Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

Gambar IV.5.
Lokasi Prioritas Pembangunan Wilayah



Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 2029 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2026-2029 dan RKP Tahun 2026. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026-2029 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tema pembangunan daerah tahun 2026 yaitu **"Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berakhlak dan Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif"**. Dalam rangka operasionalisasi tema pembangunan Tahun 2026 sebagai tahun awal RPJMD Tahun 2026-2029, terdapat 8 prioritas pembangunan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan
6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi

Perubahan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.2.
Sasaran Indikator Makro Pembagunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Perubahan RKPD Tahun 2026

No	Indikator	Target RPJMD 2025-2029 Tahun 2026	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang	Target RKP Tahun 2026	Target RKPD Tahun 2026	Target P-RKPD 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekopnomi (%)	5,2 - 6,5	4,8 - 6,5	5,9 - 6,2	5,9 - 6,5	5,9 - 6,2
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	80,5 - 84.9	Tidak dibahas	87,88 - 88,2	86,9 - 89,5	87,88 - 88,2
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,21	Tidak dibahas	3,3	3,3	3,3
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,85 - 7,08	6,5 - 7,0	6,5 - 7,0	6,50 - 7,00	6,50 - 7,00
5	Rasio Gini	0,358	0,346 - 0,352	0,346 - 0,352	0,346 - 0,352	0,346 - 0,352

No	Indikator	Target RPJMD 2025-2029 Tahun 2026	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang	Target RKP Tahun 2026	Target RKPD Tahun 2026	Target P-RKPD 2026
6	Indeks Modal Manusia	0,53	Tidak dibahas	0,54	0,54	0,54
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	33,46	33,26 - 37,47	33,26 - 37,47	33,26 - 37,47	33,26 - 37,47
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,81	Tidak dibahas	77,81	77,81	77,81
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,64 - 4,03	4,00 - 4,19	4,00 - 4,18	4,00 - 4,18	4,00 - 4,18

Sumber: P-RKPD Provisi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Tabel IV.3.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Satuan	Capaian 2025	Target RPJMD	Target P-RKPD 2026
1.	Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	T.1. Meningkatnya kualitas Modal Manusia	Indeks Modal Manusia	Angka	0,53	0,53	0,54
		S.1. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,15	74,06	74,25
		S.2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	Rata rata lama sekolah	Tahun	9,38	9,59 - 9,60	9,59 - 9,60
			Harapan lama sekolah	Tahun	13,56	13,87-13,88	13,87-13,88
2	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	T.2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang adaptif	Indeks Ketahanan Nasiona	Angka	2,66	3,09	3,09
		S.3. Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Indeks Demokrasi Provinsi	Angka	81,96	81,65-84,91	81,65-84,91
		S.4. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	80,20	79,52-79,73	80,70
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	57,73 (2024)	56,99-57,11	57,90
		S.5. Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender	Indeks Perlindungan Anak	Angka	66,07 (2024)	61,97-63,48	69,20
			Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	59,60	56,98	64,10
			Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,336	0,336-0,331	0,331
3	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	T.3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,43	5,2-6,5	5,9 - 6,2
			Rasio Gini	Angka	0,350	0,348-0,358	0,346-0,352
		S.6. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	12,91	13,61	13,13
			Rasio Volume usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Persen	1,13	0,77	1
			Indeks Ketahanan Pangan	Angka	74,30	86,01	75,20
4	Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	S.7. Meningkatnya Integrasi ekonomi regional dan global	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	0,51	10,9*	0,61
		S.8. Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan	Tingkat Inflasi	Persen	2,84	1,6 – 3,7	2,50

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Satuan	Capaian 2025	Target RPJMD	Target P-RKPD 2026
		Ekonomi Makro Daerah	Inklusi Keuangan	Persen	88,57 (2022)	85,03	89,05
5	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	S.9. Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	Persen	39,76	34,05	39,85
		S.10. Menurunnya pengangguran	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,60	6,5 – 7,00	6,50-7,00
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,21	3,64-4,03	4,0-4,18
6.	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani	T.4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital	Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	Nilai	59,20 (2024)	55,66	60,5
		S.11. Meningkatnya pembangunan infrastruktur teknologi dan komunikasi	Nilai Pilar Infrastruktur ITDN	Nilai	48,57 (2024)	62,12	48,75
		S.12. Meningkatnya keterampilan digital masyarakat	Nilai Pilar Keterampilan Masyarakat ITDN)	Nilai	66,20 (2024)	62,12	67,05
		T.5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	85,09	81,86	85,10
		S.11. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Angka	70,26	70,03	70,30
		S12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,34	4,44	4,41
		S.13. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Angka	62,35	61,5	62,4
7.	Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.	T.6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yg merata dan lingkungan yang berkelanjutan	Indeks Williamson	Angka	0,662	0,54	0,54
			Penurunan Intensitas Emisi GRK	Angka	Belum Rilis	33,46	33,26-37,47
		S.14. Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Layanan Infrastruktur	Persen	86,14	88,83	88,83
8	Peningkatan mitigasi dan ketahanan menghadapi situasi bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	S.15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Indeks Resiko Bencana	Poin	148,05	134,20-133,12	134,20-133,12
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	80,67	77,81	77,81

Sumber: P-RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka arah kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan dilaksanakan dengan mengacu pada rencana tata ruang dan dijabarkan ke dalam lima kawasan pembangunan yaitu Kawasan Makassar, Kawasan Bulukumba, Kawasan Watampone, Kawasan Parepare, dan Kawasan Palopo. Arah kebijakan pengembangan kawasan Makassar dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengingat peran Kawasan Makassar sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan

Perkotaan Mamminasata yang merupakan kontributor utama PDRB Sulawesi Selatan. Selain itu Kawasan Makassar juga merupakan Kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata yaitu Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) DPP Baru Toraja Makassar-Selayar yang meliputi TN Bantimurung Bulusaraung, KPPN Makassar, dan Geopark Maros-Pangkajene Kepulauan. Sebagai dukungan dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah Sasaran utama pembangunan wilayah pada Kawasan Makassar tahun 2026 dengan target sebagai berikut:

Tabel IV.4.
Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota
Pada Kawasan Pembangunan Makassar Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target P-RKPD 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,43
2	PDRB Per Kapita	Juta Rp/Kapita	186.75
3	Kontribusi PDRB	%	35,14
4	Tingkat Kemiskinan	%	3,46 – 2,56
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,53
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	85,75
7	Rasio Gini	Nilai	0,359
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Nilai	34,98
9	IKLH	Nilai	66,38

Sumber: RKPD Provisi Sulawesi Selatan Tahun 2026

4.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah Kota Makassar tahun 2026 menggambarkan fokus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD. Secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam perumusan prioritas dan sasaran prioritas pembangunan daerah Kota Makassar mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2026 yaitu: **"Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Meningkatkan Daya Saing"** yang kemudian dijabarkan melalui prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi
2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan
3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan
5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal
6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital

7. Menciptakan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi
8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan
9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kota Makassar tahun 2026 difokuskan pada sasaran dan target kinerja pembangunan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV.5.
Sasaran Indikator Makro Pembangunan Daerah
Kota Makassar Perubahan RKPD Tahun 2026

No	Indikator	Target RPJMD 2025-2029 Tahun 2026	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang	Target RKPD Tahun 2026	Target P-RKPD 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekopnomi (%)	6,43	6,43	6,43	6,43
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	186,75	186,75	186.75	186,75
3	Kontribusi PDRB Kota Makassar (%)	35,14	Tidak Dibahas	35,14	35,14
4	Tingkat Kemiskinan (%)	3,46	3,78 – 3,46	3,46	3,46
5	Rasio Gini	0,359	0.381 - 0.359	0,359	0.359
6	Indeks Pembangunan Manusia	85,86	85,86	85,86	85,86
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,98	34,98	34,98	34,98
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,38	Tidak Dibahas	66,38	66,38
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,53	9,53	9,53	9,53

Tabel IV.6.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026
1	Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	**Tujuan 1.1:** Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.34	6,43	5,73
		Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19	19,46	19,46
			Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (%)	20,03	20,30	20,30
		Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Kesempatan Kerja, dan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9.60	9,53	9,53
			PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/ Tahun)	176.28	186.75	186.75
2	Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan	**Tujuan 1.2:** Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	4,10	4,23	4,23
		Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0.67	0,61	0,61
		Sasaran 1.2.2: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Tingkat Inflasi (%)	2.69	1,77	1,77
			Indeks Ketahanan Pangan	76.42	88,05	88,05
		Sasaran 1.2.3:	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)	26,57	8,85	8,85

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026
		Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar				
3	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	**Tujuan 2.1:** Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia IPM)	85.46	85,86	85,86
		Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan (Nilai)	81,96	82,10	82,10
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75.30	75,66	75,66
		Sasaran 2.1.3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	22,105	20.543	20.543
4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	**Tujuan 3.1:** Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata	Indeks Layanan Infrastruktur (Nilai)	80.51	79,46	79,46
		Sasaran 3.1.1: Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	93,40	84,45	93,41
			Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan	26,89	27,35	27,35
		Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%)	10	25	25
5	Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri	**Tujuan 4.1:**	Indeks Inovasi Daerah	-	79,23	79,23

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026
	ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah				
		Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi	4,5	4,56	4,56
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah (%)	6,93	4	7
		Tujuan 4.2: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Terhadap PDRB (%)	2,20	2,28	2,28
		Sasaran 4.2.1: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	6.268.077	5.634.009	5.634.009
			Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	2,47	1,65	1,65
		Sasaran 4.2.2: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Takbenda (%)	13,33	13,33	13,33
			Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan (%)	19,44	16,66	16,66
		Sasaran 4.2.3:	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif	5,081	4.831	4.831

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif	Persentase Industri Ekonomi Kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital (%)	10,73	15,43	15,43
6	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital	**Tujuan 5.1:** Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	80.52	81,31	81,31
		Sasaran 5.1.1: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	68,94	70,50	70,50
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	N.A	4,03	4,03
			Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK	84.20	87,98	87,98
7	Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	**Tujuan 5.2:** Meningkatnya Kualitas Keamanan, Ketentramandan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	72,99	77	77
		Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)	66,30	56,02	68,00
		Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kota Toleran	4,834	4,862	4,862
8	Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	**Tujuan 6.1:** Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	64.90	63,15	63,15
		Sasaran 6.1.1: Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	0.275	0,177	0,177

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026
		Sasaran 6.1.2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	67,04	70,60	70,60
		Sasaran 6.1.3: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	67.17	61,00	61,00
			Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,542	0,518	0,518
		Tujuan 6.2: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran	Tingkat Kemiskinan (%)	4.43	3,46	3,46
		Sasaran 6.2.1: Menurunnya Disparitas Pendapatan	Gini Rasio	0.391	0,381-0,359	0,359
		Sasaran 6.2.2: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0.043	42,51	42,51
9	Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	**Tujuan 7.1:** Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,28	66,38	66,38
		Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	74,17	74,15	74,15
			Indeks Kualitas Udara	73,63	75,52	75,52
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,17,	36,13	36,13
			Timbulan Sampah Yang terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	1,53	10	10

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026
		Tujuan 7.2: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	91.44	107	107
		Sasaran 7.2.1: Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah	0,48	0,48	0,50
			Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	NA	34,98	34,98

Prioritas Pembangunan Tahun 2026 tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar pada tahun sebelumnya dan isu strategis daerah. Sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan tahun 2026, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel IV.7.
Hubungan Permasalahan Pembangunan dan Prioritas Pembangunan
Kota Makassar Tahun 2026

No	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Pembangunan
1	Masih Rendahnya Daya Saing Ekonomi Daerah, Dan Masih Belum Optimalnya Penciptaan Lapangan Kerja Dan Berusaha	Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Tujuan: Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi (%)
			Sasaran: Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
				Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (%)
			Sasaran: Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
				PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)
2	Masih rendahnya kualitas iklim investasi, kemandirian fiskal daerah yang didukung dengan ketahanan pangan	Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan	Tujuan: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah
			Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)
			Sasaran: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Tingkat Inflasi (%)
				Indeks Ketahanan Pangan
			Sasaran: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)
3	Masih Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Global	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Tujuan: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
			Sasaran: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan

No	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Pembangunan
			Sasaran: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)
			Sasaran: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)
4	Masih rendahnya kualitas Infrastruktur Perkotaan dan belum optimalnya pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata	Indeks Layanan Infrastruktur
			Sasaran: Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan
				Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan
			Sasaran: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)%
5	Masih belum optimalnya pemanfaatan sektor ekonomi kreatif dan kekayaan seni budaya guna Peningkatan daya saing sektor pariwisata	Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah
			Sasaran: Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi
			Sasaran: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah (%)
			Tujuan: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB (%)
			Sasaran: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara
				Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan
			Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Takbenda (%)
				Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan (%)

No	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Pembangunan
			Sasaran: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif (Industri)
				Persentase Industri Ekonomi Kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital (%)
6	Belum optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi
			Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK
7	Belum optimalnya kualitas keamanan masyarakat, serta masih rendahnya kualitas ketentraman dan Ketertiban Umum	Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Sasaran: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)
			Sasaran: Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kota Toleran
8	Belum optimalnya Pelayanan Dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, serta rendahnya kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga
			Sasaran: Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender
			Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak
			Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda
				Indeks Pembangunan Keolahragaan
			Tujuan: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran	Tingkat Kemiskinan%

No	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Pembangunan
			Sasaran: Menurunnya Disparitas Pendapatan	Gini Rasio
			Sasaran: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
9	Masih rendahnya Pelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup, serta belum optimalnya penguatan Mitigasi Bencana	Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Tujuan: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air
				Indeks Kualitas Udara
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan
				Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
			Tujuan: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana
			Sasaran: Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah
				Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)

4.2.4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026

Untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2026, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan merupakan penjabaran operasional RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2029 untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2026. Perumusan strategi dan arah kebijakan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan, isu strategis, dinamika kondisi daerah, kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, serta kemampuan keuangan daerah, sehingga menjadi pedoman dalam penetapan prioritas pembangunan, program, kegiatan/subkegiatan perangkat daerah. Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Kota Makassar Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel IV.8.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Tahun 2026
Tujuan 1.1: Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Meningkatkan produktivitas sektor industri dan perdagangan melalui peningkatan kualitas SDM yang adaptif, pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan kawasan industri terintegrasi, mendorong adopsi teknologi dan inovasi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan deregulasi dan kepastian hukum,	1. Peningkatan kualitas SDM di sektor industri dan perdagangan melalui assessment kebutuhan industri yang terintegrasi, pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi yang relevan, serta membangun Makassar Creative Hub di setiap Kecamatan. 2. Peningkatan akses permodalan dan pemasaran bagi 153 Kelurahan melalui pembentukan gerai UMKM, yang didukung oleh program peningkatan kompetensi seperti Makassar Skill Competition. 3. Pengembangan dan Pembinaan melalui Inkubator Center.
	Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat	Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsif, melalui revitalisasi vokasi berorientasi kompetensi dan sertifikasi, penyelarasan kurikulum dengan industri, serta pemberdayaan ekonomi wilayah melalui pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis potensi lokal dan pemberian modal UMKM secara bertahap	1. Merancang skema pemberian modal usaha UMKM tahap awal dengan persyaratan yang terukur dan fokus pada kelompok usaha binaan. 2. Dukungan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi industri, UMKM, dan pelaku usaha kreatif,, termasuk pembentukan dan pemanfaatan Koperasi Merah Putih di kelurahan sebagai pusat permodalan dan distribusi usaha.
Tujuan 1.2: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan membangun sistem pengelolaan PAD yang inovatif, Transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika ekonomi daerah	1. Penataan Sistem dan Penguatan Basis Data melalui pemetaan potensi PAD. 2. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 bagi Pensiunan dan Veteran Pejuang.
	Sasaran 1.2.2: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui penerapan teknologi pertanian modern dan pendampingan berkelanjutan kepada petani,	1. Pemetaan komoditas pangan unggulan di berbagai wilayah Makassar dan mengidentifikasi potensi peningkatan produksi serta produktivitas dengan konsep urban farming. 2. Pengadaan Mobile Storage Pangan.
	Sasaran 1.2.3: Meningkatnya Realisasi Investasi di	Mewujudkan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi, bersinergi dengan sektor swasta dan institusi syariah untuk menarik investasi padat karya dan	Membangun tata kelola investasi yang efisien dan transparan dengan mengembangkan sistem dan prosedur investasi yang sederhana, cepat, dan akuntabel melalui digitalisasi dan integrasi layanan.

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Tahun 2026
	Kota Makassar	berwawasan lingkungan melalui skema KPBU dan KSPI	
Tujuan 2.1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Mengoptimalkan Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, serta penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas baik sistem pendidikan maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar dengan pemberian seragam gratis untuk Siswa SD dan SMP di kota Makassar.
			2. Peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan khususnya di wilayah kepulauan.
			3. Penyediaan insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang bertugas di wilayah kepulauan.
			4. Peningkatan pembangunan dan perbaikan sarana fisik seperti gedung sekolah ramah lingkungan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga yang inklusif dan aksesibilitas.
			5. Peningkatan akses dan kualitas layanan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan pembangunan Pembangunan Sekolah terintegrasi PAUD/SD di setiap kecamatan.
			6. Peningkatan angka partisipasi sekolah dengan mengembalikan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah dengan pemberian bantuan pendidikan.
	Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Mengoptimalkan Pembudayaan perilaku hidup sehat dan Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, melalui pemenuhan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan inklusif, percepatan eliminasi penyakit dan penerapan kebijakan promotif preventif, perkuatan sistem surveilans kesehatan untuk memantau penyakit	1. Pemerataan dan penguatan layanan kesehatan dengan penyediaan ambulance secara gratis.
			2. Pemenuhan dan distribusi Tenaga Kesehatan dan Paramedis di wilayah kepulauan Kota Makassar dengan pemberian insentif kepada tenaga medis dan paramedis yang bekerja di fasilitas kesehatan Pemerintah di Pulau-pulau.
			3. Perluasan cakupan layanan pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari Rumah sakit ke rumah pasien.
			4. Perluasan akses penyediaan pusat layanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan Pulau.
			5. Perluasan dan penguatan pembudayaan pola hidup sehat dan bersih serta penyehatan lingkungan
			6. Penyediaan dan optimalisasi sarana posyandu, puskesmas dan rumah sakit.
			7. Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan upaya terpadu secara berkelanjutan dalam rangka pelayanan kesehatan inklusif yang lebih menjangkau kelompok rentan.

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Tahun 2026
			8. Peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan dalam mendukung kualitas layanan kesehatan.
			9. Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan dengan pendidikan dan pelatihan agar mampu melaksanakan praktik pelayanan kesehatan dengan kompetensi sesuai standar dan kebutuhan masyarakat.
			10. Pengembangan sistem insentif kepada masyarakat dan pihak terkait sebagai stimulan dalam upaya percepatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta penanganan stunting dan gizi buruk.
	Sasaran 2.1.3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Optimalisasi peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, berkarakter dan mampu berkontribusi dalam pengembangan kewirausahaan,	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global melalui pendidikan vokasi yang relevan, penguatan karakter dan etika, serta akselerasi ekosistem kewirausahaan.
			2. Pengembangkan pusat-pusat keunggulan yang spesifik pada sektor ekonomi yang potensial antara lain agribisnis, pusat kreatif digital, atau pusat pelatihan pariwisata berkelanjutan.
			3. Pendampingan intensif bagi UMKM untuk adopsi teknologi digital yaitu pemasaran online, e-commerce, payment gateway, serta fasilitasi akses ke permodalan.
Tujuan 3.1: Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata	Sasaran 3.1.1: Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur perkotaan secara merata, inklusif dan terintegrasi melalui kolaborasi, pemanfaatan teknologi dan pengembangan skema pembiayaan inovatif	1. Penguatan data dan perencanaan pembangunan infrastruktur melalui identifikasi kebutuhan, kepastian lahan dan kesesuaian tata ruang serta penguatan kapasitas lembaga dalam perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur.
			2. Pengembangan alternatif pendanaan dan peluang kerjasama dalam implementasi pembangunan infrastruktur.
			3. Peningkatan cakupan layanan dan akses masyarakat terhadap air bersih melalui keringanan sambungan rumah utamanya bagi masyarakat kurang mampu, wilayah sulit akses air bersih dan padat penduduk, serta pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas penyediaan air bersih berkualitas.
			4. Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur pada seluruh wilayah kota melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur termasuk penataan ruang publik pada wilayah pesisir di Kecamatan Ujung Pandang, Serta peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur pada wilayah pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
			5. Optimalisasi penanganan banjir dan pengendalian daya rusak air melalui

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Tahun 2026
			perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir utamanya pada lokasi strategis, wilayah rawan banjir, wilayah pesisir serta koridor penghubung antar wilayah kota.
			6. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan publik melalui pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan dan penyediaan operasional bangunan gedung pemerintah.
			7. Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan melalui pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana; penanganan permukiman kumuh dan mendukung penyediaan perumahan publik vertikal perkotaan.
			8. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga melalui perencanaan, pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga termasuk perencanaan kawasan dan infrastruktur Stadion yang terintegrasi di Kecamatan Biringkanaya.
			9. Perencanaan infrastruktur stadion serta pematangan lahan di Kecamatan Biringkanaya.
			10. Penguatan penanganan kemacetan serta penguatan konektivitas darat dan wilayah pulau melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan termasuk wilayah pulau, dukungan pengembangan dan penataan transportasi publik ramah lingkungan berupa angkutan umum massal perkotaan baik melalui pengadaan maupun skema kerjasama.
			11. Pemenuhan sanitasi aman melalui pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem pengolahan air limbah domestik baik individual maupun terpusat skala kota dan skala permukiman khususnya di wilayah pulau dan wilayah kumuh.
			12. Peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional melalui revitalisasi pasar tradisional.
	Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penguatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui percepatan penetapan, integrasi dan implementasi RDTR	1. Percepatan legalisasi RDTR melalui penyempurnaan dokumen teknis dan harmonisasi substansi teknis RDTR di wilayah strategis dan kawasan pertumbuhan dengan melibatkan partisipasi publik dan tenaga ahli.
			2. Legalisasi RDTR sesuai tahapan serta Implementasi Perda RDTR melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat, perangkat daerah dan dunia

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Tahun 2026
			usaha serta integrasi informasi geospasial dengan Online Submission System (OSS) untuk perizinan berbasis RDTR.
Tujuan 4.1: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Kualitas Penguasaan IPTEK	Peningkatan daya saing daerah melalui penguasaan IPTEK yang mendorong produktivitas daerah	Penguatan IPTEKIN melalui transformasi sumber daya dan transformasi ekosistem iptek dan inovasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
			Membangun kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga dan perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM, kemampuan penelitian dan pengembangan di bidang IPTEK, serta kesadaran dan pemanfaatan teknologi digital.
	Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Kualitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Penguatan kreativitas dan inovasi dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan serta peningkatan daya saing melalui pengembangan kebijakan dan ekosistem yang mendukung riset dan penerapan inovasi	1. Penguatan data dan informasi riset untuk mendukung kebijakan berbasis bukti dalam seluruh sektor pembangunan.
			2. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya dalam pengembangan riset dan inovasi dan penerapan teknologi.
Tujuan 4.2: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Sasaran 4.2.1: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Meningkatkan PDRB sektor makan-minum melalui fasilitasi daya tarik dan peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara,	1. Pengembangan daya tarik wisata lewat kurasi destinasi, kompetisi ide, revitalisasi kawasan, dan promosi digital yang didukung oleh pembangunan basis data terpadu.
			2. Pemetaan ekosistem mangrove dan potensi wisata pada 3 lokasi (Untia, Lantebung dan Lakkang).
			3. Pelatihan pengembangan Kelompok Sadar Wisata (KSW) wisata mangrove Untia, Lantebung, Lakkang, Laelae, Samalona dan Pantai Layar Putih).
			4. Pemetaan potensi ekoturisme di Pulau Lanjukang, Pulau Barrang Caddi, dan Pulau Barrang Lompo serta mengadakan pelatihan pengembangan ekoturisme.
	Sasaran 4.2.2: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Penguatan ketangguhan masyarakat melalui pendidikan keagamaan dan penguatan budaya serta kearifan lokal sejak dini	1. Pengembangan zonasi kawasan cagar budaya yang produktif secara ekonomi, terjaga nilai sejarahnya, dan berdaya guna bagi masyarakat lokal.
			2. Penguatan ketangguhan masyarakat melalui pendidikan keagamaan dan penguatan budaya serta kearifan lokal sejak dini.
			3. Penguatan pelestarian Pemasaran dan promosi budaya oleh generasi muda dan komunitas seni untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal.

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Tahun 2026
			4. Penguatan generasi muda dan komunitas seni untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal.
	Sasaran 4.2.3: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif	Penguatan Pusat Inovasi menjadi katalisator yang kuat untuk meningkatkan daya saing pariwisata didorong oleh kekayaan seni budaya dan kreativitas lokal yang inovatif,	1. Membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri ekonomi kreatif melalui regulasi yang adaptif, infrastruktur yang memadai, dan aksesibilitas terhadap sumber daya.
			2. Peningkatan kapasitas SDM kreatif dengan penguatan kompetensi dan keahlian pelaku ekonomi kreatif melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pertukaran pengetahuan.
Tujuan 5.1: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif	Sasaran 5.1.1: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis kinerja yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas	1. Penguatan aspek pemerintahan Digital melalui peningkatan kapabilitas dan budaya digital aparatur sipil negara, peningkatan interoperabilitas dan keterpaduan data lintas instansi pemerintah, penyediaan infrastruktur digital yang berkualitas dan tangguh, serta penguatan kebijakan dan tata kelola pemerintahan digital.
			2. Pengembangan digitalisasi layanan publik melalui integrasi layanan perizinan usaha, layanan administrasi kependudukan tambahan dan layanan sosial.
Tujuan 5.2: Meningkatnya Kualitas Keamanan. Ketenteraman. dan Ketertiban Umum	Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Memperkuat stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dengan melibatkan peran serta masyarakat	1. Penguatan institusionalisasi partisipasi warga melalui forum komunikasi Kelurahan dan Kecamatan, (antara warga, RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas).
			2. Pemberdayaan kelompok rentan (anak muda, perempuan, disabilitas) dalam sistem keamanan lingkungan dengan pendekatan berbasis masyarakat untuk menjamin rasa aman dan kebutuhan ruang publik yang sehat dan nyaman.
	Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	Memperkuat kehidupan beragama yang maslahat, mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi, dan saling menghargai antar umat beragama	1. Penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan memperkuat komitmen kebangsaan yang menghargai keberagaman.
			2. Penguatan dialog antar penganut umat beragama dan penghayat kepercayaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme.
			3. Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan melalui pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu sebagai bentuk penghargaan, kepedulian, dan motivasi.
Tujuan 6.1: Meningkatny	Sasaran 6.1.1: Menurunnya	Mengoptimalkan penurunan ketimpangan gender melalui pendekatan holistik yang	1. Mengoptimalkan penurunan ketimpangan gender melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budaya dengan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Tahun 2026
a Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Ketimpangan Gender	mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budaya	Pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan.
			2. Peningkatan Pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan Pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan.
	Sasaran 6.1.2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh, Berkelanjutan, dan berbasis hak anak	1. Peningkatan Akses Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Perempuan, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Sosial, Pemberantasan Kekerasan Berbasis Gender, Advokasi dan Kesadaran Sosial.
			2. Peningkatan koordinasi multipihak dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek pencegahan, penanganan langsung, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial
			3. Pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan.
			4. Penyuluhan dan Pendidikan Publik yang Intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam melindungi anak-anak, terjaminnya akses terhadap layanan kesehatan anak, serta kualitas pendidikan anak.
			5. Memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berbasis hak anak, Dengan Menjamin anak yang berstatus ATS dan APS untuk kembali bersekolah.
	Sasaran 6.1.3: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Penguatan terciptanya generasi muda yang unggul, berdaya saing, serta peningkatan prestasi olahraga	1. Penguatan generasi muda yang unggul, berdaya saing, serta peningkatan prestasi olahraga.
			2. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Olahraga serta Pengembangan tempat latihan olahraga yang terjangkau dan ramah bagi pemuda di kecamatan melalui Pembangunan gelanggang remaja dan *sport center.*
			3. Menciptakan peluang kerja yang layak dan mendorong semangat kewirausahaan di kalangan pemuda.
Tujuan 6.2: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat	Sasaran 6.2.1: Menurunnya Disparitas Pendapatan	Memperluas peluang ekonomi yang lebih merata, peningkatan Sumber Daya Manusia dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	1. Penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan dan bantuan teknis untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.
			2. Pengurangan beban pengeluaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
			3. Peningkatan kualitas dan Keterampilan dengan pelatihan vokasional sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.
			4. Fasilitasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Tahun 2026
Sasaran	Sasaran 6.2.2: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Penguatan pembangunan inklusif yang menghormati hak asasi manusia (HAM), mengurangi kesenjangan sosial bagi penyandang disabilitas dan memastikan aksesibilitas di berbagai sektor kehidupan,	1. Penguatan pembangunan inklusif yang menghormati hak asasi manusia (HAM), dan memastikan aksesibilitas di berbagai sektor kehidupan melalui Pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan. 2. Pelatihan soft skills dan literasi digital bagi penyandang disabilitas serta Sertifikasi kompetensi untuk penyandang disabilitas melalui Pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel.
Tujuan 7.1: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan tata kelola lingkungan melalui pengendalian pencemaran, inovasi pengelolaan sampah dan pengelolaan ruang terbuka hijau secara partisipatif dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Peningkatan penanganan sampah dari hulu ke hilir melalui edukasi pemilahan sampah sejak dari sumber dengan pelibatan komunitas; serta penyediaan sarana dan prasarana persampahan dengan mendorong dukungan alternatif pembiayaan dan kerjasama pihak swasta. 2. Optimalisasi pengurangan timbulan sampah sejak dari sumber dengan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah di tingkat kelurahan termasuk TPS3R dan Bank Sampah, melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. 3. Peningkatan cakupan layanan persampahan secara inklusif melalui penyusunan regulasi dan penerapan pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran tanah, air dan udara dengan mengoptimalkan pencegahan, pengawasan dan pengendalian terhadap sumber pencemar termasuk pembersihan sampah pada saluran drainase sekunder dan primer dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 5. Penguatan pengembangan RTH melalui pemetaan dan identifikasi lokasi potensial RTH baru. 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH berbasis adaptasi perubahan iklim melalui pembangunan RTH, pengembangan taman berbasis komunitas sebagai taman bermain dan kreatif dan penanaman vegetasi mangrove pada wilayah pesisir dengan mendorong partisipasi swasta melalui program Corporate Social Responsibility dan kemitraan lainnya.
Tujuan 7.2: Meningkatnya Resiliensi Terhadap	Sasaran 7.2.1: Meningkatnya Kapasitas Penanganan	Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berfokus pada edukasi, infrastruktur hijau, pemanfaatan teknologi adaptif,	1. Mendorong upaya penurunan emisi GRK melalui penguatan tata kelola dan pelaksanaan aksi kegiatan yang mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK serta mendorong penggunaan kendaraan listrik maupun kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Tahun 2026
Bencana dan Perubahan Iklim	Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	kolaborasi multipihak dan pendekatan partisipatif	perorangan. 2. Peningkatan ketahanan energi yang ramah lingkungan melalui dukungan dan pengembangan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana energi baru terbarukan utamanya di wilayah Kec,Kepulauan Sangkarrang. 3. Mendorong efisiensi energi melalui adopsi teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan infrastruktur hijau didukung penerapan insentif dan disinsentif. 4. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana banjir melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada wilayah rawan banjir dan pengaman pesisir pantai. 5. Penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada pemerintah dan masyarakat serta penguatan layanan peringatan dini bencana.

Untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2026, perlu dirumuskan kegiatan prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan dalam Perubahan RKPD tahun 2026 dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Adapun kegiatan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan, Penataan/Rehabilitasi dan Pengembangan Infrastruktur Dasar di Wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar dengan prioritas :
   - Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Pendidikan
   - Pemberian Insentif Bagi tenaga Kesehatan dan Pendidikan.
   - Penyediaan Transportasi Air bagi Masyarakat.
   - Pelatihan keterampilan bagi
   - Pembangunan/perbaikan sarana ibadah
2. Penataan Ruang Publik di Kawasan Pantai Losari (inklusif)
3. Pemugaran Kawasan Kumuh dan renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
4. Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) melalui penyerahan aset Perumahan dan ataupun pengembangan serta perbaikan Infrastruktur permukiman melalui pembenahan/pembangunan drainase, jalan dan penerangan jalan pemukiman.
5. Pelaksanaan Event Bulanan (*monthly event*) berskala Nasional dan Internasional bersifat tematik untuk mendorong industri kreatif dan kunjungan wisata di kota makassar.
6. Pengembangan Sumber daya Manusia (SDM) Kota Makassar melalui Makassar Creative Hub (MCH)
7. Belanja Makassar Berbagi Jaminan Sosial (Makassar Berjasa)/Makassar *Sosial Assistance Program* (*Social Security Sharing*).
8. Gratis Iuran Sampah Bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem
9. Melakukan pemetaan komoditas pangan unggulan di berbagai wilayah Makassar dan mengidentifikasi potensi peningkatan produksi serta produktivitas dengan konsep *Urban Farming*, termasuk sarana dan prasarana untuk kelompok nelayan (Pengadaan Mesin Perahu)
10. Mengoptimalkan pembangunan dan perbaikan sarana fisik seperti gedung sekolah ramah lingkungan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga yang inklusif dan aksesibilitas dengan mengutamakan pemerataan akses pendidikan di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. Penyediaan Teknologi pendidikan, dengan Prioritas:
    - Pembangunan dan Rehabilitasi SMP
    - Pembangunan dan Rehabilitasi SD
    - Pembangunan dan Rehabilitasi PAUD
    - Pengadaan Seragam SD
    - Pengadaan Seragam SMP
    - Pengadaan peralatan sekolah bagi siswa-siswi SD dan SMP
    - Pemberian Beasiswa Bagi SD dan SMP Berprestasi
    - Bantuan iuran kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas. Posyandu) dan fasilitas kesehatan lanjutan dengan dukungan tenaga kesehatan yang terlatih, serta pemerataan layanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui perilaku hidup sehat, mengintegrasikan sistem surveilans untuk memantau berbagai jenis penyakit secara terkoordinasi, serta memperkuat kebijakan akses kesehatan yang inklusif
12. Intervensi dasar infrastruktur permukiman melalui perbaikan sanitasi, optimalisasi

SPAM, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan rentan dan penyusunan rencana teknis pembangunan infrastruktur (pasar. konektivitas dan olahraga), dengan Prioritas:

- Rehabilitasi/Pembangunan Jalan
- Pembangunan Tanggul
- Pengembangan Sistem Drainase
- Rehabilitasi Sistem Drainase
- Pengembangan pengendali banjir
- Pengadaan *Vibrator Rolle*, Mobil Crane 8 Ton, *Excavator Amphibious*, *Wheel Excavator*
- Perencanaan Pembangunan Kantor Pemerintah
- Pembangunan Kantor Pemerintah
- Pembangunan/Pembuatan Jalan Paving,
- Pembangunan Jalan Beton
- Pembangunan Rumah Baru Layak Huni
- Perbaikan Rumah Tidak Layak huni
- Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
- Gratis pemasangan instalasi air bersih

13. Pengembangan layanan publik digital melalui digitalisasi proses administrasi pemerintahan dan penguatan literasi digital ASN, Dan Pengembangan sistem layanan digital terintegrasi dan berbasis data dan kebutuhan warga, Digitalisasi Pelayanan publik dan informasi publik melalui *Makassar Super Apps,* dengan Prioritas:
    - Pengembangan Aplikasi Makassar Super Apps (Lontara+)
    - Pembangunan Kantor Lurah
    - Pembangunan Kantor Camat
    - Rehabilitasi Kantor Lurah
    - Rehabilitasi Kantor Camat
14. Penguatan Institusionalisasi Partisipasi Warga, melalui forum komunikasi kelurahan dan Kecamatan, (antara warga, RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas) dan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat dalam tim keamanan lingkungan dengan pendekatan berbasis masyarakat terhadap rasa aman dan kebutuhan ruang publik, dengan Prioritas:
    - Hibah Rumah Ibadah, Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, Majelis Ulama Indonesia, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Forum Kerukunan Umat Beragama, dalam meningkatkan kualitas toleransi dalam masyarakat, melalui pencegahan dan penanganan konflik sosial dan meningkatkan ketahanan budaya dan moderasi beragama.
    - Pengadaan CCTV, guna meningkatkan kualitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
    - Hibah Kodim 1408/Makassar, Hibah Polrestabes Kota Makassar, Hibah Polres Pelabuhan Kota Makassar, untuk mendukung Prioritas Daerah meningkatkan kualitas keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
15. Peningkatan Akses Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Perempuan, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Sosial, Peningkatan Partisipasi Politik dan Pengambilan Keputusan, Pemberantasan Kekerasan Berbasis Gender, Advokasi dan Kesadaran Sosial, dan Penguatan Infrastruktur dan Kebijakan Gender, dengan Prioritas:
    - Hibah PKK, Hibah Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar
16. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Olahraga serta Pengembangan tempat latihan

olahraga yang terjangkau dan ramah bagi pemuda di kecamatan dan Menciptakan peluang kerja yang layak dan mendorong semangat kewirausahaan di kalangan pemuda, terjaminnya aspek kesehatan fisik dan mental pemuda serta keterlibatan Partisipasi Politik dan Sosial, dengan Prioritas:
   - Pembangunan Stadion Sepak Bola.
   - Rehabilitasi Lapangan Karebosi (Pembangunan Tahap I, dan Tahun Jamak)
   - Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar, Hibah Pramuka, Hibah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), Hibah *National Paralympic Committee* (NPC) Kota Makassar, dalam mendukung prioritas daerah meningkatkan pembudayaan dan prestasi olahraga.
17. Peningkatan SDM dan fasilitasi pembentukan kelompok usaha mikro dan kecil serta koperasi, dengan fokus pada penyediaan informasi pasar dan peluang usaha yang menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, dengan Prioritas:
   - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil
   - Inkubator Usaha Mikro
18. Penguatan penempatan tenaga kerja Pengembangan pelatihan vokasi inklusif berbasis permintaan pasar, pelatihan *soft skills* dan literasi digital bagi penyandang disabilitas serta sertifikasi kompetensi untuk penyandang disabilitas.
19. Harmonisasi kebijakan daerah terkait pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, penyusunan peta jalan pengelolaan sampah dan pengembangan RTH dan pemetaan lokasi potensial RTH baru, dengan Prioritas:
   - Belanja Sarana dan Prasarana Persampahan Motor Tiga Roda, Mobil tangki Penyiram, Mobil Dump Truck.
   - Pengadaan Lahan TPA Tamangapa
   - Pembangunan Posko Keanekaragaman Hayati Nipa-Nipa
   - TPS3R dan Pengelolaan Sampah terpadu
   - Optimalisasi pemanfaatan Dana Kelurahan untuk pengelolaan persampahan termasuk sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat serta peningkatan peran serta masyarakat.
20. Pengelolaan Dana Kelurahan, terkait Kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana lingkup kelurahan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan, baik yang bersumber dari APBD maupun DAU.

4.2.4.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2026

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Program pembangunan daerah Kota Makassar Tahun 2026, merupakan sekumpulan program prioritas yang secara spesifik langsung terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran, program untuk menjawab prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik dan program yang terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun Program Prioritas Kota Makassar Tahun 2026, tercantum pada tabel berikut:

Tabel IV.9.
Program Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (*Outcome*)	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
PD 1: Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	**Tujuan 1.1:** Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,73	
	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,46	
		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	20,30	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	4,80%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Nilai ekspor barang Kota Makassar	12.10%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	70%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Pengembangan UMKM	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	1%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Kesempatan Kerja. dan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,53	
		PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	186.75	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	21,21%	Dinas Ketenagakerjaan
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	61%	Dinas Ketenagakerjaan
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	15%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pertumbuhan Wirausaha	14.5%	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	21.722 Ton	Dinas Perikanan dan Pertanian
	Program Pengembangan Sumber Daya	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi	12.92%	Dinas Pariwisata

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (*Outcome*)	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	17.75%	Dinas Pemuda dan Olahraga
PD 2: Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan	**Tujuan 1.2:** Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	4,23	
	Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,61	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	42.17%	Badan Pendapatan Daerah
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	50.00%	
		Persentase Penerapan sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	93.00%	
	Sasaran 1.2.2: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Tingkat Inflasi (%)	1,77	
		Indeks Ketahanan Pangan	88,05	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	100%	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	15616 Ton	Dinas Perikanan dan Pertanian
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	8 Ton	
		Peningkatan Produksi Hortikultura	330,60 Ton	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKG)	2042	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.568.35 Ton	Dinas Perikanan dan Pertanian
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	1,30%	Dinas Ketahanan Pangan
	Sasaran 1.2.3: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	8,85	

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (*Outcome*)	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
	Makassar			
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investas	Nilai Investasi 3.000.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	90%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Sekretariat Daerah, Bagian Kerjasama
		Efektivitas Kerja Sama Daerah	100%	
PD 3: Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	**Tujuan 2.1:** Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	85,86	
	Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	82.10	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Iklim Inklusivitas SMP	10.63,42%	Dinas Pendidikan
		Iklim Keamanan SD	11.77,03%	
		Iklim Keamanan SMP	12.73,02%	
		Iklim Kebinekaan SD	13.75,50%	
		Iklim Kebinekaan SMP	14.72,62%	
		Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)	1.72,19%	
		Angka Partisipasi Sekolah (7-15 tahun)	2.99,80%	
		Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan	3.12,98%	
		Skor Kemampuan Literasi SD	4.67,86%	
		Skor Kemampuan Literasi SMP	5.73,86%	
		Skor Kamampuan Numerasi SD	6.60,18%	
		Skor Kamampuan Numerasi SMP	7.65,85%	
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	8.81,45%	
		Iklim Inklusivitas SD	9.65,15 %	
	Program Pendidik dan Tenaga	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi	77,22%	Dinas Pendidikan

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (*Outcome*)	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
	Kependidikan	S1/D4		
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	100%	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	2 Pustakawan, 150 Tenaga Teknis	Dinas Perpustakaan
		Jumlah Koleksi Judul Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	33.712	
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	580.000	
		Angka Budaya Baca Kota Makassar	70	
		Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat	81,10	
	Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75,66	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	
		Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
		Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100%	
		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (*Outcome*)	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	
	Sasaran 2.1.3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah/Per Kapita/Tahun)	20.543	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investas	Nilai Investasi 3.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan TSP
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	15%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pertumbuhan Wirausaha	14,5%	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	61.00	Dinas Ketenagakerjaan
PD 4: Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	**Tujuan 3.1:** Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata	Indeks Layanan Infrastruktur	79,46	
	Sasaran 3.1.1: Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	93,41	
		Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan	27,355	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	88,74%	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum)	46,09%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Perumahan dan Kawasan	Persentase Pengurangan rumah tidak	3,69%	Dinas Perumahan

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (*Outcome*)	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
	Permukiman Kumuh	layak huni pada wilayah pencegahan kumuh		dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Makassar	54,85%	Dinas Pekerjaan Umum
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi. erosi. dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Makassar	54,45	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan	4,12%	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase Rumah Tangga Yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi	0,19%	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) akses aman	10,28%	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) akses aman	4,15%	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	57,81%	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	49,65%	Dinas Pekerjaan Umum
	Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%)	25	

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (*Outcome*)	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	100%	Dinas Penataan Ruang
PD 5: Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	**Tujuan 4.1:** Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	79,23	
	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi	4,56	
	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	100%	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah (%)	7	
	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	100%	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Tujuan 4.2: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi. Makan dan Minum (%)	2,28	
	Sasaran 4.2.1: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	5.634.009	
		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	1,65	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	7%	Dinas Pariwisata
	Sasaran 4.2.2: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Persentase peningkatan karya budaya terdaftar dalam Warisan Budaya Takbenda (%)	13.3%	
		Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan (%)	16,66	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	55,5%	Dinas Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	20%	Dinas Kebudayaan
	Sasaran 4.2.3: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Makassar (Industri)	4.831	
		Persentase Industri Ekonomi Kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital (%)	15,43	

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (*Outcome*)	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	3.03%	Dinas Pariwisata
PD 6: Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital	**Tujuan 5.1:** Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	81,31	
	Sasaran 5.1.1: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Pnilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	70,50	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,03	
		Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK	87.98	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	78,21%	Inspektorat Daerah
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40%	
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	85%	
		Persentase Penurunan SILPA	3%	
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	73%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	71%	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase SKPD yang mengimplementasikan layanan aplikasi	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (*Outcome*)	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
		umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
PD 7: Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	**Tujuan 5.2:** Meningkatnya Kualitas Keamanan. Ketentraman. dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	77	
	Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)	68,00	
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kota Makassar	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90%	Seluruh Kecamatan
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	85%	Badan Kesatuan Bangda dan Politik
	Sasaran 5.2.2: Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kota Toleran	4,862	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	85%	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan, Narkotika, Fasilitasi Kerukunan, Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	85%	
PD 8: Peningkatan kualitas keluarga dan Pembangunan gender, Pemberdayaan	**Tujuan 6.1:** Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	63,15	
	Sasaran 6.1.1: Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	0.177	

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (*Outcome*)	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	75%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
	Sasaran 6.1.2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	70.60	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	65,55%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
	Sasaran 6.1.3: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	61	
		Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,518	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	17.75%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Tujuan 6.2: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran	Tingkat Kemiskinan (%)	3,46	
	Sasaran 6.2.1: Menurunnya Disparitas Pendapatan	Gini Rasio	0,359	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	Dinas Sosial
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	80%	
	Sasaran 6.2.2: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	42,51	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	61.00	Dinas Ketenagakerjaan
	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas terlantar yang memperoleh	100%	Dinas Sosial

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (*Outcome*)	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
		rehabilitasi sosial di luar panti		
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	
		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	
		Jumlah Warga Negara Gelandang dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	100%	
PD 9: Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	**Tujuan 7.1:** Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,38	
	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	74,15	
		Indeks Kualitas Udara	75,52	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	36,13	
		Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	10	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	6,23%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	6%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	90%	Seluruh Kecamatan
	Tujuan 7.2: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	107	
	Sasaran 7.2.1: Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah	0,50	
		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,98	
	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	100%	Badan

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (*Outcome*)	Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung Jawab
		layanan informasi rawan bencana		Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	
	Program Penanganan Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	Dinas Sosial
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai Waktu Tanggap (*Response Time* 15 Menit)	100%	
	Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	6%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	0.46	Dinas Perhubungan
		Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	60%	

Sebagai langkah konkret mencapai tujuan dan sasaran, di dalam RPJMN Tahun 2025-2029, diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas. Kegiatan Prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian visi, misi dan Program Strategis (Janji Politik). Kegiatan Prioritas ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMD Tahun 2O25-2O29, yang disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik SKPD, BUMD Swasta dan Stakeholder lainnya. Kegiatan Prioritas RPJMD dalam pencapaian Program Strategis dan Program Unggulan (Janji Politik) Kota Makassar Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel IV.10.
Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja RPJMD
Dalam Pencapaian Janji Politik Kota Makassar Tahun 2025-2029

Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung-jawab
Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja			
1. Membangun *Makassar Creative Hub* sebagai wadah kreatifitas, pengembangan *skill*, dan *Co-Working Space* di setiap Kecamatan	• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif sebanyak 500 Orang 2. Fasilitasi Kegiatan Sertifikasi bagi pekerja industri Pariwisata 200 orang 3. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 300 orang 4. Fasilitasi Pelatihan Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas 500 orang	Dinas Pariwisata
	• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pembangunan dan Pembentukan *Makassar Creative Hub* pada 5 Lokasi	
	• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi SDM siap pakai sebanyak 150 Orang 2. Makassar *Skill Competition* (1 kali) 3. Sertifikasi Kompetensi sebanyak 100 orang	
2. Pemberian modal usaha UMKM	Program Pengembangan UMKM	1. Fasilitasi Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM (Target 100 Koperasi dan 300 UMKM) 2. Fasilitasi Akses pembiayaan KUR (Target 153 KKMP, 50 Koperasi non KKMP dan 150 UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3. Membentuk Gerai UMKM pada 153 kelurahan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik (30 kelurahan) 2. Peningkatan Kualitas Mutu produk dan Penumbuhan Kemampuan Usaha sebanyak 1000 UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. Pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW	Program Pemberdayaan Usaha Menengah.	1. Pengembangan dan Pembinaan Melalui Inkubator Center sebanyak 1000 UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung-jawab
	Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)		Menengah
5. Penciptaan 10 titik akses PKL	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Pelatihan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (2 titik akses PKL) 2. Penataan dan Pembinaan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6. Pemberdayaan ekonomi wilayah tempat pembuangan akhir	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik (280 orang yang dilatih untuk daur ulang sampah plastik)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7. Pembangunan pusat budidaya dan wisata mangrove di wilayah pesisir dan pulau	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Penyusunan masterplan dan DED pengembangan Kawasan ekowisata Mangrove (Lantebung, Untia dan Lakkang); 2. Pelatihan tata kelola destinasi dan pelatihan manajemen kepariwisataan bagi 6 KSW	Dinas Pariwisata
8. Menggalakkan konsep *urban farming* pada masyarakat	• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Pembentukan Kelompok *Urban Farming* Pada 15 Lokasi 2. Pengadaan Bibit/Peralatan *Urban Farming*	Dinas Perikanan dan Pertanian
	• Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pembangunan Storage Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
9. Relaksasi PBB Bagi Pensiunan Pejabat Negara, Guru, Polri, Pensiunan BUMN/BUMD dan Veteran Pejuang	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2, 50% bagi WP Pensiunan Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri, Pensiunan BUMN, Pensiunan BUMD termasuk istri/suami, dan/atau janda/dudanya 2. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2, 75% bagi WP orang pribadi Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Veteran Pembela Kemerdekaan, dan penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya termasuk janda/dudanya 3. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi pensiunan swasta dengan penghasilan terakhir di bawah Rp. 4 jt 4. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu secara ekonomi	Badan Pendapatan Daerah
10. Relaksasi Pajak Reklame bagi UMKM	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Izin penyelenggaraan reklame tidak berlaku bagi: Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut,	Badan Pendapatan Daerah

Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung-jawab
		dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m^2 (dua meter persegi) dan menempel di bangunan miliknya/ dikuasai	
11. Relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penataan regulasi daerah dan tata Kelola Investasi daerah Kota Makassar dan investasi tumbuh serta pembentukan *command center* (fasilitasi investasi) investasi daerah untuk layanan proaktif 2. Pelatihan dan intervensi *MINDSPACE Service Excellent*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. *Updating* data PBB-P2 2. Optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB 3. Koordinasi dengan SKPD pengelola retribusi untuk pembayaran retribusi secara non tunai 4. Integrasi data dengan SKPD terkait (*host to host* Makassar Super Apps) 5. Pemasangan stiker pemutakhiran data dan pendaftaran potensi seluruh Objek Pajak Daerah 6. Sosialisasi semua jenis Pajak Daerah 7. Mengintensifkan pengawasan, pengendalian, penindakan, dan penagihan piutang Pajak Daerah secara lebih *massif* 8. GIS pemutakhiran data dan pendaftaran potensi seluruh Objek Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
13. Perlindungan dan bantuan hukum bagi tenaga kerja dan Makassar Berbagi Jaminan Sosial (Berjasa)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Melakukan Pendampingan Hukum: a. Litigasi b. Non Litigasi	Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
	• Program Hubungan Industrial • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan • Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Hari Tua) bagi 45.000 pekerja rentan 2. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, dan Jaminan Kecelakaan Kerja) bagi 36.466 pekerja rentan 3. Pemberian Jaminan Sosial bagi 17.217 pekerja keagamaan, Kader Kesehatan/KB, Rt/Rw	Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk KB, Sekretariat Daerah, dan Seluruh Kecamatan
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
14. Gratis seragam dan Peralatan	Program Pengelolaan	Pemberian Seragam Gratis untuk siswa SD dan SMP di Kota Makassar	Dinas Pendidikan

Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung-jawab
sekolah bagi siswa-siswi SD dan SMP	Pendidikan		Dinas Koperasi, UKM
15. Penyediaan ambulance secara gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Operasional Ambulans Laut Operasional ambulans Puskesmas dan RSUD	Dinas Kesehatan
16. Penambahan Insentif Nakes pada fasilitas kesehatan pemerintah di pulau-pulau	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemberian tunjangan tenaga medis dan paramedis pulau berdasarkan zonasi wilayah	Dinas Kesehatan
17. Layanan Gratis pemeriksaan dan Pengantaran Obat Pasien Rawat Jalan dari RS ke Rumah Pasien	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan motor operasional pengantaran obat sebanyak 2 unit	Dinas Kesehatan
18. Penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan pulau	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeriksaan kesehatan terpadu dokter spesialis untuk masyarakat pulau (4 kali dalam setahun)	Dinas Kesehatan
19. Pembangunan gedung Dinas Pendidikan *(Education City Hall)*	Program Pengelolaan Pendidikan	1 unit Gedung Kantor Dinas Pendidikan/*Education City Hall*	Dinas Pendidikan
20. Pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi	Program Kepegawaian Daerah	Peningkatan kompetensi guru melalui lanjut studi dengan pemberian beasiswa sebanyak 15 Orang untuk jenjang S2, dan 10 Orang untuk jenjang S3	Badan Kepegawaian dan Pengembang-an SDM Daerah
21. Pemberian Tunjangan bagi Wali Kelas SD dan SMP yang bertugas di pulau-pulau	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemberian tunjangan khusus sebagai bentuk kompensasi kepada tenaga Pendidik dan Kependidikan di daerah khusus (perbatasan, atau pulau-pulau)	Dinas Pendidikan
22. Pembangunan Sekolah terintegrasi PAUD/SD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan unit sekolah baru terintegrasi (PAUD/SD)	Dinas Pendidikan
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota			

Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung-jawab
Yang Berkeadilan			
23. Perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*;	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT (1 unit); 2. Optimalisasi SPALD terpusat Skala Perkotaan (1 unit); 3. Pembangunan SPALD skala Perkotaan dengan sambungan IPAL Losari 480 m^3/hari atau 1000 SR; 4. Optimalisasi SPALD terpusat Skala Permukiman (1 unit); 5. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (1500 rumah tangga); 6. Operasi dan pemeliharaan SPALD (10 unit); 7. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan SPALD (210 orang); 8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara SPALD (100 Penyelenggara) Penyediaan Unit Pengolahan Setempat (1167 Rumah Tangga); 9. Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPALD (3 dokumen)	Dinas Pekerjaan Umum
	• Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Pelabuhan Baru, Kawasan Tamalanrea- Biringkanaya dan Kawasan Bantaran Kanal Jongaya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	• Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	20 perumahan dilengkapi PSU	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24. Pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional	Program Penataan Bangunan Gedung	1. Dokumen Amdal dan Andal Lalin Stadion; 2. Penimbunan/pematangan lahan (6,5 Ha); 3. Konstruksi Stadion Sepak Bola (1 unit)	Dinas Pekerjaan Umum
25. Revitalisasi pasar tradisional di Barombong	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan modern di lokasi strategi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
26. Penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penyediaan/Pemeliharaan Bus Listrik 2 unit 2. Penyusunan Masterplan Perparkiran 3. Pengamanan Kegiatan *Car Free Day* 4. Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
27. Bedah Rumah bagi KK Prasejahtera	Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan 130 unit RTLH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
28. Memastikan kebutuhan air bersih warga terpenuhi, gratis	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	1. Peningkatan SPAM, 4 unit dengan kapasitas 1,2 liter/detik/ unit (200 SR); 2. Pembangunan pengolahan air minum dan SPAM jaringan perpipaan 8 unit dengan kapasitas 1,2 liter/detik/ unit (400 SR).	Dinas Pekerjaan Umum PDAM

Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung-jawab
pemasangan instalasi air bersih	Minum	3. Operasi dan Pemeliharaan sarana air siap minum dan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 5 unit. 4. Perluasan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 200 SR.	
Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, serta Pariwisata			
29. Pembuatan *blue print* pembangunan situs kota tua di Makassar	Program Pelestarian dan Pengelolaan cagar Budaya	Penyusunan Regulasi Hukum terkait Zonasi kawasan Kota lama Makassar	Dinas Kebudayaan
30. Menghidupkan etnoturisme di kota makassar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pembentukan Kelompok sadar Wisata di 2 Lokasi yakni (Kampung Rama dan Kawasan Pecinan) 2. Penyusunan dokumen masterplan dan DED pengembangan Kawasanekturisme (Kampung Paropo, Kampung Rama dan Kawasan Pecinan); 3. Pelatihan tata kelola destinasi dan pelatihan manajemen kepariwisataan bagi masyarakat di kawasan Kampung Paropo, Kampung Rama dan Kawasan Pecinan	Dinas Pariwisata
31. Penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah	Program Pengelolaan Persampahan	1. Membentuk 8 BSU pada kecamatan yang memiliki kanal 2. Menyediakan 12 tempat sampah pilah sepanjang kanal 3. Melakukan sosialisasi di 4 lokasi kepada masyarakat di sekitar kanal terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 4. Menerbitkan surat edaran terkait penataan kanal 5. Menjalin kemitraan dengan 5 pihak swasta untuk penyediaan sarana persampahan, edukasi, dan sosialisasi pengelolaan sampah sepanjang kanal	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Koordinasi teknis dengan BBWS dan melaksanakan pembersihan kanal setiap minggu, dan pengangkatan sedimen 2 kali sebulan (3 kanal: Jongaya, Sinrijala dan Pannampu)	Dinas Pekerjaan Umum
32. Penataan Pesisir dan Pulau sebagai sentra baru ekoturisme	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pembentukan Kelompok sadar Wisata di 2 Lokasi yakni (Pulau Barrang caddi dan Pulau Langkai) 2. Penyusunan dokumen masterplan dan DED pengembangan Kawasan ekoturisme (Pulau Lanjukang, Pulau Barrang Caddi dan Pulau Barrang Lompo); 3. Pelatihan tata kelola destinasi dan pelatihan manajemen kepariwisataan bagi masyarakat dan KSW di Pulau Lanjukang, Pulau Barrang Caddi dan Pulau Barrang Lompo	Dinas Pariwisata
Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata			

Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung-jawab
Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum			
33. Digitalisasi Pelayanan publik, *Mulia Super Apps*	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Integrasi Layanan Publik melalui *Super Apps*: perluasan layanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, pendidikan, pajak, dan bantuan sosial.	Dinas Komunikasi dan Informatika
34. Desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan	• Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyediaan sarana pelayanan administrasi berupa komputer dan jaringan internet pada 153 kelurahan	Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)
	• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Dinas Komunikasi dan Informatika
35. Melaksanakan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi	Program Kepegawaian Daerah	1. Peninjauan dan pemutakhiran dokumen analisis jabatan (Anjab) dan evaluasi jabatan (Evjab) 2. Penyusunan pedoman internal pelaksanaan seleksi terbuka berbasis meritokrasi 3. Penyesuaian dan digitalisasi sistem manajemen kepegawaian untuk mendukung seleksi terbuka (integrasi dengan SIASN/BKPSDM) 4. Penyusunan database rekam jejak dan kompetensi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembang-an SDM Daerah
36. Pemberian insentif dan pencairan TPP bagi pegawai secara proporsional dan tepat waktu	• Program Kepegawaian Daerah	Menerapkan sistem digital dalam pengelolaan TPP dan mengembang-kan formula perhitungan TPP yang lebih berbasis pada kinerja aktual	Badan Kepegawaian dan Pengembang-an SDM Daerah
	• Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemberian Tambahan penghasilan ASN 2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
37. Pemilihan langsung RT/RW	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1. Monitoring dan Evaluasi Ketua RT/RW 2. Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT/RW, bila diperlukan	Bagian Pemberdaya-an Masyarakat Sekretariat Daerah
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)
38. Mengaktifkan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelaksanaan Posko KAMTIBMAS di 996 RW pada 153 Kelurahan	Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)

Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung-jawab
39. Pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Monitoring dan verifikasi data penerima insentif PKA tahun 2026 2. Pemberian insentif bagi PKA 2026	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah
Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga			
40. Penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas	• Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan dan/atau rehabilitasi 1 km pedestrian	Dinas Pekerjaan Umum
	• Program Penataan Bangunan Gedung	1. Pembangunan 15 unit Bangunan Gedung Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum
41. Pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan	• Program Perlindungan Perempuan • Program Perlindungan Khusus Anak	Penambahan honor jasa bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
	• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak korban tindak kekerasan dan disabilitas 2. Pendampingan pekerja sosial kepada anak yang berhadapan hukum (50 anak) 3. Fasilitasi anak balita terlantar untuk mendapatkan orang tua asuh (31 Anak)	Dinas Sosial
42. Pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel	• Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan kapasitas dan pelatihan keterampilan bagi perempuan dan difabel (100 orang)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
	• Program Rehabilitasi Sosial	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya disabilitas 2. Pemberian pelatihan keterampilan bagi disabilitas	Dinas Sosial
43. Pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Melakukan Pendampingan Hukum: a. Litigasi b. Non Litigasi	Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
44. Menjamin siwa/i ATS dan APS	Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dengan mengembalikan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah dengan pemberian	Dinas Pendidikan

Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung-jawab
untuk kembali bersekolah		beasiswa (SD 200 Siswa dan SMP 200 Siswa)	
45. Makassar bebas Anak Jalanan	• Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Pemantapan dan penertiban awal dengan fokus utama penguatan dasar hukum, peningkatan kapasitas internal, dan penertiban awal yang terstruktur. 2. Intensifikasi penertiban dan sinkronisasi data meliputi peningkatan intensitas dan jangkauan penertiban, serta memperkuat koordinasi dengan dinas sosial	Satuan Polisi Pamong Praja
	• Program Rehabilitasi Sosial	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya disabilitas 2. Pemenuhan kebutuhan dasar 20 anak jalanan dan pengemis (fasilitasi NIK, fasilitasi ke layanan pendidikan dan kesehatan) 3. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi anak jalanan dan pengemis 4. Pelatihan keterampilan bagi 50 anak jalanan usia 15-18 tahun dan pengemis produktif	Dinas Sosial
46. Pembangunan gelanggang remaja dan *sport center*	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Serta Mitigasi Bencana			
47. Meningkatkan persentase ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	-	Dinas Lingkungan Hidup
		1. Identifikasi Potensi RTH (1 Dokumen) 2. Inventarisasi RTH (15 Kecamatan) 3. Pendampingan Penyusunan PERDA 4. Pengelolaan Mangrove melalui CSR 5. Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan RTH 6. Penambahan 1 lahan pemakaman	
48. Revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif	• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Pengadaan bibit/pohon) 2. Revitalisasi Taman Kota	Dinas Lingkungan Hidup
	• Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Pemetaan kondisi eksisting taman kota (fungsi, aksesibilitas, aspek ramah anak dan ramah gender). 2. Konsultasi publik dengan anak, remaja, perempuan, kelompok difabel, masyarakat sekitar. 3. Penyusunan masterplan revitalisasi taman bermain dan kreatif (standar KLA, SNI taman bermain). 4. Penyusunan regulasi/Perwali/Surat Edaran teknis tentang taman ramah anak.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja 2026	SKPD Penanggung-jawab
49.Gratis iuran sampah bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem	• Program Pengelolaan Persampahan	Sosialisasi Perwali dan monev terkait iuran sampah gratis	Dinas Lingkungan Hidup
	• Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemutakhiran data rumah tangga kategori miskin sebagai calon penerima layanan gratis iuran sampah, dengan daya listrik R1-450 VA dan R1-900 VA pada 153 kelurahan	Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)
50.Penguatan Mitigasi bencana pada warga masyarakat	• Program Penanggulangan Bencana	1. Peningkatan kapasitas kawasan di kecamatan rawan bencana 2. Pelatihan Pencegahan dan mitigasi kepada masyarakat rawan bencana terutama kepada kelompok rentan 250 orang 3. Penyediaan Peralatan kebencanaan (*Early Warning System*)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	• Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (53 Kelurahan) 2. Pelatihan Relawan Kebakaran (Target 90 0rang) 3. Tanggap kebakaran Rumah Tangga (Target 22 Keluarga) 4. Pelatihan dan Diklat Aparatur Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tujuan pembangunan kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, konsisten dengan tujuan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, yaitu mengurangi ketimpangan pembangunan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Sesuai dengan arah RPJMN Tahun 2025-2029 untuk penguatan fondasi transformasi, maka fokus pembangunan kewilayahan pada tahun 2026, diantaranya adalah: peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya, Optimalisasi potensi PAD melalui tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi, Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan, peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya, Peningkatan PDRB sektor pariwisata.

Tabel IV.11.
Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan
Kota Makassar Tahun 2025-2029

No	Wilayah	Arah pembangunan kewilayahan		
		Prioritas pembangunan daerah		Indikasi highlight intervensi
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar	
1	KOTA MAKASSAR	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan *Makassar Creative Hub*, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; ▪ pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; ▪ penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), ▪ penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; ▪ pemberdayaan masyarakat yang adaptif termasuk pemberdayaan ekonomi wilayah tempat pembuangan akhir serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui ▪ pemberian modal dan pendampingan UMKM; ▪ pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; ▪ pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal ▪ peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; ▪ Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan	Optimalisasi potensi PAD melalui: ▪ pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; ▪ penguatan optimalisasi pengelolaan,dan penguatan sistem keamanan data; ▪ peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta ▪ penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi ▪ intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
				Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui: ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya; ▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan; ▪ dukungan pengembangan pelabuhan perikanan Samudera Untia; ▪ peningkatan produktivitas pertanian, dan perikanan yang dipioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas; ▪ pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern		Perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui: ▪ sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI;

No	Wilayah	Arah pembangunan kewilayahan		
		Prioritas pembangunan daerah		Indikasi highlight intervensi
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar	
		dan berdaya saing		▪ penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri ▪ penguatan tata kelola investasi; ▪ peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; ▪ penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui: ▪ pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD dan pembangunan Gedung Dinas Pendidikan *(Educational City Hall)* ▪ peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP, ▪ peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi dan pemberian tunjangan bagi wali kelas SD dan SMP yang bertugas di wilayah kepulauan, dan ▪ peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.
				Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui: ▪ penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, ▪ perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau: ▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital dengan penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan pulau, penyediaan ambulance gratis dan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan utamanya pada fasilitas kesehatan pemerintah di pulau-pulau; ▪ penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak ▪ peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan dan penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir; ▪ pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui: ▪ penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk

No	Wilayah	Arah pembangunan kewilayahan		
		Prioritas pembangunan daerah		Indikasi highlight intervensi
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar	
				peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk pembangunan stadion sepak bola di Kelurahan Untia dan penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; ▪ penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; ▪ penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*, ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; ▪ dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; ▪ peningkatan kualitas saluran drainase; ▪ peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui: ▪ pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; ▪ diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan pesisir dan pulau sebagai sentra baru e*cotourism* serta pembangunan pusat budidaya wisata mangrove di wilayah pesisir; ▪ pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya termasuk pembuatan *blue print* pembangunan situs kota tua; ▪ penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui: ▪ perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; ▪ transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; ▪ pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; ▪ penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar *Super Apps*, ▪ penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; ▪ optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; ▪ penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; ▪ optimalisasi pendapatan dan belanja daerah;

No	Wilayah	Arah pembangunan kewilayahan		
		Prioritas pembangunan daerah		Indikasi highlight intervensi
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar	
				▪ pengendalian inflasi ▪ perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	7. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui: ▪ penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; ▪ peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; ▪ peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; ▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; ▪ pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui: ▪ pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, ▪ peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; ▪ peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; ▪ peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan ▪ peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi.
				Penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui: ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; ▪ penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan ▪ penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda
		5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui: • pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien;
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses

No	Wilayah	Arah pembangunan kewilayahan		
		Prioritas pembangunan daerah		Indikasi highlight intervensi
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar	
				layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; ▪ peningkatan pengendalian pencemaran tanah, air dan udara; ▪ penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta; ▪ dukungan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energy listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan *non-motorized* sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; ▪ penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.

4.2.5. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional Tahun 2026

Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Tema Pembangunan, Indikator Makro Pembangunan, Prioritas Pembangunan, tujuan dan sasaran Kota Makassar tahun 2026 telah selaras dengan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional tahun 2026, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.12.
Keselarasan Tema RKPD Kota Makassar tahun 2026 dengan Tema RKPD Provinsi Sul-Sel dan Tema RKP Nasional Tahun 2026

Tema RKPD Kota Makassar Tahun 2026	Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026	Tema RKP Nasional Tahun 2026
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Meningkatkan Daya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berakhlak dan Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif"	Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif

Tabel IV.13.
Keselarasan Indikator Makro RKP, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar Tahun 2026

No	Indikator Makro	Target RKP Tahun 2026	Target P-RKPD Prov Sul-Sel 2026	Target P-RKPD Kota Makassar 2026	Keterangan
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9 - 6,2	5,9 - 6,2	5,73	Target berdasarkan P-RKPD Provinsi Sul-Sel
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00 - 4,18	4,00 - 4,18	9,53	Target berdasarkan P-RKPD Provinsi Sul-Sel
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 - 7,0	6,50 - 7,00	3,46	Target berdasarkan P-RKPD Provinsi Sul-Sel
4	Rasio Gini	0,346 - 0,352	0,346 - 0,352	0,359	Target berdasarkan P-RKPD Provinsi Sul-Sel
5	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	87,88 - 88,2	87,88 - 88,2	186,75	Target berdasarkan P-RKPD Provinsi Sul-Sel
6	Indeks Modal Manusia	0,54	0,54	85,86 (IPM)	Target berdasarkan P-RKPD Provinsi Sul-Sel
7	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,3	3,3	35,14	Target berdasarkan P-RKPD Provinsi Sul-Sel
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,81	77,81	66,38	Target berdasarkan P-RKPD Provinsi Sul-Sel
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	33,26 - 37,47	33,26 - 37,47	9,53	Target berdasarkan P-RKPD Provinsi Sul-Sel

Tabel IV.14.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sulawesi-Selatan dan Prioritas Nasional/Asta Cita
terhadap Sasaran Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026

Tujuan Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Sel	Prioritas Nasional
1. Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	8. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah	PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
	2. Meningkatnya Kesempatan Kerja, dan Pendapatan Masyarakat	9. Meningkatnya pembangunan perdesaan	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
2. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	8. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah	
	4. Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	7. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global	
	5. Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	6. Meningkatnya produktivitas Ekonomi dan swasembada pangan	
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6. Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
	7. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
	8. Meningkatnya Daya	6. Meningkatnya	PN 2:

Tujuan Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Sel	Prioritas Nasional
	Beli Masyarakat	produktivitas Ekonomi dan swasembada pangan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
4. Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata	9. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	11. Meningkatnya jangkauan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi 16. Meningkatnya kualitas infrastruktur	PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
	10. Meningkatnya Pengendalian dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	16. Meningkatnya kualitas infrastruktur	PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
5. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	11. Meningkatnya Penguasaan IPTEK	15. Meningkatnya inovasi Pembangunan daerah	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
	12. Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang	15. Meningkatnya inovasi Pembangunan daerah	PN 4: Memperkuat Pembangunan

Tujuan Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Sel	Prioritas Nasional
	Pembangunan		Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
6. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	13. Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	7. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global	PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
	14. Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	4. Meningkatnya kualitas Kehidupan beragama dan Pemajuan kebudayaan	PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
	15. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi Kreatif	12. Meningkatnya keterampilan Digital masyarakat	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Tujuan Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Sel	Prioritas Nasional
7. Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif	16. Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	3. Meningkatnya kualitas demokrasi 13. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah daerah 14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
8. Meningkatnya Kualitas Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum	17. Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	4. Meningkatnya kualitas Kehidupan beragama dan Pemajuan kebudayaan	PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
	18. Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	4. Meningkatnya kualitas Kehidupan beragama dan Pemajuan kebudayaan	PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
9. Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	19. Menurunnya Ketimpangan Gender	5. Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
	20. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	5. Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender	
	21. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	5. Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui

Tujuan Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Sel	Prioritas Nasional
			Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
10. Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran	22. Menurunnya Disparitas Pendapatan	10. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
	23. Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	10. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
11. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	24. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17. Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
	25. Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	17. Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama

Tujuan Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Kota Makassar	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Sel	Prioritas Nasional
			untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Tabel IV.15.
Keselarasan Asta Cita/Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan
Dan Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026

Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Sel	Prioritas Pembangunan Kota Makassar
PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PD 1: Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	PD 7: Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	PD 3: Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	PD 7: Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi
	PD 4: Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	PD 5: Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PD 1: Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	PD 3: Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PD 2: Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjina	PD 7: Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD 2: Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjina	PD 9: Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PD 3: Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang	PD 2: Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan

Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Sel	Prioritas Pembangunan Kota Makassar
	berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PD 5: Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	PD 1: Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	PD 6: Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	PD 6: Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital pemerintahan
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal	PD 7: Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	PD 4: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD 8: Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	PD 8: Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan

Sebagai dukungan terhadap Program dan Kegiatan yang menunjang Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional tahun 2026, maka Pemerintah Kota Makassar menetapkan program pembangunan daerah yang disinkronisasi dan menjadi dukungan terhadap prioritas provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV.16.
Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi-Selatan
Dengan Tujuan/Sasaran dan Program Prioritas Kota Makassar Tahun 2026

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PD 5: Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	PD 1: Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Tujuan 1.1: Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi (%)
			Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
				Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri
			Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang kota Makassar
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan
			Program Pengembangan UMKM	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
			Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Kesempatan Kerja. dan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
				PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
				Pertumbuhan Wirausaha

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PD 3: Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	PD 2: Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan	Tujuan 1.2: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah
			Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah
				Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan
				Persentase Penerapan sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
			Sasaran 1.2.2: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Tingkat Inflasi (%)
				Indeks Ketahanan Pangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
				Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan
				Peningkatan Produksi Hortikultura

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKG)
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan
			Sasaran 1.2.3: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investas
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
				Efektivitas Kerja Sama Daerah
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PD 1: Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	PD 3: Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Tujuan 2.1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia
			Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi dalam PAUD
				Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
				Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)
				kesetaraan
				Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional
				Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik
			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
			Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah ibu hamil Mendapatkan pelayanan kesehatan
				Jumlah ibu bersalin mendapatkan Pelayanan kesehatan
				Jumlah bayi baru Lahir mendapatkan Pelayanan kesehatan
				Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan
				Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan
				Jumlah Warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan
				Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
				Jumlah Warga Negara penderita Diabetes militus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)
				Jumlah Warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan
				Jumlah Warga Negara tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan
				Persentase warga negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
			Sasaran 2.1.3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah/Per Kapita/Tahun)
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investas
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
				Pertumbuhan Wirausaha
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di	PD 7: Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	PD 4: Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	Tujuan 3.1: Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata	Indeks Layanan Infrastruktur
			Sasaran 3.1.1: Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan
				Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan
			Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan
			Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum)

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)
Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni pada wilayah pencegahan kumuh
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Makassar
				Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi. erosi. dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Makassar
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik
			Program Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu
			Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang (%)
				Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%)
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
PN 2:	PD 3:	PD 5:	Tujuan 4.1:	Indeks Inovasi Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	
	PD 4: Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi
			Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan
			Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah (%)
			Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan
			Tujuan 4.2: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi. Makan dan Minum (%)
			Sasaran 4.2.1: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)
				Jumlah daya tarik pariwisata yang difasilitasi (Lokasi)
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
			Sasaran 4.2.2: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Persentase peningkatan karya budaya terdaftar dalam Warisan Budaya Takbenda (%)
				Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)
				Persentase Warisan Budaya Tak Benda Yang di Tetapkan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan
			Sasaran 4.2.3: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Makassar (Industri)
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual
				Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Makassar
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	PD 6: Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	PD 6: Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital	Tujuan 5.1: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi
			Sasaran 5.1.1: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)
				Urusan Wajib Pelayanan Dasar
				Persentase Penurunan SILPA
				Persentase laporan keuangan tepat waktu
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
				Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase SKPD yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PD 1: Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	PD 7: Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Tujuan 5.2: Meningkatnya Kualitas Keamanan. Ketentraman. dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	PD 3: Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,	PD 2: Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan,		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kota Makassar
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)
Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjina		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan
			Sasaran 5.2.2: Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kota Toleran
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan, Narkotika, Fasilitasi Kerukunan, Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD 8: Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	PD 8: Peningkatan kualitas keluarga dan Pembangunan gender, Pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Tujuan 6.1: Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga
			Sasaran 6.1.1: Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
			Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
			Sasaran 6.1.2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar
			Sasaran 6.1.3: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda
				Indeks Pembangunan Keolahragaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
			Tujuan 6.2: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran	Tingkat Kemiskinan (%)
			Sasaran 6.2.1: Menurunnya Disparitas Pendapatan	Gini Rasio
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi
			Sasaran 6.2.2: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar
			Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas terlantar yang memperoleh

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)
				rehabilitasi sosial di luar panti
				Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
				Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
				Jumlah Warga Negara Gelandang dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD 2: Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjina	PD 9: Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Tujuan 7.1: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air
				Indeks Kualitas Udara
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan
				Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
			Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan
			Tujuan 7.2: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana
			Sasaran 7.2.1:	Indeks Ketahanan Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)
			Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)
			Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
				Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
				Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
			Program Penanganan Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran
			Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat
				Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

4.2.6. Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025 dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Makassar Tahun 2026

Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, sebagai dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional tahun 2026, tercermin pada Keselarasan hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025, untuk tahun rencana 2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional, sesuai tabel berikut:

Tabel IV.17.
Keselarasan Rekorterenbang Tahun 2025 terhadap P-RKPD Kota Makassar Tahun 2026

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
1	1.01	Urusan pemerintahan bidang pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	Program pengelolaan pendidikan	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik		19000	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
2	1.02	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	Unit	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	6	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	10	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	24	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
3	1.03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	323,00 - Meningkatnya ketahanan	1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	1.2	1,2	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
		dan penataan ruang	tambah di dalam negeri.	air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air			1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	500	200	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
					1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
4	1.04	Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	150	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	40	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
						Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	20	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
5	1.05	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan	1.05.03	Program penanggulangan bencana	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk				1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar									
			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).				1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02 1.05.04	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	4	4	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).			Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	4	4	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
				standar									
6	1.06	Urusan pemerintahan bidang sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	Program pemberdayaan sosial	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	100	200	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100.00	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
7	2.07	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	371,00 - Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	608	400	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,		2.07.05	Program hubungan industrial	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang	Perusahaan	300	300	Provinsi : kabkota : skpd :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.					Perusahaan	Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				apip :
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	34722	24.306	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
8	2.09	Urusan pemerintahan bidang pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	153	150	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	12	3	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
					2.09.04	Program penanganan kerawanan pangan	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	2	3	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
9	2.11	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03 2.11.11	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	15	10	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			biru										
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			Program pengelolaan persampahan	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	411731	411731	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	275.733	275.733	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
10	2.12	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependuduk	2.12.02	Program pendaftaran penduduk	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	1	6	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
					2.12.03	Program pencatatan sipil	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal	Laporan	1	6	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			.	an berbasis digital				Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K	Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan d				
11	2.14	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	3	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	49	5	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
					2.14.04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	12	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
12	2.15	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	1000	520	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
13	2.17	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	153	30	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	153	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
					2.17.07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	10.000	700	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	1870	600	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
14	2.18	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	369,00 - Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	12	12	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	200	12	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
15	2.22	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	Program pengembangan kebudayaan	2.22.02.2.01.0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	28	25	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	230	350	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	230	350	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
					2.22.05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	6	6	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	1	5	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
16	2.23	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	Program pembinaan perpustakaan	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	65	4	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	Program pembinaan perpustakaan	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	5000	5000	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	340,00 - Meningkatnya Kegemaran	2.23.03	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan,	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	100	700	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
			prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membaca dan Literasi Masyarakat				Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	2	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
17	2.24	Urusan pemerintahan bidang kearsipan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	343,00 - Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	Program pengelolaan arsip	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	10	5	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Penggunaan	20	5	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
18	3.25	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	Program pengelolaan perikanan tangkap	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	160	150	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	27	41	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
							3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	440	0	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
					3.25.05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	102	51	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	134	100	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
19	3.26	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi	0	3	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	2	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
					3.26.04	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	1	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
19	3.27	Urusan pemerintahan bidang pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4	10	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana	Laporan		1	Provinsi : kabkota :

No	Kode Bidang Urusan	Bidang urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Rakortek-renbang 2025	Target RKPD 2026	Ket
								Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pendukung Pertanian Lainnya				skpd : apip :
							3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	0	40	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
20	3.30	Urusan pemerintahan bidang perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	Program pengembangan ekspor	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	5	15	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha		10.00	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
21	3.31	Urusan pemerintahan bidang perindustrian	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	Program perencanaan dan pembangunan industri	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	4	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
					3.31.03	Program pengendalian izin usaha industri	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang	Dokumen	1	4	Provinsi : kabkota : skpd : apip :
					3.31.03	Program pengendalian izin usaha industri	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi,	Dokumen	1	4	Provinsi : kabkota : skpd : apip :

4.2.7. Keselarasan Dukungan Program dan Kegiatan/Subkegiatan Kota Makassar terhadap Kegiatan Prioritas Utama

Dalam struktur perencanaan pembangunan nasional, Kegiatan Prioritas Utama (KPU) merupakan instrumen strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengawal pencapaian Prioritas Nasional (PN). KPU berfungsi sebagai komitmen operasional yang mengikat kementerian/lembaga teknis di pusat dengan pemerintah daerah. Terdapat pula 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) merupakan klasifikasi atas program kerja prioritas nasional atau kumpulan program kerja pemerintah sebagai implementasi prioritas nasional yang dilaksanakan kementerian dan lembaga nonkementerian (K/L) dengan dukungan pemerintah daerah sesuai direktif presiden untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi, dan sinkronisasi baik dalam pengambilan keputusan maupun operasionalisasinya. Pelaksanaan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional memerlukan dukungan dan sinergi pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk mengoptimalkan pencapaiannya. Agar KPU dan PKPN dapat terlaksana secara efektif di lapangan, Pemerintah Kota Makassar mewujudkan keselarasan melalui dukungan konkret nomenklatur Program hingga Sub-Kegiatan yang direlevansikan langsung dengan target-target KPU dan PKPN. Adapun matriks keselarasan dukungan program sub kegiatan dan target pemerintah Kota Makassar terhadap Kegiatan Prioritas Utama dan Program Kerja Prioritas Nasional tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.18.
Kegiatan Prioritas Utama dan Dukungan Program/Subkegiatan
Kota Makassar Tahun 2026

No	Kegiatan Prioritas utama (KPU)	Dukungan Kota Makassar dalam P- RKPD 2026			Ket
		Program	Sub kegiatan	Target Tahun 2026	
Prioritas Nasional 1	1 Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	12 Laporan	
			Pelayanan Informasi Publik	30 Permohonan	
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	12 Rekomendasi	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	368 Media	
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	300 Orang	
Prioritas Nasional 2	2 Pembangunan pangan hewani	1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	
		2. Program pengelolaan perikanan budidaya	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32 Unit	
	3 Pembangunan pangan lokal dan nabati	1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10 Laporan	
		2. Program penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	40 Ha	
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	4 Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12 Liter/detik	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3 Unit	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR	

No	Kegiatan Prioritas utama (KPU)		Dukungan Kota Makassar dalam P- RKPD 2026			Ket
			Program	Sub kegiatan	Target Tahun 2026	
				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4,8 Liter/detik	
	5	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	21 Sistem Drainase Perkotaan	
				Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	21 Sistem Drainase Perkotaan	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	40 Sistem Drainase Perkotaan	
			2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1 Unit	
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	240 M^3/Hari	
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1 Unit	
	6	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyediaan Infrastruktur	1 Unit	
			2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	2 Unit	
				Pengembangan Pendidikan	1 Dokumen	
				Penyediaan Infrastruktur	1 Unit	
				Pengembangan Sistem Pemasaran	1 Dokumen	
				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	3 Lembaga	
				Penyusunan Dokumen Strategis Bidang Ekonomi Kreatif Daerah	1 Dokumen	
				Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	1 Produk	
	7	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	

No	Kegiatan Prioritas utama (KPU)	Dukungan Kota Makassar dalam P- RKPD 2026			Ket
		Program	Sub kegiatan	Target Tahun 2026	
		2. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	15 Laporan	
			Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	8 Laporan	
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	51 Perangkat Daerah	
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2 Dokumen	
			Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	
	8 Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	1 Kegiatan	
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	14 Lokasi	
		2. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	60 Dokumen	
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65 Badan Usaha	
	9 Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	1. Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	20 Kelompok	
			Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	3 Laporan	
		2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11 Laporan	
	10 Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	1. Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	20 Kelompok	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 Dokumen	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2 Unit	

No	Kegiatan Prioritas utama (KPU)		Dukungan Kota Makassar dalam P- RKPD 2026			Ket
			Program	Sub kegiatan	Target Tahun 2026	
				Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	3 Laporan	
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	411731 Ton	
			2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11 Laporan	
Prioritas Nasional 3	11	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	
			2. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Penyediaan Infrastruktur	1 Unit	
	12	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	
Prioritas Nasional 4	13	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	1. Program pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0 Unit	
			2. Program pembinaan perpustakaan	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	5000 Eksemplar	
	14	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	Program pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	18880 Peserta Didik	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah (Menengah Pertama)	19000 Peserta Didik	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	32 Satuan Pendidikan	
	15	Penurunan kematian ibu dan anak	Program pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27776 Orang	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	26514 Orang	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	25616 Orang	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	86472 Orang	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	197812 Orang	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0 Dokumen	

No	Kegiatan Prioritas utama (KPU)	Dukungan Kota Makassar dalam P- RKPD 2026			Ket
		Program	Sub kegiatan	Target Tahun 2026	
	16 Pencegahan dan penurunan stunting	1. Program pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	
		2. program pembinaan keluarga berencana	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	15 Kecamatan Laporan	
			Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	55 Mitra Kerja Organisasi	
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3460 Orang	
	17 Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Program pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27776 Orang	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	26514 Orang	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	25616 Orang	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	86472 Orang	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	197812 Orang	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	971476 Orang	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	153951 Orang	
	18 Penuntasan TBC	Program pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	33122 Orang	
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6815 Orang	
	19 Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	1. Program pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	
		2. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0 Laporan	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	12 Orang	

No	Kegiatan Prioritas utama (KPU)	Dukungan Kota Makassar dalam P- RKPD 2026			Ket
		Program	Sub kegiatan	Target Tahun 2026	
	20 Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	Program pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	
	21 Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Program pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	Pengembangan Rumah Sakit	1 Unit	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4 Unit	
	22 Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program peningkatan Kapasitas sumber Daya manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Dokumen	
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	162 Orang	
	23 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya	1. Program pengembangan kebudayaan	Perlindungan Pembangunan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	25 Objek	
		2. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	12 Objek	
			Penetapan Cagar Budaya	6 Objek	
			Perlindungan Cagar Budaya	4 Objek	
			Pengembangan Cagar Budaya	5 Objek	
			Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Objek	
		3. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	200 Orang	
			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2 Eksemplar	
			Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	1000 Eksemplar	
			Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	250 Eksemplar	

No	Kegiatan Prioritas utama (KPU)		Dukungan Kota Makassar dalam P- RKPD 2026			Ket
			Program	Sub kegiatan	Target Tahun 2026	
			4. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	200 Orang	
	24	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi	Program riset dan inovasi daerah	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	7 Laporan	
				Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	3 Pelatihan	
				Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	
	25	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	Program Pengembangan daya Saing keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	100 Orang	
				Pembentukan dan Penyediaan Sistem Data Keolahragaan Terpadu di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	
				Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	150 Orang	
Prioritas Nasional 6	26	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	1. Program Perlindungan dan Jaminan sosial	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Keluarga	1200 Orang	
			2. Program pemberdayaan sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Lembaga	
				Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	231 Orang	
	27	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif	1. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	590 Unit Usaha	
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	700 Unit Usaha	
				Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	30 Unit Usaha	
				Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	15 Unit Usaha	

No	Kegiatan Prioritas utama (KPU)		Dukungan Kota Makassar dalam P- RKPD 2026			Ket
			Program	Sub kegiatan	Target Tahun 2026	
				Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	6000 Unit Usaha	
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	600 Orang	
			2. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	192 Orang	
	28	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	1. Program peningkatan prasarana. Sarana dan utilitas umum (PSU)	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	11 Lokasi	
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1 Lokasi	
				Pembangunan Jalan	14,87 Km	
			2. Program penyelenggaraan jalan	Rehabilitasi Jalan	24,37 Km	
				Rekonstruksi Jalan	9,15 Km	
				Pemeliharaan Rutin Jalan	28,75 Km	
			3. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	10 Ha	
Prioritas Nasional 7	29	Pencegahan tindak pidana korupsi	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.	4 Laporan	
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	88 Laporan	
				Reviu Laporan Kinerja	13 Laporan	
				Reviu Laporan Keuangan	14 Laporan	
				Kerjasama Pengawasan Internal	30 Kesepakatan	
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12 Laporan	
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.	24 Laporan	
			2. Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	3 Dokumen	
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1 Laporan	
				Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	

No	Kegiatan Prioritas utama (KPU)		Dukungan Kota Makassar dalam P- RKPD 2026			Ket
			Program	Sub kegiatan	Target Tahun 2026	
			3. Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	51 Dokumen	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	51 Dokumen	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	51 Dokumen	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	51 Dokumen	
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	
	30	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	500 Orang	
				Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	300 Orang	
	31	Transformasi digital layanan publik prioritas	Program pengelolaan aplikasi informatika	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	51 Dokumen	
				Penyediaan Akses Internet	51 Perangkat Daerah	
				Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	3 Aplikasi	
	32	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	Program pengelolaan pendapatan daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 Laporan	
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	51000 Obyek Pajak	
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	22500 Layanan	
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen	

No	Kegiatan Prioritas utama (KPU)	Dukungan Kota Makassar dalam P- RKPD 2026			Ket
		Program	Sub kegiatan	Target Tahun 2026	
			Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	
	33 Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak	Program pengelolaan pendapatan daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	
Prioritas Nasional 8	34 Penguatan karakter dan jati diri bangsa	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Dokumen	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	
			Pembentukan Paskibraka	70 Orang	
		2. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	1 Dokumen	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	1000 Orang	
			Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	200 Orang	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	
			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	200 Orang	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	200 Orang	

No	Kegiatan Prioritas utama (KPU)		Dukungan Kota Makassar dalam P- RKPD 2026			Ket
			Program	Sub kegiatan	Target Tahun 2026	
				Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1 Unit	
				Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1 Organisasi	
				Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kabupaten/kota	200 Orang	
	35	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	1. Program Pengembangan Kebudayaan	Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	25 Objek	
			2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya	Pengembangan Cagar Budaya	5 Objek	
				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	12 Objek	
				Penetapan Cagar Budaya	6 Objek	
				Perlindungan Cagar Budaya	4 Objek	
				Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Objek	
			3. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2 Eksemplar	
	36	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut	1. Program penanggulangan bencana	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	4 Kawasan	
			2. Program Pengendalian Pencemaran an/atau Kerusakan Lingkungan hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2 Dokumen	
			3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	110 Ha	

4.2.8. Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan

RKP Tahun 2026 konsisten memuat tujuan yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu mengurangi ketimpangan pembangunan antar Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Sejumlah intervensi telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 untuk mendukung pencapaian prioritas nasional di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar yang dirumuskan berdasarkan Prioritas Nasional, Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026 dengan RKP 2026, juga tercermin dari intervensi pembangunan kewilayahan Keselarasan intervensi pembangunan kewilayahan disusun dalam rangka menjaga konsistensi perencanaan pembangunan dan sejalan dengan pendekatan spasial dan kewilayahan pada RKP Tahun 2026. Kota Makassar sebagai "Kawasan Wilayah Metropolitan" Makassar menjadi bagian pembangunan wilayah Sulawesi dengan fokus pembangunan kota terpadu dan terintegrasi yang diarahkan pada penguatan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan. Penyelarasan ini menjadi bentuk dukungan terhadap fokus pembangunan nasional melalui intervensi pada lokasi prioritas yang telah menjadi highlight secara nasional, dalam bentuk dukungan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah. Adapun matriks keselarasan dukungan program, kegiatan, dan sub kegiatan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 terhadap highlight indikasi intervensi pembangunan kewilayahan pada RKP Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.19.
Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan RKP Tahun 2026
dan Dukungan Program/Subkegiatan Kota Makassar Tahun 2026

RKP Tahun 2026 (Perpres 117 Tahun 2025)		Perubahan RKPD Tahun 2026		
Lokasi Prioritas	**Highlight Intervensi**	**Lokasi Prioritas**	**Dukungan Pemerintah Daerah (Program dan Kegiatan/Subkegiatan)**	**Keterangan**
	Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Makassar (Mamminasata) dan Sekitarnya yang Berkelanjutan			
Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya • A1: Kota Makassar	Pembangunan Bank Sampah Pusat 1 unit di Kota Makassar	Kota Makassar	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Dinas Lingkungan Hidup
Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya • A1: Kota Makassar	Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL) Kota Makassar	Kota Makassar	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Dinas Lingkungan Hidup
Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya • A1: Kota Makassar	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis Lintas Makassar-Parepare (KA Makassar-Parepare)	Kota Makassar	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Dinas Penataan Ruang
Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya • A1: Kota Makassar	Daerah yang Dikuatkan Tata Kelola Smart Citynya	Kota Makassar	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat			
Provinsi Sulawesi Selatan	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan	Kota Makassar	- Pembangunan Jalan - Rehabilitasi Jalan - Rekonstruksi Jalan - Pemeliharaan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum

RKP Tahun 2026 (Perpres 117 Tahun 2025)		Perubahan RKPD Tahun 2026		
Lokasi Prioritas	**Highlight Intervensi**	**Lokasi Prioritas**	**Dukungan Pemerintah Daerah (Program dan Kegiatan/Subkegiatan)**	**Keterangan**
		Kota Makassar	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Perumahan dan Permukiman serta Pemenuhan Pelayanan Dasar di Wilayah Perkotaan, Perdesaan, Pesisir, Kepulauan dan Wilayah 3T			
Provinsi Sulawesi Selatan	Perluasan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat	Kota Makassar	Penyediaan Akses Internet	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Fasilitasi Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah			
Provinsi Sulawesi Selatan	Penanganan Pemukiman Kumuh Terpadu	Kota Makassar	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penguatan Pelayanan, Sumberdaya Manusia, dan Tata Kelola Kesehatan			
Provinsi Sulawesi Selatan	Pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak);	Kota Makassar	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD
Provinsi Sulawesi Selatan	Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi	Kota Makassar	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD
Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan Kapasitas Sarana dan Layanan RS	Kota Makassar	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD
Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan	Kota Makassar	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan	Kota Makassar	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

RKP Tahun 2026 (Perpres 117 Tahun 2025)		Perubahan RKPD Tahun 2026		
Lokasi Prioritas	**Highlight Intervensi**	**Lokasi Prioritas**	**Dukungan Pemerintah Daerah (Program dan Kegiatan/Subkegiatan)**	**Keterangan**
Provinsi Sulawesi Selatan	Penyediaan dan optimalisasi sarana posyandu, puskesmas, dan rumah sakit	Kota Makassar	- Pembangunan Puskesmas - Pengembangan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Pemenuhan dan peningkatan alat kesehatan	Kota Makassar	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Vaksin imunisasi program	Kota Makassar	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Pengadaan alkes yang didampingi dalam pelaksanaan riset dan uji klinik	Kota Makassar	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Implementasi layanan telemedicine	Kota Makassar	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Penguatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan, serta Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dan Kematian Ibu dan Anak.			
Provinsi Sulawesi Selatan	Penyediaan obat, bahan, dan alat serta pembekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (TPT), HIV/AIDS, kusta, PIMS, frambusia, zoonosis, dan malaria bagi masyarakat	Kota Makassar	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Bahan Pencegahan dan Pengendalian TBC	Kota Makassar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Layanan informasi dan edukasi TBC, HIV/AIDS, kusta, PIMS, frambusia, zoonosis, kusta dan malaria	Kota Makassar	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan

RKP Tahun 2026 (Perpres 117 Tahun 2025)		Perubahan RKPD Tahun 2026		
Lokasi Prioritas	**Highlight Intervensi**	**Lokasi Prioritas**	**Dukungan Pemerintah Daerah (Program dan Kegiatan/Subkegiatan)**	**Keterangan**
Provinsi Sulawesi Selatan	Penanggulangan TB di tempat kerja	Kota Makassar	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Penemuan aktif dan Skrining mobile penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, kusta, PIMS, frambusia, zoonosis, dan Malaria)	Kota Makassar	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Pelaporan kasus penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, kusta, PIMS, frambusia, zoonosis dan malaria) oleh fasyankes swasta;	Kota Makassar	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, HIV/AIDS, kusta, PIMS, frambusia, zoonosis dan malaria);	Kota Makassar	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi	Ibu hamil dan balita yang mendapat	Kota Makassar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan

RKP Tahun 2026 (Perpres 117 Tahun 2025)		Perubahan RKPD Tahun 2026		
Lokasi Prioritas	**Highlight Intervensi**	**Lokasi Prioritas**	**Dukungan Pemerintah Daerah (Program dan Kegiatan/Subkegiatan)**	**Keterangan**
Selatan	makanan tambahan dari buffer stock			
Provinsi Sulawesi Selatan	Tenaga kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Makassar	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi;	Kota Makassar	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dilaksanakan oleh 47 Puskesmas, anggaran bersumber DAK
Provinsi Sulawesi Selatan	Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, neonatal, antenatal care (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra-stunting, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);	Kota Makassar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Kota Makassar	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Kegiatan surveilans gizi dan KIA	Kota Makassar	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita dan Kampanye dan penyebarluasan informasi pencegahan stunting	Kota Makassar	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Investigasi awal Kejadian tidak Diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Dinas Kesehatan

RKP Tahun 2026 (Perpres 117 Tahun 2025)		Perubahan RKPD Tahun 2026		
Lokasi Prioritas	**Highlight Intervensi**	**Lokasi Prioritas**	**Dukungan Pemerintah Daerah (Program dan Kegiatan/Subkegiatan)**	**Keterangan**
			- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Promosi Lima Pilar STBM) - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
Provinsi Sulawesi Selatan	Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi	Kota Makassar	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja;	Kota Makassar	Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal diSatuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur non formal dan informal	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Selatan	Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Program Kesehatan dan Lingkungan yang Responsif Gender (stunting/AKI, perubahan iklim, kespro)	Kota Makassar	Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal diSatuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur non formal dan informal	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penurunan Kematian Ibu dan Anak			
Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;	Kota Makassar	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan	Kota Makassar	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Selatan	Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir	Kota Makassar	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dilaksanakan di 47 Puskesmas se-Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi	Kota Makassar	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan			

RKP Tahun 2026 (Perpres 117 Tahun 2025)		Perubahan RKPD Tahun 2026		
Lokasi Prioritas	**Highlight Intervensi**	**Lokasi Prioritas**	**Dukungan Pemerintah Daerah (Program dan Kegiatan/Subkegiatan)**	**Keterangan**
	dan Gizi bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro			
Provinsi Sulawesi Selatan	Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;	Kota Makassar	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri	Kota Makassar	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan
	Pembudayaan Hidup Sehat dan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular			
Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan KIE dan Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup	Kota Makassar	- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal - Pengendalian Program KKBPK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Selatan	Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit	Kota Makassar	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dilaksanakan oleh 47 Puskesmas dan RSUD
Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;	Kota Makassar	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Penerapan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok/KTR;	Kota Makassar	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi kriteria	Kota Makassar	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	**Penyehatan lingkungan dengan output penguatan surveilans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan**	Kota Makassar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Promosi Lima Pilar STBM)	Dinas Kesehatan

RKP Tahun 2026 (Perpres 117 Tahun 2025)		Perubahan RKPD Tahun 2026		
Lokasi Prioritas	**Highlight Intervensi**	**Lokasi Prioritas**	**Dukungan Pemerintah Daerah (Program dan Kegiatan/Subkegiatan)**	**Keterangan**
	5 pilar STBM			
	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis			
Provinsi Sulawesi Selatan	Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk Skrining kesehatan	Kota Makassar	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir	Kota Makassar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Pelaksanaan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA	Kota Makassar	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis	Kota Makassar	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dilaksanakan oleh 47 Puskesmas
Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis	Kota Makassar	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis	Kota Makassar	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan	Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis	Kota Makassar	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Pengembangan Kawasan Pertanian, Perikanan, dan Peternakan			
Provinsi Sulawesi Selatan	Bantuan sarana dan prasarana pertanian	Kota Makassar	Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan, Perluasan Akses Pendidikan Sektor Strategis, Penguatan Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Bidang			

RKP Tahun 2026 (Perpres 117 Tahun 2025)		Perubahan RKPD Tahun 2026		
Lokasi Prioritas	**Highlight Intervensi**	**Lokasi Prioritas**	**Dukungan Pemerintah Daerah (Program dan Kegiatan/Subkegiatan)**	**Keterangan**
	STEAM serta Penguatan Pendidikan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Provinsi Sulawesi Selatan	Penyediaan dan peningkatan layanan pelatihan yang relevan dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (DUDIKA);	Kota Makassar	- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan
Provinsi Sulawesi Selatan	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas di seluruh jenjang yang mengalami kerusakan;	Kota Makassar	- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - Pembangunan Perpustakaan Sekolah - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah - Pembangunan Ruang Kelas Baru - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - Pembangunan Laboratorium - Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pembangunan Ruang Kelas Baru - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan

RKP Tahun 2026 (Perpres 117 Tahun 2025)		Perubahan RKPD Tahun 2026		
Lokasi Prioritas	**Highlight Intervensi**	**Lokasi Prioritas**	**Dukungan Pemerintah Daerah (Program dan Kegiatan/Subkegiatan)**	**Keterangan**
Provinsi Sulawesi Selatan	Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP)	Kota Makassar	- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Pengelolaan Dana BOP PAUD - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan	Pembangunan unit sekolah baru;	Kota Makassar	- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Dinas Pendidikan
	Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual			
Provinsi Sulawesi Selatan	Fasilitasi dan Promosi Industri Gim nasional;	Kota Makassar	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Selatan	Fasilitasi Inkubasi dan Akselerasi Startup Gim Indonesia;	Kota Makassar	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Selatan	Pelatihan Talenta Digital yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan	Kota Makassar	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
	Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Perspektif Gender, termasuk Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan			
Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan	Kota Makassar	- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan	Kota Makassar	- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RKP Tahun 2026 (Perpres 117 Tahun 2025)		Perubahan RKPD Tahun 2026		
Lokasi Prioritas	**Highlight Intervensi**	**Lokasi Prioritas**	**Dukungan Pemerintah Daerah (Program dan Kegiatan/Subkegiatan)**	**Keterangan**
			- Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
Provinsi Sulawesi Selatan	Pemenuhan dan perlindungan perempuan bebas dari kekerasan; dan Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong peran kepemimpinan perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan	Kota Makassar	- Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan	Kota Makassar	- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sulawesi Selatan	Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Pemerintah Daerah melalui Penilaian HAM	Kota Makassar	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak			
Provinsi Sulawesi Selatan	Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korban perkawinan anak termasuk penguatan data, koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;	Kota Makassar	- Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RKP Tahun 2026 (Perpres 117 Tahun 2025)		Perubahan RKPD Tahun 2026		
Lokasi Prioritas	**Highlight Intervensi**	**Lokasi Prioritas**	**Dukungan Pemerintah Daerah (Program dan Kegiatan/Subkegiatan)**	**Keterangan**
			- Pendampingan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota	
Provinsi Sulawesi Selatan	Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak	Kota Makassar	- Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sulawesi Selatan	Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Kota Makassar	- Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			- Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Ketahanan dan Penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi			
Provinsi Sulawesi Selatan	Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai;	Kota Makassar	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan	Pengembangan ruang terbuka hijau	Kota Makassar	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Selatan	Destinasi wisata alam yang dikembangkan sarana dan	Kota Makassar	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata

RKP Tahun 2026 (Perpres 117 Tahun 2025)		Perubahan RKPD Tahun 2026		
Lokasi Prioritas	**Highlight Intervensi**	**Lokasi Prioritas**	**Dukungan Pemerintah Daerah (Program dan Kegiatan/Subkegiatan)**	**Keterangan**
	prasarananya;			
Provinsi Sulawesi Selatan	Fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dalam pemanfaatan jasa wisata	Kota Makassar	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata
	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi			
Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;	Kota Makassar	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi
Provinsi Sulawesi Selatan	Pengembangan kewirausahaan	Kota Makassar	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Dinas Koperasi dan UMKM
	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif			
Provinsi Sulawesi Selatan	Pendidikan SKKNI untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas pengembangan produk	Kota Makassar	Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Sulawesi Selatan	Fasilitasi dan pendampingan peningkatan manajemen mutu produk	Kota Makassar	Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Sulawesi Selatan	Fasilitasi usaha yang mendukung Makan Bergizi Gratis	Kota Makassar	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
	Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal			
Provinsi Sulawesi Selatan	Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	Kota Makassar	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Sulawesi Selatan	Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	Kota Makassar	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;	Kota Makassar	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;	Kota Makassar	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Dinas Koperasi dan UMKM

RKP Tahun 2026 (Perpres 117 Tahun 2025)		Perubahan RKPD Tahun 2026		
Lokasi Prioritas	**Highlight Intervensi**	**Lokasi Prioritas**	**Dukungan Pemerintah Daerah (Program dan Kegiatan/Subkegiatan)**	**Keterangan**
Provinsi Sulawesi Selatan	Akreditasi lembaga halal	Kota Makassar	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Sulawesi Selatan	Pengembangan kemitraan penjaminan produk halal.	Kota Makassar	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S),	Kota Makassar	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

4.3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD, dan RKPD mengamanatkan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD berdasarkan hasil reses dari penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD menjadi salah satu bahan dalam Penyusunan RKPD. Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut diintegrasikan ke dalam aplikasi SIPD Kemendagri yang terintegrasi pada penyusunan dokumen rancangan awal RKPD. Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diusulkan oleh 50 anggota DPRD Kota Makassar untuk perencanaan tahun, yang secara garis besar usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD berkaitan permasalahan pembangunan sebagai berikut:

a. Pembangunan Gedung Pemerintah (Kantor Camat, Kantor Lurah, Gedung Sekolah, Ruang Kelas Baru, Lapangan Sekolah);
b. Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur/Sarana dan Prasarana (Drainase, Ipal Komunal, Sumur Bor, dll);
c. Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur/Sarana dan Prasarana (Jembatan, Jalan Aspal, Jalan Beton, Jalan Lingkungan, dll);
d. Pembangunan/Rehabilitasi Tanggul Dermaga, Pemecah Ombak;
e. Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Tradisional, Puskesmas, Posyandu;
f. Pembangunan Sekolah, dan Ruang Kelas Baru;
g. Bantuan yang diserahkan ke masyarakat (Banutan Kain Kafan, Benih Ikan/udang dan pakan, Bibit Pohon/Tanaman Penghijauan, sarana pengolahan, peral;atan pertanian, sarana pengankutan sampah);
h. Bantuan Masjid dan Rumah Ibadah Lainnya, Majelis Taklim, Imama/Khatib dan Guru Mengaji, peralatan mandi jenazah;
i. Bantuan pelatihan (Menjahit, Pemasaran Online, desain kemasan (*packaging*), Kesenian Tradisional, Kewirausahaan Pemuda);
j. Bantuan beasiswa kepada siswa kurang mampu, perlengkapan sekolah, Penanganan Kemiskinan estrim dan Stunting;
k. Fasilitasi akses permodalan bagiu UMKM,
l. Pengadaan CCTV, Lampu Jalan, prasarana jalan dan papan nama jalan;
m. Penyuluan dan pencegahan bahaya narkoba, lem, dan obat-obatan lainya
n. Perbaikan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.

Pokok-pokok pikiran DPRD diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menyelaraskan pokok-pokok pikiran dengan RKPD.

Untuk perencanaan tahun tahun 2026 sebanyak 769 usulan yang disetujui dan ditujukan kepada 17 SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar. Secara garis besar Pokok-Pokok Pikiran DPRD dapat dikelompokkan atas beberapa hal sebagai berikut:

Tabel IV.20.
Pokok - Pokok Pikiran DPRD Kota Makassar Tahun 2026
(Semester I)

No	SKPD	Jumlah Usulan dalam Dokumen RKPD	Jumlah Usulan dalam SIPD	Selisih	Disetujui dalam APBD
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	4	0	4
2.	Dinas Kebudayaan	3	3	0	0
3.	Dinas Kesehatan	22	22	0	2
4.	Dinas Ketahanan Pangan	3	6	-3	2
5.	Dinas Ketenagakerjaan	4	4	0	4
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	29	29	0	29
7.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	55	55	0	55
8.	Dinas Lingkungan Hidup	35	35	0	21
9.	Dinas Pekerjaan Umum	651	651	0	297
10.	Dinas Pemuda dan Olahraga	8	8	0	7
11.	Dinas Pendidikan	16	17	-1	12
12.	Dinas Perdagangan	1	4	-3	0
13.	Dinas Perhubungan	113	113	0	96
14.	Dinas Perikanan dan Pertanian	8	8	0	6
15.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	35	35	0	3
16.	Dinas Sosial	6	6	0	1
17.	Sekretariat Daerah	9	9	0	2
	Jumlah	**1002**	**1009**	**-7**	**541**

Usulan ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 651 usulan. Terdiri dari usulan pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sarana air bersih, pembangunan, rehabilitasi dan pengerukan saluran drainase, rehabilitasi gedung pemerintah, pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor pemerintah. Sebanyak 469 usulan telah dilaksanakan penilaian teknis berdasarkan kondisi lapangan dan sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum. Sebanyak 182 usulan tidak dapat disetujui dengan beberapa alasan yaitu karena usulan berulang diusulkan pada usulan musrenbang dan usulan pokok-pokok pikiran, lokasi yang diusulkan bukan merupakan asset atau bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Makassar, kondisi fisik yang diusulkan masih dalam kondisi baik atau baru dikerjakan, tidak memenuhi kriteria teknis, alamat lokasi yang diusulkan tidak sesuai, bukan merupakan tupoksi, dan usulan telah dianggarkan di tahun anggaran 2025.

Usulan ditujukan ke Dinas Perhubungan sebanyak 113 usulan. Terdiri dari usulan pengadaan sarana dan papan nama jalan, pengadaan dan perbaikan lampu jalan, dan pembangunan/rehabilitasi dermaga. Sebanyak 106 usulan telah sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan, dan sebanyak 7 usulan tidak dapat disetujui karena bukan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.

Usulan ditujukan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 35 usulan. Terdiri dari usulan perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan, pembangunan dan rehabilitasi drainase dalam kawasan perumahan; pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan; dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Sebanyak 15 usulan telah sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan dan KAwasan Permukiman, dan sebanyak 20 usulan tidak dapat disetujui karena lokasi yang diusulkan bukan merupakan kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu tidak masuk dalam deliniasi kawasan kumuh, kawasan perumahan yang belum diserahkan PSU kepada Pemerintah Kota Makassar, usulan telah diakomodir pada tahun anggaran 2025.

Usulan ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 35 usulan. Terdiri dari usulan bantuan tempat sampah pilah, sarana pengangkutan sampah, pemangkasan pohon, dan bantuan pohon penghijauan. Sebanyak 21 usulan telah sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup, dan sebanyak 14 usulan tidak dapat disetujui karena bukan menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup seperti lokasi usulan tempat sampah bukan merupakan ruang publik, penentuan titik yang menjadi kewenangan kecamatan, pengangkutan sampah yang merupakan kewenangan kecamatan, dan pengerukan sampah pada saluran drainase yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.

Usulan ditujukan ke Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 29 usulan dan seluruhnya diakomodir, yaitu usulan pengadaan CCTV.

Usulan ditujukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 55 (lima puluh lima) usulan, Dinas Ketenagakerjaan 4 (empat) Usulan, Dinas Perdagangan 4 (empat) Usulan, Dinas Perikanan dan Pertanian 6 (enam) usulan dan seluruhnya diakomodir.

Usulan ditujukan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 4 usulan dan seluruhnya diakomodir. Sedangkan untuk usulan yang ditujukan ke Sekretariat Daerah sebanyak 9 usulan, dengan 8 usulan diakomodir dan 1 usulan ditolak.



BAB V

RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2026

Kerangka pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan analisis terhadap kapasitas riil keuangan daerah sebagai dasar dalam menentukan kemampuan pendanaan bagi program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kondisi aktual penerimaan daerah, proyeksi pendapatan, serta sumber-sumber pembiayaan daerah yang dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, target Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp4,558,465,550,164.00 (Empat triliun lima ratus lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah). Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp2,322,499,363,164.00 (Dua triliun tiga ratus dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) dan Pendapatan Transfer sebesar Rp2,235,966,187,000.00 (Dua triliun dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ditargetkan pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Dari sisi pembiayaan daerah, Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp699.852.249.910,96 (Enam ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah sembilan puluh enam sen), yang seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Penerimaan pembiayaan tersebut dimanfaatkan untuk menutup kebutuhan pendanaan akibat perubahan kebijakan fiskal daerah sekaligus mendukung pemenuhan alokasi belanja prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Berdasarkan hasil penyesuaian tersebut, alokasi Belanja Daerah pada instrumen perubahan direncanakan sebesar Rp5,258,317,800,074.96 (Lima triliun dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen), yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Rincian kerangka pendanaan secara makro dan sektoral pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 disajikan secara struktural ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.1.
Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2026

Kode	URAIAN	RKPD 2026	APBD 2026	TARGET PERUBAHAN 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**PENDAPATAN**	**4,902,101,827,000,00**	**4,695,138,820,000.00**	**4,558,465,550,164.00**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**2,206,350,556,000.00**	**2,329,144,956,000.00**	**2,322,499,363,164.00**
1.1.1	Pajak Daerah	1,954,987,697,000.00	2,053,987,697,000.00	2,053,987,697,000.00
1.1.2	Retribusi daerah	174,847,759,000.00	175,847,759,000.00	186,847,759,000.00

Kode	URAIAN	RKPD 2026	APBD 2026	TARGET PERUBAHAN 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1.3	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	27,205,600,000.00	50,000,000,000.00	32,354,407,164.00
1.1.4	Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	49,309,500,000.00	49,309,500,000.00	49,309,500,000.00
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.695.751.271.000,00**	**2,365,993,864,000.00**	**2,235,966,187,000.00**
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.528.751.271.000,00	2,018,293,864,000.00	2.032.257.529.000,00
1.2.2	TRANSFER ANTAR-DAERAH	167.000.000.000,00	347,700,000,000.00	203,708,658,000.00
1.3	**LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Dana darurat	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Lain Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0.00	0.00	0.00
2	**BELANJA**	**5,106,461,612,000.00**	**5,175,138,820,000.00**	**5,258,317,800,074.96**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**4,116,788,735,646.88**	**4,184,978,930,437.00**	**4,318,304,518,920.66**
2.1.1	Belanja Pegawai	1,989,911,677,755.00	1,902,436,103,737.00	1,828,869,075,764.96
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,969,020,391,226.88	2,083,243,981,900.00	2,283,548,407,559.70
2.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Hibah	157,856,666,665.00	199,298,844,800.00	205,887,035,596.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00
2.2	**BELANJA MODAL**	**959,672,876,353.12**	**975,159,889,563.00**	**925,013,281,154.30**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	31,300,571,047.00	22,719,717,980.00	32,380,652,500.00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141,972,138,033.00	237,760,439,354.00	248.571,779,753.00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	431,188,612,930.00	396,020,592,940.00	326,243,002,049.00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	343,337,089,061.12	290,694,949,121.00	293,348,293,064.30
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,941,498,942.00	12,847,318,168.00	12,960,785,068.00
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1,932,966,340.00	15,116,872,000.00	11,508,768,720.00
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**30.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Kode	URAIAN	RKPD 2026	APBD 2026	TARGET PERUBAHAN 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.4.1	Transfer Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00
	Total Surplus/ (Defisit)	0.00	0.00	0.00
3	**PEMBIAYAAN**	**214.359.785.000,00**	**480.000.000.000,00**	**699.852.249.910,96**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**209.359.785.000,00**	**480.000.000.000,00**	**699.852.249.910,96**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	209.359.785.000,00	480.000.000.000,00	699.852.249.910,96
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan	0.00	0.00	0.00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.000.000.000,00**	**0.00**	**0.00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00
3.2.5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	0.00
3.2.6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00	0.00

Kode	URAIAN	RKPD 2026	APBD 2026	TARGET PERUBAHAN 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
3.2.7	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00	0.00
3.2.8	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0.00	0.00	0.00
3.2.9	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00
3.2.10	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00	0.00
3.2.11	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00
	Pembiayaan Netto	**204.359.785.000,00**	**480.000.000.000,00**	**699.852.249.910,96**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar, Tahun 2026 (Data diolah)

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026

Pelaksanaan proses penyusunan penatapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosdur perencanaan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran Pembangunan daerah untuk Perubahan Tahun 2026, Perumusan Program Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2026 terdiri 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi;
2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan;
3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan;
5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal;
6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital;
7. Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi;
8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan;
9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim.

Secara keseluruhan Prioritas Pembangunan pada Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel V.2.
Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada Perubahan RKPD 2026

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	**Tujuan 1.1:** **Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi**								
		Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Program Pengembangan UMKM	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	1%	3.326.378.200	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	1%	6.154.117.580	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor barang Kota Makassar	12.10%	1.606.565.580	Persentase pertumbuhan nilai ekspor barang Kota Makassar	12.10%	5.578.968.892	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	70%	293.944.800	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	70%	768.432.200	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	4.8%	1.975.441.820	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	4.8%	3.089.503.640	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
					Total PD I	**7.202.330.400**			**15.591.022.312**	
2	Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga,	Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Kesempatan Kerja. dan Pendapatan Masyarakat	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitas-nya	21.21%	1.725.506.000	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitas-nya	21.21%	1.899.136.600	Dinas Ketenagakerjaan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	dan ketahanan pangan									
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar	61%	1.620.504.300	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar	61%	1.561.757.800	Dinas Ketenagakerjaan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar	14.5%	2.539.227.300	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar	15%	1.468.496.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha	15%	2.539.227.300	Pertumbuhan Wirausaha	14.5%	1.468.496.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	17.75%	7.028.413.000	Rasio Wirausaha Pemuda	17.75%	12.641.186.400	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	21127 Ton	2.215.102.840	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	21722 Ton	2.008.9546.100	Dinas Perikanan dan Pertanian
			Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	12.92%	2.750.611.850	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	12.92%	2.668.062.038	Dinas Pariwisata

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Tujuan 1.2: **Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah**								
		Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	43.74 %	30.652.857.226	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	45.01 %	28.852.962.266	Badan Pendapatan Daerah
		Sasaran 1.2.2: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tingkat ketersediaan energi berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKG)	2400 kkal/kapita	4.295.230.500	Tingkat ketersediaan energi berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKG)	2825 kkal/kapita	5.664.142.422	Dinas Ketahanan Pangan
			Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tingkat konsumsi energi berdasarkan Angka Kecukupan Energi	2100 kkal/kapita	4.295.230.500	Tingkat konsumsi energi berdasarkan Angka Kecukupan Energi	2042 kkal/kapita	5.664.142.422	Dinas Ketahanan Pangan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	3.83 %	544.825.300	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	1.30 %	1.209.479.900	Dinas Ketahanan Pangan
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1568.35 Ton	1.080.560.460	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1568.35 Ton	4.192.795.600	Dinas Perikanan dan Pertanian
			Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	15616 Ton	5.008.335.760	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	15616 Ton	13.528.481.636	Dinas Perikanan dan Pertanian
			Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	8 Ton	5.008.335.760	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	8 Ton	13.528.481.636	Dinas Perikanan dan Pertanian
			Program penyediaan dan pengembang	Peningkatan Produksi Hortikultura	330.60 Ton	5.008.335.760	Peningkatan Produksi Hortikultura	330.60 Ton	13.528.481.636	Dinas Perikanan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			an sarana pertanian							dan Pertanian
			Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100 %	54.362.000	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100 %	61.976.700	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100 %	748.728.080	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100 %	1.084.118.300	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	100 %	748.728.080	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	100 %	1.084.118.300	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Sasaran 1.2.3: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Rp 2.600.000.000.000	805.948.240	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Rp 3.000.000.000.000	561.181.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	90 %	1.227.850.640	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	90 %	1.045.954.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100 %	43.439.409.440	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100 %	50.560.991.390	Sekretariat Daerah
			Program pemerintahan dan	Efektivitas kerja sama daerah	100 %	43.439.409.440	Efektivitas kerja sama daerah	100 %	50.560.991.390	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			kesejahteraan rakyat							
					Total PD II	**166.776.739.776**			**232.924.979.736**	
		Tujuan 2.1: **Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing**								
3	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)	72.19%	329.545.126.910	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)	72.19%	302.530.445.560	Dinas Pendidikan
			Program pengelolaan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (7-15 tahun)	99.80 %	329.545.126.910	Angka Partisipasi Sekolah (7-15 tahun)	99.80 %	302.530.445.560	Dinas Pendidikan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program pengelolaan pendidikan	Skor Kemampuan Literasi SD	67.86 %	329.545.126.910	Skor Kemampuan Literasi SD	67.86 %	302.530.445.560	Dinas Pendidikan
			Program pengelolaan pendidikan	Skor Kemampuan Literasi SMP	73.86 %	329.545.126.910	Skor Kemampuan Literasi SMP	73.86 %	302.530.445.560	Dinas Pendidikan
			Program pengelolaan pendidikan	Skor Kamampuan Numerasi SD	60.18 %	329.545.126.910	Skor Kamampuan Numerasi SD	60.18 %	302.530.445.560	Dinas Pendidikan
			Program pengelolaan pendidikan	Skor Kamampuan Numerasi SMP	65.85 %	329.545.126.910	Skor Kamampuan Numerasi SMP	65.85 %	302.530.445.560	Dinas Pendidikan
			Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	100 %	123.015.000	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	100 %	18.015.000	Dinas Pendidikan
			Program pembinaan perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	81.10 %	4.567.555.200	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	81.10 %	1.346.397.300	Dinas Perpustakaan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	192.189.218.400	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	212.860.394.384	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	192.189.218.400	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	212.860.394.384	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	192.189.218.400	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	212.860.394.384	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	192.189.218.400	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	212.860.394.384	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	192.189.218.400	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	212.860.394.384	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	192.189.218.400	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	212.860.394.384	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100%	192.189.218.400	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100%	212.860.394.384	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	192.189.218.400	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	212.860.394.384	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan	100%	192.189.218.400	Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan	100%	212.860.394.384	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Kesehatan Masyarakat	kesehatan sesuai standar			kesehatan sesuai standar			
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	192.189.218.400	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	212.860.394.384	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	192.189.218.400	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	212.860.394.384	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan	100%	192.189.218.400	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan	100%	212.860.394.384	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Kesehatan Masyarakat	deteksi dini HIV sesuai standar			deteksi dini HIV sesuai standar			
		Sasaran 2.1.3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar	61 %	1.620.504.300	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar	61 %	1.561.757.800	Dinas Ketenagakerjaan
			Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	15 %	2.539.227.300	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	15 %	1.468.496.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program pemberdayaan usaha	Pertumbuhan Wirausaha	14.5 %	2.539.227.300	Pertumbuhan Wirausaha	14.5 %	1.468.496.000	Dinas Koperasi, Usaha

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)							Kecil dan Menengah
			Program pengembangan iklim penanaman modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Rp 2.600.000.000.000	805.948.240	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Rp 3.000.000.000.000	561.181.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Total PD III	**533.929.822.650**			**521.815.183.244**	
		Tujuan 3.1: **Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata**								

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	Sasaran 3.1.1: Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kota Makassar	54.45 %	16.755.034.000	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kota Makassar	54.85 %	7.130.950.617	Dinas Pekerjaan Umum
			Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS	54.85 %	16.755.034.000	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS	55.64 %	7.130.950.617	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				kewenangan Kota Makassar			kewenangan Kota Makassar			
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan	4.12 %	29.938.498.440	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan	4.12 %	18.886.195.938	Dinas Pekerjaan Umum
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) akses aman	100 %	42.752.080.637	Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) akses aman	10.28 %	19.470.628.833	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) akses aman	4.15 %	42.752.080.637	Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) akses aman	4.15 %	19.470.628.833	Dinas Pekerjaan Umum
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Persentase drainase dalam kondisi baik	57.81 %	80.545.042.788	Persentase Persentase drainase dalam kondisi baik	57.81 %	57.455.625.700	Dinas Pekerjaan Umum
			Program penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	49.65 %	293.222.389.350	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	49.65 %	288.931.566.907	Dinas Pekerjaan Umum
			Program penyelenggaraan jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	88.74 %	204.380.997.746	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	88.74 %	202.094.118.499	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni pada wilayah pencegahan kumuh	3.69 %	3.055.410.500	Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni pada wilayah pencegahan kumuh	3.69 %	12.601.891.300	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum	100 %	7.817.813.400	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum	100 %	5.970.077.516	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Pengendalian dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	100 %	4.865.001.680	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	100 %	11.104.122.605	Dinas Penataan Ruang
		Tujuan 4.1:								

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah								
		Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	100 %	3.162.045.800	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	100 %	6.019.470.771	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	100 %	3.162.045.800	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	100 %	6.019.470.771	Badan Riset dan Inovasi Daerah
					Total PD IV	**686.494.314.341**			**629.664.648.686**	
		Tujuan 4.2: **Meningkatnya Daya Saing Pariwisata**								

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	Peningkatan daya saing sektor pariwisata melalui penguatan dan inovasi industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Sasaran 4.2.1: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	7 %	4.735.612.600	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	7 %	12.942.001.200	Dinas Pariwisata
		Sasaran 4.2.2: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Program pengembangan kebudayaan	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100 %	1.641.976.780	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100 %	4.891.092.500	Dinas Kebudayaan
			Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	20 %	6.599.206.300	Persentase kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	20 %	6.599.206.300	Dinas Kebudayaan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Sasaran 4.2.3: Meningkatnya Kuantitas	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	3.03 %	15.175.806.610	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	3.03 %	15.175.806.610	Dinas Pariwisata
					Total PD V	**28.152.602.290**			**39.608.106.610**	
		Tujuan 5.1: **Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif**								
6	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan	Sasaran 5.1.1: Meningkatnya Akuntabilitas	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase SKPD yang mengimplementasikan layanan	100 %	45.184.405.416	Persentase SKPD yang mengimplementasikan layanan	100 %	37.026.363.723	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital	Pemerintahan Daerah		aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
			Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 %	3.060.051.644	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 %	2.237.116.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	40 %	47.017.935.500	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30 %	25.112.378.827	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	30 %	47.017.935.500	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40 %	25.112.378.827	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	85 %	47.017.935.500	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	85 %	25.112.378.827	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penurunan SILPA	3 %	47.017.935.500	Persentase Penurunan SILPA	3 %	25.112.378.827	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100 %	47.017.935.500	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100 %	25.112.378.827	Badan Pengelolaan Keuangan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
										dan Aset Daerah
			Program kepegawaian daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	73 %	4.287.343.800	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	73 %	11.242.236.785	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Program kepegawaian daerah	Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	71 %	4.287.343.800	Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	71 %	11.242.236.785	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Program penyelenggar	Tindak lanjut rekomendasi	78.21 %	2.960.628.020	Tindak lanjut rekomendasi	78.21 %	2.191.933.300	Inspektorat Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			aan pengawasan	BPK tahun anggaran N-1			BPK tahun anggaran N-1			
Total PD VI						**102.510.364.380**			**77.810.028.635**	
		Tujuan 5.2: **Meningkatnya Kualitas Keamanan. Ketentraman. dan Ketertiban Umum**								
7	Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100 %	25.235.900.200	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100 %	12.239.805.100	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	37.577.500	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	37.577.500	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	583.968.000	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	558.362.385	Kecamatan Panakkukang
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	688.703.000	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	698.630.200	Kecamatan Tamalanrea
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	580.414.000	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	512.538.300	Kecamatan Biringkanaya

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	472.342.600	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	472.342.600	Kecamatan Wajo
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	866.104.500	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	647.591.600	Kecamatan Mamajang
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	398.598.800	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	573.826.400	Kecamatan Makassar
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	96.000.000	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	96.000.000	Kecamatan Manggala

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	100 %	584.378.260	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	570.740.960	Kecamatan Rappocini
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	655.205.000	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	644.400.000	Kecamatan Ujung Pandang
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	100 %	723.577.660	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	585.819.700	Kecamatan Ujung Tanah
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	687.871.200	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	687.871.200	Kecamatan Tamalate

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	483.309.000	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	483.309.000	Kecamatan Mariso
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	852.080.400	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	815.272.200	Kecamatan Tallo
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	612.800.000	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90 %	699.200.000	Kecamatan Bontoala
		Sasaran 5.2.2 Meningkatnya Kualitas Toleransi	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya	85 %	1.502.342.600	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya	85 %	1.612.661.722	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Dalam Masyarakat	sosial, dan budaya	dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan			dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan			
			Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	85 %	12.663.725.020	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	85 %	20.269.149.168	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Total PD VII						**47.724.897.740**			**42.205.098.035**	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Tujuan 6.1: **Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender**								
8	Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Sasaran 6.1.1: Menurunnya Ketimpangan Gender	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	75 %	5.521.445.100	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	75 %	5.441.189.100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	1 %	2.186.910.844	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	1 %	2.965.366.944	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
										Perlindungan Anak
		Sasaran 6.1.2 Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Program pemenuhan hak anak (pha)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	65.55 %	396.841.200	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	65.55 %	612.246.600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar	100 %	1.243.952.048	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar	100 %	1.658.597.948	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Sasaran 6.1.3 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	17.75 %	7.028.413.000	Rasio Wirausaha Pemuda	17.75 %	12.641.186.400	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	100 %	92.925.737.300	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	100 %	54.250.420.817	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Tujuan 6.2: **Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran**								
		Sasaran 6.2.1: Menurunnya Disparitas Pendapatan	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	2.382.505.700	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	2.932.855.200	Dinas Sosial
			Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	80 %	2.382.505.700	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	80 %	2.932.855.200	Dinas Sosial

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Sasaran 6.2.2: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Program rehabilitasi sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	4.474.269.706	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	3.921.776.306	Dinas Sosial
			Program rehabilitasi sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	4.474.269.706	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	3.921.776.306	Dinas Sosial
			Program rehabilitasi sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	4.474.269.706	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	3.921.776.306	Dinas Sosial

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program rehabilitasi sosial	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	4.474.269.706	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	3.921.776.306	Dinas Sosial
			Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar	61 %	1.620.504.300	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar	61 %	1.561.757.800	Dinas Ketenagakerjaan
Total PD VIII						**117.780.579.198**			**85.985.397.115**	
		Tujuan 7.1: Meningkatnya Pengelolaan								

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Lingkungan Hidup yang Lestari								
9	Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	1.662.297.700	Persentase penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	948.915.700	Dinas Lingkungan Hidup
			Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	6,23 %	16.631.316.460	Persentase pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	6,23 %	9.305.491.160	Dinas Lingkungan Hidup
			Program pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	4%	9.875.969.380	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	6 %	36.298.560.950	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan 43ocial43kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 43ocial di Kecamatan	90 %	14.622.640.400	Indeks kepuasan 43ocial43kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 43ocial di Kecamatan	90 %	14.842.032.740	Kecamatan Rappocini
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan 43ocial43kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 43ocial di Kecamatan	90 %	16.190.709.700	Indeks kepuasan 43ocial43kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 43ocial di Kecamatan	90 %	16.852.727.460	Kecamatan Ujung Pandang
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan	Indeks kepuasan 43ocial43kat terhadap penyelenggara	90 %	15.394.438.642	Indeks kepuasan 43ocial43kat terhadap penyelenggara	90 %	17.409.135.600	Kecamatan Tamalanrea

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			pelayanan publik	an pemerintahan dan pelayanan 44ocial di Kecamatan			an pemerintahan dan pelayanan 44ocial di Kecamatan			
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan 44ocial44kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 44ocial di Kecamatan	90 %	8.974.107.460	Indeks kepuasan 44ocial44kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 44ocial di Kecamatan	90 %	10.866.308.690	Kecamatan Ujung Tanah
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan 44ocial44kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	90 %	1.509.578.400	Indeks kepuasan 44ocial44kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	90 %	3.842.708.925	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				45ocial di Kecamatan			45ocial di Kecamatan			
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan 45ocial45kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 45ocial di Kecamatan	90 %	17.901.040.280	Indeks kepuasan 45ocial45kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 45ocial di Kecamatan	90 %	19.669.087.760	Kecamatan Panakkukang
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan 45ocial45kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 45ocial di Kecamatan	90 %	10.054.890.000	Indeks kepuasan 45ocial45kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 45ocial di Kecamatan	90 %	9.709.279.015	Kecamatan Mamajang

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan 46ocial46kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 46ocial di Kecamatan	90 %	18.807.906.600	Indeks kepuasan 46ocial46kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 46ocial di Kecamatan	90 %	15.825.034.580	Kecamatan Biringkanaya
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan 46ocial46kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 46ocial di Kecamatan	90 %	8.195.200.000	Indeks kepuasan 46ocial46kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 46ocial di Kecamatan	90 %	9.209.265.800	Kecamatan Wajo
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan	Indeks kepuasan 46ocial46kat terhadap penyelenggara	90 %	8.380.802.700	Indeks kepuasan 46ocial46kat terhadap penyelenggara	90 %	8.911.411.320	Kecamatan Mariso

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			pelayanan publik	an pemerintahan dan pelayanan 47ocial di Kecamatan			an pemerintahan dan pelayanan 47ocial di Kecamatan			
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan 47ocial47kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 47ocial di Kecamatan	100 %	7.992.524.600	Indeks kepuasan 47ocial47kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 47ocial di Kecamatan	90 %	10.025.103.600	Kecamatan Bontoala
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan 47ocial47kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	90 %	13.125.407.860	Indeks kepuasan 47ocial47kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	90 %	13.263.594.660	Kecamatan Manggala

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				48ocial di Kecamatan			48ocial di Kecamatan			
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan 48ocial48kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 48ocial di Kecamatan	90 %	11.938.041.330	Indeks kepuasan 48ocial48kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 48ocial di Kecamatan	90 %	11.516.806.200	Kecamatan Tallo
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan 48ocial48kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 48ocial di Kecamatan	90 %	12.927.398.459	Indeks kepuasan 48ocial48kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 48ocial di Kecamatan	90 %	14.0670681.159	Kecamatan Makassar

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan 49ocial49kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 49ocial di Kecamatan	90 %	16.689.807.700	Indeks kepuasan 49ocial49kat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 49ocial di Kecamatan	90 %	17.408.530.160	Kecamatan Tamalate
		Tujuan 7.2: **Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**								
		Sasaran 7.2.1: Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi	Program penanggulangan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	7.815.171.960	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	24.240.796.410	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perubahan Iklim								
			Program penanggulangan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	7.815.171.960	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	24.240.796.410	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program penanggulangan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	7.815.171.960	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	24.240.796.410	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program pencegahan, penanggulangan, penyelamata	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan	100 %	18.675.608.240	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan	100 %	20.038.304.920	Dinas Pemadam Kebakaran dan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			n kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	dan evakuasi korban kebakaran			dan evakuasi korban kebakaran			Penyelamatan
			Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai Waktu Tanggap (Response Time 15 Menit)	100 %	18.675.608.240	Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai Waktu Tanggap (Response Time 15 Menit)	100 %	20.038.304.920	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Program penanganan bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan 51ocial pada saat dan	100 %	2.353.160.480	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan 51ocial pada saat dan	100 %	2.196.550.200	Dinas Sosial

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				setelah tanggap darurat bencana			setelah tanggap darurat bencana			
			Program pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	4 %	9.875.969.380	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	6 %	36.298.560.950	Dinas Lingkungan Hidup
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Kinerja lalu lintas Kabupaten/ Kota	0.61	20.867.591.001	Kinerja lalu lintas Kabupaten/ Kota	0.46	31.713.064.750	Dinas Perhubungan
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	60 %	20.867.591.001	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	60 %	31.713.064.750	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan / Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok RKPD 2026			Perubahan RKPD 2026			Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		Indikator Sasaran & Kinerja Program	Target		
					Kinerja	Anggaran		Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Total PD IX						**270.461.578.732**			**481.061.952.709**	
TOTAL ANGGARAN						**1.897.454.735.367**			**2.027.120.773.781**	

5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026

Perumusan Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis yang disusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pelayan dasar yaitu:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; serta
6. Sosial.

Untuk urusan pemerintahan wajib tidak terkait pelayanan dasar ada 18 (delapan belas) urusan yaitu:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

Sementara itu, urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu:

1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Perdagangan; dan
5. Perindustrian.

Fungsi penunjang urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu:

a. Perencanaan dan Keuangan;
b. Pengadaan;
c. Kepegawaian; serta
d. Transparansi dan Partisipasi Publik.

Unsur Pendukung

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Unsur Pengawas: Inspektorat Daerah
Urusan Kewilayahan: Kecamatan
Urusan Pemerintahan Umum: Kesatuan Bangsa

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan dari setiap urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**1.227.015.573.000,00**	**1.266.385.237.861,00**	**1.242.850.500.000,00**	**15.834.927.000,00**							**1.219.697.601.180,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.227.015.573.000,00**	**1.266.385.237.861,00**	**1.242.850.500.000,00**	**15.834.927.000,00**							**1.219.697.601.180,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.227.015.573.000,00**	**1.266.385.237.861,00**	**1.242.850.500.000,00**	**15.834.927.000,00**							**1.219.697.601.180,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur** **Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah** **Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100** **100** **100 %** **%** **%**	**946.570.341.473,00**	**936.489.037.551,00**	**940.073.981.040,00**	**6.496.447.294,00**							**953.066.788.767,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**946.570.341.473,00**	**936.489.037.551,00**	**940.073.981.040,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**953.066.788.767,00**	-
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				100 Persen	-	71.034.900,00	1.423.286.600,00	1.283.286.600,00	1.212.251.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		54.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	42.335.300,00	1.286.587.000,00	1.146.587.000,00	1.104.251.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.965.800,00	3.965.800,00	3.965.800,00	0,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.910.700,00	3.910.700,00	3.910.700,00	0,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	3.982.400,00	3.982.400,00	3.982.400,00	0,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.938.300,00	3.938.300,00	3.938.300,00	0,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	12.902.400,00	120.902.400,00	120.902.400,00	108.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			13.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	939.300.006.138,00	912.864.802.616,00	910.695.657.816,00	-28.604.348.322,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pegawai Lingkup Dinas Pendidikan		948.096.153.287,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8290 Orang /bulan	8290 Orang /bulan	931.940.539.538,00	905.450.536.016,00	904.839.477.216,00	-27.101.062.322,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			940.613.118.487,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	6.673.800.000,00	6.673.800.000,00	4.773.240.000,00	-1.900.560.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.742.890.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	682.672.200,00	682.672.200,00	724.546.200,00	41.874.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			737.134.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.994.400,00	57.794.400,00	358.394.400,00	355.400.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**946.570.341.473,00**	**936.489.037.551,00**	**940.073.981.040,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**953.066.788.767,00**	-
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	-336.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	-336.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**946.570.341.473,00**	**936.489.037.551,00**	**940.073.981.040,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**953.066.788.767,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	318.000.000,00	1.809.500.000,00	3.733.100.000,00	3.415.100.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pegawai Lingkup Dinas Pendidikan		382.284.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				280 Paket	280 Paket	210.000.000,00	396.500.000,00	396.500.000,00	186.500.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			190.284.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	14 Orang	108.000.000,00	1.413.000.000,00	3.336.600.000,00	3.228.600.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			192.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	687.513.700,00	1.414.842.335,00	1.042.842.335,00	355.328.635,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	DInas Pendidikan Kota Makassar		615.185.680,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.561.500,00	3.561.500,00	3.561.500,00	0,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	173.806.700,00	22.763.100,00	22.763.100,00	-151.043.600,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			180.378.880,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.489.600,00	157.949.735,00	157.949.735,00	85.460.135,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			73.276.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.915.900,00	45.768.000,00	45.768.000,00	35.852.100,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	262.740.000,00	149.800.000,00	149.800.000,00	-112.940.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			249.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	165.000.000,00	1.035.000.000,00	663.000.000,00	498.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			98.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.787.287.600,00	1.707.896.000,00	4.094.097.860,00	2.306.810.260,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		519.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				92 Unit	92 Unit	497.970.000,00	352.662.700,00	860.169.300,00	362.199.300,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			93.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				94 Unit	94 Unit	1.289.317.600,00	1.355.233.300,00	3.233.928.560,00	1.944.610.960,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			426.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	3.571.785.135,00	16.383.996.000,00	18.709.536.429,00	15.137.751.294,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		2.912.951.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.016.472.000,00	1.074.432.000,00	1.074.432.000,00	57.960.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			935.587.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.555.313.135,00	15.309.564.000,00	17.635.104.429,00	15.079.791.294,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.977.364.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	498.714.000,00	548.714.000,00	515.460.000,00	16.746.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		486.914.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				31 Unit	31 Unit	269.690.000,00	269.690.000,00	254.600.000,00	-15.090.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			251.890.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	29.220.000,00	79.220.000,00	79.220.000,00	50.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			35.220.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.804.000,00	199.804.000,00	181.640.000,00	-18.164.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			199.804.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun) Angka Partisipasi Sekolah (7-15 tahun) Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan Skor Kemampuan Literasi SD Skor Kemampuan Literasi SMP Skor Kamampuan Numerasi SD Skor Kamampuan Numerasi SMP Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B Iklim Inklusivitas SD**				**-**	**10.63,42 11.77,03 12.73,02 13.75,50 14.72,62 1.72,19 2.99,80 3.12,98 4.67,86 5.73,86 6.60,18 7.65,85 8.81,45 9.65,15 % % % % % % % % % % % % %**	**280.112.708.127,00**	**329.545.126.910,00**	**302.530.445.560,00**	**-13.703.038.994,00**						**266.409.669.133,00**	
		[Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD]	**Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD**	**100**	**100**	**100**	-	-	**280.112.708.127,00**	**329.545.126.910,00**	**302.530.445.560,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**266.409.669.133,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Sekolah Dasar yang Dikelola*				100 %	100 %	91.773.337.567,00	156.977.701.350,00	153.157.264.000,00	61.383.926.433,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	SD Negeri dan Swasta Se-Kota Makassar		136.988.231.395,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	575.383.500,00	6.683.500,00	6.683.500,00	-568.700.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.182.868.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	384.625.500,00	366.625.500,00	343.625.500,00	-41.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			645.946.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	574.493.300,00	556.493.300,00	533.493.300,00	-41.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.074.384.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	25 Unit	2.646.309.300,00	2.941.937.850,00	3.837.400.800,00	1.191.091.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.182.189.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	967.455.700,00	949.455.700,00	928.455.700,00	-39.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.293.802.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	488.351.600,00	452.351.600,00	434.351.600,00	-54.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			652.531.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	5.248.925.900,00	6.195.425.900,00	45.808.400,00	-5.203.117.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			10.431.645.920,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				950 Peserta Didik	950 Peserta Didik	500.298.100,00	492.393.300,00	638.193.300,00	137.895.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			260.573.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				481 Orang	481 Orang	6.627.381.660,00	0,00	0,00	-6.627.381.660,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			9.867.182.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				3060 Orang	3060 Orang	1.259.361.500,00	6.695.661.500,00	8.011.261.500,00	6.751.900.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			564.296.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				480 Satuan Pendidikan	480 Satuan Pendidikan	361.209.200,00	366.489.200,00	356.889.200,00	-4.320.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			164.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				480 Satuan Pendidikan	480 Satuan Pendidikan	45.639.833.107,00	118.661.800.000,00	118.661.800.000,00	73.021.966.893,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			64.005.216.935,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				400 Orang	400 Orang	157.229.500,00	160.049.500,00	135.049.500,00	-22.180.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			79.895.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				8 Dokumen	8 Dokumen	463.981.500,00	491.021.500,00	746.468.100,00	282.486.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			217.749.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	1 Dokumen	1.629.800,00	1.629.800,00	1.629.800,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	6.551.705.100,00	6.416.705.100,00	6.408.752.700,00	-142.952.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.756.793.520,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				26 Ruang	26 Ruang	8.428.425.900,00	2.774.882.900,00	2.669.882.900,00	-5.758.543.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			12.925.038.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				30 Unit	30 Unit	1.873.190.300,00	1.873.190.300,00	1.985.163.300,00	111.973.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.106.044.520,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				400 Satuan Pendidikan	400 Satuan Pendidikan	133.036.700,00	249.736.700,00	215.736.700,00	82.700.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			74.785.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				40 Ruang	40 Ruang	5.712.682.400,00	6.493.057.400,00	6.386.307.400,00	673.625.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			12.760.842.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				18880 Peserta Didik	18880 Peserta Didik	715.764.200,00	715.764.200,00	693.964.200,00	-21.800.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			612.383.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	2.462.063.800,00	116.346.600,00	116.346.600,00	-2.345.717.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			5.129.934.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Dikelola*				100 %	100 %	147.702.077.080,00	139.214.037.700,00	114.643.443.800,00	-33.058.633.280,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	SMP Negeri dan Swasta Se-Kota Makassar		110.887.911.764,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	1 Unit	25.503.973.700,00	21.405.008.000,00	1.713.518.000,00	-23.790.455.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.151.983.300,00	1.133.983.300,00	1.109.983.300,00	-42.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.121.365.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	565.838.500,00	547.838.500,00	526.838.500,00	-39.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			667.806.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	1.009.970.800,00	37.150.800,00	14.150.800,00	-995.820.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			964.985.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	2.146.304.700,00	2.083.918.700,00	2.067.918.700,00	-78.386.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.694.192.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	25 Unit	3.865.162.600,00	3.645.889.600,00	3.630.889.600,00	-234.273.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			5.149.839.440,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				40 Ruang	40 Ruang	7.630.044.400,00	7.572.240.400,00	7.545.240.400,00	-84.804.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			14.114.047.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	1.282.552.300,00	1.264.552.300,00	1.244.552.300,00	-38.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.472.359.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				30 Unit	30 Unit	2.336.886.000,00	2.250.449.000,00	2.220.449.000,00	-116.437.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.139.176.720,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	5.260.128.300,00	5.206.128.300,00	69.729.600,00	-5.190.398.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			12.868.591.720,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				19000 Peserta Didik	19000 Peserta Didik	721.283.200,00	721.283.200,00	653.283.200,00	-68.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			806.585.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				8500 Peserta Didik	8500 Peserta Didik	896.713.200,00	866.713.200,00	866.713.200,00	-30.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.102.605.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				340 Orang	0 Orang	3.952.012.680,00	0,00	0,00	-3.952.012.680,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			7.347.479.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				3400 Orang	3400 Orang	1.284.322.500,00	4.462.022.500,00	4.668.022.500,00	3.383.700.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.277.119.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				250 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan	324.484.100,00	324.484.100,00	321.234.100,00	-3.250.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			358.525.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				250 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan	65.555.507.000,00	66.044.100.000,00	66.044.100.000,00	488.593.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			35.532.008.064,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				250 Orang	250 Orang	119.711.800,00	119.711.800,00	295.161.800,00	175.450.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			149.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				9 Dokumen	9 Dokumen	463.569.000,00	463.569.000,00	933.437.000,00	469.868.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			361.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				213 Satuan Pendidikan	213 Satuan Pendidikan	172.880.500,00	172.880.500,00	89.080.500,00	-83.800.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			192.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				24 Ruang	24 Ruang	14.103.019.100,00	13.247.119.100,00	13.167.119.100,00	-935.900.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			11.232.052.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	850 Orang	320.822.500,00	320.822.500,00	320.822.500,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	5.003.976.200,00	5.003.976.200,00	4.960.449.000,00	-43.527.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			5.103.350.520,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	1.539.047.000,00	816.287.000,00	715.841.000,00	-823.206.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.598.563.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	2.491.883.700,00	1.503.909.700,00	1.464.909.700,00	-1.026.974.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.633.141.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase Pendidikan Anak Usia DIni (PAUD) yang Dikelola*				100 %	100 %	32.605.207.980,00	24.973.552.360,00	26.350.502.260,00	-6.254.705.720,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	PAUD Negeri dan Swasta Se-Kota Makassar		13.885.579.090,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	187.992.000,00	187.992.000,00	442.545.500,00	254.553.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				16 Orang	0 Orang	299.394.900,00	0,00	0,00	-299.394.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			317.587.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				2380 Orang	2380 Orang	8.344.305.000,00	1.686.305.000,00	1.717.105.000,00	-6.627.200.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.890.475.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				572 Satuan Pendidikan	572 Satuan Pendidikan	571.295.400,00	465.055.400,00	666.712.100,00	95.416.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			568.756.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				572 Satuan Pendidikan	572 Satuan Pendidikan	12.588.829.500,00	11.157.486.500,00	11.157.486.500,00	-1.431.343.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.473.243.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				572 Orang	572 Orang	177.575.000,00	153.075.000,00	153.075.000,00	-24.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			177.819.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				50 Dokumen	50 Dokumen	210.534.800,00	264.184.800,00	264.184.800,00	53.650.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			250.374.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				30 Ruang	30 Ruang	63.800.000,00	63.550.000,00	63.550.000,00	-250.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			54.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta didik	300 Peserta didik	169.692.200,00	277.742.200,00	264.492.200,00	94.800.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			164.038.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	86.787.800,00	127.902.800,00	127.902.800,00	41.115.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			69.354.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	1 Unit	7.361.954.500,00	7.361.954.500,00	8.455.258.400,00	1.093.303.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**280.112.708.127,00**	**329.545.126.910,00**	**302.530.445.560,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**266.409.669.133,00**	-
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	1 Paket	6.460.000,00	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD]	**Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD**	**100**	**100**	**100**	-	-	**280.112.708.127,00**	**329.545.126.910,00**	**302.530.445.560,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**266.409.669.133,00**	-
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	465.834.700,00	347.664.700,00	391.550.500,00	-74.284.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			745.013.520,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				668 Satuan Pendidikan	668 Satuan Pendidikan	2.070.752.180,00	2.874.179.460,00	2.640.179.460,00	569.427.280,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.174.619.170,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dikelola*				100 %	100 %	8.032.085.500,00	8.379.835.500,00	8.379.235.500,00	347.150.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	SKB dan PKBM Se-Kota Makassar		4.647.946.884,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	20 Peserta Didik	698.000,00	698.000,00	698.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	174.439.900,00	179.439.900,00	179.439.900,00	5.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			150.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	7.414.609.800,00	7.756.959.800,00	7.756.959.800,00	342.350.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.041.901.584,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				120 Orang	120 Orang	69.763.000,00	70.763.000,00	70.763.000,00	1.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			69.458.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				100 Dokumen	100 Dokumen	153.074.000,00	152.474.000,00	152.474.000,00	-600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			167.830.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				5700 Peserta Didik	5700 Peserta Didik	219.500.800,00	219.500.800,00	218.900.800,00	-600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			218.357.300,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase satuan pendidikan yang Mengembangkan kurikulum muatan lokal**				**-**	**100 %**	**111.195.400,00**	**118.245.400,00**	**118.245.400,00**	**-1.293.400,00**							**109.902.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**111.195.400,00**	**118.245.400,00**	**118.245.400,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**109.902.000,00**	-
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah Kurikulum yang Dikembangkan*				2 Kurikulum	2 Kurikulum	111.195.400,00	118.245.400,00	118.245.400,00	7.050.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	PAUD dan Pendidikan Kesetaraan/Nonformal		109.902.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				50 Dokumen	50 Dokumen	111.195.400,00	118.245.400,00	118.245.400,00	7.050.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			109.902.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik** **Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4**				**-**	**1.100 2.77,22 %**	**123.015.000,00**	**123.015.000,00**	**18.015.000,00**	**-105.555.000,00**							**17.460.000,00**	
		[Indeks Pemerataan Guru]	**Indeks Pemerataan Guru**	**100**	**0**	**0**	-	-	**123.015.000,00**	**123.015.000,00**	**18.015.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**17.460.000,00**	-
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Kegiatan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Dilaksanakan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	123.015.000,00	123.015.000,00	18.015.000,00	-105.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	PTK Se-Kota Makassar		17.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				12 Dokumen	12 Dokumen	51.010.000,00	51.010.000,00	9.010.000,00	-42.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			9.435.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				12 Laporan	12 Laporan	72.005.000,00	72.005.000,00	9.005.000,00	-63.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			8.025.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui**				**-**	**38,38 %**	**98.313.000,00**	**109.813.000,00**	**109.813.000,00**	**-4.531.720,00**							**93.781.280,00**	
		[Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui]	**Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui**	**46.38**	**36.38**	**36.38**	-	-	**98.313.000,00**	**109.813.000,00**	**109.813.000,00**	-	-	-	-	-	-	**38.3**	**93.781.280,00**	-
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Izin PAUD yang diterbitkan*				150 Lembaga	150 Lembaga	98.313.000,00	109.813.000,00	109.813.000,00	11.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	PAUD dan Pendidikan Kesetaraan/Nonformal		93.781.280,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	98.313.000,00	109.813.000,00	109.813.000,00	11.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			93.781.280,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							**544.477.620.004,00**	**410.636.742.705,00**	**441.818.147.019,00**	**-102.659.472.985,00**							**395.063.972.641,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**544.477.620.004,00**	**410.636.742.705,00**	**441.818.147.019,00**	**-102.659.472.985,00**							**395.063.972.641,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**544.477.620.004,00**	**410.636.742.705,00**	**441.818.147.019,00**	**-102.659.472.985,00**							**395.063.972.641,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**339.469.925.987,00**	**204.667.298.165,00**	**213.460.003.330,00**	**-130.679.757.168,00**							**208.790.168.819,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**339.469.925.987,00**	**204.667.298.165,00**	**213.460.003.330,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**208.790.168.819,00**	-
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun*				10 Dokumen	13 Dokumen	54.020.200,00	69.770.200,00	69.770.200,00	15.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Kesehatan		54.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7 Dokumen	25.002.000,00	32.152.000,00	32.152.000,00	7.150.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.005.900,00	4.005.900,00	4.005.900,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.005.900,00	4.005.900,00	4.005.900,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.001.900,00	4.201.900,00	4.201.900,00	200.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.003.500,00	4.003.500,00	4.003.500,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	13.001.000,00	21.401.000,00	21.401.000,00	8.400.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun*				-	41 Dokumen	202.899.211.751,00	190.258.662.051,00	198.636.533.581,00	-4.262.678.170,00			-	- -	-		202.900.211.439,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2590 Orang /bulan	2590 Orang /bulan	200.532.146.951,00	188.229.422.051,00	196.495.693.581,00	-4.036.453.370,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.532.559.439,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.959.958.200,00	1.626.240.000,00	1.737.840.000,00	-222.118.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.959.744.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	407.106.600,00	403.000.000,00	403.000.000,00	-4.106.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			407.908.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	12 Dokumen	336.000.000,00	180.000.000,00	188.000.000,00	-148.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12 Laporan	336.000.000,00	180.000.000,00	188.000.000,00	-148.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	2 Jenis	571.800.000,00	1.417.500.000,00	1.830.000.000,00	1.258.200.000,00			-	- -	-		662.145.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				190 Paket	190 Paket	133.500.000,00	133.500.000,00	133.500.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			133.845.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				52 Orang	181 Orang	438.300.000,00	1.284.000.000,00	1.696.500.000,00	1.258.200.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			528.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	6 Jenis	918.825.400,00	4.973.009.600,00	5.048.760.085,00	4.129.934.685,00			-	- -	-		916.786.960,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	35.431.000,00	35.555.000,00	35.561.585,00	130.585,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.646.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9 Paket	74.251.500,00	4.171.989.800,00	4.196.033.500,00	4.121.782.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	477.384.700,00	28.299.800,00	0,00	-477.384.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			477.380.960,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	250.878.200,00	260.285.000,00	260.285.000,00	9.406.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	20.880.000,00	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105 Laporan	105 Laporan	60.000.000,00	456.000.000,00	536.000.000,00	476.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			132.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	39 Laporan	3.099.925.120,00	3.872.149.780,00	3.889.259.500,00	789.334.380,00			-	- -	-		3.072.301.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-18.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	729.680.000,00	738.968.000,00	747.077.720,00	17.397.720,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			753.203.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	134.424.100,00	210.280.000,00	210.280.000,00	75.855.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			73.981.520,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.217.821.020,00	2.904.901.780,00	2.931.901.780,00	714.080.760,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.227.116.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*				-	4 Jenis	1.246.217.000,00	3.896.206.534,00	3.797.679.964,00	2.551.462.964,00			-	- -	-		1.184.724.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.650.000,00	42.650.000,00	27.040.000,00	-15.610.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			40.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				286 Unit	286 Unit	1.002.710.000,00	805.110.000,00	722.419.830,00	-280.290.170,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			942.940.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	4 Unit	200.857.000,00	3.048.446.534,00	3.048.220.134,00	2.847.363.134,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			200.904.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**				**-**	**100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % % % % % % % % % % %**	**192.872.820.257,00**	**192.189.218.400,00**	**212.860.394.384,00**	**-7.468.938.075,00**						**185.403.882.182,00**	
		[Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan]	**Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**192.872.820.257,00**	**192.189.218.400,00**	**212.860.394.384,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**185.403.882.182,00**	-
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kota Makassar yang disediakan*				45 & 3 PKM & RS	47 PKM & 1 RS PKM & RS	47.001.795.277,00	58.837.761.320,00	55.243.497.369,00	8.241.702.092,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat		21.022.947.012,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	15.739.875.267,00	11.818.497.600,00	9.647.281.000,00	-6.092.594.267,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**192.872.820.257,00**	**192.189.218.400,00**	**212.860.394.384,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**185.403.882.182,00**	-
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Unit	4 Unit	647.569.150,00	1.491.541.700,00	1.497.541.700,00	849.972.550,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		[Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan]	**Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**192.872.820.257,00**	**192.189.218.400,00**	**212.860.394.384,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**185.403.882.182,00**	-
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	2.932.083.800,00	4.405.379.100,00	4.405.379.100,00	1.473.295.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.769.608.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				46 Unit	47 Unit	732.775.000,00	1.716.306.640,00	1.715.708.640,00	982.933.640,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				753.570.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	10.417.662.600,00	9.550.818.200,00	9.587.562.600,00	-830.100.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	16.351.941.100,00	29.610.254.380,00	28.050.547.429,00	11.698.606.329,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				18.315.117.212,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				47 Paket	47 Paket	179.888.360,00	244.963.700,00	339.476.900,00	159.588.540,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				184.651.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan puskesmas dan RSUD*				-	87,75 %	145.442.990.680,00	130.841.039.780,00	155.260.253.715,00	9.817.263.035,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat		163.905.264.170,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27776 Orang	27776 Orang	2.856.508.800,00	387.710.600,00	823.760.600,00	-2.032.748.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				3.623.928.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				26514 Orang	26514 Orang	1.916.912.600,00	538.160.100,00	1.080.712.100,00	-836.200.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				4.127.396.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25251 Orang	25616 Orang	528.623.000,00	528.623.000,00	5.004.471.200,00	4.475.848.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				528.665.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				112481 Orang	86472 Orang	97.947.800,00	86.182.300,00	86.169.600,00	-11.778.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			114.666.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				197812 Orang	197812 Orang	470.138.100,00	590.151.500,00	694.636.500,00	224.498.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			571.824.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				971476 Orang	971476 Orang	1.293.007.200,00	214.715.700,00	273.015.700,00	-1.019.991.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.313.064.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				153951 Orang	153951 Orang	18.600.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	3.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			21.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				333663 Orang	330427 Orang	33.618.400,00	36.618.400,00	36.618.400,00	3.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			36.678.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27238 Orang	26974 Orang	30.443.400,00	33.443.400,00	33.443.400,00	3.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			33.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				3567 Orang	3567 Orang	88.987.800,00	49.801.400,00	49.801.400,00	-39.186.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			72.582.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				33122 Orang	33122 Orang	29.943.500,00	190.393.500,00	4.893.613.500,00	4.863.670.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			32.253.960,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				42475 Orang	42475 Orang	359.096.000,00	575.096.000,00	263.436.000,00	-95.660.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			373.195.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				3 Dokumen	3 Dokumen	20.126.800,00	20.126.800,00	20.126.800,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			20.046.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	2.409.043.500,00	1.350.450.400,00	2.044.610.400,00	-364.433.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.276.865.960,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	345.299.300,00	276.576.100,00	274.576.100,00	-70.723.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			155.614.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	6 Dokumen	240.964.300,00	615.964.300,00	1.644.604.300,00	1.403.640.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			238.066.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	4 Dokumen	28.170.600,00	28.170.600,00	97.170.600,00	69.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			20.080.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	88.455.900,00	130.255.900,00	130.255.900,00	41.800.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			114.835.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				6 Dokumen	6 Dokumen	51.031.200,00	51.031.200,00	51.031.200,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			56.035.120,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				240 Orang	240 Orang	42.155.000,00	292.155.000,00	292.155.000,00	250.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			42.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2548 Orang	2548 Orang	52.293.600,00	32.133.600,00	32.133.600,00	-20.160.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			52.296.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	21.053.200,00	21.053.200,00	21.053.200,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			20.982.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	2.612.741.960,00	2.652.544.600,00	2.157.144.600,00	-455.597.360,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.898.233.520,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	118.863.128.800,00	99.180.316.000,00	124.471.556.800,00	5.608.428.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			118.149.858.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				282 Orang	282 Orang	16.843.800,00	16.843.800,00	16.843.800,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			42.852.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				52 Paket	52 Paket	8.702.400,00	8.702.400,00	300.680.875,00	291.978.475,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			8.794.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				15 Dokumen	15 Dokumen	543.348.700,00	498.212.700,00	492.092.700,00	-51.256.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			523.216.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				47 Unit	47 Unit	2.473.984.220,00	1.193.766.600,00	1.042.202.600,00	-1.431.781.620,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.473.984.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				47 Dokumen	47 Dokumen	7.099.932.000,00	17.792.151.880,00	5.582.024.480,00	-1.517.907.520,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			23.278.910.490,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	2.002.040.000,00	2.002.040.000,00	2.002.040.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.002.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				47 Unit	47 Unit	203.831.900,00	581.831.900,00	581.831.900,00	378.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			74.615.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	7 Laporan	22.476.800,00	22.476.800,00	14.726.800,00	-7.750.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			22.467.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				4 Dokumen	4 Dokumen	21.140.000,00	21.140.000,00	21.140.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			21.065.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	6815 Orang	35.040.200,00	31.740.200,00	31.740.200,00	-3.300.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			44.472.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	231.136.000,00	411.136.000,00	173.316.000,00	-57.820.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			230.735.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	2665 Orang	39.236.400,00	39.236.400,00	53.629.960,00	14.393.560,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			39.155.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				7 Tatanan	7 Tatanan	154.828.700,00	144.228.700,00	144.228.700,00	-10.600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			154.953.920,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	9.268.000,00	90.568.000,00	90.568.000,00	81.300.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			9.399.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				27564 0	27564 0	36.208.000,00	36.208.000,00	168.008.000,00	131.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				37.308.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				3 Dokumen	4 Dokumen	22.102.600,00	22.102.600,00	22.102.600,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				22.007.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				4 Dokumen	5 Dokumen	24.580.200,00	24.580.200,00	24.580.200,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				24.555.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**192.872.820.257,00**	**192.189.218.400,00**	**212.860.394.384,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**185.403.882.182,00**	-
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
		[Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan]	**Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**192.872.820.257,00**	**192.189.218.400,00**	**212.860.394.384,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**185.403.882.182,00**	-
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindak lanjuti perizinannya*				100 %	28 Unit	428.034.300,00	2.510.417.300,00	2.310.243.300,00	1.882.209.000,00			-	- -	-		475.671.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				33 Unit	33 Unit	15.695.500,00	15.695.500,00	15.695.500,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				16.276.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				28 Unit	60 Unit	32.492.800,00	66.092.800,00	66.092.800,00	33.600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				46.651.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				247 Unit	4 Unit	309.795.900,00	2.358.578.900,00	2.158.404.900,00	1.848.609.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -				309.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				3 Dokumen	3 Dokumen	70.050.100,00	70.050.100,00	70.050.100,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				103.154.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan**				**-**	**90 %**	**344.365.500,00**	**287.916.940,00**	**1.305.533.960,00**	**-48.340,00**							**344.317.160,00**	
		[Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan]	**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan**	**100**	**100**	**95**	-	-	**344.365.500,00**	**287.916.940,00**	**1.305.533.960,00**	-	-	-	-	-	-	**95**	**344.317.160,00**	-
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota*				100 %	1 Paket	139.259.900,00	106.520.900,00	106.520.900,00	-32.739.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	MASYARAKAT		139.260.160,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	139.259.900,00	106.520.900,00	106.520.900,00	-32.739.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			139.260.160,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/Kota*				10 Kegiatan undefined undefined	1 Paket	113.661.600,00	98.918.000,00	293.958.000,00	180.296.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	MASYARAKAT		113.613.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	113.661.600,00	98.918.000,00	293.958.000,00	180.296.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			113.613.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	1 Paket	91.444.000,00	82.478.040,00	905.055.060,00	813.611.060,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	MASYARAKAT		91.444.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				162 Orang	162 Orang	91.444.000,00	82.478.040,00	905.055.060,00	813.611.060,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			91.444.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**				**-**	**100 %**	**517.110.080,00**	**481.952.700,00**	**919.060.100,00**	**8.494.400,00**							**525.604.480,00**	
		[Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman]	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**100**	**85.61**	**100**	-	-	**517.110.080,00**	**481.952.700,00**	**919.060.100,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**525.604.480,00**	-
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Tersedianya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*				100 %	1 Paket	133.687.700,00	159.193.100,00	237.911.100,00	104.223.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	MASYARAKAT		125.438.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				6 Dokumen	6 Dokumen	133.687.700,00	159.193.100,00	237.911.100,00	104.223.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			125.438.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Tersedianya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga*				10 PKRT	1 Paket	86.862.000,00	86.862.000,00	86.862.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	MASYARAKAT		86.862.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				2 Dokumen	2 Dokumen	86.862.000,00	86.862.000,00	86.862.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			86.862.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Tersedianya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*				100 %	1 Paket	187.594.580,00	127.715.600,00	252.014.600,00	64.420.020,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	MASYARAKAT		187.322.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	187.594.580,00	127.715.600,00	252.014.600,00	64.420.020,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			187.322.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Tersedianya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*				3265 sarana	1 Paket	56.024.900,00	56.024.500,00	56.024.900,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	MASYARAKAT		72.338.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	12 Dokumen	56.024.900,00	56.024.500,00	56.024.900,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			72.338.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Tersedianya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan*				-	1 Paket	35.250.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	MASYARAKAT		36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.250.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			36.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Tersedianya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga*				-	1 Paket	17.690.900,00	16.907.500,00	250.997.500,00	233.306.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	MASYARAKAT		17.643.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				1 Unit	1 Unit	17.690.900,00	16.907.500,00	250.997.500,00	233.306.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			17.643.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**-**	**25 %**	**11.273.398.180,00**	**13.010.356.500,00**	**13.273.155.245,00**	**-11.273.398.180,00**							**0,00**	
		[Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Dlberdayakan]	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**	**100**	**10**	**25**	-	-	**11.273.398.180,00**	**13.010.356.500,00**	**13.273.155.245,00**	-	-	-	-	-	-	**25**	**0,00**	-
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Posyandu yang menerima bantuan biaya operasional*				-	1012 Posyandu	10.975.348.500,00	12.790.185.800,00	12.938.128.600,00	1.962.780.100,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	10.975.348.500,00	12.790.185.800,00	12.938.128.600,00	1.962.780.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Promosi Kegiatan dan gerakan hidup bersih dan sehat yang diselenggarakan*				-	12 kegiatan	298.049.680,00	220.170.700,00	220.170.700,00	-77.878.980,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				12 Dokumen	9 Dokumen	298.049.680,00	220.170.700,00	220.170.700,00	-77.878.980,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	114.855.945,00	114.855.945,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	0,00	114.855.945,00	114.855.945,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS ANDALAS							**1.573.433.600,00**	**1.419.837.280,00**	**1.419.837.280,00**	**-153.596.320,00**							**1.505.033.600,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.573.433.600,00**	**1.419.837.280,00**	**1.419.837.280,00**	**-153.596.320,00**							**1.505.033.600,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.573.433.600,00**	**1.419.837.280,00**	**1.419.837.280,00**	**-153.596.320,00**							**1.505.033.600,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah** **Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100** **100** **90 %** **%** **%**	**1.573.433.600,00**	**1.419.837.280,00**	**1.419.837.280,00**	**-68.400.000,00**							**1.505.033.600,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.573.433.600,00**	**1.419.837.280,00**	**1.419.837.280,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.505.033.600,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.573.433.600,00	1.419.837.280,00	1.419.837.280,00	-153.596.320,00			-	- -	-		1.505.033.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.573.433.600,00	1.419.837.280,00	1.419.837.280,00	-153.596.320,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			1.505.033.600,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS ANTANG							**2.802.214.000,00**	**2.877.507.220,00**	**2.927.507.220,00**	**125.293.220,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.802.214.000,00**	**2.877.507.220,00**	**2.927.507.220,00**	**125.293.220,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.802.214.000,00**	**2.877.507.220,00**	**2.927.507.220,00**	**125.293.220,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**2.802.214.000,00**	**2.877.507.220,00**	**2.927.507.220,00**	**-2.802.214.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.802.214.000,00	2.877.507.220,00	2.927.507.220,00	125.293.220,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.802.214.000,00	2.877.507.220,00	2.927.507.220,00	125.293.220,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS							**2.735.507.780,00**	**2.536.739.742,00**	**2.548.228.001,00**	**-187.279.779,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.735.507.780,00**	**2.536.739.742,00**	**2.548.228.001,00**	**-187.279.779,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.735.507.780,00**	**2.536.739.742,00**	**2.548.228.001,00**	**-187.279.779,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**2.735.507.780,00**	**2.536.739.742,00**	**2.548.228.001,00**	**-2.735.507.780,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.735.507.780,00	2.536.739.742,00	2.548.228.001,00	-187.279.779,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.735.507.780,00	2.536.739.742,00	2.548.228.001,00	-187.279.779,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS ANTARA							**1.578.957.000,00**	**1.493.699.196,00**	**1.510.967.196,00**	**-67.989.804,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.578.957.000,00**	**1.493.699.196,00**	**1.510.967.196,00**	**-67.989.804,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.578.957.000,00**	**1.493.699.196,00**	**1.510.967.196,00**	**-67.989.804,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**1.578.957.000,00**	**1.493.699.196,00**	**1.510.967.196,00**	**-1.578.957.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.578.957.000,00	1.493.699.196,00	1.510.967.196,00	-67.989.804,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.578.957.000,00	1.493.699.196,00	1.510.967.196,00	-67.989.804,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BALLAPARANG							**2.307.271.000,00**	**2.128.332.400,00**	**2.128.332.400,00**	**-178.938.600,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.307.271.000,00**	**2.128.332.400,00**	**2.128.332.400,00**	**-178.938.600,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.307.271.000,00**	**2.128.332.400,00**	**2.128.332.400,00**	**-178.938.600,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**2.307.271.000,00**	**2.128.332.400,00**	**2.128.332.400,00**	**-2.307.271.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.307.271.000,00	2.128.332.400,00	2.128.332.400,00	-178.938.600,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.307.271.000,00	2.128.332.400,00	2.128.332.400,00	-178.938.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BANGKALA							**2.062.200.000,00**	**1.859.476.833,00**	**1.893.519.857,00**	**-168.680.143,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.062.200.000,00**	**1.859.476.833,00**	**1.893.519.857,00**	**-168.680.143,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.062.200.000,00**	**1.859.476.833,00**	**1.893.519.857,00**	**-168.680.143,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**2.062.200.000,00**	**1.859.476.833,00**	**1.893.519.857,00**	**-2.062.200.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.062.200.000,00	1.859.476.833,00	1.893.519.857,00	-168.680.143,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.062.200.000,00	1.859.476.833,00	1.893.519.857,00	-168.680.143,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BARA-BARAYA							**2.901.458.968,00**	**3.449.431.992,00**	**3.455.481.992,00**	**554.023.024,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.901.458.968,00**	**3.449.431.992,00**	**3.455.481.992,00**	**554.023.024,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.901.458.968,00**	**3.449.431.992,00**	**3.455.481.992,00**	**554.023.024,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**2.901.458.968,00**	**3.449.431.992,00**	**3.455.481.992,00**	**-2.901.458.968,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.901.458.968,00	3.449.431.992,00	3.455.481.992,00	554.023.024,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.901.458.968,00	3.449.431.992,00	3.455.481.992,00	554.023.024,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BAROMBONG							**2.302.397.000,00**	**2.022.816.000,00**	**2.022.816.000,00**	**-279.581.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.302.397.000,00**	**2.022.816.000,00**	**2.022.816.000,00**	**-279.581.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.302.397.000,00**	**2.022.816.000,00**	**2.022.816.000,00**	**-279.581.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**2.302.397.000,00**	**2.022.816.000,00**	**2.022.816.000,00**	**-2.302.397.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.302.397.000,00	2.022.816.000,00	2.022.816.000,00	-279.581.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.302.397.000,00	2.022.816.000,00	2.022.816.000,00	-279.581.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BARRANG LOMPO							**2.294.719.000,00**	**2.025.876.496,00**	**2.025.762.496,00**	**-268.956.504,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.294.719.000,00**	**2.025.876.496,00**	**2.025.762.496,00**	**-268.956.504,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.294.719.000,00**	**2.025.876.496,00**	**2.025.762.496,00**	**-268.956.504,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**2.294.719.000,00**	**2.025.876.496,00**	**2.025.762.496,00**	**-2.294.719.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.294.719.000,00	2.025.876.496,00	2.025.762.496,00	-268.956.504,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.294.719.000,00	2.025.876.496,00	2.025.762.496,00	-268.956.504,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BATUA							**3.373.861.368,00**	**3.397.893.992,00**	**3.398.013.992,00**	**24.152.624,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.373.861.368,00**	**3.397.893.992,00**	**3.398.013.992,00**	**24.152.624,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.373.861.368,00**	**3.397.893.992,00**	**3.398.013.992,00**	**24.152.624,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**3.373.861.368,00**	**3.397.893.992,00**	**3.398.013.992,00**	**-3.373.861.368,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	3.373.861.368,00	3.397.893.992,00	3.398.013.992,00	24.152.624,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.373.861.368,00	3.397.893.992,00	3.398.013.992,00	24.152.624,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BIRA							**2.570.897.000,00**	**2.271.289.992,00**	**2.271.289.992,00**	**-299.607.008,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.570.897.000,00**	**2.271.289.992,00**	**2.271.289.992,00**	**-299.607.008,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.570.897.000,00**	**2.271.289.992,00**	**2.271.289.992,00**	**-299.607.008,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**2.570.897.000,00**	**2.271.289.992,00**	**2.271.289.992,00**	**-2.570.897.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.570.897.000,00	2.271.289.992,00	2.271.289.992,00	-299.607.008,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.570.897.000,00	2.271.289.992,00	2.271.289.992,00	-299.607.008,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BULUROKENG							**2.168.289.000,00**	**1.585.402.436,00**	**1.580.402.436,00**	**-587.886.564,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.168.289.000,00**	**1.585.402.436,00**	**1.580.402.436,00**	**-587.886.564,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.168.289.000,00**	**1.585.402.436,00**	**1.580.402.436,00**	**-587.886.564,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**2.168.289.000,00**	**1.585.402.436,00**	**1.580.402.436,00**	**-2.168.289.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.168.289.000,00	1.585.402.436,00	1.580.402.436,00	-587.886.564,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.168.289.000,00	1.585.402.436,00	1.580.402.436,00	-587.886.564,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS CENDRAWASIH							**5.330.604.000,00**	**2.526.091.888,00**	**2.643.972.478,00**	**-2.686.631.522,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.330.604.000,00**	**2.526.091.888,00**	**2.643.972.478,00**	**-2.686.631.522,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**5.330.604.000,00**	**2.526.091.888,00**	**2.643.972.478,00**	**-2.686.631.522,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**5.330.604.000,00**	**2.526.091.888,00**	**2.643.972.478,00**	**-5.330.604.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	5.330.604.000,00	2.526.091.888,00	2.643.972.478,00	-2.686.631.522,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5.330.604.000,00	2.526.091.888,00	2.643.972.478,00	-2.686.631.522,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS DAHLIA							**4.054.533.400,00**	**1.906.605.009,00**	**1.906.605.009,00**	**-2.147.928.391,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.054.533.400,00**	**1.906.605.009,00**	**1.906.605.009,00**	**-2.147.928.391,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**4.054.533.400,00**	**1.906.605.009,00**	**1.906.605.009,00**	**-2.147.928.391,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**4.054.533.400,00**	**1.906.605.009,00**	**1.906.605.009,00**	**-4.054.533.400,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	4.054.533.400,00	1.906.605.009,00	1.906.605.009,00	-2.147.928.391,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.054.533.400,00	1.906.605.009,00	1.906.605.009,00	-2.147.928.391,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS DAYA							**1.122.935.000,00**	**824.019.992,00**	**920.651.589,00**	**-202.283.411,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.122.935.000,00**	**824.019.992,00**	**920.651.589,00**	**-202.283.411,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.122.935.000,00**	**824.019.992,00**	**920.651.589,00**	**-202.283.411,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**1.122.935.000,00**	**824.019.992,00**	**920.651.589,00**	**-1.122.935.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.122.935.000,00	824.019.992,00	920.651.589,00	-202.283.411,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.122.935.000,00	824.019.992,00	920.651.589,00	-202.283.411,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS JONGAYA							**2.140.607.968,00**	**3.098.728.452,00**	**3.086.996.360,00**	**946.388.392,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.140.607.968,00**	**3.098.728.452,00**	**3.086.996.360,00**	**946.388.392,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.140.607.968,00**	**3.098.728.452,00**	**3.086.996.360,00**	**946.388.392,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**2.140.607.968,00**	**3.098.728.452,00**	**3.086.996.360,00**	**-2.140.607.968,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.140.607.968,00	3.098.728.452,00	3.086.996.360,00	946.388.392,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.140.607.968,00	3.098.728.452,00	3.086.996.360,00	946.388.392,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS JUMPANDANG BARU							**2.473.135.968,00**	**3.219.828.700,00**	**3.086.707.075,00**	**613.571.107,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.473.135.968,00**	**3.219.828.700,00**	**3.086.707.075,00**	**613.571.107,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.473.135.968,00**	**3.219.828.700,00**	**3.086.707.075,00**	**613.571.107,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**2.473.135.968,00**	**3.219.828.700,00**	**3.086.707.075,00**	**-2.473.135.968,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.473.135.968,00	3.219.828.700,00	3.086.707.075,00	613.571.107,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.473.135.968,00	3.219.828.700,00	3.086.707.075,00	613.571.107,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KALUKU BODOA							**3.579.520.968,00**	**4.491.391.800,00**	**4.599.406.800,00**	**1.019.885.832,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.579.520.968,00**	**4.491.391.800,00**	**4.599.406.800,00**	**1.019.885.832,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.579.520.968,00**	**4.491.391.800,00**	**4.599.406.800,00**	**1.019.885.832,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**3.579.520.968,00**	**4.491.391.800,00**	**4.599.406.800,00**	**-3.579.520.968,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	3.579.520.968,00	4.491.391.800,00	4.599.406.800,00	1.019.885.832,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.579.520.968,00	4.491.391.800,00	4.599.406.800,00	1.019.885.832,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KAPASA							**1.788.975.000,00**	**1.516.452.500,00**	**1.516.052.500,00**	**-272.922.500,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.788.975.000,00**	**1.516.452.500,00**	**1.516.052.500,00**	**-272.922.500,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.788.975.000,00**	**1.516.452.500,00**	**1.516.052.500,00**	**-272.922.500,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**1.788.975.000,00**	**1.516.452.500,00**	**1.516.052.500,00**	**-1.788.975.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.788.975.000,00	1.516.452.500,00	1.516.052.500,00	-272.922.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.788.975.000,00	1.516.452.500,00	1.516.052.500,00	-272.922.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KARUWISI							**2.194.430.800,00**	**2.019.422.996,00**	**1.987.644.674,00**	**-206.786.126,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.194.430.800,00**	**2.019.422.996,00**	**1.987.644.674,00**	**-206.786.126,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.194.430.800,00**	**2.019.422.996,00**	**1.987.644.674,00**	**-206.786.126,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**2.194.430.800,00**	**2.019.422.996,00**	**1.987.644.674,00**	**-2.194.430.800,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.194.430.800,00	2.019.422.996,00	1.987.644.674,00	-206.786.126,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.194.430.800,00	2.019.422.996,00	1.987.644.674,00	-206.786.126,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KASSI-KASSI							**3.220.680.968,00**	**4.528.968.589,00**	**4.521.343.589,00**	**1.300.662.621,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.220.680.968,00**	**4.528.968.589,00**	**4.521.343.589,00**	**1.300.662.621,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.220.680.968,00**	**4.528.968.589,00**	**4.521.343.589,00**	**1.300.662.621,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**3.220.680.968,00**	**4.528.968.589,00**	**4.521.343.589,00**	**-3.220.680.968,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	3.220.680.968,00	4.528.968.589,00	4.521.343.589,00	1.300.662.621,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.220.680.968,00	4.528.968.589,00	4.521.343.589,00	1.300.662.621,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LAYANG							**3.021.192.000,00**	**2.546.854.768,00**	**2.634.901.758,00**	**-386.290.242,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.021.192.000,00**	**2.546.854.768,00**	**2.634.901.758,00**	**-386.290.242,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.021.192.000,00**	**2.546.854.768,00**	**2.634.901.758,00**	**-386.290.242,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**3.021.192.000,00**	**2.546.854.768,00**	**2.634.901.758,00**	**-3.021.192.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	3.021.192.000,00	2.546.854.768,00	2.634.901.758,00	-386.290.242,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.021.192.000,00	2.546.854.768,00	2.634.901.758,00	-386.290.242,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MACCINI SAWAH							**2.178.449.000,00**	**1.875.141.196,00**	**1.875.312.200,00**	**-303.136.800,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.178.449.000,00**	**1.875.141.196,00**	**1.875.312.200,00**	**-303.136.800,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.178.449.000,00**	**1.875.141.196,00**	**1.875.312.200,00**	**-303.136.800,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**2.178.449.000,00**	**1.875.141.196,00**	**1.875.312.200,00**	**-2.178.449.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.178.449.000,00	1.875.141.196,00	1.875.312.200,00	-303.136.800,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.178.449.000,00	1.875.141.196,00	1.875.312.200,00	-303.136.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MACCINI SOMBALA							**2.745.820.000,00**	**2.282.173.996,00**	**2.235.974.000,00**	**-509.846.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.745.820.000,00**	**2.282.173.996,00**	**2.235.974.000,00**	**-509.846.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.745.820.000,00**	**2.282.173.996,00**	**2.235.974.000,00**	**-509.846.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**2.745.820.000,00**	**2.282.173.996,00**	**2.235.974.000,00**	**-2.745.820.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.745.820.000,00	2.282.173.996,00	2.235.974.000,00	-509.846.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.745.820.000,00	2.282.173.996,00	2.235.974.000,00	-509.846.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MAKKASAU							**2.361.929.000,00**	**2.018.769.203,00**	**2.217.993.960,00**	**-143.935.040,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.361.929.000,00**	**2.018.769.203,00**	**2.217.993.960,00**	**-143.935.040,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.361.929.000,00**	**2.018.769.203,00**	**2.217.993.960,00**	**-143.935.040,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.361.929.000,00**	**2.018.769.203,00**	**2.217.993.960,00**	**-2.361.929.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.361.929.000,00	2.018.769.203,00	2.217.993.960,00	-143.935.040,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.361.929.000,00	2.018.769.203,00	2.217.993.960,00	-143.935.040,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MALIMONGAN BARU							**2.128.449.000,00**	**1.861.205.240,00**	**1.891.315.355,00**	**-237.133.645,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.128.449.000,00**	**1.861.205.240,00**	**1.891.315.355,00**	**-237.133.645,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.128.449.000,00**	**1.861.205.240,00**	**1.891.315.355,00**	**-237.133.645,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.128.449.000,00**	**1.861.205.240,00**	**1.891.315.355,00**	**-2.128.449.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.128.449.000,00	1.861.205.240,00	1.891.315.355,00	-237.133.645,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.128.449.000,00	1.861.205.240,00	1.891.315.355,00	-237.133.645,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MAMAJANG							**0,00**	**2.235.241.992,00**	**2.235.241.992,00**	**2.235.241.992,00**							**2.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**2.235.241.992,00**	**2.235.241.992,00**	**2.235.241.992,00**							**2.500.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**2.235.241.992,00**	**2.235.241.992,00**	**2.235.241.992,00**							**2.500.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**2.235.241.992,00**	**2.235.241.992,00**	**2.500.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	2.235.241.992,00	2.235.241.992,00	2.235.241.992,00			-	- -	-		2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.235.241.992,00	2.235.241.992,00	2.235.241.992,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MANGASA							**2.445.933.750,00**	**2.206.926.216,00**	**2.206.926.216,00**	**-239.007.534,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.445.933.750,00**	**2.206.926.216,00**	**2.206.926.216,00**	**-239.007.534,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.445.933.750,00**	**2.206.926.216,00**	**2.206.926.216,00**	**-239.007.534,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.445.933.750,00**	**2.206.926.216,00**	**2.206.926.216,00**	**-2.445.933.750,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.445.933.750,00	2.206.926.216,00	2.206.926.216,00	-239.007.534,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.445.933.750,00	2.206.926.216,00	2.206.926.216,00	-239.007.534,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MARADEKAYA							**1.785.928.450,00**	**1.621.612.012,00**	**1.672.579.240,00**	**-113.349.210,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.785.928.450,00**	**1.621.612.012,00**	**1.672.579.240,00**	**-113.349.210,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.785.928.450,00**	**1.621.612.012,00**	**1.672.579.240,00**	**-113.349.210,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.785.928.450,00**	**1.621.612.012,00**	**1.672.579.240,00**	**-1.785.928.450,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.785.928.450,00	1.621.612.012,00	1.672.579.240,00	-113.349.210,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.785.928.450,00	1.621.612.012,00	1.672.579.240,00	-113.349.210,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MINASA UPA							**2.340.216.000,00**	**2.073.933.996,00**	**2.073.934.000,00**	**-266.282.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.340.216.000,00**	**2.073.933.996,00**	**2.073.934.000,00**	**-266.282.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.340.216.000,00**	**2.073.933.996,00**	**2.073.934.000,00**	**-266.282.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.340.216.000,00**	**2.073.933.996,00**	**2.073.934.000,00**	**-2.340.216.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.340.216.000,00	2.073.933.996,00	2.073.934.000,00	-266.282.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.340.216.000,00	2.073.933.996,00	2.073.934.000,00	-266.282.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PACCERAKKANG							**2.168.693.968,00**	**2.719.612.600,00**	**2.719.647.600,00**	**550.953.632,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.168.693.968,00**	**2.719.612.600,00**	**2.719.647.600,00**	**550.953.632,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.168.693.968,00**	**2.719.612.600,00**	**2.719.647.600,00**	**550.953.632,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.168.693.968,00**	**2.719.612.600,00**	**2.719.647.600,00**	**-2.168.693.968,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.168.693.968,00	2.719.612.600,00	2.719.647.600,00	550.953.632,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.168.693.968,00	2.719.612.600,00	2.719.647.600,00	550.953.632,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAMPANG							**2.135.327.968,00**	**3.135.942.000,00**	**3.205.942.000,00**	**1.070.614.032,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.135.327.968,00**	**3.135.942.000,00**	**3.205.942.000,00**	**1.070.614.032,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.135.327.968,00**	**3.135.942.000,00**	**3.205.942.000,00**	**1.070.614.032,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.135.327.968,00**	**3.135.942.000,00**	**3.205.942.000,00**	**-2.135.327.968,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.135.327.968,00	3.135.942.000,00	3.205.942.000,00	1.070.614.032,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.135.327.968,00	3.135.942.000,00	3.205.942.000,00	1.070.614.032,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANAMBUNGAN							**1.736.848.000,00**	**1.405.089.572,00**	**1.355.465.572,00**	**-381.382.428,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.736.848.000,00**	**1.405.089.572,00**	**1.355.465.572,00**	**-381.382.428,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.736.848.000,00**	**1.405.089.572,00**	**1.355.465.572,00**	**-381.382.428,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.736.848.000,00**	**1.405.089.572,00**	**1.355.465.572,00**	**-1.736.848.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.736.848.000,00	1.405.089.572,00	1.355.465.572,00	-381.382.428,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.736.848.000,00	1.405.089.572,00	1.355.465.572,00	-381.382.428,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PATTINGALLOANG							**2.850.396.000,00**	**2.753.134.000,00**	**2.753.134.000,00**	**-97.262.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.850.396.000,00**	**2.753.134.000,00**	**2.753.134.000,00**	**-97.262.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.850.396.000,00**	**2.753.134.000,00**	**2.753.134.000,00**	**-97.262.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.850.396.000,00**	**2.753.134.000,00**	**2.753.134.000,00**	**-2.850.396.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.850.396.000,00	2.753.134.000,00	2.753.134.000,00	-97.262.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.850.396.000,00	2.753.134.000,00	2.753.134.000,00	-97.262.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PULAU KODINGARENG							**1.549.949.000,00**	**1.167.913.392,00**	**1.145.172.392,00**	**-404.776.608,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.549.949.000,00**	**1.167.913.392,00**	**1.145.172.392,00**	**-404.776.608,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.549.949.000,00**	**1.167.913.392,00**	**1.145.172.392,00**	**-404.776.608,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.549.949.000,00**	**1.167.913.392,00**	**1.145.172.392,00**	**-1.549.949.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.549.949.000,00	1.167.913.392,00	1.145.172.392,00	-404.776.608,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.549.949.000,00	1.167.913.392,00	1.145.172.392,00	-404.776.608,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS RAPPOKALLING							**2.025.075.968,00**	**2.894.554.700,00**	**2.894.574.700,00**	**869.498.732,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.025.075.968,00**	**2.894.554.700,00**	**2.894.574.700,00**	**869.498.732,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.025.075.968,00**	**2.894.554.700,00**	**2.894.574.700,00**	**869.498.732,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.025.075.968,00**	**2.894.554.700,00**	**2.894.574.700,00**	**-2.025.075.968,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.025.075.968,00	2.894.554.700,00	2.894.574.700,00	869.498.732,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.025.075.968,00	2.894.554.700,00	2.894.574.700,00	869.498.732,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SUDIANG							**2.791.088.968,00**	**3.355.008.409,00**	**3.362.924.691,00**	**571.835.723,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.791.088.968,00**	**3.355.008.409,00**	**3.362.924.691,00**	**571.835.723,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.791.088.968,00**	**3.355.008.409,00**	**3.362.924.691,00**	**571.835.723,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.791.088.968,00**	**3.355.008.409,00**	**3.362.924.691,00**	**-2.791.088.968,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.791.088.968,00	3.355.008.409,00	3.362.924.691,00	571.835.723,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.791.088.968,00	3.355.008.409,00	3.362.924.691,00	571.835.723,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SUDIANG RAYA							**2.228.294.968,00**	**2.996.678.992,00**	**2.991.153.992,00**	**762.859.024,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.228.294.968,00**	**2.996.678.992,00**	**2.991.153.992,00**	**762.859.024,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.228.294.968,00**	**2.996.678.992,00**	**2.991.153.992,00**	**762.859.024,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.228.294.968,00**	**2.996.678.992,00**	**2.991.153.992,00**	**-2.228.294.968,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.228.294.968,00	2.996.678.992,00	2.991.153.992,00	762.859.024,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.228.294.968,00	2.996.678.992,00	2.991.153.992,00	762.859.024,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TABARINGAN							**1.749.570.600,00**	**1.415.709.868,00**	**1.485.646.611,00**	**-263.923.989,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.749.570.600,00**	**1.415.709.868,00**	**1.485.646.611,00**	**-263.923.989,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.749.570.600,00**	**1.415.709.868,00**	**1.485.646.611,00**	**-263.923.989,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.749.570.600,00**	**1.415.709.868,00**	**1.485.646.611,00**	**-1.749.570.600,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.749.570.600,00	1.415.709.868,00	1.485.646.611,00	-263.923.989,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.749.570.600,00	1.415.709.868,00	1.485.646.611,00	-263.923.989,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TAMALANREA							**2.220.590.000,00**	**2.138.164.671,00**	**2.174.264.671,00**	**-46.325.329,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.220.590.000,00**	**2.138.164.671,00**	**2.174.264.671,00**	**-46.325.329,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.220.590.000,00**	**2.138.164.671,00**	**2.174.264.671,00**	**-46.325.329,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.220.590.000,00**	**2.138.164.671,00**	**2.174.264.671,00**	**-2.220.590.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.220.590.000,00	2.138.164.671,00	2.174.264.671,00	-46.325.329,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.220.590.000,00	2.138.164.671,00	2.174.264.671,00	-46.325.329,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TAMALANREA JAYA							**1.564.674.000,00**	**1.471.320.288,00**	**1.576.527.680,00**	**11.853.680,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.564.674.000,00**	**1.471.320.288,00**	**1.576.527.680,00**	**11.853.680,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.564.674.000,00**	**1.471.320.288,00**	**1.576.527.680,00**	**11.853.680,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.564.674.000,00**	**1.471.320.288,00**	**1.576.527.680,00**	**-1.564.674.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.564.674.000,00	1.471.320.288,00	1.576.527.680,00	11.853.680,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.564.674.000,00	1.471.320.288,00	1.576.527.680,00	11.853.680,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TAMALATE							**2.813.124.968,00**	**3.677.992.000,00**	**3.878.133.041,00**	**1.065.008.073,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.813.124.968,00**	**3.677.992.000,00**	**3.878.133.041,00**	**1.065.008.073,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.813.124.968,00**	**3.677.992.000,00**	**3.878.133.041,00**	**1.065.008.073,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.813.124.968,00**	**3.677.992.000,00**	**3.878.133.041,00**	**-2.813.124.968,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.813.124.968,00	3.677.992.000,00	3.878.133.041,00	1.065.008.073,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.813.124.968,00	3.677.992.000,00	3.878.133.041,00	1.065.008.073,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TAMAMAUNG							**2.712.877.000,00**	**2.834.343.992,00**	**2.954.343.992,00**	**241.466.992,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.712.877.000,00**	**2.834.343.992,00**	**2.954.343.992,00**	**241.466.992,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.712.877.000,00**	**2.834.343.992,00**	**2.954.343.992,00**	**241.466.992,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.712.877.000,00**	**2.834.343.992,00**	**2.954.343.992,00**	**-2.712.877.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.712.877.000,00	2.834.343.992,00	2.954.343.992,00	241.466.992,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.712.877.000,00	2.834.343.992,00	2.954.343.992,00	241.466.992,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TAMANGAPA							**2.401.767.000,00**	**2.141.253.000,00**	**2.150.954.512,00**	**-250.812.488,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.401.767.000,00**	**2.141.253.000,00**	**2.150.954.512,00**	**-250.812.488,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.401.767.000,00**	**2.141.253.000,00**	**2.150.954.512,00**	**-250.812.488,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.401.767.000,00**	**2.141.253.000,00**	**2.150.954.512,00**	**-2.401.767.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.401.767.000,00	2.141.253.000,00	2.150.954.512,00	-250.812.488,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.401.767.000,00	2.141.253.000,00	2.150.954.512,00	-250.812.488,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TARAKAN							**1.996.540.000,00**	**1.397.107.000,00**	**1.396.868.000,00**	**-599.672.000,00**							**1.213.296.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.996.540.000,00**	**1.397.107.000,00**	**1.396.868.000,00**	**-599.672.000,00**							**1.213.296.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.996.540.000,00**	**1.397.107.000,00**	**1.396.868.000,00**	**-599.672.000,00**							**1.213.296.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.996.540.000,00**	**1.397.107.000,00**	**1.396.868.000,00**	**-783.244.000,00**							**1.213.296.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.996.540.000,00	1.397.107.000,00	1.396.868.000,00	-599.672.000,00			-	- -	-		1.213.296.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.996.540.000,00	1.397.107.000,00	1.396.868.000,00	-599.672.000,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			1.213.296.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TODDOPULI							**2.057.523.600,00**	**1.532.687.996,00**	**1.532.637.996,00**	**-524.885.604,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.057.523.600,00**	**1.532.687.996,00**	**1.532.637.996,00**	**-524.885.604,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.057.523.600,00**	**1.532.687.996,00**	**1.532.637.996,00**	**-524.885.604,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.057.523.600,00**	**1.532.687.996,00**	**1.532.637.996,00**	**-2.057.523.600,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.057.523.600,00	1.532.687.996,00	1.532.637.996,00	-524.885.604,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.057.523.600,00	1.532.687.996,00	1.532.637.996,00	-524.885.604,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD DAYA MAKASSAR							**0,00**	**113.592.368.299,00**	**114.136.459.482,00**	**114.136.459.482,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**113.592.368.299,00**	**114.136.459.482,00**	**114.136.459.482,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**113.592.368.299,00**	**114.136.459.482,00**	**114.136.459.482,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**113.592.368.299,00**	**114.136.459.482,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	113.592.368.299,00	114.136.459.482,00	114.136.459.482,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	113.592.368.299,00	114.136.459.482,00	114.136.459.482,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
		PUSKESMAS PERTIWI							**0,00**	**1.612.704.392,00**	**1.612.684.392,00**	**1.612.684.392,00**							**1.887.787.400,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**1.612.704.392,00**	**1.612.684.392,00**	**1.612.684.392,00**							**1.887.787.400,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**1.612.704.392,00**	**1.612.684.392,00**	**1.612.684.392,00**							**1.887.787.400,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.612.704.392,00**	**1.612.684.392,00**	**1.887.787.400,00**							**1.887.787.400,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	1.612.704.392,00	1.612.684.392,00	1.612.684.392,00			-	- -	-		1.887.787.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.612.704.392,00	1.612.684.392,00	1.612.684.392,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			1.887.787.400,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM							**713.888.924.647,00**	**609.018.647.301,00**	**631.962.110.483,00**	**-81.926.814.164,00**							**738.134.218.019,68**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**713.888.924.647,00**	**609.018.647.301,00**	**631.962.110.483,00**	**-81.926.814.164,00**							**738.134.218.019,68**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**713.888.924.647,00**	**609.018.647.301,00**	**631.962.110.483,00**	**-81.926.814.164,00**							**738.134.218.019,68**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**90 100 % %**	**100 100 90 % % %**	**39.319.420.005,20**	**40.031.603.638,00**	**34.742.659.289,00**	**-4.555.808.201,20**							**34.763.611.804,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**39.319.420.005,20**	**40.031.603.638,00**	**34.742.659.289,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**34.763.611.804,00**	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun*				52 Dokumen	100 %	177.888.900,00	206.066.000,00	204.029.000,00	26.140.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		54.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	69.534.900,00	98.905.000,00	97.136.500,00	27.601.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.601.900,00	18.550.000,00	18.550.000,00	-1.051.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.517.000,00	18.157.000,00	18.157.000,00	-1.360.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.188.000,00	17.879.000,00	17.879.000,00	-309.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.671.800,00	17.780.900,00	17.780.900,00	-890.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				52 Laporan	52 Laporan	32.375.300,00	34.794.100,00	34.525.600,00	2.150.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			13.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				42 Dokumen	100 %	29.010.375.961,20	29.883.652.890,00	26.879.658.863,00	-2.130.717.098,20			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		28.285.564.304,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				220 Orang/ bulan	220 Orang/ bulan	26.068.725.361,20	26.998.901.290,00	24.447.785.763,00	-1.620.939.598,20	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			25.340.002.414,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	2.092.299.100,00	2.328.555.000,00	1.876.275.000,00	-216.024.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			2.094.106.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	755.667.600,00	480.998.200,00	480.998.200,00	-274.669.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			756.063.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.902.000,00	26.311.300,00	26.311.300,00	5.409.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			21.867.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	22.986.200,00	16.924.800,00	16.326.300,00	-6.659.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			23.707.640,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	49.795.700,00	31.962.300,00	31.962.300,00	-17.833.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			49.817.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun*				2 Laporan	100 %	15.449.000,00	12.949.000,00	12.949.000,00	-2.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		15.464.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.449.000,00	12.949.000,00	12.949.000,00	-2.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			15.464.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun*				15 Laporan	100 %	768.243.200,00	1.372.743.200,00	1.422.743.200,00	654.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		855.089.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				580 Paket	580 Paket	375.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	135.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			405.304.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	60.341.200,00	60.341.200,00	57.841.200,00	-2.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			117.197.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	100 Orang	262.500.000,00	750.000.000,00	802.500.000,00	540.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			262.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	70.402.000,00	52.402.000,00	52.402.000,00	-18.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			70.088.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun*				17 Laporan	100 %	759.988.000,00	1.223.936.600,00	1.213.946.600,00	453.958.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		743.342.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	66.516.000,00	37.985.000,00	37.985.000,00	-28.531.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			64.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	120.304.000,00	120.304.000,00	120.304.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			119.171.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	127.363.000,00	87.842.600,00	77.852.600,00	-49.510.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			119.171.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	254.805.000,00	254.805.000,00	254.805.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	9.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	182.000.000,00	705.000.000,00	705.000.000,00	523.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			182.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				132 Unit	100 %	670.237.400,00	445.964.400,00	445.964.400,00	-224.273.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		548.469.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				65 Unit	92 Unit	670.237.400,00	445.964.400,00	445.964.400,00	-224.273.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			548.469.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				48 Laporan	100 %	7.564.317.544,00	6.533.371.548,00	4.210.448.226,00	-3.353.869.318,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		3.908.763.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	33.467.300,00	24.889.800,00	24.889.800,00	-8.577.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			24.235.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.865.717.724,00	3.890.555.768,00	1.620.395.446,00	-2.245.322.278,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.249.721.000,00	434.700.000,00	298.057.000,00	-1.951.664.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			2.015.260.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.415.411.520,00	2.183.225.980,00	2.267.105.980,00	851.694.460,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.869.268.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				1198 Unit	100 %	352.920.000,00	352.920.000,00	352.920.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		352.920.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				350 Unit	350 Unit	332.920.000,00	332.920.000,00	332.920.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			332.920.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kota Makassar** **Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kota Makassar**				**54,85** **54,45 %** **%**	**54,85** **55,64 %** **%**	**16.755.034.000,00**	**7.296.190.600,00**	**7.130.950.617,00**	**8.790.577.437,00**							**25.545.611.437,00**	
		[Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Makassar]	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Makassar**	**64.35**	**55.64**	**54.85**	-	-	**16.755.034.000,00**	**7.296.190.600,00**	**7.130.950.617,00**	-	-	-	-	-	-	**54.85**	**25.545.611.437,00**	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai WS dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				39 Unit	100 %	16.755.034.000,00	7.296.190.600,00	7.130.950.617,00	-9.624.083.383,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		25.545.611.437,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				3 Unit	0 Unit	924.340.000,00	0,00	0,00	-924.340.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.064.677.299,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0100	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan				3 Unit	3 Unit	1.131.231.600,00	969.990.600,00	910.401.450,00	-220.830.150,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.029.677.299,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1.06 KM	1.06 KM	2.548.149.000,00	0,00	0,00	-2.548.149.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			11.188.685.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				30 Titik	30 Titik	1.901.498.700,00	783.165.500,00	776.565.500,00	-1.124.933.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			2.042.453.899,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	1.263.240.400,00	0,00	0,00	-1.263.240.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.348.319.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi																		
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	6.428.501.800,00	5.543.034.500,00	5.443.983.667,00	-984.518.133,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			6.598.212.543,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				1 Unit	0 Unit	1.727.243.000,00	0,00	0,00	-1.727.243.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.746.921.199,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	830.829.500,00	0,00	0,00	-830.829.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			526.664.598,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga Yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi** **Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan**				**100 %**	**0,19** **4,12 %** **%**	**29.938.498.440,00**	**19.455.688.188,00**	**18.886.195.938,00**	**-5.713.748.640,00**							**24.224.749.800,00**	
		[Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari]	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari**	**84.76**	**79.84**	**83.88**	-	-	**29.938.498.440,00**	**19.455.688.188,00**	**18.886.195.938,00**	-	-	-	-	-	-	**83.88**	**24.224.749.800,00**	-
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				24 Unit	100 %	29.938.498.440,00	19.455.688.188,00	18.886.195.938,00	-11.052.302.502,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		24.224.749.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.072.024.140,00	808.213.500,00	840.613.500,00	-231.410.640,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.067.715.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				4,8 Liter/Detik	4,8 Liter/Detik	5.277.434.720,00	2.425.030.100,00	2.488.180.100,00	-2.789.254.620,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			5.312.394.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				12 Liter/Detik	12 Liter/Detik	17.438.237.670,00	12.726.492.188,00	12.389.023.238,00	-5.049.214.432,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			13.260.411.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	3 Unit	1.960.685.360,00	796.114.600,00	788.914.600,00	-1.171.770.760,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.466.146.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				200 SR	150 SR	3.983.332.250,00	2.514.126.800,00	2.193.753.500,00	-1.789.578.750,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			2.957.933.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyedlaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				23 Lembaga	23 Lembaga	206.784.300,00	185.711.000,00	185.711.000,00	-21.073.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			160.149.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) akses aman** **Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) akses aman**				**100 %**	**10,28 4,15 %**	**42.752.080.637,80**	**16.441.341.100,00**	**19.470.628.833,00**	**-12.285.958.778,80**							**30.466.121.859,00**	
		[Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik]	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik**	**93.72**	**84.97**	**91.94**	-	-	**42.752.080.637,80**	**16.441.341.100,00**	**19.470.628.833,00**	-	-	-	-	-	-	**91.94**	**30.466.121.859,00**	-
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				1503 Unit	100 %	42.752.080.637,80	16.441.341.100,00	19.470.628.833,00	-23.281.451.804,80			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		30.466.121.859,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	122.417.368,00	77.532.000,00	4.398.528.733,00	4.276.111.365,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			86.410.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				480 M³/Hari	240 M³/Hari	23.457.509.496,00	9.240.028.600,00	8.648.628.600,00	-14.808.880.896,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			20.570.465.859,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	1.150.379.308,00	389.292.200,00	341.837.000,00	-808.542.308,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			22.525.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				1167 Rumah Tangga	350 Rumah Tangga	16.138.238.629,80	5.635.363.900,00	5.580.763.900,00	-10.557.474.729,80	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			9.769.361.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	1.883.535.836,00	1.099.124.400,00	500.870.600,00	-1.382.665.236,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			17.360.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik**				**57,81 %**	**57,81 %**	**80.545.042.788,00**	**50.823.995.030,00**	**57.455.625.700,00**	**-24.070.936.015,00**							**56.474.106.773,00**	
			Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	**67.19**	**74.56**	**57.81**	-	-	**80.545.042.788,00**	**50.823.995.030,00**	**57.455.625.700,00**	-	-	-	-	-	-	**57.81**	**56.474.106.773,00**	-
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				74 Sistem Drainase Perk	100 %	80.545.042.788,00	50.823.995.030,00	57.455.625.700,00	-23.089.417.088,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		56.474.106.773,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				33 Sistem Drainase Perkotaan	21 Sistem Drainase Perkotaan	25.246.799.825,00	9.059.621.870,00	10.053.019.870,00	-15.193.779.955,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			25.260.800.986,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	10.143.013.900,00	9.079.291.430,00	8.828.856.500,00	-1.314.157.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			9.934.434.196,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				20 Sistem Drainase Perkotaan	21 Sistem Drainase Perkotaan	19.044.598.003,00	12.348.324.800,00	12.126.679.400,00	-6.917.918.603,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			19.996.879.591,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	1.350.032.300,00	1.861.770.500,00	4.179.270.500,00	2.829.238.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.281.992.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				40 Sistem Drainase Perkotaan	40 Sistem Drainase Perkotaan	24.760.598.760,00	18.474.986.430,00	22.267.799.430,00	-2.492.799.330,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik**				**49,65 %**	**49,65 %**	**293.222.389.350,00**	**285.089.291.483,00**	**288.931.566.907,00**	**82.470.981.850,00**							**375.693.371.200,00**	
		[Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik]	**Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik**	**60.34**	**65.72**	**49.65**	-	-	**293.222.389.350,00**	**285.089.291.483,00**	**288.931.566.907,00**	-	-	-	-	-	-	**49.65**	**375.693.371.200,00**	-
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Yang Terlaksana*				36 Unit	100 %	293.222.389.350,00	285.089.291.483,00	288.931.566.907,00	-4.290.822.443,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		375.693.371.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.08.2.01.0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara																		
			Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				10 Bangunan Gedung Negara	10 Bangunan Gedung Negara	71.130.100,00	34.211.800,00	34.211.800,00	-36.918.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			72.112.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				16 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	13.708.788.747,00	27.379.798.691,00	33.317.654.431,00	19.608.865.684,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			27.457.530.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				10 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	1.728.828.503,00	3.343.931.975,00	2.462.769.563,00	733.941.060,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.736.413.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	15 Dokumen	277.713.642.000,00	254.331.349.017,00	253.116.931.113,00	-24.596.710.887,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			346.427.316.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan**				**4,06 %**	**4,06 %**	**1.290.769.500,00**	**1.290.769.500,00**	**2.034.819.500,00**	**644.080.280,00**							**1.934.849.780,00**	
		[Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan]	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**5.94**	**0**	**4.06**	-	-	**1.290.769.500,00**	**1.290.769.500,00**	**2.034.819.500,00**	-	-	-	-	-	-	**4.06**	**1.934.849.780,00**	-
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Yang Terselenggara*				1 Kawasan	100 %	1.290.769.500,00	1.290.769.500,00	2.034.819.500,00	744.050.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		1.934.849.780,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	14.957.300,00	14.957.300,00	14.957.300,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.782.425.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				1 Kawasan	1 Kawasan	764.162.200,00	764.162.200,00	2.019.862.200,00	1.255.700.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			52.538.380,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.09.2.01.0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan																		
			Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan				10 Orang	0 Orang	511.650.000,00	511.650.000,00	0,00	-511.650.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			99.886.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan dalam Kondisi Baik**				**88,74 %**	**88,74 %**	**204.380.997.746,00**	**186.601.472.562,00**	**202.094.118.499,00**	**-15.860.866.379,32**							**188.520.131.366,68**	
		[Tingkat Kemantapan Jalan]	**Tingkat Kemantapan Jalan**	**96.06**	**72.01**	**88.74**	-	-	**204.380.997.746,00**	**186.601.472.562,00**	**202.094.118.499,00**	-	-	-	-	-	-	**88.74**	**188.520.131.366,68**	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				575 Ruas	100 %	204.380.997.746,00	186.601.472.562,00	202.094.118.499,00	-2.286.879.247,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		188.520.131.366,68	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				1 Dokumen	0 Dokumen	1.023.551.000,00	0,00	0,00	-1.023.551.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.281.057.280,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				10 Dokumen	0 Dokumen	44.956.000,00	0,00	0,00	-44.956.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			43.735.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				712,45 KM	1858,09 KM	635.476.800,00	467.330.400,00	187.330.400,00	-448.146.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			634.057.280,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				28,75 KM	28,75 KM	29.276.245.760,00	15.590.887.062,00	17.369.049.062,00	-11.907.196.698,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			21.834.131.840,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				517,5 KM	0 KM	422.426.900,00	0,00	0,00	-422.426.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			418.785.477,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				100,43 KM	14,87 KM	85.305.402.730,00	52.387.165.500,00	53.384.271.790,00	-31.921.130.940,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			68.918.815.980,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				100,43 KM	24,37 KM	44.851.204.000,00	78.485.049.200,00	77.339.440.400,00	32.488.236.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			54.159.129.035,73	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian				18 0	0 0	3.881.859.000,00	0,00	0,00	-3.881.859.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			983.985.877,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				38,84 KM	9,15 KM	33.187.774.756,00	34.758.835.800,00	51.325.210.247,00	18.137.435.491,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			37.470.931.916,95	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan																		
			Panjang jembatan yang dibangun				18 Meter	18 Meter	5.752.100.800,00	4.912.204.600,00	2.488.816.600,00	-3.263.284.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			2.775.501.680,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**				**37,44 %**	**37,44 %**	**5.684.692.180,00**	**1.988.295.200,00**	**1.215.545.200,00**	**-5.173.028.180,00**							**511.664.000,00**	
		[Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli]	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli**	**53.44**	**0**	**37.44**	-	-	**5.684.692.180,00**	**1.988.295.200,00**	**1.215.545.200,00**	-	-	-	-	-	-	**37.44**	**511.664.000,00**	-
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Yang Terlaksana*				3 Kegiatan	100 %	4.567.565.700,00	1.375.467.700,00	598.217.700,00	-3.969.348.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		482.310.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				300 Orang	300 Orang	605.582.920,00	314.071.900,00	313.671.900,00	-291.911.020,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			253.871.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				150 Lembaga	150 Lembaga	2.471.401.360,00	813.077.000,00	72.227.000,00	-2.399.174.360,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			75.885.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				150 Orang	150 Orang	1.490.581.420,00	248.318.800,00	212.318.800,00	-1.278.262.620,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			152.554.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				1 sistem	100 %	1.012.370.990,00	558.074.400,00	598.574.400,00	-413.796.590,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		14.975.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	1.012.370.990,00	558.074.400,00	598.574.400,00	-413.796.590,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			14.975.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Yang Terlaksana*				1 dokumen	100 %	104.755.490,00	54.753.100,00	18.753.100,00	-86.002.390,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		14.378.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	104.755.490,00	54.753.100,00	18.753.100,00	-86.002.390,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			14.378.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		UPT PERBENGKELAN DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT							**18.137.832.340,00**	**14.471.805.020,00**	**15.537.093.770,00**	**-2.600.738.570,00**							**10.106.234.772,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.137.832.340,00**	**14.471.805.020,00**	**15.537.093.770,00**	**-2.600.738.570,00**							**10.106.234.772,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**18.137.832.340,00**	**14.471.805.020,00**	**15.537.093.770,00**	**-2.600.738.570,00**							**10.106.234.772,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**90 100 % %**	**100 100 90 % % %**	**18.137.832.340,00**	**14.471.805.020,00**	**15.537.093.770,00**	**-8.031.597.568,00**							**10.106.234.772,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**18.137.832.340,00**	**14.471.805.020,00**	**15.537.093.770,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**10.106.234.772,00**	-
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				1198 Unit	100 %	18.137.832.340,00	14.471.805.020,00	15.537.093.770,00	-2.600.738.570,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		10.106.234.772,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	28.764.250,00	42.750.000,00	42.750.000,00	13.985.750,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			32.112.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				725 Unit	650 Unit	14.998.398.090,00	12.495.344.520,00	13.560.633.270,00	-1.437.764.820,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			7.803.317.772,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				80 Unit	80 Unit	3.088.204.800,00	1.933.710.500,00	1.933.710.500,00	-1.154.494.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			2.248.305.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				10 Unit	0 Unit	22.465.200,00	0,00	0,00	-22.465.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			22.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH							**3.324.341.013,00**	**5.074.093.870,00**	**5.235.880.220,00**	**1.911.539.207,00**							**3.437.224.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.324.341.013,00**	**5.074.093.870,00**	**5.235.880.220,00**	**1.911.539.207,00**							**3.437.224.560,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**3.324.341.013,00**	**5.074.093.870,00**	**5.235.880.220,00**	**1.911.539.207,00**							**3.437.224.560,00**	
1.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) akses aman** **Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) akses aman**				**100 %**	**10,28 4,15 %**	**3.324.341.013,00**	**5.074.093.870,00**	**5.235.880.220,00**	**112.883.547,00**							**3.437.224.560,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				1503 Unit	100 %	3.324.341.013,00	5.074.093.870,00	5.235.880.220,00	1.911.539.207,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		3.437.224.560,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				1 Unit	0 Unit	398.883.833,00	0,00	0,00	-398.883.833,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			413.844.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				10 Unit	10 Unit	41.435.300,00	45.035.300,00	41.069.500,00	-365.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			19.323.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				1500 Rumah Tangga	1500 Rumah Tangga	1.557.277.480,00	2.031.978.700,00	1.939.390.550,00	382.113.070,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.582.737.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				8 Unit	0 Unit	1.144.999.200,00	0,00	0,00	-1.144.999.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.196.953.060,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				210 Orang	210 Orang	89.881.400,00	89.881.400,00	71.292.800,00	-18.588.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			39.152.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0043	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Penyelenggara	100 Penyelenggara	91.863.800,00	2.907.198.470,00	3.184.127.370,00	3.092.263.570,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			185.213.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		DINAS PENATAAN RUANG							**27.009.339.000,00**	**37.905.917.680,00**	**33.466.400.000,00**	**6.457.061.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**27.009.339.000,00**	**37.905.917.680,00**	**33.466.400.000,00**	**6.457.061.000,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**27.009.339.000,00**	**37.905.917.680,00**	**33.466.400.000,00**	**6.457.061.000,00**							**0,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah** **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik**				**100** **90 %** **%**	**100** **90 %** **%**	**20.367.049.700,00**	**20.285.452.480,00**	**18.610.341.795,00**	**-20.367.049.700,00**							**0,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**20.367.049.700,00**	**20.285.452.480,00**	**18.610.341.795,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	53.774.200,00	55.544.600,00	55.244.600,00	1.470.400,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	4.972.100,00	5.772.800,00	5.772.800,00	800.700,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.154.500,00	2.154.500,00	2.154.500,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.591.000,00	4.285.500,00	4.285.500,00	694.500,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.895.200,00	6.170.400,00	5.870.400,00	-24.800,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.288.300,00	2.288.300,00	2.288.300,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.078.500,00	4.078.500,00	4.078.500,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20.367.049.700,00**	**20.285.452.480,00**	**18.610.341.795,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	1.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	30.794.600,00	30.794.600,00	30.794.600,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**20.367.049.700,00**	**20.285.452.480,00**	**18.610.341.795,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	12.549.123.040,00	13.808.104.140,00	12.136.372.515,00	-412.750.525,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	73 Orang/bulan	11.976.156.740,00	13.244.950.840,00	11.578.450.840,00	-397.705.900,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	355.560.000,00	352.800.000,00	342.690.000,00	-12.870.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	192.938.500,00	188.600.500,00	193.478.875,00	540.375,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.386.200,00	8.058.400,00	8.058.400,00	-1.327.800,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.477.700,00	10.706.100,00	10.706.100,00	-771.600,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20.367.049.700,00**	**20.285.452.480,00**	**18.610.341.795,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.603.900,00	2.988.300,00	2.988.300,00	-615.600,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	563.851.200,00	563.851.200,00	537.851.200,00	-26.000.000,00			-	- -	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	227.851.200,00	227.851.200,00	227.851.200,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	336.000.000,00	310.000.000,00	-26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**20.367.049.700,00**	**20.285.452.480,00**	**18.610.341.795,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	204.000.000,00	252.000.000,00	312.000.000,00	108.000.000,00			-	- -	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				176 Paket	176 Paket	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	10 Orang	72.000.000,00	120.000.000,00	180.000.000,00	108.000.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.225.488.700,00	1.307.588.700,00	1.207.822.500,00	-17.666.200,00			-	- -	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan Kapasitas		0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.580.000,00	15.580.000,00	15.537.000,00	-43.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5 Paket	40.997.900,00	40.997.900,00	43.077.900,00	2.080.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	157.248.000,00	157.248.000,00	157.248.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6.108.200,00	6.108.200,00	6.105.000,00	-3.200,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	23.760.000,00	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	61.794.600,00	23.894.600,00	22.094.600,00	-39.700.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	97 Laporan	920.000.000,00	1.040.000.000,00	940.000.000,00	20.000.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20.367.049.700,00**	**20.285.452.480,00**	**18.610.341.795,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.202.882.000,00	1.350.434.400,00	1.350.186.700,00	-852.695.300,00			-	- -	indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian,Perlengkapan dan Keuangan)		0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.300.000.000,00	0,00	0,00	-1.300.000.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**20.367.049.700,00**	**20.285.452.480,00**	**18.610.341.795,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	105 Unit	2.882.000,00	1.350.434.400,00	1.350.186.700,00	1.347.304.700,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.801.980.560,00	1.928.331.440,00	1.988.481.280,00	-813.499.280,00			-	- -	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.235.481.920,00	861.832.800,00	949.553.040,00	-1.285.928.880,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	210.808.800,00	210.808.800,00	211.089.600,00	280.800,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	355.689.840,00	855.689.840,00	827.838.640,00	472.148.800,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	765.950.000,00	1.019.598.000,00	1.022.383.000,00	256.433.000,00			-	- -	Jumlah Saran dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	44.380.000,00	44.380.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	11 Unit	450.970.000,00	450.970.000,00	450.970.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				120 Unit	80 Unit	72.050.000,00	54.800.000,00	86.472.000,00	14.422.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198.550.000,00	469.448.000,00	440.561.000,00	242.011.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
2.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Kepatuhan IMB Kota**				**65 %**	**65 %**	**1.777.287.620,00**	**3.730.935.600,00**	**3.751.935.600,00**	**-1.777.287.620,00**							**0,00**	
		[Persentase Pengendalian Penyelenggaraan Perizinan Bangunan Gedung]	**Persentase Pengendalian Penyelenggaraan Perizinan Bangunan Gedung**	**100**	**0**	**100**	-	-	**1.777.287.620,00**	**3.730.935.600,00**	**3.751.935.600,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*				65 %	65 %	1.777.287.620,00	3.730.935.600,00	3.751.935.600,00	1.974.647.980,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				12 Dokumen	12 Dokumen	1.777.287.620,00	3.730.935.600,00	3.751.935.600,00	1.974.647.980,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -		0,00	DINAS PENATAAN RUANG
3.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Ketaatan Terhadap RTRW**				**80 %**	**80 %**	**4.865.001.680,00**	**13.889.529.600,00**	**11.104.122.605,00**	**-4.865.001.680,00**							**0,00**	
		[Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang]	**Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang**	**100**	**0**	**100**	-	-	**4.865.001.680,00**	**13.889.529.600,00**	**11.104.122.605,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)*				80 %	80 %	1.573.093.300,00	11.346.210.500,00	8.880.278.905,00	7.307.185.605,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	241.050.700,00	9.227.423.100,00	6.227.423.100,00	5.986.372.400,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.185.528.400,00	1.587.319.200,00	2.121.387.605,00	935.859.205,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				6 Laporan	6 Laporan	146.514.200,00	531.468.200,00	531.468.200,00	384.954.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.865.001.680,00**	**13.889.529.600,00**	**11.104.122.605,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah*				80 %	80 %	789.639.040,00	798.738.200,00	793.403.600,00	3.764.560,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				0 Layanan	350 Layanan	565.075.140,00	505.924.700,00	531.922.100,00	-33.153.040,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
		[Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang]	**Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang**	**100**	**0**	**100**	-	-	**4.865.001.680,00**	**13.889.529.600,00**	**11.104.122.605,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				0 Dokumen	1 Dokumen	109.592.200,00	108.894.600,00	106.494.600,00	-3.097.600,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				85 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	114.971.700,00	183.918.900,00	154.986.900,00	40.015.200,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.502.269.340,00	1.744.580.900,00	1.430.440.100,00	-1.071.829.240,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				12 Dokumen	12 Dokumen	116.986.600,00	4.057.000,00	4.057.000,00	-112.929.600,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				12 Laporan	12 Laporan	1.928.037.540,00	1.429.478.900,00	960.725.300,00	-967.312.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				12 Laporan	12 Laporan	254.959.600,00	178.759.600,00	333.372.400,00	78.412.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal																		
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				12 Berita Acara	12 Berita Acara	202.285.600,00	132.285.400,00	132.285.400,00	-70.000.200,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**43.271.138.800,00**	**57.572.606.964,00**	**59.167.448.320,00**	**15.896.309.520,00**							**22.543.504.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**43.271.138.800,00**	**57.572.606.964,00**	**59.167.448.320,00**	**15.896.309.520,00**							**22.543.504.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**43.271.138.800,00**	**57.572.606.964,00**	**59.167.448.320,00**	**15.896.309.520,00**							**22.543.504.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas**				**100%** **90%** **Dokumen**	**100%** **90%** **Dokumen**	**19.790.132.385,00**	**22.905.665.887,00**	**17.196.528.875,70**	**228.467.615,00**							**20.018.600.000,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**19.790.132.385,00**	**22.905.665.887,00**	**17.196.528.875,70**	-	-	-	-	-	-	**100**	**20.018.600.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Cakupan Sasaran Strategis dan ImplePersentase Capaian Cakupan Sasaran Strategis dan Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi mentasi Kebijakan Reformasi Birokrasi*				100 %	100 %	112.055.800,00	118.108.700,00	113.008.700,00	952.900,00			-	- -	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	49.517.700,00	51.560.600,00	51.560.600,00	2.042.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.572.300,00	10.572.300,00	9.072.300,00	-1.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.004.000,00	11.804.000,00	10.304.000,00	300.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.040.200,00	10.040.200,00	8.840.200,00	-1.200.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.086.000,00	11.286.000,00	10.386.000,00	300.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**19.790.132.385,00**	**22.905.665.887,00**	**17.196.528.875,70**	-	-	-	-	-	-	**-**	**20.018.600.000,00**	-
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.786.800,00	9.796.800,00	9.796.800,00	1.010.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**19.790.132.385,00**	**22.905.665.887,00**	**17.196.528.875,70**	-	-	-	-	-	-	**100**	**20.018.600.000,00**	-
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	13.048.800,00	13.048.800,00	13.048.800,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun*				100 %	100 %	16.108.147.565,00	16.208.447.687,00	11.296.447.687,00	-4.811.699.878,00			-	- -	-		18.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				170 Orang/ bulan	170 Orang/ bulan	15.589.620.265,00	15.588.617.187,00	10.676.617.187,00	-4.913.003.078,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	398.400.000,00	462.000.000,00	462.000.000,00	63.600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	89.696.400,00	114.777.900,00	114.777.900,00	25.081.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.975.400,00	16.181.900,00	16.181.900,00	4.206.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.808.900,00	4.710.300,00	4.710.300,00	901.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			18.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	14.646.600,00	22.160.400,00	22.160.400,00	7.513.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**19.790.132.385,00**	**22.905.665.887,00**	**17.196.528.875,70**	-	-	-	-	-	-	**-**	**20.018.600.000,00**	-
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	336.000.000,00	311.122.000,00	180.000.000,00	-156.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	311.122.000,00	180.000.000,00	-156.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur] [Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 90**	**100 90**	**100 90**	-	-	**19.790.132.385,00**	**22.905.665.887,00**	**17.196.528.875,70**	-	-	-	-	-	-	**100 90**	**20.018.600.000,00**	-
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun*				100 %	100 %	745.500.000,00	1.476.000.000,00	1.491.000.000,00	745.500.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	120 Paket	112.500.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-22.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	633.000.000,00	1.386.000.000,00	1.401.000.000,00	768.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang disusun*				100 %	100 %	834.946.700,00	1.363.665.100,00	1.783.672.800,70	948.726.100,70			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	13.122.600,00	16.626.000,00	16.626.000,00	3.503.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	195.649.500,00	538.658.000,00	854.309.800,00	658.660.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.240.200,00	15.070.200,00	17.457.800,00	7.217.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	59.159.000,00	156.620.300,00	126.620.300,00	67.461.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	36.898.600,00	25.300.200,00	25.268.500,70	-11.630.099,30	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	312.060.000,00	212.060.000,00	362.060.000,00	50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	34.286.400,00	39.800.000,00	39.800.000,00	5.513.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	147.000.000,00	333.000.000,00	333.000.000,00	186.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	26.530.400,00	26.530.400,00	8.530.400,00	-18.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang di adakan*				6 Jenis	6 Jenis	38.393.400,00	568.500.400,00	568.500.400,00	530.107.000,00			-	- -	-		20.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	31.400.000,00	421.097.000,00	421.097.000,00	389.697.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	931.100,00	931.100,00	931.100,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.329.600,00	141.739.600,00	141.739.600,00	140.410.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			10.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.732.700,00	4.732.700,00	4.732.700,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang di sediakan*				3 Jenis	3 Jenis	1.110.788.920,00	1.093.402.000,00	1.247.339.288,00	136.550.368,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	411.776.000,00	60.990.800,00	70.103.400,00	-341.672.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	218.760.000,00	218.760.000,00	263.781.888,00	45.021.888,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	480.252.920,00	813.651.200,00	913.454.000,00	433.201.080,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara*				5 Jenis	5 Jenis	504.300.000,00	1.766.420.000,00	516.560.000,00	12.260.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	44.380.000,00	27.040.000,00	-17.340.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	199.850.000,00	308.650.000,00	305.050.000,00	105.200.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	52.570.000,00	52.570.000,00	52.570.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur]	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**	**90**	**90**	**90**	-	-	**19.790.132.385,00**	**22.905.665.887,00**	**17.196.528.875,70**	-	-	-	-	-	-	**90**	**20.018.600.000,00**	-
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.500.000,00	1.352.820.000,00	123.900.000,00	-75.600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni**				**100% Dokumen**	**100% Dokumen**	**1.827.978.900,00**	**5.567.997.300,00**	**5.579.694.100,00**	**-1.303.074.900,00**							**524.904.000,00**	
		[Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni]	**Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**	**100**	**100**	**100**	-	-	**1.827.978.900,00**	**5.567.997.300,00**	**5.579.694.100,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**524.904.000,00**	-
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota Makassar yang didata*				100 Dokumen	100 Dokumen	720.940.700,00	681.142.900,00	615.362.900,00	-105.577.800,00			-	- -	-		214.904.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	114.629.200,00	0,00	0,00	-114.629.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			114.904.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	90.919.200,00	21.340.600,00	21.340.600,00	-69.578.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				3 Dokumen	3 Dokumen	57.212.200,00	431.185.100,00	365.405.100,00	308.192.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	123.292.800,00	114.015.900,00	114.015.900,00	-9.276.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				3 Dokumen	3 Dokumen	123.360.300,00	0,00	0,00	-123.360.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	120.669.600,00	114.601.300,00	114.601.300,00	-6.068.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				3 Dokumen	0 Dokumen	90.857.400,00	0,00	0,00	-90.857.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota Makassar*				110 orang	110 orang	103.761.200,00	82.960.700,00	82.313.500,00	-21.447.700,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				50 Orang	0 Orang	15.447.800,00	0,00	0,00	-15.447.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator																		
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				5 Orang	0 Orang	44.431.000,00	0,00	0,00	-44.431.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				20 Orang	0 Orang	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				50 Orang	50 Orang	17.405.400,00	82.960.700,00	82.313.500,00	64.908.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				40 Orang	40 Orang	13.977.000,00	0,00	0,00	-13.977.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni* *Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota Makassar yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni*				100 Unit Rumah Tangga	100 Unit Rumah Tangga	779.778.500,00	301.147.200,00	301.147.200,00	-478.631.300,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				50 Unit Rumah	50 Unit Rumah	14.114.400,00	301.147.200,00	301.147.200,00	287.032.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				50 Unit Rumah	0 Unit Rumah	21.781.400,00	0,00	0,00	-21.781.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah				50 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	168.177.700,00	0,00	0,00	-168.177.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah				50 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	476.480.000,00	0,00	0,00	-476.480.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				50 Unit Rumah	0 Unit Rumah	99.225.000,00	0,00	0,00	-99.225.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Jumlah Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dibina*				3 Dokumen, 3 Laporan	3 Dokumen, 3 Laporan	149.046.400,00	3.695.815.200,00	3.899.939.200,00	3.750.892.800,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0003	Pembangunan Rumah Khusus																		
			Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	149.046.400,00	3.695.815.200,00	3.899.939.200,00	3.750.892.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan*				100% 10 Dokumen, 1 Lapora	100% 10 Dokumen, 1 Lapora	49.760.300,00	804.012.100,00	678.012.100,00	628.251.800,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				10 Dokumen	10 Dokumen	26.374.000,00	804.012.100,00	678.012.100,00	651.638.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum				1 Laporan	1 Laporan	23.386.300,00	0,00	0,00	-23.386.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	*Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang diterbitkan*				1 Laporan	1 Laporan	24.691.800,00	2.919.200,00	2.919.200,00	-21.772.600,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				1 Laporan	1 Laporan	24.691.800,00	2.919.200,00	2.919.200,00	-21.772.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang di Tangani**				**100% 1 Laporan**	**100% 1 Laporan**	**10.779.803.615,00**	**14.360.302.895,00**	**17.819.256.528,00**	**-10.779.803.615,00**							**0,00**	
		[Persentase Luas Kawasan Kumuh & 10 Ha yang Ditangani]	**Persentase Luas Kawasan Kumuh < 10 Ha yang Ditangani**	**75**	**0**	**15**	-	-	**10.779.803.615,00**	**14.360.302.895,00**	**17.819.256.528,00**	-	-	-	-	-	-	**15**	**0,00**	-
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan*				1 Laporan	1 Laporan	56.061.200,00	0,00	0,00	-56.061.200,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik				3 Dokumen	3 Dokumen	23.758.700,00	0,00	0,00	-23.758.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				3 Laporan	3 Laporan	32.302.500,00	0,00	0,00	-32.302.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*				4 Dokumen, 1 Kel. M	100 %	183.745.300,00	913.123.100,00	236.473.100,00	52.727.800,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	2 Dokumen	115.386.700,00	857.665.500,00	181.015.500,00	65.628.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0010	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Dokumen	1 Dokumen	20.192.100,00	0,00	0,00	-20.192.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	19.224.300,00	0,00	0,00	-19.224.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0013	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	20.238.700,00	55.457.600,00	55.457.600,00	35.218.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				3 Dokumen	3 Dokumen	8.703.500,00	0,00	0,00	-8.703.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*				150 Unit	100 %	10.539.997.115,00	13.447.179.795,00	17.582.783.428,00	7.042.786.313,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				50 Unit Rumah	50 Unit Rumah	1.656.258.500,00	0,00	0,00	-1.656.258.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				3 Dokumen	3 Dokumen	610.238.000,00	0,00	0,00	-610.238.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				3 Dokumen	3 Dokumen	109.860.300,00	272.424.475,00	252.574.108,00	142.713.808,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				20 Ha	20 Ha	3.639.253.715,00	0,00	0,00	-3.639.253.715,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				50 Unit	50 Unit	1.041.906.300,00	0,00	0,00	-1.041.906.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				20 Ha	10 Ha	3.482.480.300,00	13.174.755.320,00	17.330.209.320,00	13.847.729.020,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh**				**100% Unit, Dok,Paket, Org**	**100% Unit, Dok,Paket, Org**	**3.055.410.500,00**	**12.771.678.400,00**	**12.601.891.300,00**	**-2.055.410.500,00**							**1.000.000.000,00**	
		[Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni pada wilayah pencegahan kumuh]	**Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni pada wilayah pencegahan kumuh**	**100**	**50**	**40**	-	-	**3.055.410.500,00**	**12.771.678.400,00**	**12.601.891.300,00**	-	-	-	-	-	-	**40**	**1.000.000.000,00**	-
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*				100 Unit	100 Unit	3.055.410.500,00	12.771.678.400,00	12.601.891.300,00	9.546.480.800,00			-	- -	-		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				150 Unit Rumah	150 Unit Rumah	1.479.480.300,00	6.322.065.600,00	6.499.778.500,00	5.020.298.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				40 Unit	40 Unit	796.123.200,00	5.751.197.900,00	5.654.297.900,00	4.858.174.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				2 Laporan	2 Laporan	665.317.600,00	575.180.000,00	325.180.000,00	-340.137.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				125 Orang	125 Orang	58.145.600,00	61.745.600,00	61.745.600,00	3.600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0009	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				50 Orang	50 Orang	56.343.800,00	61.489.300,00	60.889.300,00	4.545.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**				**100 Dokumen / Laporan**	**46.09 %**	**7.817.813.400,00**	**1.966.962.482,00**	**5.970.077.516,30**	**-6.817.813.400,00**							**1.000.000.000,00**	
		[Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)]	**Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)**	**100**	**20**	**100**	-	-	**7.817.813.400,00**	**1.966.962.482,00**	**5.970.077.516,30**	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.000.000.000,00**	-
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan yang dilaksanakan*				100 Dokumen / Laporan	100 %	7.817.813.400,00	1.966.962.482,00	5.970.077.516,30	-1.847.735.883,70			-	- -	-		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	217.213.000,00	115.316.800,00	115.316.800,00	-101.896.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				95 Laporan	95 Laporan	696.470.900,00	471.669.100,00	331.744.300,00	-364.726.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU																		
			Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU				90 Kelompok	90 Kelompok	102.193.300,00	101.343.300,00	98.943.300,00	-3.250.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																		
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				3 Lokasi	3 Lokasi	647.027.100,00	0,00	0,00	-647.027.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	64.587.100,00	52.875.700,00	52.875.700,00	-11.711.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				20 Laporan	20 Laporan	414.268.900,00	810.692.300,00	858.192.300,00	443.923.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																		
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				11 Lokasi	11 Lokasi	4.856.008.850,00	310.891.900,00	193.891.900,00	-4.662.116.950,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				1 Lokasi	1 Lokasi	820.044.250,00	104.173.382,00	4.319.113.216,30	3.499.068.966,30	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		UPT RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)							**2.077.415.200,00**	**2.077.414.835,00**	**1.990.351.680,00**	**-87.063.520,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.077.415.200,00**	**2.077.414.835,00**	**1.990.351.680,00**	**-87.063.520,00**							**0,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**2.077.415.200,00**	**2.077.414.835,00**	**1.990.351.680,00**	**-87.063.520,00**							**0,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**2.077.415.200,00**	**2.077.414.835,00**	**1.990.351.680,00**	**-2.077.415.200,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.077.415.200,00**	**2.077.414.835,00**	**1.990.351.680,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-				-	-	2.077.415.200,00	2.077.414.835,00	1.990.351.680,00	-87.063.520,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				3 Laporan	3 Laporan	2.040.410.000,00	2.040.409.635,00	1.965.346.480,00	-75.063.520,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3 Dokumen	3 Dokumen	37.005.200,00	37.005.200,00	25.005.200,00	-12.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**41.388.278.000,00**	**42.941.790.730,00**	**43.307.300.000,00**	**1.919.022.000,00**							**44.345.556.640,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**41.388.278.000,00**	**42.941.790.730,00**	**43.307.300.000,00**	**1.919.022.000,00**							**44.345.556.640,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**41.388.278.000,00**	**42.941.790.730,00**	**43.307.300.000,00**	**1.919.022.000,00**							**44.345.556.640,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**100 90 % %**	**100 100 90 % % %**	**16.152.377.800,00**	**30.856.657.030,00**	**31.067.494.900,00**	**2.453.385.160,00**							**18.605.762.960,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**16.152.377.800,00**	**30.856.657.030,00**	**31.067.494.900,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**18.605.762.960,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah*				100 %	100 %	78.321.300,00	86.648.600,00	79.419.600,00	1.098.300,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	ASN SATPOL PP Kota Makassar		54.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	48.145.400,00	55.663.200,00	48.434.200,00	288.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.419.600,00	4.363.200,00	4.363.200,00	-56.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.099.600,00	4.094.700,00	4.094.700,00	-4.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.278.800,00	5.157.400,00	5.157.400,00	878.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.398.800,00	4.169.700,00	4.169.700,00	-229.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	12.979.100,00	13.200.400,00	13.200.400,00	221.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			13.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	13.479.568.000,00	16.462.627.600,00	15.184.819.400,00	1.705.251.400,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	ASN SATPOL PP Kota Makassar		16.475.583.280,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				155 Orang/ bulan	150 Orang/ bulan	12.828.500.800,00	15.828.500.800,00	14.564.300.800,00	1.735.800.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			15.828.500.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	381.059.600,00	374.699.600,00	374.691.400,00	-6.368.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			372.087.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	184.959.000,00	184.959.000,00	184.959.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			184.921.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.734.100,00	16.930.500,00	14.530.500,00	-3.203.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			17.733.880,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	20.155.700,00	12.990.100,00	12.990.100,00	-7.165.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			24.487.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	47.158.800,00	44.547.600,00	33.347.600,00	-13.811.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			47.853.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				90 %	90 %	339.218.000,00	3.697.500,00	45.697.500,00	-293.520.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	ASN SATPOL PP Kota Makassar		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	339.218.000,00	3.697.500,00	45.697.500,00	-293.520.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				90 %	90 %	394.889.400,00	314.864.400,00	493.364.400,00	98.475.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	ASN SATPOL PP Kota Makassar		288.110.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				240 Paket	2 Paket	180.000.000,00	126.675.000,00	126.675.000,00	-53.325.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	22 Orang	165.000.000,00	145.500.000,00	324.000.000,00	159.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	170 Orang	49.889.400,00	42.689.400,00	42.689.400,00	-7.200.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			48.110.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat daerah*				90 %	90 %	594.591.100,00	632.924.440,00	893.457.480,00	298.866.380,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	ASN SATPOL PP KOTA MAKASSAR		621.359.680,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.298.000,00	3.232.000,00	3.327.240,00	29.240,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			3.492.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	373.280.900,00	295.298.300,00	492.439.000,00	119.158.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			352.660.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.123.300,00	15.322.700,00	15.322.700,00	1.199.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			12.322.680,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.026.000,00	15.004.840,00	15.004.840,00	-21.160,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			9.999.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.720.200,00	22.710.000,00	22.710.000,00	-10.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			22.743.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			14.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			18.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	45 Laporan	101.000.000,00	213.860.000,00	306.860.000,00	205.860.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			155.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.742.700,00	38.096.600,00	8.393.700,00	-24.349.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			32.742.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				90 %	90 %	184.460.000,00	12.269.604.490,00	13.269.916.520,00	13.085.456.520,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	ASN SATPOL PP KOTA MAKASSAR		184.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	84.600.000,00	84.600.000,00	77.550.000,00	-7.050.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			84.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	14 Laporan	99.860.000,00	12.185.004.490,00	13.192.366.520,00	13.092.506.520,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				90 %	90 %	1.081.330.000,00	1.086.290.000,00	1.100.820.000,00	19.490.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	ASN SATPOL PP KOTA MAKASSAR		982.110.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.130.000,00	45.130.000,00	45.130.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			41.630.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				63 Unit	58 Unit	1.012.060.000,00	1.017.310.000,00	1.031.840.000,00	19.780.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			916.630.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	24.140.000,00	23.850.000,00	23.850.000,00	-290.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			23.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**25.235.900.200,00**	**12.085.133.700,00**	**12.239.805.100,00**	**503.893.480,00**							**25.739.793.680,00**	
		[Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota]	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota**	**100**	**100**	**100**	-	-	**25.235.900.200,00**	**12.085.133.700,00**	**12.239.805.100,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**25.739.793.680,00**	-
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan*				100 %	100 %	24.250.527.500,00	10.479.525.400,00	11.216.703.700,00	-13.033.823.800,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Masyarakat Kota Makassar dan Pegawai Satpol PP		24.731.180.480,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen	4 Dokumen	313.629.700,00	239.947.000,00	353.186.400,00	39.556.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			427.480.840,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	4.018.846.600,00	4.071.276.200,00	4.052.276.200,00	33.429.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			4.016.081.040,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas																		
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				60 Orang	50 Orang	272.650.000,00	273.000.000,00	213.180.000,00	-59.470.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				4 laporan	4 laporan	9.068.552.140,00	2.116.931.900,00	2.156.289.000,00	-6.912.263.140,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			9.110.710.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				25 Laporan	25 Laporan	9.938.459.360,00	3.184.197.500,00	3.485.697.500,00	-6.452.761.860,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			11.159.763.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	13.674.700,00	13.674.700,00	13.674.700,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			17.145.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				92 Unit	105 Unit	119.889.400,00	45.487.500,00	428.891.800,00	309.002.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				333 Orang	333 Orang	454.825.600,00	485.010.600,00	463.508.100,00	8.682.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada*				100 %	100 %	705.978.200,00	1.430.939.700,00	866.439.200,00	160.461.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Masyarakat Kota Makassar		727.123.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 laporan	12 laporan	32.846.700,00	54.466.100,00	54.466.100,00	21.619.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			33.172.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				7 unit	6 unit	1.254.800,00	763.255.400,00	32.257.600,00	31.002.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			66.881.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6 Laporan	6 Laporan	16.645.000,00	4.595.900,00	4.595.900,00	-12.049.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			16.824.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				15 Laporan	8 Laporan	231.399.900,00	139.969.900,00	139.969.900,00	-91.430.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			233.062.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				4 Laporan	4 Laporan	238.883.100,00	233.074.100,00	233.074.100,00	-5.809.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			240.909.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	4 Laporan	134.948.700,00	185.578.300,00	352.075.600,00	217.126.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			136.274.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Persentase PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya*				100 %	100 %	279.394.500,00	174.668.600,00	156.662.200,00	-122.732.300,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	ASN SATPOL PP KOTA MAKASSAR		281.490.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS																		
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				1 Dokumen	1 Dokumen	27.904.500,00	8.338.600,00	8.332.200,00	-19.572.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah																		
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	125.745.000,00	83.830.000,00	83.830.000,00	-41.915.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			140.745.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				3 Laporan	5 Laporan	125.745.000,00	82.500.000,00	64.500.000,00	-61.245.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			140.745.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN							**51.693.138.000,00**	**53.954.198.300,00**	**53.771.847.246,00**	**2.078.709.246,00**							**61.278.651.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**51.693.138.000,00**	**53.954.198.300,00**	**53.771.847.246,00**	**2.078.709.246,00**							**61.278.651.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**51.693.138.000,00**	**53.954.198.300,00**	**53.771.847.246,00**	**2.078.709.246,00**							**61.278.651.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 90 % %**	**33.017.529.760,00**	**36.214.991.580,00**	**33.733.542.326,00**	**8.355.328.240,00**							**41.372.858.000,00**	
		[Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah] [Persentase ketersediaan sarana danprasarana aparatur] [Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**90**	**90**	**90**	-	-	**33.017.529.760,00**	**36.214.991.580,00**	**33.733.542.326,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**41.372.858.000,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	54.929.400,00	54.929.400,00	54.929.400,00	0,00			-	- -	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		61.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	23.846.100,00	23.846.100,00	23.846.100,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.349.900,00	4.349.900,00	4.349.900,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.111.000,00	5.111.000,00	5.111.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.334.600,00	4.334.600,00	4.334.600,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.885.200,00	3.885.200,00	3.885.200,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	13.402.600,00	13.402.600,00	13.402.600,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	24.703.989.344,00	24.685.594.857,00	21.841.551.403,00	-2.862.437.941,00			-	- -	-		30.662.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				229 Orang/ bulan	229 Orang/ bulan	24.117.669.344,00	24.117.874.857,00	21.276.531.403,00	-2.841.137.941,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	579.360.000,00	560.760.000,00	558.360.000,00	-21.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			650.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.494.300,00	2.494.300,00	2.194.300,00	-300.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.233.800,00	2.233.800,00	2.233.800,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.231.900,00	2.231.900,00	2.231.900,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**33.017.529.760,00**	**36.214.991.580,00**	**33.733.542.326,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**41.372.858.000,00**	-
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	-336.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	-336.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		[Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah] [Persentase ketersediaan sarana danprasarana aparatur] [Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**90**	**90**	**90**	-	-	**33.017.529.760,00**	**36.214.991.580,00**	**33.733.542.326,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**41.372.858.000,00**	-
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	433.106.500,00	531.131.500,00	515.146.800,00	82.040.300,00			-	- -	Kota Makassar		652.113.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	2 Paket	221.128.900,00	169.153.900,00	153.169.200,00	-67.959.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.977.600,00	1.977.600,00	1.977.600,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.113.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	30 Orang	210.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	150.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	1.969.460.600,00	2.079.482.300,00	2.187.465.300,00	218.004.700,00			-	- -	-		2.012.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	20.032.000,00	20.032.000,00	20.032.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	11 Paket	937.220.700,00	1.070.698.200,00	1.091.986.200,00	154.765.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	36.106.200,00	13.643.000,00	1.338.000,00	-34.768.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			42.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	679.957.200,00	678.964.600,00	676.964.600,00	-2.992.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36.944.500,00	36.944.500,00	36.944.500,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			46.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			14.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	231.000.000,00	231.000.000,00	332.000.000,00	101.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				-	100 %	110.392.600,00	141.555.800,00	216.665.800,00	106.273.200,00			-	- -	-		123.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	24 Unit	29.845.600,00	28.900.800,00	19.840.800,00	-10.004.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			32.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	41.922.000,00	41.430.000,00	41.430.000,00	-492.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			49.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	13 Unit	38.625.000,00	71.225.000,00	155.395.000,00	116.770.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			42.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				-	100 %	1.163.412.116,00	1.675.081.856,00	1.714.989.056,00	551.576.940,00			-	- -	-		1.258.745.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	766.943.536,00	788.538.536,00	788.538.536,00	21.595.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			838.745.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	396.468.580,00	886.543.320,00	926.450.520,00	529.981.940,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			420.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				-	100 %	4.246.239.200,00	6.711.215.867,00	7.202.794.567,00	2.956.555.367,00			-	- -	-		6.604.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				97 Unit	1 Unit	44.630.000,00	44.630.000,00	44.630.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			53.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				96 Unit	67 Unit	3.812.414.500,00	2.926.475.900,00	3.145.649.900,00	-666.764.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			6.500.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	52 Unit	36.800.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	4 Unit	200.222.000,00	3.618.954.667,00	3.963.514.667,00	3.763.292.667,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	139.972.700,00	72.155.300,00	0,00	-139.972.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			16.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran**				**100 15 % menit**	**100 15 % menit**	**18.675.608.240,00**	**17.739.206.720,00**	**20.038.304.920,00**	**1.230.184.760,00**							**19.905.793.000,00**	
		[Jumlah Warga Negara yang memperolehlayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran] [Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran]	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Waktu Tanggap (response time) penanganan Kebakaran**	**100**	**100**	**100**	-	-	**18.675.608.240,00**	**17.739.206.720,00**	**20.038.304.920,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**19.905.793.000,00**	-
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				1 Dokumen	100 %	17.933.371.860,00	16.927.643.620,00	18.243.862.120,00	310.490.260,00			-	- -	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		18.706.849.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	5.003.700,00	5.003.700,00	5.003.700,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	14.737.576.340,00	12.331.228.220,00	12.668.528.720,00	-2.069.047.620,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	776.704.920,00	2.260.283.800,00	2.424.821.800,00	1.648.116.880,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			800.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	12.142.000,00	12.142.000,00	43.542.000,00	31.400.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	1 Dokumen	12.442.800,00	12.442.800,00	12.442.800,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.849.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				459 Orang	459 Orang	702.779.800,00	732.997.800,00	1.515.997.800,00	813.218.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			800.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.158.900,00	54.088.900,00	54.088.900,00	11.930.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				98 Unit	132 Unit	1.625.818.600,00	1.500.711.600,00	1.500.711.600,00	-125.107.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -				2.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	10.797.900,00	10.797.900,00	10.777.900,00	-20.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -				15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				22 Keluarga	22 Keluarga	7.946.900,00	7.946.900,00	7.946.900,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Yang Terlaksana*				-	100 %	9.512.500,00	9.512.500,00	9.512.500,00	0,00			-	- -	Kota Makassar			8.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4.661.000,00	4.661.000,00	4.661.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				8.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4.851.500,00	4.851.500,00	4.851.500,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Yang Terlaksana*				-	100 %	187.699.080,00	499.108.800,00	430.245.700,00	242.546.620,00			-	- -	Kota Makassar			12.944.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				90 Orang	900 Orang	176.828.180,00	399.737.900,00	418.202.300,00	241.374.120,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				53 Desa/Kelurahan	53 Desa/Kelurahan	3.343.400,00	91.843.400,00	12.043.400,00	8.700.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				4.944.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	0 Dokumen	7.527.500,00	7.527.500,00	0,00	-7.527.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				8.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Yang Terselenggara*				-	100 %	545.024.800,00	302.941.800,00	1.354.684.600,00	809.659.800,00			-	- -	Kota Makassar			1.178.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	22.638.000,00	22.638.000,00	22.638.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar				1 Dokumen	0 Dokumen	23.081.800,00	23.081.800,00	0,00	-23.081.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				28.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	1 Laporan	98.770.000,00	98.770.000,00	98.770.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				46 Unit	19 Unit	400.535.000,00	158.452.000,00	1.233.276.600,00	832.741.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -				1.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**23.057.875.000,00**	**38.127.619.855,00**	**39.205.500.000,00**	**16.147.625.000,00**							**13.017.376.657,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23.057.875.000,00**	**38.127.619.855,00**	**39.205.500.000,00**	**16.147.625.000,00**							**13.017.376.657,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**23.057.875.000,00**	**38.127.619.855,00**	**39.205.500.000,00**	**16.147.625.000,00**							**13.017.376.657,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**15.242.703.040,00**	**19.199.080.445,00**	**15.187.923.690,00**	**-2.225.326.383,00**							**13.017.376.657,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**15.242.703.040,00**	**19.199.080.445,00**	**15.187.923.690,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**13.017.376.657,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah uang disusun*				-	10 Dokumen	167.176.500,00	167.176.500,00	167.176.500,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	ASN, Non ASN, Masyarakat dan Relawan		451.416.657,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	32.635.000,00	32.635.000,00	32.635.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.832.200,00	4.832.200,00	4.832.200,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			16.651.657,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.951.300,00	4.951.300,00	4.951.300,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			16.912.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.803.700,00	4.803.700,00	4.803.700,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			16.495.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.746.400,00	4.746.400,00	4.746.400,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			16.358.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.475.800,00	3.475.800,00	3.475.800,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	111.732.100,00	111.732.100,00	111.732.100,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			358.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Tersusun*				-	5 Dokumen	9.465.740.760,00	10.471.649.865,00	10.095.313.610,00	629.572.850,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	ASN, Non ASN, Masyarakat dan Relawan		12.252.460.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				91 Orang/bulan	96 Orang/bulan	8.979.500.760,00	9.979.733.965,00	9.579.517.710,00	600.016.950,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			11.495.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	396.240.000,00	396.240.000,00	420.120.000,00	23.880.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			430.760.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	90.000.000,00	95.675.900,00	95.675.900,00	5.675.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			326.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**15.242.703.040,00**	**19.199.080.445,00**	**15.187.923.690,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**13.017.376.657,00**	-
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	336.000.000,00	336.000.000,00	310.000.000,00	-26.000.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	336.000.000,00	310.000.000,00	-26.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**15.242.703.040,00**	**19.199.080.445,00**	**15.187.923.690,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**13.017.376.657,00**	-
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Jasa Administrasi Kepegawaian yang Tersedia*				-	7 Jenis	465.000.000,00	664.682.820,00	634.682.820,00	169.682.820,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	ASN, Non ASN, Masyarakat dan Relawan		313.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				190 Paket	190 Paket	225.000.000,00	424.682.820,00	424.682.820,00	199.682.820,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			313.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	240.000.000,00	240.000.000,00	210.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia*				-	4 Jenis	459.074.600,00	4.830.329.020,00	1.080.862.100,00	621.787.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	ASN, Non ASN, Masyarakat dan Relawan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.974.000,00	19.452.000,00	19.452.000,00	10.478.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.423.400,00	58.423.400,00	147.357.400,00	88.934.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.305.200,00	4.164.307.620,00	6.070.700,00	-8.234.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.190.000,00	62.605.000,00	62.605.000,00	58.415.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10.000.000,00	14.359.000,00	14.359.000,00	4.359.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	43.880.000,00	35.880.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	203.182.000,00	203.182.000,00	487.138.000,00	283.956.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	152.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	148.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan*				-	4 Jenis	2.847.755.180,00	1.184.326.240,00	880.396.490,00	-1.967.358.690,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	ASN, Non ASN, Masyarakat dan Relawan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.982.311.180,00	328.602.240,00	72.392.490,00	-1.909.918.690,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	499.380.000,00	507.660.000,00	507.660.000,00	8.280.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	366.064.000,00	348.064.000,00	300.344.000,00	-65.720.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan*				-	4 Jenis	1.501.956.000,00	1.544.916.000,00	2.019.492.170,00	517.536.170,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	ASN, Non ASN, Masyarakat dan Relawan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.880.000,00	42.880.000,00	46.380.000,00	3.500.000,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	1.153.540.000,00	1.196.500.000,00	1.366.826.170,00	213.286.170,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	43.450.000,00	43.450.000,00	43.450.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	65 Unit	262.086.000,00	262.086.000,00	562.836.000,00	300.750.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat**				**-**	**100 %**	**7.815.171.960,00**	**18.928.539.410,00**	**24.017.576.310,00**	**-7.815.171.960,00**							**0,00**	
		[Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana]	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**100**	**100**	**100**	-	-	**7.815.171.960,00**	**18.928.539.410,00**	**24.017.576.310,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana*				100 %	100 %	82.563.000,00	330.563.000,00	621.769.000,00	539.206.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	ASN, Non ASN, Masyarakat dan Relawan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				200 Orang	200 Orang	32.563.000,00	80.563.000,00	380.463.000,00	347.900.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	250.000.000,00	241.306.000,00	191.306.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Warga Negara uang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana*				100 %	100 %	3.241.237.280,00	3.777.464.110,00	3.982.985.710,00	741.748.430,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	ASN, Non ASN, Masyarakat dan Relawan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	31.823.600,00	31.823.600,00	231.823.600,00	200.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	34.248.800,00	206.113.850,00	206.113.850,00	171.865.050,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				4 Kawasan	4 Kawasan	137.222.800,00	137.222.800,00	114.750.800,00	-22.472.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				175 Orang	175 Orang	60.963.500,00	287.463.500,00	287.463.500,00	226.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	2.944.496.180,00	2.963.357.960,00	2.991.351.560,00	46.855.380,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				2 Kawasan	2 Kawasan	32.482.400,00	151.482.400,00	151.482.400,00	119.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				100 %	100 %	1.713.034.140,00	8.465.427.780,00	7.909.274.180,00	6.196.240.040,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	ASN, Non ASN, Masyarakat dan Relawan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	1 Laporan	13.613.600,00	13.613.600,00	13.613.600,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	561.937.540,00	740.560.000,00	808.771.600,00	246.834.060,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				20 Orang	20 Orang	35.163.600,00	6.248.934.780,00	4.096.550.780,00	4.061.387.180,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				30 Orang	30 Orang	41.400.000,00	41.400.000,00	106.346.400,00	64.946.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1000 Orang	1000 Orang	994.567.800,00	1.354.567.800,00	2.817.640.200,00	1.823.072.400,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	66.351.600,00	66.351.600,00	66.351.600,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*JUmlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang ditata*				-	100 %	2.778.337.540,00	6.355.084.520,00	11.503.547.420,00	8.725.209.880,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	ASN, Non ASN, Masyarakat dan Relawan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	36.019.400,00	36.019.400,00	36.019.400,00	0,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				55 Orang	55 Orang	22.455.200,00	22.455.200,00	286.749.200,00	264.294.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				55 Orang	55 Orang	20.884.000,00	33.634.000,00	33.634.000,00	12.750.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				7 Kegiatan	7 Kegiatan	2.261.919.340,00	5.766.416.320,00	10.650.585.220,00	8.388.665.880,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				0 Lembaga	0 Lembaga	41.848.800,00	101.348.800,00	101.348.800,00	59.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota																		
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				1 Laporan	1 Laporan	45.210.800,00	45.210.800,00	45.210.800,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**24.650.980.000,00**	**25.074.008.600,00**	**26.550.800.000,00**	**1.899.820.000,00**							**25.372.910.164,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**24.650.980.000,00**	**25.074.008.600,00**	**26.550.800.000,00**	**1.899.820.000,00**							**25.372.910.164,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**24.650.980.000,00**	**25.074.008.600,00**	**26.550.800.000,00**	**1.899.820.000,00**							**25.372.910.164,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**14.027.739.714,00**	**16.144.523.394,00**	**16.285.811.994,00**	**1.057.142.346,00**							**15.084.882.060,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**14.027.739.714,00**	**16.144.523.394,00**	**16.285.811.994,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**15.084.882.060,00**	-
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	54.262.500,00	78.318.100,00	75.818.100,00	21.555.600,00			-	- -	-		54.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	24.988.000,00	43.531.600,00	41.031.600,00	16.043.600,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.997.500,00	4.629.500,00	4.629.500,00	632.000,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.124.700,00	5.324.700,00	5.324.700,00	1.200.000,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.109.200,00	5.309.200,00	5.309.200,00	1.200.000,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.105.600,00	4.585.600,00	4.585.600,00	480.000,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	4 Laporan	12.937.500,00	14.937.500,00	14.937.500,00	2.000.000,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			13.000.000,00	DINAS SOSIAL
		[Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah]	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**14.027.739.714,00**	**16.144.523.394,00**	**16.285.811.994,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**15.084.882.060,00**	-
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Penyelanggaraan Administrasi Keuangan*				-	100 %	11.542.626.936,00	11.542.736.536,00	10.837.774.056,00	-704.852.880,00			-	- -	-		11.542.627.876,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	11.068.386.936,00	11.068.496.536,00	10.128.596.536,00	-939.790.400,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.068.387.876,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	294.240.000,00	294.240.000,00	311.640.000,00	17.400.000,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			294.240.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	180.000.000,00	180.000.000,00	397.537.520,00	217.537.520,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			180.000.000,00	DINAS SOSIAL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**14.027.739.714,00**	**16.144.523.394,00**	**16.285.811.994,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**15.084.882.060,00**	-
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				-	100 %	336.000.000,00	336.000.000,00	310.000.000,00	-26.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	336.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1	**NON URUSAN**							**24.650.980.000,00**	**25.074.008.600,00**	**26.550.800.000,00**	**1.899.820.000,00**							**25.372.910.164,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**24.650.980.000,00**	**25.074.008.600,00**	**26.550.800.000,00**	**1.899.820.000,00**							**25.372.910.164,00**	
	1.06.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**24.650.980.000,00**	**25.074.008.600,00**	**26.550.800.000,00**	**1.899.820.000,00**							**25.372.910.164,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**24.650.980.000,00**	**25.074.008.600,00**	**26.550.800.000,00**	**1.899.820.000,00**							**25.372.910.164,00**	
		[Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur]	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**	**90**	**90**	**90**	-	-	**14.027.739.714,00**	**16.144.523.394,00**	**16.285.811.994,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**15.084.882.060,00**	-
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	157.882.200,00	1.016.250.000,00	1.016.250.000,00	858.367.800,00			-	- -	-		217.882.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				146 Paket	146 Paket	97.882.200,00	101.250.000,00	101.250.000,00	3.367.800,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			97.882.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	134 Orang	60.000.000,00	915.000.000,00	915.000.000,00	855.000.000,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	234.240.500,00	830.168.122,00	936.867.922,00	702.627.422,00			-	- -	-		457.555.040,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.235.000,00	10.235.000,00	235.000,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	98.944.600,00	219.931.700,00	163.007.500,00	64.062.900,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			95.449.240,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.489.800,00	96.783.000,00	121.407.000,00	108.917.200,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			146.638.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.933.500,00	54.326.600,00	54.326.600,00	44.393.100,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.012.200,00	35.736.022,00	35.736.022,00	25.723.822,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			14.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	16.460.400,00	26.755.800,00	22.755.800,00	6.295.400,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			16.467.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	62.000.000,00	372.000.000,00	515.000.000,00	453.000.000,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			155.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	228.274.600,00	365.945.600,00	819.093.500,00	590.818.900,00			-	- -	-		664.886.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	60.400.000,00	95.318.000,00	175.613.000,00	115.213.000,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	167.874.600,00	270.627.600,00	643.480.500,00	475.605.900,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			614.886.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	616.002.978,00	1.287.315.036,00	1.554.508.416,00	938.505.438,00			-	- -	-		1.189.510.944,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	183.482.198,00	205.833.396,00	205.833.396,00	22.351.198,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			231.168.144,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	432.520.780,00	1.081.481.640,00	1.348.675.020,00	916.154.240,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			958.342.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	858.450.000,00	687.790.000,00	735.500.000,00	-122.950.000,00			-	- -	-		958.420.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.130.000,00	42.130.000,00	27.040.000,00	-15.090.000,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			42.130.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	38 Unit	556.380.000,00	599.220.000,00	599.220.000,00	42.840.000,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			556.450.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				69 Unit	69 Unit	44.100.000,00	46.440.000,00	46.440.000,00	2.340.000,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			44.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	215.840.000,00	0,00	62.800.000,00	-153.040.000,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			315.840.000,00	DINAS SOSIAL
1.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial**				**-**	**50 %**	**1.281.764.400,00**	**1.071.206.300,00**	**1.213.806.300,00**	**154.299.500,00**							**1.436.063.900,00**	
		[Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial]	**Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial**	**70**	**0**	**50**	-	-	**1.281.764.400,00**	**1.071.206.300,00**	**1.213.806.300,00**	-	-	-	-	-	-	**50**	**1.436.063.900,00**	-
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan pengawasan Pengumpulan Sumbangan di Kota Makassar*				30 Kegiatan	36 Kegiatan	51.602.400,00	19.800.000,00	9.000.000,00	-42.602.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pelaksana Pengumpulan Sumbangan		51.598.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				30 Dokumen	30 Dokumen	51.602.400,00	19.800.000,00	9.000.000,00	-42.602.400,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				51.598.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Potensi Sumber Kesejateraan Sosial yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi*				-	300 Orang	1.230.162.000,00	1.051.406.300,00	1.204.806.300,00	-25.355.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		1.384.465.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Lembaga	200 Lembaga	352.668.200,00	299.364.000,00	346.704.000,00	-5.964.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				506.976.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				231 Orang	231 Orang	478.808.200,00	490.167.300,00	587.227.300,00	108.419.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				478.803.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				300 Orang	300 Orang	398.685.600,00	261.875.000,00	270.875.000,00	-127.810.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			398.686.400,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitas Sosial Diluar Panti**				**-**	**100 %**	**4.474.269.706,00**	**3.346.606.706,00**	**3.921.776.306,00**	**-982.699.402,00**							**3.491.570.304,00**	
		[Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti]	**Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti**	**100**	**100**	**100**	-	-	**4.474.269.706,00**	**3.346.606.706,00**	**3.921.776.306,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**3.491.570.304,00**	-
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti* *Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti* *Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti* *Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti*				-	170 orang 170 orang 85 orang	3.092.531.516,00	2.747.530.266,00	3.174.196.666,00	81.665.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis		2.599.107.304,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	240.513.000,00	35.690.000,00	52.292.000,00	-188.221.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			260.520.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	91.997.100,00	79.826.000,00	101.783.800,00	9.786.700,00	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			117.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	92.329.000,00	69.512.300,00	415.525.000,00	323.196.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			137.878.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	57.592.000,00	31.427.900,00	83.944.000,00	26.352.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			38.968.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	1.062.956.416,00	982.944.866,00	1.171.344.866,00	108.388.450,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			883.208.304,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				260 Orang	260 Orang	201.278.300,00	102.080.000,00	314.080.000,00	112.801.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			134.247.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	4.174.000,00	3.400.000,00	1.700.000,00	-2.474.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.270.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	112.666.500,00	119.095.200,00	40.663.000,00	-72.003.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			105.023.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	1.189.500.000,00	1.285.740.000,00	959.300.000,00	-230.200.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			845.486.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	17.268.000,00	16.444.000,00	14.694.000,00	-2.574.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			26.658.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	19.570.000,00	19.570.000,00	18.170.000,00	-1.400.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			42.830.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	2.687.200,00	1.800.000,00	700.000,00	-1.987.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.718.000,00	DINAS SOSIAL
		[Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti]	**Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti**	**100**	**100**	**100**	-	-	**4.474.269.706,00**	**3.346.606.706,00**	**3.921.776.306,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**3.491.570.304,00**	-
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*				-	100 Orang	1.381.738.190,00	599.076.440,00	747.579.640,00	-634.158.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis		892.463.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	100.798.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-99.798.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	106.766.250,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-74.766.250,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			197.808.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				600 Orang	600 Orang	405.854.600,00	20.280.000,00	189.290.000,00	-216.564.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			462.120.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				160 Orang	160 Orang	11.439.600,00	9.487.000,00	9.487.000,00	-1.952.600,00	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			11.519.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	671.579.040,00	469.615.440,00	441.238.640,00	-230.340.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			99.946.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	2.106.000,00	2.000.000,00	500.000,00	-1.606.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.270.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	18.718.400,00	2.324.000,00	13.944.000,00	-4.774.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			15.670.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	64.476.000,00	62.370.000,00	60.120.000,00	-4.356.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			103.130.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi**				**-**	**100 80 % N/A**	**2.382.505.700,00**	**2.118.744.600,00**	**2.932.855.200,00**	**182.822.400,00**							**2.565.328.100,00**	
		[Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar]	**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	**100**	**100**	**100**	-	-	**2.382.505.700,00**	**2.118.744.600,00**	**2.932.855.200,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**2.565.328.100,00**	-
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Anak Terlantar Yang Keluar dari Keterlantaran*				-	10 Orang	77.049.900,00	36.329.600,00	36.329.600,00	-40.720.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Anak-Anak Terlantar		84.216.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	60.750.000,00	20.750.000,00	20.750.000,00	-40.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			60.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	3.018.900,00	2.979.600,00	2.979.600,00	-39.300,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.027.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0004	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi																		
			Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi				3 Orang	3 Orang	10.581.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	-681.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			17.738.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fakir Miskin Penerima Bantuan Sosial*				-	50 %	2.305.455.800,00	2.082.415.000,00	2.896.525.600,00	591.069.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		2.481.111.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				5000 Orang	5000 Orang	706.194.900,00	397.800.000,00	397.800.000,00	-308.394.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			709.593.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	361.500.000,00	286.500.000,00	286.500.000,00	-75.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			333.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1100 Orang	1200 Orang	1.123.710.000,00	1.359.115.000,00	1.959.115.000,00	835.405.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.322.560.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				5000 Usulan	5000 Usulan	114.050.900,00	39.000.000,00	253.110.600,00	139.059.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			115.358.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana**				**-**	**100 %**	**2.353.160.480,00**	**2.392.927.600,00**	**2.196.550.200,00**	**417.905.320,00**							**2.771.065.800,00**	
		[Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana]	**Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**	**100**	**100**	**100**	-	-	**2.353.160.480,00**	**2.392.927.600,00**	**2.196.550.200,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**2.771.065.800,00**	-
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya*				-	5000 Orang	2.049.780.480,00	1.528.025.200,00	1.280.162.600,00	-769.617.880,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat yang terdampak Bencana alam dan sosial		2.128.465.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				5000 Orang	5000 Orang	1.192.870.200,00	835.274.200,00	605.783.600,00	-587.086.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			1.254.099.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				5000 Orang	5000 Orang	319.500.000,00	270.560.400,00	271.688.400,00	-47.811.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			319.763.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				1500 Orang	1500 Orang	258.000.000,00	220.992.600,00	220.992.600,00	-37.007.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			276.698.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	65.150.200,00	46.998.000,00	27.498.000,00	-37.652.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			63.641.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	214.260.080,00	154.200.000,00	154.200.000,00	-60.060.080,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			214.263.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Taruna Siaga Bencana yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana*				-	60 Orang	303.380.000,00	864.902.400,00	916.387.600,00	613.007.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Taruna Siaga Bencana Kota Makassar		642.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	303.380.000,00	864.902.400,00	916.387.600,00	613.007.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			642.600.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Cakupan layanan Taman Makam Pahlawan**				**-**	**100 %**	**131.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-107.540.000,00**							**24.000.000,00**	
		[Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan]	**Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**131.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**24.000.000,00**	-
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang Mendapat Pemeliharaan di Kota Makassar*				-	1 Makam	131.540.000,00	0,00	0,00	-131.540.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Taman Makam Pahlawan		24.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	107.540.000,00	0,00	0,00	-107.540.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			24.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS KETENAGAKERJAAN							**45.300.538.000,00**	**45.175.774.040,00**	**46.779.000.000,00**	**1.478.462.000,00**							**45.138.089.732,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**45.300.538.000,00**	**45.175.774.040,00**	**46.779.000.000,00**	**1.478.462.000,00**							**45.138.089.732,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**45.300.538.000,00**	**45.175.774.040,00**	**46.779.000.000,00**	**1.478.462.000,00**							**45.138.089.732,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**100 90 Persen Persen**	**100 90 Persen Persen**	**13.447.520.520,00**	**13.067.844.440,00**	**13.442.443.000,00**	**-120.162.048,00**							**13.327.358.472,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**13.447.520.520,00**	**13.067.844.440,00**	**13.442.443.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**13.327.358.472,00**	-
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun*				100 Persen	100 Persen	57.213.200,00	52.178.300,00	52.178.000,00	-5.035.200,00			-	- -	Perangkat Daerah		57.213.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	38.972.000,00	37.762.500,00	37.762.500,00	-1.209.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			38.972.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.528.300,00	2.985.400,00	2.985.400,00	457.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.528.300,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.528.300,00	2.882.800,00	2.882.800,00	354.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.528.300,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.528.300,00	1.963.500,00	1.963.500,00	-564.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.528.300,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.528.300,00	1.902.000,00	1.902.000,00	-626.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.528.300,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	8.128.000,00	4.682.100,00	4.681.800,00	-3.446.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.128.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				100 Persen	100 Persen	10.994.885.972,00	10.973.119.092,00	10.598.719.092,00	-396.166.880,00			-	- -	Perangkat Daerah		10.994.885.972,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	77 Orang/bulan	10.553.957.972,00	10.553.958.092,00	10.178.358.092,00	-375.599.880,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.553.957.972,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	275.904.000,00	274.084.800,00	275.284.800,00	-619.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			275.904.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	165.024.000,00	145.076.200,00	145.076.200,00	-19.947.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			165.024.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun*				undefined undefined	100 Persen	336.000.000,00	330.700.000,00	310.000.000,00	-26.000.000,00			-	- -	Perangkat Daerah		336.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Tahun Laporan	12 Laporan	336.000.000,00	330.700.000,00	310.000.000,00	-26.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			336.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun*				100 Persen	100 Persen	154.991.040,00	83.136.200,00	578.560.000,00	423.568.960,00			-	- -	Perangkat Daerah		207.491.040,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	10 Paket	10.000.000,00	8.560.000,00	8.560.000,00	-1.440.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	81.991.040,00	1.076.200,00	0,00	-81.991.040,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			81.991.040,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	50 Orang	63.000.000,00	73.500.000,00	570.000.000,00	507.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			115.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun*				7 Jenis	100 Persen	561.880.300,00	474.793.960,00	472.438.160,00	-89.442.140,00			-	- -	Perangkat Daerah		541.880.300,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.434.800,00	4.860.000,00	4.860.000,00	-6.574.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.434.800,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	53.867.200,00	46.073.100,00	46.073.100,00	-7.794.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			53.867.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36.431.500,00	30.532.260,00	30.532.260,00	-5.899.240,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			36.431.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.030.000,00	12.991.800,00	12.991.800,00	-2.038.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.030.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	26.100.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			26.100.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	31 Laporan	350.300.000,00	285.520.000,00	285.520.000,00	-64.780.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			350.300.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	68.716.800,00	68.716.800,00	66.361.000,00	-2.355.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			48.716.800,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				21 Unit	100 Persen	269.331.300,00	118.914.700,00	341.378.400,00	72.047.100,00			-	- -	Perangkat Daerah		150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	2 Unit	69.096.500,00	26.066.000,00	48.874.000,00	-20.222.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			30.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	29 Unit	200.234.800,00	92.848.700,00	292.504.400,00	92.269.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			120.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				100 Persen	100 Persen	605.818.708,00	653.902.188,00	647.331.348,00	41.512.640,00			-	- -	Perangkat Daerah		605.818.728,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	161.306.480,00	142.581.200,00	153.022.200,00	-8.284.280,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			161.306.480,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	346.701.648,00	291.728.008,00	296.973.693,00	-49.727.955,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			346.701.648,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	97.810.580,00	219.592.980,00	197.335.455,00	99.524.875,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			97.810.600,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				75 Unit	100 Persen	467.400.000,00	381.100.000,00	441.838.000,00	-25.562.000,00			-	- -	Perangkat Daerah		434.069.232,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	44.380.000,00	29.290.000,00	-15.090.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			44.380.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	279.760.000,00	242.990.000,00	266.568.000,00	-13.192.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			279.760.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	53 Unit	42.940.000,00	41.480.000,00	41.480.000,00	-1.460.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			42.940.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.320.000,00	52.250.000,00	104.500.000,00	4.180.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			66.989.232,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**				**97,50 Persen**	**97,50 Persen**	**121.615.100,00**	**122.886.000,00**	**122.886.000,00**	**0,00**							**121.615.100,00**	
		[Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja]	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**	**100**	**96.67**	**97.50**	-	-	**121.615.100,00**	**122.886.000,00**	**122.886.000,00**	-	-	-	-	-	-	**97.50**	**121.615.100,00**	-
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun*				100 Persen	1 Dokumen	121.615.100,00	122.886.000,00	122.886.000,00	1.270.900,00			-	- -	Perusahaan dan Tenaga Kerja		121.615.100,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	30.913.000,00	56.067.500,00	56.067.500,00	25.154.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.913.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				50 Orang	50 Orang	90.702.100,00	66.818.500,00	66.818.500,00	-23.883.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			90.702.100,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya**				**21,21 Persen**	**21,21 Persen**	**1.725.506.000,00**	**1.972.401.100,00**	**1.899.136.600,00**	**0,00**							**1.725.506.000,00**	
		[Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya]	**Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya**	**25.40**	**20.49**	**20.86**	-	-	**1.725.506.000,00**	**1.972.401.100,00**	**1.899.136.600,00**	-	-	-	-	-	-	**21.21**	**1.725.506.000,00**	-
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*				100 Persen	100 Persen	854.535.800,00	1.251.364.200,00	1.091.275.300,00	236.739.500,00			-	- -	Perusahaan dan Tenaga Kerja		854.535.800,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				32 Orang	16 Orang	202.476.700,00	157.174.400,00	153.296.800,00	-49.179.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			202.476.700,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				10 Lembaga	10 Lembaga	8.013.700,00	8.275.300,00	0,00	-8.013.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.013.700,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi																		
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n				128 Orang	154 Orang	644.045.400,00	1.085.914.500,00	937.978.500,00	293.933.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			644.045.400,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina*				100 Lembaga	60 Lembaga	60.330.900,00	34.388.200,00	95.455.800,00	35.124.900,00			-	- -	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		60.330.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				100 Lembaga	60 Lembaga	60.330.900,00	34.388.200,00	95.455.800,00	35.124.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.330.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi*				2 Perizinan	1 Perizinan	101.377.180,00	112.271.800,00	133.533.800,00	32.156.620,00			-	- -	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		101.377.180,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																		
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				2 Perizinan	1 Perizinan	101.377.180,00	112.271.800,00	133.533.800,00	32.156.620,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			101.377.180,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas*				150 Perusahaan	145 Perusahaan	322.457.420,00	208.936.600,00	213.431.400,00	-109.026.020,00			-	- -	Perusahaan dan Tenaga Kerja		322.457.420,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				150 Perusahaan	145 Perusahaan	322.457.420,00	208.936.600,00	213.431.400,00	-109.026.020,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			322.457.420,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	386.804.700,00	365.440.300,00	365.440.300,00	-21.364.400,00			-	- -	Perusahaan dan Tenaga Kerja		386.804.700,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	386.804.700,00	365.440.300,00	365.440.300,00	-21.364.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			386.804.700,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar**				**61,00 Persen**	**61,00 Persen**	**1.620.504.300,00**	**1.579.277.900,00**	**1.561.757.800,00**	**1.713.180,00**							**1.622.217.480,00**	
		[Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar]	**Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar**	**65**	**60.05**	**61**	-	-	**1.620.504.300,00**	**1.579.277.900,00**	**1.561.757.800,00**	-	-	-	-	-	-	**61**	**1.622.217.480,00**	-
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan, diberdayakan dan mendapatkan fasilitasi layanan*				2290 Orang	2790 Orang	966.629.900,00	1.031.549.300,00	1.012.119.600,00	45.489.700,00			-	- -	Perusahaan dan Pencari Kerja		966.629.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				20 Orang	17 Orang	52.947.200,00	53.911.900,00	69.911.900,00	16.964.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			52.947.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				2500 Orang	2500 Orang	122.427.400,00	122.306.900,00	117.306.900,00	-5.120.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			122.427.400,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				80 Orang	100 Orang	37.559.200,00	37.606.300,00	37.606.300,00	47.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			37.559.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				100 Orang	50 Orang	390.375.200,00	52.498.700,00	134.098.700,00	-256.276.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			390.375.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				140 Orang	140 Orang	363.320.900,00	765.225.500,00	653.195.800,00	289.874.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			363.320.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah LPTKS yang diterbitkan perizinnya, dilakukan pengawasan dan pengendalian*				10 Lembaga	10 Lembaga	141.912.900,00	84.610.900,00	86.110.900,00	-55.802.000,00			-	- -	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)		141.912.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi																		
			Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi				5 Lembaga	5 Lembaga	60.818.400,00	20.898.800,00	20.898.800,00	-39.919.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.818.400,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS																		
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				5 Lembaga	5 Lembaga	81.094.500,00	63.712.100,00	65.212.100,00	-15.882.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			81.094.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase pengelolaan Informasi Pasar Kerja*				100 Persen	100 Persen	426.302.500,00	374.356.500,00	374.835.100,00	-51.467.400,00			-	- -	Perusahaan dan Pencari Kerja		426.302.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				12 Dokumen	12 Dokumen	40.478.400,00	40.831.000,00	43.831.000,00	3.352.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.478.400,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				6000 Orang	6000 Orang	65.646.400,00	7.567.600,00	5.067.600,00	-60.578.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			65.646.400,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				500 Orang	500 Orang	320.177.700,00	325.957.900,00	325.936.500,00	5.758.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			320.177.700,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan*				130 Orang	116 Orang	85.659.000,00	88.761.200,00	88.692.200,00	3.033.200,00			-	- -	Pekerja Migran Indonesia		87.372.180,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				100 Orang	100 Orang	33.790.600,00	37.092.900,00	37.092.900,00	3.302.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			34.466.412,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				20 Orang	16 Orang	51.868.400,00	51.668.300,00	51.599.300,00	-269.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			52.905.768,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)**				**41,00 Persen**	**41,00 Persen**	**28.385.392.080,00**	**28.433.364.600,00**	**29.752.776.600,00**	**-43.999.400,00**							**28.341.392.680,00**	
		[Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)]	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**43**	**40.26**	**41**	-	-	**28.385.392.080,00**	**28.433.364.600,00**	**29.752.776.600,00**	-	-	-	-	-	-	**41**	**28.341.392.680,00**	-
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama*				105 Perusahaan	120 Perusahaan	171.476.400,00	128.126.400,00	128.126.400,00	-43.350.000,00			-	- -	Perusahaan, Tenaga Kerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh		171.476.400,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				100 Perusahaan	100 Perusahaan	55.130.400,00	37.530.400,00	37.530.400,00	-17.600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			55.130.400,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				6 Perusahaan	20 Perusahaan	46.178.400,00	35.828.400,00	35.828.400,00	-10.350.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			46.178.400,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	12 Laporan	70.167.600,00	54.767.600,00	54.767.600,00	-15.400.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			70.167.600,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota*				250 Perkara	200 Perkara	28.213.915.680,00	28.305.238.200,00	29.624.650.200,00	1.410.734.520,00			-	- -	-		28.169.916.280,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				60 Perkara	60 Perkara	350.419.000,00	242.719.000,00	242.719.000,00	-107.700.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			350.419.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				200 Perkara	200 Perkara	93.801.280,00	351.953.400,00	266.421.400,00	172.620.120,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			93.801.280,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	14.057.700,00	6.557.700,00	6.557.700,00	-7.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			14.057.700,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	272.976.400,00	265.346.200,00	225.346.200,00	-47.630.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			272.976.400,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				40000 Orang	103826 Orang	27.482.661.300,00	27.438.661.900,00	28.883.605.900,00	1.400.944.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			27.438.661.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**21.081.710.000,00**	**24.012.324.900,00**	**21.353.400.000,00**	**271.690.000,00**							**9.026.625.948,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.081.710.000,00**	**24.012.324.900,00**	**21.353.400.000,00**	**271.690.000,00**							**9.026.625.948,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**21.081.710.000,00**	**24.012.324.900,00**	**21.353.400.000,00**	**271.690.000,00**							**9.026.625.948,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**11.172.517.808,00**	**11.470.825.608,00**	**10.067.726.608,00**	**-2.180.891.860,00**							**8.991.625.948,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**11.172.517.808,00**	**11.470.825.608,00**	**10.067.726.608,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**8.991.625.948,00**	-
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen perencanaan kinerja yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target capaian perangkat daerah secara terukur dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah*				-	10 Dokumen	78.672.000,00	49.926.400,00	47.930.400,00	-30.741.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	ASN		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	46.702.000,00	25.552.000,00	25.552.000,00	-21.150.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.557.000,00	3.761.400,00	3.487.000,00	-1.070.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.415.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	-800.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.478.400,00	5.478.400,00	5.216.800,00	-261.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.519.600,00	5.519.600,00	5.301.600,00	-218.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	13.000.000,00	7.000.000,00	5.758.000,00	-7.242.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 Persen	9.382.328.348,00	9.475.208.348,00	8.039.717.348,00	-1.342.611.000,00			-	- -	-		8.991.625.948,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	64 Orang/bulan	8.991.626.248,00	8.991.626.248,00	7.576.701.048,00	-1.414.925.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.991.625.948,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	380.400.000,00	473.280.000,00	454.680.000,00	74.280.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.733.000,00	5.733.000,00	4.460.400,00	-1.272.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.569.100,00	4.569.100,00	3.875.900,00	-693.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**11.172.517.808,00**	**11.470.825.608,00**	**10.067.726.608,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**8.991.625.948,00**	-
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	1 Dokumen	336.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-156.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-156.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**11.172.517.808,00**	**11.470.825.608,00**	**10.067.726.608,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**8.991.625.948,00**	-
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 Persen	146.831.000,00	441.126.200,00	579.000.000,00	432.169.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	72 Paket	56.831.000,00	54.126.200,00	54.000.000,00	-2.831.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	76 Orang	90.000.000,00	387.000.000,00	525.000.000,00	435.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 Persen	401.555.800,00	431.257.820,00	254.055.820,00	-147.499.980,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	59.043.800,00	88.745.820,00	85.595.820,00	26.552.020,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.512.000,00	21.512.000,00	20.460.000,00	-1.052.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37 Laporan	21 Laporan	310.000.000,00	310.000.000,00	148.000.000,00	-162.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 Persen	32.819.900,00	39.197.200,00	159.188.200,00	126.368.300,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	5 Unit	32.819.900,00	39.197.200,00	159.188.200,00	126.368.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 Persen	393.810.760,00	490.379.640,00	444.754.840,00	50.944.080,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	323.573.760,00	371.304.000,00	222.770.400,00	-100.803.360,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	49.237.000,00	119.075.640,00	221.984.440,00	172.747.440,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Pemaliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 Persen	400.500.000,00	363.730.000,00	363.080.000,00	-37.420.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	378.820.000,00	342.050.000,00	342.050.000,00	-36.770.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	31 Unit	21.680.000,00	21.680.000,00	21.030.000,00	-650.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**presentase Anggaran Responsive Gender (ARG)**				**75 persentase**	**75 persentase**	**5.521.945.100,00**	**5.600.745.100,00**	**5.441.189.100,00**	**-5.521.945.100,00**							**0,00**	
		[Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)]	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**95**	**71**	**75**	-	-	**5.521.945.100,00**	**5.600.745.100,00**	**5.441.189.100,00**	-	-	-	-	-	-	**75**	**0,00**	-
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat analisis gender dan GBS*				51 Dokumen	51 Dokumen	267.259.000,00	261.459.000,00	210.242.300,00	-57.016.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	OPD/Lembaga		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	93.177.700,00	93.177.700,00	81.977.700,00	-11.200.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				4 Laporan	4 Laporan	109.064.600,00	103.264.600,00	103.264.600,00	-5.800.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi				1 Kebijakan	1 Kebijakan	39.888.100,00	39.888.100,00	25.000.000,00	-14.888.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				0 Lembaga	0 Lembaga	25.128.600,00	25.128.600,00	0,00	-25.128.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemayarakatan kewenangan kab/kota yang terlaksana*				-	100 Persen	5.205.660.800,00	5.290.260.800,00	5.230.946.800,00	25.286.000,00			-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				10 Lembaga	10 Lembaga	5.146.281.800,00	5.146.281.800,00	5.116.400.000,00	-29.881.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi				0 Lembaga	0 Lembaga	29.946.800,00	114.546.800,00	114.546.800,00	84.600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				100 orang	100 orang	29.432.200,00	29.432.200,00	0,00	-29.432.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang terlaksana*				-	100 Persen	49.025.300,00	49.025.300,00	0,00	-49.025.300,00			-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota																		
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				0 Lembaga	0 Lembaga	24.532.000,00	24.532.000,00	0,00	-24.532.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				0 dokumen	0 dokumen	24.493.300,00	24.493.300,00	0,00	-24.493.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan-termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan**				**-**	**77.97 %**	**2.186.910.844,00**	**2.863.674.844,00**	**2.965.366.944,00**	**-2.186.910.844,00**								**0,00**	
		[Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO]	**Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**	**0.60**	**1.05**	**1**	-	-	**2.186.910.844,00**	**2.863.674.844,00**	**2.965.366.944,00**	-	-	-	-	-	-	**1**	**0,00**	-
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	117.121.000,00	287.277.600,00	189.777.600,00	72.656.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	11 Dokumen	72.121.000,00	242.277.600,00	144.777.600,00	72.656.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				3 Lembaga	3 Lembaga	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordiansi Kewenagan Kabupaten/Kota*				-	100 %	507.676.244,00	494.093.544,00	622.723.144,00	115.046.900,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota				0 Orang	0 Orang	6.750.000,00	0,00	5.850.000,00	-900.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				0 orang	200 orang	306.432.000,00	270.912.000,00	297.657.600,00	-8.774.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0 Orang	50 Orang	179.076.544,00	208.011.044,00	259.515.044,00	80.438.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				0 orang	200 orang	15.417.700,00	15.170.500,00	15.170.500,00	-247.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.186.910.844,00**	**2.863.674.844,00**	**2.965.366.944,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				0 orang	0 orang	0,00	0,00	44.530.000,00	44.530.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		[Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO]	**Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**	**0.60**	**1.05**	**1**	-	-	**2.186.910.844,00**	**2.863.674.844,00**	**2.965.366.944,00**	-	-	-	-	-	-	**1**	**0,00**	-
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kota makassar yang mendapat penguatan dan pengembangan*				-	3 Kegiatan	1.562.113.600,00	2.082.303.700,00	2.152.866.200,00	590.752.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat dan Lembaga Penyedia Layanan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				4 Lembaga	10 Lembaga	39.283.800,00	180.831.900,00	235.536.400,00	196.252.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi				2 Laporan	102 Laporan	1.375.525.000,00	1.375.525.000,00	1.375.525.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				165 orang	452 orang	75.904.800,00	490.246.800,00	506.104.800,00	430.200.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				4 Dokumen	2 Dokumen	71.400.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	-35.700.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Pembelajaran Keluarga Yang Berprespektif Gender dan Anak sesuai standar**				**-**	**293 Utama**	**470.002.300,00**	**749.586.300,00**	**524.332.100,00**	**-470.002.300,00**							**0,00**	
		[Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar]	**Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar**	**313**	**285**	**285**	-	-	**470.002.300,00**	**749.586.300,00**	**524.332.100,00**	-	-	-	-	-	-	**293**	**0,00**	-
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kulaitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kab/Kota yang terlaksana*				-	100 Persen	133.261.800,00	223.761.800,00	83.107.600,00	-50.154.200,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan				0 Lembaga	4 Lembaga	51.907.600,00	51.907.600,00	83.107.600,00	31.200.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas				0 Lembaga	5 Lembaga	81.354.200,00	171.854.200,00	0,00	-81.354.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kab/Kota yang terlaksana*				-	100 Persen	336.740.500,00	525.824.500,00	441.224.500,00	104.484.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota																		
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota				0 Orang	200 Orang	336.740.500,00	525.824.500,00	441.224.500,00	104.484.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan atau Penyusunan Kebijakan**				**-**	**65 %**	**89.540.700,00**	**89.540.700,00**	**83.940.700,00**	**-89.540.700,00**							**0,00**	
		[Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan]	**Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan**	**85**	**60**	**65**	-	-	**89.540.700,00**	**89.540.700,00**	**83.940.700,00**	-	-	-	-	-	-	**65**	**0,00**	-
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data ditingkat Daerah Kab/Kota yang terlaksana*				-	100 %	89.540.700,00	89.540.700,00	83.940.700,00	-5.600.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	2 Dokumen	89.540.700,00	89.540.700,00	83.940.700,00	-5.600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kelurahan Ramah Anak**				**-**	**100 %**	**396.841.200,00**	**1.179.021.600,00**	**612.246.600,00**	**-396.841.200,00**							**0,00**	
		[Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)]	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**	**71.55**	**61.65**	**65.55**	-	-	**396.841.200,00**	**1.179.021.600,00**	**612.246.600,00**	-	-	-	-	-	-	**65.55**	**0,00**	-
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tersusunnya pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	100 Persen	121.611.600,00	408.304.400,00	314.100.600,00	192.489.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Lembaga	10 Lembaga	58.333.800,00	211.983.800,00	144.780.000,00	86.446.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan	5 Laporan	63.277.800,00	196.320.600,00	169.320.600,00	106.042.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tersusunnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	100 Persen	275.229.600,00	770.717.200,00	298.146.000,00	22.916.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				0 Orang	945 Orang	100.373.000,00	446.648.200,00	142.096.000,00	41.723.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				0 Lembaga	10 Lembaga	10.400.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	10.400.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				0 Lembaga	10 Lembaga	154.056.600,00	292.869.000,00	124.850.000,00	-29.206.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait**				**98.05 %**	**98.05 %**	**1.243.952.048,00**	**2.058.930.748,00**	**1.658.597.948,00**	**-1.208.952.048,00**							**35.000.000,00**	
		[Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar]	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar**	**100**	**100**	**100**	-	-	**1.243.952.048,00**	**2.058.930.748,00**	**1.658.597.948,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**35.000.000,00**	-
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana*				-	100 Persen	143.871.200,00	500.255.200,00	374.845.000,00	230.973.800,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				6 Dokumen	12 Dokumen	66.955.200,00	264.839.200,00	159.139.200,00	92.184.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				4 Kegiatan	10 Kegiatan	76.916.000,00	235.416.000,00	215.705.800,00	138.789.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah*				15 Lorong	100 Persen	996.534.048,00	972.238.248,00	1.176.497.448,00	179.963.400,00			-	- -	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				0 Orang	500 Orang	455.128.704,00	379.701.904,00	379.701.904,00	-75.426.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				0 Orang	500 Orang	342.196.800,00	382.281.600,00	422.714.400,00	80.517.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	13.500.000,00	0,00	13.650.000,00	150.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0 Orang	70 Orang	179.076.544,00	208.824.744,00	301.191.144,00	122.114.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.243.952.048,00**	**2.058.930.748,00**	**1.658.597.948,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**35.000.000,00**	-
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				-	500 Orang	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		[Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar]	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar**	**100**	**100**	**100**	-	-	**1.243.952.048,00**	**2.058.930.748,00**	**1.658.597.948,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**35.000.000,00**	-
	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota				0 Orang	20 Orang	6.632.000,00	1.430.000,00	24.240.000,00	17.608.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota yang terlaksana*				-	100 Persen	103.546.800,00	586.437.300,00	107.255.500,00	3.708.700,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				4 Dokumen	4 Dokumen	15.280.000,00	19.874.900,00	14.929.900,00	-350.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota																		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				7 Dokumen	15 Dokumen	88.266.800,00	566.562.400,00	92.325.600,00	4.058.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**17.002.874.000,00**	**20.963.781.793,00**	**20.270.300.000,00**	**3.267.426.000,00**							**16.390.922.940,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.002.874.000,00**	**20.963.781.793,00**	**20.270.300.000,00**	**3.267.426.000,00**							**16.390.922.940,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**17.002.874.000,00**	**20.963.781.793,00**	**20.270.300.000,00**	**3.267.426.000,00**							**16.390.922.940,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**				**-**	**100 Persen**	**11.149.980.200,00**	**11.283.801.278,00**	**11.228.043.058,00**	**-611.951.060,00**							**10.538.029.140,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**11.149.980.200,00**	**11.283.801.278,00**	**11.228.043.058,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**10.538.029.140,00**	-
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun*				6 Dokumen	100 Persen	53.999.900,00	59.582.200,00	59.582.200,00	5.582.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		69.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	4 Dokumen	24.999.900,00	30.242.000,00	30.242.000,00	5.242.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	3.816.000,00	3.816.000,00	-184.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	3.955.600,00	3.955.600,00	-44.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.347.200,00	4.347.200,00	347.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.647.200,00	4.647.200,00	647.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	4 Laporan	13.000.000,00	12.574.200,00	12.574.200,00	-425.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			13.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		[Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah]	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**11.149.980.200,00**	**11.283.801.278,00**	**11.228.043.058,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**10.538.029.140,00**	-
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 Persen	8.606.473.191,00	8.656.298.891,00	8.690.638.691,00	84.165.500,00			-	- -	-		8.606.473.191,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	66 Orang/bulan	8.257.603.491,00	8.257.603.491,00	8.289.903.491,00	32.300.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.257.603.491,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1 Dokumen	292.320.000,00	292.337.200,00	294.377.200,00	2.057.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			292.320.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	56.549.700,00	106.358.200,00	106.358.000,00	49.808.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			56.549.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**11.149.980.200,00**	**11.283.801.278,00**	**11.228.043.058,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**10.538.029.140,00**	-
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 Persen	336.000.000,00	312.000.000,00	180.000.000,00	-156.000.000,00			-	- -	-		336.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Tahun Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	312.000.000,00	180.000.000,00	-156.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			336.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		[Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur]	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**	**90**	**90**	**90**	-	-	**11.149.980.200,00**	**11.283.801.278,00**	**11.228.043.058,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**10.538.029.140,00**	-
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 Persen	145.500.000,00	556.500.000,00	646.500.000,00	501.000.000,00			-	- -	-		145.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	67.500.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	-1.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			67.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	95 Orang	78.000.000,00	490.500.000,00	580.500.000,00	502.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			78.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 Persen	977.545.649,00	476.229.727,00	541.189.927,00	-436.355.722,00			-	- -	-		977.545.649,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	100.694.500,00	73.269.207,00	73.269.207,00	-27.425.293,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.694.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	598.443.149,00	103.944.920,00	103.944.920,00	-494.498.229,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			598.443.149,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.822.000,00	19.961.600,00	28.403.800,00	20.581.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.822.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	16 Laporan	162.966.000,00	162.354.000,00	168.872.000,00	5.906.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			162.966.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	107.620.000,00	116.700.000,00	166.700.000,00	59.080.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			107.620.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				-	100 Persen	53.760.300,00	260.719.300,00	260.719.300,00	206.959.000,00			-	- -	-		53.760.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	23 Unit	53.760.300,00	260.719.300,00	260.719.300,00	206.959.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			53.760.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				-	100 Persen	709.751.160,00	676.461.160,00	565.402.940,00	-144.348.220,00			-	- -	-		82.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2 Laporan	27.000.000,00	1.562.800,00	1.536.800,00	-25.463.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			27.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2 Laporan	55.800.000,00	61.678.000,00	61.678.000,00	5.878.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			55.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	626.951.160,00	613.220.360,00	502.188.140,00	-124.763.020,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				-	100 Persen	266.950.000,00	286.010.000,00	284.010.000,00	17.060.000,00			-	- -	-		266.950.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.630.000,00	27.040.000,00	27.040.000,00	-16.590.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			43.630.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	11 Unit	167.350.000,00	191.460.000,00	191.460.000,00	24.110.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			167.350.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	72 Unit	55.970.000,00	67.510.000,00	65.510.000,00	9.540.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			55.970.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Tingkat Konsumsi Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi Tingkat Ketersediaan Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKG)**				**2100 2400 kkal/kap kkal/kap**	**2042 2825 kkal/kap kkal/kap**	**4.295.230.500,00**	**6.113.995.995,00**	**5.664.142.422,00**	**0,00**							**4.295.230.500,00**	
		[Tingkat Ketersediaan Energi BerdasarkanAngka Kecukupan Energi (AKG)]	**Tingkat Ketersediaan Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKG)**	**2400**	**2400**	**2400**	-	-	**4.295.230.500,00**	**6.113.995.995,00**	**5.664.142.422,00**	-	-	-	-	-	-	**2400**	**4.295.230.500,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Yang Terlaksana*				91 %	100 Persen	1.129.842.800,00	3.041.689.195,00	2.633.835.622,00	1.503.992.822,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Meningkatkan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan		1.129.842.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				3 Laporan	3 Laporan	914.773.600,00	947.200.495,00	199.912.395,00	-714.861.205,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			914.773.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				150 Keluarga	150 Keluarga	33.872.600,00	42.356.400,00	58.357.327,00	24.484.727,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			33.872.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				3 laporan	3 laporan	115.603.000,00	1.961.040.600,00	2.290.474.400,00	2.174.871.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			115.603.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	65.593.600,00	91.091.700,00	85.091.500,00	19.497.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			65.593.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		[Tingkat Konsumsi Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi]	**Tingkat Konsumsi Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi**	**2100**	**2041**	**2100**	-	-	**4.295.230.500,00**	**6.113.995.995,00**	**5.664.142.422,00**	-	-	-	-	-	-	**2100**	**4.295.230.500,00**	-
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Yang Terlaksana*				90 Persen	100 Persen	3.165.387.700,00	3.072.306.800,00	3.030.306.800,00	-135.080.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Meningkatkan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan		3.165.387.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	56.393.200,00	62.600.000,00	60.600.000,00	4.206.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			56.393.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Laporan	2 Laporan	2.236.702.300,00	2.101.509.700,00	2.107.189.700,00	-129.512.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			2.236.702.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	3 Laporan	119.019.700,00	102.000.000,00	68.000.000,00	-51.019.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			119.019.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Dokumen	1 Dokumen	753.272.500,00	806.197.100,00	794.517.100,00	41.244.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			753.272.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase daerah rentan dan rawan pangan**				**3.83 Persen**	**1.3 Persen**	**544.825.300,00**	**1.216.809.900,00**	**1.209.479.900,00**	**0,00**							**544.825.300,00**	
		[Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan]	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**1.26**	**1.31**	**1.30**	-	-	**544.825.300,00**	**1.216.809.900,00**	**1.209.479.900,00**	-	-	-	-	-	-	**1.30**	**544.825.300,00**	-
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Persentase Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Yang Tersusun*				100 Persen	100 Persen	121.614.700,00	130.671.700,00	130.671.700,00	9.057.000,00			-	- -	-		121.614.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	121.614.700,00	130.671.700,00	130.671.700,00	9.057.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			121.614.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	423.210.600,00	1.086.138.200,00	1.078.808.200,00	655.597.600,00			-	- -	-		423.210.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	178.249.000,00	158.343.000,00	176.493.000,00	-1.756.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			178.249.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				3 Laporan	3 Laporan	213.010.700,00	883.514.700,00	890.034.700,00	677.024.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			213.010.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	31.950.900,00	44.280.500,00	12.280.500,00	-19.670.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			31.950.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan**				**80 Persen**	**80 Persen**	**1.012.838.000,00**	**2.349.174.620,00**	**2.168.634.620,00**	**0,00**							**1.012.838.000,00**	
		[Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar]	**Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar**	**80**	**100**	**80**	-	-	**1.012.838.000,00**	**2.349.174.620,00**	**2.168.634.620,00**	-	-	-	-	-	-	**80**	**1.012.838.000,00**	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana*				100 Persen	100 Persen	1.012.838.000,00	2.349.174.620,00	2.168.634.620,00	1.155.796.620,00			-	- -	-		1.012.838.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1 Dokumen	172.420.000,00	106.760.200,00	81.560.200,00	-90.859.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			172.420.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				4 Dokumen	1 Dokumen	665.913.600,00	2.069.824.120,00	1.918.084.120,00	1.252.170.520,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			665.913.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				3 Dokumen	1 Dokumen	174.504.400,00	172.590.300,00	168.990.300,00	-5.514.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			174.504.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS PERTANAHAN							**17.052.128.000,00**	**21.542.142.323,00**	**17.930.375.372,00**	**878.247.372,00**							**5.939.194.133,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.052.128.000,00**	**21.542.142.323,00**	**17.930.375.372,00**	**878.247.372,00**							**5.939.194.133,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**17.052.128.000,00**	**21.542.142.323,00**	**17.930.375.372,00**	**878.247.372,00**							**5.939.194.133,00**	
1.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah** **Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**100** **90 %** **%**	**100** **100** **90 %** **%** **%**	**7.611.725.168,00**	**8.710.881.593,00**	**6.535.413.722,00**	**-7.611.725.168,00**							**0,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**7.611.725.168,00**	**8.710.881.593,00**	**6.535.413.722,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun*				10 Dokumen	9 dokumen	57.931.600,00	135.265.200,00	124.058.000,00	66.126.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	SKPD		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	24.999.000,00	84.939.600,00	78.515.200,00	53.516.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.998.700,00	7.631.500,00	7.609.200,00	3.610.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.995.600,00	7.613.500,00	6.904.500,00	2.908.900,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.995.800,00	9.242.000,00	8.642.000,00	4.646.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.986.100,00	6.117.500,00	6.070.800,00	2.084.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**7.611.725.168,00**	**8.710.881.593,00**	**6.535.413.722,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.10.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.956.800,00	7.654.600,00	4.249.800,00	293.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**7.611.725.168,00**	**8.710.881.593,00**	**6.535.413.722,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	12.999.600,00	12.066.500,00	12.066.500,00	-933.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	5.406.980.508,00	6.098.047.558,00	4.431.424.530,00	-975.555.978,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	SKPD		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	5.005.687.008,00	5.638.114.258,00	4.016.089.630,00	-989.597.378,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	256.334.300,00	271.934.300,00	246.854.300,00	-9.480.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	72.907.600,00	117.887.400,00	117.868.000,00	44.960.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**7.611.725.168,00**	**8.710.881.593,00**	**6.535.413.722,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.10.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	38.556.900,00	30.717.900,00	30.717.900,00	-7.839.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**7.611.725.168,00**	**8.710.881.593,00**	**6.535.413.722,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.10.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.014.600,00	6.014.600,00	6.014.600,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.480.100,00	33.379.100,00	13.880.100,00	-13.600.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**7.611.725.168,00**	**8.710.881.593,00**	**6.535.413.722,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.10.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	336.000.000,00	0,00	0,00	-336.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	0,00	0,00	-336.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**7.611.725.168,00**	**8.710.881.593,00**	**6.535.413.722,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.039.813.740,00	1.102.512.900,00	675.314.500,00	-364.499.240,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	SKPD		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	286.276.240,00	207.195.400,00	167.497.000,00	-118.779.240,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**7.611.725.168,00**	**8.710.881.593,00**	**6.535.413.722,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.10.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	692.037.500,00	655.317.500,00	267.817.500,00	-424.220.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**7.611.725.168,00**	**8.710.881.593,00**	**6.535.413.722,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.10.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	61.500.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	178.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan*				42 Jenis	42 Jenis	363.086.520,00	939.050.085,00	887.133.815,00	524.047.295,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	SKPD		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	112.550.020,00	358.126.020,00	310.129.750,00	197.579.730,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	29.733.500,00	44.586.565,00	44.586.565,00	14.853.065,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	32.483.000,00	37.697.500,00	37.697.500,00	5.214.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	13 Laporan	72.000.000,00	382.320.000,00	382.320.000,00	310.320.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	98.920.000,00	98.920.000,00	95.000.000,00	-3.920.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia*				12 Bulan	12 Bulan	42.742.800,00	42.742.800,00	40.259.827,00	-2.482.973,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	SKPD		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.742.800,00	42.742.800,00	40.259.827,00	-2.482.973,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara*				56 Unit	56 Unit	365.170.000,00	393.263.050,00	377.223.050,00	12.053.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	SKPD		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	53.130.000,00	61.763.050,00	61.763.050,00	8.633.050,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	127.350.000,00	135.220.000,00	133.820.000,00	6.470.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	34.690.000,00	46.280.000,00	31.640.000,00	-3.050.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
2.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi**				**100 %**	**100 %**	**190.693.040,00**	**936.735.900,00**	**936.735.900,00**	**1.906.930,00**							**192.599.970,00**	
		[Persentase Penanganan Sengketa Tanah]	**Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**100**	**100**	**100**	-	-	**190.693.040,00**	**936.735.900,00**	**936.735.900,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**192.599.970,00**	-
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah mediasi sengketa tanah yang dilaksanakan*				12 mediasi	12 mediasi	190.693.040,00	936.735.900,00	936.735.900,00	746.042.860,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Pertanahan Kota Makassar		192.599.970,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Berita Acara	12 Berita Acara	69.592.000,00	684.391.800,00	684.391.800,00	614.799.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			70.287.920,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	121.101.040,00	252.344.100,00	252.344.100,00	131.243.060,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			122.312.050,00	DINAS PERTANAHAN
3.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan**				**25 %**	**100 %**	**5.689.697.192,00**	**7.353.435.280,00**	**5.950.619.800,00**	**56.896.971,00**							**5.746.594.163,00**	
		[Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan]	**Persentase Penanganan Sengketa Tanah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**5.689.697.192,00**	**7.353.435.280,00**	**5.950.619.800,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**5.746.594.163,00**	-
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan*				5 lokasi	3 lokasi	5.689.697.192,00	7.353.435.280,00	5.950.619.800,00	260.922.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Pertanahan Kota Makassar		5.746.594.163,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	37.642.000,00	47.642.600,00	47.642.600,00	10.000.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			38.018.420,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	5.652.055.192,00	7.305.792.680,00	5.902.977.200,00	250.922.008,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			5.708.575.743,00	DINAS PERTANAHAN
4.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Tanah Aset Pemerintah kota yang diamankan melalui pengamanan fisik Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota yang disertifikatkan**				**65 73 % %**	**20.46 40 % %**	**3.560.012.600,00**	**4.541.089.550,00**	**4.507.605.950,00**	**-3.560.012.600,00**							**0,00**	
		[Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah]	**Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**3.560.012.600,00**	**4.541.089.550,00**	**4.507.605.950,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Tanah Asset Pemerintahan Kota yang diamankan*				160 Bidang	160 Bidang	3.560.012.600,00	4.541.089.550,00	4.507.605.950,00	947.593.350,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	SKPD		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	800.847.200,00	681.788.900,00	657.337.700,00	-143.509.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				75 Dokumen	75 Dokumen	840.219.000,00	540.389.400,00	540.389.400,00	-299.829.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				85 Dokumen	85 Dokumen	1.918.946.400,00	3.318.911.250,00	3.309.878.850,00	1.390.932.450,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				0,00	DINAS PERTANAHAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**100.370.435.568,00**	**98.743.907.720,00**	**109.908.858.897,00**	**9.538.423.329,00**							**209.011.979.490,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.370.435.568,00**	**98.743.907.720,00**	**109.908.858.897,00**	**9.538.423.329,00**							**209.011.979.490,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**100.370.435.568,00**	**98.743.907.720,00**	**109.908.858.897,00**	**9.538.423.329,00**							**209.011.979.490,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah** **Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**90 %** **100 %**	**100 %** **100 %** **90 %**	**32.763.472.181,00**	**36.125.113.006,00**	**34.174.820.473,00**	**-1.639.818.948,00**							**31.123.653.233,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**32.763.472.181,00**	**36.125.113.006,00**	**34.174.820.473,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**31.123.653.233,00**	-
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun*				9 Dokumen	100 %	156.308.200,00	102.597.000,00	102.597.000,00	-53.711.200,00			-	- -	DLH Kota Makassar		247.445.440,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	126.997.300,00	68.253.800,00	68.253.800,00	-58.743.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.937.040,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.174.500,00	4.961.000,00	4.961.000,00	786.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.063.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.781.400,00	4.781.400,00	781.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.784.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.200,00	5.403.800,00	5.403.800,00	1.403.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.285.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.135.700,00	4.899.300,00	4.899.300,00	763.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.388.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	13.000.500,00	14.297.700,00	14.297.700,00	1.297.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			42.987.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				4 Dokumen	100 %	26.058.379.581,00	26.076.789.606,00	22.861.087.973,00	-3.197.291.608,00			-	- -	DLH Kota Makassar		25.138.212.793,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				202 Orang/ bulan	202 Orang/ bulan	25.252.359.181,00	25.252.368.406,00	22.017.216.773,00	-3.235.142.408,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.361.286.633,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	475.440.000,00	535.920.000,00	465.370.000,00	-10.070.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			515.760.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	228.538.000,00	219.281.200,00	309.281.200,00	80.743.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			233.858.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.028.300,00	42.122.700,00	42.122.700,00	-32.905.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.014.100,00	27.097.300,00	27.097.300,00	83.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			27.308.160,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun*				1 Dokumen	100 %	2.094.000.000,00	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	-669.000.000,00			-	- -	DLH Kota Makassar		2.017.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				202 Paket	202 Paket	151.500.000,00	0,00	0,00	-151.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				319 Orang	319 Orang	1.942.500.000,00	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	-517.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.017.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	760.054.100,00	1.342.135.400,00	942.726.400,00	182.672.300,00			-	- -	DLH Kota Makassar		1.434.896.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.450.000,00	0,00	0,00	-15.450.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.478.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	102.477.300,00	362.134.300,00	162.134.300,00	59.657.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			767.198.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	37.264.800,00	45.022.400,00	45.613.400,00	8.348.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	305.642.000,00	183.758.700,00	183.758.700,00	-121.883.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			93.380.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.840.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	294.000.000,00	746.000.000,00	546.000.000,00	252.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			560.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				71 Unit	100 %	721.981.500,00	1.554.620.700,00	2.933.714.700,00	2.211.733.200,00			-	- -	DLH Kota Makassar		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	6.040.000,00	407.518.000,00	407.518.000,00	401.478.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				69 Unit	69 Unit	715.941.500,00	1.147.102.700,00	2.526.196.700,00	1.810.255.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				12 Laporan	100 %	1.994.600.800,00	4.077.998.300,00	4.193.722.400,00	2.199.121.600,00			-	- -	DLH Kota Makassar		1.518.360.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.052.384.220,00	240.680.700,00	240.679.800,00	-811.704.420,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			625.816.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	942.216.580,00	3.837.317.600,00	3.953.042.600,00	3.010.826.020,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			892.544.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				2 Laporan	100 %	978.148.000,00	1.545.972.000,00	1.715.972.000,00	737.824.000,00			-	- -	DLH Kota Makassar		767.237.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	27.040.000,00	207.040.000,00	387.040.000,00	360.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			28.112.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	320.100.000,00	435.150.000,00	425.150.000,00	105.050.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			675.125.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit	47.100.000,00	59.680.000,00	59.680.000,00	12.580.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			64.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	583.908.000,00	844.102.000,00	844.102.000,00	260.194.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**				**100 %**	**100 %**	**1.014.657.380,00**	**756.761.534,00**	**650.570.534,00**	**200.447.480,00**							**1.215.104.860,00**	
		[Persentase Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup]	**Persentase Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**100**	**100**	**100**	-	-	**1.014.657.380,00**	**756.761.534,00**	**650.570.534,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.215.104.860,00**	-
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				2 Dokumen	100 %	691.180.680,00	547.451.134,00	491.260.134,00	-199.920.546,00			-	- -	Masyarakat, usaha dan/atau kegiatan		988.740.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	233.649.600,00	154.752.034,00	114.561.034,00	-119.088.566,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			988.740.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				14 Lokasi	14 Lokasi	113.466.800,00	66.469.100,00	66.469.100,00	-46.997.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	149.161.880,00	228.868.400,00	212.868.400,00	63.706.520,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan																		
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				20 Paket	12 Paket	194.902.400,00	97.361.600,00	97.361.600,00	-97.540.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Pemulihan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				2 Kegiatan	100 %	323.476.700,00	209.310.400,00	159.310.400,00	-164.166.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat, usaha dan/atau kegiatan		226.364.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	181.110.400,00	119.461.100,00	93.461.100,00	-87.649.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			112.642.080,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	142.366.300,00	89.849.300,00	65.849.300,00	-76.517.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			113.722.020,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik**				**6,23 %**	**6,23 %**	**16.631.316.460,00**	**24.535.292.460,00**	**9.305.491.160,00**	**3.000.967.060,00**							**19.632.283.520,00**	
		[Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik]	**Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik**	**7.36**	**5.66**	**6.23**	-	-	**16.631.316.460,00**	**24.535.292.460,00**	**9.305.491.160,00**	-	-	-	-	-	-	**6.23**	**19.632.283.520,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				12,52 %	100 %	16.631.316.460,00	24.535.292.460,00	9.305.491.160,00	-7.325.825.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan pelaku usaha		19.632.283.520,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	331.463.500,00	0,00	0,00	-331.463.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			370.428.520,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				110 Ha	110 Ha	1.308.711.300,00	17.423.584.100,00	1.543.465.100,00	234.753.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			14.160.040.640,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				35 Orang	11 Orang	3.394.023.660,00	2.950.489.860,00	2.903.739.660,00	-490.284.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			422.107.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				58 Unit	30 Unit	11.597.118.000,00	4.161.218.500,00	4.858.286.400,00	-6.738.831.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			4.679.707.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Limbah B3 yang Terkelola**				**100 %**	**100 %**	**601.597.500,00**	**293.945.300,00**	**389.438.700,00**	**374.765.900,00**							**976.363.400,00**	
		[Persentase Limbah B3 yang Terkelola]	**Persentase Limbah B3 yang Terkelola**	**100**	**97**	**100**	-	-	**601.597.500,00**	**293.945.300,00**	**389.438.700,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**976.363.400,00**	-
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Persentase Penyimpanan sementara Limbah B3 Yang Terlaksana*				60 Unit	100 %	93.359.800,00	65.418.200,00	66.917.900,00	-26.441.900,00			-	- -	Masyarakat, usaha dan/atau kegiatan		224.477.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)																		
			Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				60 Dokumen	60 Dokumen	34.654.000,00	32.212.400,00	32.212.400,00	-2.441.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			44.609.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3																		
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan				60 Usaha	60 Usaha	58.705.800,00	33.205.800,00	34.705.500,00	-24.000.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			179.868.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				2.791,94 Ton 3.490,11 Ton	100 %	508.237.700,00	228.527.100,00	322.520.800,00	-185.716.900,00			-	- -	Masyarakat dan pelaku usaha		751.885.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				2 Dokumen	2 Dokumen	442.899.900,00	206.789.300,00	300.850.600,00	-142.049.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			637.975.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota																		
			jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				60 Usaha	60 Usaha	65.337.800,00	21.737.800,00	21.670.200,00	-43.667.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			113.910.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH**				**61,50 %**	**61,50 %**	**605.570.400,00**	**578.190.400,00**	**1.234.390.400,00**	**-83.917.480,00**							**521.652.920,00**	
		[Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH]	**Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH**	**30.77**	**24.59**	**61.50**	-	-	**605.570.400,00**	**578.190.400,00**	**1.234.390.400,00**	-	-	-	-	-	-	**61.50**	**521.652.920,00**	-
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diawasi*				60 Usaha	100 %	605.570.400,00	578.190.400,00	1.234.390.400,00	628.820.000,00			-	- -	Masyarakat, usaha dan/atau kegiatan		521.652.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				60 Dokumen	60 Dokumen	372.113.300,00	344.733.300,00	1.068.733.300,00	696.620.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			422.760.560,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				65 Badan Usaha	65 Badan Usaha	233.457.100,00	233.457.100,00	165.657.100,00	-67.800.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			98.892.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan**				**100 %**	**100 %**	**1.413.344.100,00**	**4.671.833.400,00**	**4.377.264.000,00**	**-635.580.180,00**							**777.763.920,00**	
		[Persentase Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan]	**Persentase Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**1.413.344.100,00**	**4.671.833.400,00**	**4.377.264.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**777.763.920,00**	-
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terselenggara*				100 %	100 %	1.413.344.100,00	4.671.833.400,00	4.377.264.000,00	2.963.919.900,00			-	- -	Masyarakat dan pelaku usaha		777.763.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	391.687.000,00	1.232.138.200,00	1.298.488.200,00	906.801.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			479.036.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				260 Orang	260 Orang	895.326.400,00	2.738.694.100,00	2.380.974.700,00	1.485.648.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			222.664.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat				20 Keluarga	20 Keluarga	51.815.100,00	25.071.900,00	21.871.900,00	-29.943.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				150 Lembaga	150 Lembaga	74.515.600,00	675.929.200,00	675.929.200,00	601.413.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			76.063.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**				**100 %**	**100 %**	**388.362.260,00**	**339.782.300,00**	**279.782.300,00**	**1.827.006.800,00**							**2.215.369.060,00**	
		[Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)]	**Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**100**	**100**	**100**	-	-	**388.362.260,00**	**339.782.300,00**	**279.782.300,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**2.215.369.060,00**	-
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				12 Pengaduan	100 %	388.362.260,00	339.782.300,00	279.782.300,00	-108.579.960,00			-	- -	Masyarakat dan pelaku usaha		2.215.369.060,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				3 Perkara	3 Perkara	28.662.200,00	28.287.800,00	24.287.800,00	-4.374.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			14.444.720,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				10 Pengaduan	10 Pengaduan	338.654.260,00	290.823.100,00	237.823.100,00	-100.831.160,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.149.058.440,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Sanksi	1 Sanksi	21.045.800,00	20.671.400,00	17.671.400,00	-3.374.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			51.865.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**				**4 %**	**6 %**	**46.952.115.287,00**	**31.442.989.320,00**	**59.497.101.330,00**	**105.597.673.290,00**							**152.549.788.577,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah]	**Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**	**12**	**2.01**	**4**	-	-	**46.952.115.287,00**	**31.442.989.320,00**	**59.497.101.330,00**	-	-	-	-	-	-	**4**	**152.549.788.577,00**	-
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah Yang Terlaksana*				5 Dokumen	100 %	46.339.701.287,00	30.951.923.320,00	59.034.721.030,00	12.695.019.743,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	SKPD, Masyarakat dan pelaku usaha		151.756.213.457,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				20 Kelompok	20 Kelompok	6.223.014.300,00	3.596.917.100,00	3.696.917.100,00	-2.526.097.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			87.889.820,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	56.725.700,00	34.625.700,00	34.625.700,00	-22.100.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			57.061.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				2 Unit	2 Unit	35.872.133.747,00	23.683.659.120,00	24.103.971.330,00	-11.768.162.417,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			147.669.520.287,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.652.995.600,00	721.450.000,00	967.450.000,00	-685.545.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			359.552.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				30 Dokumen	30 Dokumen	59.608.300,00	268.408.300,00	195.524.600,00	135.916.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			131.859.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				411.731 Ton	411.731 Ton	55.218.800,00	528.518.800,00	27.773.601.400,00	27.718.382.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			1.362.007.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah																		
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				3 Laporan	3 Laporan	2.035.171.040,00	1.907.828.600,00	2.142.188.600,00	107.017.560,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			1.991.280.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0023	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah				1 Dokumen	1 Dokumen	80.949.500,00	80.949.500,00	80.876.100,00	-73.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			97.044.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0026	Operasionalisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi				39 Unit	39 Unit	303.884.300,00	129.566.200,00	39.566.200,00	-264.318.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -				0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	*Persentase Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Yang Dibina dan Diawasi*				80 Unit	100 %	612.414.000,00	491.066.000,00	462.380.300,00	-150.033.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat, usaha dan/atau kegiatan			793.575.120,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah				20 Laporan	20 Laporan	75.514.900,00	47.014.900,00	46.829.200,00	-28.685.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -				120.560.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah																		
			Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja				80 Unit	80 Unit	458.766.000,00	365.918.000,00	344.918.000,00	-113.848.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -				597.397.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	78.133.100,00	78.133.100,00	70.633.100,00	-7.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -				75.617.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPT TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH TAMANGAPA							**9.875.969.380,00**	**8.720.120.460,00**	**36.298.560.950,00**	**26.422.591.570,00**							**10.525.499.531,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.875.969.380,00**	**8.720.120.460,00**	**36.298.560.950,00**	**26.422.591.570,00**							**10.525.499.531,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**9.875.969.380,00**	**8.720.120.460,00**	**36.298.560.950,00**	**26.422.591.570,00**							**10.525.499.531,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**				**4 %**	**6 %**	**9.875.969.380,00**	**8.720.120.460,00**	**36.298.560.950,00**	**649.530.151,00**							**10.525.499.531,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.875.969.380,00**	**8.720.120.460,00**	**36.298.560.950,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**10.525.499.531,00**	-
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah Yang Terlaksana*				5 Dokumen	100 %	9.875.969.380,00	8.720.120.460,00	36.298.560.950,00	26.422.591.570,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat Kota Makassar		10.525.499.531,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				275.733,01 Ton	275.733,01 Ton	9.875.969.380,00	8.720.120.460,00	36.298.560.950,00	26.422.591.570,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -				10.525.499.531,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPT PEMAKAMAN							**9.426.242.800,00**	**7.909.418.460,00**	**6.443.706.460,00**	**-2.982.536.340,00**							**8.509.991.900,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.426.242.800,00**	**7.909.418.460,00**	**6.443.706.460,00**	**-2.982.536.340,00**							**8.509.991.900,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**9.426.242.800,00**	**7.909.418.460,00**	**6.443.706.460,00**	**-2.982.536.340,00**							**8.509.991.900,00**	
1.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik**				**6,23 %**	**6,23 %**	**9.426.242.800,00**	**7.909.418.460,00**	**6.443.706.460,00**	**-916.250.900,00**							**8.509.991.900,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				12,52 %	100 %	9.426.242.800,00	7.909.418.460,00	6.443.706.460,00	-2.982.536.340,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat, SKPD, Usaha/Kegiatan di Kota Makassar		8.509.991.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Ha	110 Ha	9.426.242.800,00	7.909.418.460,00	6.443.706.460,00	-2.982.536.340,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			8.509.991.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPT BANK SAMPAH							**2.599.651.552,00**	**3.632.396.660,00**	**5.182.806.360,00**	**2.583.154.808,00**							**2.905.088.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.599.651.552,00**	**3.632.396.660,00**	**5.182.806.360,00**	**2.583.154.808,00**							**2.905.088.400,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**2.599.651.552,00**	**3.632.396.660,00**	**5.182.806.360,00**	**2.583.154.808,00**							**2.905.088.400,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**				**4 %**	**6 %**	**2.599.651.552,00**	**3.632.396.660,00**	**5.182.806.360,00**	**305.436.848,00**							**2.905.088.400,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah Yang Terlaksana*				5 Dokumen	100 %	2.599.651.552,00	3.632.396.660,00	5.182.806.360,00	2.583.154.808,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat, SKPD, Usaha/Kegiatan di Kota Makassar		2.905.088.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				500 Ton	500 Ton	2.599.651.552,00	3.632.396.660,00	5.182.806.360,00	2.583.154.808,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			2.905.088.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN							**1.662.297.700,00**	**994.156.700,00**	**948.915.700,00**	**-713.382.000,00**							**440.329.100,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.662.297.700,00**	**994.156.700,00**	**948.915.700,00**	**-713.382.000,00**							**440.329.100,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**1.662.297.700,00**	**994.156.700,00**	**948.915.700,00**	**-713.382.000,00**							**440.329.100,00**	
1.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**				**100 %**	**100 %**	**1.662.297.700,00**	**994.156.700,00**	**948.915.700,00**	**-1.221.968.600,00**							**440.329.100,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				2 Dokumen	100 %	1.662.297.700,00	994.156.700,00	948.915.700,00	-713.382.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat, SKPD, Usaha/Kegiatan di Kota Makassar		440.329.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.662.297.700,00	994.156.700,00	948.915.700,00	-713.382.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			440.329.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**20.552.872.000,00**	**25.903.187.998,00**	**30.921.200.000,00**	**10.368.328.000,00**							**26.084.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**20.552.872.000,00**	**25.903.187.998,00**	**30.921.200.000,00**	**10.368.328.000,00**							**26.084.000.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**20.552.872.000,00**	**25.903.187.998,00**	**30.921.200.000,00**	**10.368.328.000,00**							**26.084.000.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah** **Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**100 %**	**100** **100** **90 %** **%** **%**	**15.978.077.020,00**	**22.494.369.456,00**	**26.002.342.258,00**	**3.657.922.980,00**							**19.636.000.000,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**15.978.077.020,00**	**22.494.369.456,00**	**26.002.342.258,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**19.636.000.000,00**	-
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase dokumen capaian kinerja perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja PD*				100 %	100 %	63.693.100,00	70.205.300,00	53.505.300,00	-10.187.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	dokumen perencanaan dan keuangan dukcapil		71.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	33.723.900,00	40.469.700,00	33.169.700,00	-554.200,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.291.900,00	4.291.900,00	3.091.900,00	-1.200.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.291.900,00	4.291.900,00	3.091.900,00	-1.200.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.136.600,00	4.136.600,00	2.936.600,00	-1.200.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.136.600,00	4.136.600,00	2.936.600,00	-1.200.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	13.112.200,00	12.878.600,00	8.278.600,00	-4.833.600,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase capaian administrasi keuangan*				100 %	100 %	12.066.725.052,00	12.086.053.363,00	12.549.553.363,00	482.828.311,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	dokumen administrasi keuangan dukcapil		13.462.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	11.642.962.652,00	11.642.970.963,00	12.106.470.963,00	463.508.311,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			13.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	268.336.000,00	287.656.000,00	287.656.000,00	19.320.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			320.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	148.007.400,00	148.007.400,00	148.007.400,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.419.000,00	7.419.000,00	7.419.000,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**15.978.077.020,00**	**22.494.369.456,00**	**26.002.342.258,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**19.636.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah*				-	1 Laporan	336.000.000,00	336.000.000,00	390.000.000,00	54.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN dukcapil makassar		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	336.000.000,00	390.000.000,00	54.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**15.978.077.020,00**	**22.494.369.456,00**	**26.002.342.258,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**19.636.000.000,00**	-
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase capaian kegiatan administrasi kepegawaian PD*				100 %	100 %	303.650.000,00	321.650.000,00	269.550.000,00	-34.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	asn dukcapil		335.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	200 Paket	114.750.000,00	114.750.000,00	114.750.000,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	97.500.000,00	120.000.000,00	82.500.000,00	-15.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	91.400.000,00	86.900.000,00	72.300.000,00	-19.100.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase capaian kegiatan administrasi umum PD*				100 %	100 %	664.627.700,00	627.963.300,00	758.719.740,00	94.092.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN dukcapil		1.043.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	9.210.800,00	8.965.700,00	74.572.040,00	65.361.240,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	43.915.900,00	43.673.100,00	43.673.100,00	-242.800,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	22.093.200,00	22.093.200,00	22.093.200,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	35.246.400,00	74.271.500,00	115.908.600,00	80.662.200,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	14.427.100,00	13.455.500,00	13.455.500,00	-971.600,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	13.920.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	4.080.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			17.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5.280.000,00	16.970.000,00	16.970.000,00	11.690.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	301.646.000,00	301.646.000,00	325.162.000,00	23.516.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2000 Dokumen	2000 Dokumen	218.888.300,00	128.888.300,00	128.885.300,00	-90.003.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	549.483.800,00	6.188.244.973,00	8.968.521.452,00	8.419.037.652,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	barang milik daerah dukcapil		2.335.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			650.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	16.821.800,00	171.809.160,00	197.466.000,00	180.644.200,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	432.662.000,00	6.016.435.813,00	8.631.055.452,00	8.198.393.452,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	1.200.087.368,00	1.897.302.520,00	2.054.792.520,00	854.705.152,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN dukcapil		1.600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	33.363.600,00	33.363.600,00	33.363.600,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			470.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	568.930.368,00	578.625.000,00	575.745.000,00	6.814.632,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			580.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	597.793.400,00	1.285.313.920,00	1.445.683.920,00	847.890.520,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	793.810.000,00	966.950.000,00	957.699.883,00	163.889.883,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	dukcapil		790.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.630.000,00	43.630.000,00	43.630.000,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	40 Unit	328.630.000,00	489.050.000,00	489.050.000,00	160.420.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				200 Unit	200 Unit	231.550.000,00	274.670.000,00	302.165.883,00	70.615.883,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**15.978.077.020,00**	**22.494.369.456,00**	**26.002.342.258,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**19.636.000.000,00**	-
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	190.000.000,00	159.600.000,00	122.854.000,00	-67.146.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			195.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital** **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**				**100 %**	**13,7** **74,3 %** **%**	**3.632.709.460,00**	**2.522.078.542,00**	**4.005.451.442,00**	**1.282.290.540,00**							**4.915.000.000,00**	
		[Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital]	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital** **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**	**22.9** **83.50**	**11.48** **72.00**	**13.7** **74.30**	-	-	**3.632.709.460,00**	**2.522.078.542,00**	**4.005.451.442,00**	-	-	-	-	-	-	**13.7** **76.60**	**4.915.000.000,00**	-
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*persentase pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu*				100 %	100 %	863.844.960,00	894.935.642,00	939.922.642,00	76.077.682,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	penduduk rentan dan difabel kota makassar		1.795.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.225.900,00	12.453.300,00	16.203.800,00	3.977.900,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				12 Dokumen	12 Dokumen	221.001.400,00	67.917.104,00	67.917.104,00	-153.084.296,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	79.462.300,00	118.261.038,00	132.501.838,00	53.039.538,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	551.155.360,00	696.304.200,00	723.299.900,00	172.144.540,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*persentase dokumen penataan pendaftaran penduduk yang terselesaikan*				100 %	100 %	2.744.964.500,00	1.603.242.900,00	3.060.728.800,00	315.764.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	penduduk kota makassar dan usia anak 0-17 tahun		3.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	2.744.964.500,00	1.603.242.900,00	3.060.728.800,00	315.764.300,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*persentase dokumen pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk*				100 %	100 %	23.900.000,00	23.900.000,00	4.800.000,00	-19.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	penduduk kota makassar dan usia anak 0-17 tahun		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				3 Laporan	3 Laporan	23.900.000,00	23.900.000,00	4.800.000,00	-19.100.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Rasio Pasangan Berakte Nikah**				**-**	**100 60 % %**	**530.296.780,00**	**500.296.100,00**	**542.930.600,00**	**477.703.220,00**							**1.008.000.000,00**	
		[Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan]	**Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**	**99.89**	**99.84**	**99.86**	-	-	**530.296.780,00**	**500.296.100,00**	**542.930.600,00**	-	-	-	-	-	-	**99.86**	**1.008.000.000,00**	-
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*persentase capaian pelayanan pencatatan sipil*				-	95 %	406.543.680,00	466.413.400,00	509.347.900,00	102.804.220,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	masyarakat kota makassar		680.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				12 Dokumen	12 Dokumen	388.428.280,00	391.324.300,00	418.322.400,00	29.894.120,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			560.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				18 Layanan	18 Layanan	18.115.400,00	75.089.100,00	91.025.500,00	72.910.100,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*persentase capaian pelekasanaan penyelenggaraan pencatatan sipil*				-	100 %	123.753.100,00	33.882.700,00	33.582.700,00	-90.170.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	masyarakat kota makassar		328.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				6 Laporan	6 Laporan	4.274.600,00	4.274.600,00	4.274.600,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	95.578.500,00	5.708.100,00	5.708.100,00	-89.870.400,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				3 Laporan	3 Laporan	23.900.000,00	23.900.000,00	23.600.000,00	-300.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan**				**100 %**	**20 %**	**257.693.380,00**	**315.930.800,00**	**260.165.300,00**	**147.306.620,00**							**405.000.000,00**	
		[Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan]	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**	**20**	**20**	**20**	-	-	**257.693.380,00**	**315.930.800,00**	**260.165.300,00**	-	-	-	-	-	-	**20**	**405.000.000,00**	-
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*persentase capaian kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*				100 %	100 %	77.559.280,00	88.088.300,00	92.586.800,00	15.027.520,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	skpd /non skpd pemanfaat data kependudukan		220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				3 Dokumen	3 Dokumen	77.559.280,00	88.088.300,00	92.586.800,00	15.027.520,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*persentase capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				100 %	100 %	180.134.100,00	227.842.500,00	167.578.500,00	-12.555.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	skpd /non skpd pemanfaat data kependudukan		185.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4 Laporan	4 Laporan	98.141.300,00	134.383.700,00	74.119.700,00	-24.021.600,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	3 Laporan	45.200.000,00	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				2 Dokumen	2 Dokumen	36.792.800,00	48.258.800,00	48.258.800,00	11.466.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**cakupan pengelolaan profil kependudukan**				**100 %**	**100 %**	**154.095.360,00**	**70.513.100,00**	**110.310.400,00**	**-34.095.360,00**							**120.000.000,00**	
		[Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan]	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**154.095.360,00**	**70.513.100,00**	**110.310.400,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**120.000.000,00**	-
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*persentase capaian kegiatan penyusunan profil kependudukan*				100 %	100 %	154.095.360,00	70.513.100,00	110.310.400,00	-43.784.960,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	buku profil dukcapil		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				60 Dokumen	60 Dokumen	154.095.360,00	70.513.100,00	110.310.400,00	-43.784.960,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**27.134.951.000,00**	**28.307.972.580,00**	**35.052.200.000,00**	**7.917.249.000,00**							**25.131.408.800,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**27.134.951.000,00**	**28.307.972.580,00**	**35.052.200.000,00**	**7.917.249.000,00**							**25.131.408.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**27.134.951.000,00**	**28.307.972.580,00**	**35.052.200.000,00**	**7.917.249.000,00**							**25.131.408.800,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**17.067.975.140,00**	**19.913.710.380,00**	**17.640.736.590,00**	**-5.856.934.340,00**							**11.211.040.800,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**17.067.975.140,00**	**19.913.710.380,00**	**17.640.736.590,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**11.211.040.800,00**	-
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Perancanaan, Penganggaran dan Presentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun*				-	100 %	72.344.700,00	72.344.700,00	65.994.700,00	-6.350.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Meningkatnya Kualitas, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga		122.784.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	31.124.500,00	31.124.500,00	24.774.500,00	-6.350.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			60.943.300,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.590.800,00	6.590.800,00	6.590.800,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			11.826.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.606.800,00	6.606.800,00	6.606.800,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			10.159.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.606.800,00	7.606.800,00	7.606.800,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			10.898.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.606.800,00	7.606.800,00	7.606.800,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			9.706.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	12.809.000,00	12.809.000,00	12.809.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			19.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun*				-	100 %	13.388.395.300,00	13.391.302.120,00	10.898.402.120,00	-2.489.993.180,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Meningkatnya Kualitas, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga		8.837.458.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12.842.657.300,00	12.842.804.120,00	10.349.904.120,00	-2.492.753.180,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			8.353.866.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	230.760.000,00	233.520.000,00	233.520.000,00	2.760.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			276.936.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	289.309.500,00	289.309.500,00	289.309.500,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			185.205.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.084.200,00	17.084.200,00	17.084.200,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			16.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.584.300,00	8.584.300,00	8.584.300,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			4.950.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**17.067.975.140,00**	**19.913.710.380,00**	**17.640.736.590,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**11.211.040.800,00**	-
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Presentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun*				-	100 %	378.978.200,00	378.978.200,00	222.978.200,00	-156.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Meningkatnya Kualitas, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga		5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	42.978.200,00	42.978.200,00	42.978.200,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	336.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**27.134.951.000,00**	**28.307.972.580,00**	**35.052.200.000,00**	**7.917.249.000,00**							**25.131.408.800,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.134.951.000,00**	**28.307.972.580,00**	**35.052.200.000,00**	**7.917.249.000,00**							**25.131.408.800,00**	
	2.14.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**27.134.951.000,00**	**28.307.972.580,00**	**35.052.200.000,00**	**7.917.249.000,00**							**25.131.408.800,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**27.134.951.000,00**	**28.307.972.580,00**	**35.052.200.000,00**	**7.917.249.000,00**							**25.131.408.800,00**	
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersusun*				-	100 %	159.325.600,00	1.445.773.500,00	1.445.743.500,00	1.286.417.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Meningkatnya Kualitas, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga		243.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				110 Paket	110 Paket	22.437.600,00	693.885.500,00	693.885.500,00	671.447.900,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			72.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**17.067.975.140,00**	**19.913.710.380,00**	**17.640.736.590,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**11.211.040.800,00**	-
	2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	37.888.000,00	37.888.000,00	37.858.000,00	-30.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			27.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	99.000.000,00	714.000.000,00	714.000.000,00	615.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			143.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersusun*				-	100 %	864.670.000,00	617.809.600,00	486.955.400,00	-377.714.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Meningkatnya Kualitas, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga		756.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	27.291.600,00	27.291.600,00	27.344.800,00	53.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			77.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.139.700,00	40.749.300,00	41.830.800,00	33.691.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			33.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	15.238.700,00	73.268.700,00	73.279.800,00	58.041.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			38.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	72.000.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	-37.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			23.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	56 Laporan	310.000.000,00	342.000.000,00	210.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			550.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	432.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-332.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			35.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana*				-	100 %	136.845.200,00	1.580.136.000,00	1.580.136.000,00	1.443.290.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Meningkatnya Kualitas, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga		127.446.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	16.657.700,00	46.795.700,00	46.795.700,00	30.138.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			13.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	120.187.500,00	1.533.340.300,00	1.533.340.300,00	1.413.152.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			114.246.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana*				-	100 %	905.273.280,00	1.359.860.240,00	1.383.200.650,00	477.927.370,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Meningkatnya Kualitas, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga		668.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	319.354.560,00	361.014.000,00	384.354.410,00	64.999.850,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			379.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	359.118.720,00	122.046.240,00	122.046.240,00	-237.072.480,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			24.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	226.800.000,00	876.800.000,00	876.800.000,00	650.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			264.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah yang Terlaksana*				-	100 %	1.162.142.860,00	1.067.506.020,00	1.557.326.020,00	395.183.160,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Meningkatnya Kualitas, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga		449.702.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	64.540.000,00	44.630.000,00	44.630.000,00	-19.910.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			44.220.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				170 Unit	170 Unit	309.450.000,00	444.000.000,00	444.000.000,00	134.550.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			313.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				43 Unit	43 Unit	67.000.000,00	36.540.000,00	36.540.000,00	-30.460.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			39.182.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			33.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	671.152.860,00	492.336.020,00	982.156.020,00	311.003.160,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			19.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)**				**-**	**17.6 2.008 % %**	**662.742.740,00**	**567.241.800,00**	**780.431.100,00**	**178.756.160,00**							**841.498.900,00**	
		[Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)]	**Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)**	**2**	**2.01**	**2.008**	-	-	**662.742.740,00**	**567.241.800,00**	**780.431.100,00**	-	-	-	-	-	-	**2.008**	**841.498.900,00**	-
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Presentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerinta Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang Terlaksana*				-	100 %	394.620.900,00	387.153.600,00	357.147.500,00	-37.473.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Meningkatnya Kualitas, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga		461.943.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				100 Orang Kegiatan	100 Orang Kegiatan	46.709.200,00	45.927.100,00	45.927.100,00	-782.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			43.415.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				2 Kegiatan	2 Kegiatan	26.761.000,00	26.717.400,00	26.717.400,00	-43.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			275.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	95.011.600,00	89.371.600,00	74.371.600,00	-20.640.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			53.583.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				100 Orang Satuan Pendidikan	100 Orang Satuan Pendidikan	136.575.200,00	135.574.400,00	135.568.300,00	-1.006.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			43.910.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0030	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				100 Orang Laporan	100 Orang Laporan	89.563.900,00	89.563.100,00	74.563.100,00	-15.000.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			46.033.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersusun*				-	100 %	268.121.840,00	180.088.200,00	423.283.600,00	155.161.760,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Meningkatnya Kualitas, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga		379.555.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				15 Kecamatan Dokumen	15 Kecamatan Dokumen	76.319.800,00	54.959.800,00	54.959.800,00	-21.360.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			37.512.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	139.659.040,00	99.914.600,00	343.110.000,00	203.450.960,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			150.839.150,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0022	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan																		
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	31.877.300,00	10.248.100,00	10.248.100,00	-21.629.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			65.703.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0025	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB																		
			Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.145.400,00	9.725.400,00	9.725.400,00	-420.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			61.915.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	10.120.300,00	5.240.300,00	5.240.300,00	-4.880.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			63.584.950,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Rasio akseptor KB Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi**				**-**	**11 61,66 % %**	**8.946.335.780,00**	**7.448.802.600,00**	**11.063.907.710,00**	**3.031.535.620,00**							**11.977.871.400,00**	
		[Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)]	**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)**	**68**	**59.8**	**61.6**	-	-	**8.946.335.780,00**	**7.448.802.600,00**	**11.063.907.710,00**	-	-	-	-	-	-	**61.6**	**11.977.871.400,00**	-
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan*				-	55 Mitra Kerja	840.145.300,00	838.609.500,00	904.639.200,00	64.493.900,00			-	- -	Meningkatnya Kualitas, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga		1.320.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				10 Jenis Unit	10 Jenis Unit	135.629.500,00	133.378.500,00	73.307.400,00	-62.322.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			429.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Balai Laporan	12 Balai Laporan	299.993.600,00	325.308.800,00	505.308.800,00	205.315.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	- -			330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				15 Kecamatan Laporan	15 Kecamatan Laporan	72.838.600,00	48.838.600,00	43.238.600,00	-29.600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			88.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				3 Kegiatan Dokumen	3 Kegiatan Dokumen	156.157.300,00	156.157.300,00	150.857.300,00	-5.300.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			242.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				55 Mitra Kerja Organisasi	55 Mitra Kerja Organisasi	175.526.300,00	174.926.300,00	131.927.100,00	-43.599.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			231.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang didayagunakan*				-	153 PKB/PLKB	6.746.879.580,00	5.622.748.500,00	6.482.380.600,00	-264.498.980,00			-	- -	-		7.923.341.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1157 Orang	1157 Orang	5.654.227.700,00	4.826.785.700,00	5.690.958.100,00	36.730.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	- -			7.153.341.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				12 bulan Organisasi	12 bulan Organisasi	531.159.780,00	671.270.700,00	687.736.400,00	156.576.620,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			660.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				153 PKB/PLKB Laporan	153 PKB/PLKB Laporan	561.492.100,00	124.692.100,00	103.686.100,00	-457.806.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Angka prevelensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)* *Jumlah Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota Makassar yang dikendalikan dan didistribusikan*				-	114 Faskes 61.6 %	1.044.215.500,00	672.349.200,00	2.851.866.510,00	1.807.651.010,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Pasangan Usia Subur		2.569.529.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				114 Faskes Laporan	114 Faskes Laporan	23.590.700,00	19.790.700,00	156.540.700,00	132.950.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			308.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				3460 Orang	3460 Orang	537.336.700,00	253.336.700,00	2.306.643.710,00	1.769.307.010,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			968.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				15 Unit	15 Unit	5.649.200,00	6.059.200,00	6.059.200,00	410.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				525 Orang	525 Orang	27.465.300,00	27.465.300,00	27.465.300,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			104.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				100 Faskes Laporan	100 Faskes Laporan	20.152.800,00	13.652.800,00	13.612.800,00	-6.540.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			66.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				200 Orang	200 Orang	170.446.400,00	170.446.400,00	170.446.400,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			83.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				0 Laporan	0 Laporan	153.565.000,00	92.038.700,00	81.539.000,00	-72.026.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			243.650.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				200 Orang	200 Orang	27.503.700,00	27.503.700,00	27.503.700,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				220 Orang	220 Orang	50.788.300,00	34.338.300,00	34.338.300,00	-16.450.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				3100 Orang	3100 Orang	27.717.400,00	27.717.400,00	27.717.400,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			245.779.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Angka prevelensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)*				-	61.6 %	315.095.400,00	315.095.400,00	825.021.400,00	509.926.000,00			-	- -	stakeholder dan mitra kerja		165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				-	49 Unit	0,00	0,00	509.926.000,00	509.926.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				15 Kampung	15 Kampung	315.095.400,00	315.095.400,00	315.095.400,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**				**-**	**76 %**	**457.897.340,00**	**378.217.800,00**	**5.567.124.600,00**	**643.100.360,00**							**1.100.997.700,00**	
		[Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga]	**Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**	**80**	**75**	**76**	-	-	**457.897.340,00**	**378.217.800,00**	**5.567.124.600,00**	-	-	-	-	-	-	**76**	**1.100.997.700,00**	-
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	457.897.340,00	378.217.800,00	379.524.600,00	-78.372.740,00			-	- -	-		1.100.997.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				200 Laporan	200 Laporan	199.707.100,00	157.955.600,00	159.263.100,00	-40.444.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			275.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				15 Unit	15 Unit	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			33.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				200 Orang	200 Orang	39.792.000,00	39.391.800,00	39.391.500,00	-400.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			82.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1000 Laporan	1000 Laporan	54.852.800,00	54.852.800,00	54.852.800,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			423.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				12 Orang	12 Orang	109.545.440,00	72.017.600,00	72.017.200,00	-37.528.240,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	- -			286.997.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	0,00	5.187.600.000,00	5.187.600.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	0 laporan	0,00	0,00	1.179.000.000,00	1.179.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	0 laporan	0,00	0,00	4.008.600.000,00	4.008.600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN							**70.201.370.910,00**	**89.913.326.558,00**	**82.648.275.048,00**	**12.446.904.138,00**							**244.935.615.917,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**70.201.370.910,00**	**89.913.326.558,00**	**82.648.275.048,00**	**12.446.904.138,00**							**244.935.615.917,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**70.201.370.910,00**	**89.913.326.558,00**	**82.648.275.048,00**	**12.446.904.138,00**							**244.935.615.917,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah** **Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**100** **90 %** **%**	**100** **90 %** **%** **%**	**45.617.403.929,00**	**51.845.950.128,00**	**49.707.861.620,00**	**5.572.270.068,00**							**51.189.673.997,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**45.617.403.929,00**	**51.845.950.128,00**	**49.707.861.620,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**51.189.673.997,00**	-
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun*				100 %	100 %	57.918.600,00	45.568.600,00	45.568.600,00	-12.350.000,00			-	- -	-		113.457.851,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	25.549.000,00	13.199.000,00	13.199.000,00	-12.350.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			43.826.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.508.300,00	5.508.300,00	5.508.300,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.111.895,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.998.200,00	3.998.200,00	3.998.200,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.187.418,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.477.200,00	4.477.200,00	4.477.200,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.115.060,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.998.200,00	3.998.200,00	3.998.200,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.130.790,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	14.387.700,00	14.387.700,00	14.387.700,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.086.688,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				100 %	100 %	16.879.318.107,00	16.894.219.035,00	15.354.025.035,00	-1.525.293.072,00			-	- -	-		24.948.475.662,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				133 Orang/ bulan	133 Orang/ bulan	16.130.888.907,00	16.131.024.535,00	14.595.411.335,00	-1.535.477.572,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	476.640.000,00	476.160.000,00	475.200.000,00	-1.440.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			575.040.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	256.590.300,00	267.188.200,00	263.567.600,00	6.977.300,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			199.096.027,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.379.000,00	12.725.600,00	12.725.400,00	4.346.400,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.539.635,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.819.900,00	7.120.700,00	7.120.700,00	300.800,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**45.617.403.929,00**	**51.845.950.128,00**	**49.707.861.620,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**51.189.673.997,00**	-
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun*				100 %	100 %	336.000.000,00	830.000.000,00	310.000.000,00	-26.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	336.000.000,00	830.000.000,00	310.000.000,00	-26.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**45.617.403.929,00**	**51.845.950.128,00**	**49.707.861.620,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**51.189.673.997,00**	-
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun*				100 %	100 %	2.421.878.000,00	4.478.833.800,00	4.478.833.800,00	2.056.955.800,00			-	- -	-		768.713.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	1.515.878.000,00	2.231.833.800,00	2.231.833.800,00	715.955.800,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			659.813.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				166 Orang	432 Orang	906.000.000,00	2.247.000.000,00	2.247.000.000,00	1.341.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			108.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun*				100 %	100 %	493.848.500,00	1.328.708.900,00	942.560.100,00	448.711.600,00			-	- -	-		468.783.887,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	36.313.500,00	36.297.900,00	36.149.100,00	-164.400,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			80.825.943,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	72.584.800,00	72.584.800,00	72.584.800,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			16.729.944,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.908.000,00	266.969.000,00	266.969.000,00	166.061.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.410.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	34.042.200,00	33.857.200,00	33.857.200,00	-185.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			18.912.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	6 Dokumen	54.000.000,00	54.000.000,00	53.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			29.245.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	17 Laporan	196.000.000,00	865.000.000,00	480.000.000,00	284.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			297.660.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				100 %	100 %	6.925.597.000,00	11.796.216.525,00	11.452.267.700,00	4.526.670.700,00			-	- -	-		20.322.483.010,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	168.000.000,00	0,00	0,00	-168.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	7 Unit	5.433.664.400,00	10.732.704.225,00	10.313.725.400,00	4.880.061.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			17.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				168 Unit	115 Unit	648.541.500,00	524.930.500,00	599.960.500,00	-48.581.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			22.483.010,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				85 Unit	48 Unit	675.391.100,00	538.581.800,00	538.581.800,00	-136.809.300,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			2.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				100 %	100 %	15.470.499.488,00	13.085.524.368,00	13.830.288.368,00	-1.640.211.120,00			-	- -	-		3.140.545.622,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	20.613.400,00	20.613.400,00	20.613.400,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			31.504.770,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.995.289.248,00	1.995.289.248,00	1.988.570.848,00	-6.718.400,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	13.454.596.840,00	11.069.621.720,00	11.821.104.120,00	-1.633.492.720,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.509.040.852,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				100 %	100 %	3.032.344.234,00	3.386.878.900,00	3.294.318.017,00	261.973.783,00			-	- -	-		1.427.214.965,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.130.000,00	42.130.000,00	27.040.000,00	-15.090.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			50.977.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				72 Unit	72 Unit	1.100.020.000,00	1.154.020.000,00	1.256.549.117,00	156.529.117,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			1.151.823.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				126 Unit	126 Unit	85.510.000,00	85.510.000,00	85.510.000,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			94.101.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.804.684.234,00	2.105.218.900,00	1.925.218.900,00	120.534.666,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			130.312.765,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kinerja Lalu Lintas Kota Rasio Konektivitas Kota Kinerja lalu lintas Kabupaten/ Kota Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal**				**60 0,61 %**	**0,46 60 % undefined %**	**20.867.591.001,00**	**31.543.334.450,00**	**30.213.327.778,00**	**112.315.350.919,00**							**133.182.941.920,00**	
		[Konektivitas Darat]	**Konektivitas Darat**	**0.66**	**0.59**	**0.61**	-	-	**20.867.591.001,00**	**31.543.334.450,00**	**30.213.327.778,00**	-	-	-	-	-	-	**0.62**	**133.182.941.920,00**	-
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang terpelihara Jumlah Perlengkapan Jalan yang tersedia Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia*				100 %	% 100 %	7.384.927.401,00	9.336.047.530,00	7.776.310.558,00	391.383.157,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	SKPD		15.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				215 Unit	275 Unit	4.564.067.700,00	6.483.548.558,00	6.423.548.558,00	1.859.480.858,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			9.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				30000 Unit	100 Unit	2.820.859.701,00	2.852.498.972,00	1.352.762.000,00	-1.468.097.701,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Yang Terlaksana*				-	100 %	96.648.200,00	86.648.200,00	90.792.200,00	-5.856.000,00			-	- -	-		123.840.860,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				1 Dokumen	1 Dokumen	96.648.200,00	86.648.200,00	90.792.200,00	-5.856.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			123.840.860,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Terlaksana*				2 Laporan	100 %	1.874.824.900,00	4.020.872.500,00	4.231.533.200,00	2.356.708.300,00			-	- -	-		2.962.306.270,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	1.874.824.900,00	4.020.872.500,00	4.231.533.200,00	2.356.708.300,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.962.306.270,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				100 %	100 %	8.266.379.980,00	12.955.349.500,00	13.328.183.100,00	5.061.803.120,00			-	- -	-		20.304.527.584,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	4 Laporan	435.620.400,00	355.586.900,00	728.420.500,00	292.800.100,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.950.643.016,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	4 Laporan	112.580.800,00	2.292.084.800,00	2.292.084.800,00	2.179.504.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			83.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				15 Laporan	13 Laporan	7.718.178.780,00	10.307.677.800,00	10.307.677.800,00	2.589.499.020,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			4.270.284.568,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Andalalin untuk Jalan Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan*				50 Dokumen	100 %	123.677.100,00	123.677.100,00	123.677.100,00	0,00			-	- -	-		255.706.368,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				50 Laporan	12 Laporan	3.532.400,00	3.532.400,00	3.532.400,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			87.252.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin																		
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				5 Orang	5 Orang	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			48.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				6 Laporan	4 Laporan	28.373.200,00	28.373.200,00	28.373.200,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			87.252.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin																		
			Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan				50 Dokumen	40 Dokumen	24.271.500,00	24.271.500,00	24.271.500,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			33.202.368,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Yang Terlaksana*				1 Laporan	100 %	249.899.120,00	249.899.120,00	256.763.120,00	6.864.000,00			-	- -	-		458.333.392,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	1 Laporan	31.581.900,00	31.581.900,00	35.771.900,00	4.190.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			36.162.676,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				2 Laporan	2 Laporan	218.317.220,00	218.317.220,00	220.991.220,00	2.674.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			422.170.716,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana Yang Tersedia*				30 %	100 %	2.118.341.300,00	4.429.653.700,00	4.329.704.200,00	2.211.362.900,00			-	- -	-		91.279.591.446,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	70.853.000,00	54.715.400,00	66.890.900,00	-3.962.100,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				80 Unit	3 Unit	2.047.488.300,00	4.374.938.300,00	4.262.813.300,00	2.215.325.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			90.979.591.446,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan*				100 %	100 %	161.075.300,00	76.561.700,00	0,00	-161.075.300,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	5.988.800,00	0,00	0,00	-5.988.800,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	155.086.500,00	76.561.700,00	0,00	-155.086.500,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan*				100 %	100 %	135.567.900,00	96.701.300,00	19.188.100,00	-116.379.800,00			-	- -	-		1.528.190.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	4.371.500,00	0,00	0,00	-4.371.500,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.328.190.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	56.447.200,00	39.888.100,00	19.188.100,00	-37.259.100,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	0 Dokumen	74.749.200,00	56.813.200,00	0,00	-74.749.200,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan*				100 %	100 %	127.763.400,00	66.728.400,00	57.176.200,00	-70.587.200,00			-	- -	-		210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan	4 Laporan	72.576.200,00	57.176.200,00	57.176.200,00	-15.400.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				4 Unit	0 Unit	55.187.200,00	9.552.200,00	0,00	-55.187.200,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan*				100 %	%	328.486.400,00	101.195.400,00	0,00	-328.486.400,00			-	- -	-		410.445.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	52.725.600,00	34.762.800,00	0,00	-52.725.600,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	0 Dokumen	95.444.400,00	8.095.800,00	0,00	-95.444.400,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			210.445.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	180.316.400,00	58.336.800,00	0,00	-180.316.400,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Rasio Konektivitas Penyeberangan**				**0,76 undefined**	**0,76 %**	**3.716.375.980,00**	**6.524.041.980,00**	**2.727.085.650,00**	**56.846.624.020,00**							**60.563.000.000,00**	
		[Konektivitas Laut]	**Konektivitas Laut**	**0.80**	**0.74**	**0.75**	-	-	**3.716.375.980,00**	**6.524.041.980,00**	**2.727.085.650,00**	-	-	-	-	-	-	**0.76**	**60.563.000.000,00**	-
	2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan*				100 %	%	25.908.800,00	7.958.800,00	0,00	-25.908.800,00			-	- -	-		181.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	0 Dokumen	25.908.800,00	7.958.800,00	0,00	-25.908.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			181.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	*Persentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Yang Diterbitkan*				100 %	%	35.090.800,00	9.290.800,00	0,00	-35.090.800,00			-	- -	-		181.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	0 Dokumen	35.090.800,00	9.290.800,00	0,00	-35.090.800,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			181.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Persentase Pembangunan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Yang Terlaksana*				100 %	100 %	3.655.376.380,00	6.506.792.380,00	2.727.085.650,00	-928.290.730,00			-	- -	-		60.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	3.079.714.200,00	2.843.786.200,00	1.843.786.200,00	-1.235.928.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			60.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	173.827.400,00	19.207.400,00	22.327.400,00	-151.500.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				12 Laporan	1 Laporan	401.834.780,00	3.643.798.780,00	860.972.050,00	459.137.270,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR							**2.202.186.340,00**	**4.330.117.740,00**	**4.330.153.376,00**	**2.127.967.036,00**							**2.640.303.683,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.202.186.340,00**	**4.330.117.740,00**	**4.330.153.376,00**	**2.127.967.036,00**							**2.640.303.683,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**2.202.186.340,00**	**4.330.117.740,00**	**4.330.153.376,00**	**2.127.967.036,00**							**2.640.303.683,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kinerja Lalu Lintas Kota / Kota** **Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal**				**60** **0,47 %** **undefined**	**0,46** **60** **%**	**2.202.186.340,00**	**4.330.117.740,00**	**4.330.153.376,00**	**438.117.343,00**							**2.640.303.683,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.202.186.340,00**	**4.330.117.740,00**	**4.330.153.376,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.640.303.683,00**	-
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Terlaksana*				100 %	100 %	2.202.186.340,00	4.330.117.740,00	4.330.153.376,00	2.127.967.036,00			-	- -	-		2.640.303.683,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	11.891.300,00	2.439.545.500,00	2.439.545.500,00	2.427.654.200,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			148.850.763,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12 Dokumen	12 Dokumen	348.223.100,00	348.222.400,00	348.198.500,00	-24.600,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			1.750.085.920,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				12 Unit	12 Unit	392.443.500,00	392.325.200,00	392.325.200,00	-118.300,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			574.387.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12 Laporan	12 Laporan	1.449.628.440,00	1.150.024.640,00	1.150.084.176,00	-299.544.264,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			166.980.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPT PENERANGAN JALAN UMUM							**69.733.623.750,00**	**74.697.970.558,00**	**85.492.934.604,00**	**15.759.310.854,00**							**93.000.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**69.733.623.750,00**	**74.697.970.558,00**	**85.492.934.604,00**	**15.759.310.854,00**							**93.000.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**69.733.623.750,00**	**74.697.970.558,00**	**85.492.934.604,00**	**15.759.310.854,00**							**93.000.000.000,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota** **Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap kondisi Ideal**				**60** **0,47 %**	**0,46** **60** **%**	**69.733.623.750,00**	**74.697.970.558,00**	**85.492.934.604,00**	**23.266.376.250,00**							**93.000.000.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia*				100 %	100 %	69.733.623.750,00	74.697.970.558,00	85.492.934.604,00	15.759.310.854,00			-	- -	-		93.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				520 Unit	562 Unit	10.389.985.050,00	13.246.895.158,00	13.239.092.904,00	2.849.107.854,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	- -			14.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				30000 Unit	30000 Unit	59.343.638.700,00	61.451.075.400,00	72.253.841.700,00	12.910.203.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	- -			79.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**80.624.170.930,00**	**77.623.738.080,00**	**78.208.312.353,00**	**-2.415.858.577,00**							**87.544.191.417,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**80.624.170.930,00**	**77.623.738.080,00**	**78.208.312.353,00**	**-2.415.858.577,00**							**87.544.191.417,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**75.585.066.930,00**	**74.869.743.123,00**	**75.485.544.326,00**	**-99.522.604,00**							**87.544.191.417,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**14.149.796.134,00**	**15.989.574.527,00**	**17.041.922.432,00**	**1.081.177.122,00**							**15.230.973.256,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**14.149.796.134,00**	**15.989.574.527,00**	**17.041.922.432,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**15.230.973.256,00**	-
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				-	100 %	65.070.200,00	7.100.000,00	5.980.000,00	-59.090.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	38.153.800,00	7.100.000,00	5.980.000,00	-32.173.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.857.300,00	0,00	0,00	-2.857.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.857.800,00	0,00	0,00	-2.857.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.168.400,00	0,00	0,00	-9.168.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.176.300,00	0,00	0,00	-9.176.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.856.600,00	0,00	0,00	-2.856.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketersedian Laporan keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	10.266.476.714,00	10.321.711.091,00	9.933.451.786,00	-333.024.928,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		11.748.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	9.665.295.914,00	9.713.644.491,00	9.325.385.186,00	-339.910.728,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			11.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	372.720.000,00	394.920.000,00	394.920.000,00	22.200.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			495.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	208.828.500,00	213.146.600,00	213.146.600,00	4.318.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.188.500,00	0,00	0,00	-4.188.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15.443.800,00	0,00	0,00	-15.443.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur]	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**	**90**	**90**	**90**	-	-	**14.149.796.134,00**	**15.989.574.527,00**	**17.041.922.432,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**15.230.973.256,00**	-
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	266.250.000,00	323.250.000,00	377.815.895,00	111.565.895,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				135 Paket	135 Paket	101.250.000,00	101.250.000,00	95.937.300,00	-5.312.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				17 Orang	16 Orang	165.000.000,00	222.000.000,00	281.878.595,00	116.878.595,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			385.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.483.850.400,00	1.454.942.456,00	891.825.465,00	-592.024.935,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		1.166.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	8 Paket	11.986.500,00	8.338.000,00	8.338.000,00	-3.648.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				63 Paket	62 Paket	132.659.000,00	124.224.000,00	110.886.500,00	-21.772.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			132.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	13 Paket	94.755.600,00	104.625.456,00	100.955.965,00	6.200.365,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	4.655.200,00	19.545.000,00	22.365.000,00	17.709.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	60 Dokumen	44.940.000,00	44.940.000,00	34.010.000,00	-10.930.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	100 Laporan	5.000.000,00	49.375.000,00	47.375.000,00	42.375.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	130 Laporan	1.178.486.000,00	1.101.486.000,00	565.486.000,00	-613.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			770.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.368.100,00	2.409.000,00	2.409.000,00	-8.959.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah*				-	100 %	460.097.200,00	1.226.431.920,00	3.320.837.920,00	2.860.740.720,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		77.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	28 Unit	144.525.000,00	143.400.000,00	143.400.000,00	-1.125.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	58 Unit	315.572.200,00	1.083.031.920,00	3.177.437.920,00	2.861.865.720,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	1.125.711.620,00	2.069.889.060,00	1.975.241.366,00	849.529.746,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		907.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1 Laporan	31.374.900,00	26.500.000,00	24.500.000,00	-6.874.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				168 Laporan	273 Laporan	108.442.500,00	109.467.000,00	69.727.046,00	-38.715.454,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				154 Laporan	117 Laporan	985.894.220,00	1.933.922.060,00	1.881.014.320,00	895.120.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			715.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				-	100 %	482.340.000,00	586.250.000,00	536.770.000,00	54.430.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		672.473.256,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	27.040.000,00	27.040.000,00	-17.340.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.973.256,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	17 Unit	346.740.000,00	512.360.000,00	441.380.000,00	94.640.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			511.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				150 Unit	65 Unit	91.220.000,00	46.850.000,00	68.350.000,00	-22.870.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah**				**-**	**75 %**	**16.250.865.380,00**	**17.239.964.571,00**	**21.417.258.171,00**	**20.871.734.620,00**							**37.122.600.000,00**	
		[Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah]	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah**	**83**	**0**	**75**	-	-	**16.250.865.380,00**	**17.239.964.571,00**	**21.417.258.171,00**	-	-	-	-	-	-	**75**	**37.122.600.000,00**	-
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	16.250.865.380,00	17.239.964.571,00	21.417.258.171,00	5.166.392.791,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		37.122.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																		
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				12 Laporan	12 Laporan	189.462.800,00	132.787.200,00	132.787.200,00	-56.675.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			97.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				30 Permohonan	30 Permohonan	287.458.200,00	62.438.400,00	60.838.400,00	-226.619.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.161.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	1.010.031.500,00	250.800.000,00	250.800.000,00	-759.231.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.320.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				178 Media	368 Media	14.763.912.880,00	16.793.938.971,00	20.972.832.571,00	6.208.919.691,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			34.543.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase SKPD yang mengimplemen-tasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**				**100 %**	**100 %**	**45.184.405.416,00**	**41.640.204.025,00**	**37.026.363.723,00**	**-9.993.787.255,00**							**35.190.618.161,00**	
		[Persentase SKPD yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan]	**Persentase SKPD yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**	**100**	**0**	**100**	-	-	**45.184.405.416,00**	**41.640.204.025,00**	**37.026.363.723,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**35.190.618.161,00**	-
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disusun*				100 %	100 %	45.184.405.416,00	41.640.204.025,00	37.026.363.723,00	-8.158.041.693,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	SKPD		35.190.618.161,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	4 Dokumen	622.100.000,00	822.000.000,00	821.229.000,00	199.129.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			334.510.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	1.149.109.000,00	472.082.750,00	976.980.150,00	-172.128.850,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			6.390.849.080,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																		
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				4 Layanan	4 Layanan	1.656.560.000,00	2.035.100.000,00	1.743.868.720,00	87.308.720,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				10 Aplikasi	10 Aplikasi	829.619.600,00	1.582.624.000,00	1.799.680.000,00	970.060.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.049.780.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Aplikasi	3 Aplikasi	80.100.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	-66.700.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			88.110.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				2 Laporan	1 Laporan	116.448.200,00	104.764.200,00	104.764.200,00	-11.684.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet																		
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	31.533.249.016,00	24.939.336.816,00	23.974.564.323,00	-7.558.684.693,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			18.557.209.281,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				20 Dokumen	39 Dokumen	9.197.219.600,00	11.670.896.259,00	7.591.877.330,00	-1.605.342.270,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.770.159.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**1.594.818.880,00**	**1.328.249.857,00**	**1.313.841.927,00**	**-280.976.953,00**							**0,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase OPD yang MenggunakanData Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah**				**-**	**89 89 % %**	**1.594.818.880,00**	**1.328.249.857,00**	**1.313.841.927,00**	**-1.594.818.880,00**							**0,00**	
		[Persentase SKPD Yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah]	**Persentase SKPD Yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**100**	**76**	**100**	-	-	**1.594.818.880,00**	**1.328.249.857,00**	**1.313.841.927,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral Di Pemerintah Kota Makassar*				-	100 %	1.594.818.880,00	1.328.249.857,00	1.313.841.927,00	-280.976.953,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				85 %	85 %	117.670.700,00	253.390.150,00	253.390.150,00	135.719.450,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				85 %	85 %	679.874.100,00	52.219.000,00	52.219.000,00	-627.655.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				85 %	85 %	268.855.000,00	104.600.000,00	130.100.000,00	-138.755.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				100 Orang	400 Orang	120.274.180,00	217.016.707,00	184.016.707,00	63.742.527,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				85 %	85 %	408.144.900,00	701.024.000,00	694.116.070,00	285.971.170,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**3.444.285.120,00**	**1.425.745.100,00**	**1.408.926.100,00**	**-2.035.359.020,00**							**0,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**				**-**	**49 %**	**3.444.285.120,00**	**1.425.745.100,00**	**1.408.926.100,00**	**-3.444.285.120,00**							**0,00**	
		[ingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah]	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**62**	**41**	**49**	-	-	**3.444.285.120,00**	**1.425.745.100,00**	**1.408.926.100,00**	-	-	-	-	-	-	**49**	**0,00**	-
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah*				-	65 %	3.182.165.220,00	1.281.114.900,00	1.366.342.900,00	-1.815.822.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				23 Laporan	15 Laporan	971.019.400,00	519.777.900,00	599.777.900,00	-371.241.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				4 Laporan	8 Laporan	194.650.800,00	105.600.000,00	105.600.000,00	-89.050.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	1.805.079.020,00	477.072.000,00	460.200.000,00	-1.344.879.020,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				2 Dokumen	2 Dokumen	211.416.000,00	178.665.000,00	200.765.000,00	-10.651.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah Dalam Jaring Komunikasi Sandi*				-	100 %	262.119.900,00	144.630.200,00	42.583.200,00	-219.536.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				1 Kegiatan	2 Kegiatan	262.119.900,00	144.630.200,00	42.583.200,00	-219.536.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		UPT WAR ROOM							**4.998.599.070,00**	**2.868.667.607,00**	**2.613.728.342,00**	**-2.384.870.728,00**							**5.517.076.477,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.998.599.070,00**	**2.868.667.607,00**	**2.613.728.342,00**	**-2.384.870.728,00**							**5.517.076.477,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**4.998.599.070,00**	**2.868.667.607,00**	**2.613.728.342,00**	**-2.384.870.728,00**							**5.517.076.477,00**	
1.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase SKPD yang Mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**				**-**	**100 %**	**4.998.599.070,00**	**2.868.667.607,00**	**2.613.728.342,00**	**518.477.407,00**							**5.517.076.477,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.998.599.070,00**	**2.868.667.607,00**	**2.613.728.342,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**5.517.076.477,00**	-
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana*				-	100 %	4.998.599.070,00	2.868.667.607,00	2.613.728.342,00	-2.384.870.728,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		5.517.076.477,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				12 Laporan	12 Laporan	4.998.599.070,00	2.868.667.607,00	2.613.728.342,00	-2.384.870.728,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.517.076.477,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							**19.613.943.180,00**	**22.731.084.030,00**	**23.106.600.000,00**	**3.492.656.820,00**							**1.729.107.880,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.613.943.180,00**	**22.731.084.030,00**	**23.106.600.000,00**	**3.492.656.820,00**							**1.729.107.880,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**19.613.943.180,00**	**22.731.084.030,00**	**23.106.600.000,00**	**3.492.656.820,00**							**1.729.107.880,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**100 %**	**100** **90 %** **%**	**9.935.963.120,00**	**11.021.002.810,00**	**10.787.058.920,00**	**-8.206.855.240,00**							**1.729.107.880,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**9.935.963.120,00**	**11.021.002.810,00**	**10.787.058.920,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.729.107.880,00**	-
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun*				100 %	100 %	79.724.000,00	59.513.600,00	68.972.700,00	-10.751.300,00			-	- -	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKP		86.897.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	39.225.900,00	37.830.700,00	42.814.200,00	3.588.300,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			39.225.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.975.500,00	7.132.500,00	7.131.200,00	-844.300,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.975.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.037.800,00	3.496.000,00	3.486.400,00	-1.551.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.037.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.969.300,00	3.427.500,00	3.423.100,00	-1.546.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.969.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.156.100,00	1.542.300,00	1.542.300,00	-3.613.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.156.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	11.532.400,00	3.871.400,00	3.871.400,00	-7.661.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.532.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	5.827.000,00	2.213.200,00	6.704.100,00	877.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			13.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	7.899.848.180,00	7.927.618.460,00	7.416.995.460,00	-482.852.720,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	7.346.310.580,00	7.356.511.560,00	6.857.608.560,00	-488.702.020,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	12 Dokumen	345.929.800,00	377.707.000,00	363.187.000,00	17.257.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	12 Dokumen	181.151.500,00	180.998.500,00	182.598.500,00	1.447.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	2 Dokumen	3.990.000,00	1.529.800,00	1.529.800,00	-2.460.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	6 Laporan	6.132.000,00	4.571.300,00	5.771.300,00	-360.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	4 Dokumen	5.625.000,00	2.011.200,00	2.011.200,00	-3.613.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	12 Laporan	4.349.300,00	2.747.500,00	2.747.500,00	-1.601.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	2 Dokumen	6.360.000,00	1.541.600,00	1.541.600,00	-4.818.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.935.963.120,00**	**11.021.002.810,00**	**10.787.058.920,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.729.107.880,00**	-
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	501.414.480,00	336.000.000,00	310.000.000,00	-191.414.480,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Tahun Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	336.000.000,00	310.000.000,00	-26.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	3 Laporan	165.414.480,00	0,00	0,00	-165.414.480,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**9.935.963.120,00**	**11.021.002.810,00**	**10.787.058.920,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.729.107.880,00**	-
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun*				3 Laporan	100 %	333.030.560,00	1.259.250.000,00	927.750.000,00	594.719.440,00			-	- -	Laporan Administrasi Kepegawaian SKPD		463.014.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				79 Paket	97 Paket	59.250.000,00	59.250.000,00	59.250.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			59.250.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	4 Dokumen	129.780.560,00	0,00	0,00	-129.780.560,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			259.764.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	144.000.000,00	1.200.000.000,00	868.500.000,00	724.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			144.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun*				6 Laporan	100 %	546.981.100,00	466.997.710,00	758.224.920,00	211.243.820,00			-	- -	Laporan Administrasi Umum SKPD		552.628.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	89.036.100,00	77.143.900,00	204.511.028,00	115.474.928,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			94.410.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	54.414.500,00	43.419.310,00	76.279.392,00	21.864.892,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			54.414.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.710.500,00	22.434.500,00	22.434.500,00	-3.276.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.984.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				23 Dokumen	23 Dokumen	36.420.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-9.420.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			36.420.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	21 Laporan	323.400.000,00	279.000.000,00	328.000.000,00	4.600.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			323.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	100.000.000,00	82.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			18.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				-	100 %	0,00	0,00	420.212.500,00	420.212.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	420.212.500,00	420.212.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				3 Laporan	100 %	208.215.820,00	592.234.400,00	514.054.700,00	305.838.880,00			-	- -	Laporan Jasa Penunjang Urusan SKPD		247.208.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	142.871.820,00	81.346.400,00	1.949.600,00	-140.922.220,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			181.864.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	55.800.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	3.600.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			55.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.935.963.120,00**	**11.021.002.810,00**	**10.787.058.920,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.729.107.880,00**	-
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	9.544.000,00	451.488.000,00	452.705.100,00	443.161.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			9.544.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**9.935.963.120,00**	**11.021.002.810,00**	**10.787.058.920,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.729.107.880,00**	-
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				-	100 %	366.748.980,00	379.388.640,00	370.848.640,00	4.099.660,00			-	- -	-		379.358.980,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.130.000,00	43.130.000,00	27.040.000,00	-16.090.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			43.130.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	224.370.000,00	224.370.000,00	232.330.000,00	7.960.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			236.980.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 Unit	57 Unit	39.370.000,00	32.050.000,00	31.640.000,00	-7.730.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			39.370.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	59.878.980,00	79.838.640,00	79.838.640,00	19.959.660,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			59.878.980,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**				**15.63 %**	**15.63 %**	**552.073.800,00**	**375.597.500,00**	**375.597.500,00**	**-552.073.800,00**							**0,00**	
		[Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi]	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**16**	**4.45**	**15.63**	-	-	**552.073.800,00**	**375.597.500,00**	**375.597.500,00**	-	-	-	-	-	-	**15.63**	**0,00**	-
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Yang Terfasilitasi*				953 Unit Usaha	Unit Usaha 30	318.795.900,00	207.519.600,00	207.519.600,00	-111.276.300,00			-	- -	Koperasi yang ada Kota Makassar		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				953 Unit Usaha	210 Unit Usaha	318.795.900,00	207.519.600,00	207.519.600,00	-111.276.300,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Yang Terfasilitasi*				650 Unit Usaha	4 Unit Usaha	233.277.900,00	168.077.900,00	168.077.900,00	-65.200.000,00			-	- -	Koperasi yang ada di Kota Makassar		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				650 Unit Usaha	210 Unit Usaha	233.277.900,00	168.077.900,00	168.077.900,00	-65.200.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**				**27 %**	**27 %**	**994.391.980,00**	**733.914.500,00**	**629.007.100,00**	**-994.391.980,00**							**0,00**	
		[Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi]	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**28**	**26.40**	**27**	-	-	**994.391.980,00**	**733.914.500,00**	**629.007.100,00**	-	-	-	-	-	-	**27**	**0,00**	-
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Terlaksana*				-	653 Unit Usaha	994.391.980,00	733.914.500,00	629.007.100,00	-365.384.880,00			-	- -	Koperasi yang ada di Kota Makassar		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				403 Unit Usaha	653 Unit Usaha	737.660.700,00	548.159.700,00	545.474.700,00	-192.186.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				403 Unit Usaha	653 Unit Usaha	256.731.280,00	185.754.800,00	83.532.400,00	-173.198.880,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**				**44.50 76.15 % %**	**44.50 %**	**563.932.480,00**	**497.993.000,00**	**317.023.000,00**	**-563.932.480,00**							**0,00**	
		[Persentase koperasi aktif]	**Persentase koperasi aktif**	**44.50**	**44.43**	**44.50**	-	-	**563.932.480,00**	**497.993.000,00**	**317.023.000,00**	-	-	-	-	-	-	**44.50**	**0,00**	-
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya*				916 Unit Usaha	15 %	563.932.480,00	497.993.000,00	317.023.000,00	-246.909.480,00			-	- -	Koperasi, KSP, USP yang ada di Kota Makassar		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				263 Unit Usaha	180 Unit Usaha	325.834.480,00	261.099.600,00	186.719.600,00	-139.114.880,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				653 Unit Usaha	180 Unit Usaha	238.098.000,00	236.893.400,00	130.303.400,00	-107.794.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**				**-**	**20.55 %**	**437.358.100,00**	**354.352.900,00**	**354.252.100,00**	**-437.358.100,00**							**0,00**	
		[Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan]	**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**	**21.92**	**26.94**	**20.55**	-	-	**437.358.100,00**	**354.352.900,00**	**354.252.100,00**	-	-	-	-	-	-	**20.55**	**0,00**	-
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengurus Koperasi yang diberikan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian*				-	400 Orang	437.358.100,00	354.352.900,00	354.252.100,00	-83.106.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				0 Orang	400 Orang	437.358.100,00	354.352.900,00	354.252.100,00	-83.106.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**				**-**	**27.50 %**	**1.264.618.200,00**	**2.554.060.400,00**	**3.021.047.800,00**	**-1.264.618.200,00**							**0,00**	
		[Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas]	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	**29**	**27.23**	**27.50**	-	-	**1.264.618.200,00**	**2.554.060.400,00**	**3.021.047.800,00**	-	-	-	-	-	-	**27.50**	**0,00**	-
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koperasi yang diberikan Pembinaan*				-	60 %	1.264.618.200,00	2.554.060.400,00	3.021.047.800,00	1.756.429.600,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi																		
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				20 Kelompok Masyarakat	24 Kelompok Masyarakat	218.838.800,00	833.705.000,00	767.915.000,00	549.076.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				100 Unit Usaha	253 Unit Usaha	277.655.600,00	878.498.600,00	828.362.000,00	550.706.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				353 Unit Usaha	253 Unit Usaha	415.504.400,00	171.447.800,00	541.947.800,00	126.443.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				153 Unit Usaha	153 Unit Usaha	352.619.400,00	670.409.000,00	882.823.000,00	530.203.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Pertumbuhan Wirausaha Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal**				**15 14.5 % %**	**14.5 15 % %**	**2.539.227.300,00**	**2.007.792.600,00**	**1.468.496.000,00**	**-2.539.227.300,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal]	**Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal**	**40**	**10.45**	**15**	-	-	**2.539.227.300,00**	**2.007.792.600,00**	**1.468.496.000,00**	-	-	-	-	-	-	**15**	**0,00**	-
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan melalui Pendataan dengan para Pemangku Kepentingan*				-	2000 Unit Usaha	2.539.227.300,00	2.007.792.600,00	1.468.496.000,00	-1.070.731.300,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				460 Unit Usaha	590 Unit Usaha	163.232.600,00	101.832.600,00	147.392.600,00	-15.840.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				0 Unit Usaha	700 Unit Usaha	419.982.400,00	205.444.800,00	205.388.800,00	-214.593.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	369.987.800,00	220.937.800,00	217.387.800,00	-152.600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				50 Unit Usaha	15 Unit Usaha	487.407.400,00	377.787.400,00	178.694.900,00	-308.712.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				0 Unit Usaha	6000 Unit Usaha	672.662.800,00	511.237.900,00	141.252.900,00	-531.409.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				0 Orang	600 Orang	425.954.300,00	590.552.100,00	578.379.000,00	152.424.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor**				**1 %**	**1 %**	**3.326.378.200,00**	**5.186.370.320,00**	**6.154.117.580,00**	**-3.326.378.200,00**							**0,00**	
		[Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor]	**Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor**	**0.75**	**0**	**1**	-	-	**3.326.378.200,00**	**5.186.370.320,00**	**6.154.117.580,00**	-	-	-	-	-	-	**1**	**0,00**	-
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Usaha Mikro yang Berorientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Yang berkembang*				-	2000 Unit Usaha	3.326.378.200,00	5.186.370.320,00	6.154.117.580,00	2.827.739.380,00			-	- -	UMKM yang ada di Kota Makassar		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				2000 Unit Usaha	5000 Unit Usaha	1.434.480.300,00	1.252.272.520,00	1.268.663.160,00	-165.817.140,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				970 Unit Usaha	1000 Unit Usaha	1.891.897.900,00	3.934.097.800,00	4.885.454.420,00	2.993.556.520,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		UPT PUSAT LAYANAN USAHA LORONG							**308.985.820,00**	**353.417.320,00**	**353.500.000,00**	**44.514.180,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**308.985.820,00**	**353.417.320,00**	**353.500.000,00**	**44.514.180,00**							**0,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**308.985.820,00**	**353.417.320,00**	**353.500.000,00**	**44.514.180,00**							**0,00**	
1.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**				**-**	**-**	**308.985.820,00**	**353.417.320,00**	**353.500.000,00**	**-308.985.820,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**308.985.820,00**	**353.417.320,00**	**353.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-				-	-	308.985.820,00	353.417.320,00	353.500.000,00	44.514.180,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	308.985.820,00	353.417.320,00	353.500.000,00	44.514.180,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**22.548.655.000,00**	**22.394.902.191,00**	**23.393.200.000,00**	**844.545.000,00**							**24.295.419.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**22.548.655.000,00**	**22.394.902.191,00**	**23.393.200.000,00**	**844.545.000,00**							**24.295.419.400,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**22.548.655.000,00**	**22.394.902.191,00**	**23.393.200.000,00**	**844.545.000,00**							**24.295.419.400,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**-**	**100 90 Persen Persen**	**17.122.462.700,00**	**18.547.578.891,00**	**19.318.606.700,00**	**1.746.764.400,00**							**18.869.227.100,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**17.122.462.700,00**	**18.547.578.891,00**	**19.318.606.700,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**18.869.227.100,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 Persen	112.630.500,00	107.570.700,00	107.330.700,00	-5.299.800,00			-	- -	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		74.747.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.057.500,00	11.959.400,00	11.959.400,00	2.901.900,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.750.800,00	5.557.300,00	5.497.300,00	-2.253.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.557.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.688.800,00	5.382.300,00	5.322.300,00	-2.366.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.382.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.632.000,00	5.352.000,00	5.292.000,00	-2.340.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.352.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.854.000,00	5.457.900,00	5.397.900,00	-1.456.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.457.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	12.998.200,00	4.169.500,00	4.169.500,00	-8.828.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.998.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Berita Acara	1 Berita Acara	55.341.100,00	66.584.200,00	66.584.200,00	11.243.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				3 Dokumen	1 Dokumen	5.308.100,00	3.108.100,00	3.108.100,00	-2.200.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 Persen	11.473.930.600,00	11.476.135.171,00	12.008.035.621,00	534.105.021,00			-	- -	Pegawai dan laporan keuangan Perangkat Daerah		11.479.572.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	56 Orang/bulan	10.955.222.500,00	10.955.222.671,00	11.487.123.121,00	531.900.621,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.955.222.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	326.270.000,00	304.892.800,00	304.892.800,00	-21.377.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			326.270.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	182.046.000,00	198.079.500,00	198.079.500,00	16.033.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			198.079.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	10.392.100,00	17.940.200,00	17.940.200,00	7.548.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**17.122.462.700,00**	**18.547.578.891,00**	**19.318.606.700,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**18.869.227.100,00**	-
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersususn*				-	100 Persen	336.000.000,00	336.000.000,00	180.000.000,00	-156.000.000,00			-	- -	Barang milik daerah		336.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Tahun Laporan	12 Laporan	336.000.000,00	336.000.000,00	180.000.000,00	-156.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			336.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**17.122.462.700,00**	**18.547.578.891,00**	**19.318.606.700,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**18.869.227.100,00**	-
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 Persen	504.619.800,00	1.267.494.600,00	1.304.470.600,00	799.850.800,00			-	- -	Pegawai		1.267.494.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	9.619.800,00	294.314.600,00	313.290.600,00	303.670.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			294.314.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				150 Orang	100 Orang	495.000.000,00	973.180.000,00	991.180.000,00	496.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			973.180.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 Persen	764.155.160,00	868.169.000,00	1.089.873.179,00	325.718.019,00			-	- -	Pegawai, Masyarakat, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		928.962.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	16.431.200,00	16.546.000,00	16.546.000,00	114.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			16.546.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	3 Paket	63.637.300,00	132.127.700,00	96.953.700,00	33.316.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			132.127.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	40.768.100,00	28.090.300,00	31.450.300,00	-9.317.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.768.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	145.509.500,00	133.676.900,00	145.997.079,00	487.579,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			145.509.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	51.730.900,00	22.888.100,00	62.086.100,00	10.355.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			51.730.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	5 Dokumen	25.440.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-7.440.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.440.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3000 Laporan	12 Laporan	30.373.000,00	53.840.000,00	57.840.000,00	27.467.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			53.840.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	12 Laporan	197.000.000,00	202.000.000,00	240.000.000,00	43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			202.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2000 Dokumen	12 Dokumen	188.899.800,00	67.500.000,00	67.500.000,00	-121.399.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			67.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.365.360,00	193.500.000,00	353.500.000,00	349.134.640,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			193.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				-	100 Persen	965.886.600,00	1.281.193.500,00	1.642.303.300,00	676.416.700,00			-	- -	Barang Milik Daerah		1.284.624.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				105 Unit	120 Unit	254.195.400,00	250.764.000,00	623.901.000,00	369.705.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			254.195.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	80 Unit	711.691.200,00	1.030.429.500,00	1.018.402.300,00	306.711.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			1.030.429.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				-	100 Persen	2.399.170.040,00	2.691.235.920,00	2.477.803.300,00	78.633.260,00			-	- -	Pegawai, Masyarakat, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.825.055.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	368.332.180,00	234.512.600,00	208.172.600,00	-160.159.580,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			368.332.180,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	114.042.000,00	119.760.000,00	82.560.000,00	-31.482.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			119.760.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	1.916.795.860,00	2.336.963.320,00	2.187.070.700,00	270.274.840,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.336.963.320,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				-	100 Persen	566.070.000,00	519.780.000,00	508.790.000,00	-57.280.000,00			-	- -	Barang Milik Daerah		672.770.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.630.000,00	55.870.000,00	44.880.000,00	1.250.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			55.870.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	341.180.000,00	435.640.000,00	435.640.000,00	94.460.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			435.640.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	90 Unit	181.260.000,00	28.270.000,00	28.270.000,00	-152.990.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			181.260.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**				**2.600.000.000.000 99.000.000 120 340 Rupiah US$ Investor Investor**	**3 Milyar Rupiah**	**805.948.240,00**	**550.681.200,00**	**561.181.200,00**	**0,00**							**805.948.240,00**	
		[Realisasi Total terhadap Target Investasi]	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**4226959532250**	**3827931439043**	**3000000000000**	-	-	**805.948.240,00**	**550.681.200,00**	**561.181.200,00**	-	-	-	-	-	-	**3000000000000**	**805.948.240,00**	-
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang Diterbitkan*				2 Kebijakan	2 kegiatan	444.032.600,00	311.734.000,00	311.734.000,00	-132.298.600,00			-	- -	Pelaku Usaha		444.032.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	2 Dokumen	186.726.400,00	137.086.800,00	137.086.800,00	-49.639.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			186.726.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																		
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				50 Dokumen	4 Dokumen	257.306.200,00	174.647.200,00	174.647.200,00	-82.659.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			257.306.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Peta Potensi Investasi yang Tersusun*				-	1 Dokumen	361.915.640,00	238.947.200,00	249.447.200,00	-112.468.440,00			-	- -	Peta Potensi Investasi		361.915.640,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				15 Dokumen	1 Dokumen	361.915.640,00	238.947.200,00	249.447.200,00	-112.468.440,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			361.915.640,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Promosi Penanaman Modal**				**-**	**90 Persen**	**1.974.583.700,00**	**1.072.676.600,00**	**1.268.606.600,00**	**0,00**							**1.974.583.700,00**	
		[Persentase pemenuhan kebutuhan promosi penanaman modal]	**Persentase pemenuhan kebutuhan promosi penanaman modal**	**100**	**90**	**90**	-	-	**1.974.583.700,00**	**1.072.676.600,00**	**1.268.606.600,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.974.583.700,00**	-
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Diselenggarakan*				-	3 Kegiatan	1.974.583.700,00	1.072.676.600,00	1.268.606.600,00	-705.977.100,00			-	- -	Pameran Promosi Investasi		1.974.583.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	5 Dokumen	1.473.571.000,00	677.793.600,00	873.723.600,00	-599.847.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.473.571.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	501.012.700,00	394.883.000,00	394.883.000,00	-106.129.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			501.012.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**				**-**	**90 Persen**	**1.227.850.640,00**	**964.264.000,00**	**1.045.954.000,00**	**0,00**							**1.227.850.640,00**	
		[Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan]	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**100**	**80**	**90**	-	-	**1.227.850.640,00**	**964.264.000,00**	**1.045.954.000,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**1.227.850.640,00**	-
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizininan Bidang Penanaman Modal yang Diselenggarakan*				-	11 Jenis	1.227.850.640,00	964.264.000,00	1.045.954.000,00	-181.896.640,00			-	- -	Pelaku Usaha		1.227.850.640,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	292.603.200,00	78.478.500,00	109.478.500,00	-183.124.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			292.603.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				21000 Pelaku Usaha	3000 Pelaku Usaha	682.903.740,00	688.880.900,00	791.720.900,00	108.817.160,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			682.903.740,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				12 Pelaku Usaha	275 Pelaku Usaha	146.903.100,00	135.545.700,00	135.545.700,00	-11.357.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			146.903.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				12 Kegiatan Usaha	1000 Kegiatan Usaha	105.440.600,00	61.358.900,00	9.208.900,00	-96.231.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			105.440.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**				**-**	**90 Persen**	**302.456.200,00**	**330.978.000,00**	**258.128.000,00**	**0,00**							**302.456.200,00**	
		[Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha]	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**100**	**80**	**90**	-	-	**302.456.200,00**	**330.978.000,00**	**258.128.000,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**302.456.200,00**	-
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*				-	100 Persen	302.456.200,00	330.978.000,00	258.128.000,00	-44.328.200,00			-	- -	Pelaku Usaha		302.456.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				12 Kegiatan Usaha.	12 Kegiatan Usaha.	98.254.500,00	81.546.800,00	44.966.800,00	-53.287.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			98.254.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				12 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	116.676.500,00	141.377.800,00	108.257.800,00	-8.418.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			116.676.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	87.525.200,00	108.053.400,00	104.903.400,00	17.378.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			87.525.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**				**-**	**90 Persen**	**1.115.353.520,00**	**928.723.500,00**	**940.723.500,00**	**0,00**							**1.115.353.520,00**	
		[Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal]	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**100**	**80**	**90**	-	-	**1.115.353.520,00**	**928.723.500,00**	**940.723.500,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**1.115.353.520,00**	-
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*				-	12 Dokumen	1.115.353.520,00	928.723.500,00	940.723.500,00	-174.630.020,00			-	- -	Data dan Informasi Perizinan		1.115.353.520,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.115.353.520,00	928.723.500,00	940.723.500,00	-174.630.020,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.115.353.520,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							**111.257.178.000,00**	**120.749.807.202,00**	**80.310.300.000,00**	**-30.946.878.000,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.257.178.000,00**	**120.749.807.202,00**	**80.310.300.000,00**	**-30.946.878.000,00**							**0,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**111.257.178.000,00**	**120.749.807.202,00**	**80.310.300.000,00**	**-30.946.878.000,00**							**0,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100** **100** **90 %** **%** **%**	**11.303.027.700,00**	**11.635.179.000,00**	**12.718.692.783,00**	**-11.303.027.700,00**							**0,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**11.303.027.700,00**	**11.635.179.000,00**	**12.718.692.783,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen penganggaran dan laporan kinerja*				-	8 dok	54.460.000,00	66.593.600,00	66.593.600,00	12.133.600,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	24.590.700,00	49.326.200,00	49.326.200,00	24.735.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.225.300,00	3.148.200,00	3.148.200,00	-1.077.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.245.400,00	3.984.400,00	3.984.400,00	-261.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.245.400,00	3.984.400,00	3.984.400,00	-261.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.134.200,00	3.884.400,00	3.884.400,00	-249.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	13.019.000,00	2.266.000,00	2.266.000,00	-10.753.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase keuangan perangkat daerah*				-	100 %	8.032.007.840,00	8.081.487.840,00	8.022.257.823,00	-9.750.017,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	7.287.927.840,00	7.287.927.840,00	7.251.617.823,00	-36.310.017,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	528.080.000,00	577.560.000,00	554.640.000,00	26.560.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**11.303.027.700,00**	**11.635.179.000,00**	**12.718.692.783,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase capaian administrasi umum barang milik daerah SKPD*				-	100 %	336.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	-76.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	-76.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**11.303.027.700,00**	**11.635.179.000,00**	**12.718.692.783,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase capaian administrasi kepegawaian*				-	100 %	205.390.400,00	253.360.000,00	480.610.000,00	275.219.600,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	48.380.000,00	97.360.000,00	144.610.000,00	96.230.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	17.010.400,00	0,00	0,00	-17.010.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	140.000.000,00	156.000.000,00	336.000.000,00	196.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor lainnya*				-	100 %	460.183.900,00	455.234.600,00	1.126.742.400,00	666.558.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.255.500,00	1.197.500,00	0,00	-14.255.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	63.958.600,00	71.515.200,00	129.565.400,00	65.606.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.075.000,00	7.899.400,00	7.899.400,00	824.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	18.706.320,00	24.846.320,00	13.846.320,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.260.000,00	14.059.180,00	22.574.280,00	19.314.280,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.120.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-11.520.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	320.000.000,00	300.000.000,00	936.000.000,00	616.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.514.800,00	38.257.000,00	2.257.000,00	-23.257.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tersedianya barang milik kantor*				-	100 %	938.537.700,00	887.509.700,00	951.589.700,00	13.052.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	445.653.500,00	0,00	0,00	-445.653.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	492.884.200,00	887.509.700,00	951.589.700,00	458.705.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	929.637.860,00	1.379.703.260,00	1.486.573.260,00	556.935.400,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	19.180.000,00	0,00	0,00	-19.180.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	44.460.000,00	0,00	0,00	-44.460.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	865.997.860,00	1.379.703.260,00	1.486.573.260,00	620.575.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	346.810.000,00	251.290.000,00	324.326.000,00	-22.484.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	28.160.000,00	45.380.000,00	45.380.000,00	17.220.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	304.780.000,00	194.960.000,00	267.996.000,00	-36.784.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	13.870.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	-2.920.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Rasio wirausaha muda**				**17.15 persen**	**17.15 persen**	**7.028.413.000,00**	**13.364.828.548,00**	**13.341.186.400,00**	**-7.028.413.000,00**							**0,00**	
		[Rasio Wirausaha Pemuda]	**Rasio Wirausaha Pemuda**	**19.46**	**16.61**	**17.15**	-	-	**7.028.413.000,00**	**13.364.828.548,00**	**13.341.186.400,00**	-	-	-	-	-	-	**17.75**	**0,00**	-
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang terlaksana*				15 program kerja	15 program kerja	4.162.370.000,00	8.473.441.248,00	8.458.599.100,00	4.296.229.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pemuda (penduduk usia 16-30 tahun)			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	46.868.000,00	0,00	0,00	-46.868.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				1000 Orang	1000 Orang	887.443.000,00	339.819.700,00	339.819.700,00	-547.623.300,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				200 Orang	200 Orang	194.156.000,00	0,00	0,00	-194.156.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	1 Kegiatan	139.664.000,00	3.926.683.286,00	3.926.181.800,00	3.786.517.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				200 Orang	200 Orang	2.701.120.000,00	3.326.965.562,00	3.313.624.900,00	612.504.900,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				200 Orang	200 Orang	193.119.000,00	879.972.700,00	878.972.700,00	685.853.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				5 kegiatan	5 kegiatan	2.866.043.000,00	4.891.387.300,00	4.882.587.300,00	2.016.544.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pemuda (penduduk usia 16-30 tahun)		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	2.386.512.000,00	4.891.387.300,00	4.882.587.300,00	2.496.075.300,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				200 Orang	200 Orang	479.531.000,00	0,00	0,00	-479.531.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Peningkatan Prestasi Olahraga Cakupan Pembinaan Olahraga Cakupan Pembinaan Atlet Muda**				**-**	**456 atlet berprestasi 43 cabang olahraga 78,12 83.5 Atlet Cabang Olahraga % %**	**92.925.737.300,00**	**95.749.799.654,00**	**54.250.420.817,00**	**-92.925.737.300,00**							**0,00**	
		[Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas]	**Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas**	**100**	**100**	**100**	-	-	**92.925.737.300,00**	**95.749.799.654,00**	**54.250.420.817,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah*				-	5 cabang olahraga	58.349.968.800,00	51.698.647.094,00	7.313.977.940,00	-51.035.990.860,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	58.349.968.800,00	51.698.647.094,00	7.313.977.940,00	-51.035.990.860,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kejuaraan yang terlaksana*				-	11 kegiatan	1.806.508.900,00	4.837.815.800,00	4.837.815.800,00	3.031.306.900,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.666.738.900,00	4.787.683.800,00	4.787.683.800,00	3.120.944.900,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				150 Orang	150 Orang	139.770.000,00	50.132.000,00	50.132.000,00	-89.638.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	193.193.600,00	0,00	0,00	-193.193.600,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				100 Orang	100 Orang	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	13.193.600,00	0,00	0,00	-13.193.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga*				-	50 organisasi	29.575.130.000,00	28.158.400.000,00	28.158.400.000,00	-1.416.730.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	29.575.130.000,00	28.158.400.000,00	28.158.400.000,00	-1.416.730.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga*				-	5 kegiatan	3.000.936.000,00	11.054.936.760,00	13.940.227.077,00	10.939.291.077,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Laporan	1 Laporan	1.314.734.000,00	6.067.087.800,00	6.066.837.800,00	4.752.103.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	557.526.000,00	4.073.428.760,00	6.958.969.077,00	6.401.443.077,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	7 Lembaga	1.128.676.000,00	914.420.200,00	914.420.200,00	-214.255.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS KEBUDAYAAN							**16.521.066.000,00**	**26.399.997.585,00**	**31.112.100.000,00**	**14.591.034.000,00**							**19.884.315.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.521.066.000,00**	**26.399.997.585,00**	**31.112.100.000,00**	**14.591.034.000,00**							**19.884.315.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**16.521.066.000,00**	**26.399.997.585,00**	**31.112.100.000,00**	**14.591.034.000,00**							**19.884.315.000,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**11.257.571.880,00**	**12.373.542.585,00**	**12.805.209.488,00**	**-365.326.800,00**							**10.892.245.080,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**11.257.571.880,00**	**12.373.542.585,00**	**12.805.209.488,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**10.892.245.080,00**	-
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	10 Dokumen	55.066.800,00	150.148.200,00	172.767.800,00	117.701.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		55.066.800,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	52.204.000,00	51.834.000,00	26.834.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	8.289.100,00	12.289.100,00	8.289.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	6.287.700,00	11.681.700,00	7.681.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	11.279.000,00	17.279.000,00	13.279.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.066.800,00	7.641.300,00	15.236.900,00	10.170.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			5.066.800,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	3 Laporan	13.000.000,00	64.447.100,00	64.447.100,00	51.447.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			13.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Daerah*				100 persen	12 Bulan	9.559.180.200,00	10.259.273.435,00	9.735.449.335,00	176.269.135,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		9.600.855.900,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				82 Orang/bulan	12 Orang/bulan	8.681.980.900,00	9.381.981.135,00	8.882.297.435,00	200.316.535,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			8.681.981.580,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				23 Dokumen	12 Dokumen	394.680.000,00	394.680.000,00	392.040.000,00	-2.640.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			402.120.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				850 Dokumen	850 Dokumen	300.515.500,00	300.515.500,00	300.515.300,00	-200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			327.635.400,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	62.859.900,00	62.952.900,00	57.452.900,00	-5.407.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			64.115.360,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	12 Dokumen	49.507.900,00	49.507.900,00	45.007.700,00	-4.500.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			50.367.980,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	69.636.000,00	69.636.000,00	58.136.000,00	-11.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			74.635.580,00	DINAS KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**11.257.571.880,00**	**12.373.542.585,00**	**12.805.209.488,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**10.892.245.080,00**	-
	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	5 laporan	336.000.000,00	126.000.600,00	0,00	-336.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5 Laporan	336.000.000,00	126.000.600,00	0,00	-336.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**11.257.571.880,00**	**12.373.542.585,00**	**12.805.209.488,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**10.892.245.080,00**	-
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Peningkatan SDM Pegawai Lingkup Dinas Kebudayaan*				1 Tahun	6 Orang	69.000.000,00	72.000.000,00	761.250.000,00	692.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		81.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	113 Paket	0,00	0,00	84.750.000,00	84.750.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	69.000.000,00	72.000.000,00	676.500.000,00	607.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			81.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	563.183.600,00	795.005.050,00	834.249.813,00	271.066.213,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		396.550.220,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.256.000,00	8.520.700,00	8.520.763,00	264.763,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			8.256.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.372.300,00	226.875.300,00	124.182.000,00	33.809.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			51.981.220,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.021.300,00	26.840.650,00	56.840.650,00	27.819.350,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			31.569.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.010.000,00	2.344.400,00	2.344.400,00	-7.665.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			10.010.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1 Dokumen	14.400.000,00	600.000,00	600.000,00	-13.800.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				21 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	31.700.000,00	31.700.000,00	16.700.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	48 Laporan	396.124.000,00	498.124.000,00	610.062.000,00	213.938.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			264.734.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				1 Tahun	1 Tahun	343.351.280,00	613.122.300,00	650.984.900,00	307.633.620,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		357.330.160,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	88.095.200,00	180.363.600,00	191.283.600,00	103.188.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			89.095.200,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	81.656.080,00	312.655.480,00	339.661.680,00	258.005.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			81.634.960,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	173.600.000,00	120.103.220,00	120.039.620,00	-53.560.380,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			186.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dipelihara*				1 Tahun	1 Tahun	331.790.000,00	357.993.000,00	650.507.640,00	318.717.640,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		401.442.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	45.130.000,00	45.130.000,00	750.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			40.880.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	7 Unit	177.360.000,00	202.813.000,00	202.813.000,00	25.453.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			177.360.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	14.250.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			20.300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	95.800.000,00	95.800.000,00	388.314.640,00	292.514.640,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			162.902.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan**				**55.5 %**	**55.5 %**	**1.641.976.780,00**	**3.640.329.400,00**	**4.891.092.500,00**	**1.283.527.520,00**							**2.925.504.300,00**	
		[Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan]	**Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**1.641.976.780,00**	**3.640.329.400,00**	**4.891.092.500,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**2.925.504.300,00**	-
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				25 OPK		1.473.662.380,00	3.349.315.600,00	4.701.329.400,00	3.227.667.020,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat		2.784.813.800,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				25 Objek	28 Objek	1.181.261.380,00	3.056.914.600,00	4.411.048.400,00	3.229.787.020,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.144.390.800,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				350 Orang	230 Orang	219.309.400,00	219.309.400,00	218.509.400,00	-800.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			567.327.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	73.091.600,00	73.091.600,00	71.771.600,00	-1.320.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			73.096.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam kota makassar yang dilestarikan*				1 Objek	2 Objek	102.276.800,00	224.976.200,00	123.725.500,00	21.448.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		140.690.500,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				3 Objek	2 Objek	102.276.800,00	224.976.200,00	123.725.500,00	21.448.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			140.690.500,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga adat yang penganutnya dalam kota makassar yang dibina*				1 Lembaga	1 Lembaga	66.037.600,00	66.037.600,00	66.037.600,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	66.037.600,00	66.037.600,00	66.037.600,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kesenian Tradisional yang di Lestarikan dan di Kembangkan**				**-**	**20 %**	**1.655.232.220,00**	**6.599.207.500,00**	**7.626.229.612,00**	**1.732.518.180,00**							**3.387.750.400,00**	
		[Persentase kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan]	**Persentase kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan**	**100**	**0**	**20**	-	-	**1.655.232.220,00**	**6.599.207.500,00**	**7.626.229.612,00**	-	-	-	-	-	-	**20**	**3.387.750.400,00**	-
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terbinanya Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam Kota Makassar*				30 Kelopmpok	100 %	1.655.232.220,00	6.599.207.500,00	7.626.229.612,00	5.970.997.392,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		3.387.750.400,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				315 Orang	330 Orang	112.617.000,00	102.616.800,00	102.616.800,00	-10.000.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			197.637.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	20 Lembaga	1.542.615.220,00	6.496.590.700,00	7.523.612.812,00	5.980.997.592,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.190.113.400,00	DINAS KEBUDAYAAN
4.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal**				**-**	**100 %**	**579.450.460,00**	**847.036.300,00**	**1.019.416.300,00**	**4.235.780,00**							**583.686.240,00**	
		[Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal]	**Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal**	**100**	**87**	**100**	-	-	**579.450.460,00**	**847.036.300,00**	**1.019.416.300,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**583.686.240,00**	-
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terbinanya sejarah lokal kota makassar*				7 Objek	2 Objek	579.450.460,00	847.036.300,00	1.019.416.300,00	439.965.840,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		583.686.240,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				17 Orang	12 Orang	274.678.060,00	212.023.200,00	222.523.200,00	-52.154.860,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			275.274.200,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				5 Unit	2 Unit	183.448.100,00	329.586.400,00	329.586.400,00	146.138.300,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			184.016.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				5 Dokumen	21 Dokumen	121.324.300,00	305.426.700,00	467.306.700,00	345.982.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			124.396.040,00	DINAS KEBUDAYAAN
5.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Objek Cagar Budaya yang di Tetapkan**				**-**	**20 %**	**733.285.560,00**	**1.947.694.200,00**	**2.768.394.500,00**	**689.043.040,00**							**1.422.328.600,00**	
		[Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan]	**Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan**	**100**	**23**	**20**	-	-	**733.285.560,00**	**1.947.694.200,00**	**2.768.394.500,00**	-	-	-	-	-	-	**20**	**1.422.328.600,00**	-
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pendaftaran dan Penetapan Objek diduga Cagar Budaya*				32 Objek	6 Objek	259.852.060,00	331.386.000,00	269.536.000,00	9.683.940,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		326.256.600,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				12 Objek	12 Objek	149.796.260,00	134.053.400,00	127.753.400,00	-22.042.860,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			143.312.600,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				6 Objek	6 Objek	110.055.800,00	197.332.600,00	141.782.600,00	31.726.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			182.944.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar*				32 Objek	8 Objek	430.917.600,00	1.573.792.300,00	2.484.584.600,00	2.053.667.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		1.049.085.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				3 Objek	4 Objek	267.932.800,00	1.300.544.900,00	2.268.358.800,00	2.000.426.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			844.763.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				5 Objek	5 Objek	162.984.800,00	273.247.400,00	216.225.800,00	53.241.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			204.322.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar*				6 Objek	3 Objek	42.515.900,00	42.515.900,00	14.273.900,00	-28.242.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		46.987.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.03.0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				3 Objek	3 Objek	42.515.900,00	42.515.900,00	14.273.900,00	-28.242.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			46.987.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
6.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum**				**-**	**1,08 %**	**653.549.100,00**	**992.187.600,00**	**2.001.757.600,00**	**19.251.280,00**							**672.800.380,00**	
		[Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum]	**Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum**	**5.58**	**0**	**1.08**	-	-	**653.549.100,00**	**992.187.600,00**	**2.001.757.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.08**	**672.800.380,00**	-
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Terkelolanya Museum Kota Makassar*				1 museum	1 museum	653.549.100,00	992.187.600,00	2.001.757.600,00	1.348.208.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		672.800.380,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				25 Unit	25 Unit	97.760.300,00	104.987.600,00	504.961.200,00	407.200.900,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			98.261.300,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				29 Orang	7 Orang	209.656.800,00	207.686.200,00	172.522.600,00	-37.134.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			209.657.180,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				59403 Unit	13 Unit	177.673.700,00	201.950.100,00	814.474.500,00	636.800.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			180.205.900,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	5 Unit	95.075.800,00	433.681.200,00	465.916.800,00	370.841.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			97.130.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0016	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya				1 Unit	1 Unit	73.382.500,00	43.882.500,00	43.882.500,00	-29.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			87.546.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		DINAS PERPUSTAKAAN							**13.415.122.000,00**	**10.147.570.907,00**	**10.321.400.000,00**	**-3.093.722.000,00**							**12.007.761.484,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.415.122.000,00**	**10.147.570.907,00**	**10.321.400.000,00**	**-3.093.722.000,00**							**12.007.761.484,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**13.415.122.000,00**	**10.147.570.907,00**	**10.321.400.000,00**	**-3.093.722.000,00**							**12.007.761.484,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**100 %**	**100 100 90 % % %**	**8.545.940.100,00**	**8.539.256.507,00**	**8.608.302.800,00**	**-386.703.220,00**							**8.159.236.880,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**8.545.940.100,00**	**8.539.256.507,00**	**8.608.302.800,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**8.159.236.880,00**	-
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	49.250.000,00	75.605.412,00	75.005.412,00	25.755.412,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pegawai Dinas Perpustakaan		49.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	20.250.000,00	40.462.812,00	39.862.812,00	19.612.812,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			20.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	5.693.800,00	5.693.800,00	1.693.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.745.400,00	4.745.400,00	745.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	5.342.400,00	5.342.400,00	1.342.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	6.221.200,00	6.221.200,00	2.221.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	13.000.000,00	13.139.800,00	13.139.800,00	139.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			13.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
		[Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah]	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**8.545.940.100,00**	**8.539.256.507,00**	**8.608.302.800,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**8.159.236.880,00**	-
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	6.457.429.460,00	6.771.846.860,00	6.459.546.860,00	2.117.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pegawai Dinas Perpustakaan		6.457.429.460,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	6.086.250.260,00	6.386.250.260,00	6.084.750.260,00	-1.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.086.250.260,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	240.600.000,00	250.440.000,00	239.640.000,00	-960.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			240.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	127.162.200,00	131.823.600,00	131.823.600,00	4.661.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			127.162.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.417.000,00	3.333.000,00	3.333.000,00	-84.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.417.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**8.545.940.100,00**	**8.539.256.507,00**	**8.608.302.800,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**8.159.236.880,00**	-
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	336.000.000,00	0,00	0,00	-336.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	0,00	0,00	-336.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN
		[Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah]	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**8.545.940.100,00**	**8.539.256.507,00**	**8.608.302.800,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**8.159.236.880,00**	-
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				90 %	90 %	72.000.000,00	96.000.000,00	354.000.000,00	282.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pegawai Dinas Perpustakaan		72.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	72.000.000,00	96.000.000,00	354.000.000,00	282.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			72.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				90 %	90 %	356.957.020,00	344.412.395,00	460.888.988,00	103.931.968,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Pegawai Dinas Perpustakaan		498.155.420,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	5.830.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	1.505.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			5.830.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				56 Paket	56 Paket	88.632.220,00	66.456.400,00	77.271.300,00	-11.360.920,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			135.830.620,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.800,00	15.742.995,00	18.990.995,00	8.990.195,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			10.000.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	14.040.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00	-4.680.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			14.040.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	33 Laporan	208.454.000,00	215.518.000,00	317.931.693,00	109.477.693,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			302.454.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
		[Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur]	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**	**90**	**90**	**90**	-	-	**8.545.940.100,00**	**8.539.256.507,00**	**8.608.302.800,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**8.159.236.880,00**	-
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	253.901.620,00	203.752.800,00	203.752.800,00	-50.148.820,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	253.901.620,00	203.752.800,00	203.752.800,00	-50.148.820,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				90 %	90 %	698.412.000,00	738.164.040,00	745.633.740,00	47.221.740,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Pegawai Dinas Perpustakaan		760.412.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	8 Laporan	6.636.000,00	7.029.100,00	7.029.100,00	393.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			6.636.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	135.792.000,00	126.816.000,00	126.816.000,00	-8.976.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			135.792.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	555.984.000,00	604.318.940,00	611.788.640,00	55.804.640,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			617.984.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				90 %	90 %	321.990.000,00	309.475.000,00	309.475.000,00	-12.515.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Pegawai Dinas Perpustakaan		321.990.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.880.000,00	40.085.000,00	40.085.000,00	-795.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			40.880.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	243.860.000,00	232.420.000,00	232.420.000,00	-11.440.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			243.860.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	37.250.000,00	36.970.000,00	36.970.000,00	-280.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			37.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Jumlah Koleksi Judul Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun Angka Budaya Baca Kota Makassar Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat**				**70 32 Pustakawan, 150 Tenaga Teknis 33.712 580.000 81,10 % Orang Judul orang/tahun Nilai**	**32 Pustakawan, 150 Tenaga Teknis 33.712 580.000 70 81,10 Orang Judul orang/tahun % Nilai**	**4.567.555.200,00**	**1.225.114.500,00**	**1.346.397.300,00**	**-1.323.799.556,00**							**3.243.755.644,00**	
		[Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat]	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**	**84.72**	**84.52**	**84.60**	-	-	**4.567.555.200,00**	**1.225.114.500,00**	**1.346.397.300,00**	-	-	-	-	-	-	**84.60**	**3.243.755.644,00**	-
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan tingkat Kota yang dikelola dan dibina yang akan terakreditasi Jumlah Perpustakaan tingkat Kota yang dikelola dan dibina yang terakreditasi*				50 sekolah yang terakreditasi	50 sekolah yang terakreditasi	4.004.499.200,00	805.428.700,00	926.711.500,00	-3.077.787.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pelajar dan Masyarakat umum		1.519.327.284,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	53.134.000,00	53.134.000,00	53.134.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			54.334.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	3.150.000.000,00	41.800.000,00	41.800.000,00	-3.108.200.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				5 Layanan	5 Layanan	4.244.100,00	4.244.100,00	4.244.100,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.244.140,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan				65 Perpustakaan	65 Perpustakaan	77.302.200,00	95.302.000,00	95.302.000,00	17.999.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			118.567.424,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat																		
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				5000 Eksemplar	5000 Eksemplar	312.038.400,00	303.559.100,00	324.915.900,00	12.877.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			429.542.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi																		
			Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi				5 Dokumen	5 Dokumen	3.716.800,00	3.716.800,00	3.716.800,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.716.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	49.643.100,00	49.643.100,00	49.643.100,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			85.715.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	1 Dokumen	53.668.000,00	53.668.000,00	53.668.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			110.934.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2300 Eksemplar	2300 Eksemplar	195.583.900,00	90.823.300,00	190.749.300,00	-4.834.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			579.365.320,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				200 Eksemplar	200 Eksemplar	95.165.000,00	95.066.800,00	95.066.800,00	-98.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			122.165.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	10.003.700,00	14.471.500,00	14.471.500,00	4.467.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			10.743.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase jumlah pengunjung* *Persentase Jumlah Pengunjung*				-	50 %	563.056.000,00	419.685.800,00	419.685.800,00	-143.370.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pelajar dan Masyarakat umum		1.724.428.360,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				9 Orang	9 Orang	43.932.000,00	43.932.000,00	43.932.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			145.511.360,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	12.706.400,00	112.151.100,00	112.151.100,00	99.444.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			43.263.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				5 Lokus	5 Lokus	506.417.600,00	263.602.700,00	263.602.700,00	-242.814.900,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.535.654.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Julah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang Dilestarikan**				**-**	**0,14 %**	**301.626.700,00**	**383.199.900,00**	**366.699.900,00**	**303.142.260,00**							**604.768.960,00**	
		[Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki]	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki**	**0.14**	**704**	**0.14**	-	-	**301.626.700,00**	**383.199.900,00**	**366.699.900,00**	-	-	-	-	-	-	**0.14**	**604.768.960,00**	-
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Naskah Kuno yang dilestariskan*				-	708 Judul	179.725.600,00	206.947.600,00	190.447.600,00	10.722.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pelajar dan Masyarakat umum		482.867.960,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				200 Orang	200 Orang	149.229.600,00	176.451.600,00	176.451.600,00	27.222.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			422.458.960,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				2 Eksemplar	2 Eksemplar	30.496.000,00	30.496.000,00	13.996.000,00	-16.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			60.409.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Judul Koleksi Budaya etnis Nusantara yang ditemukan*				-	2 Kegiatan	121.901.100,00	176.252.300,00	176.252.300,00	54.351.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pelajar dan Masyarakat umum		121.901.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	115.230.000,00	169.581.200,00	169.581.200,00	54.351.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			115.230.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				250 Eksemplar	250 Eksemplar	6.671.100,00	6.671.100,00	6.671.100,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.671.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
		DINAS KEARSIPAN							**12.167.392.000,00**	**14.304.393.888,00**	**16.470.400.000,00**	**4.303.008.000,00**							**10.599.261.600,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.167.392.000,00**	**14.304.393.888,00**	**16.470.400.000,00**	**4.303.008.000,00**							**10.599.261.600,00**	
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**12.167.392.000,00**	**14.304.393.888,00**	**16.470.400.000,00**	**4.303.008.000,00**							**10.599.261.600,00**	
1.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah** **Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**90** **100 %** **%**	**100** **100** **90 %** **%** **%**	**11.104.106.460,00**	**11.122.228.488,00**	**13.134.617.300,00**	**-2.034.099.220,00**							**9.070.007.240,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**11.104.106.460,00**	**11.122.228.488,00**	**13.134.617.300,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**9.070.007.240,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				12 Dokumen	12 Dokumen	49.172.700,00	71.449.100,00	71.435.500,00	22.262.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Organisasi Perangkat Daerah		54.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	27.930.600,00	37.708.800,00	37.708.800,00	9.778.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.885.900,00	9.153.700,00	9.140.100,00	5.254.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.885.900,00	4.001.900,00	4.001.900,00	116.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.885.900,00	5.548.300,00	5.548.300,00	1.662.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.885.900,00	4.001.900,00	4.001.900,00	116.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	5.698.500,00	11.034.500,00	11.034.500,00	5.336.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			13.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun*				8 Dokumen	8 Dokumen	7.164.832.500,00	7.214.891.740,00	6.764.591.740,00	-400.240.760,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Organisasi Perangkat Daerah		7.087.125.840,00	DINAS KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	51 Orang/bulan	6.882.298.700,00	6.882.298.540,00	6.431.998.540,00	-450.300.160,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.800.702.840,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	15 Dokumen	205.800.000,00	234.720.000,00	234.720.000,00	28.920.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			207.960.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	72.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	18.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			72.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.733.800,00	7.873.200,00	7.873.200,00	3.139.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.463.000,00	DINAS KEARSIPAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**11.104.106.460,00**	**11.122.228.488,00**	**13.134.617.300,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.070.007.240,00**	-
	2.24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi BMD pada Perangkat Daerah yang disedlakan*				7 Jenis	7 Jenis	336.000.000,00	336.000.000,00	180.000.000,00	-156.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	336.000.000,00	180.000.000,00	-156.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KEARSIPAN
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**11.104.106.460,00**	**11.122.228.488,00**	**13.134.617.300,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**9.070.007.240,00**	-
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia*				6 Jenis	6 Jenis	135.000.000,00	1.311.000.000,00	2.820.000.000,00	2.685.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Organisasi Perangkat Daerah		346.500.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				19 Orang	86 Orang	135.000.000,00	1.311.000.000,00	2.820.000.000,00	2.685.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			346.500.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan*				12 Bulan	12 Bulan	137.389.500,00	730.629.028,00	908.504.028,00	771.114.528,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Organisasi Perangkat Daerah		471.395.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	4.989.500,00	4.989.500,00	4.989.500,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.995.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				150 Laporan	150 Laporan	2.400.000,00	25.639.528,00	46.514.528,00	44.114.528,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.400.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	74 Laporan	130.000.000,00	700.000.000,00	857.000.000,00	727.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			464.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan*				26 Unit	26 Unit	2.765.446.900,00	866.527.700,00	1.638.329.700,00	-1.127.117.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Organisasi Perangkat Daerah		561.820.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	77 Unit	559.717.900,00	866.527.700,00	1.638.329.700,00	1.078.611.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			561.820.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.205.729.000,00	0,00	0,00	-2.205.729.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*				4 Jenis	4 Jenis	260.324.860,00	331.671.600,00	428.616.468,00	168.291.608,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Organisasi Perangkat Daerah		294.566.400,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	24 Laporan	38.056.860,00	40.272.000,00	43.293.600,00	5.236.740,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			39.698.400,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	5 Laporan	50.868.000,00	66.852.000,00	69.648.000,00	18.780.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			50.868.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	5 Laporan	171.400.000,00	224.547.600,00	315.674.868,00	144.274.868,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			204.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan pemeliharaan*				7 Jenis	7 Jenis	255.940.000,00	260.059.320,00	323.139.864,00	67.199.864,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Organisasi Perangkat Daerah		254.600.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.730.000,00	43.730.000,00	27.040.000,00	-16.690.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			43.730.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	157.580.000,00	157.580.000,00	195.350.544,00	37.770.544,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			157.580.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	36 Unit	26.130.000,00	18.830.000,00	60.830.000,00	34.700.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			26.290.000,00	DINAS KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	28.500.000,00	39.919.320,00	39.919.320,00	11.419.320,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			27.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
2.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional**				**100 (51 SKPD) 94 71 % % Orang**	**100 (51 SKPD) 71 94 % Orang %**	**478.011.500,00**	**1.260.995.200,00**	**1.262.995.200,00**	**-320.325.140,00**							**157.686.360,00**	
		[Persentase Ketersediaan Arsip]	**Persentase Ketersediaan Arsip**	**100**	**6.91**	**20**	-	-	**478.011.500,00**	**1.260.995.200,00**	**1.262.995.200,00**	-	-	-	-	-	-	**20**	**157.686.360,00**	-
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah arsip Kota Makassar yang dikelola*				10 (1 Kegiatan/5 SKPD) Dokumen	5(5 SKPD) Dokumen	61.956.700,00	833.693.200,00	833.693.200,00	771.736.500,00			-	- -	-		21.638.400,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				200 Berkas	200 Berkas	9.171.800,00	708.216.100,00	708.216.100,00	699.044.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			9.172.400,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				200 Berkas	200 Berkas	6.819.800,00	52.521.300,00	52.521.300,00	45.701.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.823.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Laporan	10 Laporan	45.965.100,00	72.955.800,00	72.955.800,00	26.990.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.643.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip Statis Kota Makasar yang dikelola*				2 (150 Box) Dokumen	2 Dokumen	344.889.800,00	144.524.500,00	144.524.500,00	-200.365.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Organisasi Perangkat Daerah		102.736.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI																		
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI				2 Arsip	2 Arsip	5.524.200,00	5.735.200,00	5.735.200,00	211.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			5.525.400,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1000 Arsip	1000 Arsip	339.365.600,00	138.789.300,00	138.789.300,00	-200.576.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			97.210.600,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kota Makassar yang dikelola*				2 (2 SKPD) Dokumen	2 Dokumen	71.165.000,00	282.777.500,00	284.777.500,00	213.612.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Organisasi Perangkat Daerah		33.311.960,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				2 Pengguna	20 Pengguna	6.036.600,00	75.505.100,00	137.505.100,00	131.468.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.036.800,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	65.128.400,00	207.272.400,00	147.272.400,00	82.144.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			27.275.160,00	DINAS KEARSIPAN
3.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat**				**1191 box arsip statis**	**1191 box arsip statis**	**529.221.340,00**	**1.915.121.400,00**	**2.066.738.700,00**	**736.413.060,00**							**1.265.634.400,00**	
		[Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip]	**Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**100**	**10.41**	**20**	-	-	**529.221.340,00**	**1.915.121.400,00**	**2.066.738.700,00**	-	-	-	-	-	-	**20**	**1.265.634.400,00**	-
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Jumlah Arsip Dilingkungan Pemerintah Kota Makassar yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun yang dimusnahkan*				102 Dokumen	102 Dokumen	9.625.400,00	9.707.600,00	9.707.600,00	82.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Organisasi Perangkat Daerah		9.847.200,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				51 Berkas	350 Berkas	5.635.300,00	5.707.800,00	5.707.800,00	72.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			5.745.200,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				51 Arsip	2000 Arsip	3.990.100,00	3.999.800,00	3.999.800,00	9.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.102.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip yang Berskala Kota Makassar yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana*				10 Dokumen	10 Dokumen	11.462.400,00	29.831.800,00	30.409.800,00	18.947.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Organisasi Perangkat Daerah		15.864.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				5 Arsip	100 Arsip	5.597.300,00	10.499.900,00	10.499.900,00	4.902.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			7.693.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				5 Arsip	100 Arsip	5.865.100,00	19.331.900,00	19.909.900,00	14.044.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			8.171.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kota Makassar yang diautentifikasi*				14 Dokumen	14 Dokumen	434.991.300,00	1.831.190.700,00	1.846.230.000,00	1.411.238.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Organisasi Perangkat Daerah		1.051.680.200,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				2 Arsip	1000 Arsip	430.330.100,00	1.222.633.800,00	1.237.673.100,00	807.343.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.030.885.200,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				12 Arsip	1000 Arsip	4.661.200,00	608.556.900,00	608.556.900,00	603.895.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			20.795.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	*Jumlah Arsip Statis Kota Kota Makassar yang Dinyatakan Hilang yang dilakukan pencarian*				5 Dokumen	5 Dokumen	73.142.240,00	44.391.300,00	180.391.300,00	107.249.060,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Organisasi Perangkat Daerah		188.243.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang																		
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan				2 Arsip	150 Arsip	40.575.900,00	37.521.200,00	173.521.200,00	132.945.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			42.792.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang				2 Arsip	150 Arsip	28.872.540,00	3.033.900,00	3.033.900,00	-25.838.640,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			142.006.400,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)																		
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				1 Arsip	150 Arsip	3.693.800,00	3.836.200,00	3.836.200,00	142.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.444.600,00	DINAS KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan**				**100 %**	**100 %**	**56.052.700,00**	**6.048.800,00**	**6.048.800,00**	**49.880.900,00**							**105.933.600,00**	
		[Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup]	**Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup**	**100**	**100**	**100**	-	-	**56.052.700,00**	**6.048.800,00**	**6.048.800,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**105.933.600,00**	-
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	*Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kota Makassar yang mendapat pelayanan izin*				12 (1 SOP) Dokumen	12 (1 SOP) Dokumen	56.052.700,00	6.048.800,00	6.048.800,00	-50.003.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Organisasi Perangkat Daerah		105.933.600,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				1 SOP	1 SOP	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				12 Arsip	12 Arsip	6.052.700,00	6.048.800,00	6.048.800,00	-3.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			105.933.600,00	DINAS KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN							**46.565.365.200,00**	**56.203.082.103,00**	**45.499.237.340,00**	**-1.066.127.860,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**46.565.365.200,00**	**56.203.082.103,00**	**45.499.237.340,00**	**-1.066.127.860,00**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**40.138.989.700,00**	**41.516.177.887,00**	**30.849.146.624,00**	**-9.289.843.076,00**							**0,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**100 90 Persen Persen**	**100 90 Persen Persen**	**36.283.411.800,00**	**33.831.848.437,00**	**23.145.339.024,00**	**-36.283.411.800,00**							**0,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**36.283.411.800,00**	**33.831.848.437,00**	**23.145.339.024,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun*				27.10 Poin	100 Persen	66.863.200,00	135.077.500,00	136.577.500,00	69.714.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	37.734.000,00	43.051.400,00	43.051.400,00	5.317.400,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.423.200,00	5.908.200,00	5.908.200,00	485.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.310.900,00	5.836.100,00	5.836.100,00	525.200,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.406.500,00	5.889.100,00	5.889.100,00	482.600,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.562.900,00	5.742.600,00	5.742.600,00	179.700,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	7.425.700,00	68.650.100,00	70.150.100,00	62.724.400,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				95 Persen	100 Persen	28.030.237.200,00	28.083.758.781,00	17.205.558.793,00	-10.824.678.407,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				184 Orang/ bulan	121 Orang/ bulan	27.469.837.200,00	27.469.838.781,00	16.591.638.793,00	-10.878.198.407,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	434.400.000,00	487.920.000,00	487.920.000,00	53.520.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	126.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**36.283.411.800,00**	**33.831.848.437,00**	**23.145.339.024,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 Persen	336.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-156.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	336.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-156.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**36.283.411.800,00**	**33.831.848.437,00**	**23.145.339.024,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun*				23,15 Poin	100 Persen	371.250.000,00	1.013.610.000,00	1.013.610.000,00	642.360.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				167 Paket	195 Paket	191.250.000,00	116.610.000,00	116.610.000,00	-74.640.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				149 Orang	221 Orang	180.000.000,00	897.000.000,00	897.000.000,00	717.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun*				100 Persen	100 Persen	874.287.400,00	1.088.660.456,00	937.379.627,00	63.092.227,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.510.000,00	19.044.800,00	19.044.800,00	15.534.800,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	4 Paket	44.061.200,00	54.162.200,00	54.881.371,00	10.820.171,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	46.060.800,00	32.929.056,00	32.929.056,00	-13.131.744,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	176.455.400,00	155.300.400,00	155.300.400,00	-21.155.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3 Dokumen	17.400.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	-12.180.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	46 Laporan	398.000.000,00	585.000.000,00	433.000.000,00	35.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	188.800.000,00	237.004.000,00	237.004.000,00	48.204.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				100 Persen	100 Persen	5.541.727.400,00	2.124.134.300,00	2.162.963.000,00	-3.378.764.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	66 Unit	207.741.400,00	970.859.300,00	1.009.688.000,00	801.946.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.333.986.000,00	1.153.275.000,00	1.153.275.000,00	-4.180.711.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				100 Persen	100 Persen	495.996.600,00	608.627.400,00	930.480.104,00	434.483.504,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	119.757.960,00	220.635.600,00	232.712.400,00	112.954.440,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	329.278.980,00	280.272.480,00	290.048.384,00	-39.230.596,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46.959.660,00	107.719.320,00	407.719.320,00	360.759.660,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				100 Persen	100 Persen	567.050.000,00	597.980.000,00	578.770.000,00	11.720.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.430.000,00	43.430.000,00	28.340.000,00	-15.090.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	13 Unit	507.580.000,00	507.580.000,00	503.460.000,00	-4.120.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	69 Unit	16.040.000,00	46.970.000,00	46.970.000,00	30.930.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Tangkap**				**163 21.127 Kelompok Ton**	**21722 Ton**	**2.215.102.840,00**	**2.035.089.200,00**	**2.008.946.100,00**	**-2.215.102.840,00**							**0,00**	
		[Jumlah Produksi Perikanan Tangkap]	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**23355**	**20603.90**	**21401**	-	-	**2.215.102.840,00**	**2.035.089.200,00**	**2.008.946.100,00**	-	-	-	-	-	-	**21722**	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya*				21127 Ton	19 Persen	262.830.800,00	302.109.200,00	296.448.100,00	33.617.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Dokumen	10 Dokumen	262.830.800,00	302.109.200,00	296.448.100,00	33.617.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Bina Kelompok Nelayan*				40 Kelompok	40 Kelompok	1.565.442.900,00	1.732.980.000,00	1.712.498.000,00	147.055.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				160 Orang	610 Orang	72.192.400,00	667.478.500,00	667.478.500,00	595.286.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				41 Kelompok	14 Kelompok	167.728.000,00	65.501.500,00	45.019.500,00	-122.708.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				741 Unit	793 Unit	1.325.522.500,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-325.522.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**				**1568,35 Ton**	**1568,35 Ton**	**1.080.560.460,00**	**3.998.889.350,00**	**4.192.795.600,00**	**-1.080.560.460,00**							**0,00**	
		[Jumlah Produksi perikanan budidaya]	**Jumlah Produksi perikanan budidaya**	**1606.33**	**1519.58**	**1559**	-	-	**1.080.560.460,00**	**3.998.889.350,00**	**4.192.795.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1568.35**	**0,00**	-
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen rekomendasi izin usaha pembudidayaan ikan yang diterbitkan*				100 Persen	100 Persen	1.309.000,00	1.625.800,00	1.625.800,00	316.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1.309.000,00	1.625.800,00	1.625.800,00	316.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Persentase kelompok pembudidaya yang didampingi, di fasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya*				100 Persen	100 Persen	194.742.100,00	186.568.800,00	175.718.800,00	-19.023.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				80 Kelompok	82 Kelompok	61.513.900,00	58.833.100,00	58.833.100,00	-2.680.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				80 Kelompok	82 Kelompok	62.007.800,00	58.797.800,00	58.797.800,00	-3.210.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				80 Kelompok	82 Kelompok	71.220.400,00	68.937.900,00	58.087.900,00	-13.132.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Persentase sarana dan prasarana pembudidayaan ikan yang dimanfaatkan*				100 Persen	100 Persen	884.509.360,00	3.810.694.750,00	4.015.451.000,00	3.130.941.640,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	149.513.160,00	282.525.600,00	299.398.600,00	149.885.440,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				14 Unit	32 Unit	176.523.600,00	2.747.388.150,00	2.909.329.800,00	2.732.806.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.215.700,00	4.733.700,00	4.733.700,00	518.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				14 Unit	19 Unit	400.695.500,00	627.901.900,00	654.290.500,00	253.595.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				7 Unit	4 Unit	130.588.500,00	131.006.500,00	130.559.500,00	-29.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.922.200,00	9.396.200,00	9.396.200,00	-526.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0013	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan																		
			Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia				14 Unit	6 Unit	13.050.700,00	7.742.700,00	7.742.700,00	-5.308.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase Sumber Daya Perikanan Yang Diawasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**29.918.700,00**	**15.125.900,00**	**12.325.900,00**	**-29.918.700,00**							**0,00**	
		[persentase sumber daya perikanan yang diawasi]	**persentase sumber daya perikanan yang diawasi**	**100**	**100**	**100**	-	-	**29.918.700,00**	**15.125.900,00**	**12.325.900,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Persentase tingkat Kepatuhan Perikanan yang diperiksa*				100 Persen	100 Persen	29.918.700,00	15.125.900,00	12.325.900,00	-17.592.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				51 Pelaku Usaha	51 Pelaku Usaha	18.179.300,00	6.122.000,00	6.122.000,00	-12.057.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	11.739.400,00	9.003.900,00	6.203.900,00	-5.535.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Angka Konsumsi Ikan**				**48,94 Persen**	**48,94 Persen**	**529.995.900,00**	**1.635.225.000,00**	**1.489.740.000,00**	**-529.995.900,00**							**0,00**	
		[Angka Konsumsi Ikan]	**angka konsumsi ikan**	**49.73**	**48.55**	**48.74**	-	-	**529.995.900,00**	**1.635.225.000,00**	**1.489.740.000,00**	-	-	-	-	-	-	**48.94**	**0,00**	-
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Persentase Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang ditargetkan*				100 Persen	100 Persen	11.296.000,00	10.497.200,00	7.497.200,00	-3.798.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	11.296.000,00	10.497.200,00	7.497.200,00	-3.798.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan*				1 Persen	1 Persen	518.699.900,00	1.624.727.800,00	1.482.242.800,00	963.542.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				27,9 Ton	27,9 Ton	518.699.900,00	1.624.727.800,00	1.482.242.800,00	963.542.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**6.426.375.500,00**	**14.686.904.216,00**	**14.650.090.716,00**	**8.223.715.216,00**							**0,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Hortikultura Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan**				**8 15616 330,60 Ton Ton Ton**	**15616 330,60 8 Ton Ton Ton**	**5.008.335.760,00**	**13.554.295.136,00**	**13.528.481.636,00**	**-5.008.335.760,00**							**0,00**	
		[Peningkatan Produksi Tanaman Pangan]	**peningkatan produksi tanaman pangan**	**15620**	**15614**	**15615**	-	-	**5.008.335.760,00**	**13.554.295.136,00**	**13.528.481.636,00**	-	-	-	-	-	-	**15616**	**0,00**	-
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Pemanfaatan Bantuan Sarana Pertanian*				100 Persen	100 Persen	4.568.652.780,00	9.038.303.536,00	8.838.267.036,00	4.269.614.256,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				4 Laporan	4 Laporan	53.908.700,00	46.382.700,00	46.382.700,00	-7.526.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				10 Laporan	10 Laporan	4.251.423.060,00	8.538.175.336,00	8.791.884.336,00	4.540.461.276,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Bantuan SDG hewan yang termanfaatkan*				100 Persen	100 Persen	431.097.080,00	4.507.350.900,00	4.681.573.900,00	4.250.476.820,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	431.097.080,00	4.507.350.900,00	4.681.573.900,00	4.250.476.820,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengawasan mutu pakan yang ditargetkan*				100 Persen	100 Persen	4.258.800,00	4.417.300,00	4.417.300,00	158.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				4 Laporan	4 Laporan	4.258.800,00	4.417.300,00	4.417.300,00	158.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengawasan bibit ternak yang ditargetkan*				100 Persen	100 Persen	4.327.100,00	4.223.400,00	4.223.400,00	-103.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				4 Laporan	4 Laporan	4.327.100,00	4.223.400,00	4.223.400,00	-103.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B**				**40 Ha**	**40 Ha**	**148.437.200,00**	**51.837.800,00**	**50.837.800,00**	**-148.437.200,00**							**0,00**	
		[Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B]	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B**	**40**	**0**	**40**	-	-	**148.437.200,00**	**51.837.800,00**	**50.837.800,00**	-	-	-	-	-	-	**40**	**0,00**	-
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan dan di manfaatkan*				100 Persen	100 Persen	148.437.200,00	51.837.800,00	50.837.800,00	-97.599.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	51.782.400,00	14.065.000,00	13.065.000,00	-38.717.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				40 Ha	40 Ha	14.882.100,00	11.016.400,00	11.016.400,00	-3.865.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	81.772.700,00	26.756.400,00	26.756.400,00	-55.016.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**				**80 14,60 Persen Persen**	**14,60 80 Persen Persen**	**1.163.627.640,00**	**1.015.863.380,00**	**1.005.863.380,00**	**-1.163.627.640,00**							**0,00**	
		[Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)]	**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**	**90**	**70**	**77.5**	-	-	**1.163.627.640,00**	**1.015.863.380,00**	**1.005.863.380,00**	-	-	-	-	-	-	**80**	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Hewan /Ternak yang tertangani kesehatannya*				100 Persen	100 Persen	216.082.020,00	383.299.760,00	370.299.760,00	154.217.740,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				5 Kasus	5 Kasus	5.833.000,00	5.833.000,00	5.833.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				12 Laporan	12 Laporan	210.249.020,00	377.466.760,00	364.466.760,00	154.217.740,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengawasan peredaran Produk Hewan dan hasil turunannya yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal*				100 Persen	100 Persen	481.380.540,00	428.356.400,00	431.356.400,00	-50.024.140,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				4 laporan	4 laporan	19.299.500,00	21.817.000,00	21.817.000,00	2.517.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan																		
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				6 Laporan	5 Laporan	291.104.040,00	190.929.600,00	193.929.600,00	-97.174.440,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM																		
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				12 Laporan	3 Laporan	170.977.000,00	215.609.800,00	215.609.800,00	44.632.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase variabel pengujian jasa laboratorium dan jasa medik Veteriner yang dilaksanakan dalam daerah kabupaten/kota*				100 Persen	100 Persen	297.450.680,00	17.654.800,00	17.654.800,00	-279.795.880,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				8 Laporan	4 Laporan	29.091.900,00	17.654.800,00	17.654.800,00	-11.437.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase Dokumen Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diterbitkan*				100 Persen	100 Persen	168.714.400,00	186.552.420,00	186.552.420,00	17.838.020,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				12 Dokumen	12 Dokumen	167.337.400,00	185.175.420,00	185.175.420,00	17.838.020,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM				200 Dokumen	200 Dokumen	1.377.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penanganan Bencana Pertanian**				**80 Persen**	**80 Persen**	**98.733.300,00**	**57.619.300,00**	**57.619.300,00**	**-98.733.300,00**							**0,00**	
		[Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian]	**Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian**	**80**	**100**	**80**	-	-	**98.733.300,00**	**57.619.300,00**	**57.619.300,00**	-	-	-	-	-	-	**80**	**0,00**	-
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Rasio Luas Serangan OPT yang dikendalikan terhadap Total Luas lahan Pertanian kota Makassar*				4,02 Persen	4,02 Persen	98.733.300,00	57.619.300,00	57.619.300,00	-41.114.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	100 Ha	98.733.300,00	57.619.300,00	57.619.300,00	-41.114.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**7.241.600,00**	**7.288.600,00**	**7.288.600,00**	**-7.241.600,00**							**0,00**	
		[Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan]	**presentase izin usaha pertanian yang diterbitkan**	**100**	**80**	**100**	-	-	**7.241.600,00**	**7.288.600,00**	**7.288.600,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pertimbangan Teknis*				100 Persen	100 Persen	5.159.700,00	4.509.000,00	4.509.000,00	-650.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.159.700,00	4.509.000,00	4.509.000,00	-650.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	*Persentase Ketaatan izin Usaha pengecer obat hewan yang dilakukan pengawasan*				100 Persen	100 Persen	2.081.900,00	2.779.600,00	2.779.600,00	697.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																		
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi				4 Laporan	4 Laporan	2.081.900,00	2.779.600,00	2.779.600,00	697.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
		UPT TPI PAOTERE							**0,00**	**424.593.840,00**	**432.093.840,00**	**432.093.840,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**0,00**	**424.593.840,00**	**432.093.840,00**	**432.093.840,00**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**0,00**	**424.593.840,00**	**432.093.840,00**	**432.093.840,00**							**0,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**				**21722 Ton**	**21722 Ton**	**0,00**	**424.593.840,00**	**432.093.840,00**	**0,00**							**0,00**	
		-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	**424.593.840,00**	**432.093.840,00**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Persentase Layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*				100 Persen	100 Persen	0,00	424.593.840,00	432.093.840,00	432.093.840,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	1 Layanan	0,00	424.593.840,00	432.093.840,00	432.093.840,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		UPT TPI RAJAWALI							**252.052.940,00**	**333.112.240,00**	**345.112.240,00**	**93.059.300,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**252.052.940,00**	**333.112.240,00**	**345.112.240,00**	**93.059.300,00**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**252.052.940,00**	**333.112.240,00**	**345.112.240,00**	**93.059.300,00**							**0,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**				**21722 Ton**	**21722 Ton**	**252.052.940,00**	**333.112.240,00**	**345.112.240,00**	**-252.052.940,00**							**0,00**	
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Persentase Layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*				100 Persen	100 Persen	252.052.940,00	333.112.240,00	345.112.240,00	93.059.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelompok Masyarakat Nelayan		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	1 Layanan	252.052.940,00	333.112.240,00	345.112.240,00	93.059.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
		UPT BBI PARANGTAMBUNG							**257.033.260,00**	**1.768.347.020,00**	**1.783.346.820,00**	**1.526.313.560,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**257.033.260,00**	**1.768.347.020,00**	**1.783.346.820,00**	**1.526.313.560,00**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**257.033.260,00**	**1.768.347.020,00**	**1.783.346.820,00**	**1.526.313.560,00**							**0,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**				**1568.35 Ton**	**1568.35 Ton**	**257.033.260,00**	**1.768.347.020,00**	**1.783.346.820,00**	**-257.033.260,00**							**0,00**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Persentase sarana dan prasarana pembudidayaan ikan yang dimanfaatkan*				100 Persen	100 Persen	257.033.260,00	1.768.347.020,00	1.783.346.820,00	1.526.313.560,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	257.033.260,00	1.768.347.020,00	1.783.346.820,00	1.526.313.560,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
		UPT PEMBIBITAN TANAMAN							**0,00**	**0,00**	**315.245.500,00**	**315.245.500,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**0,00**	**0,00**	**315.245.500,00**	**315.245.500,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**0,00**	**0,00**	**315.245.500,00**	**315.245.500,00**							**0,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Hortikultura Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan**				**-**	**15616 330,60 8 Ton Ton Ton**	**0,00**	**0,00**	**315.245.500,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Pemanfaatan Bantuan Sarana Pertanian*				-	100 Persen	0,00	0,00	315.245.500,00	315.245.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	315.245.500,00	315.245.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
		UPT PUSKESWAN							**0,00**	**309.159.800,00**	**316.659.760,00**	**316.659.760,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**0,00**	**309.159.800,00**	**316.659.760,00**	**316.659.760,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**0,00**	**309.159.800,00**	**316.659.760,00**	**316.659.760,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular** **Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)** **Cakupan Produksi Peternakan Dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (Asuh)** **Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**				**-**	**100% (0 Kasus)** **14,60** **15.15** **80 Persen** **%** **Persen**	**0,00**	**309.159.800,00**	**316.659.760,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase variabel pengujian jasa laboratorium dan jasa medik Veteriner yang dilaksanakan dalam daerah kabupaten/kota*				-	100 Persen	0,00	309.159.800,00	316.659.760,00	316.659.760,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				0 Laporan	12 Laporan	0,00	309.159.800,00	316.659.760,00	316.659.760,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
		UPT PENYULUHAN							**231.942.600,00**	**161.704.500,00**	**161.704.500,00**	**-70.238.100,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**231.942.600,00**	**161.704.500,00**	**161.704.500,00**	**-70.238.100,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**231.942.600,00**	**161.704.500,00**	**161.704.500,00**	**-70.238.100,00**							**0,00**	
1.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelompok tani yang aktif**				**100 Persen**	**100 Persen**	**231.942.600,00**	**161.704.500,00**	**161.704.500,00**	**-231.942.600,00**							**0,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan Kapasitasnya*				100 Persen	100 Persen	231.942.600,00	161.704.500,00	161.704.500,00	-70.238.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Unit	2 Unit	205.772.500,00	135.534.400,00	135.534.400,00	-70.238.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Unit	2 Unit	26.170.100,00	26.170.100,00	26.170.100,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
		-							**46.565.365.200,00**	**56.203.082.103,00**	**45.499.237.340,00**	**-1.066.127.860,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**46.565.365.200,00**	**56.203.082.103,00**	**45.499.237.340,00**	**-1.066.127.860,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**6.426.375.500,00**	**14.686.904.216,00**	**14.650.090.716,00**	**8.223.715.216,00**							**0,00**	
1.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)** **Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**				**14,60** **80 Persen**	**14,60** **80 Persen**	**1.163.627.640,00**	**1.015.863.380,00**	**1.005.863.380,00**	**-1.163.627.640,00**							**0,00**	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase variabel pengujian jasa laboratorium dan jasa medik Veteriner yang dilaksanakan dalam daerah kabupaten/kota*				100 Persen	100 Persen	297.450.680,00	17.654.800,00	17.654.800,00	-279.795.880,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	268.358.780,00	0,00	0,00	-268.358.780,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
		DINAS PARIWISATA							**32.848.622.000,00**	**53.836.872.504,00**	**54.762.300.000,00**	**21.913.678.000,00**							**39.192.283.792,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**32.848.622.000,00**	**53.836.872.504,00**	**54.762.300.000,00**	**21.913.678.000,00**							**39.192.283.792,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**32.848.622.000,00**	**53.836.872.504,00**	**54.762.300.000,00**	**21.913.678.000,00**							**39.192.283.792,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 90 Persen Persen**	**15.793.372.147,00**	**15.862.128.312,00**	**15.193.947.460,00**	**269.842.145,00**							**16.063.214.292,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**15.793.372.147,00**	**15.862.128.312,00**	**15.193.947.460,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**16.063.214.292,00**	-
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 Persen	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00			-	- -	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD		127.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			67.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			16.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		[Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah]	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**15.793.372.147,00**	**15.862.128.312,00**	**15.193.947.460,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**16.063.214.292,00**	-
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 Persen	12.197.706.737,00	12.224.587.160,00	11.812.587.160,00	-385.119.577,00			-	- -	Dokumen Keuangan Dinas Pariwisata		11.846.714.292,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	115 Orang/bulan	11.629.462.537,00	11.629.462.760,00	11.217.462.760,00	-411.999.777,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.274.985.292,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	382.320.000,00	409.200.000,00	409.200.000,00	26.880.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			385.320.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	185.924.200,00	185.924.400,00	185.924.400,00	200,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			186.409.000,00	DINAS PARIWISATA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**15.793.372.147,00**	**15.862.128.312,00**	**15.193.947.460,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**16.063.214.292,00**	-
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 Persen	336.000.000,00	456.000.000,00	440.000.000,00	104.000.000,00			-	- -	Barang Milik Daerah Dinas Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	456.000.000,00	440.000.000,00	104.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
		[Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur]	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**	**90**	**90**	**90**	-	-	**15.793.372.147,00**	**15.862.128.312,00**	**15.193.947.460,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**16.063.214.292,00**	-
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 Persen	396.432.800,00	357.500.000,00	359.000.000,00	-37.432.800,00			-	- -	Pegawai ASN dan PPPK Dinas Pariwisata		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	3 Paket	216.432.800,00	107.000.000,00	107.000.000,00	-109.432.800,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	24 Orang	180.000.000,00	250.500.000,00	252.000.000,00	72.000.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersusun*				-	100 Persen	829.343.100,00	766.021.100,00	667.884.100,00	-161.459.000,00			-	- -	Sarana Prasaran Umum Kantor Dinas Pariwisata		1.053.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.755.900,00	28.016.000,00	28.016.000,00	4.260.100,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	165.866.000,00	167.020.100,00	164.003.100,00	-1.862.900,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			170.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	76.650.600,00	61.126.500,00	61.126.500,00	-15.524.100,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			78.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	149.918.800,00	149.524.500,00	149.524.500,00	-394.300,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.499.800,00	34.800.000,00	34.800.000,00	2.300.200,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.600.000,00	21.600.000,00	9.480.000,00	-6.120.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maradekaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	63.052.000,00	60.740.000,00	60.740.000,00	-2.312.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12 Laporan	302.000.000,00	243.194.000,00	160.194.000,00	-141.806.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana*				-	100 Persen	324.039.800,00	318.458.500,00	317.560.600,00	-6.479.200,00			-	- -	Pelatan Kantor Dinas Pariwisata		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	21 Unit	324.039.800,00	318.458.500,00	317.560.600,00	-6.479.200,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana*				-	100 Persen	1.069.708.460,00	978.891.552,00	836.245.600,00	-233.462.860,00			-	- -	Jasa Penunjang Kantor Dinas Pariwisata		1.680.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	873.364.460,00	661.212.000,00	631.780.000,00	-241.584.460,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	3 Laporan	196.344.000,00	317.679.552,00	204.465.600,00	8.121.600,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			380.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana*				-	100 Persen	586.141.250,00	706.670.000,00	706.670.000,00	120.528.750,00			-	- -	Barang Milik Dinas Pariwisata Kota Makassar		656.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41.630.000,00	27.040.000,00	27.040.000,00	-14.590.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			46.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	24 Unit	408.851.250,00	339.690.000,00	339.690.000,00	-69.161.250,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			430.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	24.000.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	-4.800.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				81 Unit	81 Unit	55.610.000,00	56.830.000,00	56.830.000,00	1.220.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**15.793.372.147,00**	**15.862.128.312,00**	**15.193.947.460,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**16.063.214.292,00**	-
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	56.050.000,00	263.910.000,00	263.910.000,00	207.860.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**				**-**	**7 Persen**	**4.735.612.600,00**	**12.971.046.200,00**	**12.942.001.200,00**	**2.798.456.900,00**							**7.534.069.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan]	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**	**18**	**24.88**	**7**	-	-	**4.735.612.600,00**	**12.971.046.200,00**	**12.942.001.200,00**	-	-	-	-	-	-	**7**	**7.534.069.500,00**	-
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola*				-	3 DTW	1.017.533.100,00	5.796.732.300,00	5.734.152.100,00	4.716.619.000,00			-	- -	Daya Tarik Wisata Kota Makassar		715.998.700,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Lokasi	3 Lokasi	501.534.400,00	88.400.000,00	88.400.000,00	-413.134.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	515.998.700,00	5.708.332.300,00	5.645.752.100,00	5.129.753.400,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			515.998.700,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang Dikelola*				-	1 Destinasi	1.562.126.900,00	4.687.713.000,00	4.728.748.200,00	3.166.621.300,00			-	- -	Destinasi Kota Makassar		4.553.070.800,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Lokasi	1 Lokasi	183.070.800,00	88.400.000,00	88.400.000,00	-94.670.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			183.070.800,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	91.474.800,00	589.232.000,00	528.132.000,00	436.657.200,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	1.135.430.900,00	2.778.365.800,00	2.880.501.000,00	1.745.070.100,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	116.959.300,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	983.040.700,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.050.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	12 Laporan	35.191.100,00	131.715.200,00	131.715.200,00	96.524.100,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			120.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.735.612.600,00**	**12.971.046.200,00**	**12.942.001.200,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**7.534.069.500,00**	-
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang Tersusun*				-	12 Laporan	67.316.500,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-17.316.500,00			-	- -	Usaha Pariwisata Kota Makassar		65.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota																		
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota				1 Dokumen	12 Dokumen	67.316.500,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-17.316.500,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			65.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**				**-**	**5.88 Persen**	**3.895.274.400,00**	**7.104.807.864,00**	**6.685.907.864,00**	**3.584.725.600,00**							**7.480.000.000,00**	
		[Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata]	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**	**19.23**	**0**	**5.88**	-	-	**3.895.274.400,00**	**7.104.807.864,00**	**6.685.907.864,00**	-	-	-	-	-	-	**5.88**	**7.480.000.000,00**	-
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Tersusun*				-	12 Laporan	3.895.274.400,00	7.104.807.864,00	6.685.907.864,00	2.790.633.464,00			-	- -	Daya Tarik Destinasi Kota Makassar		7.480.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	2 Dokumen	471.193.400,00	580.292.200,00	580.292.200,00	109.098.800,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			480.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Kegiatan	10 Kegiatan	2.709.995.000,00	3.344.548.600,00	2.828.548.600,00	118.553.600,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	12 Promosi	714.086.000,00	3.179.967.064,00	3.277.067.064,00	2.562.981.064,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual**				**-**	**3.03 Persen**	**5.673.751.003,00**	**15.546.900.090,00**	**17.272.381.438,00**	**-518.751.003,00**							**5.155.000.000,00**	
		[Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual]	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual**	**6.11**	**2.20**	**3.03**	-	-	**5.673.751.003,00**	**15.546.900.090,00**	**17.272.381.438,00**	-	-	-	-	-	-	**3.03**	**5.155.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif sebagai Ruang Berekspresi Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif yang Disediakan*				-	1 Unit	200.000.000,00	4.062.645.940,00	3.026.515.620,00	2.826.515.620,00			-	- -	Pelaku Ekonomi Kreatif		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	2 Unit	200.000.000,00	4.062.645.940,00	3.026.515.620,00	2.826.515.620,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Yang Tersusun*				-	4 Dokumen	5.473.751.003,00	11.484.254.150,00	14.245.865.818,00	8.772.114.815,00			-	- -	Pelaku Ekonomi Kreatif		5.155.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan				1 Dokumen	1 Dokumen	81.600.000,00	151.972.000,00	151.972.000,00	70.372.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0004	Penyediaan Infrastruktur																		
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia				1 Unit	1 Unit	409.374.700,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-399.374.700,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			95.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	4.722.276.503,00	10.733.682.350,00	13.495.294.018,00	8.773.017.515,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.800,00	44.199.800,00	44.199.800,00	-5.800.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah																		
			Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah				3 Lembaga	3 Lembaga	24.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	34.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah																		
			Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	91.500.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	108.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Produk	1 Produk	95.000.000,00	286.400.000,00	286.400.000,00	191.400.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**				**-**	**12.92 Persen**	**2.750.611.850,00**	**2.351.990.038,00**	**2.668.062.038,00**	**209.388.150,00**							**2.960.000.000,00**	
		[Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi]	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**	**25.85**	**0**	**12.92**	-	-	**2.750.611.850,00**	**2.351.990.038,00**	**2.668.062.038,00**	-	-	-	-	-	-	**12.92**	**2.960.000.000,00**	-
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah SDM Pariwisata yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas*				-	590 Orang	1.593.272.350,00	1.387.753.450,00	1.413.818.450,00	-179.453.900,00			-	- -	Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1.810.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				150 Orang	540 Orang	801.179.790,00	790.788.550,00	760.788.550,00	-40.391.240,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			900.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				600 Orang	50 Orang	265.500.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	-130.500.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	91.704.960,00	56.937.500,00	56.937.500,00	-34.767.460,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas*				-	2525 Orang	1.157.339.500,00	964.236.588,00	1.254.243.588,00	96.904.088,00			-	- -	Pelaku Ekonomi Kreatif		1.150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				50 Orang	2500 Orang	818.339.500,00	814.236.588,00	1.104.243.588,00	285.904.088,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				50 Orang	25 Orang	339.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-189.000.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		UPT EVENT							**32.848.622.000,00**	**53.836.872.504,00**	**54.762.300.000,00**	**21.913.678.000,00**							**39.192.283.792,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**32.848.622.000,00**	**53.836.872.504,00**	**54.762.300.000,00**	**21.913.678.000,00**							**39.192.283.792,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**32.848.622.000,00**	**53.836.872.504,00**	**54.762.300.000,00**	**21.913.678.000,00**							**39.192.283.792,00**	
1.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**				**-**	**12.92 Persen**	**2.750.611.850,00**	**2.351.990.038,00**	**2.668.062.038,00**	**209.388.150,00**							**2.960.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.750.611.850,00**	**2.351.990.038,00**	**2.668.062.038,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.960.000.000,00**	-
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah SDM Pariwisata yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas*				-	477 Orang	1.593.272.350,00	1.387.753.450,00	1.413.818.450,00	-179.453.900,00			-	- -	Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1.810.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	12 Laporan	434.887.600,00	405.027.400,00	461.092.400,00	26.204.800,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			460.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		UPT LOSARI							**32.848.622.000,00**	**53.836.872.504,00**	**54.762.300.000,00**	**21.913.678.000,00**							**39.192.283.792,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**32.848.622.000,00**	**53.836.872.504,00**	**54.762.300.000,00**	**21.913.678.000,00**							**39.192.283.792,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**32.848.622.000,00**	**53.836.872.504,00**	**54.762.300.000,00**	**21.913.678.000,00**							**39.192.283.792,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**				**-**	**7 Persen**	**4.735.612.600,00**	**12.971.046.200,00**	**12.942.001.200,00**	**2.798.456.900,00**							**7.534.069.500,00**	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Dikelola*				-	1 Kawasan	2.088.636.100,00	2.436.600.900,00	2.429.100.900,00	340.464.800,00			-	- -	Kawasan Strategis Pariwisata Kota Makassar		2.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	2.073.000.900,00	2.421.600.900,00	2.421.600.900,00	348.600.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			2.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				2 Orang	2 Orang	15.635.200,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-8.135.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERDAGANGAN							**22.368.966.000,00**	**30.634.843.100,00**	**28.867.500.000,00**	**6.498.534.000,00**							**20.932.698.653,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**22.368.966.000,00**	**30.634.843.100,00**	**28.867.500.000,00**	**6.498.534.000,00**							**20.932.698.653,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**20.237.177.580,00**	**26.671.401.960,00**	**25.458.679.660,00**	**5.221.502.080,00**							**18.431.479.673,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**100 90 Persen Persen**	**100 100 90 % % %**	**16.023.563.940,00**	**17.531.198.960,00**	**16.354.475.148,00**	**-1.694.476.723,00**							**14.329.087.217,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**16.023.563.940,00**	**17.531.198.960,00**	**16.354.475.148,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**14.329.087.217,00**	-
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun*				28 dokumen undefined undefined	100 %	157.718.580,00	257.738.800,00	244.638.600,00	86.920.020,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar		155.176.740,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	128.735.080,00	189.755.300,00	194.255.100,00	65.520.020,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			126.176.740,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.600,00	12.399.600,00	9.199.600,00	5.200.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.800,00	12.399.800,00	9.199.800,00	5.200.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.998.000,00	12.398.000,00	9.198.000,00	5.200.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.996.000,00	12.396.000,00	9.196.000,00	5.200.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	14 Laporan	12.990.100,00	18.390.100,00	13.590.100,00	600.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			13.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				203 Laporan undefined undefined	100 %	12.087.894.760,00	12.068.166.593,00	10.588.614.593,00	-1.499.280.167,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar		12.135.646.223,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	11.321.699.040,00	11.321.699.193,00	9.860.699.193,00	-1.460.999.847,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			11.699.279.423,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				95 Dokumen	95 Dokumen	332.560.000,00	411.600.000,00	387.240.000,00	54.680.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			328.960.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	60 Dokumen	186.194.600,00	199.394.600,00	199.394.600,00	13.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			23.026.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				36 Laporan	36 Laporan	247.441.120,00	135.472.800,00	141.280.800,00	-106.160.320,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			84.380.800,00	DINAS PERDAGANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**16.023.563.940,00**	**17.531.198.960,00**	**16.354.475.148,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**14.329.087.217,00**	-
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun*					100 %	336.000.000,00	411.658.000,00	406.158.000,00	70.158.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	336.000.000,00	411.658.000,00	406.158.000,00	70.158.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERDAGANGAN
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**16.023.563.940,00**	**17.531.198.960,00**	**16.354.475.148,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**14.329.087.217,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun*				12 dokumen undefined undefined	100 %	139.500.000,00	1.035.915.000,00	1.035.915.000,00	896.415.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar		128.971.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	79.500.000,00	108.915.000,00	108.915.000,00	29.415.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			86.971.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	60.000.000,00	927.000.000,00	927.000.000,00	867.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun*				4 Laporan undefined undefined	100 %	517.837.980,00	646.763.480,00	607.345.480,00	89.507.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar		467.515.840,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.757.500,00	15.665.000,00	15.665.000,00	8.907.500,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			6.760.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	250.000.280,00	250.000.280,00	250.000.280,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			41.773.040,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.063.700,00	11.063.700,00	11.063.700,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			11.064.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	26.616.000,00	104.650.000,00	104.650.000,00	78.034.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			26.616.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			31.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	32 Laporan	185.816.000,00	220.900.000,00	181.782.000,00	-4.034.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	6.384.500,00	13.284.500,00	12.984.500,00	6.600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			102.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				2 Laporan undefined undefined	100 %	474.326.800,00	752.336.000,00	1.148.651.800,00	674.325.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar		213.447.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	47.970.000,00	0,00	0,00	-47.970.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			33.892.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	154.173.200,00	336.630.200,00	182.557.000,00	28.383.800,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			26.700.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	272.183.600,00	415.705.800,00	966.094.800,00	693.911.200,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			152.855.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				36 Laporan undefined undefined	100 %	956.730.820,00	1.110.236.200,00	971.159.475,00	14.428.655,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar		578.570.412,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	19.959.660,00	41.376.600,00	34.674.900,00	14.715.240,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			19.849.200,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	364.811.800,00	444.079.000,00	444.079.000,00	79.267.200,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			204.844.612,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	571.959.360,00	624.780.600,00	492.405.575,00	-79.553.785,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			353.876.600,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				12 Bulan 30 Unit 4 Laporan 70 Unit	100 %	1.353.555.000,00	1.248.384.887,00	1.351.992.200,00	-1.562.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar		649.760.002,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	44.380.000,00	45.130.000,00	750.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			12.768.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	510.270.000,00	507.650.000,00	639.980.000,00	129.710.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			326.112.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	45.090.000,00	45.090.000,00	31.670.000,00	-13.420.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			22.180.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	55.000.000,00	56.000.000,00	54.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			57.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	698.815.000,00	595.264.887,00	581.212.200,00	-117.602.800,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			231.700.002,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan**				**100 Persen**	**95 %**	**199.320.860,00**	**1.377.280.300,00**	**484.680.300,00**	**5.955.500,00**							**205.276.360,00**	
		[Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi]	**Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi**	**100**	**90**	**100**	-	-	**199.320.860,00**	**1.377.280.300,00**	**484.680.300,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**205.276.360,00**	-
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang terbit*				22 Dokumen undefined undefined	350 unit	14.102.100,00	17.554.800,00	17.554.800,00	3.452.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Pasar rakyat dan Toko Swalayan		14.117.200,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	14.102.100,00	17.554.800,00	17.554.800,00	3.452.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			14.117.200,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Jumlah tada daftar gudang yang terbit*				4 Dokumen undefined undefined	440 Unit	74.475.680,00	662.278.000,00	214.478.000,00	140.002.320,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Gudang di Seluruh Kota Makassar		74.510.760,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				4 Dokumen	4 Dokumen	74.475.680,00	662.278.000,00	214.478.000,00	140.002.320,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			74.510.760,00	DINAS PERDAGANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**199.320.860,00**	**1.377.280.300,00**	**484.680.300,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**205.276.360,00**	-
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	*Jumlah Tanda Pendaftaran Waralaba STPW Untuk Penerima Waralaba Dalam Negeri Yang Terbit*				4 Dokumen undefined undefined	465 unit	17.894.900,00	18.252.400,00	18.252.400,00	357.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Penerima Waralaba		20.621.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	17.894.900,00	18.252.400,00	18.252.400,00	357.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			20.621.000,00	DINAS PERDAGANGAN
		[Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi]	**Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi**	**100**	**90**	**100**	-	-	**199.320.860,00**	**1.377.280.300,00**	**484.680.300,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**205.276.360,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	*Jumlah SIUP Minol Golongan B dan C Yang Diterbitkan*				4 Dokumen undefined undefined	120 unit	76.888.280,00	657.819.100,00	213.019.100,00	136.130.820,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Pengecer/Penjual Minuman Beralkohol Golongan B dan C di Kota Makassar		78.441.600,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	76.888.280,00	657.819.100,00	213.019.100,00	136.130.820,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			78.441.600,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Berbahaya*				4 Dokumen undefined undefined	4 Laporan	15.959.900,00	21.376.000,00	21.376.000,00	5.416.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Pelaku Usaha		17.585.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				4 Laporan	4 Laporan	15.959.900,00	21.376.000,00	21.376.000,00	5.416.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			17.585.800,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana Distribusi Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**				**100 Persen**	**100 persen**	**54.362.000,00**	**61.976.700,00**	**61.976.700,00**	**994.200,00**							**55.356.200,00**	
		[Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya]	**Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**	**100**	**100**	**100**	-	-	**54.362.000,00**	**61.976.700,00**	**61.976.700,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**55.356.200,00**	-
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun dan Dalam Kondisi Baik*				1 unit 1 Unit undefined undefined	0 unit	4.364.900,00	8.348.400,00	8.348.400,00	3.983.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Sarana Distribusi Perdagangan		4.937.200,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	4.364.900,00	8.348.400,00	8.348.400,00	3.983.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.937.200,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina*				100 Orang undefined undefined		49.997.100,00	53.628.300,00	53.628.300,00	3.631.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		50.419.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.997.100,00	53.628.300,00	53.628.300,00	3.631.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			50.419.000,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Presentase Kofisiensi Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok**				**100 Persen**	**100 %**	**748.728.080,00**	**1.091.191.600,00**	**1.084.118.300,00**	**-61.950.440,00**							**686.777.640,00**	
		-	-	-	-	-	-	-	**748.728.080,00**	**1.091.191.600,00**	**1.084.118.300,00**	-	-	-	-	-	-	-	**686.777.640,00**	-
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Harga dan Stok Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Terkendali*				4 Jenis undefined undefined	31 Jenis	733.903.080,00	755.766.600,00	748.693.300,00	14.790.220,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Seluruh Pasar Tradisional di Kota Makassar		672.004.040,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	128.023.180,00	149.432.300,00	142.359.000,00	14.335.820,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			91.889.800,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting]	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**100**	**100**	**100**	-	-	**748.728.080,00**	**1.091.191.600,00**	**1.084.118.300,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**686.777.640,00**	-
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	605.879.900,00	606.334.300,00	606.334.300,00	454.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				580.114.240,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Laporan Pengewasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi*				undefined undefined	4 Laporan	14.825.000,00	335.425.000,00	335.425.000,00	320.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Pelaku Usaha		14.773.600,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																		
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				4 Dokumen	4 Dokumen	14.825.000,00	335.425.000,00	335.425.000,00	320.600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				14.773.600,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Presentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang Kota Makaassar**				**12.1 US**	**12.1 persen**	**1.606.565.580,00**	**4.434.342.600,00**	**5.578.968.892,00**	**424.062.420,00**							**2.030.628.000,00**	
		[Nilai Ekspor Barang Kota Makassar]	**Nilai Ekspor Barang Kota Makassar**	**14.95**	**11.95**	**12.1**	-	-	**1.606.565.580,00**	**4.434.342.600,00**	**5.578.968.892,00**	-	-	-	-	-	-	**12.1**	**2.030.628.000,00**	-
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Yang Berorientasi Ekspor Pada Pameran Dagang Yang Difasilitasi*				10 Jenis undefined undefined	15 Pelaku Usaha	1.606.565.580,00	4.434.342.600,00	5.578.968.892,00	3.972.403.312,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor		2.030.628.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	366.819.000,00	633.412.800,00	894.072.800,00	527.253.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				450.819.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	541.967.000,00	2.895.024.700,00	4.005.194.992,00	3.463.227.992,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				541.967.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	368.842.000,00	551.978.100,00	341.974.100,00	-26.867.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				392.842.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				18 Produk	18 Produk	328.937.580,00	353.927.000,00	337.727.000,00	8.789.420,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				645.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Presentase Penanganaan Pegaduan Kemetrologian**				**90 Persen**	**90 %**	**1.310.692.320,00**	**1.405.479.600,00**	**1.126.028.120,00**	**-838.423.520,00**							**472.268.800,00**	
		[Persentase Penanganan Pengaduan Kemetrologian]	**Persentase Penanganan Pengaduan Kemetrologian**	**90**	**70**	**90**	-	-	**1.310.692.320,00**	**1.405.479.600,00**	**1.126.028.120,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**472.268.800,00**	-
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Yang Ditera Ulang*				2000 UTTP undefined undefined	1700 Pelaku Usaha	1.310.692.320,00	1.405.479.600,00	1.126.028.120,00	-184.664.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal di Kota Makassar		472.268.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				100 Orang	100 Orang	105.608.560,00	84.060.400,00	82.860.400,00	-22.748.160,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			105.268.800,00	DINAS PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Presentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi /dilaksanakan**				**70 Persen**	**70 persen**	**293.944.800,00**	**769.932.200,00**	**768.432.200,00**	**358.140.656,00**							**652.085.456,00**	
		[Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan]	**Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan**	**90**	**60**	**70**	-	-	**293.944.800,00**	**769.932.200,00**	**768.432.200,00**	-	-	-	-	-	-	**70**	**652.085.456,00**	-
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah UMKM Yang Difasilitasi Pada Pameran Promosi Produk Dalam Negeri*				2 Pameran undefined undefined	20 UMKM	293.944.800,00	769.932.200,00	768.432.200,00	474.487.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	IKM dan UMKM Lokal		652.085.456,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				15 UMKM	15 UMKM	107.547.600,00	144.241.400,00	144.241.400,00	36.693.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			113.155.856,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				100 UMKM	100 UMKM	186.397.200,00	625.690.800,00	624.190.800,00	437.793.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			538.929.600,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**2.131.788.420,00**	**3.963.441.140,00**	**3.408.820.340,00**	**1.277.031.920,00**							**2.501.218.980,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**				**4.8 %**	**4.8 %**	**1.975.441.820,00**	**3.634.324.440,00**	**3.089.503.640,00**	**360.572.620,00**							**2.336.014.440,00**	
		[Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri]	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**	**4.8**	**0**	**4.8**	-	-	**1.975.441.820,00**	**3.634.324.440,00**	**3.089.503.640,00**	-	-	-	-	-	-	**4.8**	**2.336.014.440,00**	-
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencana dan Evaluasi pembangunan industri yang tersusun*				14 Dokumen undefined undefined	1 Dokumen	1.975.441.820,00	3.634.324.440,00	3.089.503.640,00	1.114.061.820,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Pelaku Usaha Industri di Kota Makassar		2.336.014.440,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	45.905.400,00	163.444.200,00	132.644.200,00	86.738.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			70.332.240,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	65.405.880,00	63.116.300,00	62.561.100,00	-2.844.780,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			137.227.440,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	381.077.300,00	1.382.639.600,00	1.250.039.600,00	868.962.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			448.233.240,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	1.150.932.300,00	1.817.124.440,00	1.467.524.440,00	316.592.140,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.211.725.400,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.667.900,00	25.005.700,00	22.205.700,00	7.537.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			15.263.480,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan**				**0.41 Persen**	**0.41 Persen**	**39.410.400,00**	**52.308.800,00**	**45.508.800,00**	**5.732.640,00**							**45.143.040,00**	
		[Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan]	**Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan**	**0.41**	**67.03**	**0.41**	-	-	**39.410.400,00**	**52.308.800,00**	**45.508.800,00**	-	-	-	-	-	-	**0.41**	**45.143.040,00**	-
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Diterbitkannya izin -izin usaha industri dan kawasan industri sesuai kewenangan daerah. Jumlah Izin Usaha Industri IUI Izin Perluasan Usaha Industri IPUI Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Yang Diterbitkan Jumlah penerbitan Izin Usaha Industri IUI Izin Perluasan Usaha Industri IPUI Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Kewenangan Kabupaten Kota yang difasilitasi*				85 IKM undefined undefined	365 unit 85 IKM undefined undefined	39.410.400,00	52.308.800,00	45.508.800,00	6.098.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Pelaku Usaha Industri di Kota Makassar		45.143.040,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				4 Dokumen	4 Dokumen	30.303.600,00	32.033.600,00	28.033.600,00	-2.270.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			31.341.400,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				2 Dokumen	2 Dokumen	9.106.800,00	20.275.200,00	17.475.200,00	8.368.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			13.801.640,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini**				**100 Persen**	**100 Persen**	**116.936.200,00**	**276.807.900,00**	**273.807.900,00**	**3.125.300,00**							**120.061.500,00**	
		[Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini]	**Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini**	**100**	**100**	**100**	-	-	**116.936.200,00**	**276.807.900,00**	**273.807.900,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**120.061.500,00**	-
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Data dan Informasi Industri Yang Tersusun*				100 IKM undefined undefined	4 Laporan	116.936.200,00	276.807.900,00	273.807.900,00	156.871.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Pelaku Usaha Industri di Kota Makassar		120.061.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				4 Dokumen	4 Dokumen	88.860.000,00	228.031.100,00	225.231.100,00	136.371.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			90.095.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	13.751.600,00	25.054.200,00	24.654.200,00	10.902.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			14.681.180,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				2 Dokumen	2 Dokumen	14.324.600,00	23.722.600,00	23.922.600,00	9.598.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			15.285.320,00	DINAS PERDAGANGAN
		UPT METROLOGI							**22.368.966.000,00**	**30.634.843.100,00**	**28.867.500.000,00**	**6.498.534.000,00**							**20.932.698.653,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**22.368.966.000,00**	**30.634.843.100,00**	**28.867.500.000,00**	**6.498.534.000,00**							**20.932.698.653,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**20.237.177.580,00**	**26.671.401.960,00**	**25.458.679.660,00**	**5.221.502.080,00**							**18.431.479.673,00**	
1.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**-**	**-**	**1.310.692.320,00**	**1.405.479.600,00**	**1.126.028.120,00**	**-838.423.520,00**							**472.268.800,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.310.692.320,00**	**1.405.479.600,00**	**1.126.028.120,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**472.268.800,00**	-
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Alat UTTP yang di tera*				2000 UTTP	2000 UTTP	1.310.692.320,00	1.405.479.600,00	1.126.028.120,00	-184.664.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		472.268.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				2000 Unit	2000 Unit	1.205.083.760,00	1.321.419.200,00	1.043.167.720,00	-161.916.040,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			367.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
		UPT PENYEMAKAN KULIT							**22.368.966.000,00**	**30.634.843.100,00**	**28.867.500.000,00**	**6.498.534.000,00**							**20.932.698.653,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**22.368.966.000,00**	**30.634.843.100,00**	**28.867.500.000,00**	**6.498.534.000,00**							**20.932.698.653,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**2.131.788.420,00**	**3.963.441.140,00**	**3.408.820.340,00**	**1.277.031.920,00**							**2.501.218.980,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**				**4.8 Persen**	**4.8 Persen**	**1.975.441.820,00**	**3.634.324.440,00**	**3.089.503.640,00**	**360.572.620,00**							**2.336.014.440,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri*				14 Dokumen	14 Dokumen	1.975.441.820,00	3.634.324.440,00	3.089.503.640,00	1.114.061.820,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Pelaku Usaha Industri di Kota Makassar		2.336.014.440,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	317.453.040,00	182.994.200,00	154.528.600,00	-162.924.440,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			453.232.640,00	DINAS PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**257.732.750.000,00**	**266.735.240.120,00**	**298.290.350.000,00**	**40.557.600.000,00**							**254.938.572.132,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.053.148.700,00**	**16.004.253.900,00**	**15.863.253.800,00**	**2.810.105.100,00**							**13.053.148.700,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**13.053.148.700,00**	**16.004.253.900,00**	**15.863.253.800,00**	**2.810.105.100,00**							**13.053.148.700,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lingkup Kelurahan Persentase PKK Aktif**				**-**	**100 100 % %**	**13.053.148.700,00**	**16.004.253.900,00**	**15.863.253.800,00**	**0,00**							**13.053.148.700,00**	
		[Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lingkup Kelurahan]	**Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lingkup Kelurahan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**13.053.148.700,00**	**16.004.253.900,00**	**15.863.253.800,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**13.053.148.700,00**	-
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Kegiatan-Kegiatan Kelembagaan Kemasyarakatan di 153 Kelurahan Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan, RT/RW dan PKK Terselenggaranya Pembinaanaan LPM dan Peningkatan Peran Kelembagaan Dalam Kegiatan Pembangunan Kelurahan Terselenggaranya Sayembara dan Pembinaan Kelompok TTG*				153 Kelurahan	153 Kelurahan	13.053.148.700,00	16.004.253.900,00	15.863.253.800,00	2.810.105.100,00			-	- -	153 Kelurahan Lingkup Kota Makassar		13.053.148.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				153 Lembaga	3 Lembaga	8.681.745.460,00	9.649.287.400,00	9.616.287.400,00	934.541.940,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.681.745.460,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				153 Unit	153 Unit	4.086.163.620,00	5.568.120.800,00	5.467.620.700,00	1.381.457.080,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.086.163.620,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				153 Laporan	1 Laporan	285.239.620,00	786.845.700,00	779.345.700,00	494.106.080,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			285.239.620,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**244.679.601.300,00**	**250.730.986.220,00**	**282.427.096.200,00**	**37.747.494.900,00**							**241.885.423.432,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**244.679.601.300,00**	**250.730.986.220,00**	**282.427.096.200,00**	**37.747.494.900,00**							**241.885.423.432,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Persentase kerumahtanggan sekretariat daerah yang di fasilitasi Indeks Kematangan Organisasi Persentase Ketersediaan Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 100 100 100 100 90 % % % % % %**	**195.641.231.856,00**	**196.341.179.356,00**	**223.960.007.776,00**	**-2.794.177.868,00**						**192.847.053.988,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**195.641.231.856,00**	**196.341.179.356,00**	**223.960.007.776,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**192.847.053.988,00**	-
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen DPA - SKPD Yang disusun Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhriar Realisasi Kinerja SKPD Yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah Yang disusun Jumlah Dokumen RKA - SKPD Yang disusun Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				25 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 4 Laporan 60 Dokumen 6 Dokumen	25 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 4 Laporan 60 Dokumen 6 Dokumen	141.914.420,00	167.651.600,00	170.651.600,00	28.737.180,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar		141.914.420,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	107.414.420,00	123.785.900,00	126.785.900,00	19.371.480,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			107.414.420,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	12.763.300,00	12.763.300,00	2.763.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8.500.000,00	15.102.400,00	15.102.400,00	6.602.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			8.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah]	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**195.641.231.856,00**	**196.341.179.356,00**	**223.960.007.776,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**192.847.053.988,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang disediakan* *Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN Yang disediakan* *% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Yang Terverifikasi* *Jumlah Kegiatan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan* *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang disusun* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Yang Tersusun* *Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan*				100 % 12 Bulan 12 Laporan 14 Bulan 18 Dokumen 4 Kegiatan 5 Laporan	100 % 12 Bulan 12 Laporan 14 Bulan 18 Dokumen 4 Kegiatan 5 Laporan	52.268.829.428,00	52.324.716.158,00	48.950.063.263,00	-3.318.766.165,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar		52.268.803.460,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				251 Orang/ bulan	251 Orang/ bulan	49.652.894.758,00	49.544.452.828,00	45.772.336.663,00	-3.880.558.095,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			49.652.868.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.905.974.000,00	1.877.268.400,00	1.911.388.400,00	5.414.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.905.974.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	451.805.510,00	579.761.430,00	903.036.700,00	451.231.190,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			451.805.510,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	9.410.000,00	10.358.800,00	10.358.800,00	948.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			9.410.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	8.277.400,00	8.277.400,00	-1.722.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	238.745.160,00	304.597.300,00	344.665.300,00	105.920.140,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			238.745.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur]	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**	**90**	**90**	**90**	-	-	**195.641.231.856,00**	**196.341.179.356,00**	**223.960.007.776,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**192.847.053.988,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah* *Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Yang disusun* *% Terlaksananya Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				100 %	100 % 1 Laporan 4 Dokumen	6.803.337.560,00	4.894.109.960,00	4.892.417.160,00	-1.910.920.400,00			-	- -	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar		6.803.337.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.859.337.560,00	1.114.109.960,00	1.112.417.160,00	-746.920.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			1.859.337.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**195.641.231.856,00**	**196.341.179.356,00**	**223.960.007.776,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**192.847.053.988,00**	-
	4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	4.944.000.000,00	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	-1.164.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			4.944.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur]	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**	**90**	**90**	**90**	-	-	**195.641.231.856,00**	**196.341.179.356,00**	**223.960.007.776,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**192.847.053.988,00**	-
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang diadakan* *% Terlaksananya Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi*				100 % 120 Orang 2192 Stel	100 % 120 Orang 2192 Stel	1.382.008.300,00	1.360.960.400,00	1.678.786.400,00	296.778.100,00			-	- -	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar		1.382.008.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2192 Paket	2192 Paket	908.008.300,00	907.960.400,00	1.102.786.400,00	194.778.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			908.008.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				21 Orang	21 Orang	474.000.000,00	453.000.000,00	576.000.000,00	102.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			474.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bahan Bacaan Yang disediakan* *Jumlah Barang Cetak dan Penggadaan Yang disediakan* *Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Yang diadakan* *Jumlah Kunjungan Tamu Pemerintah Kota Makassar Yang difasiltasi* *Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah* *% Terlaksananya Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah*				100 % 140 Perjalanan 200 Kunjungan 2112 Bahan Bacaan 30 Jenis 36 Jenis	100 % 140 Perjalanan 200 Kunjungan 2112 Bahan Bacaan 30 Jenis 36 Jenis	20.914.452.700,00	17.376.768.960,00	23.420.669.120,00	2.506.216.420,00			-	- -	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar		20.915.141.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	697.999.200,00	1.670.471.000,00	1.801.344.220,00	1.103.345.020,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			697.999.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	1.480.003.500,00	1.618.796.700,00	1.612.774.900,00	132.771.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.480.692.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2160 Dokumen	2160 Dokumen	198.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			198.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				200 Laporan	200 Laporan	16.849.900.000,00	12.200.951.260,00	18.330.000.000,00	1.480.100.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			16.849.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				154 Laporan	154 Laporan	1.688.550.000,00	1.688.550.000,00	1.478.550.000,00	-210.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.688.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang diadakan* *Jumlah Mebeleur Yang diadakan* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang diadakan* *% Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan*				0 Unit 100 % 10 Jenis 17 Jenis	0 Unit 100 % 10 Jenis 17 Jenis	20.738.043.400,00	21.794.222.500,00	33.100.385.504,00	12.362.342.104,00			-	- -	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar		17.943.203.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	994.917.000,00	1.444.917.000,00	2.154.368.000,00	1.159.451.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			994.917.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	2.012.040.000,00	3.020.996.400,00	8.511.485.500,00	6.499.445.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			7.346.026.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	17.731.086.400,00	17.328.309.100,00	22.434.532.004,00	4.703.445.604,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			9.602.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Telepon Air dan Listrik* *Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia* *Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Tersedia* *Jumlah Tenaga Kebersihan Yang Terlibat Dalam Kebersihan Kantor* *% Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 % 10500 Surat 10 Jenis 12 Bulan 300 Orang	100 % 10500 Surat 10 Jenis 12 Bulan 300 Orang	40.079.663.760,00	38.400.625.660,00	41.899.308.736,00	1.819.644.976,00			-	- -	-		40.079.663.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10500 Laporan	10500 Laporan	3.843.389.100,00	2.135.070.200,00	2.217.249.500,00	-1.626.139.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.843.389.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.823.669.120,00	5.578.869.120,00	5.578.919.520,00	-3.244.749.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.823.669.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	23.412.600.000,00	25.672.422.800,00	28.475.857.800,00	5.063.257.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			23.412.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				300 Laporan	300 Laporan	4.000.005.540,00	5.014.263.540,00	5.627.281.916,00	1.627.276.376,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.005.540,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Bangunan/Gedung Yang Peralatan dan Mesinnya Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala* *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala* *Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Pajaknya di Bayar dan dipelihara* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Pajaknya di Perpanjang dan dipelihara* *Jumlah Mabeluer Yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala* *% Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*				100 % 10 Unit 3 Gedung Kantor 439 Unit 6 Bangunan/Gedung	100 % 10 Unit 3 Gedung Kantor 439 Unit 6 Bangunan/Gedung	13.285.659.708,00	15.296.341.208,00	22.499.063.393,00	9.213.403.685,00			-	- -	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar		13.285.659.708,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	1.274.830.400,00	1.274.821.600,00	3.240.090.800,00	1.965.260.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			1.274.830.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				439 Unit	439 Unit	7.015.092.900,00	7.015.089.200,00	9.223.990.000,00	2.208.897.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			7.015.092.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	58.800.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			58.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	1.850.111.200,00	1.850.111.200,00	1.663.600.000,00	-186.511.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			1.850.111.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	3.086.825.208,00	5.097.519.208,00	8.312.582.593,00	5.225.757.385,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			3.086.825.208,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Persentase ketersediaan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah]	**Persentase ketersediaan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**195.641.231.856,00**	**196.341.179.356,00**	**223.960.007.776,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**192.847.053.988,00**	-
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Bulan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* *Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* *Jumlah Pimpinan dan Keluarga Yang Mendapatkan Jasa Perawatan Kesehatan (Medical Chekh-Up)* *% Terlaksananya Adminsitrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				100 % 12 Bulan 8 Orang	100 % 12 Bulan 8 Orang	3.978.940.620,00	3.978.940.620,00	3.978.940.620,00	0,00			-	- -	Perangkat Daerah dan Mitra Kerja Sama		3.978.940.620,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	326.373.920,00	326.373.920,00	326.373.920,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			326.373.920,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	8 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	3.572.566.700,00	3.572.566.700,00	3.572.566.700,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.572.566.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah di Fasilitas]	**Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah di Fasilitas**	**100**	**100**	**100**	-	-	**195.641.231.856,00**	**196.341.179.356,00**	**223.960.007.776,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**192.847.053.988,00**	-
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah* *Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah* *Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah* *% Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*				100 % 1 Rumah Dinas 1 Rumah Jabatan	100 % 1 Rumah Dinas 1 Rumah Jabatan	20.027.735.500,00	24.030.638.300,00	26.594.187.100,00	6.566.451.600,00			-	- -	-		20.027.735.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.494.690.000,00	6.866.994.960,00	7.455.103.860,00	960.413.860,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.494.690.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.079.500.000,00	4.169.977.060,00	4.491.422.980,00	411.922.980,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.079.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.453.545.500,00	12.993.666.280,00	14.647.660.260,00	5.194.114.760,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			9.453.545.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Indeks Kematangan Organisasi]	**Indeks Kematangan Organisasi**	**100**	**100**	**100**	-	-	**195.641.231.856,00**	**196.341.179.356,00**	**223.960.007.776,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**192.847.053.988,00**	-
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Yang dilaksanakan* *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Yang dilaksanakan* *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Yang dilaksanakan* *Terlaksananya Penataan Organisasi*				100 % 2 Dokumen 5 Dokumen	100 % 2 Dokumen 5 Dokumen	923.695.760,00	1.923.694.350,00	1.813.076.800,00	889.381.040,00			-	- -	-		923.695.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				5 Dokumen	5 Dokumen	176.736.540,00	376.285.700,00	383.968.500,00	207.231.960,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			176.736.540,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				5 Laporan	5 Laporan	429.636.580,00	795.323.350,00	693.665.400,00	264.028.820,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			429.636.580,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	317.322.640,00	752.085.300,00	735.442.900,00	418.120.260,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			317.322.640,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Persentase ketersediaan Protokoler dan Komunikasi Pimpinan]	**Persentase ketersediaan Protokoler dan Komunikasi Pimpinan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**195.641.231.856,00**	**196.341.179.356,00**	**223.960.007.776,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**192.847.053.988,00**	-
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Yang dilaksanakan* *Jumlah Pelayanan Fasilitasi Keprotokolan Pemerintah Kota Makassar Yang Mendapat Layanan Keprotokoleran* *Jumlah Pelayanan, Fasilitas Keprotokoleran dan Dokumentasi Pimpinan Pemerintahan Kota Makassar* *Jumlah Pendokumentasian Kegiatan/Tugas Pimpinan Daerah Yang dilaksanakan*				1160 Pelayanan 240 Dokumen 320 Pelayanan 840 Pelayanan	1160 Pelayanan 240 Dokumen 320 Pelayanan 840 Pelayanan	15.096.950.700,00	14.792.509.640,00	14.962.458.080,00	-134.492.620,00			-	- -	-		15.096.950.700,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				840 Laporan	780 Laporan	12.397.521.000,00	12.179.515.140,00	12.260.467.080,00	-137.053.920,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			12.397.521.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				320 Laporan	320 Laporan	456.662.360,00	379.821.500,00	405.319.500,00	-51.342.860,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			456.662.360,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				240 Laporan	100 Laporan	2.242.767.340,00	2.233.173.000,00	2.296.671.500,00	53.904.160,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			2.242.767.340,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kinerja penyelenggaraan pemerintahan** **Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat** **Persentase kegiatan keagamaan yang mendapat dukungan/ fasilitas** **Persentase produk hukum yang dihasilkan** **Efektivitas kerja sama daerah**				**-**	**100** **100** **100** **100** **100 %** **%** **%** **%** **%**	**43.439.409.440,00**	**48.541.220.930,00**	**50.660.991.390,00**	**0,00**						**43.439.409.440,00**	
		[Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan]	**Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**43.439.409.440,00**	**48.541.220.930,00**	**50.660.991.390,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**43.439.409.440,00**	-
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)* *Jumlah Dokumen Penetapan Kode dan Data Kewilayahan* *Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Pelanggrana Adminsitrasi Pemerintahan* *% Terlaksananya Administrasi Pemerintahan*				100 % 1 Laporan 4 Dokumen	100 % 1 Laporan 4 Dokumen	1.280.153.000,00	1.752.249.800,00	2.234.299.800,00	954.146.800,00			-	- -	Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Kota Makassar		1.280.153.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	280.530.220,00	492.376.700,00	541.773.500,00	261.243.280,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			280.530.220,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	3 Dokumen	318.019.500,00	499.991.000,00	890.744.200,00	572.724.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			318.019.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	681.603.280,00	759.882.100,00	801.782.100,00	120.178.820,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			681.603.280,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat]	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**100**	**100**	-	-	**43.439.409.440,00**	**48.541.220.930,00**	**50.660.991.390,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**43.439.409.440,00**	-
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Pelaksaan Kebijakan dan Kapaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat* *Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial* *Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spritual* *Terlaksananya Kegiatan dan Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*				22 Kegiatan 27 Kegiatan 5 Kebijakan	22 Kegiatan 27 Kegiatan 5 Kebijakan	34.775.787.820,00	37.863.776.830,00	40.727.597.630,00	5.951.809.810,00			-	- -	153 Kelurahan Lingkup Kota Makassar		34.775.787.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				22 Dokumen	22 Dokumen	32.815.951.220,00	36.037.156.030,00	37.890.490.430,00	5.074.539.210,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			32.815.951.220,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			5 Dokumen	5 Dokumen	860.997.620,00	853.794.400,00	876.792.000,00	15.794.380,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			860.997.620,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				5 Dokumen	5 Dokumen	1.098.838.980,00	972.826.400,00	1.960.315.200,00	861.476.220,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.098.838.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan]	**Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**43.439.409.440,00**	**48.541.220.930,00**	**50.660.991.390,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**43.439.409.440,00**	-
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum* *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Di susun* *Jumlah Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasi* *Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana*				100 % 120 Produk Hukum 12 Perkara	100 % 100 Dokumen 12 Kasus	3.186.380.440,00	5.102.627.100,00	4.914.027.100,00	1.727.646.660,00			-	- -	153 Kelurahan Lingkup Kota Makassar		3.186.380.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				100 Dokumen	100 Dokumen	849.769.800,00	821.487.000,00	770.520.300,00	-79.249.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			849.769.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				12 Kasus	12 Kasus	1.941.328.440,00	3.883.439.800,00	3.763.405.700,00	1.822.077.260,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.941.328.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				100 Dokumen	100 Dokumen	395.282.200,00	397.700.300,00	380.101.100,00	-15.181.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			395.282.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Efektivitas Kerja Sama Daerah]	**Efektivitas Kerja Sama Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**43.439.409.440,00**	**48.541.220.930,00**	**50.660.991.390,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**43.439.409.440,00**	-
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri* *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri* *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama*				100 %	1 Dokumen 1 Laporan 30 Dokumen	4.197.088.180,00	3.822.567.200,00	2.785.066.860,00	-1.412.021.320,00			-	- -	Perangkat Daerah dan Mitra Kerja Sama		4.197.088.180,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				30 Dokumen	30 Dokumen	2.198.665.640,00	2.051.565.600,00	1.358.858.500,00	-839.807.140,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.198.665.640,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	1.407.186.220,00	1.449.034.500,00	1.178.989.600,00	-228.196.620,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.407.186.220,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	591.236.320,00	321.967.100,00	247.218.760,00	-344.017.560,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			591.236.320,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian** **Tingkat kematangan UKPBJ** **Pembangunan efektivitas kebijakan administrasi pembangunan**				**-**	**100** **3** **90 %** **Level** **%**	**5.598.960.004,00**	**5.848.585.934,00**	**7.806.097.034,00**	**0,00**							**5.598.960.004,00**	
		[Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan]	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**5.598.960.004,00**	**5.848.585.934,00**	**7.806.097.034,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**5.598.960.004,00**	-
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Laporan Informasi dan rekomendasi Distribusi dan Pengendalian Perekonomian* *Jumlah Laporan Kinerja Manajemen dan Keuangan BMUD dan BLUD* *Jumlah Rapat Koordinasi* *% Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Jumlah BUMD yang berkinerja baik*				100 % 26 BUMD/BLUD 2 Laporan 4 Kali	100 % 26 BUMD/BLUD 2 Laporan 4 Kali	1.943.507.540,00	2.208.476.460,00	2.501.074.060,00	557.566.520,00			-	- -	Perangkat Daerah dan Mitra Kerja Sama		1.943.507.540,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				51 Dokumen	51 Dokumen	1.257.366.100,00	1.558.335.100,00	1.752.499.900,00	495.133.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.257.366.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	349.335.480,00	313.335.400,00	299.200.200,00	-50.135.280,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			349.335.480,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	4 Dokumen	286.805.960,00	286.805.960,00	399.373.960,00	112.568.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			286.805.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian** **Tingkat kematangan UKPBJ** **Pembangunan efektivitas kebijakan administrasi pembangunan**				**-**	**100** **3** **90 %** **Level** **%**	**5.598.960.004,00**	**5.848.585.934,00**	**7.806.097.034,00**	**0,00**							**5.598.960.004,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.598.960.004,00**	**5.848.585.934,00**	**7.806.097.034,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**5.598.960.004,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan TPAKD* *Jumlah Laporan Informasi dan rekomendasi Distribusi dan Pengendalian Perekonomian* *Jumlah Laporan Kinerja Manajemen dan Keuangan BMUD dan BLUD* *Jumlah Rapat Koordinasi* *% Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Jumlah BUMD yang berkinerja baik*				-	100 % 26 BUMD/BLUD 2 Laporan 4 Kali	1.943.507.540,00	2.208.476.460,00	2.501.074.060,00	557.566.520,00			-	- -	153 Kelurahan Lingkup Kota Makassar		1.943.507.540,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
5.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian** **Tingkat kematangan UKPBJ** **Pembangunan efektivitas kebijakan administrasi pembangunan**				**-**	**100** **3** **90 %** **Level** **%**	**5.598.960.004,00**	**5.848.585.934,00**	**7.806.097.034,00**	**0,00**							**5.598.960.004,00**	
		[Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan]	**Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan**	**90**	**90**	**90**	-	-	**5.598.960.004,00**	**5.848.585.934,00**	**7.806.097.034,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**5.598.960.004,00**	-
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan* *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*				12 Laporan 2 Dokumen 4 Laporan	12 Laporan 2 Dokumen 4 Laporan	727.691.900,00	717.690.900,00	1.217.604.400,00	489.912.500,00			-	- -	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar		727.691.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	454.727.980,00	444.727.500,00	632.530.200,00	177.802.220,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			454.727.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	129.048.380,00	129.048.300,00	117.159.100,00	-11.889.280,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			129.048.380,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	143.915.540,00	143.915.100,00	467.915.100,00	323.999.560,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			143.915.540,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Tingkat Kematangan UKPBJ]	**Tingkat Kematangan UKPBJ**	**4**	**3**	**4**	-	-	**5.598.960.004,00**	**5.848.585.934,00**	**7.806.097.034,00**	-	-	-	-	-	-	**4**	**5.598.960.004,00**	-
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*JuJumlah Bimbingan Teknis/Sosialisasi yang dilkasanakan, Jumlah SKPD Yang Mendapatkan Pendampingan Barang dan Jasa* *Jumlah Fungsi Pemgelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Yang dilaksanakan* *Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang dilayani Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa*				200 Paket 3 Level 6 Kegiatan 7 Fungsi Layanan	200 Paket 3 Level 6 Kegiatan 7 Fungsi Layanan	2.927.760.564,00	2.922.418.574,00	4.087.418.574,00	1.159.658.010,00			-	- -	Perangkat Daerah dan Mitra Kerja Sama		2.927.760.564,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	3 Dokumen	345.032.700,00	538.718.300,00	923.523.500,00	578.490.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			345.032.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				5 Dokumen	5 Dokumen	1.158.762.764,00	1.143.363.204,00	1.917.576.404,00	758.813.640,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.158.762.764,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				250 Orang	250 Orang	1.423.965.100,00	1.240.337.070,00	1.246.318.670,00	-177.646.430,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.423.965.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**191.527.770.000,00**	**184.516.207.900,00**	**225.327.497.813,00**	**33.799.727.813,00**							**188.197.498.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**191.527.770.000,00**	**184.516.207.900,00**	**225.327.497.813,00**	**33.799.727.813,00**							**188.197.498.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**191.527.770.000,00**	**184.516.207.900,00**	**225.327.497.813,00**	**33.799.727.813,00**							**188.197.498.000,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan administrasi, Layanan Keuangan dan kesejahteraan anggota DPRD, Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**107.009.817.520,00**	**106.335.297.200,00**	**117.244.696.261,00**	**-599.616.120,00**							**106.410.201.400,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**107.009.817.520,00**	**106.335.297.200,00**	**117.244.696.261,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**106.410.201.400,00**	-
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi*				100 Dokumen	100 Dokumen	53.957.100,00	101.888.900,00	116.005.900,00	62.048.800,00			-	- -	Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak		54.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	24.984.200,00	10.360.600,00	10.360.600,00	-14.623.600,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.400,00	2.978.500,00	2.978.500,00	-1.021.900,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.998.500,00	3.755.400,00	3.755.400,00	-243.100,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.981.200,00	3.081.300,00	3.081.300,00	-899.900,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.994.900,00	3.942.900,00	3.942.900,00	-52.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	12.997.900,00	77.770.200,00	91.887.200,00	78.889.300,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			13.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Dokumen	100 Dokumen	15.559.221.450,00	15.621.016.847,00	13.624.628.148,00	-1.934.593.302,00			-	- -	Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak		15.475.620.688,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	13.462.802.490,00	13.522.574.247,00	11.535.472.060,00	-1.927.330.430,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.376.139.288,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.112.280.000,00	1.006.680.000,00	989.040.000,00	-123.240.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.115.280.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	751.703.300,00	707.304.800,00	707.304.800,00	-44.398.500,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			751.752.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.409.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00	221.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.413.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	228.026.660,00	379.827.800,00	388.181.288,00	160.154.628,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			228.036.200,00	SEKRETARIAT DPRD
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**107.009.817.520,00**	**106.335.297.200,00**	**117.244.696.261,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**106.410.201.400,00**	-
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang tersusun*				-	100 %	336.000.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**107.009.817.520,00**	**106.335.297.200,00**	**117.244.696.261,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**106.410.201.400,00**	-
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersusunnya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Dokumen	100 Dokumen	5.155.500.000,00	5.491.000.000,00	6.963.000.000,00	1.807.500.000,00			-	- -	Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak		5.155.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	5.155.500.000,00	5.491.000.000,00	6.963.000.000,00	1.807.500.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.155.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersusunnya Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah*				100 Dokumen	100 Dokumen	4.660.680.200,00	4.316.895.400,00	4.671.423.620,00	10.743.420,00			-	- -	Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak, dan Anggota DPRD		4.661.035.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	193.774.100,00	120.001.200,00	145.001.200,00	-48.772.900,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			193.827.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	1.358.335.600,00	1.277.949.400,00	1.515.540.820,00	157.205.220,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			1.358.518.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.171.578.300,00	876.697.700,00	783.513.000,00	-388.065.300,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			1.171.675.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	568.148.400,00	568.148.400,00	657.796.700,00	89.648.300,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			568.146.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	414.608.800,00	509.444.700,00	498.417.900,00	83.809.100,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			414.609.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	635.534.000,00	646.136.000,00	646.136.000,00	10.602.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			635.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	318.701.000,00	318.518.000,00	425.018.000,00	106.317.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			318.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersusunnya Pengadaan Barang Milik Daerah*				100 Unit	100 Unit	1.630.802.700,00	9.880.086.399,00	18.246.666.002,00	16.615.863.302,00			-	- -	Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak, dan Anggota DPRD		1.628.388.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				63 Unit	63 Unit	1.630.802.700,00	9.880.086.399,00	18.246.666.002,00	16.615.863.302,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			1.628.388.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi*				100 Dokumen	100 Dokumen	4.541.305.740,00	6.252.715.800,00	6.635.209.800,00	2.093.904.060,00			-	- -	Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak, dan Anggota DPRD		4.522.123.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.197.579.600,00	2.627.229.660,00	2.566.642.240,00	1.369.062.640,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.190.952.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.036.411.920,00	2.036.411.920,00	1.979.711.560,00	-56.700.360,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.040.371.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.307.314.220,00	1.589.074.220,00	2.088.856.000,00	781.541.780,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.290.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah barang yang dipelihara*				100 Unit	100 Unit	4.326.015.000,00	3.889.940.000,00	3.597.600.000,00	-728.415.000,00			-	- -	Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak, dan Anggota DPRD		4.241.047.358,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				50 Unit	50 Unit	346.010.000,00	358.810.000,00	358.810.000,00	12.800.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			325.430.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	1.064.320.000,00	1.191.800.000,00	1.288.540.000,00	224.220.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			1.100.320.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				150 Unit	150 Unit	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			16.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	462.020.000,00	308.840.000,00	209.000.000,00	-253.020.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			461.720.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**107.009.817.520,00**	**106.335.297.200,00**	**117.244.696.261,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**106.410.201.400,00**	-
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2.337.665.000,00	1.914.490.000,00	1.625.250.000,00	-712.415.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			2.337.577.358,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**107.009.817.520,00**	**106.335.297.200,00**	**117.244.696.261,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**106.410.201.400,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah Laporan pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuh*				100 Dokumen	100 Dokumen	37.636.893.626,00	37.535.031.226,00	37.613.781.626,00	-23.112.000,00			-	- -	Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak, dan Anggota DPRD		37.563.028.526,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	36.503.760.526,00	36.443.280.526,00	36.443.280.526,00	-60.480.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			36.503.760.526,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	325.000.000,00	345.000.000,00	380.000.000,00	55.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			325.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang	50 Orang	808.133.100,00	746.750.700,00	790.501.100,00	-17.632.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			734.268.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD*				100 Dokumen	100 Dokumen	33.109.441.704,00	22.910.722.628,00	25.440.381.165,00	-7.669.060.539,00			-	- -	Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak, dan Anggota DPRD		33.109.456.808,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				200 Laporan	200 Laporan	18.851.000.000,00	11.120.000.000,00	14.181.000.000,00	-4.670.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			18.851.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.258.441.704,00	11.790.722.628,00	11.259.381.165,00	-2.999.060.539,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			14.258.456.808,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Penetapan Perda APBD Tahun 2026**				**100 %**	**100 %**	**84.517.952.480,00**	**78.180.910.700,00**	**108.082.801.552,00**	**-2.730.655.880,00**							**81.787.296.600,00**	
		[Penetapan Perda APBD Tahun N]	**Penetapan Perda APBD Tahun N**	**100**	**100**	**100**	-	-	**84.517.952.480,00**	**78.180.910.700,00**	**108.082.801.552,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**81.787.296.600,00**	-
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*				100 Dokumen	100 Dokumen	26.621.474.980,00	7.651.394.000,00	8.022.404.852,00	-18.599.070.128,00			-	- -	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan SKPD		26.699.047.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	738.522.600,00	770.522.600,00	1.125.522.600,00	387.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			738.567.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				74 Dokumen	74 Dokumen	6.122.657.500,00	5.639.174.700,00	5.639.174.700,00	-483.482.800,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.122.634.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				12 Dokumen	12 Dokumen	492.194.880,00	614.696.700,00	630.707.552,00	138.512.672,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			489.846.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				8 Dokumen	8 Dokumen	1.227.000.000,00	627.000.000,00	627.000.000,00	-600.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.227.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				50 Orang	50 Orang	18.041.100.000,00	0,00	0,00	-18.041.100.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			18.121.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Tersusunnya Kegiatan Pembahasan kebijakan Anggaran*				100 Dokumen	100 Dokumen	1.717.788.300,00	3.048.788.300,00	3.048.788.300,00	1.331.000.000,00			-	- -	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan SKPD		1.717.742.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	115.671.000,00	115.671.000,00	115.671.000,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			115.673.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	116.129.000,00	116.129.000,00	116.129.000,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			116.083.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	493.232.200,00	494.232.200,00	494.232.200,00	1.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			493.232.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	510.925.200,00	496.925.200,00	496.925.200,00	-14.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			510.925.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	481.830.900,00	1.825.830.900,00	1.825.830.900,00	1.344.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			481.829.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*TERSUSUNNYA KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH*				100 Dokumen	100 Dokumen	6.898.296.400,00	26.881.816.400,00	41.129.496.400,00	34.231.200.000,00			-	- -	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan SKPD		6.897.890.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				10 Laporan	10 Laporan	1.540.634.600,00	6.311.023.400,00	9.749.282.600,00	8.208.648.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.540.571.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				10 Laporan	10 Laporan	1.480.725.900,00	6.251.114.700,00	9.689.373.900,00	8.208.648.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.480.571.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				10 Laporan	10 Laporan	1.713.988.100,00	7.380.341.700,00	9.887.636.100,00	8.173.648.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.713.859.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				10 Laporan	10 Laporan	1.600.557.400,00	6.370.946.200,00	11.234.813.400,00	9.634.256.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.600.505.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	562.390.400,00	568.390.400,00	568.390.400,00	6.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			562.384.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*JUMLAH PENINGKATAN KAPASITAS DPRD*				100 Dokumen	100 Dokumen	9.738.336.800,00	8.007.008.000,00	9.471.566.000,00	-266.770.800,00			-	- -	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan SKPD		6.887.390.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				30 Orang	30 Orang	1.385.417.600,00	1.385.417.600,00	1.385.417.600,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.352.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				18 Orang	18 Orang	476.085.600,00	476.085.600,00	476.085.600,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			475.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				50 Dokumen	50 Dokumen	2.817.157.600,00	1.085.828.800,00	2.241.386.800,00	-575.770.800,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.676.000,00	9.676.000,00	9.676.000,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			9.790.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.050.000.000,00	5.050.000.000,00	5.359.000.000,00	309.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.050.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*TERSUSUNNYA KEGIATAN PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT*				100 Dokumen	100 Dokumen	36.847.376.800,00	30.158.224.800,00	43.763.584.800,00	6.916.208.000,00			-	- -	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan SKPD		36.890.005.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				100 Laporan	100 Laporan	4.471.640.000,00	2.044.218.000,00	3.122.238.000,00	-1.349.402.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.472.418.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	2.781.800,00	2.781.800,00	2.781.800,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.205.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				150 Dokumen	150 Dokumen	30.037.635.000,00	26.957.665.000,00	37.988.445.000,00	7.950.810.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.054.882.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				75 Orang	75 Orang	2.335.320.000,00	1.153.560.000,00	2.650.120.000,00	314.800.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.352.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Terlaksananya kegiatan pada kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD*				100 Dokumen	100 Dokumen	636.944.500,00	443.944.500,00	660.944.500,00	24.000.000,00			-	- -	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan SKPD		636.984.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	636.944.500,00	443.944.500,00	660.944.500,00	24.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			636.984.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH*				100 Dokumen	100 Dokumen	66.352.800,00	24.352.800,00	24.352.800,00	-42.000.000,00			-	- -	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan SKPD		66.417.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																		
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	66.352.800,00	24.352.800,00	24.352.800,00	-42.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			66.417.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Terlaksananya kegiatan fasilitasi Tugas DPRD*				100 Dokumen	100 Dokumen	1.991.381.900,00	1.965.381.900,00	1.961.663.900,00	-29.718.000,00			-	- -	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan SKPD		1.991.821.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				50 Dokumen	50 Dokumen	84.702.000,00	84.702.000,00	80.984.000,00	-3.718.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			84.986.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				50 Dokumen	50 Dokumen	1.865.613.300,00	1.839.613.300,00	1.839.613.300,00	-26.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.865.639.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	41.066.600,00	41.066.600,00	41.066.600,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			41.196.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**38.576.590.000,00**	**36.547.454.335,00**	**35.510.902.000,00**	**-3.065.688.000,00**							**6.196.051.499.859,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**38.576.590.000,00**	**36.547.454.335,00**	**35.510.902.000,00**	**-3.065.688.000,00**							**6.196.051.499.859,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**38.576.590.000,00**	**36.547.454.335,00**	**35.510.902.000,00**	**-3.065.688.000,00**							**6.196.051.499.859,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**90** **100 %** **%**	**10 0** **100** **90 %** **%** **%**	**27.812.750.476,00**	**28.529.577.576,00**	**27.365.991.041,00**	**3.147.378.683,00**							**30.960.129.159,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**27.812.750.476,00**	**28.529.577.576,00**	**27.365.991.041,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**30.960.129.159,00**	-
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	49.316.000,00	46.514.000,00	46.514.000,00	-2.802.000,00			-	- -	Perangkat Daerah		186.821.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	16.437.300,00	13.790.300,00	13.790.300,00	-2.647.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			49.943.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.801.500,00	4.750.500,00	4.750.500,00	-51.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			19.234.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.933.900,00	3.829.900,00	3.829.900,00	-104.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			19.234.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.034.800,00	9.034.800,00	9.034.800,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.287.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.997.300,00	3.997.300,00	3.997.300,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.287.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	11.111.200,00	11.111.200,00	11.111.200,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			73.834.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				100 %	100 %	20.511.788.356,00	20.931.207.876,00	18.812.348.941,00	-1.699.439.415,00			-	- -	Perangkat Daerah		20.451.846.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	19.629.530.276,00	20.429.530.276,00	18.322.671.341,00	-1.306.858.935,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			19.563.941.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	342.000.000,00	325.440.000,00	313.440.000,00	-28.560.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			341.544.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	150.712.000,00	150.712.000,00	150.712.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			256.702.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.634.600,00	3.634.600,00	3.634.600,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.062.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.415.000,00	4.415.000,00	4.415.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.933.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.126.000,00	5.126.000,00	5.126.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	376.370.480,00	12.350.000,00	12.350.000,00	-364.020.480,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			280.661.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**27.812.750.476,00**	**28.529.577.576,00**	**27.365.991.041,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**30.960.129.159,00**	-
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	336.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-331.000.000,00			-	- -	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-331.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**27.812.750.476,00**	**28.529.577.576,00**	**27.365.991.041,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**30.960.129.159,00**	-
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun*				90 %	100 %	1.101.000.000,00	1.016.250.000,00	1.084.950.000,00	-16.050.000,00			-	- -	Perangkat Daerah		1.500.870.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				108 Paket	108 Paket	81.000.000,00	84.750.000,00	84.750.000,00	3.750.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			66.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				108 Orang	108 Orang	1.020.000.000,00	931.500.000,00	1.000.200.000,00	-19.800.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.434.870.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun*				undefined undefined	100 %	2.869.321.000,00	2.233.978.700,00	2.287.439.900,00	-581.881.100,00			-	- -	Perangkat Daerah		4.673.056.159,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.400.000,00	7.429.400,00	7.429.400,00	29.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.676.159,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	115.710.000,00	115.506.100,00	115.506.100,00	-203.900,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			130.494.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	163.659.000,00	32.222.200,00	45.118.600,00	-118.540.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			182.780.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	90.000.000,00	34.567.000,00	95.086.300,00	5.086.300,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			99.660.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	168.984.000,00	217.604.000,00	217.604.000,00	48.620.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			190.148.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	372.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	-300.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.821.439.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	135.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	-51.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			144.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	901.000.000,00	1.008.950.000,00	1.078.995.500,00	177.995.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.159.602.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	464.600.000,00	371.700.000,00	371.700.000,00	-92.900.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			472.940.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	450.968.000,00	290.000.000,00	200.000.000,00	-250.968.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			463.866.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				90 %	100 %	719.511.200,00	573.691.500,00	648.307.500,00	-71.203.700,00			-	- -	Perangkat Daerah		1.073.878.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				60 Unit	60 Unit	562.149.800,00	567.271.500,00	641.887.500,00	79.737.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			885.444.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	157.361.400,00	6.420.000,00	6.420.000,00	-150.941.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			188.434.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				90-100% %	100 %	1.113.280.320,00	2.887.175.500,00	3.190.310.700,00	2.077.030.380,00			-	- -	Perangkat Daerah		1.858.119.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	245.680.320,00	6.200.000,00	6.200.000,00	-239.480.320,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.955.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	76.800.000,00	376.512.000,00	376.512.000,00	299.712.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			544.159.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	790.800.000,00	2.504.463.500,00	2.807.598.700,00	2.016.798.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.307.005.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Terlaksana*				90-100% %	100 %	1.112.533.600,00	835.760.000,00	1.291.120.000,00	178.586.400,00			-	- -	Perangkat Daerah		1.215.538.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	31.290.000,00	46.380.000,00	46.380.000,00	15.090.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			49.626.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				62 Unit	62 Unit	673.843.600,00	589.980.000,00	495.340.000,00	-178.503.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			845.942.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				300 Unit	300 Unit	107.400.000,00	99.400.000,00	99.400.000,00	-8.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			169.969.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	100.000.000,00	650.000.000,00	350.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**				**-**	**100 %**	**3.060.051.644,00**	**2.171.119.600,00**	**2.169.901.600,00**	**934.948.356,00**							**3.995.000.000,00**	
		[Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD]	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**100**	**100**	**100**	-	-	**3.060.051.644,00**	**2.171.119.600,00**	**2.169.901.600,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**3.995.000.000,00**	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun*				100 %	100 %	2.269.640.844,00	1.579.927.000,00	1.716.509.000,00	-553.131.844,00			-	- -	Perangkat Daerah		2.950.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	120.418.000,00	135.494.600,00	134.294.600,00	13.876.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	122.010.024,00	122.079.400,00	110.079.400,00	-11.930.624,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	621.794.900,00	433.578.100,00	433.578.100,00	-188.216.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				3 Dokumen	3 Dokumen	1.405.417.920,00	888.774.900,00	1.038.556.900,00	-366.861.020,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Yang Tersusun*				100 %	100 %	36.663.000,00	12.932.300,00	12.932.300,00	-23.730.700,00			-	- -	Perangkat Daerah		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	2 Dokumen	36.663.000,00	12.932.300,00	12.932.300,00	-23.730.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terlaksana*				100 %	100 %	404.269.000,00	383.423.000,00	292.023.000,00	-112.246.000,00			-	- -	Perangkat Daerah		565.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	118.407.000,00	99.253.400,00	18.853.400,00	-99.553.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	285.862.000,00	284.169.600,00	273.169.600,00	-12.692.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Persentase implementasi Sistem Informasi Pemerintahanan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Yang Terlaksana*				100 %	100 %	349.478.800,00	194.837.300,00	148.437.300,00	-201.041.500,00			-	- -	Perangkat Daerah		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	349.478.800,00	194.837.300,00	148.437.300,00	-201.041.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia**				**100 %**	**100 100 100 % % %**	**7.703.787.880,00**	**5.846.757.159,00**	**5.975.009.359,00**	**6.153.392.582.820,00**						**6.161.096.370.700,00**	
		[Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan DanPembangunan Manusia]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia**	**100**	**100**	**100**	-	-	**7.703.787.880,00**	**5.846.757.159,00**	**5.975.009.359,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**6.161.096.370.700,00**	-
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terlaksana*				100 %	100 %	2.475.674.560,00	1.946.478.859,00	2.146.438.859,00	-329.235.701,00			-	- -	Perangkat Daerah		2.351.810.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	437.315.860,00	218.091.929,00	227.291.929,00	-210.023.931,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			361.164.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	101.178.900,00	71.440.000,00	53.440.000,00	-47.738.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			124.525.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	205.850.600,00	109.344.200,00	77.344.200,00	-128.506.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			202.158.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	490.736.000,00	616.458.530,00	670.458.530,00	179.722.530,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			380.355.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 0	1 0	325.340.200,00	223.288.700,00	235.788.700,00	-89.551.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			367.904.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 0	2 0	83.155.500,00	71.988.100,00	64.488.100,00	-18.667.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			115.826.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	198.866.300,00	109.545.900,00	102.045.900,00	-96.820.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			175.159.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	633.231.200,00	526.321.500,00	715.581.500,00	82.350.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			624.718.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Sumber Daya Alam Yang Terlaksana*				100 %	100 %	2.469.821.540,00	1.802.628.700,00	1.957.268.700,00	-512.552.840,00			-	- -	Perangkat Daerah		4.398.018.936.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	745.158.800,00	525.368.900,00	558.368.900,00	-186.789.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			768.494.330.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	85.681.000,00	64.949.000,00	64.949.000,00	-20.732.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			87.646.820.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	207.382.200,00	192.839.400,00	192.839.400,00	-14.542.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			211.545.520.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	683.944.000,00	511.510.600,00	614.150.600,00	-69.793.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.482.115.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	357.741.320,00	235.189.400,00	209.189.400,00	-148.551.920,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			368.473.848.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	64.982.640,00	42.554.400,00	42.554.400,00	-22.428.240,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			65.954.196.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	154.711.180,00	109.104.500,00	106.104.500,00	-48.606.680,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			164.254.892.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	170.220.400,00	121.112.500,00	169.112.500,00	-1.107.900,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			249.533.980.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang Terlaksana*				100 %	100 %	2.758.291.780,00	2.097.649.600,00	1.871.301.800,00	-886.989.980,00			-	- -	Perangkat Daerah		1.760.725.624.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	271.673.580,00	211.603.800,00	253.103.600,00	-18.569.980,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			351.850.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				6 Laporan	6 Laporan	130.210.700,00	130.019.900,00	120.019.700,00	-10.191.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			112.622.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	249.465.200,00	249.274.400,00	311.274.300,00	61.809.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			130.480.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	2 Laporan	489.125.900,00	489.125.900,00	495.675.800,00	6.549.900,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			496.616.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	205.541.900,00	205.351.100,00	168.851.000,00	-36.690.900,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			341.268.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	2 Laporan	36.481.300,00	36.481.300,00	36.481.200,00	-100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			113.905.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 Laporan	109.060.100,00	109.060.100,00	67.060.000,00	-42.000.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			212.796.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	2 Laporan	1.266.733.100,00	666.733.100,00	418.836.200,00	-847.896.900,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.185.124.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**92.337.242.000,00**	**70.880.000.000,00**	**57.967.000.000,00**	**-34.370.242.000,00**							**91.384.178.600,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**92.337.242.000,00**	**70.880.000.000,00**	**57.967.000.000,00**	**-34.370.242.000,00**							**91.384.178.600,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**92.337.242.000,00**	**70.880.000.000,00**	**57.967.000.000,00**	**-34.370.242.000,00**							**91.384.178.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**90 100 % %**	**100 100 90 % % %**	**37.863.929.780,00**	**34.406.752.900,00**	**28.070.026.473,00**	**-3.947.794.240,00**							**33.916.135.540,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**37.863.929.780,00**	**34.406.752.900,00**	**28.070.026.473,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**33.916.135.540,00**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	117.537.120,00	256.674.400,00	213.482.369,00	95.945.249,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Perangkat Daerah		136.408.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	88.538.720,00	147.758.600,00	111.046.969,00	22.508.249,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			107.408.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	11.992.200,00	11.617.000,00	7.617.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.400,00	11.992.200,00	11.560.000,00	7.560.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.900,00	9.907.600,00	9.493.600,00	5.493.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.400,00	9.907.600,00	9.593.600,00	5.594.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	12.999.700,00	65.116.200,00	60.171.200,00	47.171.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			13.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase capaian administrasi keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	26.021.191.626,00	25.786.192.836,00	20.410.856.996,00	-5.610.334.630,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Perangkat Daerah		25.521.888.001,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	23.245.933.486,00	23.255.566.936,00	17.889.053.296,00	-5.356.880.190,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			22.840.468.326,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.332.711.600,00	1.448.976.000,00	1.422.456.000,00	89.744.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.170.760.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1700 Dokumen	1700 Dokumen	1.289.252.000,00	934.700.000,00	979.269.500,00	-309.982.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.308.422.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9.122.800,00	10.484.800,00	19.206.900,00	10.084.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			12.127.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	45.198.300,00	46.287.900,00	7.287.900,00	-37.910.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			47.772.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	98.973.440,00	90.177.200,00	93.583.400,00	-5.390.040,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			142.338.675,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	38.625.800,00	27.058.100,00	20.359.000,00	-18.266.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Perangkat Daerah		38.625.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	38.625.800,00	27.058.100,00	20.359.000,00	-18.266.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			38.625.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	658.036.000,00	1.273.035.400,00	1.030.009.227,00	371.973.227,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Perangkat Daerah		754.792.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	2 Paket	154.423.000,00	145.236.000,00	44.280.000,00	-110.143.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			251.179.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				55 Orang	180 Orang	472.500.000,00	1.080.000.000,00	985.729.227,00	513.229.227,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			472.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	120 Orang	31.113.000,00	47.799.400,00	0,00	-31.113.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			31.113.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Administrasi umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	5.274.670.704,00	3.886.627.904,00	3.225.671.499,00	-2.048.999.205,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Perangkat Daerah		4.588.560.524,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	25.860.000,00	26.740.000,00	16.030.000,00	-9.830.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			25.860.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	470.567.900,00	248.693.800,00	226.173.800,00	-244.394.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			470.567.920,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.900.800,00	23.881.200,00	19.814.000,00	-9.086.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			28.900.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	300.381.300,00	291.717.200,00	276.636.782,00	-23.744.518,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			249.271.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	161.875.000,00	122.390.000,00	87.938.000,00	-73.937.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			161.875.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	35.280.000,00	35.280.000,00	25.480.000,00	-9.800.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			35.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	69.000.000,00	68.920.000,00	40.648.607,00	-28.351.393,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			69.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170 Laporan	535 Laporan	1.522.310.000,00	1.587.454.000,00	1.365.201.310,00	-157.108.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			887.310.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	305.910.000,00	249.310.000,00	286.670.000,00	-19.240.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			305.910.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.354.585.704,00	1.232.241.704,00	881.079.000,00	-1.473.506.704,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			2.354.585.704,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	3.093.438.400,00	111.306.400,00	434.726.390,00	-2.658.712.010,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Perangkat Daerah		106.317.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	7 Unit	293.438.400,00	111.306.400,00	434.726.390,00	141.287.990,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			106.317.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.495.046.180,00	1.604.572.860,00	1.305.596.992,00	-189.449.188,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Perangkat Daerah		1.594.292.240,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			7.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	612.152.600,00	601.560.000,00	542.796.192,00	-69.356.408,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			612.152.640,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	875.093.580,00	1.003.012.860,00	762.800.800,00	-112.292.780,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			974.339.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.165.383.950,00	1.461.285.000,00	1.429.324.000,00	263.940.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Perangkat Daerah		1.175.250.825,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.286.500,00	44.380.000,00	44.380.000,00	-906.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			47.550.825,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				75 Unit	170 Unit	662.499.950,00	1.100.180.000,00	1.099.619.000,00	437.119.050,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			670.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				118 Unit	136 Unit	117.700.000,00	124.425.000,00	93.025.000,00	-24.675.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			117.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	339.897.500,00	192.300.000,00	192.300.000,00	-147.597.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			340.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Penurunan SILPA Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				**3 100 85 40 30 % % % % %**	**100 3 30 40 85 % % % % %**	**47.017.935.500,00**	**29.646.285.400,00**	**25.112.378.827,00**	**3.715.103.760,00**							**50.733.039.260,00**	
		[Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD]	**Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD**	**30**	**26.59**	**30**	-	-	**47.017.935.500,00**	**29.646.285.400,00**	**25.112.378.827,00**	-	-	-	-	-	-	**30**	**50.733.039.260,00**	-
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*				100 %	100 %	8.215.609.640,00	7.633.224.200,00	4.663.618.951,00	-3.551.990.689,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Perangkat Daerah		9.111.978.260,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	371.559.600,00	510.907.200,00	113.974.705,00	-257.584.895,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			409.769.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	388.168.000,00	434.072.600,00	110.538.705,00	-277.629.295,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			433.348.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	71.423.000,00	36.504.300,00	4.632.000,00	-66.791.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			101.709.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	67.744.500,00	35.668.700,00	3.648.103,00	-64.096.397,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			94.594.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	77.253.000,00	45.810.800,00	4.321.604,00	-72.931.396,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			110.798.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	77.796.000,00	43.498.200,00	2.273.706,00	-75.522.294,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			110.696.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	734.669.000,00	942.951.800,00	861.431.262,00	126.762.262,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			760.669.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	648.220.600,00	786.888.200,00	288.250.300,00	-359.970.300,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			674.220.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				5 Dokumen	2 Dokumen	1.232.814.200,00	992.634.900,00	516.219.062,00	-716.595.138,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.524.814.960,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	438.265.000,00	0,00	0,00	-438.265.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			509.265.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	2.436.244.740,00	2.216.869.100,00	1.807.239.625,00	-629.005.115,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			2.614.641.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	538.214.000,00	428.938.200,00	148.375.021,00	-389.838.979,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			584.214.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1100 Orang	2100 Orang	1.133.238.000,00	1.158.480.200,00	802.714.858,00	-330.523.142,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.183.238.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase capaian koordinasi dan pengelolaan perbendaharaaan*				100 %	100 %	3.886.006.400,00	2.828.538.400,00	2.393.355.455,00	-1.492.650.945,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Perangkat Daerah		5.519.330.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	1.075.249.200,00	959.760.700,00	834.769.400,00	-240.479.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.210.943.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				800 Dokumen	800 Dokumen	89.925.000,00	89.741.200,00	26.951.500,00	-62.973.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			89.925.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	1.034.185.000,00	354.244.600,00	357.511.000,00	-676.674.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.914.185.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	236.155.200,00	115.959.400,00	50.063.000,00	-186.092.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			234.155.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	2 Dokumen	11.158.000,00	11.158.000,00	12.792.400,00	1.634.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			11.158.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	179.268.200,00	41.506.600,00	27.086.600,00	-152.181.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			179.268.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	2 Dokumen	16.036.000,00	15.937.800,00	8.881.500,00	-7.154.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			16.036.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				1436 Orang	1436 Orang	1.244.029.800,00	1.240.230.100,00	1.075.300.055,00	-168.729.745,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.863.659.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*				100 %	100 %	1.759.756.460,00	1.537.205.400,00	1.663.177.900,00	-96.578.560,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Perangkat Daerah		2.010.167.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	112.163.000,00	41.410.000,00	36.944.700,00	-75.218.300,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			120.412.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				3 Dokumen	3 Dokumen	61.227.360,00	110.991.100,00	100.233.700,00	39.006.340,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			77.227.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	17 Laporan	55.764.000,00	41.011.000,00	39.740.500,00	-16.023.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			78.607.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	173.690.000,00	145.023.000,00	228.423.000,00	54.733.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			182.615.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	425.286.000,00	288.342.400,00	288.258.600,00	-137.027.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			448.210.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	326.379.700,00	435.894.500,00	126.334.900,00	-200.044.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			551.383.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	109.250.000,00	78.497.000,00	0,00	-109.250.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			109.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				750 Orang	750 Orang	495.996.400,00	396.036.400,00	843.242.500,00	347.246.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			442.462.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase capaian penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah*				100 %	100 %	30.878.954.000,00	15.751.704.000,00	15.000.000.000,00	-15.878.954.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Perangkat Daerah		31.316.954.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	358.845.000,00	308.220.000,00	0,00	-358.845.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			540.845.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	183.939.000,00	150.114.000,00	0,00	-183.939.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			287.939.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1 Laporan	1 Laporan	336.170.000,00	293.370.000,00	0,00	-336.170.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			488.170.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-15.000.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			30.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Persentase capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah*				100 %	100 %	2.277.609.000,00	1.895.613.400,00	1.392.226.521,00	-885.382.479,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Perangkat Daerah		2.774.609.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	2 Dokumen	1.737.418.000,00	1.494.763.800,00	1.149.351.521,00	-588.066.479,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			2.026.418.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				200 Orang	800 Orang	540.191.000,00	400.849.600,00	242.875.000,00	-297.316.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			748.191.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**				**4 %**	**4 %**	**7.455.376.720,00**	**6.826.961.700,00**	**4.784.594.700,00**	**-720.372.920,00**							**6.735.003.800,00**	
		[Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap]	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	**4**	**4**	**4**	-	-	**7.455.376.720,00**	**6.826.961.700,00**	**4.784.594.700,00**	-	-	-	-	-	-	**4**	**6.735.003.800,00**	-
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase capaian pengelolaan barang milik daerah*				100 %	100 %	7.455.376.720,00	6.826.961.700,00	4.784.594.700,00	-2.670.782.020,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Perangkat Daerah		6.735.003.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	217.628.400,00	146.842.600,00	134.862.400,00	-82.766.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			149.072.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	89.257.300,00	61.360.300,00	55.860.300,00	-33.397.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			89.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	122.379.400,00	97.673.000,00	20.815.000,00	-101.564.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			122.380.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.446.865.300,00	1.551.745.600,00	1.334.955.600,00	-111.909.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.260.868.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	92.630.700,00	68.811.100,00	21.311.100,00	-71.319.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			178.231.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	114.499.200,00	50.726.600,00	45.226.600,00	-69.272.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			114.510.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	2.924.006.020,00	2.794.246.800,00	1.360.083.500,00	-1.563.922.520,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			2.963.732.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	679.627.800,00	669.855.700,00	283.472.700,00	-396.155.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			679.640.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	100.006.400,00	74.292.200,00	68.792.200,00	-31.214.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			100.020.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	4 Laporan	112.906.000,00	89.286.200,00	83.786.200,00	-29.119.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			112.912.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2350 Orang	1482 Orang	1.555.570.200,00	1.222.121.600,00	1.375.429.100,00	-180.141.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			964.338.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**131.281.504.000,00**	**126.229.879.925,00**	**120.848.900.000,00**	**-10.432.604.000,00**							**52.570.565.604,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**131.281.504.000,00**	**126.229.879.925,00**	**120.848.900.000,00**	**-10.432.604.000,00**							**52.570.565.604,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**131.281.504.000,00**	**126.229.879.925,00**	**120.848.900.000,00**	**-10.432.604.000,00**							**52.570.565.604,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah** **Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**100.00** **90.00 %** **%**	**100** **100** **90 %** **%** **%**	**100.628.646.774,00**	**96.818.662.365,00**	**91.995.937.734,00**	**-85.655.456.590,00**							**14.973.190.184,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**100.628.646.774,00**	**96.818.662.365,00**	**91.995.937.734,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**14.973.190.184,00**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	86.428.500,00	85.026.300,00	62.086.500,00	-24.342.000,00			-	- -	Kota Makassar.		54.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	48.719.400,00	48.663.600,00	25.724.000,00	-22.995.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.010.500,00	4.010.500,00	4.010.500,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.061.400,00	4.061.400,00	4.061.400,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.103.900,00	4.121.400,00	4.121.400,00	17.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.056.200,00	4.073.700,00	4.073.700,00	17.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	21.477.100,00	20.095.700,00	20.095.500,00	-1.381.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			13.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		[Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah]	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**100.628.646.774,00**	**96.818.662.365,00**	**91.995.937.734,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**14.973.190.184,00**	-
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah*				100.00 %	100.00 %	81.027.295.840,00	81.911.867.449,00	76.966.702.718,00	-4.060.593.122,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		1.262.549.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				250 Orang/ bulan	250 Orang/ bulan	79.828.777.240,00	80.702.075.449,00	75.762.757.518,00	-4.066.019.722,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	710.520.000,00	691.320.000,00	685.560.000,00	-24.960.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			766.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	394.281.900,00	424.755.300,00	424.755.100,00	30.473.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			401.598.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	93.716.700,00	93.716.700,00	93.630.100,00	-86.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			94.750.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**100.628.646.774,00**	**96.818.662.365,00**	**91.995.937.734,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**14.973.190.184,00**	-
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	336.000.000,00	336.000.000,00	310.000.000,00	-26.000.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	336.000.000,00	336.000.000,00	310.000.000,00	-26.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		[Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur]	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**	**90**	**90**	**90**	-	-	**100.628.646.774,00**	**96.818.662.365,00**	**91.995.937.734,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**14.973.190.184,00**	-
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas*				100.00 %	100.00 %	1.374.900.000,00	1.674.550.000,00	1.674.550.000,00	299.650.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		1.931.361.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	321.400.000,00	317.220.000,00	317.220.000,00	-4.180.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				165 Orang	165 Orang	1.053.500.000,00	1.357.330.000,00	1.357.330.000,00	303.830.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.631.361.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik*				100.00 %	100.00 %	3.186.796.080,00	3.296.986.420,00	3.391.303.320,00	204.507.240,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		4.584.656.328,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	89.599.500,00	23.679.500,00	23.679.500,00	-65.920.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			99.231.328,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	359.816.500,00	341.817.640,00	139.647.240,00	-220.169.260,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			468.197.040,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	145.580.300,00	76.459.200,00	57.364.800,00	-88.215.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			156.272.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	304.208.180,00	301.195.880,00	322.971.880,00	18.763.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			229.234.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.219.801.800,00	1.332.099.200,00	1.327.714.900,00	107.913.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.231.101.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	162.810.000,00	162.810.000,00	162.000.000,00	-810.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			165.280.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				150 Laporan	150 Laporan	59.818.200,00	74.000.000,00	74.000.000,00	14.181.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			60.780.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				101 Laporan	101 Laporan	836.000.000,00	955.000.000,00	1.254.000.000,00	418.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			2.055.215.060,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.161.600,00	29.925.000,00	29.925.000,00	20.763.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			119.344.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang dan Peralatan Mesin Lainnya dalam Kondisi Baik*				100.00 %	100.00 %	3.763.232.970,00	717.515.400,00	1.087.510.400,00	-2.675.722.570,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		178.080.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				484 Unit	484 Unit	3.763.232.970,00	717.515.400,00	1.087.510.400,00	-2.675.722.570,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			178.080.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik*				100.00 %	100.00 %	3.561.091.684,00	3.656.952.996,00	3.681.952.996,00	120.861.312,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		3.358.989.506,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.431.391.484,00	2.200.988.996,00	2.200.988.996,00	-230.402.488,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			2.490.009.506,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	235.000.000,00	157.000.000,00	157.000.000,00	-78.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			234.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	894.700.200,00	1.298.964.000,00	1.323.964.000,00	429.263.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			634.980.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik*				100.00 %	100.00 %	7.292.901.700,00	5.139.763.800,00	4.821.831.800,00	-2.471.069.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		3.603.553.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.130.000,00	45.130.000,00	45.130.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			40.794.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				200 Unit	200 Unit	2.411.050.000,00	2.861.050.000,00	2.553.470.000,00	142.420.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			2.508.970.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				600 Unit	600 Unit	957.069.200,00	405.992.000,00	395.640.000,00	-561.429.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			830.094.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.529.078.700,00	1.790.518.000,00	1.790.518.000,00	-1.738.560.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			180.314.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	350.573.800,00	37.073.800,00	37.073.800,00	-313.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			43.380.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran PAD dalam APBD Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah**				**43.74 %**	**45.01 % % %**	**30.652.857.226,00**	**29.411.217.560,00**	**28.852.962.266,00**	**6.944.518.194,00**							**37.597.375.420,00**	
		[Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah]	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**47.34**	**38.17**	**42.17**	-	-	**30.652.857.226,00**	**29.411.217.560,00**	**28.852.962.266,00**	-	-	-	-	-	-	**42.17**	**37.597.375.420,00**	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Presentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah*				100.00 % 50.00 % 93.00 %	%	30.652.857.226,00	29.411.217.560,00	28.852.962.266,00	-1.799.894.960,00			-	- -	Kota Makassar		37.597.375.420,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.075.299.400,00	762.880.000,00	762.880.000,00	-312.419.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			872.948.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	906.701.500,00	1.015.675.100,00	861.675.100,00	-45.026.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			653.520.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				8 Laporan	8 Laporan	19.766.601.326,00	17.959.165.860,00	17.989.120.916,00	-1.777.480.410,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			29.249.503.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.144.849.400,00	1.256.682.400,00	1.256.682.400,00	111.833.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			770.272.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	12 Dokumen	81.582.400,00	97.296.800,00	97.296.800,00	15.714.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			119.334.520,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	486.372.000,00	796.481.000,00	796.481.000,00	310.109.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			138.814.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	1.672.590.900,00	1.838.806.900,00	1.731.806.900,00	59.216.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PELAYANAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH							**131.281.504.000,00**	**126.229.879.925,00**	**120.848.900.000,00**	**-10.432.604.000,00**							**52.570.565.604,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**131.281.504.000,00**	**126.229.879.925,00**	**120.848.900.000,00**	**-10.432.604.000,00**							**52.570.565.604,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**131.281.504.000,00**	**126.229.879.925,00**	**120.848.900.000,00**	**-10.432.604.000,00**							**52.570.565.604,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah**				**43.74 %**	**45.01 %**	**30.652.857.226,00**	**29.411.217.560,00**	**28.852.962.266,00**	**6.944.518.194,00**							**37.597.375.420,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**30.652.857.226,00**	**29.411.217.560,00**	**28.852.962.266,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**37.597.375.420,00**	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan* *Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital* *Persentase Realisasi Pajak Daerah*				100.00 % 50.00 % 93.00 %	100.00 % 50.00 % 93.00 %	30.652.857.226,00	29.411.217.560,00	28.852.962.266,00	-1.799.894.960,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		37.597.375.420,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.279.617.900,00	1.170.578.100,00	1.170.578.100,00	-109.039.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.249.734.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	86.344.700,00	228.924.700,00	228.924.700,00	142.580.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			99.692.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PAJAK BUMI BANGUNAN							**131.281.504.000,00**	**126.229.879.925,00**	**120.848.900.000,00**	**-10.432.604.000,00**							**52.570.565.604,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**131.281.504.000,00**	**126.229.879.925,00**	**120.848.900.000,00**	**-10.432.604.000,00**							**52.570.565.604,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**131.281.504.000,00**	**126.229.879.925,00**	**120.848.900.000,00**	**-10.432.604.000,00**							**52.570.565.604,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah**				**43.74 %**	**45.01 %**	**30.652.857.226,00**	**29.411.217.560,00**	**28.852.962.266,00**	**6.944.518.194,00**							**37.597.375.420,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan* *Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital* *Persentase Realisasi Pajak Daerah*				100.00 % 50.00 % 93.00 %	100.00 % 50.00 % 93.00 %	30.652.857.226,00	29.411.217.560,00	28.852.962.266,00	-1.799.894.960,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		37.597.375.420,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				51000 Obyek Pajak	51000 Obyek Pajak	3.217.201.100,00	3.217.201.100,00	2.972.957.350,00	-244.243.750,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			3.200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT BPHTB							**131.281.504.000,00**	**126.229.879.925,00**	**120.848.900.000,00**	**-10.432.604.000,00**							**52.570.565.604,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**131.281.504.000,00**	**126.229.879.925,00**	**120.848.900.000,00**	**-10.432.604.000,00**							**52.570.565.604,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**131.281.504.000,00**	**126.229.879.925,00**	**120.848.900.000,00**	**-10.432.604.000,00**							**52.570.565.604,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah**				**95,00 42,17 56,00 % % %**	**45.01 %**	**30.652.857.226,00**	**29.411.217.560,00**	**28.852.962.266,00**	**6.944.518.194,00**							**37.597.375.420,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Realisasi Pajak Daerah*				100 %	100 % 50 % 93 %	30.652.857.226,00	29.411.217.560,00	28.852.962.266,00	-1.799.894.960,00			-	- -	Kota Makassar		37.597.375.420,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				51000 Obyek Pajak	51000 Obyek Pajak	145.599.200,00	146.439.200,00	146.439.200,00	840.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			267.704.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH							**131.281.504.000,00**	**126.229.879.925,00**	**120.848.900.000,00**	**-10.432.604.000,00**							**52.570.565.604,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**131.281.504.000,00**	**126.229.879.925,00**	**120.848.900.000,00**	**-10.432.604.000,00**							**52.570.565.604,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**131.281.504.000,00**	**126.229.879.925,00**	**120.848.900.000,00**	**-10.432.604.000,00**							**52.570.565.604,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah**				**43.74 %**	**45.01 %**	**30.652.857.226,00**	**29.411.217.560,00**	**28.852.962.266,00**	**6.944.518.194,00**							**37.597.375.420,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Realisasi Pajak Daerah*				100.00 % 50.00 % 93.00 %	100.00 % 50.00 % 93.00 %	30.652.857.226,00	29.411.217.560,00	28.852.962.266,00	-1.799.894.960,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		37.597.375.420,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				22500 Layanan	22500 Layanan	790.097.400,00	921.086.400,00	838.119.800,00	48.022.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			975.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH							**25.537.771.000,00**	**35.749.164.800,00**	**37.130.200.000,00**	**11.592.429.000,00**							**12.373.271.206,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**25.537.771.000,00**	**35.749.164.800,00**	**37.130.200.000,00**	**11.592.429.000,00**							**12.373.271.206,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**20.654.078.900,00**	**31.264.693.600,00**	**32.748.353.300,00**	**12.094.274.400,00**							**7.440.742.185,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**100 90 persen persen**	**100 100 90 % % %**	**16.366.735.100,00**	**20.848.826.275,00**	**21.506.116.515,00**	**-13.306.710.153,00**							**3.060.024.947,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**16.366.735.100,00**	**20.848.826.275,00**	**21.506.116.515,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**3.060.024.947,00**	-
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun*				19 Dokumen	19 Dokumen	52.897.800,00	52.897.975,00	40.513.400,00	-12.384.400,00			-	- -	ASN Pemerintah Kota Makassar		37.721.682,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	24.696.600,00	24.610.600,00	12.260.600,00	-12.436.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			24.943.566,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.872.400,00	3.872.400,00	3.872.400,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.911.124,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.056.600,00	4.048.900,00	4.048.900,00	-7.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.097.166,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.722.600,00	4.816.475,00	4.781.900,00	59.300,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.769.826,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.941.800,00	3.941.800,00	3.941.800,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	11.607.800,00	11.607.800,00	11.607.800,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		[Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah]	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**16.366.735.100,00**	**20.848.826.275,00**	**21.506.116.515,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**3.060.024.947,00**	-
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun*				14 Dokumen	14 Dokumen	13.973.552.530,00	15.952.731.520,00	14.796.047.595,00	822.495.065,00			-	- -	ASN Pemerintah Kota Makassar		452.252.447,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	13.526.108.830,00	15.526.108.920,00	14.363.550.795,00	837.441.965,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				18 Dokumen	12 Dokumen	295.440.000,00	274.560.000,00	280.560.000,00	-14.880.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			298.394.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	152.003.700,00	152.062.600,00	151.936.800,00	-66.900,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			153.858.047,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan*				3 Jenis	3 Jenis	642.618.250,00	1.380.498.000,00	2.101.738.000,00	1.459.119.750,00			-	- -	ASN Pemerintah Kota Makassar		649.044.433,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				116 Paket	116 Paket	101.587.500,00	105.750.000,00	105.750.000,00	4.162.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			102.603.375,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				400 Orang	400 Orang	45.942.000,00	653.088.000,00	928.328.000,00	882.386.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			46.401.420,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				20 Laporan	15 Laporan	432.088.750,00	558.660.000,00	995.660.000,00	563.571.250,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			436.409.638,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	50 Orang	63.000.000,00	63.000.000,00	72.000.000,00	9.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			63.630.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia*				6 Jenis	6 Jenis	273.655.100,00	714.866.660,00	722.954.675,00	449.299.575,00			-	- -	ASN Pemerintah Kota Makassar		482.754.851,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.538.000,00	0,00	15,00	-10.537.985,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.643.380,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	12 Paket	36.048.200,00	40.534.900,00	40.534.900,00	4.486.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			36.408.682,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	3.949.300,00	3.949.300,00	4.271.100,00	321.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.988.793,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.306.800,00	22.349.000,00	28.351.600,00	6.044.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			22.529.868,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.452.600,00	19.510.800,00	18.490.400,00	-1.962.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.657.126,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	12 Dokumen	17.280.000,00	17.280.000,00	67.280.000,00	50.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			17.452.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12 Laporan	17.489.500,00	18.306.560,00	18.306.560,00	817.060,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			17.664.395,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1 Laporan	126.158.000,00	581.158.000,00	532.442.000,00	406.284.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			333.782.780,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.461.700,00	1.398.100,00	1.398.100,00	-63.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.476.317,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	17.971.000,00	10.380.000,00	11.880.000,00	-6.091.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			18.150.710,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		[Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur]	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**	**90**	**90**	**90**	-	-	**16.366.735.100,00**	**20.848.826.275,00**	**21.506.116.515,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**3.060.024.947,00**	-
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan*				8 Unit	8 Unit	159.025.700,00	713.768.500,00	1.907.941.500,00	1.748.915.800,00			-	- -	ASN Pemerintah Kota Makassar		160.615.957,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	894.574.000,00	894.574.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	159.025.700,00	713.768.500,00	1.013.367.500,00	854.341.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			160.615.957,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan*				2 Jenis	2 Jenis	912.105.720,00	1.807.953.620,00	1.710.811.345,00	798.705.625,00			-	- -	ASN Pemerintah Kota Makassar		921.226.777,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	820.305.720,00	782.436.000,00	743.509.400,00	-76.796.320,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			828.508.777,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.800.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			56.358.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	969.717.620,00	911.501.945,00	875.501.945,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			36.360.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*				4 Jenis	4 Jenis	352.880.000,00	226.110.000,00	226.110.000,00	-126.770.000,00			-	- -	ASN Pemerintah Kota Makassar		356.408.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	27.040.000,00	27.040.000,00	-17.340.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			44.823.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	224.760.000,00	162.570.000,00	162.570.000,00	-62.190.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			227.007.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				118 Unit	118 Unit	83.740.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	-47.240.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			84.577.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**				**9.08 64.21 persen persen**	**64.21 9.08 persen persen**	**4.287.343.800,00**	**10.415.867.325,00**	**11.242.236.785,00**	**93.373.438,00**							**4.380.717.238,00**	
		[Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya]	**Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya**	**75**	**55**	**71**	-	-	**4.287.343.800,00**	**10.415.867.325,00**	**11.242.236.785,00**	-	-	-	-	-	-	**71**	**4.380.717.238,00**	-
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang dikelola*				5 Jenis	5 Jenis	1.477.621.200,00	5.877.953.600,00	6.388.888.600,00	4.911.267.400,00			-	- -	ASN Pemerintah Kota Makassar		1.500.477.412,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	250.897.400,00	250.897.400,00	79.797.400,00	-171.100.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			253.406.374,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				2 Lembaga	2 Lembaga	151.547.000,00	3.281.079.400,00	3.967.994.400,00	3.816.447.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			161.142.470,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	960.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.040.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			969.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	105.192.800,00	335.992.800,00	331.112.800,00	225.920.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			106.244.728,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	9.984.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.083.840,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah Mutasi dan Promosi ASN*				5 Dokumen	5 Dokumen	331.204.200,00	544.319.900,00	461.506.900,00	130.302.700,00			-	- -	ASN Pemerintah Kota Makassar		334.516.242,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	205.987.300,00	457.103.000,00	376.690.000,00	170.702.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			208.047.173,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				6 Dokumen	12 Dokumen	125.216.900,00	87.216.900,00	84.816.900,00	-40.400.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			126.469.069,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		[Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya]	**Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya**	**77**	**65**	**73**	-	-	**4.287.343.800,00**	**10.415.867.325,00**	**11.242.236.785,00**	-	-	-	-	-	-	**73**	**4.380.717.238,00**	-
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN yang dikelola*				3 Jenis	3 Jenis	1.785.500.300,00	2.493.000.000,00	2.544.500.000,00	758.999.700,00			-	- -	ASN Pemerintah Kota Makassar		1.803.355.303,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	263.000.300,00	993.000.000,00	1.031.000.000,00	767.999.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			265.630.303,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				12 Orang	12 Orang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.515.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	0,00	13.500.000,00	-9.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- -	- -			22.725.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		[Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya]	**Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya**	**75**	**55**	**71**	-	-	**4.287.343.800,00**	**10.415.867.325,00**	**11.242.236.785,00**	-	-	-	-	-	-	**71**	**4.380.717.238,00**	-
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang dikelola*				3 Jenis	3 Jenis	693.018.100,00	1.500.593.825,00	1.847.341.285,00	1.154.323.185,00			-	- -	ASN Pemerintah Kota Makassar		742.368.281,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				5 Dokumen	5 Dokumen	351.749.700,00	128.826.075,00	405.811.575,00	54.061.875,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			373.447.197,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				300 Orang	500 Orang	131.784.200,00	645.601.800,00	470.425.160,00	338.640.960,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			133.102.042,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				300 Orang	300 Orang	42.762.000,00	256.670.900,00	541.215.500,00	498.453.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			67.429.620,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				10 Orang	10 Orang	166.722.200,00	469.495.050,00	429.889.050,00	263.166.850,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			168.389.422,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**4.883.692.100,00**	**4.484.471.200,00**	**4.381.846.700,00**	**-501.845.400,00**							**4.932.529.021,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural** **Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan** **Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal**				**100** **20** **5.00 % Jam Pelajaran** **%**	**100** **20** **5.00 % Jam Pelajaran** **%**	**4.883.692.100,00**	**4.484.471.200,00**	**4.381.846.700,00**	**48.836.921,00**							**4.932.529.021,00**	
		[Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan]	**Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan**	**14**	**11.20**	**12**	-	-	**4.883.692.100,00**	**4.484.471.200,00**	**4.381.846.700,00**	-	-	-	-	-	-	**12**	**4.932.529.021,00**	-
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dikelola*				2 Jenis	2 Jenis	4.883.692.100,00	4.484.471.200,00	4.381.846.700,00	-501.845.400,00			-	- -	ASN Pemerintah Kota Makassar		4.932.529.021,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan	5 Laporan	2.535.445.100,00	2.502.161.900,00	2.420.558.700,00	-114.886.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.560.799.551,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		[Persentase ASN Yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional]	**Persentase ASN Yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional**	**43**	**40.72**	**41**	-	-	**4.883.692.100,00**	**4.484.471.200,00**	**4.381.846.700,00**	-	-	-	-	-	-	**41**	**4.932.529.021,00**	-
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				4 Dokumen	4 Dokumen	2.348.247.000,00	1.982.309.300,00	1.961.288.000,00	-386.959.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.371.729.470,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH							**11.954.000.000,00**	**15.703.999.529,00**	**15.475.700.000,00**	**3.521.700.000,00**							**13.751.970.563,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.954.000.000,00**	**15.703.999.529,00**	**15.475.700.000,00**	**3.521.700.000,00**							**13.751.970.563,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**11.954.000.000,00**	**15.703.999.529,00**	**15.475.700.000,00**	**3.521.700.000,00**							**13.751.970.563,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE KETERSEDIAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**				**-**	**100 %**	**8.791.954.200,00**	**10.497.812.429,00**	**9.456.229.229,00**	**-249.356.210,00**							**8.542.597.990,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**8.791.954.200,00**	**10.497.812.429,00**	**9.456.229.229,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**8.542.597.990,00**	-
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun*				2 DOKUMEN	100 %	54.234.600,00	28.925.200,00	28.925.200,00	-25.309.400,00			-	- -	-		54.235.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	21.234.900,00	7.067.100,00	7.067.100,00	-14.167.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			21.235.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	2.367.600,00	2.367.600,00	-1.632.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	1.844.400,00	1.844.400,00	-2.155.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.617.800,00	3.617.800,00	-382.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.572.200,00	3.572.200,00	-427.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**8.791.954.200,00**	**10.497.812.429,00**	**9.456.229.229,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**8.542.597.990,00**	-
	5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.572.200,00	3.572.200,00	-427.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**8.791.954.200,00**	**10.497.812.429,00**	**9.456.229.229,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**8.542.597.990,00**	-
	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	12.999.700,00	6.883.900,00	6.883.900,00	-6.115.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			13.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				12 BULAN	100 %	7.619.685.720,00	7.618.222.420,00	6.700.522.420,00	-919.163.300,00			-	- -	-		7.676.253.093,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	51 Orang/bulan	7.265.323.820,00	7.265.323.820,00	6.347.623.820,00	-917.700.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.265.318.193,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	253.800.000,00	265.800.000,00	265.800.000,00	12.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			257.520.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	87.429.200,00	74.081.700,00	74.081.700,00	-13.347.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			140.282.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.481.900,00	4.481.900,00	4.481.900,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.482.100,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	8.650.800,00	8.535.000,00	8.535.000,00	-115.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.650.800,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**8.791.954.200,00**	**10.497.812.429,00**	**9.456.229.229,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**8.542.597.990,00**	-
	5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	336.000.000,00	363.040.000,00	207.040.000,00	-128.960.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	363.040.000,00	207.040.000,00	-128.960.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**8.791.954.200,00**	**10.497.812.429,00**	**9.456.229.229,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**8.542.597.990,00**	-
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun*				12 BULAN	100 %	105.000.000,00	1.246.500.000,00	1.153.500.000,00	1.048.500.000,00			-	- -	-		72.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	33.000.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	1.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	101 Orang	72.000.000,00	1.212.000.000,00	1.119.000.000,00	1.047.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			72.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun*				3 JENIS	100 %	277.652.000,00	433.016.140,00	604.016.140,00	326.364.140,00			-	- -	-		347.654.300,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.073.800,00	0,00	0,00	-2.073.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.074.300,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	37.136.340,00	37.136.340,00	27.136.340,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.178.200,00	12.899.800,00	12.899.800,00	1.721.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.180.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	14.400.000,00	101.100.000,00	101.100.000,00	86.700.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			14.400.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47 Laporan	40 Laporan	240.000.000,00	281.880.000,00	452.880.000,00	212.880.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			310.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				4 UNIT	100 %	56.158.600,00	367.876.845,00	367.876.845,00	311.718.245,00			-	- -	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	27 Unit	56.158.600,00	367.876.845,00	367.876.845,00	311.718.245,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				12 BULAN	100 %	101.013.280,00	248.042.164,00	273.138.964,00	172.125.684,00			-	- -	-		140.014.600,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	39.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-18.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			39.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.134.300,00	6.340.500,00	6.340.500,00	4.206.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.768.600,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	59.878.980,00	220.701.664,00	245.798.464,00	185.919.484,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			99.246.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				10 PAKET	100 %	242.210.000,00	192.189.660,00	121.209.660,00	-121.000.340,00			-	- -	-		252.440.997,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	0,00	0,00	-44.380.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			48.818.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	159.930.000,00	159.930.000,00	88.950.000,00	-70.980.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			175.922.997,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			6.700.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.600.000,00	24.959.660,00	24.959.660,00	-5.640.340,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			21.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan**				**100 %**	**100 %**	**3.162.045.800,00**	**5.206.187.100,00**	**6.019.470.771,00**	**2.047.326.773,00**							**5.209.372.573,00**	
		[Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan]	**Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan**	**100**	**0**	**100**	-	-	**3.162.045.800,00**	**5.206.187.100,00**	**6.019.470.771,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**5.209.372.573,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	*Persentase Penelitian Pengembangan Pengkajian dan Penerapan Yang Terlaksana*				18 Rekomendasi	100 %	1.932.685.800,00	3.411.020.700,00	3.840.051.071,00	1.907.365.271,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, NGO, Media dan Masyarakat		3.533.747.871,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																		
			Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				1 Laporan	0 Laporan	245.853.300,00	0,00	0,00	-245.853.300,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			171.995.922,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset																		
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset				3 Naskah	5 Naskah	576.654.100,00	1.037.209.000,00	1.010.209.000,00	433.554.900,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.065.701.725,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				10 Laporan	7 Laporan	893.825.900,00	1.850.432.300,00	1.720.532.300,00	826.706.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.913.093.107,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																		
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				1 Laporan	2 Laporan	36.090.300,00	366.452.000,00	952.382.371,00	916.292.071,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			222.106.532,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																		
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				2 Pelatihan	3 Pelatihan	180.262.200,00	156.927.400,00	156.927.400,00	-23.334.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			160.850.585,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	*Persentase Invensi dan Inovasi yang terlaksana*				110 produk	100 Persen	1.229.360.000,00	1.795.166.400,00	2.179.419.700,00	950.059.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, NGO, Media dan Masyarakat		1.675.624.702,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah				1 Laporan	1 Laporan	153.894.100,00	120.983.300,00	120.983.300,00	-32.910.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			153.894.100,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)				1 Laporan	1 Laporan	75.621.000,00	114.554.100,00	102.554.100,00	26.933.100,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			75.621.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi				1 Laporan	1 Laporan	49.995.000,00	49.995.000,00	451.348.300,00	401.353.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			49.995.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)				1 Laporan	1 Laporan	58.285.000,00	58.285.000,00	47.485.000,00	-10.800.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			58.285.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah																		
			Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah				1 Kegiatan	3 Kegiatan	384.701.000,00	754.980.500,00	731.780.500,00	347.079.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			773.035.012,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				1 Laporan	1 Laporan	128.242.400,00	112.702.200,00	149.702.200,00	21.459.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			152.242.400,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi																		
			Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi				1 Naskah	2 Naskah	143.769.600,00	368.359.600,00	360.559.600,00	216.790.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			377.568.590,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah				1 Laporan	1 Laporan	199.993.100,00	182.247.900,00	181.947.900,00	-18.045.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0026	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset				1 Laporan	1 Laporan	34.858.800,00	33.058.800,00	33.058.800,00	-1.800.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			34.983.600,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		INSPEKTORAT DAERAH							**50.428.400.000,00**	**38.362.985.900,00**	**36.555.600.000,00**	**-13.872.800.000,00**							**54.381.829.722,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**50.428.400.000,00**	**38.362.985.900,00**	**36.555.600.000,00**	**-13.872.800.000,00**							**54.381.829.722,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**50.428.400.000,00**	**38.362.985.900,00**	**36.555.600.000,00**	**-13.872.800.000,00**							**54.381.829.722,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersedian Sarana dan Prasarana Aparatur**				**90 100 % %**	**100 90 % %**	**46.613.620.580,00**	**35.866.406.480,00**	**33.729.105.400,00**	**3.009.593.108,00**							**49.623.213.688,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**46.613.620.580,00**	**35.866.406.480,00**	**33.729.105.400,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**49.623.213.688,00**	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				100 %	100 %	159.068.520,00	159.068.520,00	126.838.000,00	-32.230.520,00			-	- -	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait		163.520.550,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	20 Dokumen	130.732.120,00	130.732.120,00	111.101.600,00	-19.630.520,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			147.520.550,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.919.600,00	10.919.600,00	4.919.600,00	-6.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.768.100,00	10.768.100,00	4.768.100,00	-6.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Rappocini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.389.900,00	3.389.900,00	3.089.900,00	-300.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.258.800,00	3.258.800,00	2.958.800,00	-300.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase kinerja dan pelaporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dihasilkan*				100 %	100 %	25.622.901.340,00	25.622.901.340,00	22.904.708.875,00	-2.718.192.465,00			-	- -	Inspektorat Daerah		28.897.515.788,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				112 Orang/ bulan	98 Orang/b ulan	25.165.766.540,00	25.165.766.540,00	22.554.394.275,00	-2.611.372.265,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			28.406.642.984,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	262.080.000,00	262.080.000,00	228.480.000,00	-33.600.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			307.920.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.365.700,00	4.365.700,00	3.405.700,00	-960.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.135.644,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	190.689.100,00	190.689.100,00	118.428.900,00	-72.260.200,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			178.817.160,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dihasilkan*				100 %	100 %	12.918.545.400,00	3.660.449.400,00	3.934.213.700,00	-8.984.331.700,00			-	- -	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait		13.098.905.948,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				226 Paket	315 Paket	139.365.000,00	139.365.000,00	157.657.500,00	18.292.500,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			216.550.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				103 Orang	98 Orang	12.735.192.000,00	3.477.096.000,00	3.733.500.000,00	-9.001.692.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.800.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				64 Orang	64 Orang	43.988.400,00	43.988.400,00	43.056.200,00	-932.200,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			82.355.148,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan adminitrasi umum perangkat daerah yang disusun*				100 %	100 %	2.501.715.100,00	2.111.403.100,00	1.607.723.500,00	-893.991.600,00			-	- -	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait		3.115.569.260,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	12 Paket	7.909.500,00	7.909.500,00	26.832.500,00	18.923.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			13.520.880,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	21 Paket	324.088.500,00	305.363.500,00	146.254.100,00	-177.834.400,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			109.865.196,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	19 Paket	293.639.800,00	259.250.800,00	305.044.900,00	11.405.100,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			458.835.840,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	5 Paket	46.395.300,00	46.395.300,00	45.165.300,00	-1.230.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			89.850.720,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.018.624,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50.900.000,00	50.900.000,00	72.246.700,00	21.346.700,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			90.784.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	35 Laporan	1.533.198.000,00	1.196.000.000,00	774.000.000,00	-759.198.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.995.594.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	240.424.000,00	240.424.000,00	233.020.000,00	-7.404.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			351.099.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dihasilkan*				100 %	100 %	1.728.387.500,00	828.465.400,00	2.362.634.900,00	634.247.400,00			-	- -	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait		439.667.520,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	91 Unit	50.720.000,00	18.120.000,00	410.102.000,00	359.382.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			330.205.848,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				161 Unit	104 Unit	1.677.667.500,00	810.345.400,00	1.952.532.900,00	274.865.400,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			109.461.672,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun*				100 %	100 %	2.247.791.720,00	2.247.791.720,00	1.550.600.600,00	-697.191.120,00			-	- -	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait		2.659.123.222,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	204.373.760,00	204.373.760,00	170.508.200,00	-33.865.560,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			197.041.222,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	417.883.200,00	417.883.200,00	431.833.200,00	13.950.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			430.602.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00	576.000.000,00	-516.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			1.731.480.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	9 Laporan	533.534.760,00	533.534.760,00	372.259.200,00	-161.275.560,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun*				100 %	100 %	1.435.211.000,00	1.236.327.000,00	1.242.385.825,00	-192.825.175,00			-	- -	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait		1.248.911.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.380.000,00	44.380.000,00	44.380.000,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			44.380.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	417.130.000,00	417.130.000,00	417.130.000,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			317.101.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				225 Unit	137 Unit	156.010.000,00	87.570.000,00	93.570.000,00	-62.440.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			131.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**46.613.620.580,00**	**35.866.406.480,00**	**33.729.105.400,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**49.623.213.688,00**	-
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	817.691.000,00	687.247.000,00	687.305.825,00	-130.385.175,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			756.330.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1**				**78.21 %**	**78.21 %**	**2.960.628.020,00**	**1.765.728.020,00**	**2.191.933.300,00**	**555.949.935,00**							**3.516.577.955,00**	
		[Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1]	**Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1**	**82.21**	**76.21**	**77.21**	-	-	**2.960.628.020,00**	**1.765.728.020,00**	**2.191.933.300,00**	-	-	-	-	-	-	**78.21**	**3.516.577.955,00**	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Disusun*				100 %	100 %	2.745.876.720,00	1.613.376.720,00	1.716.670.800,00	-1.029.205.920,00			-	- -	SKPD, Masyarakat, ASN dan Stakeholder		3.134.469.479,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	86.103.100,00	15.303.100,00	15.073.100,00	-71.030.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			84.632.837,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				88 Laporan	88 Laporan	541.359.500,00	216.159.500,00	140.869.500,00	-400.490.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			683.973.280,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				208 Laporan	13 Laporan	274.241.800,00	274.241.800,00	172.866.800,00	-101.375.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			173.263.460,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				26 Laporan	14 Laporan	74.925.000,00	45.625.000,00	44.850.200,00	-30.074.800,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			22.541.420,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				24 Kesepakatan	30 Kesepakatan	704.530.800,00	544.330.800,00	758.543.400,00	54.012.600,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			827.809.580,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				6 Dokumen	6 Dokumen	1.064.716.520,00	517.716.520,00	584.467.800,00	-480.248.720,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.342.248.902,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu disusun*				100 %	100 %	214.751.300,00	152.351.300,00	475.262.500,00	260.511.200,00			-	- -	SKPD, Masyarakat, ASN dan Stakeholder		382.108.476,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				12 Laporan	12 Laporan	20.156.600,00	20.156.600,00	9.569.200,00	-10.587.400,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.987.056,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				24 Laporan	24 Laporan	194.594.700,00	132.194.700,00	465.693.300,00	271.098.600,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			371.121.420,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**				**3 Level**	**3 Level**	**854.151.400,00**	**730.851.400,00**	**634.561.300,00**	**387.886.679,00**							**1.242.038.079,00**	
		[Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)]	**Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**	**3**	**3**	**3**	-	-	**854.151.400,00**	**730.851.400,00**	**634.561.300,00**	-	-	-	-	-	-	**3**	**1.242.038.079,00**	-
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Persentase capaian perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang disusun*				100 %	100 %	309.659.000,00	304.259.000,00	227.400.000,00	-82.259.000,00			-	- -	SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar		497.401.846,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				52 Rekomendasi	52 Rekomendasi	134.902.000,00	134.902.000,00	93.415.000,00	-41.487.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			191.165.784,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	174.757.000,00	169.357.000,00	133.985.000,00	-40.772.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			306.236.062,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase capaian pendampingan dan asistensi yang disusun*				100 %	100 %	544.492.400,00	426.592.400,00	407.161.300,00	-137.331.100,00			-	- -	SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar		744.636.233,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	29.070.000,00	29.070.000,00	25.955.000,00	-3.115.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			32.734.210,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	292.077.000,00	246.177.000,00	198.317.000,00	-93.760.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			257.717.489,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	5 Kegiatan	125.352.500,00	53.352.500,00	52.190.300,00	-73.162.200,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- -	- -			290.783.890,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	97.992.900,00	97.992.900,00	130.699.000,00	32.706.100,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			163.400.644,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN BIRINGKANAYA							**51.308.034.625,00**	**49.374.295.610,00**	**48.869.216.971,00**	**-2.438.817.654,00**							**52.630.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**51.308.034.625,00**	**49.374.295.610,00**	**48.869.216.971,00**	**-2.438.817.654,00**							**52.630.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**51.308.034.625,00**	**49.374.295.610,00**	**48.869.216.971,00**	**-2.438.817.654,00**							**52.630.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah** **Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100** **100** **90 %** **%** **%**	**18.692.856.488,00**	**20.191.075.498,00**	**19.366.815.659,00**	**1.447.143.512,00**							**20.140.000.000,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**18.692.856.488,00**	**20.191.075.498,00**	**19.366.815.659,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**20.140.000.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah* *Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				-	100 % 100% undefined	34.841.400,00	23.939.100,00	23.939.100,00	-10.902.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat			61.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.731.300,00	4.595.300,00	4.595.300,00	-2.136.000,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				12.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.828.400,00	2.988.200,00	2.988.200,00	-840.200,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				7.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	3.828.400,00	2.988.200,00	2.988.200,00	-840.200,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				7.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.828.400,00	2.988.200,00	2.988.200,00	-840.200,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				7.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.894.000,00	3.053.800,00	3.053.800,00	-840.200,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				7.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.973.700,00	2.963.200,00	2.963.200,00	-10.500,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				7.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	9.757.200,00	4.362.200,00	4.362.200,00	-5.395.000,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				14.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian,Perlengkapan dan keuangan)*				-	100 %	16.417.422.396,00	16.334.674.806,00	15.597.797.643,00	-819.624.753,00			-	- -	-		15.100.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	13.539.843.396,00	14.299.843.506,00	13.515.565.943,00	-24.277.453,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.000.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	750.960.000,00	637.320.000,00	635.250.000,00	-115.710.000,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			800.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	91.783.000,00	336.285.300,00	336.284.500,00	244.501.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.034.836.000,00	1.061.226.000,00	1.110.697.200,00	-924.138.800,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.200.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**18.692.856.488,00**	**20.191.075.498,00**	**19.366.815.659,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**20.140.000.000,00**	-
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	216.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**18.692.856.488,00**	**20.191.075.498,00**	**19.366.815.659,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**20.140.000.000,00**	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian,Perlengkapan dan keuangan)*				-	100 %	411.000.000,00	480.000.000,00	519.000.000,00	108.000.000,00			-	- -	-		400.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				265 Paket	265 Paket	216.000.000,00	157.500.000,00	157.500.000,00	-58.500.000,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	195.000.000,00	322.500.000,00	361.500.000,00	166.500.000,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian,Perlengkapan dan keuangan)*				-	100 %	152.806.000,00	336.784.500,00	258.784.500,00	105.978.500,00			-	- -	-		254.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	176.000,00	15.754.500,00	15.754.500,00	15.578.500,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			23.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	108.640.000,00	155.040.000,00	155.040.000,00	46.400.000,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			105.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	34.000.000,00	156.000.000,00	78.000.000,00	44.000.000,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			120.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian,Perlengkapan dan keuangan)*				-	100 %	508.888.692,00	1.991.701.592,00	2.098.016.916,00	1.589.128.224,00			-	- -	-		3.040.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	231.420.192,00	231.420.192,00	231.735.516,00	315.324,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			240.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	93.658.500,00	1.464.281.400,00	1.464.281.400,00	1.370.622.900,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			2.100.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	183.810.000,00	296.000.000,00	402.000.000,00	218.190.000,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			700.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik*				-	100 %	951.898.000,00	893.975.500,00	739.277.500,00	-212.620.500,00			-	- -	-		1.285.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.770.000,00	266.840.000,00	56.880.000,00	17.110.000,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				159 Unit	159 Unit	352.308.000,00	372.368.000,00	427.630.000,00	75.322.000,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	300.200.000,00	177.617.500,00	177.617.500,00	-122.582.500,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			850.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				110 Unit	110 Unit	259.620.000,00	77.150.000,00	77.150.000,00	-182.470.000,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			90.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan**				**-**	**90 %**	**18.807.906.600,00**	**16.015.004.580,00**	**15.825.034.580,00**	**-1.717.906.600,00**							**17.090.000.000,00**	
		[Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan]	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**100**	**98.18**	**100**	-	-	**18.807.906.600,00**	**16.015.004.580,00**	**15.825.034.580,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**17.090.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	17.233.200,00	22.401.500,00	37.921.500,00	20.688.300,00			-	- -	Masyarakat		90.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	17.233.200,00	22.401.500,00	37.921.500,00	20.688.300,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			90.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan*				-	100 %	18.790.673.400,00	15.992.603.080,00	15.787.113.080,00	-3.003.560.320,00			-	- -	-		17.000.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				11 Laporan	11 Laporan	18.790.673.400,00	15.992.603.080,00	15.787.113.080,00	-3.003.560.320,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			17.000.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**2.951.826.625,00**	**181.519.100,00**	**181.497.600,00**	**-2.701.826.625,00**							**250.000.000,00**	
		[Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik]	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**100**	**100**	**100**	-	-	**2.951.826.625,00**	**181.519.100,00**	**181.497.600,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**250.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan*				-	100 %	2.951.826.625,00	181.519.100,00	181.497.600,00	-2.770.329.025,00			-	- -	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		250.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	182.777.200,00	181.519.100,00	181.497.600,00	-1.279.600,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan**				**-**	**90 %**	**580.414.000,00**	**512.538.300,00**	**512.538.300,00**	**-430.414.000,00**							**150.000.000,00**	
		[Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**580.414.000,00**	**512.538.300,00**	**512.538.300,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**150.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum di tingkat kecamatan*				-	100 %	580.414.000,00	512.538.300,00	512.538.300,00	-67.875.700,00			-	- -	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		150.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	448.414.000,00	380.538.300,00	380.538.300,00	-67.875.700,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan**				**-**	**100 %**	**10.275.030.912,00**	**12.474.158.132,00**	**12.983.330.832,00**	**4.724.969.088,00**							**15.000.000.000,00**	
		[Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**10.275.030.912,00**	**12.474.158.132,00**	**12.983.330.832,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**15.000.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan*				-	100 %	10.275.030.912,00	12.474.158.132,00	12.983.330.832,00	2.708.299.920,00			-	- -	-		15.000.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				11 Dokumen	11 Dokumen	10.275.030.912,00	12.474.158.132,00	12.983.330.832,00	2.708.299.920,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			15.000.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
		KELURAHAN LAIKANG KECAMATAN BIRINGKANAYA							**0,00**	**497.139.675,00**	**497.139.675,00**	**497.139.675,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**497.139.675,00**	**497.139.675,00**	**497.139.675,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**497.139.675,00**	**497.139.675,00**	**497.139.675,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**497.139.675,00**	**497.139.675,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**0,00**	**497.139.675,00**	**497.139.675,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**500.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	497.139.675,00	497.139.675,00	497.139.675,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Laikang		500.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	399.869.275,00	399.869.275,00	399.869.275,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Laikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			400.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	97.270.400,00	97.270.400,00	97.270.400,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Laikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			100.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN SUDIANG KECAMATAN BIRINGKANAYA							**400.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**100.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**400.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**100.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**400.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasaran lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**400.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-400.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	400.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Sudiang		0,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Sudiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Sudiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA							**0,00**	**488.494.545,00**	**488.494.545,00**	**488.494.545,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**488.494.545,00**	**488.494.545,00**	**488.494.545,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**488.494.545,00**	**488.494.545,00**	**488.494.545,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Keluraha yang mendapat pemberdayaan** **Persentase Sarana dan Prasaran lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**488.494.545,00**	**488.494.545,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan*				-	100 %	0,00	488.494.545,00	488.494.545,00	488.494.545,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Berua		0,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	3 Unit	0,00	388.511.500,00	388.511.500,00	388.511.500,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Berua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0,00	99.983.045,00	99.983.045,00	99.983.045,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Berua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN PACCERAKKANG KECAMATAN BIRINGKANAYA							**0,00**	**498.941.800,00**	**498.941.800,00**	**498.941.800,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**498.941.800,00**	**498.941.800,00**	**498.941.800,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**498.941.800,00**	**498.941.800,00**	**498.941.800,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase Sarana dan Prasaran lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**498.941.800,00**	**498.941.800,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	498.941.800,00	498.941.800,00	498.941.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Paccerakkang		500.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	399.935.055,00	399.935.055,00	399.935.055,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Paccerakkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			400.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	99.006.745,00	99.006.745,00	99.006.745,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Paccerakkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			100.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN BAKUNG KECAMATAN BIRINGKANAYA							**0,00**	**498.634.500,00**	**498.634.500,00**	**498.634.500,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**498.634.500,00**	**498.634.500,00**	**498.634.500,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**498.634.500,00**	**498.634.500,00**	**498.634.500,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasaran lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**498.634.500,00**	**498.634.500,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	498.634.500,00	498.634.500,00	498.634.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Bakung		0,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	399.846.800,00	399.846.800,00	399.846.800,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0,00	98.787.700,00	98.787.700,00	98.787.700,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA							**500.000.000,00**	**495.283.600,00**	**495.283.600,00**	**-4.716.400,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**495.283.600,00**	**495.283.600,00**	**-4.716.400,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**495.283.600,00**	**495.283.600,00**	**-4.716.400,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasaran lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**495.283.600,00**	**495.283.600,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	495.283.600,00	495.283.600,00	-4.716.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Untia		500.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	400.000.100,00	400.000.100,00	400.000.100,00	0,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Untia	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			400.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	99.999.900,00	95.283.500,00	95.283.500,00	-4.716.400,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Untia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			100.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KELURAHAN BULUROKENG KECAMATAN BIRINGKANAYA							**0,00**	**446.975.745,00**	**446.975.745,00**	**446.975.745,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**446.975.745,00**	**446.975.745,00**	**446.975.745,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**446.975.745,00**	**446.975.745,00**	**446.975.745,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Mayarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasaran lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**446.975.745,00**	**446.975.745,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan*				100 %	100 %	0,00	446.975.745,00	446.975.745,00	446.975.745,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Bulurokeng		500.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	400.331.345,00	400.331.345,00	400.331.345,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Bulurokeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			400.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	46.644.400,00	46.644.400,00	46.644.400,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Bulurokeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			100.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA							**500.000.000,00**	**499.985.800,00**	**499.985.800,00**	**-14.200,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**499.985.800,00**	**499.985.800,00**	**-14.200,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**499.985.800,00**	**499.985.800,00**	**-14.200,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Mayarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasaran lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**499.985.800,00**	**499.985.800,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	499.985.800,00	499.985.800,00	-14.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Katimbang		500.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	438.016.800,00	438.016.800,00	438.016.800,00	0,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Katimbang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			400.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	61.983.200,00	61.969.000,00	61.969.000,00	-14.200,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Katimbang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			100.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
		KELURAHAN DAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA							**500.000.000,00**	**499.907.406,00**	**499.907.406,00**	**-92.594,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**499.907.406,00**	**499.907.406,00**	**-92.594,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**499.907.406,00**	**499.907.406,00**	**-92.594,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Mayarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasaran lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**499.907.406,00**	**499.907.406,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	499.907.406,00	499.907.406,00	-92.594,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Daya		500.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	400.000.000,00	399.909.906,00	399.909.906,00	-90.094,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Daya	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			400.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	99.997.500,00	99.997.500,00	-2.500,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Daya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			100.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
		KELURAHAN PAI KECAMATAN BIRINGKANAYA							**330.950.375,00**	**499.310.200,00**	**499.310.200,00**	**168.359.825,00**							**498.531.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**330.950.375,00**	**499.310.200,00**	**499.310.200,00**	**168.359.825,00**							**498.531.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**330.950.375,00**	**499.310.200,00**	**499.310.200,00**	**168.359.825,00**							**498.531.500,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Mayarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasaran lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**330.950.375,00**	**499.310.200,00**	**499.310.200,00**	**167.581.125,00**							**498.531.500,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	330.950.375,00	499.310.200,00	499.310.200,00	168.359.825,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Pai		498.531.500,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	330.950.375,00	330.950.375,00	330.950.375,00	0,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			365.131.500,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	168.359.825,00	168.359.825,00	168.359.825,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			133.400.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN SUDIANG RAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA							**500.000.000,00**	**499.942.195,00**	**499.942.195,00**	**-57.805,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**499.942.195,00**	**499.942.195,00**	**-57.805,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**499.942.195,00**	**499.942.195,00**	**-57.805,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Mayarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasaran lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**499.942.195,00**	**499.942.195,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	499.942.195,00	499.942.195,00	-57.805,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Sudiang Raya		500.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	400.000.000,00	399.942.195,00	399.942.195,00	-57.805,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Sudiang Raya	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			400.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Biringkanaya, Sudiang Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			100.000.000,00	KECAMATAN BIRINGKANAYA
		KECAMATAN BONTOALA							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah** **Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**90 %**	**100** **100** **90 %** **%** **%**	**16.755.598.320,00**	**18.652.250.308,00**	**16.229.416.334,00**	**1.378.041.680,00**							**18.133.640.000,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**16.755.598.320,00**	**18.652.250.308,00**	**16.229.416.334,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**18.133.640.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah*				100 %	100 %	43.182.900,00	28.502.900,00	28.502.900,00	-14.680.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Kecamatan Bontoala		71.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	19.716.000,00	10.436.000,00	10.436.000,00	-9.280.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			35.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.457.000,00	4.857.000,00	4.857.000,00	-3.600.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			9.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.003.300,00	4.403.300,00	4.403.300,00	-600.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			9.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.003.300,00	4.403.300,00	4.403.300,00	-600.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			9.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.003.300,00	4.403.300,00	4.403.300,00	-600.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			9.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	14.469.954.876,00	14.474.247.308,00	12.640.867.834,00	-1.829.087.042,00			-	- -	-		12.882.640.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	13.533.954.876,00	13.538.247.308,00	11.712.307.834,00	-1.821.647.042,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	720.000.000,00	720.000.000,00	712.560.000,00	-7.440.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			692.640.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			190.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**16.755.598.320,00**	**18.652.250.308,00**	**16.229.416.334,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**18.133.640.000,00**	-
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	216.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN BONTOALA
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**16.755.598.320,00**	**18.652.250.308,00**	**16.229.416.334,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**18.133.640.000,00**	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	120.000.000,00	772.500.000,00	897.000.000,00	777.000.000,00			-	- -	-		650.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	120.000.000,00	772.500.000,00	897.000.000,00	777.000.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			650.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	339.104.100,00	400.975.700,00	508.975.700,00	169.871.600,00			-	- -	-		750.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.945.000,00	21.020.100,00	21.020.100,00	-3.924.900,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	90.578.700,00	91.509.700,00	91.509.700,00	931.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			95.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	74.719.800,00	79.819.800,00	79.819.800,00	5.100.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			65.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.960.600,00	33.686.100,00	33.686.100,00	-274.500,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.220.000,00	100.260.000,00	100.260.000,00	98.040.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.680.000,00	4.680.000,00	154.680.000,00	150.000.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00	70.000.000,00	28.000.000,00	-80.000.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	12.314.300,00	1.342.720.900,00	260.718.200,00	248.403.900,00			-	- -	-		1.500.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	12.314.300,00	1.342.720.900,00	260.718.200,00	248.403.900,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			1.500.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.107.562.144,00	691.301.500,00	811.349.700,00	-296.212.444,00			-	- -	-		1.700.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	189.565.000,00	189.565.000,00	189.565.000,00	0,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	917.997.144,00	501.736.500,00	621.784.700,00	-296.212.444,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.500.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	447.480.000,00	812.002.000,00	952.002.000,00	504.522.000,00			-	- -	-		580.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37.880.000,00	37.880.000,00	37.880.000,00	0,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				103 Unit	103 Unit	191.660.000,00	191.660.000,00	331.660.000,00	140.000.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				120 Unit	120 Unit	121.800.000,00	81.200.000,00	81.200.000,00	-40.600.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			130.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	96.140.000,00	501.262.000,00	501.262.000,00	405.122.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan**				**100 %**	**90 %**	**7.992.524.600,00**	**9.310.579.000,00**	**10.025.103.600,00**	**7.007.475.400,00**							**15.000.000.000,00**	
		[Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan]	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**7.992.524.600,00**	**9.310.579.000,00**	**10.025.103.600,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**15.000.000.000,00**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Terciptanya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				1 Tahun	1 Tahun	7.992.524.600,00	9.310.579.000,00	10.025.103.600,00	2.032.579.000,00			-	- -	-		15.000.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	7.992.524.600,00	9.310.579.000,00	10.025.103.600,00	2.032.579.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			15.000.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.779.564.700,00**	**5.779.558.312,00**	**5.779.456.712,00**	**-2.236.724.697,00**							**3.542.840.003,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.779.564.700,00**	**5.779.558.312,00**	**5.779.456.712,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.542.840.003,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	112.737.500,00	112.737.500,00	112.737.500,00	0,00			-	- -	-		200.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	112.737.500,00	112.737.500,00	112.737.500,00	0,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
		[Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik]	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**100**	**100**	**100**	-	-	**5.779.564.700,00**	**5.779.558.312,00**	**5.779.456.712,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**3.542.840.003,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.666.827.200,00	5.666.820.812,00	5.666.719.212,00	-107.988,00			-	- -	-		3.342.840.003,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	166.827.200,00	166.827.200,00	166.725.600,00	-101.600,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**				**-**	**90 %**	**612.800.000,00**	**699.200.000,00**	**699.200.000,00**	**131.200.000,00**							**744.000.000,00**	
		[Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**612.800.000,00**	**699.200.000,00**	**699.200.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**744.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	612.800.000,00	699.200.000,00	699.200.000,00	86.400.000,00			-	- -	-		744.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	468.800.000,00	555.200.000,00	555.200.000,00	86.400.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			144.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**				**-**	**100 %**	**6.675.928.380,00**	**6.372.268.380,00**	**6.464.200.380,00**	**5.324.071.620,00**							**12.000.000.000,00**	
		[Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**6.675.928.380,00**	**6.372.268.380,00**	**6.464.200.380,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**12.000.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	6.675.928.380,00	6.372.268.380,00	6.464.200.380,00	-211.728.000,00			-	- -	-		12.000.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	6.675.928.380,00	6.372.268.380,00	6.464.200.380,00	-211.728.000,00	Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.000.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
		KELURAHAN LAYANG KECAMATAN BONTOALA							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**5.779.564.700,00**	**5.779.558.312,00**	**5.779.456.712,00**	**-2.236.724.697,00**							**3.542.840.003,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.779.564.700,00**	**5.779.558.312,00**	**5.779.456.712,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.542.840.003,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.666.827.200,00	5.666.820.812,00	5.666.719.212,00	-107.988,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		3.342.840.003,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	434.653.050,00	434.653.050,00	434.653.050,00	0,00	Kota Makassar, Bontoala, Layang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	65.346.950,00	65.346.950,00	65.346.950,00	0,00	Kota Makassar, Bontoala, Layang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BONTOALA
		KELURAHAN TIMUNGAN LOMPOA KECAMATAN BONTOALA							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**5.779.564.700,00**	**5.779.558.312,00**	**5.779.456.712,00**	**-2.236.724.697,00**							**3.542.840.003,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.666.827.200,00	5.666.820.812,00	5.666.719.212,00	-107.988,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		3.342.840.003,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	300.000.000,00	299.999.904,00	299.999.904,00	-96,00	Kota Makassar, Bontoala, Timungan Lompoa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Bontoala, Timungan Lompoa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
		KELURAHAN BONTOALA PARANG KECAMATAN BONTOALA							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**5.779.564.700,00**	**5.779.558.312,00**	**5.779.456.712,00**	**-2.236.724.697,00**							**3.542.840.003,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.666.827.200,00	5.666.820.812,00	5.666.719.212,00	-107.988,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		3.342.840.003,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	300.000.000,00	299.999.875,00	299.999.875,00	-125,00	Kota Makassar, Bontoala, Bontoala Parang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	199.999.900,00	199.999.900,00	-100,00	Kota Makassar, Bontoala, Bontoala Parang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
		KELURAHAN BUNGA EJAYA KECAMATAN BONTOALA							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.779.564.700,00**	**5.779.558.312,00**	**5.779.456.712,00**	**-2.236.724.697,00**							**3.542.840.003,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.666.827.200,00	5.666.820.812,00	5.666.719.212,00	-107.988,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		3.342.840.003,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	300.000.000,00	299.999.820,00	299.999.820,00	-180,00	Kota Makassar, Bontoala, Malimongan Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	199.999.500,00	199.999.500,00	-500,00	Kota Makassar, Bontoala, Malimongan Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
		KELURAHAN WAJO BARU KECAMATAN BONTOALA							**500.000.000,00**	**499.999.500,00**	**499.999.500,00**	**-500,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**499.999.500,00**	**499.999.500,00**	**-500,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**499.999.500,00**	**499.999.500,00**	**-500,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompokmasyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasaranalingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**499.999.500,00**	**499.999.500,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	499.999.500,00	499.999.500,00	-500,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		500.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	300.000.000,00	299.999.800,00	299.999.800,00	-200,00	Kota Makassar, Bontoala, Wajo Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	199.999.700,00	199.999.700,00	-300,00	Kota Makassar, Bontoala, Wajo Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
		KELURAHAN BARAYA KECAMATAN BONTOALA							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.779.564.700,00**	**5.779.558.312,00**	**5.779.456.712,00**	**-2.236.724.697,00**							**3.542.840.003,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.666.827.200,00	5.666.820.812,00	5.666.719.212,00	-107.988,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		3.342.840.003,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	300.000.000,00	299.999.973,00	299.999.973,00	-27,00	Kota Makassar, Bontoala, Baraya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	199.999.640,00	199.999.640,00	-360,00	Kota Makassar, Bontoala, Baraya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
		KELURAHAN BONTOALA TUA KECAMATAN BONTOALA							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.779.564.700,00**	**5.779.558.312,00**	**5.779.456.712,00**	**-2.236.724.697,00**							**3.542.840.003,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.666.827.200,00	5.666.820.812,00	5.666.719.212,00	-107.988,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		3.342.840.003,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	299.999.957,00	299.999.957,00	-43,00	Kota Makassar, Bontoala, Bontoala Tua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	199.999.700,00	199.999.700,00	-300,00	Kota Makassar, Bontoala, Bontoala Tua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BONTOALA
		KELURAHAN MALIMONGAN BARU KECAMATAN BONTOALA							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.779.564.700,00**	**5.779.558.312,00**	**5.779.456.712,00**	**-2.236.724.697,00**							**3.542.840.003,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.666.827.200,00	5.666.820.812,00	5.666.719.212,00	-107.988,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		3.342.840.003,00	KECAMATAN BONTOALA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	299.999.621,00	299.999.621,00	-379,00	Kota Makassar, Bontoala, Malimongan Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	199.999.700,00	199.999.700,00	-300,00	Kota Makassar, Bontoala, Malimongan Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN BONTOALA
		KELURAHAN TOMPO BALANG KECAMATAN BONTOALA							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.779.564.700,00**	**5.779.558.312,00**	**5.779.456.712,00**	**-2.236.724.697,00**							**3.542.840.003,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	100 %	5.666.827.200,00	5.666.820.812,00	5.666.719.212,00	-107.988,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		3.342.840.003,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Bontoala, Tompo Balang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	199.999.300,00	199.999.300,00	-700,00	Kota Makassar, Bontoala, Tompo Balang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BONTOALA
		KELURAHAN PARANG LAYANG KECAMATAN BONTOALA							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.779.564.700,00**	**5.779.558.312,00**	**5.779.456.712,00**	**-2.236.724.697,00**							**3.542.840.003,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.666.827.200,00	5.666.820.812,00	5.666.719.212,00	-107.988,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		3.342.840.003,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	274.855.000,00	274.854.870,00	274.854.870,00	-130,00	Kota Makassar, Bontoala, Parang Layang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	225.145.000,00	225.145.000,00	225.145.000,00	0,00	Kota Makassar, Bontoala, Parang Layang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BONTOALA
		KELURAHAN GADDONG KECAMATAN BONTOALA							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.779.564.700,00**	**5.779.558.312,00**	**5.779.456.712,00**	**-2.236.724.697,00**							**3.542.840.003,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	100 %	5.666.827.200,00	5.666.820.812,00	5.666.719.212,00	-107.988,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		3.342.840.003,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	407.160.000,00	407.159.632,00	407.159.632,00	-368,00	Kota Makassar, Bontoala, Gaddong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	92.840.000,00	92.839.900,00	92.839.900,00	-100,00	Kota Makassar, Bontoala, Gaddong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			92.840.000,00	KECAMATAN BONTOALA
		KELURAHAN BONTOALA KECAMATAN BONTOALA							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**37.816.416.000,00**	**40.813.856.000,00**	**39.197.377.026,00**	**1.380.961.026,00**							**49.420.480.003,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.779.564.700,00**	**5.779.558.312,00**	**5.779.456.712,00**	**-2.236.724.697,00**							**3.542.840.003,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.666.827.200,00	5.666.820.812,00	5.666.719.212,00	-107.988,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		3.342.840.003,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	319.850.000,00	319.847.380,00	319.847.380,00	-2.620,00	Kota Makassar, Bontoala, Bontoala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			291.320.000,00	KECAMATAN BONTOALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	180.150.000,00	180.149.940,00	180.149.940,00	-60,00	Kota Makassar, Bontoala, Bontoala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			208.680.000,00	KECAMATAN BONTOALA
		KECAMATAN MAKASSAR							**49.216.926.000,00**	**45.671.187.250,00**	**46.385.586.841,00**	**-2.831.339.159,00**							**53.930.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**49.216.926.000,00**	**45.671.187.250,00**	**46.385.586.841,00**	**-2.831.339.159,00**							**53.930.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**49.216.926.000,00**	**45.671.187.250,00**	**46.385.586.841,00**	**-2.831.339.159,00**							**53.930.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100** **100** **90 %** **%** **%**	**20.372.772.621,00**	**22.022.385.621,00**	**21.501.462.362,00**	**5.459.227.379,00**							**25.832.000.000,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**20.372.772.621,00**	**22.022.385.621,00**	**21.501.462.362,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**25.832.000.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	59.462.000,00	48.073.500,00	31.573.500,00	-27.888.500,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Makassar		183.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	29.289.500,00	29.135.800,00	12.635.800,00	-16.653.700,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			29.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.292.300,00	2.338.900,00	2.338.900,00	-1.953.400,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.292.300,00	2.338.900,00	2.338.900,00	-1.953.400,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			32.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.735.900,00	3.241.900,00	3.241.900,00	-1.494.000,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			26.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.692.300,00	3.292.200,00	3.292.200,00	-1.400.100,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			26.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20.372.772.621,00**	**22.022.385.621,00**	**21.501.462.362,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**25.832.000.000,00**	-
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.152.800,00	703.100,00	703.100,00	-2.449.700,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			19.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**20.372.772.621,00**	**22.022.385.621,00**	**21.501.462.362,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**25.832.000.000,00**	-
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	9.006.900,00	7.022.700,00	7.022.700,00	-1.984.200,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			21.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	16.449.029.321,00	16.461.298.701,00	15.614.583.342,00	-834.445.979,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Makassar		21.500.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/ bulan	109 Orang/ bulan	15.522.498.201,00	15.522.498.201,00	14.664.000.042,00	-858.498.159,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			19.000.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	596.943.200,00	612.303.200,00	612.303.200,00	15.360.000,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.100.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	126.063.200,00	108.063.200,00	108.063.200,00	-18.000.000,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.000.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	203.524.720,00	218.434.100,00	230.216.900,00	26.692.180,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			400.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20.372.772.621,00**	**22.022.385.621,00**	**21.501.462.362,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**25.832.000.000,00**	-
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	240.063.200,00	216.063.200,00	130.063.200,00	-110.000.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Makassar		24.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	24.063.200,00	63.200,00	63.200,00	-24.000.000,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			24.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN MAKASSAR
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**20.372.772.621,00**	**22.022.385.621,00**	**21.501.462.362,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**25.832.000.000,00**	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	645.750.000,00	1.227.750.000,00	1.417.250.000,00	771.500.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Makassar		410.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				250 Paket	500 Paket	183.750.000,00	183.750.000,00	183.750.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			230.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	182 Orang	462.000.000,00	1.044.000.000,00	1.233.500.000,00	771.500.000,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			180.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	232.193.800,00	549.019.180,00	707.019.180,00	474.825.380,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Makassar		740.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	7.070.000,00	7.070.000,00	7.070.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	12 Paket	7.927.800,00	67.811.880,00	67.811.880,00	59.884.080,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	8 Paket	38.436.000,00	191.377.300,00	191.377.300,00	152.941.300,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	70.760.000,00	70.760.000,00	120.760.000,00	50.000.000,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00	212.000.000,00	320.000.000,00	212.000.000,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	190.344.400,00	254.067.400,00	254.067.400,00	63.723.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Makassar		450.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	190.344.400,00	254.067.400,00	254.067.400,00	63.723.000,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			450.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.346.407.000,00	1.553.652.100,00	1.528.549.200,00	182.142.200,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Makassar		1.630.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	246.139.000,00	435.875.000,00	460.133.000,00	213.994.000,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			530.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	193.447.200,00	193.447.200,00	190.490.300,00	-2.956.900,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			410.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	906.820.800,00	924.329.900,00	877.925.900,00	-28.894.900,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			690.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.209.522.900,00	1.712.461.540,00	1.818.356.540,00	608.833.640,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Makassar		895.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.770.000,00	36.770.000,00	36.770.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			95.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				209 Unit	157 Unit	274.210.000,00	326.870.000,00	432.765.000,00	158.555.000,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			340.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	39.500.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	6 Unit	846.842.900,00	1.297.121.540,00	1.297.121.540,00	450.278.640,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			240.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20.372.772.621,00**	**22.022.385.621,00**	**21.501.462.362,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**25.832.000.000,00**	-
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			120.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**				**-**	**90 %**	**12.927.398.459,00**	**12.830.858.309,00**	**14.067.681.159,00**	**2.867.601.541,00**							**15.795.000.000,00**	
		[Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan]	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**12.927.398.459,00**	**12.830.858.309,00**	**14.067.681.159,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**15.795.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	155.275.200,00	155.275.200,00	155.275.200,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Makassar		295.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	155.275.200,00	155.275.200,00	155.275.200,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			295.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	12.772.123.259,00	12.675.583.109,00	13.912.405.959,00	1.140.282.700,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Makassar		15.500.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	12.772.123.259,00	12.675.583.109,00	13.912.405.959,00	1.140.282.700,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.500.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**5.149.560.800,00**	**652.834.800,00**	**651.334.800,00**	**-4.271.560.800,00**							**878.000.000,00**	
		[Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik]	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**100**	**95**	**100**	-	-	**5.149.560.800,00**	**652.834.800,00**	**651.334.800,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**878.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.149.560.800,00	652.834.800,00	651.334.800,00	-4.498.226.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Makassar		878.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	149.560.800,00	152.834.800,00	151.334.800,00	1.774.000,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			378.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**				**-**	**90 %**	**398.598.800,00**	**573.826.400,00**	**573.826.400,00**	**476.401.200,00**							**875.000.000,00**	
		[Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**398.598.800,00**	**573.826.400,00**	**573.826.400,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**875.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	392.526.400,00	560.526.400,00	560.526.400,00	168.000.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Makassar		800.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	392.463.200,00	392.463.200,00	392.463.200,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			550.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	63.200,00	168.063.200,00	168.063.200,00	168.000.000,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	6.072.400,00	13.300.000,00	13.300.000,00	7.227.600,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Makassar		75.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	6.072.400,00	13.300.000,00	13.300.000,00	7.227.600,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**				**-**	**100 %**	**10.368.595.320,00**	**9.591.282.120,00**	**9.591.282.120,00**	**181.404.680,00**							**10.550.000.000,00**	
		[Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**10.368.595.320,00**	**9.591.282.120,00**	**9.591.282.120,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**10.550.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	10.368.595.320,00	9.591.282.120,00	9.591.282.120,00	-777.313.200,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Makassar		10.550.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	10.368.595.320,00	9.591.282.120,00	9.591.282.120,00	-777.313.200,00	Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.550.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
		KELURAHAN MARADEKAYA KECAMATAN MAKASSAR							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**500.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*undefined*				-	undefined undefined	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat kelurahan Maradekaya		500.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	0,00	296.396.219,00	296.396.219,00	296.396.219,00	Kota Makassar, Makassar, Maradekaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	203.603.781,00	203.603.781,00	203.603.781,00	Kota Makassar, Makassar, Maradekaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN MARADEKAYA UTARA KECAMATAN MAKASSAR							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	-		500.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	256.536.295,00	256.536.295,00	256.536.295,00	Kota Makassar, Makassar, Maradekaya Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	243.463.705,00	243.463.705,00	243.463.705,00	Kota Makassar, Makassar, Maradekaya Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN MARADEKAYA SELATAN KECAMATAN MAKASSAR							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**609.569.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**609.569.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**609.569.600,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**109.569.600,00**							**609.569.600,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	-		609.569.600,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	5 Unit	220.089.240,00	220.089.240,00	220.089.240,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maradekaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			274.874.040,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	279.910.760,00	279.910.760,00	279.910.760,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maradekaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			334.695.560,00	KECAMATAN MAKASSAR
		KELURAHAN MACCINI KECAMATAN MAKASSAR							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	-		500.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	450.986.300,00	450.986.300,00	450.986.300,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	49.013.700,00	49.013.700,00	49.013.700,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN MACCINI GUSUNG KECAMATAN MAKASSAR							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	-		500.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini Gusung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini Gusung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN MACCINI PARANG KECAMATAN MAKASSAR							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	349.980.446,00	349.980.446,00	349.980.446,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini Parang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0,00	150.019.554,00	150.019.554,00	150.019.554,00	Kota Makassar, Makassar, Maccini Parang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN BARA-BARAYA KECAMATAN MAKASSAR							**499.115.000,00**	**499.115.000,00**	**499.115.000,00**	**0,00**							**250.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**499.115.000,00**	**499.115.000,00**	**499.115.000,00**	**0,00**							**250.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**499.115.000,00**	**499.115.000,00**	**499.115.000,00**	**0,00**							**250.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**499.115.000,00**	**499.115.000,00**	**499.115.000,00**	**-249.115.000,00**							**250.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	499.115.000,00	499.115.000,00	499.115.000,00	0,00			-	- -	-		250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	299.115.000,00	299.115.000,00	299.115.000,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
		KELURAHAN BARA-BARAYA SELATAN KECAMATAN MAKASSAR							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**570.940.576,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**570.940.576,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**570.940.576,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**70.940.576,00**							**570.940.576,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	-		570.940.576,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	279.059.424,00	279.059.424,00	279.059.424,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			350.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	220.940.576,00	220.940.576,00	220.940.576,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			220.940.576,00	KECAMATAN MAKASSAR
		KELURAHAN BARA-BARAYA TIMUR KECAMATAN MAKASSAR							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	Kelurahan Bara-baraya Timur		500.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	394.792.713,00	394.792.713,00	394.792.713,00	Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	105.207.287,00	105.207.287,00	105.207.287,00	Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN BARA-BARAYA UTARA KECAMATAN MAKASSAR							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	-		500.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	462.418.538,00	462.418.538,00	462.418.538,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	37.581.462,00	37.581.462,00	37.581.462,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
		KELURAHAN BARANA KECAMATAN MAKASSAR							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	Kelurahan Barana		500.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	414.544.856,00	414.544.856,00	414.544.856,00	Kota Makassar, Makassar, Barana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	85.455.144,00	85.455.144,00	85.455.144,00	Kota Makassar, Makassar, Barana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN LARIANG BANGI KECAMATAN MAKASSAR							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	Kelurahan Lariang Bangi		500.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	485.213.800,00	485.213.800,00	485.213.800,00	Kota Makassar, Makassar, Lariangbangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	14.786.200,00	14.786.200,00	14.786.200,00	Kota Makassar, Makassar, Lariangbangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN MARICAYA KECAMATAN MAKASSAR							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	Kelurahan Maricaya		500.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	358.183.050,00	358.183.050,00	358.183.050,00	Kota Makassar, Makassar, Maricaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	141.816.950,00	141.816.950,00	141.816.950,00	Kota Makassar, Makassar, Maricaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN MARICAYA BARU KECAMATAN MAKASSAR							**49.216.926.000,00**	**45.671.187.250,00**	**46.385.586.841,00**	**-2.831.339.159,00**							**53.930.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**49.216.926.000,00**	**45.671.187.250,00**	**46.385.586.841,00**	**-2.831.339.159,00**							**53.930.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**49.216.926.000,00**	**45.671.187.250,00**	**46.385.586.841,00**	**-2.831.339.159,00**							**53.930.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**5.149.560.800,00**	**652.834.800,00**	**651.334.800,00**	**-4.271.560.800,00**							**878.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.149.560.800,00	652.834.800,00	651.334.800,00	-4.498.226.000,00			-	- -	Kelurahan Maricaya Baru		878.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	437.246.100,00	437.246.100,00	437.246.100,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maricaya Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	62.753.900,00	62.753.900,00	62.753.900,00	0,00	Kota Makassar, Makassar, Maricaya Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MAKASSAR
		KECAMATAN MAMAJANG							**39.698.217.000,00**	**40.506.676.870,00**	**38.496.360.886,00**	**-1.201.856.114,00**							**38.053.497.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**39.698.217.000,00**	**40.506.676.870,00**	**38.496.360.886,00**	**-1.201.856.114,00**							**38.053.497.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**39.698.217.000,00**	**40.506.676.870,00**	**38.496.360.886,00**	**-1.201.856.114,00**							**38.053.497.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**20.256.357.414,00**	**21.447.008.624,00**	**20.326.003.525,00**	**-644.720.000,00**							**19.611.637.414,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**20.256.357.414,00**	**21.447.008.624,00**	**20.326.003.525,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**19.611.637.414,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah*				-	100 %	37.627.300,00	32.689.900,00	32.689.900,00	-4.937.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Kecamatan Mamajang		30.020.600,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.480.200,00	5.964.400,00	5.964.400,00	-5.515.800,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			11.480.200,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.671.800,00	3.273.700,00	3.273.700,00	-3.398.100,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.585.000,00	2.332.500,00	2.332.500,00	-1.252.500,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.585.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.983.400,00	5.926.200,00	5.926.200,00	942.800,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.230.600,00	5.400.800,00	5.400.800,00	2.170.200,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.230.600,00	KECAMATAN MAMAJANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20.256.357.414,00**	**21.447.008.624,00**	**20.326.003.525,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**19.611.637.414,00**	-
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.951.500,00	4.966.900,00	4.966.900,00	1.015.400,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**20.256.357.414,00**	**21.447.008.624,00**	**20.326.003.525,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**19.611.637.414,00**	-
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	3.724.800,00	4.825.400,00	4.825.400,00	1.100.600,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.724.800,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan SKPD*				-	100 %	17.576.125.702,00	17.438.560.682,00	15.891.392.479,00	-1.684.733.223,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Kecamatan Mamajang		17.576.127.002,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	16.397.724.382,00	16.397.724.382,00	14.849.356.179,00	-1.548.368.203,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			16.397.725.682,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	659.520.000,00	659.400.000,00	660.600.000,00	1.080.000,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			659.520.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	232.320.000,00	345.600.000,00	345.600.000,00	113.280.000,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			232.320.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	286.561.320,00	35.836.300,00	35.836.300,00	-250.725.020,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			286.561.320,00	KECAMATAN MAMAJANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20.256.357.414,00**	**21.447.008.624,00**	**20.326.003.525,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**19.611.637.414,00**	-
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	216.000.000,00	0,00	130.000.000,00	-86.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	0,00	130.000.000,00	-86.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	497.750.000,00	597.750.000,00	705.750.000,00	208.000.000,00			-	- -	-		239.750.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				197 Paket	197 Paket	155.750.000,00	147.750.000,00	129.750.000,00	-26.000.000,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			155.750.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**20.256.357.414,00**	**21.447.008.624,00**	**20.326.003.525,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**19.611.637.414,00**	-
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				110 Orang	110 Orang	342.000.000,00	450.000.000,00	576.000.000,00	234.000.000,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			84.000.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	169.149.800,00	295.427.500,00	514.427.500,00	345.277.700,00			-	- -	-		169.149.800,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	880.000,00	18.688.300,00	18.688.300,00	17.808.300,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			880.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.946.100,00	71.809.200,00	71.809.200,00	50.863.100,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.946.100,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	23.663.700,00	29.450.000,00	29.450.000,00	5.786.300,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			23.663.700,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	15.660.000,00	51.480.000,00	238.480.000,00	222.820.000,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.660.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00	124.000.000,00	156.000.000,00	48.000.000,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			108.000.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.419.194.612,00	2.690.150.542,00	2.659.313.646,00	1.240.119.034,00			-	- -	-		1.256.080.012,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	413.273.880,00	311.620.800,00	309.905.200,00	-103.368.680,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			413.273.880,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	241.248.112,00	231.007.112,00	223.548.166,00	-17.699.946,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			241.248.112,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	764.672.620,00	2.147.522.630,00	2.125.860.280,00	1.361.187.660,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			601.558.020,00	KECAMATAN MAMAJANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20.256.357.414,00**	**21.447.008.624,00**	**20.326.003.525,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**19.611.637.414,00**	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	340.510.000,00	392.430.000,00	392.430.000,00	51.920.000,00			-	- -	-		340.510.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.170.000,00	38.170.000,00	38.170.000,00	0,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			38.170.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**20.256.357.414,00**	**21.447.008.624,00**	**20.326.003.525,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**19.611.637.414,00**	-
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	47 Unit	256.630.000,00	315.120.000,00	315.120.000,00	58.490.000,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			256.630.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	85 Unit	45.710.000,00	39.140.000,00	39.140.000,00	-6.570.000,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			45.710.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan**				**-**	**90 %**	**10.054.890.000,00**	**10.558.348.800,00**	**9.709.279.015,00**	**0,00**							**10.054.890.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan]	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**10.054.890.000,00**	**10.558.348.800,00**	**9.709.279.015,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**10.054.890.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	100 %	34.712.700,00	88.485.300,00	118.485.300,00	83.772.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Kecamatan Mamajang		34.712.700,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13 Dokumen	13 Dokumen	34.712.700,00	88.485.300,00	118.485.300,00	83.772.600,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			34.712.700,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				-	100 %	10.020.177.300,00	10.469.863.500,00	9.590.793.715,00	-429.383.585,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kecamatan Mamajang		10.020.177.300,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				13 Laporan	13 Laporan	10.020.177.300,00	10.469.863.500,00	9.590.793.715,00	-429.383.585,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			10.020.177.300,00	KECAMATAN MAMAJANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**1.173.635.000,00**	**209.258.000,00**	**205.358.000,00**	**-1.000.000.000,00**							**173.635.000,00**	
		[Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik]	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**100**	**25**	**100**	-	-	**1.173.635.000,00**	**209.258.000,00**	**205.358.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**173.635.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Koordinasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan dan Kecamatan*				-	1 Tahun	1.173.635.000,00	209.258.000,00	205.358.000,00	-968.277.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kecamatan Mamajang		173.635.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13 0	13 0	173.635.000,00	209.258.000,00	205.358.000,00	31.723.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			173.635.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**				**-**	**90 %**	**866.104.500,00**	**637.793.200,00**	**647.591.600,00**	**0,00**							**866.104.500,00**	
		[Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**866.104.500,00**	**637.793.200,00**	**647.591.600,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**866.104.500,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				-	100 %	866.104.500,00	637.793.200,00	647.591.600,00	-218.512.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kecamatan Mamajang		866.104.500,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	705.386.880,00	407.385.200,00	410.774.800,00	-294.612.080,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			705.386.880,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				13 Laporan	13 Laporan	160.717.620,00	230.408.000,00	236.816.800,00	76.099.180,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			160.717.620,00	KECAMATAN MAMAJANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**				**-**	**100 %**	**7.347.230.086,00**	**7.654.268.246,00**	**7.608.128.746,00**	**0,00**							**7.347.230.086,00**	
		[Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**7.347.230.086,00**	**7.654.268.246,00**	**7.608.128.746,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**7.347.230.086,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	100 %	7.347.230.086,00	7.654.268.246,00	7.608.128.746,00	260.898.660,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kecamatan Mamajang		7.347.230.086,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				13 Dokumen	13 Dokumen	7.347.230.086,00	7.654.268.246,00	7.608.128.746,00	260.898.660,00	Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			7.347.230.086,00	KECAMATAN MAMAJANG
		KELURAHAN BONTO LEBANG KECAMATAN MAMAJANG							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**- Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan - Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	304.238.455,00	304.238.455,00	304.238.455,00	0,00	Kota Makassar, Mamajang, Bonto Lebang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	195.761.545,00	195.761.545,00	195.761.545,00	0,00	Kota Makassar, Mamajang, Bonto Lebang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
		KELURAHAN BONTO BIRAENG KECAMATAN MAMAJANG							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				18 Unit	18 Unit	278.675.936,00	278.675.936,00	278.675.936,00	0,00	Kota Makassar, Mamajang, Bonto Biraeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	221.324.064,00	221.324.064,00	221.324.064,00	0,00	Kota Makassar, Mamajang, Bonto Biraeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
		KELURAHAN TAMPARANG KEKE KECAMATAN MAMAJANG							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	358.097.514,00	357.962.584,00	357.962.584,00	-134.930,00	Kota Makassar, Mamajang, Tamparang Keke	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	141.902.486,00	142.037.416,00	142.037.416,00	134.930,00	Kota Makassar, Mamajang, Tamparang Keke	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
		KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN MAMAJANG							**500.000.000,00**	**499.900.432,00**	**499.900.432,00**	**-99.568,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**499.900.432,00**	**499.900.432,00**	**-99.568,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**499.900.432,00**	**499.900.432,00**	**-99.568,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**499.900.432,00**	**499.900.432,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	499.900.432,00	499.900.432,00	-99.568,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	312.632.832,00	312.632.832,00	312.632.832,00	0,00	Kota Makassar, Mamajang, Karang Anyar	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	187.367.168,00	187.267.600,00	187.267.600,00	-99.568,00	Kota Makassar, Mamajang, Karang Anyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
		KELURAHAN LABUANG BAJI KECAMATAN MAMAJANG							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**511.376.900,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**511.376.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**511.376.900,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**11.376.900,00**							**511.376.900,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kelurahan		511.376.900,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	461.105.400,00	430.669.400,00	430.669.400,00	-30.436.000,00	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			461.376.900,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	38.894.600,00	69.330.600,00	69.330.600,00	30.436.000,00	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			50.000.000,00	KECAMATAN MAMAJANG
		KELURAHAN MAMAJANG DALAM KECAMATAN MAMAJANG							**0,00**	**499.999.816,00**	**499.999.816,00**	**499.999.816,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**499.999.816,00**	**499.999.816,00**	**499.999.816,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**499.999.816,00**	**499.999.816,00**	**499.999.816,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**499.999.816,00**	**499.999.816,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	499.999.816,00	499.999.816,00	499.999.816,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	401.025.056,00	401.025.056,00	401.025.056,00	Kota Makassar, Mamajang, Mamajang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	98.974.760,00	98.974.760,00	98.974.760,00	Kota Makassar, Mamajang, Mamajang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN MANDALA KECAMATAN MAMAJANG							**500.000.000,00**	**499.999.916,00**	**499.999.916,00**	**-84,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**499.999.916,00**	**499.999.916,00**	**-84,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**499.999.916,00**	**499.999.916,00**	**-84,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**499.999.916,00**	**499.999.916,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	499.999.916,00	499.999.916,00	-84,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	249.951.744,00	277.724.160,00	277.724.160,00	27.772.416,00	Kota Makassar, Mamajang, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	250.048.256,00	222.275.756,00	222.275.756,00	-27.772.500,00	Kota Makassar, Mamajang, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
		KELURAHAN MARICAYA SELATAN KECAMATAN MAMAJANG							**500.000.000,00**	**491.617.000,00**	**491.617.000,00**	**-8.383.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**491.617.000,00**	**491.617.000,00**	**-8.383.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**491.617.000,00**	**491.617.000,00**	**-8.383.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**491.617.000,00**	**491.617.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	491.617.000,00	491.617.000,00	-8.383.000,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	363.985.564,00	363.985.564,00	363.985.564,00	0,00	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	136.014.436,00	127.631.436,00	127.631.436,00	-8.383.000,00	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
		KELURAHAN MAMAJANG LUAR KECAMATAN MAMAJANG							**500.000.000,00**	**499.999.998,00**	**499.999.998,00**	**-2,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**499.999.998,00**	**499.999.998,00**	**-2,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**499.999.998,00**	**499.999.998,00**	**-2,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**499.999.998,00**	**499.999.998,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	499.999.998,00	499.999.998,00	-2,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	409.884.872,00	383.409.662,00	383.409.662,00	-26.475.210,00	Kota Makassar, Mamajang, Mamajang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	90.115.128,00	116.590.336,00	116.590.336,00	26.475.208,00	Kota Makassar, Mamajang, Mamajang Luar	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
		KELURAHAN PARANG KECAMATAN MAMAJANG							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	388.813.824,00	388.813.824,00	388.813.824,00	0,00	Kota Makassar, Mamajang, Parang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	111.186.176,00	111.186.176,00	111.186.176,00	0,00	Kota Makassar, Mamajang, Parang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
		KELURAHAN PA`BATANG KECAMATAN MAMAJANG							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	397.756.352,00	397.756.352,00	397.756.352,00	Kota Makassar, Mamajang, Pa'batang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	102.243.648,00	102.243.648,00	102.243.648,00	Kota Makassar, Mamajang, Pa'batang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN SAMBUNG JAWA KECAMATAN MAMAJANG							**500.000.000,00**	**499.755.981,00**	**499.755.981,00**	**-244.019,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**499.755.981,00**	**499.755.981,00**	**-244.019,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**499.755.981,00**	**499.755.981,00**	**-244.019,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**499.755.981,00**	**499.755.981,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	499.755.981,00	499.755.981,00	-244.019,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	300.000.018,50	299.756.000,00	299.756.000,00	-244.018,50	Kota Makassar, Mamajang, Sambung Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	199.999.981,50	199.999.981,00	199.999.981,00	-0,50	Kota Makassar, Mamajang, Sambung Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
		KELURAHAN BAJI MAPPAKASUNGGU KECAMATAN MAMAJANG							**500.000.000,00**	**499.997.768,00**	**499.997.768,00**	**-2.232,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**499.997.768,00**	**499.997.768,00**	**-2.232,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**499.997.768,00**	**499.997.768,00**	**-2.232,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**499.997.768,00**	**499.997.768,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	499.997.768,00	499.997.768,00	-2.232,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	15 Unit	371.643.168,00	371.643.168,00	371.643.168,00	0,00	Kota Makassar, Mamajang, Baji Mappakasunggu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MAMAJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	128.356.832,00	128.354.600,00	128.354.600,00	-2.232,00	Kota Makassar, Mamajang, Baji Mappakasunggu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -				0,00	KECAMATAN MAMAJANG
		KECAMATAN MANGGALA							**43.869.278.000,00**	**42.635.891.494,00**	**43.195.178.404,00**	**-674.099.596,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**43.869.278.000,00**	**42.635.891.494,00**	**43.195.178.404,00**	**-674.099.596,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**43.869.278.000,00**	**42.635.891.494,00**	**43.195.178.404,00**	**-674.099.596,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**16.816.625.040,00**	**20.654.757.434,00**	**19.472.964.184,00**	**-16.816.625.040,00**							**0,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**16.816.625.040,00**	**20.654.757.434,00**	**19.472.964.184,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	50.283.500,00	50.283.500,00	36.740.100,00	-13.543.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Manggala		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	14.447.600,00	14.447.600,00	5.904.200,00	-8.543.400,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.257.300,00	12.257.300,00	7.257.300,00	-5.000.000,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.894.000,00	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.885.900,00	3.885.900,00	3.885.900,00	0,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.885.900,00	3.885.900,00	3.885.900,00	0,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	11.912.800,00	11.912.800,00	11.912.800,00	0,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	13.170.075.934,00	13.102.635.934,00	12.377.689.146,00	-792.386.788,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Manggala		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	12.371.835.934,00	12.371.835.934,00	11.646.889.146,00	-724.946.788,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	582.240.000,00	514.800.000,00	514.800.000,00	-67.440.000,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**16.816.625.040,00**	**20.654.757.434,00**	**19.472.964.184,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	216.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Manggala		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**16.816.625.040,00**	**20.654.757.434,00**	**19.472.964.184,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	72.207.300,00	735.000.000,00	997.500.000,00	925.292.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Manggala		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	120 Paket	207.300,00	150.000.000,00	150.000.000,00	149.792.700,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**16.816.625.040,00**	**20.654.757.434,00**	**19.472.964.184,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	72.000.000,00	585.000.000,00	847.500.000,00	775.500.000,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**16.816.625.040,00**	**20.654.757.434,00**	**19.472.964.184,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	251.406.600,00	709.813.050,00	548.563.050,00	297.156.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Manggala		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.056.000,00	18.277.000,00	18.277.000,00	11.221.000,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	54.088.300,00	185.253.450,00	185.253.450,00	131.165.150,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	18.872.300,00	116.549.600,00	119.299.600,00	100.427.300,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	44.250.000,00	60.593.000,00	60.593.000,00	16.343.000,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	19.140.000,00	19.140.000,00	19.140.000,00	0,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	108.000.000,00	310.000.000,00	146.000.000,00	38.000.000,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				-	100 %	235.050.400,00	2.735.634.400,00	2.214.846.400,00	1.979.796.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Manggala		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	138.200,00	77.660.000,00	77.660.000,00	77.521.800,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	234.912.200,00	2.657.974.400,00	2.137.186.400,00	1.902.274.200,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				-	100 %	2.435.577.860,00	2.491.421.550,00	2.470.406.488,00	34.828.628,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Manggala		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	301.113.600,00	397.957.600,00	394.488.938,00	93.375.338,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.134.464.260,00	2.093.463.950,00	2.075.917.550,00	-58.546.710,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				-	100 %	386.023.446,00	699.969.000,00	697.219.000,00	311.195.554,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Manggala		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.380.000,00	26.410.000,00	23.660.000,00	-12.720.000,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				132 Unit	132 Unit	201.110.000,00	207.390.000,00	207.390.000,00	6.280.000,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	36.450.000,00	67.900.000,00	67.900.000,00	31.450.000,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	112.083.446,00	398.269.000,00	398.269.000,00	286.185.554,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**				**-**	**90 %**	**13.125.407.860,00**	**12.142.211.300,00**	**13.263.594.660,00**	**-13.125.407.860,00**							**0,00**	
		[Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan]	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**13.125.407.860,00**	**12.142.211.300,00**	**13.263.594.660,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana*				-	100 %	437.798.400,00	374.400.000,00	374.400.000,00	-63.398.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Manggala		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	437.798.400,00	374.400.000,00	374.400.000,00	-63.398.400,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				-	100 %	28.376.500,00	17.388.900,00	17.388.900,00	-10.987.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Manggala		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	28.376.500,00	17.388.900,00	17.388.900,00	-10.987.600,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana*				-	100 %	12.659.232.960,00	11.750.422.400,00	12.871.805.760,00	212.572.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Manggala		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	12.659.232.960,00	11.750.422.400,00	12.871.805.760,00	212.572.800,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**3.693.675.900,00**	**179.847.000,00**	**179.847.000,00**	**-3.693.675.900,00**							**0,00**	
		[Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik]	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**100**	**62.5**	**100**	-	-	**3.693.675.900,00**	**179.847.000,00**	**179.847.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	3.693.675.900,00	179.847.000,00	179.847.000,00	-3.513.828.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Kelurahan & Masyarakat		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	193.675.900,00	179.847.000,00	179.847.000,00	-13.828.900,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**				**-**	**90 %**	**96.000.000,00**	**96.000.000,00**	**96.000.000,00**	**-96.000.000,00**							**0,00**	
		[Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**96.000.000,00**	**96.000.000,00**	**96.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana*				-	100 %	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**				**-**	**100 %**	**10.137.569.200,00**	**9.563.075.760,00**	**10.182.772.560,00**	**-10.137.569.200,00**							**0,00**	
		[Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**10.137.569.200,00**	**9.563.075.760,00**	**10.182.772.560,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana*				-	100 %	10.137.569.200,00	9.563.075.760,00	10.182.772.560,00	45.203.360,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Manggala		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	8 Dokumen	10.137.569.200,00	9.563.075.760,00	10.182.772.560,00	45.203.360,00	Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
		KELURAHAN MANGGALA KECAMATAN MANGGALA							**0,00**	**500.273.025,00**	**500.273.025,00**	**500.273.025,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.273.025,00**	**500.273.025,00**	**500.273.025,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.273.025,00**	**500.273.025,00**	**500.273.025,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.273.025,00**	**500.273.025,00**	**0,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**0,00**	**500.273.025,00**	**500.273.025,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	0,00	500.273.025,00	500.273.025,00	500.273.025,00			-	- -	Kelurahan Manggala		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	425.963.225,00	425.963.225,00	425.963.225,00	Kota Makassar, Manggala, Manggala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	0,00	74.309.800,00	74.309.800,00	74.309.800,00	Kota Makassar, Manggala, Manggala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -				0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN ANTANG KECAMATAN MANGGALA							**500.000.000,00**	**499.997.520,00**	**499.997.520,00**	**-2.480,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**499.997.520,00**	**499.997.520,00**	**-2.480,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**499.997.520,00**	**499.997.520,00**	**-2.480,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**499.997.520,00**	**499.997.520,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	500.000.000,00	499.997.520,00	499.997.520,00	-2.480,00			-	- -	Kelurahan Antang		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	386.417.320,00	390.259.520,00	390.259.520,00	3.842.200,00	Kota Makassar, Manggala, Antang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -				0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	113.582.680,00	109.738.000,00	109.738.000,00	-3.844.680,00	Kota Makassar, Manggala, Antang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -				0,00	KECAMATAN MANGGALA
		KELURAHAN BANGKALA KECAMATAN MANGGALA							**0,00**	**497.459.630,00**	**497.459.630,00**	**497.459.630,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**497.459.630,00**	**497.459.630,00**	**497.459.630,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**497.459.630,00**	**497.459.630,00**	**497.459.630,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**497.459.630,00**	**497.459.630,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	0,00	497.459.630,00	497.459.630,00	497.459.630,00			-	- -	Kelurahan Bangkala		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	378.409.030,00	378.409.030,00	378.409.030,00	Kota Makassar, Manggala, Bangkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -				0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	0,00	119.050.600,00	119.050.600,00	119.050.600,00	Kota Makassar, Manggala, Bangkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -				0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN BATUA KECAMATAN MANGGALA							**0,00**	**486.306.780,00**	**486.306.780,00**	**486.306.780,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**486.306.780,00**	**486.306.780,00**	**486.306.780,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**486.306.780,00**	**486.306.780,00**	**486.306.780,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**486.306.780,00**	**486.306.780,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	0,00	486.306.780,00	486.306.780,00	486.306.780,00			-	- -	Kelurahan Batua		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	360.975.580,00	360.975.580,00	360.975.580,00	Kota Makassar, Manggala, Batua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	0,00	125.331.200,00	125.331.200,00	125.331.200,00	Kota Makassar, Manggala, Batua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN BORONG KECAMATAN MANGGALA							**0,00**	**499.999.145,00**	**499.999.145,00**	**499.999.145,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**499.999.145,00**	**499.999.145,00**	**499.999.145,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**499.999.145,00**	**499.999.145,00**	**499.999.145,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**499.999.145,00**	**499.999.145,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	0,00	499.999.145,00	499.999.145,00	499.999.145,00			-	- -	Kelurahan Borong		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	469.195.545,00	469.195.545,00	469.195.545,00	Kota Makassar, Manggala, Borong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	0,00	30.803.600,00	30.803.600,00	30.803.600,00	Kota Makassar, Manggala, Borong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MANGGALA							**0,00**	**499.935.738,00**	**499.935.738,00**	**499.935.738,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**499.935.738,00**	**499.935.738,00**	**499.935.738,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**499.935.738,00**	**499.935.738,00**	**499.935.738,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**499.935.738,00**	**499.935.738,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	0,00	499.935.738,00	499.935.738,00	499.935.738,00			-	- -	Kelurahan Tamangapa		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	455.479.938,00	455.479.938,00	455.479.938,00	Kota Makassar, Manggala, Tamangapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	44.455.800,00	44.455.800,00	44.455.800,00	Kota Makassar, Manggala, Tamangapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN BIRING ROMANG KECAMATAN MANGGALA							**0,00**	**499.609.550,00**	**499.609.550,00**	**499.609.550,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**499.609.550,00**	**499.609.550,00**	**499.609.550,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**499.609.550,00**	**499.609.550,00**	**499.609.550,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**499.609.550,00**	**499.609.550,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	0,00	499.609.550,00	499.609.550,00	499.609.550,00			-	- -	Kelurahan Biring Romang		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	393.506.750,00	393.506.750,00	393.506.750,00	Kota Makassar, Manggala, Biring Romang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	0,00	106.102.800,00	106.102.800,00	106.102.800,00	Kota Makassar, Manggala, Biring Romang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN BITOWA KECAMATAN MANGGALA							**0,00**	**499.605.420,00**	**499.605.420,00**	**499.605.420,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**499.605.420,00**	**499.605.420,00**	**499.605.420,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**499.605.420,00**	**499.605.420,00**	**499.605.420,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**499.605.420,00**	**499.605.420,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	0,00	499.605.420,00	499.605.420,00	499.605.420,00			-	- -	Kelurahan Bitowa		0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	415.652.520,00	415.652.520,00	415.652.520,00	Kota Makassar, Manggala, Bitowo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	0,00	83.952.900,00	83.952.900,00	83.952.900,00	Kota Makassar, Manggala, Bitowo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -				0,00	KECAMATAN MANGGALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KECAMATAN MARISO							**31.645.086.480,00**	**30.800.620.980,00**	**29.518.299.680,00**	**-2.126.786.800,00**							**35.969.326.953,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**31.645.086.480,00**	**30.800.620.980,00**	**29.518.299.680,00**	**-2.126.786.800,00**							**35.969.326.953,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**31.645.086.480,00**	**30.800.620.980,00**	**29.518.299.680,00**	**-2.126.786.800,00**							**35.969.326.953,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah** **Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**90** **100 %** **%**	**100** **100** **90 %** **%** **%**	**14.802.766.648,00**	**15.128.966.508,00**	**13.465.547.648,00**	**3.333.059.431,00**							**18.135.826.079,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**14.802.766.648,00**	**15.128.966.508,00**	**13.465.547.648,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**18.135.826.079,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah*				100 %	100 %	53.210.400,00	38.090.600,00	38.090.600,00	-15.119.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Mariso		112.820.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	11.066.800,00	6.858.600,00	6.858.600,00	-4.208.200,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				35.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.035.600,00	4.865.400,00	4.865.400,00	-3.170.200,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				17.550.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.955.000,00	5.005.000,00	5.005.000,00	-3.950.000,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				15.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.028.000,00	6.860.600,00	6.860.600,00	-2.167.400,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				14.500.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.148.300,00	5.948.300,00	5.948.300,00	-1.200.000,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				12.000.000,00	KECAMATAN MARISO
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**14.802.766.648,00**	**15.128.966.508,00**	**13.465.547.648,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**18.135.826.079,00**	-
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.577.200,00	5.577.200,00	5.577.200,00	0,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				10.520.000,00	KECAMATAN MARISO
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**14.802.766.648,00**	**15.128.966.508,00**	**13.465.547.648,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**18.135.826.079,00**	-
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.399.500,00	2.975.500,00	2.975.500,00	-424.000,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				8.250.000,00	KECAMATAN MARISO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				14 Kali	14 Kali	13.113.621.128,00	12.881.588.168,00	11.188.478.168,00	-1.925.142.960,00			-	- -	Kecamatan Mariso		15.122.221.200,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	12.058.781.568,00	12.058.781.568,00	10.362.737.568,00	-1.696.044.000,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.000.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	689.980.000,00	568.320.000,00	566.760.000,00	-123.220.000,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			725.126.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	109.036.500,00	73.036.500,00	73.036.500,00	-36.000.000,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			120.520.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	255.823.060,00	181.450.100,00	185.944.100,00	-69.878.960,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			276.575.200,00	KECAMATAN MARISO
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**14.802.766.648,00**	**15.128.966.508,00**	**13.465.547.648,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**18.135.826.079,00**	-
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	216.000.000,00	216.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN MARISO
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**14.802.766.648,00**	**15.128.966.508,00**	**13.465.547.648,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**18.135.826.079,00**	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	209.498.500,00	617.044.800,00	543.573.600,00	334.075.100,00			-	- -	Kecamatan Mariso		855.768.255,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	137.498.500,00	108.544.800,00	111.573.600,00	-25.924.900,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			170.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				173 Orang	173 Orang	72.000.000,00	508.500.000,00	432.000.000,00	360.000.000,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			685.768.255,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	150.920.400,00	305.746.000,00	219.207.000,00	68.286.600,00			-	- -	Kecamatan Mariso		357.200.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.827.900,00	18.703.700,00	20.164.700,00	8.336.800,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	25.992.500,00	61.942.300,00	61.942.300,00	35.949.800,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.200.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	108.000.000,00	220.000.000,00	132.000.000,00	24.000.000,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	746.516.220,00	768.166.940,00	991.438.280,00	244.922.060,00			-	- -	Kecamatan Mariso		1.098.286.200,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	187.457.280,00	174.445.200,00	183.502.800,00	-3.954.480,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			188.765.900,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	201.479.160,00	193.163.520,00	210.810.060,00	9.330.900,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	357.579.780,00	400.558.220,00	597.125.420,00	239.545.640,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			609.520.300,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	313.000.000,00	302.330.000,00	354.760.000,00	41.760.000,00			-	- -	Kecamatan Mariso		589.530.424,00	KECAMATAN MARISO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41.770.000,00	26.160.000,00	39.270.000,00	-2.500.000,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				97 Unit	97 Unit	144.370.000,00	144.370.000,00	183.690.000,00	39.320.000,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			287.259.324,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	28.400.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			28.750.300,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	86.260.000,00	91.200.000,00	91.200.000,00	4.940.000,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			180.000.000,00	KECAMATAN MARISO
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**14.802.766.648,00**	**15.128.966.508,00**	**13.465.547.648,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**18.135.826.079,00**	-
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			13.520.800,00	KECAMATAN MARISO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**				**95 100 % %**	**90 %**	**8.380.802.700,00**	**8.621.739.320,00**	**8.911.411.320,00**	**864.197.300,00**							**9.245.000.000,00**	
		[Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan]	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**8.380.802.700,00**	**8.621.739.320,00**	**8.911.411.320,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**9.245.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan*				100 %	100 %	41.465.000,00	354.198.000,00	548.577.600,00	507.112.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Mariso		45.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9 Dokumen	9 Dokumen	41.465.000,00	354.198.000,00	548.577.600,00	507.112.600,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			45.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	8.339.337.700,00	8.267.541.320,00	8.362.833.720,00	23.496.020,00			-	- -	Kecamatan Mariso		9.200.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	8.339.337.700,00	8.267.541.320,00	8.362.833.720,00	23.496.020,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			9.200.000.000,00	KECAMATAN MARISO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**100 %**	**90 90 % %**	**1.995.622.500,00**	**151.693.700,00**	**148.993.700,00**	**-1.795.622.500,00**							**200.000.000,00**	
		[Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik]	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**100**	**100**	**100**	-	-	**1.995.622.500,00**	**151.693.700,00**	**148.993.700,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**200.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				95 %	95 %	1.995.622.500,00	151.693.700,00	148.993.700,00	-1.846.628.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Mariso		200.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	151.693.700,00	151.693.700,00	148.993.700,00	-2.700.000,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			200.000.000,00	KECAMATAN MARISO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**				**95 %**	**90 %**	**483.309.000,00**	**483.309.000,00**	**483.309.000,00**	**-94.808.126,00**							**388.500.874,00**	
		[Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**483.309.000,00**	**483.309.000,00**	**483.309.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**388.500.874,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	483.309.000,00	483.309.000,00	483.309.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Mariso		388.500.874,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	375.309.000,00	375.309.000,00	375.309.000,00	0,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			377.500.874,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				9 Laporan	9 Laporan	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			11.000.000,00	KECAMATAN MARISO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**5.982.585.632,00**	**6.414.912.452,00**	**6.509.038.012,00**	**2.017.414.368,00**							**8.000.000.000,00**	
		[Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**5.982.585.632,00**	**6.414.912.452,00**	**6.509.038.012,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**8.000.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	5.982.585.632,00	6.414.912.452,00	6.509.038.012,00	526.452.380,00			-	- -	Kecamatan Mariso		8.000.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				9 Dokumen	9 Dokumen	5.982.585.632,00	6.414.912.452,00	6.509.038.012,00	526.452.380,00	Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			8.000.000.000,00	KECAMATAN MARISO
		KELURAHAN BONTORANNU KECAMATAN MARISO							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**500.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	Kelurahan Bontorannu		500.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	333.268.992,00	333.268.992,00	333.268.992,00	Kota Makassar, Mariso, Bontorannu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	166.731.008,00	166.731.008,00	166.731.008,00	Kota Makassar, Mariso, Bontorannu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN KAMPUNG BUYANG KECAMATAN MARISO							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Kampung Buyang		500.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	254.467.006,00	296.669.270,00	296.669.270,00	42.202.264,00	Kota Makassar, Mariso, Kampung Buyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -				254.467.006,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	245.532.994,00	203.330.730,00	203.330.730,00	-42.202.264,00	Kota Makassar, Mariso, Kampung Buyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -				245.532.994,00	KECAMATAN MARISO
		KELURAHAN KUNJUNG MAE KECAMATAN MARISO							**155.971.520,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**344.028.480,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**155.971.520,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**344.028.480,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**155.971.520,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**344.028.480,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**155.971.520,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**344.028.480,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	155.971.520,00	500.000.000,00	500.000.000,00	344.028.480,00			-	- -	Kelurahan Kunjung Mae		500.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	349.380.200,00	349.380.200,00	349.380.200,00	Kota Makassar, Mariso, Kunjung Mae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -				250.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	155.971.520,00	150.619.800,00	150.619.800,00	-5.351.720,00	Kota Makassar, Mariso, Kunjung Mae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -				250.000.000,00	KECAMATAN MARISO
		KELURAHAN LETTE KECAMATAN MARISO							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.018.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.018.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.018.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**18.000,00**							**500.018.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Lette		500.018.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	382.945.090,00	382.945.090,00	382.945.090,00	0,00	Kota Makassar, Mariso, Lette	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -				382.964.700,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	117.054.910,00	117.054.910,00	117.054.910,00	0,00	Kota Makassar, Mariso, Lette	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -				117.053.300,00	KECAMATAN MARISO
		KELURAHAN MARIO KECAMATAN MARISO							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Mario		500.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	431.842.544,00	431.842.544,00	431.842.544,00	0,00	Kota Makassar, Mariso, Mario	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			431.842.544,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	68.157.456,00	68.157.456,00	68.157.456,00	0,00	Kota Makassar, Mariso, Mario	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			68.157.456,00	KECAMATAN MARISO
		KELURAHAN MARISO KECAMATAN MARISO							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Mariso		500.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	338.810.232,00	338.810.232,00	338.810.232,00	0,00	Kota Makassar, Mariso, Mariso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			338.810.232,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	161.189.768,00	161.189.768,00	161.189.768,00	0,00	Kota Makassar, Mariso, Mariso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			161.189.768,00	KECAMATAN MARISO
		KELURAHAN MATTOANGIN KECAMATAN MARISO							**0,00**	**499.900.320,00**	**499.900.320,00**	**499.900.320,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**499.900.320,00**	**499.900.320,00**	**499.900.320,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**499.900.320,00**	**499.900.320,00**	**499.900.320,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**499.900.320,00**	**499.900.320,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	499.900.320,00	499.900.320,00	499.900.320,00			-	- -	Kelurahan Mattoangin		500.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	428.130.931,00	428.130.931,00	428.130.931,00	Kota Makassar, Mariso, Mattoangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	71.769.389,00	71.769.389,00	71.769.389,00	Kota Makassar, Mariso, Mattoangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -				250.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN PANAMBUNGAN KECAMATAN MARISO							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Panambungan		500.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	429.918.790,00	429.485.242,00	429.485.242,00	-433.548,00	Kota Makassar, Mariso, Panambungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	70.081.210,00	70.514.758,00	70.514.758,00	433.548,00	Kota Makassar, Mariso, Panambungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MARISO
		KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN MARISO							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	Kelurahan Tamarunang		500.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	342.702.000,00	342.702.000,00	342.702.000,00	Kota Makassar, Mariso, Tamarunang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	157.298.000,00	157.298.000,00	157.298.000,00	Kota Makassar, Mariso, Tamarunang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN MARISO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KECAMATAN PANAKKUKANG							**54.042.258.000,00**	**52.551.614.425,00**	**52.807.645.657,00**	**-1.234.612.343,00**							**77.867.645.400,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**54.042.258.000,00**	**52.551.614.425,00**	**52.807.645.657,00**	**-1.234.612.343,00**							**77.867.645.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**54.042.258.000,00**	**52.551.614.425,00**	**52.807.645.657,00**	**-1.234.612.343,00**							**77.867.645.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**100 %**	**100 100 90 % % %**	**18.803.509.659,00**	**19.786.212.698,00**	**19.519.543.730,00**	**10.136.427.341,00**							**28.939.937.000,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**18.803.509.659,00**	**19.786.212.698,00**	**19.519.543.730,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**28.939.937.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah*				100 %	100 %	39.655.000,00	45.110.150,00	45.110.150,00	5.455.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Kecamatan Panakkukang		118.512.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.655.000,00	12.083.900,00	12.083.900,00	1.428.900,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			41.040.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	6.935.900,00	6.935.900,00	2.935.900,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			13.320.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	6.935.900,00	6.935.900,00	2.935.900,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			13.320.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	5.258.850,00	5.258.850,00	1.258.850,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			13.320.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	5.258.850,00	5.258.850,00	1.258.850,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			13.320.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	13.000.000,00	8.636.750,00	8.636.750,00	-4.363.250,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			24.192.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	15.658.221.859,00	16.264.516.859,00	15.677.947.891,00	19.726.032,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Kecamatan Panakkukang		22.448.225.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14.581.220.659,00	15.381.220.659,00	14.794.651.691,00	213.431.032,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			20.996.956.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	853.441.000,00	606.705.500,00	606.705.500,00	-246.735.500,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.024.129.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	219.638.000,00	262.059.100,00	262.059.100,00	42.421.100,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			390.140.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.922.200,00	14.531.600,00	14.531.600,00	10.609.400,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			37.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**18.803.509.659,00**	**19.786.212.698,00**	**19.519.543.730,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**28.939.937.000,00**	-
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	216.000.000,00	216.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Kecamatan Panakkukang		0,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			0,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**18.803.509.659,00**	**19.786.212.698,00**	**19.519.543.730,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**28.939.937.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	184.500.000,00	666.993.600,00	786.993.600,00	602.493.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kecamatan Panakkukang		1.440.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				180 Paket	180 Paket	135.000.000,00	149.493.600,00	149.493.600,00	14.493.600,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			240.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				180 Orang	180 Orang	49.500.000,00	517.500.000,00	637.500.000,00	588.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.200.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	86.633.000,00	275.165.800,00	337.165.800,00	250.532.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Kecamatan Panakkukang		502.800.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7 Paket	4.947.000,00	20.050.000,00	20.050.000,00	15.103.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			28.800.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	4 Paket	7.826.000,00	23.939.800,00	23.939.800,00	16.113.800,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			60.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	7 Paket	17.060.000,00	93.976.000,00	93.976.000,00	76.916.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			114.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	5 Dokumen	22.800.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	14.400.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			60.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	11 Laporan	34.000.000,00	100.000.000,00	162.000.000,00	128.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			240.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**18.803.509.659,00**	**19.786.212.698,00**	**19.519.543.730,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**28.939.937.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	41.490.000,00	40.375.000,00	40.375.000,00	-1.115.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Kecamatan Panakkukang		360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	18.560.000,00	0,00	0,00	-18.560.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**18.803.509.659,00**	**19.786.212.698,00**	**19.519.543.730,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**28.939.937.000,00**	-
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	100 Unit	22.930.000,00	40.375.000,00	40.375.000,00	17.445.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.610.579.800,00	1.717.367.289,00	1.861.937.289,00	251.357.489,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kecamatan Panakkukang		2.906.400.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	397.222.000,00	318.650.000,00	318.650.000,00	-78.572.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			482.400.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	8.503.000,00	8.503.000,00	-16.497.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			384.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.188.357.800,00	1.390.214.289,00	1.534.784.289,00	346.426.489,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			2.040.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	966.430.000,00	560.684.000,00	640.014.000,00	-326.416.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kecamatan Panakkukang		1.164.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	39.270.000,00	39.270.000,00	36.770.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			60.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	160 Unit	344.230.000,00	281.540.000,00	284.790.000,00	-59.440.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	112 Unit	92.100.000,00	85.100.000,00	85.100.000,00	-7.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			144.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	527.600.000,00	154.774.000,00	230.854.000,00	-296.746.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			600.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan**				**100 %**	**90 %**	**17.901.040.280,00**	**19.053.537.840,00**	**19.669.087.760,00**	**7.374.959.720,00**							**25.276.000.000,00**	
		[Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan]	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**17.901.040.280,00**	**19.053.537.840,00**	**19.669.087.760,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**25.276.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana*				100 %	100 %	139.604.800,00	71.296.900,00	71.296.900,00	-68.307.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Kecamatan Panakkukang		276.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	139.604.800,00	71.296.900,00	71.296.900,00	-68.307.900,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			276.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				100 %	100 %	17.761.435.480,00	18.982.240.940,00	19.597.790.860,00	1.836.355.380,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kecamatan Panakkukang		25.000.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	17.761.435.480,00	18.982.240.940,00	19.597.790.860,00	1.836.355.380,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			25.000.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.184.766.019,00**	**1.002.180.825,00**	**998.880.825,00**	**-2.522.095.619,00**							**2.662.670.400,00**	
		[Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik]	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**100**	**100**	**100**	-	-	**5.184.766.019,00**	**1.002.180.825,00**	**998.880.825,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**2.662.670.400,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa*				100 %	100 %	5.184.766.019,00	1.002.180.825,00	998.880.825,00	-4.185.885.194,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kecamatan Panakkukang		2.662.670.400,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	184.766.019,00	197.824.400,00	194.524.400,00	9.758.381,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			262.670.400,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**				**100 %**	**90 %**	**583.968.000,00**	**511.008.500,00**	**558.362.385,00**	**260.681.000,00**							**844.649.000,00**	
		[Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**583.968.000,00**	**511.008.500,00**	**558.362.385,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**844.649.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	583.968.000,00	511.008.500,00	558.362.385,00	-25.605.615,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kecamatan Panakkukang		844.649.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	450.507.000,00	377.911.500,00	425.421.285,00	-25.085.715,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			652.466.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	133.461.000,00	133.097.000,00	132.941.100,00	-519.900,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			192.183.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**11.568.974.042,00**	**12.198.674.562,00**	**12.061.770.957,00**	**8.575.414.958,00**							**20.144.389.000,00**	
		[Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**11.568.974.042,00**	**12.198.674.562,00**	**12.061.770.957,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**20.144.389.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	11.568.974.042,00	12.198.674.562,00	12.061.770.957,00	492.796.915,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kecamatan Panakkukang		20.144.389.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				11 Dokumen	11 Dokumen	11.568.974.042,00	12.198.674.562,00	12.061.770.957,00	492.796.915,00	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			20.144.389.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
		KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG							**0,00**	**428.329.055,00**	**428.329.055,00**	**428.329.055,00**							**360.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**428.329.055,00**	**428.329.055,00**	**428.329.055,00**							**360.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**428.329.055,00**	**428.329.055,00**	**428.329.055,00**							**360.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**428.329.055,00**	**428.329.055,00**	**360.000.000,00**							**360.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**0,00**	**428.329.055,00**	**428.329.055,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**360.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa*				100 %	100 %	0,00	428.329.055,00	428.329.055,00	428.329.055,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Tamamaung		360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	428.329.055,00	428.329.055,00	428.329.055,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	110.190.000,00	71.670.945,00	71.670.945,00	-38.519.055,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			240.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
		KELURAHAN SINRIJALA KECAMATAN PANAKKUKANG							**0,00**	**444.562.295,00**	**444.562.295,00**	**444.562.295,00**							**360.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**444.562.295,00**	**444.562.295,00**	**444.562.295,00**							**360.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**444.562.295,00**	**444.562.295,00**	**444.562.295,00**							**360.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**444.562.295,00**	**444.562.295,00**	**360.000.000,00**							**360.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa*				100 %	100 %	0,00	444.562.295,00	444.562.295,00	444.562.295,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Sinrijala		360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	444.562.295,00	444.562.295,00	444.562.295,00	Kota Makassar, Panakkukang, Sinrijala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	80.439.000,00	55.437.705,00	55.437.705,00	-25.001.295,00	Kota Makassar, Panakkukang, Sinrijala	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			240.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
		KELURAHAN KARUWISI KECAMATAN PANAKKUKANG							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa*				-	100 %	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Karuwisi		0,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	299.999.000,00	425.463.140,00	425.463.140,00	125.464.140,00	Kota Makassar, Panakkukang, Karuwisi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.001.000,00	74.536.860,00	74.536.860,00	-125.464.140,00	Kota Makassar, Panakkukang, Karuwisi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
		KELURAHAN KARUWISI UTARA KECAMATAN PANAKKUKANG							**0,00**	**407.163.150,00**	**407.163.150,00**	**407.163.150,00**							**360.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**407.163.150,00**	**407.163.150,00**	**407.163.150,00**							**360.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**407.163.150,00**	**407.163.150,00**	**407.163.150,00**							**360.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**407.163.150,00**	**407.163.150,00**	**360.000.000,00**							**360.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa*				100 %	100 %	0,00	407.163.150,00	407.163.150,00	407.163.150,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Karuwisi Utara		360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	407.163.150,00	407.163.150,00	407.163.150,00	Kota Makassar, Panakkukang, Karuwisi Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	117.155.825,00	92.836.850,00	92.836.850,00	-24.318.975,00	Kota Makassar, Panakkukang, Karuwisi Utara	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			240.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
		KELURAHAN PANAIKANG KECAMATAN PANAKKUKANG							**0,00**	**425.131.400,00**	**425.131.400,00**	**425.131.400,00**							**360.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**425.131.400,00**	**425.131.400,00**	**425.131.400,00**							**360.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**425.131.400,00**	**425.131.400,00**	**425.131.400,00**							**360.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**425.131.400,00**	**425.131.400,00**	**360.000.000,00**							**360.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa*				100 %	100 %	0,00	425.131.400,00	425.131.400,00	425.131.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Panaikang		360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	425.131.400,00	425.131.400,00	425.131.400,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	126.493.400,00	74.868.600,00	74.868.600,00	-51.624.800,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			240.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
		KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKKUKANG							**0,00**	**333.969.858,00**	**333.969.858,00**	**333.969.858,00**							**360.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**333.969.858,00**	**333.969.858,00**	**333.969.858,00**							**360.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**333.969.858,00**	**333.969.858,00**	**333.969.858,00**							**360.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**333.969.858,00**	**333.969.858,00**	**360.000.000,00**							**360.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa*				100 %	100 %	0,00	333.969.858,00	333.969.858,00	333.969.858,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Paropo		360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	333.969.858,00	333.969.858,00	333.969.858,00	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	165.932.240,00	166.030.142,00	166.030.142,00	97.902,00	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			240.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
		KELURAHAN KARAMPUANG KECAMATAN PANAKKUKANG							**0,00**	**383.859.000,00**	**383.859.000,00**	**383.859.000,00**							**360.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**383.859.000,00**	**383.859.000,00**	**383.859.000,00**							**360.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**383.859.000,00**	**383.859.000,00**	**383.859.000,00**							**360.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**383.859.000,00**	**383.859.000,00**	**360.000.000,00**							**360.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa*				100 %	100 %	0,00	383.859.000,00	383.859.000,00	383.859.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Karampuang		360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	383.859.000,00	383.859.000,00	383.859.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Karampuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	99.936.000,00	116.141.000,00	116.141.000,00	16.205.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Karampuang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			240.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
		KELURAHAN PANDANG KECAMATAN PANAKKUKANG							**0,00**	**453.007.800,00**	**453.007.800,00**	**453.007.800,00**							**360.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**453.007.800,00**	**453.007.800,00**	**453.007.800,00**							**360.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**453.007.800,00**	**453.007.800,00**	**453.007.800,00**							**360.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**453.007.800,00**	**453.007.800,00**	**360.000.000,00**							**360.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa*				100 %	100 %	0,00	453.007.800,00	453.007.800,00	453.007.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Pandang		360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	453.007.800,00	453.007.800,00	453.007.800,00	Kota Makassar, Panakkukang, Pandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	117.470.290,00	46.992.200,00	46.992.200,00	-70.478.090,00	Kota Makassar, Panakkukang, Pandang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			240.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
		KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG							**0,00**	**438.607.658,00**	**438.607.658,00**	**438.607.658,00**							**360.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**438.607.658,00**	**438.607.658,00**	**438.607.658,00**							**360.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**438.607.658,00**	**438.607.658,00**	**438.607.658,00**							**360.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**438.607.658,00**	**438.607.658,00**	**360.000.000,00**							**360.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa*				100 %	100 %	0,00	438.607.658,00	438.607.658,00	438.607.658,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Pampang		360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	438.607.658,00	438.607.658,00	438.607.658,00	Kota Makassar, Panakkukang, Pampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	56.472.800,00	61.392.342,00	61.392.342,00	4.919.542,00	Kota Makassar, Panakkukang, Pampang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			240.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
		KELURAHAN TELLO BARU KECAMATAN PANAKKUKANG							**0,00**	**421.278.600,00**	**421.278.600,00**	**421.278.600,00**							**360.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**421.278.600,00**	**421.278.600,00**	**421.278.600,00**							**360.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**421.278.600,00**	**421.278.600,00**	**421.278.600,00**							**360.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**421.278.600,00**	**421.278.600,00**	**360.000.000,00**							**360.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa*				100 %	100 %	0,00	421.278.600,00	421.278.600,00	421.278.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Tello Baru		360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	421.278.600,00	421.278.600,00	421.278.600,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tello Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	130.226.000,00	78.721.400,00	78.721.400,00	-51.504.600,00	Kota Makassar, Panakkukang, Tello Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			240.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
		KELURAHAN MASALE KECAMATAN PANAKKUKANG							**0,00**	**459.734.759,00**	**459.734.759,00**	**459.734.759,00**							**360.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**459.734.759,00**	**459.734.759,00**	**459.734.759,00**							**360.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**459.734.759,00**	**459.734.759,00**	**459.734.759,00**							**360.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**459.734.759,00**	**459.734.759,00**	**360.000.000,00**							**360.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa*				100 %	100 %	0,00	459.734.759,00	459.734.759,00	459.734.759,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Masale		360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	459.734.759,00	459.734.759,00	459.734.759,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			360.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	55.132.800,00	40.265.241,00	40.265.241,00	-14.867.559,00	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			240.000.000,00	KECAMATAN PANAKKUKANG
		KECAMATAN RAPPOCINI							**48.927.504.100,00**	**51.322.243.685,00**	**50.837.570.648,00**	**1.910.066.548,00**							**16.564.939.220,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**48.927.504.100,00**	**51.322.243.685,00**	**50.837.570.648,00**	**1.910.066.548,00**							**16.564.939.220,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**48.927.504.100,00**	**51.322.243.685,00**	**50.837.570.648,00**	**1.910.066.548,00**							**16.564.939.220,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**100 %**	**100 100 90 % % %**	**20.250.955.560,00**	**22.178.323.015,00**	**22.632.375.178,00**	**-17.159.536.140,00**							**3.091.419.420,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**20.250.955.560,00**	**22.178.323.015,00**	**22.632.375.178,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**3.091.419.420,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah*				100 %	100 %	41.483.100,00	19.033.300,00	19.033.300,00	-22.449.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Pegawai		41.453.520,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	13.174.400,00	5.445.900,00	5.445.900,00	-7.728.500,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			13.143.520,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.700,00	2.276.500,00	2.276.500,00	-1.723.200,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			4.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.800,00	2.276.600,00	2.276.600,00	-1.723.200,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			4.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.654.500,00	1.796.800,00	1.796.800,00	-1.857.700,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			3.655.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.654.900,00	1.931.700,00	1.931.700,00	-1.723.200,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			3.655.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	12.999.800,00	5.305.800,00	5.305.800,00	-7.694.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			13.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	17.595.632.400,00	17.636.154.900,00	16.997.361.863,00	-598.270.537,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Pegawai		959.016.480,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				104 Orang/ bulan	104 Orang/ bulan	16.598.411.740,00	16.598.411.740,00	16.022.858.703,00	-575.553.037,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	750.985.000,00	775.705.000,00	712.465.000,00	-38.520.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			750.985.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	170.517.500,00	122.635.600,00	122.635.600,00	-47.881.900,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			132.302.780,00	KECAMATAN RAPPOCINI
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20.250.955.560,00**	**22.178.323.015,00**	**22.632.375.178,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.091.419.420,00**	-
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.718.160,00	139.402.560,00	139.402.560,00	63.684.400,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			75.728.700,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya layanan pengadaan Barang Milik Daerah*				-	100 %	216.000.000,00	216.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat dan Pegawai		0,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	KECAMATAN RAPPOCINI
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**20.250.955.560,00**	**22.178.323.015,00**	**22.632.375.178,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**3.091.419.420,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	281.921.760,00	504.820.200,00	1.096.855.000,00	814.933.240,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat dan Pegawai		232.700.800,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				194 Paket	194 Paket	145.500.000,00	176.320.000,00	176.320.000,00	30.820.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			130.779.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	52.421.760,00	52.500.200,00	130.035.000,00	77.613.240,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			52.421.800,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	84.000.000,00	276.000.000,00	790.500.000,00	706.500.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			49.500.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	280.206.200,00	323.032.915,00	288.596.915,00	8.390.715,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat dan Pegawai		148.217.280,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	21.108.400,00	14.628.400,00	14.628.400,00	-6.480.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			21.150.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	67.748.500,00	64.581.940,00	68.442.940,00	694.440,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			45.570.480,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	22.788.600,00	19.071.875,00	68.774.875,00	45.986.275,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			22.789.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	17.280.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-12.180.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			17.280.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	7.280.700,00	13.650.700,00	13.650.700,00	6.370.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			7.427.800,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	22 Laporan	144.000.000,00	206.000.000,00	118.000.000,00	-26.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			34.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya layanan pengadaan Barang Milik Daerah*				-	100 %	123.082.700,00	1.688.604.500,00	1.682.494.600,00	1.559.411.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Pegawai		124.402.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				45 Unit	45 Unit	31.001.200,00	311.890.800,00	482.028.800,00	451.027.600,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			51.992.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				27 Unit	27 Unit	92.081.500,00	1.376.713.700,00	1.200.465.800,00	1.108.384.300,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			72.410.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tesedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	1.309.666.600,00	937.346.400,00	1.293.164.500,00	-16.502.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Pegawai		1.374.752.460,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	8 Laporan	121.926.600,00	122.003.400,00	122.003.400,00	76.800,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			167.946.060,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	317.257.440,00	278.319.840,00	229.708.700,00	-87.548.740,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			313.332.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	16 Laporan	870.482.560,00	537.023.160,00	941.452.400,00	70.969.840,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			893.474.400,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	402.962.800,00	853.330.800,00	1.124.869.000,00	721.906.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Pegawai		210.876.880,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	78.040.000,00	78.040.000,00	78.040.000,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			71.760.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	220.500.800,00	220.500.800,00	213.820.000,00	-6.680.800,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	35.750.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			14.600.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	68.672.000,00	519.040.000,00	797.259.000,00	728.587.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			124.516.880,00	KECAMATAN RAPPOCINI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan**				**95 %**	**90 %**	**14.622.640.400,00**	**15.101.044.340,00**	**14.842.032.740,00**	**-14.622.640.400,00**							**0,00**	
		[Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan]	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**14.622.640.400,00**	**15.101.044.340,00**	**14.842.032.740,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Ditingkat Kecamatann*				-	100 %	62.558.700,00	51.558.700,00	57.538.700,00	-5.020.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	4 Dokumen	62.558.700,00	51.558.700,00	57.538.700,00	-5.020.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	KECAMATAN RAPPOCINI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				100 %	100 %	14.560.081.700,00	15.049.485.640,00	14.784.494.040,00	224.412.340,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	14.560.081.700,00	15.049.485.640,00	14.784.494.040,00	224.412.340,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	KECAMATAN RAPPOCINI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**100 %**	**90** **90 %** **%**	**745.249.100,00**	**670.853.750,00**	**670.453.750,00**	**-45.249.100,00**							**700.000.000,00**	
		[Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan]	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**745.249.100,00**	**670.853.750,00**	**670.453.750,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**700.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*				100 %	100 %	745.249.100,00	670.853.750,00	670.453.750,00	-74.795.350,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat		700.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	188.839.900,00	188.839.900,00	188.439.900,00	-400.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	KECAMATAN RAPPOCINI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**				**100 %**	**90 %**	**584.378.260,00**	**582.740.960,00**	**570.740.960,00**	**-9.150.060,00**							**575.228.200,00**	
		[Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**584.378.260,00**	**582.740.960,00**	**570.740.960,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**575.228.200,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksanannya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	584.378.260,00	582.740.960,00	570.740.960,00	-13.637.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat		575.228.200,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	452.378.260,00	450.740.960,00	438.740.960,00	-13.637.300,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			443.228.200,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				11 Laporan	11 Laporan	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			132.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**12.724.280.780,00**	**12.789.281.620,00**	**12.121.968.020,00**	**-525.989.180,00**							**12.198.291.600,00**	
		[Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**12.724.280.780,00**	**12.789.281.620,00**	**12.121.968.020,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**12.198.291.600,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	12.724.280.780,00	12.789.281.620,00	12.121.968.020,00	-602.312.760,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Pegawai		12.198.291.600,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	12.724.280.780,00	12.789.281.620,00	12.121.968.020,00	-602.312.760,00	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			12.198.291.600,00	KECAMATAN RAPPOCINI
		KELURAHAN RAPPOCINI KECAMATAN RAPPOCINI							**500.000.000,00**	**468.641.500,00**	**468.641.500,00**	**-31.358.500,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**468.641.500,00**	**468.641.500,00**	**-31.358.500,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**468.641.500,00**	**468.641.500,00**	**-31.358.500,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**468.641.500,00**	**468.641.500,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**500.000.000,00**	**468.641.500,00**	**468.641.500,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**500.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	468.641.500,00	468.641.500,00	-31.358.500,00			-	- -	Kelurahan Rappocini		500.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	416.894.800,00	416.894.800,00	416.894.800,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Rappocini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	83.105.200,00	51.746.700,00	51.746.700,00	-31.358.500,00	Kota Makassar, Rappocini, Rappocini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
		KELURAHAN MINASA UPA KECAMATAN RAPPOCINI							**448.219.100,00**	**435.651.720,00**	**435.651.720,00**	**-12.567.380,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**448.219.100,00**	**435.651.720,00**	**435.651.720,00**	**-12.567.380,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**448.219.100,00**	**435.651.720,00**	**435.651.720,00**	**-12.567.380,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**448.219.100,00**	**435.651.720,00**	**435.651.720,00**	**-448.219.100,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	448.219.100,00	435.651.720,00	435.651.720,00	-12.567.380,00			-	- -	Kelurahan Minasa Upa		0,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	222.104.400,00	222.104.400,00	222.104.400,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Minasa Upa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	226.114.700,00	213.547.320,00	213.547.320,00	-12.567.380,00	Kota Makassar, Rappocini, Minasa Upa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN RAPPOCINI
		KELURAHAN BALLA PARANG KECAMATAN RAPPOCINI							**443.590.800,00**	**405.308.000,00**	**405.308.000,00**	**-38.282.800,00**							**300.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**443.590.800,00**	**405.308.000,00**	**405.308.000,00**	**-38.282.800,00**							**300.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**443.590.800,00**	**405.308.000,00**	**405.308.000,00**	**-38.282.800,00**							**300.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**443.590.800,00**	**405.308.000,00**	**405.308.000,00**	**-143.590.800,00**							**300.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	443.590.800,00	405.308.000,00	405.308.000,00	-38.282.800,00			-	- -	kelurahan Balla Parang		300.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	443.590.800,00	405.308.000,00	405.308.000,00	-38.282.800,00	Kota Makassar, Rappocini, Balla Parang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	56.409.200,00	49.799.200,00	49.799.200,00	-6.610.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Balla Parang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
		KELURAHAN BANTA BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI							**500.000.000,00**	**414.148.900,00**	**414.148.900,00**	**-85.851.100,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**414.148.900,00**	**414.148.900,00**	**-85.851.100,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**414.148.900,00**	**414.148.900,00**	**-85.851.100,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**414.148.900,00**	**414.148.900,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	414.148.900,00	414.148.900,00	-85.851.100,00			-	- -	Kelurahan Banta Bantaeng		0,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	359.021.000,00	293.495.100,00	293.495.100,00	-65.525.900,00	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN RAPPOCINI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	140.979.000,00	120.653.800,00	120.653.800,00	-20.325.200,00	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN RAPPOCINI
		KELURAHAN BONTO MAKKIO KECAMATAN RAPPOCINI							**500.000.000,00**	**451.989.600,00**	**451.989.600,00**	**-48.010.400,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**451.989.600,00**	**451.989.600,00**	**-48.010.400,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**451.989.600,00**	**451.989.600,00**	**-48.010.400,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**451.989.600,00**	**451.989.600,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	451.989.600,00	451.989.600,00	-48.010.400,00			-	- -	Kelurahan Bonto Makkio		500.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	390.178.900,00	347.568.500,00	347.568.500,00	-42.610.400,00	Kota Makassar, Rappocini, Bonto Makkio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	109.821.100,00	104.421.100,00	104.421.100,00	-5.400.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Bonto Makkio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
		KELURAHAN BUAKANA KECAMATAN RAPPOCINI							**500.000.000,00**	**466.662.000,00**	**466.662.000,00**	**-33.338.000,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**466.662.000,00**	**466.662.000,00**	**-33.338.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**466.662.000,00**	**466.662.000,00**	**-33.338.000,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**466.662.000,00**	**466.662.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	466.662.000,00	466.662.000,00	-33.338.000,00			-	- -	Kelurahan Buakana		500.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	286.098.400,00	286.098.400,00	286.098.400,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	213.901.600,00	180.563.600,00	180.563.600,00	-33.338.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
		KELURAHAN GUNUNG SARI KECAMATAN RAPPOCINI							**500.000.000,00**	**469.747.200,00**	**469.747.200,00**	**-30.252.800,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**469.747.200,00**	**469.747.200,00**	**-30.252.800,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**469.747.200,00**	**469.747.200,00**	**-30.252.800,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**469.747.200,00**	**469.747.200,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	469.747.200,00	469.747.200,00	-30.252.800,00			-	- -	Kelurahan Gunung Sari		500.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	367.818.400,00	338.675.600,00	338.675.600,00	-29.142.800,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	132.181.600,00	131.071.600,00	131.071.600,00	-1.110.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
		KELURAHAN KARUNRUNG KECAMATAN RAPPOCINI							**500.000.000,00**	**431.341.800,00**	**431.341.800,00**	**-68.658.200,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**431.341.800,00**	**431.341.800,00**	**-68.658.200,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**431.341.800,00**	**431.341.800,00**	**-68.658.200,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**431.341.800,00**	**431.341.800,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	431.341.800,00	431.341.800,00	-68.658.200,00			-	- -	Kelurahan Karunrung		500.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	380.142.000,00	316.683.600,00	316.683.600,00	-63.458.400,00	Kota Makassar, Rappocini, Karunrung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	119.858.000,00	114.658.200,00	114.658.200,00	-5.199.800,00	Kota Makassar, Rappocini, Karunrung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
		KELURAHAN KASSI-KASSI KECAMATAN RAPPOCINI							**48.927.504.100,00**	**51.322.243.685,00**	**50.837.570.648,00**	**1.910.066.548,00**							**16.564.939.220,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**48.927.504.100,00**	**51.322.243.685,00**	**50.837.570.648,00**	**1.910.066.548,00**							**16.564.939.220,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**48.927.504.100,00**	**51.322.243.685,00**	**50.837.570.648,00**	**1.910.066.548,00**							**16.564.939.220,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**745.249.100,00**	**670.853.750,00**	**670.453.750,00**	**-45.249.100,00**							**700.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	745.249.100,00	670.853.750,00	670.453.750,00	-74.795.350,00			-	- -	Kelurahan Kassi-Kassi		700.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	399.741.200,00	332.316.650,00	332.316.650,00	-67.424.550,00	Kota Makassar, Rappocini, Kassi - Kassi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.258.800,00	99.898.000,00	99.898.000,00	-360.800,00	Kota Makassar, Rappocini, Kassi - Kassi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
		KELURAHAN MAPPALA KECAMATAN RAPPOCINI							**500.000.000,00**	**476.882.000,00**	**476.882.000,00**	**-23.118.000,00**							**500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**476.882.000,00**	**476.882.000,00**	**-23.118.000,00**							**500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**476.882.000,00**	**476.882.000,00**	**-23.118.000,00**							**500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**476.882.000,00**	**476.882.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	476.882.000,00	476.882.000,00	-23.118.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat		500.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	367.055.400,00	367.055.400,00	367.055.400,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			300.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	132.944.600,00	109.826.600,00	109.826.600,00	-23.118.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Mappala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			200.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
		KELURAHAN TIDUNG KECAMATAN RAPPOCINI							**500.000.000,00**	**441.697.595,00**	**441.697.595,00**	**-58.302.405,00**							**581.381.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**441.697.595,00**	**441.697.595,00**	**-58.302.405,00**							**581.381.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**441.697.595,00**	**441.697.595,00**	**-58.302.405,00**							**581.381.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**441.697.595,00**	**441.697.595,00**	**81.381.000,00**							**581.381.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	441.697.595,00	441.697.595,00	-58.302.405,00			-	- -	Masyarakat		581.381.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	349.021.200,00	290.718.795,00	290.718.795,00	-58.302.405,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			381.381.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	150.978.800,00	150.978.800,00	150.978.800,00	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN RAPPOCINI
		KECAMATAN TALLO							**50.060.403.214,00**	**48.722.445.730,00**	**47.655.569.002,00**	**-2.404.834.212,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**50.060.403.214,00**	**48.722.445.730,00**	**47.655.569.002,00**	**-2.404.834.212,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**50.060.403.214,00**	**48.722.445.730,00**	**47.655.569.002,00**	**-2.404.834.212,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**20.065.590.029,00**	**23.313.634.230,00**	**23.699.672.782,00**	**-20.065.590.029,00**							**0,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**20.065.590.029,00**	**23.313.634.230,00**	**23.699.672.782,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	34.422.000,00	39.422.200,00	39.422.200,00	5.000.200,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.422.000,00	4.143.600,00	4.143.600,00	-1.278.400,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.414.200,00	3.414.200,00	-585.800,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.264.700,00	3.264.700,00	-735.300,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	7.101.400,00	7.101.400,00	3.101.400,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	5.901.400,00	5.901.400,00	1.901.400,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	13.000.000,00	15.596.900,00	15.596.900,00	2.596.900,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	16.193.844.263,00	16.312.445.450,00	16.008.342.448,00	-185.501.815,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				99 Orang/bulan	99 Orang/bulan	15.030.325.863,00	15.063.567.250,00	14.944.461.048,00	-85.864.815,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	904.200.000,00	904.200.000,00	755.160.000,00	-149.040.000,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	193.012.000,00	151.864.000,00	115.864.000,00	-77.148.000,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	66.306.400,00	192.814.200,00	192.857.400,00	126.551.000,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20.065.590.029,00**	**23.313.634.230,00**	**23.699.672.782,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	216.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**20.065.590.029,00**	**23.313.634.230,00**	**23.699.672.782,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	696.000.000,00	900.000.000,00	960.000.000,00	264.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	696.000.000,00	900.000.000,00	960.000.000,00	264.000.000,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	531.102.400,00	1.903.139.300,00	2.641.917.100,00	2.110.814.700,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	45.899.000,00	52.212.500,00	52.212.500,00	6.313.500,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	120.975.000,00	1.192.538.800,00	2.015.316.600,00	1.894.341.600,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	71.438.400,00	215.418.000,00	215.418.000,00	143.979.600,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	75.750.000,00	73.130.000,00	73.130.000,00	-2.620.000,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	73.040.000,00	77.840.000,00	77.840.000,00	4.800.000,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	144.000.000,00	292.000.000,00	208.000.000,00	64.000.000,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	29.460.366,00	733.140.000,00	1.090.610.000,00	1.061.149.634,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	29.460.366,00	733.140.000,00	1.090.610.000,00	1.061.149.634,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.627.591.000,00	2.234.262.280,00	1.768.156.034,00	140.565.034,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	189.955.800,00	156.885.100,00	156.885.100,00	-33.070.700,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	407.232.000,00	649.272.000,00	650.901.754,00	243.669.754,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	207.500.000,00	241.950.000,00	241.950.000,00	34.450.000,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	822.903.200,00	1.186.155.180,00	718.419.180,00	-104.484.020,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	737.170.000,00	1.061.225.000,00	1.061.225.000,00	324.055.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37.880.000,00	41.020.000,00	41.020.000,00	3.140.000,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				114 Unit	114 Unit	442.990.000,00	434.030.000,00	434.030.000,00	-8.960.000,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	68.200.000,00	68.200.000,00	68.200.000,00	0,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20.065.590.029,00**	**23.313.634.230,00**	**23.699.672.782,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	188.100.000,00	517.975.000,00	517.975.000,00	329.875.000,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**				**-**	**90 %**	**11.938.041.332,00**	**13.016.087.000,00**	**11.516.806.200,00**	**-11.938.041.332,00**							**0,00**	
		[Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan]	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**11.938.041.332,00**	**13.016.087.000,00**	**11.516.806.200,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	134.100.000,00	118.968.600,00	118.695.800,00	-15.404.200,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	134.100.000,00	118.968.600,00	118.695.800,00	-15.404.200,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	11.803.941.332,00	12.897.118.400,00	11.398.110.400,00	-405.830.932,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	11.803.941.332,00	12.897.118.400,00	11.398.110.400,00	-405.830.932,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**4.993.038.414,00**	**262.842.000,00**	**262.842.000,00**	**-4.993.038.414,00**							**0,00**	
		[Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**4.993.038.414,00**	**262.842.000,00**	**262.842.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.993.038.414,00	262.842.000,00	262.842.000,00	-4.730.196.414,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	254.070.200,00	262.842.000,00	262.842.000,00	8.771.800,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**				**-**	**90 %**	**852.080.400,00**	**775.218.200,00**	**815.272.200,00**	**-852.080.400,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	852.080.400,00	775.218.200,00	815.272.200,00	-36.808.200,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	545.497.200,00	516.741.100,00	556.762.700,00	11.265.500,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	306.583.200,00	258.477.100,00	258.509.500,00	-48.073.700,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**				**-**	**100 %**	**12.211.653.039,00**	**11.354.664.300,00**	**11.360.975.820,00**	**-12.211.653.039,00**							**0,00**	
		[Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**12.211.653.039,00**	**11.354.664.300,00**	**11.360.975.820,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	12.211.653.039,00	11.354.664.300,00	11.360.975.820,00	-850.677.219,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	12.211.653.039,00	11.354.664.300,00	11.360.975.820,00	-850.677.219,00	Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
		KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU KECAMATAN TALLO							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	Kelurahan Ujung Pandang Baru		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	287.428.456,00	287.428.456,00	287.428.456,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	212.571.544,00	212.571.544,00	212.571.544,00	Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**600.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**600.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	Kelurahan Kaluku Bodoa		600.000.000,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	312.053.200,00	312.053.200,00	312.053.200,00	Kota Makassar, Tallo, Kaluku Bodoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			400.000.000,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	187.946.800,00	187.946.800,00	187.946.800,00	Kota Makassar, Tallo, Kaluku Bodoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN BUNGA EJA BERU KECAMATAN TALLO							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	Kelurahan Bunga Eja Beru		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	319.382.784,00	319.382.784,00	319.382.784,00	Kota Makassar, Tallo, Bunga Eja Beru	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	180.617.216,00	180.617.216,00	180.617.216,00	Kota Makassar, Tallo, Bunga Eja Beru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN WALA-WALAYYA KECAMATAN TALLO							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**600.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**600.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	Kelurahan Wala-Walayya		600.000.000,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	0,00	366.922.888,00	366.922.888,00	366.922.888,00	Kota Makassar, Tallo, Wala-Walaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			400.000.000,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	133.077.112,00	133.077.112,00	133.077.112,00	Kota Makassar, Tallo, Wala-Walaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN TALLO KECAMATAN TALLO							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	Kelurahan Tallo		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	369.219.000,00	369.219.000,00	369.219.000,00	Kota Makassar, Tallo, Tallo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	130.781.000,00	130.781.000,00	130.781.000,00	Kota Makassar, Tallo, Tallo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN RAPPOKALLING KECAMATAN TALLO							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	Kelurahan Rappokalling		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	230.373.235,00	230.373.235,00	230.373.235,00	Kota Makassar, Tallo, Rappokalling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	269.626.765,00	269.626.765,00	269.626.765,00	Kota Makassar, Tallo, Rappokalling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN TAMMUA KECAMATAN TALLO							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Tammua		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	236.065.536,00	236.065.536,00	236.065.536,00	0,00	Kota Makassar, Tallo, Tammua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	263.934.464,00	263.934.464,00	263.934.464,00	0,00	Kota Makassar, Tallo, Tammua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
		KELURAHAN PANNAMPU KECAMATAN TALLO							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Pannampu		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	352.728.825,00	352.728.825,00	352.728.825,00	0,00	Kota Makassar, Tallo, Pannampu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	147.271.175,00	147.271.175,00	147.271.175,00	0,00	Kota Makassar, Tallo, Pannampu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
		KELURAHAN LEMBO KECAMATAN TALLO							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**600.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**600.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**600.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**100.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-		Kelurahan Lembo		600.000.000,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	293.345.100,00	293.345.100,00	293.345.100,00	0,00	Kota Makassar, Tallo, Lembo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	206.654.900,00	206.654.900,00	206.654.900,00	0,00	Kota Makassar, Tallo, Lembo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN TALLO
		KELURAHAN BULOA KECAMATAN TALLO							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**545.196.845,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**545.196.845,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**545.196.845,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**545.196.845,00**							**545.196.845,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-		-		545.196.845,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	412.924.322,00	412.924.322,00	412.924.322,00	Kota Makassar, Tallo, Buloa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			445.196.845,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	87.075.678,00	87.075.678,00	87.075.678,00	Kota Makassar, Tallo, Buloa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN TALLO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN RAPPOJAWA KECAMATAN TALLO							**261.031.786,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**238.968.214,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**261.031.786,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**238.968.214,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**261.031.786,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**238.968.214,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**261.031.786,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-261.031.786,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	261.031.786,00	500.000.000,00	500.000.000,00	238.968.214,00			-	- -	Kelurahan Rappojawa		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	238.968.214,00	238.968.214,00	238.968.214,00	Kota Makassar, Tallo, Rappojawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	261.031.786,00	261.031.786,00	261.031.786,00	0,00	Kota Makassar, Tallo, Rappojawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
		KELURAHAN LAKKANG KECAMATAN TALLO							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	Kelurahan Lakkang		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	401.381.751,00	401.381.751,00	401.381.751,00	Kota Makassar, Tallo, Lakkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	98.618.249,00	98.618.249,00	98.618.249,00	Kota Makassar, Tallo, Lakkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN SUANGGA KECAMATAN TALLO							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**550.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**550.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**550.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**50.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Suangga		550.000.000,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	340.316.964,00	340.316.964,00	340.316.964,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			400.000.000,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	159.683.036,00	159.683.036,00	159.683.036,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN TALLO
		KELURAHAN LA`LATANG KECAMATAN TALLO							**0,00**	**499.821.596,00**	**499.821.596,00**	**499.821.596,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**499.821.596,00**	**499.821.596,00**	**499.821.596,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**499.821.596,00**	**499.821.596,00**	**499.821.596,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**499.821.596,00**	**499.821.596,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	499.821.596,00	499.821.596,00	499.821.596,00			-	- -	Kelurahan La`Latang		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				16 Unit	16 Unit	0,00	307.538.896,00	307.538.896,00	307.538.896,00	Kota Makassar, Tallo, La'latang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	192.282.700,00	192.282.700,00	192.282.700,00	Kota Makassar, Tallo, La'latang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN KALUKUANG KECAMATAN TALLO							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Kalukuang		0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	286.476.680,00	286.476.680,00	286.476.680,00	0,00	Kota Makassar, Tallo, Kalukuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TALLO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	213.523.320,00	213.523.320,00	213.523.320,00	0,00	Kota Makassar, Tallo, Kalukuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -				0,00	KECAMATAN TALLO
		KECAMATAN TAMALANREA							**40.322.948.000,00**	**42.172.948.000,00**	**42.486.000.000,00**	**2.163.052.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**40.322.948.000,00**	**42.172.948.000,00**	**42.486.000.000,00**	**2.163.052.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**40.322.948.000,00**	**42.172.948.000,00**	**42.486.000.000,00**	**2.163.052.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**15.236.534.094,00**	**15.944.107.056,00**	**15.964.486.639,00**	**-15.236.534.094,00**							**0,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**15.236.534.094,00**	**15.944.107.056,00**	**15.964.486.639,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	39.082.000,00	24.145.000,00	24.145.000,00	-14.937.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.082.000,00	3.805.500,00	3.805.500,00	-6.276.500,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.133.500,00	4.133.500,00	133.500,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.133.500,00	4.133.500,00	133.500,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.133.500,00	4.133.500,00	133.500,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.133.500,00	4.133.500,00	133.500,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4 Laporan	13.000.000,00	3.805.500,00	3.805.500,00	-9.194.500,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	11.518.870.974,00	11.577.793.474,00	11.353.070.674,00	-165.800.300,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	80 Orang/bulan	10.655.944.974,00	10.655.944.974,00	10.431.244.974,00	-224.700.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	594.770.000,00	547.443.400,00	547.443.400,00	-47.326.600,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	250.427.000,00	368.210.100,00	368.210.100,00	117.783.100,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.405.000,00	3.097.500,00	3.086.100,00	-2.318.900,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2 Laporan	12.324.000,00	3.097.500,00	3.086.100,00	-9.237.900,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**15.236.534.094,00**	**15.944.107.056,00**	**15.964.486.639,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	216.000.000,00	216.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TAMALANREA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**15.236.534.094,00**	**15.944.107.056,00**	**15.964.486.639,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	190.330.000,00	573.000.000,00	682.500.000,00	492.170.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	200 Paket	140.830.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	9.170.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	74 Orang	49.500.000,00	423.000.000,00	532.500.000,00	483.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	110.838.000,00	164.212.000,00	184.208.200,00	73.370.200,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.758.000,00	9.570.000,00	9.570.000,00	-1.188.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	21.030.000,00	25.312.000,00	25.308.200,00	4.278.200,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	26.730.000,00	15.650.000,00	15.650.000,00	-11.080.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	3 Dokumen	22.320.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	-8.640.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	20 Laporan	30.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	90.000.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				-	100 %	251.718.000,00	1.215.520.920,00	1.215.520.920,00	963.802.920,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	87 Unit	62.390.000,00	587.624.720,00	587.624.720,00	525.234.720,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	64 Unit	189.328.000,00	627.896.200,00	627.896.200,00	438.568.200,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				-	100 %	2.045.352.120,00	1.606.159.662,00	1.804.697.845,00	-240.654.275,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	231.828.000,00	246.158.880,00	209.448.000,00	-22.380.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.813.524.120,00	1.360.000.782,00	1.595.249.845,00	-218.274.275,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				-	100 %	864.343.000,00	567.276.000,00	570.344.000,00	-293.999.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.380.000,00	39.520.000,00	39.520.000,00	3.140.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	2 Unit	73.490.000,00	43.470.000,00	46.720.000,00	-26.770.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	3 Unit	676.293.000,00	393.186.000,00	393.004.000,00	-283.289.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				32 Unit	50 Unit	34.160.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	-3.660.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	33 Unit	44.020.000,00	60.600.000,00	60.600.000,00	16.580.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**				**-**	**90 %**	**15.394.438.642,00**	**17.188.213.800,00**	**17.409.135.600,00**	**-15.394.438.642,00**							**0,00**	
		[Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan]	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**15.394.438.642,00**	**17.188.213.800,00**	**17.409.135.600,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				-	100 %	34.884.242,00	61.546.000,00	61.546.000,00	26.661.758,00			-	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	34.884.242,00	61.546.000,00	61.546.000,00	26.661.758,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana*				-	100 %	15.359.554.400,00	17.126.667.800,00	17.347.589.600,00	1.988.035.200,00			-	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	15.359.554.400,00	17.126.667.800,00	17.347.589.600,00	1.988.035.200,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**215.677.160,00**	**209.404.400,00**	**202.045.000,00**	**-215.677.160,00**							**0,00**	
		[Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik]	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**100**	**100**	**100**	-	-	**215.677.160,00**	**209.404.400,00**	**202.045.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	49.668.160,00	0,00	0,00	-49.668.160,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	49.668.160,00	0,00	0,00	-49.668.160,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	166.009.000,00	209.404.400,00	202.045.000,00	36.036.000,00			-	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	166.009.000,00	209.404.400,00	202.045.000,00	36.036.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**				**-**	**90 %**	**688.703.000,00**	**698.630.200,00**	**698.630.200,00**	**-688.703.000,00**							**0,00**	
		[Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**688.703.000,00**	**698.630.200,00**	**698.630.200,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana*				-	100 %	688.703.000,00	698.630.200,00	698.630.200,00	9.927.200,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	591.985.000,00	602.620.200,00	602.620.200,00	10.635.200,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	96.718.000,00	96.010.000,00	96.010.000,00	-708.000,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**				**-**	**100 %**	**8.787.595.104,00**	**8.132.592.544,00**	**8.211.702.561,00**	**-8.787.595.104,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100**	**97**	**100**	-	-	**8.787.595.104,00**	**8.132.592.544,00**	**8.211.702.561,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana*				-	100 %	8.787.595.104,00	8.132.592.544,00	8.211.702.561,00	-575.892.543,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	8 Dokumen	8.787.595.104,00	8.132.592.544,00	8.211.702.561,00	-575.892.543,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
		KELURAHAN TAMALANREA KECAMATAN TAMALANREA							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Tamalanrea		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	400.000.000,00	456.890.208,00	456.890.208,00	56.890.208,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	43.109.792,00	43.109.792,00	-56.890.208,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
		KELURAHAN TAMALANREA JAYA KECAMATAN TAMALANREA							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Tamalanrea Jaya		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	400.000.000,00	457.045.614,00	457.045.614,00	57.045.614,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	42.954.386,00	42.954.386,00	-57.045.614,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
		KELURAHAN TAMALANREA INDAH KECAMATAN TAMALANREA							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Tamalanrea Indah		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	2 Unit	400.000.000,00	457.126.865,00	457.126.865,00	57.126.865,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	42.873.135,00	42.873.135,00	-57.126.865,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
		KELURAHAN BUNTUSU KECAMATAN TAMALANREA							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Buntusu		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	400.000.000,00	456.863.824,00	456.863.824,00	56.863.824,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Buntusu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	43.136.176,00	43.136.176,00	-56.863.824,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Buntusu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
		KELURAHAN KAPASA KECAMATAN TAMALANREA							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Kapasa		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	400.000.000,00	457.007.760,00	457.007.760,00	57.007.760,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Kapasa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	42.992.240,00	42.992.240,00	-57.007.760,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Kapasa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
		KELURAHAN KAPASA RAYA KECAMATAN TAMALANREA							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Kapasa Raya		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	400.000.000,00	455.161.264,00	455.161.264,00	55.161.264,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Kapasa Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	44.838.736,00	44.838.736,00	-55.161.264,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Kapasa Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
		KELURAHAN BIRA KECAMATAN TAMALANREA							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Bira		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	400.000.000,00	457.220.300,00	457.220.300,00	57.220.300,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Bira	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	42.779.700,00	42.779.700,00	-57.220.300,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Bira	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KELURAHAN PARANGLOE KECAMATAN TAMALANREA							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				-	100 %	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Kelurahan Parangloe		0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	170.800.880,00	170.800.880,00	-229.199.120,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Parang Loe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	329.199.120,00	329.199.120,00	229.199.120,00	Kota Makassar, Tamalanrea, Parang Loe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALANREA
		KECAMATAN TAMALATE							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**100 90 % %**	**100 100 90 % % %**	**19.972.442.137,00**	**22.397.788.052,00**	**21.117.568.242,00**	**-676.600.567,00**							**19.295.841.570,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**19.972.442.137,00**	**22.397.788.052,00**	**21.117.568.242,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**19.295.841.570,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun*				100 %	100 %	13.066.100,00	10.066.100,00	10.066.100,00	-3.000.000,00			-	- -	Pegawai		43.319.120,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.619.300,00	619.300,00	619.300,00	-3.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			14.319.120,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.800,00	2.107.800,00	2.107.800,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.800,00	2.107.800,00	2.107.800,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.800,00	2.107.800,00	2.107.800,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.800,00	2.107.800,00	2.107.800,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN TAMALATE
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**19.972.442.137,00**	**22.397.788.052,00**	**21.117.568.242,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**19.295.841.570,00**	-
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	507.800,00	507.800,00	507.800,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**19.972.442.137,00**	**22.397.788.052,00**	**21.117.568.242,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**19.295.841.570,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	507.800,00	507.800,00	507.800,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			13.000.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				100 %	100 %	16.719.713.659,00	17.671.804.544,00	16.166.064.544,00	-553.649.115,00			-	- -	Pegawai		16.494.434.270,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				108 Orang/ bulan	108 Orang/ bulan	15.605.084.859,00	16.574.912.344,00	15.079.912.344,00	-525.172.515,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.381.791.270,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	710.770.400,00	710.770.400,00	686.530.400,00	-24.240.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			696.169.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	197.025.600,00	197.025.600,00	197.025.600,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			208.256.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.755.000,00	255.000,00	255.000,00	-1.500.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.750.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	205.077.800,00	188.841.200,00	202.341.200,00	-2.736.600,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			203.468.000,00	KECAMATAN TAMALATE
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**19.972.442.137,00**	**22.397.788.052,00**	**21.117.568.242,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**19.295.841.570,00**	-
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 %	216.000.000,00	216.000.000,00	134.176.000,00	-81.824.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	134.176.000,00	-81.824.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**19.972.442.137,00**	**22.397.788.052,00**	**21.117.568.242,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**19.295.841.570,00**	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun*				100 %	100 %	573.200.000,00	882.950.000,00	830.450.000,00	257.250.000,00			-	- -	-		172.700.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				108 Paket	108 Paket	165.000.000,00	168.750.000,00	168.750.000,00	3.750.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				28 Orang	28 Orang	408.200.000,00	714.200.000,00	661.700.000,00	253.500.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			172.700.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun*				100 %	100 %	451.252.300,00	689.640.680,00	609.614.280,00	158.361.980,00			-	- -	-		428.952.030,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52.500.000,00	44.107.000,00	44.107.000,00	-8.393.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			51.658.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	217.627.800,00	328.382.300,00	328.382.300,00	110.754.500,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			294.059.030,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.184.500,00	67.421.380,00	67.421.380,00	24.236.880,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			19.813.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.980.000,00	19.770.000,00	19.743.600,00	-236.400,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			19.822.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.960.000,00	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			9.600.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00	220.000.000,00	140.000.000,00	32.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			34.000.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				100 %	100 %	119.144.800,00	325.053.100,00	324.038.100,00	204.893.300,00			-	- -	-		28.420.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	119.144.800,00	325.053.100,00	324.038.100,00	204.893.300,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			28.420.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				100 %	100 %	1.349.952.528,00	1.429.732.828,00	1.420.933.818,00	70.981.290,00			-	- -	-		1.670.756.700,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	101.324.000,00	104.324.000,00	104.324.000,00	3.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			106.400.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	235.103.388,00	235.099.868,00	229.300.858,00	-5.802.530,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			230.562.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	129.575.000,00	129.575.000,00	126.575.000,00	-3.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			390.555.500,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	883.950.140,00	960.733.960,00	960.733.960,00	76.783.820,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			943.239.200,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				100 %	100 %	530.112.750,00	1.172.540.800,00	1.622.225.400,00	1.092.112.650,00			-	- -	-		457.259.450,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.770.000,00	39.770.000,00	23.660.000,00	-16.110.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			36.630.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	202.360.000,00	202.360.000,00	202.281.600,00	-78.400,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			111.554.450,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	52.800.000,00	76.110.800,00	88.110.800,00	35.310.800,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			53.400.000,00	KECAMATAN TAMALATE
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**19.972.442.137,00**	**22.397.788.052,00**	**21.117.568.242,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**19.295.841.570,00**	-
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	235.182.750,00	854.300.000,00	1.308.173.000,00	1.072.990.250,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			255.675.000,00	KECAMATAN TAMALATE
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Kecamatan**				**100 %**	**90 %**	**16.698.807.700,00**	**17.358.233.760,00**	**17.408.530.160,00**	**-1.627.010.100,00**							**15.071.797.600,00**	
		[Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan]	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**16.698.807.700,00**	**17.358.233.760,00**	**17.408.530.160,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**15.071.797.600,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana*				100 %	100 %	93.062.600,00	93.062.600,00	93.062.600,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Masyarakat		65.672.600,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	93.062.600,00	93.062.600,00	93.062.600,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			65.672.600,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana*				100 %	100 %	16.605.745.100,00	17.265.171.160,00	17.315.467.560,00	709.722.460,00			-	- -	-		15.006.125.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	16.605.745.100,00	17.265.171.160,00	17.315.467.560,00	709.722.460,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			15.006.125.000,00	KECAMATAN TAMALATE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**100 %**	**90 90 % %**	**3.688.436.055,00**	**3.530.486.190,00**	**3.530.486.190,00**	**-3.504.582.475,00**							**183.853.580,00**	
		[Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik]	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**100**	**50**	**100**	-	-	**3.688.436.055,00**	**3.530.486.190,00**	**3.530.486.190,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**183.853.580,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana*				100 %	100 %	3.688.436.055,00	3.530.486.190,00	3.530.486.190,00	-157.949.865,00			-	- -	Masyarakat		183.853.580,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	188.436.100,00	188.259.300,00	188.259.300,00	-176.800,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			183.853.580,00	KECAMATAN TAMALATE
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**				**100 %**	**90 %**	**687.871.200,00**	**687.871.200,00**	**687.871.200,00**	**120.800,00**							**687.992.000,00**	
		[Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**687.871.200,00**	**687.871.200,00**	**687.871.200,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**687.992.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana*				100 %	100 %	147.380.800,00	147.380.800,00	147.380.800,00	0,00			-	- -	Masyarakat		147.343.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	11 Laporan	14.890.400,00	14.890.400,00	14.890.400,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			14.694.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	132.490.400,00	132.490.400,00	132.490.400,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			132.649.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				100 %	100 %	540.490.400,00	540.490.400,00	540.490.400,00	0,00			-	- -	-		540.649.000,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	540.490.400,00	540.490.400,00	540.490.400,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			540.649.000,00	KECAMATAN TAMALATE
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI TINGKAT KECAMATAN**				**100 %**	**100 %**	**13.630.982.908,00**	**13.842.244.208,00**	**14.014.744.208,00**	**114.205.180,00**							**13.745.188.088,00**	
		[Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**13.630.982.908,00**	**13.842.244.208,00**	**14.014.744.208,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**13.745.188.088,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan*				100 %	1 Tahun	13.630.982.908,00	13.842.244.208,00	14.014.744.208,00	383.761.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		13.745.188.088,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	13.630.982.908,00	13.842.244.208,00	14.014.744.208,00	383.761.300,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			13.745.188.088,00	KECAMATAN TAMALATE
		KELURAHAN BALANG BARU KECAMATAN TAMALATE							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Perssentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**3.688.436.055,00**	**3.530.486.190,00**	**3.530.486.190,00**	**-3.504.582.475,00**							**183.853.580,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.688.436.055,00**	**3.530.486.190,00**	**3.530.486.190,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**183.853.580,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.688.436.055,00	3.530.486.190,00	3.530.486.190,00	-157.949.865,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Balang Baru		183.853.580,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	437.987.500,00	436.699.000,00	436.699.000,00	-1.288.500,00	Kota Makassar, Tamalate, Balang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	62.012.500,00	63.301.000,00	63.301.000,00	1.288.500,00	Kota Makassar, Tamalate, Balang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
		KELURAHAN BAROMBONG KECAMATAN TAMALATE							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Barombong		0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	378.810.500,00	378.810.500,00	378.810.500,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Barombong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	121.189.500,00	121.189.500,00	121.189.500,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Barombong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
		KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Bongaya		0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	456.963.100,00	456.962.312,00	456.962.312,00	-788,00	Kota Makassar, Tamalate, Bongaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	43.036.900,00	43.037.688,00	43.037.688,00	788,00	Kota Makassar, Tamalate, Bongaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
		KELURAHAN JONGAYA KECAMATAN TAMALATE							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Jongaya		0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	415.915.900,00	415.915.900,00	415.915.900,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Jongaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	84.084.100,00	84.084.100,00	84.084.100,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Jongaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
		KELURAHAN MACCINI SOMBALA KECAMATAN TAMALATE							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Maccini Sombala		0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	326.362.300,00	326.212.556,00	326.212.556,00	-149.744,00	Kota Makassar, Tamalate, Maccini Sombala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	173.637.700,00	173.787.444,00	173.787.444,00	149.744,00	Kota Makassar, Tamalate, Maccini Sombala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
		KELURAHAN MANGASA KECAMATAN TAMALATE							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**3.688.436.055,00**	**3.530.486.190,00**	**3.530.486.190,00**	**-3.504.582.475,00**							**183.853.580,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.688.436.055,00	3.530.486.190,00	3.530.486.190,00	-157.949.865,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Mangasa		183.853.580,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	420.619.200,00	420.619.200,00	420.619.200,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	79.380.800,00	79.380.800,00	79.380.800,00	0,00	Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
		KELURAHAN MANNURUKI KECAMATAN TAMALATE							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**3.688.436.055,00**	**3.530.486.190,00**	**3.530.486.190,00**	**-3.504.582.475,00**							**183.853.580,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.688.436.055,00	3.530.486.190,00	3.530.486.190,00	-157.949.865,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Mannuruki		183.853.580,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	462.753.800,00	249.297.280,00	249.297.280,00	-213.456.520,00	Kota Makassar, Tamalate, Mannuruki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	37.246.200,00	93.246.200,00	93.246.200,00	56.000.000,00	Kota Makassar, Tamalate, Mannuruki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
		KELURAHAN PA`BAENG BAENG KECAMATAN TAMALATE							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Pesentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasaran lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**3.688.436.055,00**	**3.530.486.190,00**	**3.530.486.190,00**	**-3.504.582.475,00**							**183.853.580,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.688.436.055,00	3.530.486.190,00	3.530.486.190,00	-157.949.865,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Pa'Baeng Baeng		183.853.580,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	336.329.520,00	336.015.460,00	336.015.460,00	-314.060,00	Kota Makassar, Tamalate, Pa'baeng-Baeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	163.670.435,00	163.668.400,00	163.668.400,00	-2.035,00	Kota Makassar, Tamalate, Pa'baeng-Baeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
		KELURAHAN PARANG TAMBUNG KECAMATAN TAMALATE							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Mayarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasaran lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**3.688.436.055,00**	**3.530.486.190,00**	**3.530.486.190,00**	**-3.504.582.475,00**							**183.853.580,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.688.436.055,00	3.530.486.190,00	3.530.486.190,00	-157.949.865,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Parang Tambung		183.853.580,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	388.139.611,00	384.570.076,00	384.570.076,00	-3.569.535,00	Kota Makassar, Tamalate, Parang Tambung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	111.860.389,00	115.429.924,00	115.429.924,00	3.569.535,00	Kota Makassar, Tamalate, Parang Tambung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
		KELURAHAN TANJUNG MERDEKA KECAMATAN TAMALATE							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Mayarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasaran lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**3.688.436.055,00**	**3.530.486.190,00**	**3.530.486.190,00**	**-3.504.582.475,00**							**183.853.580,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.688.436.055,00	3.530.486.190,00	3.530.486.190,00	-157.949.865,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Tanjung Merdeka		183.853.580,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	380.967.000,00	380.966.775,00	380.853.845,00	-113.155,00	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	119.033.000,00	119.033.225,00	119.146.155,00	113.155,00	Kota Makassar, Tamalate, Tanjung Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
		KELURAHAN BONTODURI KECAMATAN TAMALATE							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**54.678.540.000,00**	**57.816.623.410,00**	**56.759.200.000,00**	**2.080.660.000,00**							**48.984.672.838,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Mayarakat/Kelompok Masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasaran lingkup kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**3.688.436.055,00**	**3.530.486.190,00**	**3.530.486.190,00**	**-3.504.582.475,00**							**183.853.580,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.688.436.055,00	3.530.486.190,00	3.530.486.190,00	-157.949.865,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Bontoduri		183.853.580,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	321.258.400,00	321.258.150,00	321.258.150,00	-250,00	Kota Makassar, Tamalate, Bonto Duri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	178.741.600,00	178.741.400,00	178.741.400,00	-200,00	Kota Makassar, Tamalate, Bonto Duri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN TAMALATE
		KECAMATAN UJUNG PANDANG							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**15.463.395.516,00**	**15.384.746.892,00**	**14.850.550.287,00**	**3.196.604.484,00**							**18.660.000.000,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**15.463.395.516,00**	**15.384.746.892,00**	**14.850.550.287,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**18.660.000.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Acuan Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	44.930.400,00	47.003.400,00	39.843.400,00	-5.087.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		150.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	11.994.700,00	14.067.700,00	11.067.700,00	-927.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			40.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.344.500,00	7.344.500,00	6.904.500,00	-440.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			20.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.875.100,00	4.875.100,00	4.435.100,00	-440.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			20.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.388.800,00	6.388.800,00	5.948.800,00	-440.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			20.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.217.300,00	5.217.300,00	4.777.300,00	-440.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			20.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	9.110.000,00	9.110.000,00	6.710.000,00	-2.400.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan*				-	100 %	12.635.233.412,00	12.632.837.512,00	11.253.429.007,00	-1.381.804.405,00			-	- -	-		14.490.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	11.543.411.612,00	11.543.411.612,00	10.172.995.007,00	-1.370.416.605,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.000.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	637.800.000,00	637.800.000,00	613.200.000,00	-24.600.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			850.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	307.002.000,00	307.002.000,00	307.002.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			320.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.354.400,00	4.354.400,00	3.814.400,00	-540.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	142.665.400,00	140.269.500,00	156.417.600,00	13.752.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**15.463.395.516,00**	**15.384.746.892,00**	**14.850.550.287,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**18.660.000.000,00**	-
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	216.000.000,00	0,00	0,00	-216.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	0,00	0,00	-216.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**15.463.395.516,00**	**15.384.746.892,00**	**14.850.550.287,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**18.660.000.000,00**	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya kapasitas Aparatur Kecamatan*				-	100 %	257.662.500,00	376.500.000,00	1.081.500.000,00	823.837.500,00			-	- -	-		1.050.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				250 Paket	250 Paket	152.662.500,00	96.000.000,00	96.000.000,00	-56.662.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	105.000.000,00	280.500.000,00	985.500.000,00	880.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			750.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*				-	100 %	439.536.804,00	549.452.220,00	743.826.020,00	304.289.216,00			-	- -	-		585.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.965.000,00	9.205.000,00	9.205.000,00	-1.760.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	276.411.804,00	340.087.220,00	504.056.420,00	227.644.616,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	38.940.000,00	34.940.000,00	35.344.600,00	-3.595.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	108.000.000,00	160.000.000,00	190.000.000,00	82.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	980.364.900,00	984.083.760,00	1.070.711.860,00	90.346.960,00			-	- -	-		1.210.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	61.358.400,00	61.634.000,00	68.449.600,00	7.091.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	161.320.900,00	162.457.600,00	176.442.600,00	15.121.700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	751.585.600,00	753.892.160,00	819.719.660,00	68.134.060,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			750.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				-	100 %	839.667.500,00	794.870.000,00	661.240.000,00	-178.427.500,00			-	- -	-		1.075.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.020.000,00	28.910.000,00	42.020.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			75.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	171.240.000,00	145.020.000,00	171.240.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	55.380.000,00	55.380.000,00	61.380.000,00	6.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	538.087.500,00	532.620.000,00	353.660.000,00	-184.427.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	32.940.000,00	32.940.000,00	32.940.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan**				**-**	**90 %**	**16.190.709.700,00**	**16.816.148.160,00**	**16.852.727.460,00**	**1.959.290.300,00**							**18.150.000.000,00**	
		[Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan]	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**100**	**99**	**100**	-	-	**16.190.709.700,00**	**16.816.148.160,00**	**16.852.727.460,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**18.150.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	100 %	57.941.800,00	77.105.000,00	268.827.000,00	210.885.200,00			-	- -	-		150.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	57.941.800,00	77.105.000,00	268.827.000,00	210.885.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				-	100 %	16.132.767.900,00	16.739.043.160,00	16.583.900.460,00	451.132.560,00			-	- -	-		18.000.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	16.132.767.900,00	16.739.043.160,00	16.583.900.460,00	451.132.560,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			18.000.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**-**	**90** **90 %** **%**	**5.164.058.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.135.941.596,00**							**10.300.000.000,00**	
		[Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik]	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**100**	**83.38**	**100**	-	-	**5.164.058.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.192.078.404,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**10.300.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				-	100 %	5.164.058.404,00	5.192.078.404,00	5.192.078.404,00	28.020.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		10.300.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	164.060.200,00	192.080.200,00	192.080.200,00	28.020.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				300.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**				**-**	**90 %**	**655.205.000,00**	**590.400.000,00**	**644.400.000,00**	**244.795.000,00**							**900.000.000,00**	
		[Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**655.205.000,00**	**590.400.000,00**	**644.400.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**900.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Meningkatnya Ketentraman dan dan Ketertiban Umum*				-	100 %	655.205.000,00	590.400.000,00	644.400.000,00	-10.805.000,00			-	- -	-		900.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	535.205.000,00	470.400.000,00	524.400.000,00	-10.805.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			750.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**				**-**	**100 %**	**4.605.893.380,00**	**4.402.629.164,00**	**4.495.889.244,00**	**2.394.106.620,00**							**7.000.000.000,00**	
		[Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**4.605.893.380,00**	**4.402.629.164,00**	**4.495.889.244,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**7.000.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*				-	100 %	4.605.893.380,00	4.402.629.164,00	4.495.889.244,00	-110.004.136,00			-	- -	-		7.000.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	4.605.893.380,00	4.402.629.164,00	4.495.889.244,00	-110.004.136,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			7.000.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
		KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**5.164.058.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.135.941.596,00**							**10.300.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.164.058.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.192.078.404,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**10.300.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.164.058.404,00	5.192.078.404,00	5.192.078.404,00	28.020.000,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan Baru		10.300.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	199.794.000,00	199.669.196,00	199.669.196,00	-124.804,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	300.206.000,00	300.330.804,00	300.330.804,00	124.804,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.164.058.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.135.941.596,00**							**10.300.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.164.058.404,00	5.192.078.404,00	5.192.078.404,00	28.020.000,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan Bulogading		10.300.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	193.905.546,00	193.905.546,00	193.905.546,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	306.094.454,00	306.094.454,00	306.094.454,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
		KELURAHAN LAE-LAE KECAMATAN UJUNG PANDANG							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.164.058.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.135.941.596,00**							**10.300.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.164.058.404,00	5.192.078.404,00	5.192.078.404,00	28.020.000,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		10.300.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	228.879.000,00	228.879.000,00	228.879.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Lae-Lae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	271.121.000,00	271.121.000,00	271.121.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Lae-Lae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
		KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.164.058.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.135.941.596,00**							**10.300.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.164.058.404,00	5.192.078.404,00	5.192.078.404,00	28.020.000,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		10.300.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Lajangiru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Lajangiru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
		KELURAHAN LOSARI KECAMATAN UJUNG PANDANG							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.164.058.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.135.941.596,00**							**10.300.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.164.058.404,00	5.192.078.404,00	5.192.078.404,00	28.020.000,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		10.300.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	237.969.000,00	237.969.000,00	237.969.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Losari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	262.031.000,00	262.031.000,00	262.031.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Losari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
		KELURAHAN MALOKU KECAMATAN UJUNG PANDANG							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.164.058.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.135.941.596,00**							**10.300.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.164.058.404,00	5.192.078.404,00	5.192.078.404,00	28.020.000,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		10.300.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	315.009.600,00	304.357.000,00	304.357.000,00	-10.652.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Maloku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	184.990.400,00	195.643.000,00	195.643.000,00	10.652.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Maloku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
		KELURAHAN MANGKURA KECAMATAN UJUNG PANDANG							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.164.058.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.135.941.596,00**							**10.300.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.164.058.404,00	5.192.078.404,00	5.192.078.404,00	28.020.000,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		10.300.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	266.119.700,00	266.119.700,00	266.119.700,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	233.880.300,00	233.880.300,00	233.880.300,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
		KELURAHAN PISANG SELATAN KECAMATAN UJUNG PANDANG							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.164.058.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.135.941.596,00**							**10.300.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.164.058.404,00	5.192.078.404,00	5.192.078.404,00	28.020.000,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		10.300.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	252.453.324,00	252.453.324,00	252.453.324,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Pisang Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	247.546.676,00	247.546.676,00	247.546.676,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Pisang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
		KELURAHAN PISANG UTARA KECAMATAN UJUNG PANDANG							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.164.058.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.135.941.596,00**							**10.300.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.164.058.404,00	5.192.078.404,00	5.192.078.404,00	28.020.000,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		10.300.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	355.527.704,00	355.527.704,00	355.527.704,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Pisang Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	144.470.500,00	144.470.500,00	144.470.500,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Pisang Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
		KELURAHAN SAWERIGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**42.079.262.000,00**	**42.386.002.620,00**	**42.035.645.395,00**	**-43.616.605,00**							**55.010.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**5.164.058.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.192.078.404,00**	**5.135.941.596,00**							**10.300.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.164.058.404,00	5.192.078.404,00	5.192.078.404,00	28.020.000,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		10.300.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Sawerigading	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Sawerigading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN UJUNG PANDANG
		KECAMATAN UJUNG TANAH							**29.358.163.000,00**	**31.033.944.594,00**	**29.762.625.449,00**	**404.462.449,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**29.358.163.000,00**	**31.033.944.594,00**	**29.762.625.449,00**	**404.462.449,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**29.358.163.000,00**	**31.033.944.594,00**	**29.762.625.449,00**	**404.462.449,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**100 %**	**100** **100** **90 %** **%** **%**	**13.092.504.124,00**	**14.133.627.228,00**	**13.405.583.875,00**	**-13.092.504.124,00**							**0,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**13.092.504.124,00**	**14.133.627.228,00**	**13.405.583.875,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah*				100 %	100 %	56.538.900,00	47.927.819,00	47.922.519,00	-8.616.381,00			-	- -	Kantor dan SKPD Pemerintah Kota Makassar		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	14.354.200,00	10.797.700,00	10.792.400,00	-3.561.800,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.345.600,00	3.063.000,00	3.063.000,00	-2.282.600,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.458.800,00	7.698.700,00	7.698.700,00	-760.100,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.354.600,00	4.342.719,00	4.342.719,00	-2.011.881,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.503.900,00	5.503.900,00	5.503.900,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**13.092.504.124,00**	**14.133.627.228,00**	**13.405.583.875,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.246.400,00	5.246.400,00	5.246.400,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**13.092.504.124,00**	**14.133.627.228,00**	**13.405.583.875,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	11.275.400,00	11.275.400,00	11.275.400,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.846.837.788,00	10.678.994.049,00	9.984.292.257,00	-862.545.531,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	9.532.809.448,00	9.532.809.449,00	8.838.120.557,00	-694.688.891,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	652.848.700,00	551.944.200,00	551.937.900,00	-100.910.800,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	329.579.000,00	329.579.000,00	329.579.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	331.600.640,00	264.661.400,00	264.654.800,00	-66.945.840,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**13.092.504.124,00**	**14.133.627.228,00**	**13.405.583.875,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	216.000.000,00	216.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.838.300,00	11.838.300,00	11.838.300,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	11.838.300,00	11.838.300,00	11.838.300,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**13.092.504.124,00**	**14.133.627.228,00**	**13.405.583.875,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	297.750.000,00	538.595.000,00	825.095.000,00	527.345.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				162 Paket	162 Paket	81.750.000,00	178.595.000,00	178.595.000,00	96.845.000,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	216.000.000,00	360.000.000,00	646.500.000,00	430.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	317.788.500,00	354.347.600,00	293.616.100,00	-24.172.400,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.815.300,00	54.815.300,00	62.083.800,00	7.268.500,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.695.500,00	6.780.600,00	6.780.600,00	-914.900,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	68.117.700,00	57.151.700,00	57.151.700,00	-10.966.000,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	17.160.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	-1.560.000,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	170.000.000,00	220.000.000,00	152.000.000,00	-18.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	833.088.036,00	1.374.010.860,00	1.200.660.899,00	367.572.863,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	351.784.096,00	308.455.200,00	318.373.399,00	-33.410.697,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	481.303.940,00	1.065.555.660,00	882.287.500,00	400.983.560,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	512.662.600,00	911.913.600,00	912.158.800,00	399.496.200,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.380.000,00	39.380.000,00	39.380.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				181 Unit	181 Unit	303.600.000,00	303.600.000,00	303.579.000,00	-21.000,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	63.410.000,00	63.410.000,00	63.680.000,00	270.000,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	106.272.600,00	505.523.600,00	505.519.800,00	399.247.200,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**				**100 %**	**90 %**	**8.974.107.460,00**	**11.409.584.430,00**	**10.866.308.690,00**	**-8.974.107.460,00**							**0,00**	
		[Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan]	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**100**	**98**	**100**	-	-	**8.974.107.460,00**	**11.409.584.430,00**	**10.866.308.690,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				90 %	90 %	8.974.107.460,00	11.409.584.430,00	10.866.308.690,00	1.892.201.230,00			-	- -	Kantor dan SKPD Pemerintah Kota Makassar		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	8.974.107.460,00	11.409.584.430,00	10.866.308.690,00	1.892.201.230,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik** **Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan**				**100 %**	**90** **90 %** **%**	**1.905.406.200,00**	**517.942.000,00**	**517.942.000,00**	**-1.905.406.200,00**							**0,00**	
		[Persentase sarana dan prasarana lingkupKelurahan dalam kondisi baik]	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**100**	**100**	**100**	-	-	**1.905.406.200,00**	**517.942.000,00**	**517.942.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksanya Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	239.442.600,00	228.292.100,00	228.292.100,00	-11.150.500,00			-	- -	Kantor dan SKPD Pemerintah Kota Makassar		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	239.442.600,00	228.292.100,00	228.292.100,00	-11.150.500,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksanya Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	1.665.963.600,00	289.649.900,00	289.649.900,00	-1.376.313.700,00			-	- -	Kantor dan SKPD Pemerintah Kota Makassar		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	165.963.600,00	155.566.800,00	155.566.800,00	-10.396.800,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**				**100 %**	**90 %**	**723.577.660,00**	**585.819.700,00**	**585.819.700,00**	**-723.577.660,00**							**0,00**	
		[Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**723.577.660,00**	**585.819.700,00**	**585.819.700,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	723.577.660,00	585.819.700,00	585.819.700,00	-137.757.960,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	517.781.120,00	471.861.800,00	471.861.800,00	-45.919.320,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	205.796.540,00	113.957.900,00	113.957.900,00	-91.838.640,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**4.662.567.556,00**	**4.386.971.236,00**	**4.386.971.184,00**	**-4.662.567.556,00**							**0,00**	
		[Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**4.662.567.556,00**	**4.386.971.236,00**	**4.386.971.184,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.662.567.556,00	4.386.971.236,00	4.386.971.184,00	-275.596.372,00			-	- -	Kantor dan SKPD Pemerintah Kota Makassar		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	4.662.567.556,00	4.386.971.236,00	4.386.971.184,00	-275.596.372,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
		KELURAHAN CAMBA BERUA KECAMATAN UJUNG TANAH							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	250.229.770,00	250.229.770,00	250.229.770,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Camba Berua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	249.770.230,00	249.770.230,00	249.770.230,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Camba Berua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN CAMBAYA KECAMATAN UJUNG TANAH							**500.000.000,00**	**499.999.999,00**	**499.999.999,00**	**-1,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**499.999.999,00**	**499.999.999,00**	**-1,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**499.999.999,00**	**499.999.999,00**	**-1,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Presentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**499.999.999,00**	**499.999.999,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	499.999.999,00	499.999.999,00	-1,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	366.002.826,75	374.608.750,00	374.608.750,00	8.605.923,25	Kota Makassar, Ujung Tanah, Cambaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	133.997.173,25	125.391.249,00	125.391.249,00	-8.605.924,25	Kota Makassar, Ujung Tanah, Cambaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
		KELURAHAN GUSUNG KECAMATAN UJUNG TANAH							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase masyarakat / kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Presentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	348.133.800,00	348.133.800,00	348.133.800,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Gusung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	151.866.200,00	151.866.200,00	151.866.200,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Gusung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
		KELURAHAN PATTINGALLOANG KECAMATAN UJUNG TANAH							**0,00**	**365.916.900,00**	**365.916.900,00**	**365.916.900,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**365.916.900,00**	**365.916.900,00**	**365.916.900,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**365.916.900,00**	**365.916.900,00**	**365.916.900,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**365.916.900,00**	**365.916.900,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	365.916.900,00	365.916.900,00	365.916.900,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	365.916.900,00	365.916.900,00	365.916.900,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Patingalloang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	134.083.100,00	134.083.100,00	134.083.100,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Patingalloang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
		KELURAHAN PATTINGALLOANG BARU KECAMATAN UJUNG TANAH							**500.000.000,00**	**499.994.017,00**	**499.994.017,00**	**-5.983,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**499.994.017,00**	**499.994.017,00**	**-5.983,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**499.994.017,00**	**499.994.017,00**	**-5.983,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**499.994.017,00**	**499.994.017,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	499.994.017,00	499.994.017,00	-5.983,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	360.739.500,00	360.733.517,00	360.733.517,00	-5.983,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Patingalloang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	139.260.500,00	139.260.500,00	139.260.500,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Patingalloang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
		KELURAHAN TABARINGAN KECAMATAN UJUNG TANAH							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	199.883.192,00	199.875.212,00	199.875.212,00	-7.980,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Tabaringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	300.116.808,00	300.124.788,00	300.124.788,00	7.980,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Tabaringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
		KELURAHAN TAMALABBA KECAMATAN UJUNG TANAH							**500.000.000,00**	**499.997.600,00**	**499.997.600,00**	**-2.400,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**499.997.600,00**	**499.997.600,00**	**-2.400,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**499.997.600,00**	**499.997.600,00**	**-2.400,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**499.997.600,00**	**499.997.600,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	499.997.600,00	499.997.600,00	-2.400,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	33.320.000,00	32.452.350,00	32.452.350,00	-867.650,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Tamalabba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	466.680.000,00	467.545.250,00	467.545.250,00	865.250,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Tamalabba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
		KELURAHAN TOTAKA KECAMATAN UJUNG TANAH							**500.000.000,00**	**454.059.300,00**	**454.059.300,00**	**-45.940.700,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**454.059.300,00**	**454.059.300,00**	**-45.940.700,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**454.059.300,00**	**454.059.300,00**	**-45.940.700,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**454.059.300,00**	**454.059.300,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Pelatihan Sablon Bagi Warga Kelurahan Totaka*				-	1 Pokmas / Ormas	500.000.000,00	454.059.300,00	454.059.300,00	-45.940.700,00			-	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	366.000.000,00	320.059.300,00	320.059.300,00	-45.940.700,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Totaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	134.000.000,00	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Totaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
		KELURAHAN UJUNG TANAH KECAMATAN UJUNG TANAH							**0,00**	**499.991.343,00**	**499.991.343,00**	**499.991.343,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**499.991.343,00**	**499.991.343,00**	**499.991.343,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**499.991.343,00**	**499.991.343,00**	**499.991.343,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**0,00**	**499.991.343,00**	**499.991.343,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	499.991.343,00	499.991.343,00	499.991.343,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	196.690.743,00	196.690.743,00	196.690.743,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Ujung Tanah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	303.300.600,00	303.300.600,00	303.300.600,00	Kota Makassar, Ujung Tanah, Ujung Tanah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -				0,00	KECAMATAN UJUNG TANAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KECAMATAN WAJO							**28.229.967.305,00**	**30.653.758.000,00**	**29.322.415.372,00**	**1.092.448.067,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**28.229.967.305,00**	**30.653.758.000,00**	**29.322.415.372,00**	**1.092.448.067,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**28.229.967.305,00**	**30.653.758.000,00**	**29.322.415.372,00**	**1.092.448.067,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**13.721.716.364,00**	**16.603.751.160,00**	**15.131.311.732,00**	**-13.721.716.364,00**							**0,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**13.721.716.364,00**	**16.603.751.160,00**	**15.131.311.732,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				-	8 Dokumen	43.490.000,00	14.374.200,00	14.374.200,00	-29.115.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.490.000,00	2.069.200,00	2.069.200,00	-8.420.800,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	2.499.900,00	2.499.900,00	-1.500.100,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	-1.830.000,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	2.213.900,00	2.213.900,00	-1.786.100,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	1.972.900,00	1.972.900,00	-2.027.100,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**13.721.716.364,00**	**16.603.751.160,00**	**15.131.311.732,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	1.746.100,00	1.746.100,00	-2.253.900,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**13.721.716.364,00**	**16.603.751.160,00**	**15.131.311.732,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	13.000.000,00	1.702.200,00	1.702.200,00	-11.297.800,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian,Perlengkapan dan keuangan)*				-	4 Dokumen	11.152.606.104,00	11.157.831.204,00	9.503.525.376,00	-1.649.080.728,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	10.442.211.704,00	10.442.211.704,00	8.797.927.076,00	-1.644.284.628,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	522.600.000,00	522.600.000,00	511.800.000,00	-10.800.000,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	164.794.400,00	189.673.000,00	190.451.800,00	25.657.400,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	1.649.400,00	1.649.400,00	-6.350.600,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	1.697.100,00	1.697.100,00	-13.302.900,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**13.721.716.364,00**	**16.603.751.160,00**	**15.131.311.732,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	216.000.000,00	216.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	82.000.000,00	0,00	0,00	-82.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	82.000.000,00	0,00	0,00	-82.000.000,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**13.721.716.364,00**	**16.603.751.160,00**	**15.131.311.732,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	372.000.000,00	669.000.000,00	811.500.000,00	439.500.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	372.000.000,00	669.000.000,00	811.500.000,00	439.500.000,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	422.349.800,00	509.599.476,00	579.597.076,00	157.247.276,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	16.200.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00	-8.820.000,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	53.469.800,00	160.262.950,00	220.262.950,00	166.793.150,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	12.000.000,00	17.276.526,00	17.274.126,00	5.274.126,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	210.680.000,00	210.680.000,00	210.680.000,00	0,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	114.000.000,00	124.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	54.101.300,00	2.603.891.800,00	2.603.891.800,00	2.549.790.500,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	54.101.300,00	2.603.891.800,00	2.603.891.800,00	2.549.790.500,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	903.156.960,00	971.617.080,00	1.034.185.880,00	131.028.920,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	367.354.560,00	397.695.360,00	409.766.160,00	42.411.600,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.422.400,00	75.422.400,00	75.920.400,00	498.000,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	460.380.000,00	498.499.320,00	548.499.320,00	88.119.320,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	476.012.200,00	461.437.400,00	454.237.400,00	-21.774.800,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.520.000,00	39.520.000,00	39.520.000,00	0,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	100 Unit	297.831.200,00	276.840.000,00	269.640.000,00	-28.191.200,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	38.550.000,00	38.550.000,00	38.550.000,00	0,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.111.000,00	106.527.400,00	106.527.400,00	6.416.400,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**				**-**	**90 %**	**8.195.200.000,00**	**9.142.432.200,00**	**9.209.265.800,00**	**-8.195.200.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**8.195.200.000,00**	**9.142.432.200,00**	**9.209.265.800,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	35.200.000,00	40.355.700,00	40.355.700,00	5.155.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	35.200.000,00	40.355.700,00	40.355.700,00	5.155.700,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
		[Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan]	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**8.195.200.000,00**	**9.142.432.200,00**	**9.209.265.800,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	8.160.000.000,00	9.102.076.500,00	9.168.910.100,00	1.008.910.100,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	8.160.000.000,00	9.102.076.500,00	9.168.910.100,00	1.008.910.100,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**1.265.009.305,00**	**136.713.100,00**	**135.513.100,00**	**-1.265.009.305,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.265.009.305,00**	**136.713.100,00**	**135.513.100,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.265.009.305,00	136.713.100,00	135.513.100,00	-1.129.496.205,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	188.800.000,00	136.713.100,00	135.513.100,00	-53.286.900,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**				**-**	**90 %**	**472.342.600,00**	**472.342.600,00**	**472.342.600,00**	**-472.342.600,00**							**0,00**	
		[Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**472.342.600,00**	**472.342.600,00**	**472.342.600,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	472.342.600,00	472.342.600,00	472.342.600,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	376.342.600,00	376.342.600,00	376.342.600,00	0,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**				**-**	**100 %**	**4.575.699.036,00**	**4.298.518.940,00**	**4.373.982.140,00**	**-4.575.699.036,00**							**0,00**	
		[Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**4.575.699.036,00**	**4.298.518.940,00**	**4.373.982.140,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	4.575.699.036,00	4.298.518.940,00	4.373.982.140,00	-201.716.896,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	12 Dokumen	4.575.699.036,00	4.298.518.940,00	4.373.982.140,00	-201.716.896,00	Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
		KELURAHAN BUTUNG KECAMATAN WAJO							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompokmasyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasaranalingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	178.379.997,00	178.379.997,00	178.379.997,00	0,00	Kota Makassar, Wajo, Butung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	321.620.003,00	321.620.003,00	321.620.003,00	0,00	Kota Makassar, Wajo, Butung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
		KELURAHAN ENDE KECAMATAN WAJO							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompokmasyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasaranalingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	299.996.200,00	299.996.200,00	299.996.200,00	0,00	Kota Makassar, Wajo, Ende	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.003.800,00	200.003.800,00	200.003.800,00	0,00	Kota Makassar, Wajo, Ende	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
		KELURAHAN MALIMONGAN KECAMATAN WAJO							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompokmasyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasaranalingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Wajo, Malimongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Wajo, Malimongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
		KELURAHAN MALIMONGAN TUA KECAMATAN WAJO							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompokmasyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasaranalingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	330.169.381,05	330.169.381,00	330.169.381,00	-0,05	Kota Makassar, Wajo, Malimongan Tua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	169.830.618,95	169.830.619,00	169.830.619,00	0,05	Kota Makassar, Wajo, Malimongan Tua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
		KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompokmasyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasaranalingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	275.460.180,00	275.460.180,00	275.460.180,00	0,00	Kota Makassar, Wajo, Mampu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	224.539.820,00	224.539.820,00	224.539.820,00	0,00	Kota Makassar, Wajo, Mampu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
		KELURAHAN MELAYU KECAMATAN WAJO							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompokmasyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasaranalingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	204.147.120,00	204.147.120,00	204.147.120,00	Kota Makassar, Wajo, Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	295.852.880,00	295.852.880,00	295.852.880,00	Kota Makassar, Wajo, Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN MELAYU BARU KECAMATAN WAJO							**223.640.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**276.360.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**223.640.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**276.360.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**223.640.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**276.360.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompokmasyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasaranalingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 % %**	**223.640.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-223.640.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	223.640.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	276.360.000,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	276.360.000,00	276.360.000,00	276.360.000,00	Kota Makassar, Wajo, Melayu Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	223.640.000,00	223.640.000,00	223.640.000,00	0,00	Kota Makassar, Wajo, Melayu Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
		KELURAHAN PATTUNUANG KECAMATAN WAJO							**200.150.695,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**299.849.305,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**200.150.695,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**299.849.305,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**200.150.695,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**299.849.305,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompokmasyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasaranalingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 % %**	**200.150.695,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-200.150.695,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.150.695,00	500.000.000,00	500.000.000,00	299.849.305,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	299.849.305,00	299.849.305,00	299.849.305,00	Kota Makassar, Wajo, Pattunuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.150.695,00	200.150.695,00	200.150.695,00	0,00	Kota Makassar, Wajo, Pattunuang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAJO
		KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG							**13.665.753.000,00**	**16.566.784.100,00**	**15.753.799.907,00**	**2.088.046.907,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.665.753.000,00**	**16.566.784.100,00**	**15.753.799.907,00**	**2.088.046.907,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.665.753.000,00**	**16.566.784.100,00**	**15.753.799.907,00**	**2.088.046.907,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**-**	**100 100 90 % % %**	**9.509.707.232,00**	**10.048.145.312,00**	**9.783.284.594,00**	**-9.509.707.232,00**							**0,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**9.509.707.232,00**	**10.048.145.312,00**	**9.783.284.594,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daera*				-	100 %	8.407.000,00	33.221.400,00	33.221.400,00	24.814.400,00			-	- -	Persentase sarana dan prsarana aparatur dalm kondisi baik		0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.509.707.232,00**	**10.048.145.312,00**	**9.783.284.594,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	1 Laporan	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**9.509.707.232,00**	**10.048.145.312,00**	**9.783.284.594,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.201.000,00	26.015.400,00	26.015.400,00	24.814.400,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan SKPD*				-	100 %	6.729.891.912,00	6.729.891.912,00	4.711.448.959,00	-2.018.442.953,00			-	- -	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas		0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	77 Orang/bulan	6.097.281.312,00	6.097.281.312,00	4.114.838.359,00	-1.982.442.953,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	449.280.000,00	449.280.000,00	413.280.000,00	-36.000.000,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	-	1.304.400,00	1.304.400,00	1.304.400,00	0,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.026.200,00	2.026.200,00	2.026.200,00	0,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.509.707.232,00**	**10.048.145.312,00**	**9.783.284.594,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	216.000.000,00	12.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	12.000.000,00	130.000.000,00	-86.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	150.000.000,00	153.750.000,00	381.750.000,00	231.750.000,00			-	- -	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	77 Paket	54.000.000,00	57.750.000,00	57.750.000,00	3.750.000,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**9.509.707.232,00**	**10.048.145.312,00**	**9.783.284.594,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	8 Orang	96.000.000,00	96.000.000,00	324.000.000,00	228.000.000,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah*				-	100 %	84.061.200,00	284.772.000,00	364.772.000,00	280.710.800,00			-	- -	Indeks Kepuasan ASN perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, perlengkapan dan keuangan)		0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	1.050.000,00	5.509.000,00	5.509.000,00	4.459.000,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	8.261.200,00	6.947.700,00	6.947.700,00	-1.313.500,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	14.750.000,00	21.315.300,00	21.315.300,00	6.565.300,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	192.000.000,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	130.000.000,00	80.000.000,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	1.006.470.000,00	1.006.470.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	1.006.470.000,00	1.006.470.000,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera*				-	100 %	1.374.103.920,00	1.008.528.600,00	1.011.402.260,00	-362.701.660,00			-	- -	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas		0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	5 Laporan	49.383.600,00	49.383.600,00	49.383.600,00	0,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	15 Laporan	1.324.720.320,00	959.145.000,00	962.018.660,00	-362.701.660,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya layanan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daera*				-	100 %	947.243.200,00	1.825.981.400,00	2.144.219.975,00	1.196.976.775,00			-	- -	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas		0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.770.000,00	40.770.000,00	40.770.000,00	0,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	883.901.200,00	1.047.111.400,00	1.424.157.400,00	540.256.200,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.509.707.232,00**	**10.048.145.312,00**	**9.783.284.594,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	4 Unit	22.572.000,00	738.100.000,00	679.292.575,00	656.720.575,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**				**-**	**90 %**	**1.509.578.400,00**	**4.386.232.400,00**	**3.842.708.925,00**	**-1.509.578.400,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan]	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan**	**100**	**96**	**100**	-	-	**1.509.578.400,00**	**4.386.232.400,00**	**3.842.708.925,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tersedianya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	100 %	184.991.400,00	173.497.700,00	173.497.700,00	-11.493.700,00			-	- -	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan Kapasitas		0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	2 Dokumen	184.991.400,00	173.497.700,00	173.497.700,00	-11.493.700,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				-	1 Laporan	1.324.587.000,00	4.212.734.700,00	3.669.211.225,00	2.344.624.225,00			-	- -	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10 Laporan	10 Laporan	1.324.587.000,00	4.212.734.700,00	3.669.211.225,00	2.344.624.225,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan** **Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90** **90 %** **%**	**605.204.300,00**	**208.783.160,00**	**204.183.160,00**	**-605.204.300,00**							**0,00**	
		[Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik]	**Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik**	**100**	**4**	**100**	-	-	**605.204.300,00**	**208.783.160,00**	**204.183.160,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	100 %	605.204.300,00	208.783.160,00	204.183.160,00	-401.021.140,00			-	- -	Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan		0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	105.204.300,00	109.804.300,00	105.204.300,00	0,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**				**-**	**90 %**	**37.577.500,00**	**37.577.500,00**	**37.577.500,00**	**-37.577.500,00**							**0,00**	
		[Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**37.577.500,00**	**37.577.500,00**	**37.577.500,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan yang dapat diselesaikan*				-	100 %	37.577.500,00	37.577.500,00	37.577.500,00	0,00			-	- -	Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan yang dapat diselesaikan		0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	1 Laporan	37.577.500,00	37.577.500,00	37.577.500,00	0,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan**				**-**	**100 %**	**2.003.685.568,00**	**1.886.045.728,00**	**1.886.045.728,00**	**-2.003.685.568,00**							**0,00**	
		[Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**2.003.685.568,00**	**1.886.045.728,00**	**1.886.045.728,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*				-	100 %	2.003.685.568,00	1.886.045.728,00	1.886.045.728,00	-117.639.840,00			-	- -	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan		0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				0 Dokumen	15 Dokumen	1.989.285.568,00	1.871.645.728,00	1.871.645.728,00	-117.639.840,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0 Dokumen	2 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
		KELURAHAN BARRANG CADDI KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG							**0,00**	**199.652.380,00**	**199.652.380,00**	**199.652.380,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**199.652.380,00**	**199.652.380,00**	**199.652.380,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**199.652.380,00**	**199.652.380,00**	**199.652.380,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasaranalingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**0,00**	**199.652.380,00**	**199.652.380,00**	**0,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**0,00**	**199.652.380,00**	**199.652.380,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	199.652.380,00	199.652.380,00	199.652.380,00			-	- -	Kelurahan Barrang Caddi		0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	199.652.380,00	199.652.380,00	199.652.380,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Barrang Caddi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	205.500.000,00	98.978.860,00	98.978.860,00	-106.521.140,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Barrang Caddi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
		KELURAHAN BARRANG LOMPO KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG							**500.000.000,00**	**299.652.380,00**	**299.652.380,00**	**-200.347.620,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**299.652.380,00**	**299.652.380,00**	**-200.347.620,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**299.652.380,00**	**299.652.380,00**	**-200.347.620,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompokmasyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasaranalingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**299.652.380,00**	**299.652.380,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	299.652.380,00	299.652.380,00	-200.347.620,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	294.500.000,00	199.652.380,00	199.652.380,00	-94.847.620,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Barrang Lompo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	205.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-105.500.000,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Barrang Lompo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
		KELURAHAN PULAU KODINGARENG KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG							**500.000.000,00**	**299.652.380,00**	**299.652.380,00**	**-200.347.620,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**500.000.000,00**	**299.652.380,00**	**299.652.380,00**	**-200.347.620,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**500.000.000,00**	**299.652.380,00**	**299.652.380,00**	**-200.347.620,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/ kelompokmasyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan Persentase sarana dan prasaranalingkup Kelurahan dalam kondisi baik**				**-**	**90 90 % %**	**500.000.000,00**	**299.652.380,00**	**299.652.380,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	299.652.380,00	299.652.380,00	-200.347.620,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	294.500.000,00	199.652.380,00	199.652.380,00	-94.847.620,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Kodingareng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	205.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-105.500.000,00	Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Kodingareng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**30.448.870.000,00**	**36.715.221.510,00**	**38.335.560.052,96**	**7.886.690.052,96**							**31.287.041.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**30.448.870.000,00**	**36.715.221.510,00**	**38.335.560.052,96**	**7.886.690.052,96**							**31.287.041.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**30.448.870.000,00**	**36.715.221.510,00**	**38.335.560.052,96**	**7.886.690.052,96**							**31.287.041.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**100 90 % %**	**100 90 % %**	**9.276.888.760,00**	**8.989.863.410,00**	**9.033.801.262,96**	**98.171.000,00**							**9.375.059.760,00**	
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**9.276.888.760,00**	**8.989.863.410,00**	**9.033.801.262,96**	-	-	-	-	-	-	**100**	**9.375.059.760,00**	-
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	50.239.500,00	54.738.000,00	53.707.200,00	3.467.700,00			-	- -	Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak		67.410.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	21.434.700,00	22.313.000,00	22.313.000,00	878.300,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.571.500,00	5.976.300,00	5.964.300,00	1.392.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.600,00	4.701.700,00	4.554.400,00	1.303.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.250.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.175.500,00	3.873.500,00	3.809.000,00	633.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.175.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.984.000,00	4.653.900,00	3.846.900,00	-137.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.984.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	13.823.200,00	13.219.600,00	13.219.600,00	-603.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			13.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	7.792.486.760,00	7.726.966.780,00	6.202.626.832,96	-1.589.859.927,04			-	- -	Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak		7.792.487.160,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	7.314.807.360,00	7.314.807.380,00	5.790.467.432,96	-1.524.339.927,04	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.314.807.760,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	311.520.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-11.520.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			311.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	166.159.400,00	112.159.400,00	112.159.400,00	-54.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			166.159.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.276.888.760,00**	**8.989.863.410,00**	**9.033.801.262,96**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.375.059.760,00**	-
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	336.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-331.000.000,00			-	- -	-		336.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-331.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			336.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		[Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah]	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	-	-	**9.276.888.760,00**	**8.989.863.410,00**	**9.033.801.262,96**	-	-	-	-	-	-	**100**	**9.375.059.760,00**	-
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	88.500.000,00	88.500.000,00	217.500.000,00	129.000.000,00			-	- -	Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak		169.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				76 Paket	73 Paket	0,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			81.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	9 Orang	88.500.000,00	88.500.000,00	163.500.000,00	75.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			88.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	259.572.100,00	259.835.970,00	295.707.570,00	36.135.470,00			-	- -	Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak		259.572.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.844.000,00	2.800.600,00	2.800.600,00	-43.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.844.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.738.900,00	45.347.700,00	45.417.300,00	678.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			44.738.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.060.000,00	11.006.470,00	11.006.470,00	-53.530,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.060.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.117.200,00	15.869.200,00	15.869.200,00	-248.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			16.117.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			54.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	130.812.000,00	130.812.000,00	166.614.000,00	35.802.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			130.812.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	94.269.000,00	102.143.000,00	1.475.730.000,00	1.381.461.000,00			-	- -	Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak		94.269.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	10 Unit	94.269.000,00	102.143.000,00	1.475.730.000,00	1.381.461.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			94.269.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	402.971.400,00	499.829.660,00	516.329.660,00	113.358.260,00			-	- -	Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak		402.971.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	390.971.400,00	487.829.660,00	501.329.660,00	110.358.260,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			390.971.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	252.850.000,00	252.850.000,00	267.200.000,00	14.350.000,00			-	- -	Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak		252.850.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.880.000,00	42.880.000,00	46.380.000,00	3.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			42.880.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	187.250.000,00	187.250.000,00	198.100.000,00	10.850.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			187.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	22.720.000,00	22.720.000,00	22.720.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			22.720.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**80 %**	**80 %**	**3.004.829.360,00**	**2.977.054.000,00**	**3.517.451.400,00**	**500.000.000,00**							**3.504.829.360,00**	
		[Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan]	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**95**	**64**	**80**	-	-	**3.004.829.360,00**	**2.977.054.000,00**	**3.517.451.400,00**	-	-	-	-	-	-	**80**	**3.504.829.360,00**	-
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.004.829.360,00	2.977.054.000,00	3.517.451.400,00	512.622.040,00			-	- -	Kelompok Masyarakat dan Paskibraka		3.504.829.360,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	245.629.960,00	200.623.400,00	208.123.400,00	-37.506.560,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			245.629.960,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				80 Orang	80 Orang	177.484.700,00	164.384.700,00	164.084.700,00	-13.400.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			177.484.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				70 Orang	70 Orang	2.581.714.700,00	2.612.045.900,00	3.145.243.300,00	563.528.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.081.714.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**				**85 %**	**85 %**	**3.790.853.200,00**	**3.672.164.600,00**	**3.670.664.600,00**	**0,00**							**3.790.853.200,00**	
		[Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik]	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**	**95**	**100**	**85**	-	-	**3.790.853.200,00**	**3.672.164.600,00**	**3.670.664.600,00**	-	-	-	-	-	-	**85**	**3.790.853.200,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihanm Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.790.853.200,00	3.672.164.600,00	3.670.664.600,00	-120.188.600,00			-	- -	Kader Partai Politik dan Kelompok Masyarakat		3.790.853.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	100 Orang	3.790.853.200,00	3.672.164.600,00	3.670.664.600,00	-120.188.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			3.790.853.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**210.231.060,00**	**223.432.800,00**	**231.831.900,00**	**0,00**							**210.231.060,00**	
		[Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif]	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**	**95**	**100**	**85**	-	-	**210.231.060,00**	**223.432.800,00**	**231.831.900,00**	-	-	-	-	-	-	**85**	**210.231.060,00**	-
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	210.231.060,00	223.432.800,00	231.831.900,00	21.600.840,00			-	- -	Organisasi Masyarakat		210.231.060,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	210.231.060,00	223.432.800,00	231.831.900,00	21.600.840,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			210.231.060,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan**				**85 %**	**85 %**	**1.502.342.600,00**	**1.420.225.800,00**	**1.612.661.722,00**	**0,00**							**1.502.342.600,00**	
		[Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan]	**Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan**	**95**	**100**	**85**	-	-	**1.502.342.600,00**	**1.420.225.800,00**	**1.612.661.722,00**	-	-	-	-	-	-	**85**	**1.502.342.600,00**	-
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.502.342.600,00	1.420.225.800,00	1.612.661.722,00	110.319.122,00			-	- -	Kelompok Masyarakat		1.502.342.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	1.502.342.600,00	1.420.225.800,00	1.612.661.722,00	110.319.122,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			1.502.342.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan**				**85 %**	**85 %**	**12.663.725.020,00**	**19.432.480.900,00**	**20.269.149.168,00**	**240.000.000,00**							**12.903.725.020,00**	
		[Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan]	**Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan**	**95**	**100**	**85**	-	-	**12.663.725.020,00**	**19.432.480.900,00**	**20.269.149.168,00**	-	-	-	-	-	-	**85**	**12.903.725.020,00**	-
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*				2 Dokumen	2 Dokumen	12.663.725.020,00	19.432.480.900,00	20.269.149.168,00	7.605.424.148,00			-	- -	Kelompok Masyarakat		12.903.725.020,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	11.302.368.000,00	17.556.218.200,00	18.596.486.568,00	7.294.118.568,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			11.302.368.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	497.605.220,00	336.109.000,00	337.508.900,00	-160.096.320,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			497.605.220,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	863.751.800,00	1.540.153.700,00	1.335.153.700,00	471.401.900,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.103.751.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**5.106.461.612.000,00**	**5.175.138.820.000,00**	**5.258.317.800.074,96**	**151.856.188.074,96**							**10.810.668.534.431,68**	



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi pemerintah kota Makassar dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah sampai triwulan II tahun 2026. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program Pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Ukuran keberhasilan suatu daerah membutuhkan Indikator kinerja daerah yang menggambarkan kemajuan daerah tersebut serta perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemeritahan dan pembangunan Daerah kepada masyarakat/ *stakeholder* yang ditetapkan dalam Indikator Makro, dari Indikator Kinerja Utama (IKU), termasuk Indikator kinerja daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Data dan informasi yang tertuang dalam indikator kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengidentiifikasi masalah, memilih alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan gambaran terhadap masalah yang berkembang dan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi atas kebijakan yang dibuat.

6.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Indikator kinerja makro merupakan salah satu dari kinerja penyelenggaraan pemerintah yang memuat indikator ekonomi dan indikator sosial budaya yang diantaranya meliputi indeks laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, rasio gini, penurunan intensitas emisi GRK, PDRB per kapita, kontribusi PDRB Kota, indeks pembangunan manusia, dan indeks kualitas lingkungan hidup. Sehubungan dengan adanya penyesuaian target indikator makro Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 dalam RKP Tahun 2026 sesuai Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2025, telah dilakukan perhitungan ulang terhadap target indikator makro kabupaten/kota, khususnya pada Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB per Kapita, dan Kontribusi PDRB maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut, target indikator makro untuk kabupaten/kota mengalami penyesuaian. Penetapan target P-RKPD Tahun 2026 Kota Makassar mengalami penyesuaian yaitu PDRB Per kapita 187,56 dan Tingkat Kemiskinan 3,46 – 2,56.

Indikator ini sangat penting untuk analisis ekonomi, perencanaan kebijakan pemerintah, maupun keputusan investasi. Adapun target indikator makro perubahan 2026 tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel VI.1
Indikator Makro Kota Makassar Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RPJMD 2026	Target RKPD Tahun 2026	
					Pokok	Perubahan
1	Pertumbuhan Ekonomi	(%)	5,34	6,43	6,43	5,73
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	9,60	9,53	9,53	9,53

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RPJMD 2026	Target RKPD Tahun 2026	
					Pokok	Perubahan
3	Tingkat Kemiskinan	(%)	4,43	3,46	3,46	3,46-2,56
4	Gini Rasio	(%)	0,391	0,359	0,359	0,359
5	PDRB Per Kapita	(Juta)	176,28	186,75	186,75	187,56
6	Indek Pembangunan Manusia	Nilai	85,66	85,86	85,86	85,86
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	66,28	66,38	66,38	66,38
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	Belum Rilis	34,98	34,98	34,98
9	Kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan	(%)	36,47	35,14	35,14	34,77

Sumber : RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 Bappeda, data diolah tahun 2026.

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Target IKU pembangunan Kota Makassar merupakan ukuran pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Makassar (impact based) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Makassar tahun 2026. Indikator kinerja utama (IKU) disusun berdasarkan IKU yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025 – 2029.

Penetapan Indikator kinerja utama (IKU) merupakan indikator yang dipilih dari indikator tujuan dan sasaran Kota Makassar serta mengambarkan Visi RPJMD 2025-2029 “Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan”. Penyesuaian target kinerja 2026 khususnya pada indikator yang realisasi tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun target IKU pada Perubahan RKPD Kota Makassar tahun 2026, tertuang pada tabel berikut:

Tabel VI.2
Indikator Kinerja Utama Kota Makassar Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
1	Pertumbuhan Ekonomi	(%)	5,34	6.43	5,73	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	(%)	19,50	19,46	19,46	Target belum dapat disesuaikan karena data PDRB Tw2 Tahun 2026 belum dirilis oleh BPS
3	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	(%)	20,35	20,30	20,30	Target belum dapat disesuaikan karena data PDRB Tw2 Tahun 2026 belum dirilis oleh BPS
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	(%)	9,60	9,53	9,53	
5	PDRB Per Kapita	(Juta Rupiah)	176,28	186,75	187,56	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
6	Indeks Daya Saing Daerah	(Skor)	4,17	4,23	4,23	
7	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	(%)	0,67	0,61	0,61	Target belum dapat disesuaikan karena data PDRB Tw2 Tahun 2026 belum dirilis oleh BPS
8	Tingkat Inflasi	(%)	2,69	1,77	1,77	Target belum dapat disesuaikan karena data perhitungan target belum diperoleh dari BPS
9	Indeks Ketahanan Pangan	(Skor)	76,42	88,05	88,05	
10	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	(%)	26,57	8,85	8,85	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	(Nilai)	85,66	85,86	85,86	
12	Indeks Pendidikan	(Nilai)	82,05	82,10	82,10	
13	Usia Harapan Hidup	(Tahun)	75,60	75,66	75,66	
14	Pengeluaran Per Kapita	(Juta Rupiah)	22,105	20,543	20,543	Target belum dapat disesuaikan karena data perhitungan target belum diperoleh dari BPS
15	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	80,51	79,46	79,46	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
16	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	Nilai	93,40	84,45	93,41	Penyesuaian target berdasarkan realisasi
17	Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan	Nilai	26,89	27,35	27,35	
18	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	%	10	25	25	
19	Indeks Inovasi Daerah	Skor	61,75	79,23	79,23	
20	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	4,50	4,56	4,56	
21	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah	%	6,93	4	7	Penyesuaian target berdasarkan realisasi
22	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Terhadap Total PDRB	%	2,20	2,28	2,28	
23	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	(Orang)	6.268.077	5.634.009	5.634.009	Target tidak dilakukan penyesuaian disebabkan perkiraan kunjungan wisatawan menurun di tahun 2026 karena kebijakan nasional kenaikan BBM dampak dari kondisi geopolitik global
24	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	(Hari)	2,47	1,65	1,65	Target tidak dilakukan penyesuaian disebabkan perkiraan kunjungan wisatawan menurun dan juga berdampak pada lama tinggal
25	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Takbenda	(%)	13,33	13,33	13,33	Target perubahan tetap dikarenakan data warisan budaya tak benda selama 5 tahun berjumlah 150 WBTB jadi setiap tahunnya ditargetkan 30

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
						WBTB atau sebesar 13,33 persen
26	Persentase Cagar Budaya Yang Dilindungi Dan Dimanfaatkan	(%)	19,44	16,66	16,66	Target perubahan tetap karena realisasi tahun 2025 merupakan cagar budaya sudah disidangkan untuk ditetapkan dari tahun sebelumnya yaitu 7 objek dari 6 objek yang ditargetkan
27	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif	(Industri)	5,081	4.831	4.831	Target belum dapat disesuaikan karena data perhitungan target ekraf belum diperoleh dari BPS
28	Persentase Industri Ekonomi Kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital	(%)	10,73	15,43	15,43	
29	Indeks Reformasi Birokrasi	(Nilai)	80,52	81,31	81,31	
30	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	(Nilai)	68,94	70,50	70,50	
31	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	(Nilai)	NA	4,03	4,03	
32	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	(Nilai)	84,20	87,98	87,98	
33	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(Nilai)	72,99	77	77	
34	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani	(%)	66,30	56,02	68,00	Penyesuaian target berdasarkan realisasi
35	Indeks Kota Toleran	Skor	4,834	4,862	4,862	
36	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	64,90	63,15	63,15	Target tidak berubah dikarenakan Realisasi dan penatapan target dilakukan oleh BKKBN
37	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,275	0,177	0,177	
38	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	67,93*	70,60	70,60	
39	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	67,17	61,00	61,00	Target tetap dikarenakan realisasi dikeluarkan oleh pusat menggunakan metode baru dan target masih menggunakan metode lama
40	Indeks Pembangunan Keolahragaan	Skor	0,542	0,518	0,518	Target akan dilakukan penyesuaian pada tahun 2027
41	Tingkat Kemiskinan	%	4,43	3,46	3,46	
42	Gini Rasio	Nilai	0,391	0,359	0,359	
43	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	0,043*	42,51	42,51	
44	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	66,28	66,38	66,38	
45	Indeks Kualitas Air	Nilai	74,17	74,15	74,15	Target Tetap dikarenakan penetapan target ditentukan oleh KLH
46	Indeks Kualitas Udara	Nilai	73,63	75,52	75,52	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
47	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	39,17	36,13	36,13	Target Tetap dikarenakan penetapan target ditentukan oleh KLH
48	Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	1,53	10	10	
49	Indeks Risiko Bencana	Skor	91,44	107	107	Target akan dilakukan penyesuaian pada tahun 2027
50	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,48	0,48	**0,50**	Penyesuaian target berdasarkan realisasi
51	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	NA	34,98	34,98	

Sumber: RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 (data diolah) Tahun 2026.

6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Utama Pembangunan (IUP) ini disusun dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029. Dimana Penyusunan IUP telah memperhatikan keselarasan dengan kebijakan Pembangunan nasional dan provinsi dengan pengelompokan ke dalam 4 (empat) aspek Pembangunan yaitu Geografi, Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah, dan Pelayanan Umum. Adapun penyesuaian realisasi 2025 serta penetapan target Indikator Utama Pembangunan Kota Makassar Tahun 2026 sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel VI.3
Realisasi dan Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kota Makassar Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi tahun 2025	Target tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**					
1.1	**Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan**					
1	Konsumsi Listrik Per-kapita	KwH	3035	1.668	1.668	Target belum dapat disesuaikan karena data perhitungan target belum dikeluarkan oleh PLN
2	Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	6,84	3,95	3,95	
3	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	76,42	88,05	88,05	
4	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	91,70	89,75	91,71	Target disesuaikan berdasrkan realisasi
5	Kapasitas Air Baku	M^3/detik	3,57	4,07	4,07	
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	62,57	67,63	67,63	
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,38	0,59	0,59	

No	Indikator	Satuan	Realisasi tahun 2025	Target tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
8	Rasio Penduduk (Rasio Jenis Kelamin)	%	98,58	99,04	99,04	
9	Kepadatan Penduduk	Org/Km2	8.448	8.435	8.435	Target belum dapat disesuaikan karena data perhitungan target belum dikeluarkan oleh BPS
1.2	**Lingkungan Hidup Berkualitas**					
10	Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia	%	8,90	16,85	16,85	
11	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,56	1568,35	1568,35	
12	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	33,25	48,94	48,94	
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,28	66,38	66,38	
14	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	7,77	10,85	10,85	
15	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	1,53	10	10	
16	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	4,63	8,00	8,00	
17	Indeks Resiko Bencana	Indeks	91,44	107	107	Target akan dilakukan penyesuaian pada tahun 2027
18	Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	%	Belum rilis	1,55	1,55	
19	Penurunan Intesitas Emisi GRK	%	Belum rilis	34,98	34,98	
20	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Kumulatif)	%	Belum rilis	0,34	0,34	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
2.1	**Kesejahteraan Ekonomi**					
21	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,34	6,43	6,43	
22	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	Juta Rupiah	176,28	186,75	186,75	
23	PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	Triliun	269,36	289,14	289,14	
24	Pengeluaran Perkapita	Juta Rupiah	22.105	20,543	20,543	Target belum dapat disesuaikan karena data perhitungan target belum diperoleh dari BPS
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,34	6,43	6,43	
2.2	**Kesehatan Untuk Semua**					
25	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,30	75,66	75,66	
26	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	50,92	66,65	66,65	
27	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	100	100	100	
28	Prevalensi Stunting pada Balita	%	3,65	17,9	17,9	
29	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis	%	**86,66**	82,81	82,81	Tidak mengalami penyesuaian target dikarenakan target yang telah ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tren 5 tahun terkahir, adapun realisasi lebih tinggi dari

No	Indikator	Satuan	Realisasi tahun 2025	Target tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
						target dikarenakan intervensi kegiatan oleh kemenkes
30	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	%	80,67	83	83	
31	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,45	100	100	
2.3	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**					
32	Literasi	%	SD = 67,24 SMP = 80,95	SD = 67,86 SMP = 73,86	SD = 67,86 SMP = 73,86	Target akan dilakukan penyesuaian pada tahun 2027
33	Numerasi	%	SD = 57,33 SMP = 53,77	SD = 60,18 SMP = 65,85	SD = 60,18 SMP = 65,85	
34	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 Tahun	Tahun	11,56	11,59	11,59	
35	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,63	15,64	15,64	
36	Proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	32,14	23,91	23,91	Target akan dilakukan penyesuaian pada tahun 2027
37	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	%	26,76	30,27	30,27	Target akan dilakukan penyesuaian pada tahun 2027
38	Angka Putus Sekolah	%	0,95	1,04	1,04	
2.4	**Perlindungan Sosial yang Adaptif**					
39	Tingkat Kemiskinan	%	4,43	3,46	3,46	
40	Indeks Gini	Nilai	0,391	0,359	0,359	
41	Persentase penyandang Disabilitas bekerja di sektor formal	%	0,043	42,51	42,51	
42	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	53,34	67,99	67,99	
2.5	**Beragama Maslahat dan Berkebudayaan maju**					
43	Indeks Kota Toleran	Skor	4,834	4,862	4,862	
44	Persentase Benda Bangunan Struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	21,78	20	20	Target tetap dikarenakan objek yang ditetapkan sebanyak 6 cagar budaya tidak mengalami perubahan, terjadi peningkatan realisasi dikarenakan terdapat struktur cagar budaya baru yang masih sementara dalam pengkajian
45	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapat dukungan fasilitasi	%	0,06	1,19	1,19	
2.6	**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**					
46	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	64,90	63,15	63,15	Target tidak berubah dikarenakan Realisasi dan penatapan target dilakukan oleh BKKBN
47	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	68,30*	70,60	70,60	*Realisasi Tahun 2024, data tahun 2025 belum dirilis

No	Indikator	Satuan	Realisasi tahun 2025	Target tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
						oleh Kememterian PPPA
48	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	95,97	95,43	95,43	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
49	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	71,04	79,63	79,63	
50	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0.275	0,177	0,177	
51	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	67,17	61	61	Target tetap dikarenakan realisasi dikeluarkan oleh pusat menggunakan metode baru dan target masih menggunakan metode lama
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
3.1	**Daya Saing Sumber Daya Manusia**					
52	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	85,46	85,86	85,86	
53	Angka Ketergantungan	%	33,03	42,72	42,72	
3.2	**Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi**					
54	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	19,24	19,46	19,46	
55	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,20	2,28	2,28	
56	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik	Orang	6.189.997	5.538.157	5.538.157	Target tidak dilakukan penyesuaian disebabkan perkiraan kunjungan wisatawan menurun di tahun 2026 karena kebijakan nasional kenaikan BBM dampak dari kondisi geopolitik global
57	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	78.080	95.852	95.852	
58	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif	Industri	5.081	4.831	4.831	Target belum dapat disesuaikan karena data perhitungan target ekraf belum diperoleh dari BPS
59	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar	Industri	8.301	25.015	25.015	
60	Persentase Koperasi Sehat Kota Makassar	%	16,18	27,51	27,51	
61	Return on Assets (ROA) BUMD	Nilai	2,11	1,90	1,90	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
62	Produktivitas Padi	Ton/Ha	5,02	6,87	6,87	
63	Produktivitas Perikanan Tangkap	Ton	1,52	1,25	1,25	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
64	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,60	9,53	9,53	
65	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	60,65	62,51	62,51	
66	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	44,26	47,41	47,41	
67	Indeks Kapabiltas Inovasi	Skor	4,50	4,56	4,56	
3.3	**Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru**					

No	Indikator	Satuan	Realisasi tahun 2025	Target tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
68	Indeks Ekonomi Hijau	Nilai	28,80	55,2	55,2	
69	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Nilai		113,1	113,1	
3.4	**Transformasi Digital**					
70	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	49,25	49,50	49,50	
3.5	**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**					
71	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	%	15,50	90	90	
72	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	44,23	45,86	45,86	
73	Net Ekspor Barang dan Jasa	US $	-7.983,69	60.310.094,39	60.310.094,39	
3.6	**Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**					
74	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap PDB Nasional	%	1,10	1,14	1,14	
75	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan	%	34,68	35,14	34,77	
76	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan	%	75,29	82,87	82,87	
77	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Nilai	80,51	79,46	79,46	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
3.7	**Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**					
78	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,67	0,61	0,61	Target belum dapat disesuaikan karena data PDRB Tw2 Tahun 2026 belum dirilis oleh BPS
79	Tingkat Inflasi Gabungan	%	2,69	1,77	1,77	
80	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	26,57	8,85	8,85	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
81	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	B	B	B	
82	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	6,53	6,03	**6,55**	Penyesuaian target berdasarkan realisasi
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
4.1	**Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif**					
83	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,24	98,42	98,42	
84	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,01	4,03	4,03	
85	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,52	81,31	81,31	
86	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,44	4,37	4,37	
87	Indeks Survey Penilaian Integritas	Indeks	67,93	76,78	76,78	
88	Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK	Nilai	84,20	87,98	87,98	
89	Indeks Maturitas SPIP	Indeks	3,011	3,50	3,50	
4.2	**Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh Serta Demokrasi Substansial**					
90	Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Realisasi tahun 2025	Target tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
91	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	100	100	
92	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani	%	66,30	56,02	**68**	Penyesuaian target berdasarkan realisasi
93	Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD	%	16	16	16	
94	Proporsi Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD (Perda)	Perda	5	9	9	
95	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	%	11,11	32	32	
4.3	**Daya Saing Daerah Tinggi**					
96	Jumlah Kerja Sama Dengan Pemerintah Daerah Lainnya (Sister City) (PKS)	PKS	0	2	2	
97	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,17	4,23	4,23	
98	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61,75	79,23	79,23	

Sumber: RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029, (data diolah) tahun 2026

6.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mengetahui capaian indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada dokumen P-RKPD Tahun 2026 Indikator Kinerja Kunci disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dituangkan dalam Perda RPJMD Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 Tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat Indikator beserta Target IKK, yang menjadi pedoman Pemerintah Kota Makassar dalam penyusunan perencanaan tahunan (RKPD) sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel VI.4
Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kunci
Kota Makassar Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Kunci / Urusan	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
1	**Pendidikan**					
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	98,02	100	100	
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,45	100	100	
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	97,34	100	100	
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum	%	14,66	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci / Urusan	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
	menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
2	**Kesehatan**					
2.1	Rasio daya tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1 : 214	1 : 220	1 : 220	
2.2	Persentase RS Rujukan Kota Makassar yang terakreditasi	%	100	100	100	
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	
2.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	98,12	100	100	
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	
2.10	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,72	100	100	
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	
2.12	Persentase ODGJ berat Yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	
2.13	Persentase orang terduga TBC Mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Makassar	%	100	54,85	100	Penyesuaian target berdasarkan realisasi
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Makassar	%	55,64	55,64	55,64	Tidak ada penyesuaian target dikarenakan cakupan kawasan pemukiman rawan abrasi kewenangan pemerintah Kota Makassar masih tetap sama dan belum terdapat penambahan

No	Indikator Kinerja Kunci / Urusan	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
						infrastruktur pengaman pantai
3.3	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota Makassar	%	83,17	83,88	83,88	
3.4	Persentase Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,45	91,94	98,56	Penyesuaian target berdasarkan realisasi
3.5	Rasio kepatuhan IMB Kota Makassar	%	100	100	100	
3.6	Tingkat Kemantapan Jalan kota Makassar	%	98,03	88,74	98,05	Penyesuaian target berdasarkan realisasi
3.7	Rasio Tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi	%	100	37,44	100	Penyesuaian target berdasarkan realisasi
3.8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	
4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**					
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kota Makassar	%	100	100	100	
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota Makassar	%	0	100	100	
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kota Makassar yang ditangani	%	0,94	15	15	
4.4	Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	0,11	3,69	3,69	
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	
5	**Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**					
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	
5.2	Persentase Perda dan Perkada Yang ditegakkan	%	100	100	100	
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	
5.7	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran (menit)	Menit	15	15	15	

No	Indikator Kinerja Kunci / Urusan	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
6	**Sosial**					
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang terpenuhi dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	
6.2	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	
7	**Tenaga Kerja**					
7.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	98,33	98,33	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
7.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1,58	1,49	1,49	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
7.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	25,05	24,80	24,80	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
7.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	31,1	41,00	41,00	
7.5	Persentase Tenaga kerja Yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar	%	64,08	61	61	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	75	75	75	
8.2	Persentase anak korban kekerasan Yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	
8.3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 Penduduk perempuan)	%	1,04	1,00	1,00	
9	**Pangan**					
9.1	Persentase ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	78,79	90	90	
10	**Pertanahan**					
10.1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0	90	90	
11	**Lingkungan Hidup**					
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar	Nilai	66,28	66,38	66,38	
11.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota Makassar	%	1,53	4	4	
11.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar	%	54,55	61,50	61,50	

No	Indikator Kinerja Kunci / Urusan	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
12.1	Perekaman KTP Elektronik	%	95,97	96,5	96,5	
12.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA kepemilikan akta kelahiran	%	74,63	76,6	76,6	
12.3	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	98,92	99,01	99,01	
12.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	6	20	20	
13	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
13.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,01	2,008	2,008	
13.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern *(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)*	%	64,52	61,60	65,89	Penyesuaian target berdasarkan realisasi
13.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	%	57,88	11	11	
14	**Perhubungan**					
14.1	Rasio Konektivitas Kota Makassar	Rasio	0,63	0,65	0,65	
14.2	Kinerja lalu lintas Kota Makassar	Kinerja	0,47	0,46	0,46	
15	**Komunikasi dan Informatika**					
15.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	
15.2	Persentase Layanan Publik Yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	32,14	49,50	49,50	
15.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Makassar	%	83,11	85,00	85,00	
16	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					
16.1	Meningkatnya Koperasi Yang berkualitas	%	11,16	12,03	12,03	
16.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	12,02	3,70	3,70	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
17	**Penanaman Modal**					
17.1	Persentase peningkatan investasi di Kota Makassar	%	38,3	8,85	8,85	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
18	**Kepemudaan dan Olahraga**					
18.1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	54,32	18,01	18,01	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
18.2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	14,5	13,69	13,69	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
18.3	Peningkatan prestasi olahraga	%	6,20	15,42	15,42	
19	**Statistik**					
19.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang menggunakan data statistik	%	88,23	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci / Urusan	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
	dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
19.2	Persentase OPD yang menggunakan Data statistik Dalam melakukan Evaluasi pembangunan daerah	%	88,23	100	100	
20	**Persandian**					
20.1	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	%	46,19	49	49	
21	**Kebudayaan**					
21.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	22	20	20	Target tetap dikarenakan objek yang dilestarikan sebanyak 6 cagar budaya tidak mengalami perubahan, terjadi peningkatan realisasi dikarenakan terdapat struktur cagar budaya baru yang masih sementara dalam pengkajian
22	**Perpustakaan**					
22.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	59,04	84,63	84,63	
22.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	10,24	82,20	82,20	
23	**Kearsipan**					
23.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	99	99,24	99,24	
23.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	
24	**Kelautan dan Perikanan**					
24.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota Makassar	Ton	22.476	23.290,3	23.290,3	
25	**Pariwisata**					
25.1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	%	-18,32	6	6	
25.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Makassar	%	12,06	3	3	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
25.3	Tingkat hunian Akomodasi (Hari)	Hari	55,48	57,56	57,56	
25.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,23	2,16	2,16	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
25.5	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	19,43	25,60	25,60	
26	**Pertanian**					
26.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	15,11	12,67	12,67	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
26.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	48,62	70	70	
29	**Perdagangan**					

No	Indikator Kinerja Kunci / Urusan	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
29.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	87,84	100	100	
29.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100	100	100	
29.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	90	90	90	
30	**Perindustrian**					
30.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Makassar (Industri)	Industri	25,010	25.015	25.015	
30.2	Persentase pencapaian Sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	40	60	60	
30.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,33	1,05	1,05	
30.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	
30.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota Makassar	%	100	100	100	
30.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	
32	**Perencanaan dan Keuangan**					
32.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	12	11,19	11,19	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
32.2	Rasio PAD	%	40,65	45,01	45,01	
32.3	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	
32.4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	
32.5	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	
32.6	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	78,47	72,27	72,27	
33	**Pengadaan**					
33.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	1	2	2	
33.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	75	57,56	78	Penyesuaian target berdasarkan realisasi

No	Indikator Kinerja Kunci / Urusan	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026		Ket
				Pokok	Perubahan	
33.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	46	63,15	63,15	
34	**Kepegawaian**					
34.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	70,57	81	81	
34.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	18,81	74	74	
34.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	50,18	27	53,6	Penyesuaian target berdasarkan realisasi
35	**Manajemen Keuangan**					
35.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-24	-20	-20	
35.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	-83,09	-24,00	-24,00	
35.3	Manajemen Aset	Ya/tidak	Ya	Ya	Ya	
35.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,99	4,49	4,49	Target akan disesuaikan pada tahun 2027
36	**Transparansi dan Partisipasi Publik**					
36.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	
36.2	Akses publik terhadap informasi Keuangan daerah	%	100	100	100	

Sumber: RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 (data diolah) Tahun 2026

6.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) memberikan gambaran pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar menerapkan sebanyak 29 jenis pelayanan dasar yang terbagi dalam 6 bidang urusan dan dilaksanakan oleh 8 Perangkat Daerah yang terkait Pelayanan Dasar. Capaian penerapan SPM Kota Makassar Triwulan I Tahun 2026 dan target SPM Perubahan RKPD Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel VI.5
Realisasi dan Target SPM Kota Makassar Tahun 2026

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Triwulan I Tahun 2026	Target P-RKPD 2026	SKPD Penanggung jawab
		Penerima Layanan (80%)		Mutu Minimal Layanan (20%)				
		Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi			
I	**Bidang Urusan Pendidikan**							
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	77,01%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	20%	97,01%	100%	Dinas Pendidikan

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Triwulan I Tahun 2026	Target P-RKPD 2026	SKPD Penanggung jawab
		Penerima Layanan (80%)		Mutu Minimal Layanan (20%)				
		Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi			
		Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Literasi (62) dan numerasi (54)		Literasi (62) dan numerasi (54)	100%	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	57,51%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	20%	77,51%	100%	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional					Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	67,38%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	20%	87,38%	100%	Dinas Pendidikan
II	**Bidang Urusan Kesehatan**							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	18,37%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	10,94%	29,31%	100%	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	18,71%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	14,89%	33,61%	100%	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	19,65%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	13,53%	33,18%	100%	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	16,34%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	10,37%	26,71%	100%	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	17,71%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	13,08%	30,79%	100%	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	19,40%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	16,79%	36,18%	100%	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Triwulan I Tahun 2026	Target P-RKPD 2026	SKPD Penanggung jawab
		Penerima Layanan (80%)		Mutu Minimal Layanan (20%)				
		Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi			
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	21,08%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	16,60%	37,68%	100%	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	16,07%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	17,34%	33,41%	100%	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita *diabetes mellitus* usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	31,16%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	16,95%	48,10%	100%	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	29,56%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	15,80%	45,36%	100%	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	18,84%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	13,88%	32,72%	100%	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	16,97%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan	15,27%	32,25%	100%	Dinas Kesehatan
III	**Bidang Urusan Pekerjaan Umum**							
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	232 Orang 2,40%	Jumlah barang dan jasa	0,60%	3,00%	100%	Dinas Pekerjaan Umum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	988 Orang 8,41%	Jumlah barang dan jasa	0,95%	9,36%	100%	Dinas Pekerjaan Umum
IV	**Bidang Urusan Perumahan Rakyat**							

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Triwulan I Tahun 2026	Target P-RKPD 2026	SKPD Penanggung jawab
		Penerima Layanan (80%)		Mutu Minimal Layanan (20%)				
		Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi			
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	50 Orang 2,66%	Jumlah barang dan jasa	3,33%	5,99%	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	Jumlah barang dan jasa	0	0*	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
V	**Bidang Urusan Ketenteraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**							
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Kabupaten/Kota	12,08%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	11,25%	23,34%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan informasi rawan bencana	80%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	6,67%	86,67%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	67,23%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	13,21%	80,44%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	80%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	20%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	13,33%	Jumlah barang dan jasa	5,59	18,92%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran
VI	**Bidang Urusan Sosial**							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	2,35%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	30,23%	8,40%	100%	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	26,82%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	74,23%	41,69%	100%	Dinas Sosial

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Triwulan I Tahun 2026	Target P-RKPD 2026	SKPD Penanggung jawab
		Penerima Layanan (80%)		Mutu Minimal Layanan (20%)				
		Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi			
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	16,00%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	41,54%	24,15%	100%	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	42,35%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	52,94%	59,76%	100%	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	43,12%	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	41,67%	51,45%	100%	Dinas Sosial

Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2026. data diolah

Berdasarkan data Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Makassar Triwulan I Tahun 2026, terlihat bahwa Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan pemantauan terhadap 29 jenis pelayanan dasar yang mencakup 6 bidang urusan pemerintahan dan dilaksanakan oleh 8 perangkat daerah. Pengukuran capaian dilakukan berdasarkan dua komponen utama, yaitu cakupan penerima layanan (80%) dan pemenuhan mutu minimal pelayanan (20%), sehingga menghasilkan capaian SPM pada masing-masing jenis pelayanan dasar. Secara umum, capaian SPM pada Triwulan I menunjukkan bahwa sebagian besar indikator masih berada pada tahap awal pencapaian menuju target tahunan sebesar 100 persen. Hal tersebut merupakan kondisi yang relatif wajar mengingat realisasi baru memasuki triwulan pertama, sehingga berbagai program dan kegiatan pelayanan dasar masih berada dalam fase implementasi awal. Namun demikian, terdapat variasi tingkat capaian antar bidang urusan yang mencerminkan perbedaan karakteristik pelayanan, sasaran penerima manfaat, kesiapan sumber daya, serta kompleksitas pelaksanaan di masing-masing sektor.

Pada Bidang Urusan Pendidikan, capaian SPM tergolong cukup baik dibandingkan bidang lainnya. Pelayanan Pendidikan Dasar telah mencapai 97,01 persen, Pendidikan Anak Usia Dini mencapai 87,38 persen, sedangkan Pendidikan Kesetaraan mencapai 77,51 persen. Tingginya capaian tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar dan PAUD di Kota Makassar telah berjalan dengan baik serta didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber daya pendidikan. Meskipun demikian, indikator mutu yang diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian berkelanjutan agar peningkatan akses pendidikan dapat diikuti dengan

peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.

Pada Bidang Urusan Kesehatan, capaian SPM masih berada pada kisaran 26–48 persen. Pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus mencatat capaian tertinggi sebesar 48,10 persen, diikuti pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 45,36 persen, sedangkan pelayanan kesehatan balita masih menjadi yang terendah dengan capaian 26,71 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, dan deteksi dini telah berjalan, namun cakupan pelayanan kepada seluruh kelompok sasaran masih perlu diperluas. Tantangan utama berasal dari tingginya jumlah sasaran pelayanan, mobilitas penduduk perkotaan, kepatuhan masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta kebutuhan peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan.

Pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum, capaian SPM masih relatif rendah. Penyediaan kebutuhan pokok air minum baru mencapai 3,00 persen, sedangkan pelayanan pengolahan air limbah domestik mencapai 9,36 persen. Rendahnya capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur memerlukan investasi yang besar, waktu pembangunan yang relatif panjang, serta bergantung pada penyediaan jaringan infrastruktur dan kapasitas pembiayaan daerah. Selain itu, pengembangan jaringan pelayanan air minum dan sanitasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, kondisi permukiman eksisting, serta koordinasi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur dasar.

Pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat, pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana baru mencapai 5,99 persen, sedangkan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi pemerintah daerah belum menunjukkan realisasi karena belum terdapat sasaran penerima layanan pada periode pelaporan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian indikator pada sektor ini sangat dipengaruhi oleh kejadian bencana maupun pelaksanaan program relokasi yang bersifat insidental sehingga realisasinya tidak selalu merata sepanjang tahun anggaran.

Pada Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, terdapat variasi capaian yang cukup lebar. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah mencapai 100 persen, menunjukkan kesiapsiagaan yang sangat baik dalam penyelenggaraan layanan kebencanaan. Selain itu, pelayanan informasi rawan bencana mencapai 86,67 persen, sedangkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 80,44 persen. Sebaliknya, pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum baru mencapai 23,34 persen, dan pelayanan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran mencapai 18,92 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa indikator yang berbasis kesiapsiagaan relatif lebih cepat dipenuhi dibandingkan indikator yang bergantung pada jumlah kejadian maupun cakupan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Pada Bidang Urusan Sosial, capaian SPM menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis mencatat capaian tertinggi sebesar 59,76 persen, disusul perlindungan dan jaminan sosial korban bencana sebesar 51,45 persen, serta rehabilitasi sosial anak terlantar sebesar 41,69 persen. Sementara itu, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar masih rendah dengan capaian 8,40 persen, dan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar mencapai 24,15 persen. Perbedaan capaian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan sosial sangat dipengaruhi oleh validitas data sasaran, kemampuan penjangkauan kelompok rentan, serta koordinasi dengan berbagai lembaga sosial dan

masyarakat dalam proses identifikasi maupun pendampingan penerima layanan.

Jika ditinjau secara keseluruhan, terdapat beberapa faktor yang mendukung pencapaian SPM Kota Makassar pada Triwulan I Tahun 2026. Pertama, telah tersedianya regulasi dan indikator SPM yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan dasar. Kedua, adanya komitmen perangkat daerah dalam memenuhi target pelayanan melalui penyediaan barang, jasa, serta sumber daya manusia sesuai standar pelayanan minimal. Ketiga, koordinasi antar perangkat daerah yang mulai berjalan secara terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dasar di berbagai sektor. Di sisi lain, beberapa faktor masih menjadi penghambat optimalisasi pencapaian SPM, antara lain besarnya jumlah sasaran penerima layanan pada wilayah perkotaan, keterbatasan kapasitas infrastruktur pelayanan dasar terutama pada sektor pekerjaan umum dan perumahan, keterbatasan sumber daya manusia pada beberapa jenis pelayanan, serta masih perlunya peningkatan kualitas basis data penerima manfaat agar pelayanan dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, beberapa indikator SPM merupakan indikator yang sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual di lapangan, seperti kejadian bencana, relokasi masyarakat, maupun dinamika sosial yang tidak dapat diprediksi secara penuh pada awal tahun anggaran.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa implementasi Standar Pelayanan Minimal di Kota Makassar telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan, meskipun tingkat pencapaian antar bidang masih bervariasi. Bidang pendidikan dan sebagian layanan kebencanaan menunjukkan kinerja yang relatif tinggi, sedangkan sektor kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan beberapa layanan sosial masih memerlukan percepatan pelaksanaan program pada triwulan berikutnya. Oleh karena itu, optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah, penguatan kualitas data sasaran, peningkatan kapasitas pelayanan, serta percepatan realisasi program dan anggaran menjadi faktor penting agar target penerapan SPM sebesar 100 persen pada akhir Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

6.6. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan amanah dariPeraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana sebagai salah satu negara anggota PBB yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, maka dalam pelaksanaanya perlu ada keselarasan dengan Rencana Pembangunan di daerah. Target TPB Kota Makassar untuk tahun 2027, tercantum pada tabel berikut:

6.6.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 dari TPB menekankan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga tidak ada lagi penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Pencapaian tujuan 1 TPB dilakukan melalui arah kebijakan berikut:

1. **Memperkuat perlindungan sosial adaptif melalui penyaluran** jaminan sosial dan bantuan sosial tepat sasaran, berbasis pemutakhiran data kemiskinan perkotaan, untuk melindungi rumah tangga miskin dan rentan dari guncangan ekonomi.

2. **Peningkatan kapasitas ekonomi keluarga miskin** melalui pemberdayaan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, kewirausahaan digital, serta peningkatan keterampilan kerja bagi pemuda dan pekerja sektor informal.
3. **Meningkatkan kualitas permukiman dan layanan dasar** yang difokuskan pada penataan kawasan kumuh, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta dukungan rumah layak huni di lingkungan padat dan pesisir.
4. **Memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan,** termasuk pencegahan stunting, jaminan kesehatan masyarakat miskin, serta beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.
5. **Menguatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana perkotaan**, khususnya di wilayah rawan banjir, rob, dan abrasi, melalui upaya mitigasi serta pemulihan cepat yang mencegah kerentanan semakin memburuk.

Untuk mencapai visi Kota Makassar bebas kemiskinan, Pemerintah Kota Makassar menetapkan lima target utama dalam pelaksanaan Tujuan 1 TPB, yaitu: 1). Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari; 2). Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional; 3). Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan; 4). Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro; 5). Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Tabel VI.6
Target Pencapaian Indikator TPB Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun Kota Makassar

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027		
Target 1.1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.										
1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrem	BPS, Susenas Modul Konsumsi, dipadukan dengan data World Bank untuk Purchasing Power Parity	Persen	0,59	0,3	0,2	0,3	0,2	-	Dinas Sosial
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional										
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS, Susenas (KOR & KP)	Persen	4,97	4,2	3,7	4,2	3,7	4,97	Dinas Sosial

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027		
1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi sesuai dengan definisi nasional	BPS, Susenas (KOR & KP), Sakernas	Persen	4,27	4,2	3,7	4,2	3,7	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dins Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	BPS, Susenas (KOR)	Persen	100	100	100	100	100	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.3.1[a]	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	BPS & BPJS Kesehatan	Persen	99,1	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027		
1.3.1[b]	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPS & BPJS Ketenagakerjaan	Persen	49,01	67,99	70,78	67,99	70,78	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Ketenagakerjaan
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1.4.1	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar	BPS, Susenas & Podes	Persen	90	90	90	90	90	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Sosial
1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelampin dan tipe kepemilikan	BPS, Susenas	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Pertanahan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027		
1.5 : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana										
1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB, BPBD	Kejadian	150	12	12	12	12	150	Badan Penngulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran

6.6.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB di Kota Makassar diarahkan untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, terjangkau, dan bergizi, serta memperkuat ketahanan pangan perkotaan melalui pengelolaan rantai pasok yang efisien dan pengembangan usaha pangan produktif. Arah kebijakan yang ditempuh adalah:

1. **Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan** melalui penguatan distribusi logistik antarwilayah, operasi pasar, optimalisasi BUMD/BUMDes pangan, dan digitalisasi informasi harga untuk mencegah gejolak harga pangan strategis.
2. **Memperluas akses dan bantuan pangan bagi masyarakat rentan** melalui dukungan program pangan bersubsidi, peningkatan status gizi keluarga miskin, serta pelayanan penyediaan pangan sehat untuk ibu hamil/menyusui, anak balita, dan lansia.
3. **Mengembangkan urban farming dan pertanian perkotaan berkelanjutan** dengan mendorong hidroponik, akuaponik, kebun vertikal, pemanfaatan lahan pekarangan, serta *community garden*di lorong dan kawasan padat penduduk sebagai sumber pangan keluarga.
4. **Meningkatkan kualitas gizi masyarakat** melalui edukasi gizi seimbang, kampanye konsumsi pangan lokal bergizi tinggi (ikan, sayur, buah), dan intervensi percepatan penurunan stunting berbasis komunitas kesehatan.
5. **Penguatan rantai pasok pangan daerah dan UMKM kuliner** melalui kemitraan produsen–supplier–ritel modern, dukungan sertifikasi keamanan pangan, dan transformasi digital bagi UMKM makanan untuk memperluas pemasaran dan efisiensi usaha.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu membawa Pemerintah Kota Makassar mencapai tiga target, yaitu: 1). Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana; 2). Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula; 3). Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrem.

Tabel VI.7
Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027		
2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi , terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
2.1.1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernoursihment)	BPS	Persen	3,97	3,68	3,54	3,68	3,54	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Ketahanan Pangan
2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang telah disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula										
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun /balita	Kemenkes , Survei Status Gizi Indonesia	Persen	19,8	17,9	17,5	17,9	17,5	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Kesehatan
2.2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Kemenkes , Survei Status Gizi Indonesia	Persen	2,05	2,41	2,7	2,41	2,7	2,15	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027		
2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi , terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
2.2.2[a]	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	Badan Pangan Nasional (Bapanas)	Skor	89,73	90,09	90,27	90,09	90,27	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Ketahanan Pangan
2.c : Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.										
2.c.1	Indikator anomali harga pangan	BPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)		Energi:2812 Protein: 88,21	NA	NA	NA	NA	Energi:2905 Protein: 88,16	Dinas Ketahanan Pangan

6.6.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan memiliki akses yang merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Implementasi upaya pencapaian Tujuan 3 dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. **Memperluas akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas** melalui penguatan kapasitas puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer, pemanfaatan telemedicine dan *mobile clinic*, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan ibu-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
2. **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perilaku hidup sehat** melalui program promotif dan preventif yang berkelanjutan seperti GERMAS, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta penguatan layanan kesehatan mental dan peningkatan gizi masyarakat.
3. **Memperluas cakupan perlindungan sosial dan pembiayaan kesehatan yang berkeadilan** elalui perluasan kepesertaan jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, pekerja informal, dan kelompok rentan, serta digitalisasi sistem pembiayaan kesehatan untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas layanan publik.
4. **Penguatan sistem surveilans dan kesiapsiagaan terhadap kedaruratan kesehatan**
   melalui peningkatan kapasitas deteksi dini, respons cepat terhadap wabah dan krisis kesehatan, serta peningkatan ketahanan fasilitas kesehatan menghadapi situasi darurat.
5. **Kolaborasi multipihak dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan** melalui kemitraan dengan akademisi, swasta, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil dalam pemberdayaan masyarakat, inovasi layanan kesehatan, serta pemanfaatan data dan teknologi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Kebijakan tersebut diharapkan mampu membawa Pemerintah Kota Makassar mencapai enam target, yaitu: 1). Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup; 2). Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya; 3). Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan; 4). Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang; 5). Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat; 6). Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga

kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

Tabel VI.8
Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGS 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027		
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.1	Angka kematian ibu	BPS: Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS)	Persen	71,53	66,65	64,21	66,65	64,21	69	Dinas Kesehatan
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya									Dinas Kesehatan
	(a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;		Persen	98,53	99	100	100	100	100	
	(b) di fasilitas kesehatan		Persen	100	100	100	100	100	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027		
3.3.3	Kejadian malaria per 1.000 orang	Laporan Kementrian Kesehatan	Persen	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0,1	Dinas Kesehatan
3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Kementrian Kesehatan; Laporan Program Subdit Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis, dan (b) Kusta	Kemenkes: Laporan Rutin RR Elektronik	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis	Pusat Data dan Informasi BPJS Kesehatan	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.5 : Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027		
3.5.2.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	BPS: Susenas Modul KOR	Liter per Kapita	NA	NA	NA	NA	NA	99,1	Dinas Kesehatan
3.8 : mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan askes terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang										
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	Kementrian Kesehatan: Riskesdas	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.8.1.(a)	Unmeet need pelayanan kesehatan	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.8.2	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kementrian Kesehatan, BPJS Kesehatan	Persen	100	19,36	24	19,36	24	100	Dinas Kesehatan
3.a : Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027		
3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	19,82	19,36	24	19,36	24	0,36	Dinas Kesehatan
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Kemenkes: Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan	Per 1.000 penduduk	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	0,07	Dinas Kesehatan

6.6.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Makassar. Pencapaian Tujuan 4 dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. **Memperluas akses layanan pendidikan formal yang inklusif dan berkeadilan** melalui perluasan sarana dan prasarana pendidikan pada wilayah padat penduduk dan pinggiran kota, peningkatan akses pendidikan bagi kelompok difabel, masyarakat miskin, serta anak putus sekolah melalui beasiswa, sekolah ramah anak, dan layanan pendidikan alternatif.
2. **Meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan** melalui penguatan kurikulum berbasis kompetensi abad 21 (literasi, numerasi, digital skill), pengembangan sekolah vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri lokal, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran yang interaktif dan adaptif.
3. **Penguatan kapasitas dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan** melalui pelatihan pedagogik dan literasi digital berkelanjutan, penyebaran guru yang lebih merata, pemberian insentif berbasis kinerja, serta peningkatan kesejahteraan guru untuk mendukung kualitas pembelajaran.
4. **Peningkatan kualitas layanan PAUD dan kesiapan pendidikan dasar** melalui perluasan akses PAUD holistik-integratif, peningkatan peran keluarga dalam stimulasi dini, serta penguatan program transisi PAUD–SD yang memastikan kesiapan belajar anak dari aspek gizi, mental, dan sosial.
5. **Pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas pendidikan** melalui pelibatan komunitas, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan perpustakaan komunitas, beasiswa kolaboratif, program *upskilling-reskilling*, serta peningkatan literasi sepanjang hayat (*lifelong learning*).

Kebijakan tersebut diharapkan mampu membawa Pemerintah Kota Makassar mencapai enam target, yaitu: 1). Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan anak lai-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif; 2). Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar; 3). Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yan terjangkau dan berkualitas; 4). Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki

keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan; 5). Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan; 6). Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Tabel VI.9
Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027		
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan anak lai-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4.1.2	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjasng SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat	BPS: Susenas Modul KOR								
	SD/Sederajat		Persen	99,38	99,75	100	99,75	100	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Pendidikan
	SMP/Sederajat		Persen	99,01	99,2	99,3	99,2	99,3	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Pendidikan
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun; usia 13-15	BPS: Susenas Modul KOR								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027		
	tahun; dan usia 16-18 tahun									
	usia 7-12 tahun		Persen	0,58	0,4	0,3	0,4	0,3	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Pendidikan
	usia 13-15 tahun		Persen	3,02	2,25	2	2,25	2	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Pendidikan
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										
4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut jenis kelamin	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	82,65	86	88	86	88	92	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027		
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yan terjangkau dan berkualitas.										
4.3.1.(a)	Angka partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	21,91	23,91	24,91	23,91	24,91	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Pendidikan
4.4 : Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	280	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Komunikasi dan Informatika
4.5 : Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan										
4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat dan (iii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat	BPS: Susenas Modul KOR								Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027		
	SMP/sederajat, SMA/sederajat, SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untik (a) perempuan/laki-laki, (b) perdesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah /teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas									
	Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat		Persen	100	100	100	100	100	100,21	Dinas Pendidikan
	Rasio angka partisipasi kasar (APK) perempuan/laki-laki di SMP/MTS/Sederajat		Persen	104,55	103,5	103	103,5	103	106,43	Dinas Pendidikan
4.6 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi										
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	100	100	100	100	100	98,34	Dinas Pendidikan

6.6.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender satu dari sekian banyak masalah pembangunan yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Hasil pembangunan dan produk kebijakan dianggap oleh para aktivitas perempuan sebagai produk kaum laki-laki sehingga lebih banyak menguntungkan lak-laki dan mengabaikan hak-hak perempuan. Oleh karena itu mewujudkan tujuan SDGS kelima yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan merupakan menjadi relevan dan penting bagi Kota Makassar. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan secara bertahap melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. **Memperluas akses dan kesempatan perempuan dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan** melalui penguatan layanan pendidikan formal dan non-formal bagi perempuan dari keluarga miskin, perempuan kepala keluarga, serta perempuan penyandang disabilitas; serta perluasan pelatihan vokasi yang mendukung peningkatan kompetensi dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
2. **Mendorong transformasi digital bagi pemberdayaan perempuan** melalui peningkatan literasi digital perempuan, perluasan akses teknologi informasi, serta dukungan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, kewirausahaan berbasis teknologi, dan kepemimpinan di era digital.
3. **Menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui upaya preventif dan responsif yang lebih kuat** melalui edukasi hak-hak perempuan dan perlindungan anak pada kelompok usia muda, pra-nikah, dan komunitas keluarga; penguatan layanan pendampingan korban; serta penguatan peran tokoh masyarakat dalam pencegahan kekerasan berbasis gender.
4. **Penguatan kelembagaan dan kolaborasi multipihak dalam perlindungan perempuan dan anak** melalui koordinasi antar-OPD, lembaga penegak hukum, layanan kesehatan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan perwujudan kota ramah perempuan dan anak.
5. **Pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pelaporan dan respon cepat terhadap kekerasan** melalui optimalisasi platform pengaduan berbasis digital yang mudah diakses, aman, dan terintegrasi, serta penguatan kapasitas aparat

dan layanan rujukan untuk mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Kebijakan tersebut diharapkan mampu membawa Pemerintah Kota Makassar mencapai tiga target, yaitu: 1). Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan; 2). Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat; 3). Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.

Tabel VI.10
Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027		
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										
5.3.1	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun	BPS: Susenas Modul KOR	Tahun	21	21	21	21	21	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b)	KPU, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Daerah	Persen	16	16	18	16	18	25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027		
	pemerintah daerah									n Anak, BKPSDM
5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan
5.6 : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.										
5.6.2	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan,	BKKBN	Regulasi	4	4	4	4	4	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

6.6.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Makassar. Berdasarkan baseline 2024, mayoritas rumah tangga telah memiliki akses terhadap layanan air minum aman dan l sanitasi aman, serta akses fasilitas cuci tangan yang sangat tinggi. Meskipun demikian, tantangan masih terlihat pada kualitas pengolahan air limbah, cakupan layanan lumpur tinja, dan pengolahan limbah cair industri.Kota Makassar perlu memperkuat tata kelola sumber daya air, meningkatkan infrastruktur sanitasi dan persampahan, serta memastikan pengendalian pencemaran yang lebih terintegrasi. Sejumlah arah kebijakan berikut dapat ditempuh:

1. **Memperluas dan meningkatkan kualitas layanan air minum aman**: Meskipun cakupannya sudah mencapai lebih dari 99%, peningkatan kapasitas produksi dan keandalan jaringan distribusi tetap diperlukan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan meminimalkan risiko gangguan layanan.
2. **Penguatan layanan sanitasi aman dan sistem SPALD-T**: Peningkatan akses sanitasi aman dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) yang kini berada pada baseline 98,70%, perlu ditunjang oleh perluasan jaringan, perbaikan kualitas instalasi, dan penyediaan layanan khusus bagi kawasan padat atau perumahan informal.
3. **Perluasan cakupan layanan pengelolaan lumpur tinja (LLTT)**: Kota Makassar perlu memperkuat regulasi wajib LLTT, memperluas armada layanan, serta mengembangkan sistem pemantauan berkala untuk meminimalkan risiko pencemaran lingkungan dari septic tank yang tidak terkelola.
4. **Meningkatkan pengolahan limbah cair industri secara aman**: Baseline 2024 menunjukkan bahwa limbah cair industri yang diolah secara aman masih cukup rendah. Perlu pengawasan lebih ketat, penyediaan fasilitas pengolahan terpadu, serta pembinaan industri kecil menengah untuk mengadopsi sistem pengolahan limbah yang sesuai standar.
5. **Mendorong efisiensi penggunaan air di sektor rumah tangga dan industri**: Kota Makassar perlu mengembangkan kebijakan efisiensi pemakaian air, seperti kampanye hemat air, adopsi perangkat hemat air, serta manajemen permintaan di sektor usaha dan fasilitas publik, mengingat peningkatan kebutuhan air sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pengembangan kawasan.

6. **Perlindungan dan restorasi ekosistem terkait air**: Upaya restorasi kawasan pesisir, ruang terbuka hijau, dan daerah resapan perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan sumber air tanah dan mengurangi potensi banjir di wilayah pesisir serta kawasan urban padat.

Secara keseluruhan, Kota Makassar memiliki landasan yang kuat untuk mencapai target Tujuan 6, mengingat capaian awal yang relatif tinggi pada akses air minum dan sanitasi. Namun, tantangan tetap signifikan pada aspek kualitas air, layanan lumpur tinja, dan pengolahan limbah industri. Dengan memperkuat kapasitas infrastruktur, tata kelola lingkungan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas, serta pengawasan berbasis data, Makassar dapat mencapai layanan air bersih dan sanitasi yang lebih aman, merata, dan berkelanjutan menuju 2030.

Tabel VI.11
Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027		
6.1 : Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua										
6.1.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	99,25	99,35	99,40	99,35	99,40	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas PU, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 15 Kecamatan
6.2 : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	97,56	97,66	97,71	97,66	97,71	Belum ada capaian karena merupaka	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027		
									n indikator baru	
	Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	99,50	99,60	99,65	99,60	99,65	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Lingkungan Hidup
	Indikator 6.2.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	98,70	98,80	98,85	98,80	98,85	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027		
	Indikator 6.2.1.(e) Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan lumpur tinja.	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	87,50	88,55	89,55	88,55	89,55	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Lingkungan Hidup
6.3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
6.3.1 (a)	**Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan Pembangunan**	Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan	**%**	**55,62**	**56,7**	**57,78**	**56,7**	**57,78**	-	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target 2025	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027		
	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)									
6.3.1 (b)	**Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja**	**DLH**		**59.11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62,6**	Dinas Lingkungan Hidup
6.3.2 (b)	**Kualitas air sungai sebagai sumber air baku**								**78,30**	Dinas Lingkungan Hidup

6.6.7. Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau

Isu akses energi modern, bersih, dan terjangkau merupakan salah satu prasyarat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Makassar. Pemerataan akses energi tidak hanya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mengurangi ketimpangan, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta memperkuat ketahanan energi kota. Oleh karena itu, pencapaian Tujuan 7 TPB menjadi agenda penting dan strategis bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota berketahanan energi dan ramah lingkungan.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut mencakup:

1. **Perluasan akses energi listrik bagi seluruh rumah tangga** melalui peningkatan rasio elektrifikasi terutama pada wilayah padat penduduk dan permukiman informal. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan PLN untuk percepatan pemasangan sambungan listrik baru, peningkatan keandalan jaringan, serta subsidi sambungan listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan.
2. **Perluasan akses dan pemanfaatan jaringan gas kota** dengan meningkatkan jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga, khususnya di kawasan perkotaan yang padat dan memiliki potensi efisiensi energi tinggi. Pemerintah Kota Makassar berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan operator jaringan gas untuk memperluas pembangunan infrastruktur gas rumah tangga serta memastikan keterjangkauan biaya sambungan bagi masyarakat.
3. **Mendorong transisi energi bersih dalam sektor rumah tangga**, termasuk peningkatan proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan distribusi LPG yang stabil dan terjangkau, edukasi efisiensi energi, serta program konversi bagi rumah tangga yang masih menggunakan bahan bakar biomassa.
4. **Fasilitasi penggunaan listrik sebagai energi utama untuk memasak**, sejalan dengan perkembangan teknologi peralatan rumah tangga hemat energi. Pemerintah mendorong penggunaan kompor listrik dan kompor induksi melalui program demonstrasi teknologi, kerja sama dengan pelaku usaha untuk paket harga terjangkau, serta sosialisasi manfaat kesehatan, efisiensi, dan pengurangan emisi.
5. **Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring, pelaporan, dan percepatan layanan energi**, termasuk sistem pelaporan gangguan listrik,

pemutakhiran data penerima manfaat subsidi energi, serta integrasi data energi tingkat kelurahan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dan tenaga teknis dilakukan untuk mendukung implementasi layanan energi bersih yang lebih responsif dan tepat sasaran.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu membawa Pemerintah Kota Makassar mencapai tiga target utama Tujuan 7, yaitu: (1) peningkatan Rasio Elektrifikasi hingga mencapai 100% sehingga seluruh rumah tangga dapat menikmati layanan listrik yang layak dan berkelanjutan; (2) perluasan sambungan jaringan gas rumah tangga yang semakin merata dan terjangkau di seluruh wilayah perkotaan; dan (3) peningkatan proporsi rumah tangga pengguna gas/LPG dan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak sebagai bagian dari transisi energi bersih yang lebih sehat, efisien, dan ramah lingkungan bagi seluruh masyarakat.

Tabel VI.12
Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGS 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
7.1 Menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.										
7.1.1	Rasio elektrifikasi	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	100	100	100	100	100	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Direktorat Jenderal Migas, Kemen ESDM	Jumlah sambungan						Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	99,45					Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Sosial
7.1.2.(c)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	NA					Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Sosial

6.6.8. Tujuan 8, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan serta Pekerjaan Layak untuk Semua

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar. Tantangan terkait pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, kualitas pekerjaan, dan perluasan kesempatan kerja yang layak masih membutuhkan perhatian serius dalam kerangka pembangunan kota. Oleh karena itu, pencapaian Tujuan 8 TPB menjadi agenda strategis Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat daya saing ekonomi kota, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan ekonomi.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut mencakup:

1. **Mendorong pertumbuhan ekonomi kota yang inklusif melalui penguatan struktur ekonomi unggulan**. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor prioritas, pengembangan industri berbasis UMKM dan ekonomi kreatif, serta peningkatan produktivitas sektor jasa modern. Pemerintah mendorong investasi berkualitas yang menciptakan lapangan kerja produktif, yang berkontribusi pada peningkatan laju pertumbuhan PDRB per kapita dan PDRB per kapita secara berkelanjutan.
2. **Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi dan transformasi ekonomi lokal**. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja, berbagai program pelatihan berbasis kompetensi, vokasi, dan sertifikasi profesi diperluas, terutama untuk sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, Balai Latihan Kerja (BLK), serta lembaga sertifikasi kompetensi.
3. **Mengurangi dominasi lapangan kerja informal dengan memperluas akses pekerjaan layak dan perlindungan sosial**. Pemerintah mendorong peningkatan kualitas pasar tenaga kerja dengan memperluas kesempatan pekerjaan formal, memberikan pendampingan usaha bagi pekerja informal, serta memperkuat jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya ini diarahkan untuk menurunkan proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin, serta meningkatkan akses pekerja terhadap kondisi kerja yang layak dan aman.
4. **Peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penguatan standar upah dan perlindungan ketenagakerjaan**. Melalui pengawasan ketenagakerjaan, dialog sosial, dan penyusunan kebijakan Upah Minimum yang berbasis data, Pemerintah Kota Makassar berupaya memastikan kenaikan upah rata-rata per jam kerja yang mencerminkan produktivitas dan kebutuhan hidup layak. Upaya ini dibarengi dengan penegakan regulasi ketenagakerjaan dan pencegahan praktik kerja eksploitatif.
5. **Penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi kelompok rentan**. Kebijakan ini difokuskan pada penurunan tingkat pengangguran terbuka, terutama pada kelompok perempuan, pemuda, dan usia produktif. Pemerintah memperluas job fair, program

linking and matching tenaga kerja–industri, inkubasi wirausaha muda, serta akses pembiayaan usaha bagi kelompok rentan dan calon wirausaha.

6. **Pencegahan peningkatan kelompok usia muda NEET (Not in Education, Employment, or Training)**. Upaya ini meliputi perluasan akses pendidikan, program pelatihan vokasi bagi pemuda, layanan konseling karier, serta penyediaan ruang kreatif (creative hub) yang mendukung aktivitas kewirausahaan generasi muda. Intervensi ini diarahkan untuk menurunkan persentase usia muda (15–24 tahun) yang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (NEET).
7. **Penghapusan pekerja anak melalui penguatan regulasi, edukasi keluarga, dan layanan perlindungan anak**. Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap praktik pekerja anak, memberikan bantuan sosial bagi keluarga rentan, serta menyediakan akses pendidikan yang lebih inklusif. Upaya ini diarahkan untuk menurunkan persentase dan jumlah anak usia 5–17 tahun yang bekerja, dibedakan menurut jenis kelamin dan kelompok umur sesuai standar International Conference of Labour Statisticians.
8. **Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah melalui penguatan destinasi dan promosi wisata**. Pengembangan pariwisata dilakukan melalui perbaikan infrastruktur layanan kepariwisataan, digitalisasi promosi wisata, pemberdayaan komunitas lokal, serta peningkatan kualitas layanan wisata. Upaya ini meningkatkan proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB, serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
9. **Penguatan UMKM melalui akses pembiayaan, digitalisasi, dan kemitraan usaha.** Pemerintah Kota Makassar meningkatkan akses pembiayaan melalui KUR, kredit mikro daerah, dan skema pembiayaan berbasis digital, sehingga mendorong peningkatan rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan. Program pendampingan dan inkubasi UMKM juga terus diperkuat agar mampu naik kelas dan berdaya saing.
10. **Peningkatan inklusi keuangan melalui perluasan akses layanan perbankan dan transaksi digital.** Upaya dilakukan dengan memperluas literasi keuangan, memperbanyak agen bank di tingkat kelurahan, serta memfasilitasi pembukaan rekening tabungan masyarakat berpendapatan rendah. Langkah ini meningkatkan jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) per 1.000 penduduk dewasa dan jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk dewasa, sehingga memperkuat ekosistem ekonomi digital dan inklusif.

Dengan implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat mencapai indikator-indikator utama Tujuan 8, yaitu: (1) meningkatkan laju pertumbuhan PDRB per kapita dan PDRB per kapita; (2) meningkatkan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja sebagai indikator produktivitas tenaga kerja; (3) menurunkan proporsi lapangan kerja informal menurut sektor dan jenis kelamin; (4) meningkatkan upah rata-rata per jam kerja; (5) menurunkan TPT menurut jenis kelamin dan kelompok umur; (6) menurunkan persentase pemuda NEET; (7) menurunkan jumlah pekerja anak usia 5–17 tahun; (8) Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PDRB dan jumlah

wisman; (9) meningkatkan rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan; dan (10) Meningkatkan jumlah rekening DPK dan uang elektronik per 1.000 penduduk dewasa.

Tabel VI.13
Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGS 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	Persen	5,56	6,43	7,43	6,43	7,43	90	Bappeda
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS	Rp Juta	165,95	186,75	200,62	186,75	200,62	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Bappeda
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.										
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	Persen	-2,24	2,97	5,84	2,97	5,84	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Ketenaga kerjaan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif,penciptaan lapangan kerja layak,kewirausahaan,kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro,kecil dan menengah,termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan										
8.3.1.(a)	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	Persen	40,30	37,90	36,40	37,90	36,40	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Ketenagakerjaan
8.5 : Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Rp per jam							Dinas Ketenagakerjaan
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen	9,71	9,53	9,44	9,53	9,44	9,60	Dinas Ketenagakerjaan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
8.6 Secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan										
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen	19,55	17,64	16,49	17,64	16,49	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketenaga kerjaan
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anakanak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.										
8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen	2,16	2,17	2,18	2,19	2,20	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak, Dinas

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
										Ketenagakerjaan
8.9 : Pada Tahun 2030, meyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal										
8.9.1	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS	Persen	2,14	2,16	2,17	2,16	2,17	2,20	Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS	Orang	96.128	96.128	96.468	96.128	96.468	78.080	Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua										
8.10.1.(a)	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan								Dinas KUMKM
8.10.2.(a)	Jumlah rekening DPK perbankan per 1.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan	Rekening							Dinas Komunikasi dan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
										Informatika
8.10.2.(b)	Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan	Rekening							Dinas Komunikasi dan Inofrmatika

6.6.9. Tujuan 9, Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Pembangunan infrastruktur yang tangguh, penguatan sektor industri yang inklusif, dan peningkatan kapasitas inovasi merupakan fondasi penting bagi transformasi ekonomi Kota Makassar. Tantangan terkait kapasitas transportasi, daya saing industri manufaktur, pengembangan industri kecil, serta rendahnya belanja riset masih memerlukan perhatian serius agar Makassar dapat menjadi kota modern, inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pencapaian Tujuan 9 TPB menjadi agenda strategis Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan produktivitas industri, dan memperkuat ekosistem inovasi daerah.
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut mencakup:

1. **Penguatan infrastruktur transportasi untuk mendukung mobilitas manusia dan logistik** melalui perluasan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara, termasuk angkutan umum perkotaan, jaringan jalan, pelabuhan, dan terminal. Upaya ini bertujuan meningkatkan jumlah penumpang dan volume barang berdasarkan moda transportasi, sehingga mendukung aksesibilitas, kelancaran distribusi, dan efisiensi rantai pasok kota
2. **Peningkatan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian daerah** melalui pengembangan kawasan industri, fasilitas logistik, dan industri pendukung. Selain itu, peningkatan teknologi produksi, standardisasi, dan pendampingan industri menjadi fokus utama untuk memperkuat daya saing industri manufaktur.
3. **Mendorong pertumbuhan industri manufaktur melalui inovasi proses produksi dan perluasan pasar**. Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur melalui peningkatan produktivitas industri, adopsi teknologi berbasis digital, kemitraan industri–UMKM, serta ekspansi pasar nasional dan global. Fasilitasi sertifikasi, perizinan usaha, dan standar mutu diperkuat untuk mendukung industri lokal agar mampu tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.
4. **Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur melalui** perluasan pelatihan vokasi industri, penyelarasan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja (link and match), serta penyediaan insentif bagi industri padat karya. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur, sehingga industri berperan lebih besar dalam menciptakan pekerjaan produktif.
5. **Penguatan industri kecil sebagai bagian penting dari rantai nilai industri daerah.** Industri kecil diposisikan sebagai pendorong utama industrialisasi inklusif. Melalui pendampingan produksi, digitalisasi pemasaran, fasilitasi pembiayaan, dan penyediaan sentra industri kecil, Pemerintah Kota Makassar berupaya meningkatkan proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri. Strategi ini sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah berbasis UMKM.
6. **Peningkatan kapasitas riset, inovasi, dan teknologi untuk mendorong produktivitas daerah** melalui peningkatan kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga litbang, komunitas inovasi, dunia usaha dan pendanaan riset internasional. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan proporsi anggaran riset terhadap PDRB, serta mendorong inovasi teknologi yang mendukung industrialisasi hijau, efisiensi energi, dan digitalisasi layanan publik serta usaha.

Dengan implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat mencapai indikator-indikator utama Tujuan 9, antara lain: (1) meningkatkan jumlah penumpang dan barang lintas moda transportasi; (2) meningkatkan proporsi nilai tambah

industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita; (3) meningkatkan laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur; (4) meningkatkan proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor industri manufaktur; (5) meningkatkan kontribusi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri; dan (6) meningkatkan proporsi anggaran riset terhadap PDRB sebagai fondasi inovasi daerah.

Tabel VI.14
Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.2.(a)	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Kemenhub, BPS	Penumpang							Dinas Perhubungan
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita	BPS	Persen	165.954	177.954	183.954	177.954	183.954	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	BPS	Persen	4.80	5.20	5.35	5.20	5.35	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
9.2.2	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	BPS	Persen	75312	79899	82295	79899	82295	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
9.3.1	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri	BPS	Persen	24.815	25.015	25.115	25.215	25.315	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas KUMKM
9.5 : Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.										
9.5.1	Proporsi anggaran riset terhadap PDRB	BRIDA	Persen	0,0005	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0015	Brida

6.6.10. Tujuan 10, Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Ketimpangan distribusi pendapatan, kerentanan kelompok miskin, dan risiko diskriminasi terhadap kelompok tertentu masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, pencapaian Tujuan 10 TPB menjadi agenda strategis Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali dapat menikmati manfaat pembangunan secara setara.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut mencakup:

1. **Pengurangan ketimpangan pendapatan melalui inklusi ekonomi dan perluasan akses peluang ekonomi.** Pemerintah memperkuat program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah, serta fasilitasi peningkatan pendapatan melalui UMKM, padat karya, dan perluasan lapangan kerja. Upaya ini bertujuan menurunkan rasio gini, sebagai indikator utama menurunnya kesenjangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.
2. **Pengurangan jumlah penduduk miskin melalui bantuan sosial adaptif dan pemberdayaan ekonomi.** Untuk menurunkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut jenis kelamin dan kelompok umur, Pemerintah Kota Makassar memperluas program perlindungan sosial, bantuan pangan, beasiswa, intervensi gizi, serta program peningkatan pendapatan keluarga miskin. Kebijakan ini mempertimbangkan kelompok perempuan kepala keluarga, anak, lansia, dan kelompok usia produktif yang rentan secara ekonomi.
3. **Menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pendapatan melalui penguatan inklusi sosial dan ekonomi.** Upaya pengurangan kerentanan ekonomi dilakukan melalui peningkatan akses pekerjaan layak, pelatihan vokasi, fasilitasi kewirausahaan, serta perluasan akses pendidikan dan layanan dasar. Intervensi ini diarahkan untuk menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pendapatan, termasuk menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas, sehingga kesempatan ekonomi menjadi lebih merata.
4. **Penghapusan kebijakan diskriminatif dan peningkatan perlindungan hukum bagi seluruh kelompok masyarakat.** Pemerintah Kota Makassar memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap kebijakan yang berpotensi diskriminatif berdasarkan hukum HAM internasional. Upaya dilakukan melalui identifikasi dan evaluasi kebijakan diskriminatif, penyusunan kebijakan yang inklusif, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam perspektif HAM. Hal ini ditujukan untuk menurunkan jumlah kebijakan yang bersifat diskriminatif dalam 12 bulan terakhir, sekaligus meningkatkan iklim yang aman dan setara bagi seluruh kelompok rentan.
5. **Perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai perlindungan bagi pekerja rentan** melalui perluasan jangkauan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kampanye edukasi, penyederhanaan pendaftaran, dan

6. kolaborasi dengan dunia usaha serta sektor informal. Targetnya adalah meningkatkan proporsi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga seluruh pekerja, termasuk pekerja informal, pekerja perempuan, pekerja rentan, dan penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan sosial dan keamanan ekonomi.

Dengan implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat mencapai indikator-indikator utama Tujuan 10, yaitu (1) menurunnya rasio gini sebagai indikator berkurangnya ketimpangan pendapatan; (2) menurunnya persentase penduduk miskin menurut jenis kelamin dan kelompok umur; (3) menurunnya proporsi penduduk di bawah 50% median pendapatan menurut jenis kelamin dan disabilitas; (4) menurunnya jumlah kebijakan diskriminatif dalam 12 bulan terakhir; dan (5) meningkatnya proporsi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai perlindungan pekerja rentan.

Tabel VI.15
Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
10.1 Secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1.(a)	Rasio gini	BPS	Poin	0,372	0,359	0,353	0,359	0,353	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Bappeda, Dinas Sosial
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persen	4,97	3,46	3,40	3,46	3,40	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.2 Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
10.2.1	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persen							Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Persen							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat DPRD, Kesbangpol
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
10.4.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	%	49,01	67,99	70,78	67,99	70,78	Belum ada capaian karena merupak an indikator baru	Dinas Ketenagak erjaan

6.6.11. Tujuan 11, Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan utama di Kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar menghadapi tantangan urbanisasi yang pesat, mulai dari kebutuhan hunian layak, peningkatan mobilitas penduduk, penanganan kawasan rawan bencana, hingga pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan. Berdasarkan baseline 2024, akses hunian layak belum sepenuhnya dirasakan secara kolektif oleh masyarakat, rasio perluasan lahan terbangun terhadap pertumbuhan penduduk masih tinggi, sementara kualitas layanan pengelolaan sampah dan udara perkotaan masih memerlukan peningkatan signifikan. Kondisi ini menegaskan pentingnya mengelola pembangunan kota dengan lebih terarah agar Makassar tumbuh sebagai kota yang aman, inklusif, sehat, dan berketahanan. Kota Makassar perlu mengambil langkah kebijakan yang fokus, realistis, dan selaras dengan kebutuhan perkotaan yang terus berkembang, yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau**: Kota Makassar perlu memperkuat penyediaan hunian yang memenuhi standar kelayakan, termasuk melalui pembangunan rumah susun, perbaikan kawasan permukiman padat, dan penyediaan bantuan peningkatan kualitas rumah.
2. **Mengendalikan ekspansi lahan terbangun melalui perencanaan tata ruang yang lebih adaptif**: Rasio lahan terbangun yang masih tinggi menandakan perlunya pengendalian pembangunan horizontal dan mendorong pembangunan vertikal di titik-titik strategis.
3. **Memperkuat kapasitas penanggulangan bencana dan perlindungan kelompok rentan**: Dengan jumlah penduduk terdampak bencana yang masih relatif besar, kapasitas mitigasi dan respons bencana di Makassar perlu diperkuat melalui sistem peringatan dini, tata kelola risiko di kawasan rawan banjir/rob, serta peningkatan ketahanan masyarakat rentan di wilayah pesisir dan bantaran sungai.
4. **Memperluas layanan pengelolaan sampah dan meningkatkan kualitas udara perkotaan**: Akses pengumpulan sampah rumah tangga (80%) dan sampah terkelola (60%) masih perlu ditingkatkan melalui optimasi layanan, perluasan bank sampah, serta integrasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
5. **Menambah dan mengamankan akses terhadap ruang terbuka hijau dan ruang publik inklusif**: Dengan proporsi RTH kota baru mencapai yang masih cukup kecil, perlu dilakukan melalui perlindungan kawasan hijau eksisting, revitalisasi taman kota, dan integrasi RTH dalam pengembangan kawasan baru. Langkah ini juga mendukung keamanan publik dengan menurunkan risiko kejahatan di ruang publik.

Dengan mengintegrasikan penguatan layanan dasar kota, pengendalian

pertumbuhan ruang, peningkatan kualitas lingkungan, serta penyediaan ruang publik yang lebih aman dan inklusif, Kota Makassar dapat bergerak menuju pembangunan wilayah yang lebih berkelanjutan. Pelaksanaan arah kebijakan ini menuntut sinergi lintas sektor, pelibatan masyarakat, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pertumbuhan kota tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berkeadilan.

Tabel VI.16
Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 11, Membangun Kota dan Pemukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.										
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	80,50	82,7	83,7	82,7	83,7	47	Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 15 Kecamatan
11.3 Pada tahun 2030 meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas partisipasi, serta perencanaan dan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi										
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Badan Informasi Geospasial, BRIN, BPS	Rasio	1,80	1,68	1,62	1,68	1,62	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Tata Ruang, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
11.5 : Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak , dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB Global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										
11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB: Geoportal data bencana Indonesia BNPB	Jumlah	65	54	50	54	50	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran
11.6 : Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	80	83,0	84,5	83,0	84,5	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional (kota) yang terkelola	Kemen LHK, Dir Pengelolaan Sampah, Dirjen PSLB3, SIPSN	%	60	64,0	66,0	64,0	66,0	Belum ada capaian karena merupakan	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
									indikator baru	
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikular khusus PM 10	Kemen LHK, BMKG	Rata-Rata	11,87	11,5	11,3	11,5	11,3	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan	Angka Indeks	75	75,52	75,82	75,52	75,82	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Lingkungan Hidup
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.										
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	LAPAN: citra satelit, Kementerian PUPR, Kementerian LHK	%	15	16,0	16,5	16,0	16,5	Belum ada capaian karena merupakan	Dinas Tata Ruang

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
									indikator baru	
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	0,04	0,036	0,034	0,036	0,034	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Satpol PP

6.6.12. Tujuan 12, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Kota Makassar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan menanggung beban lingkungan yang semakin meningkat, terutama terkait tingginya timbulan sampah, limbah B3, serta rendahnya efisiensi produksi dan konsumsi. Baseline 2024 menunjukkan persentase sisa makanan dan jumlah limbag B3 per kapita yang relatif masih berada pada angka tinggi, dan tingkat daur ulang sampah yang masih belum optimal. Kondisi ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pola produksi dan konsumsi yang lebih efisien, rendah limbah, dan ramah lingkungan di seluruh sektor rumah tangga, dunia usaha, dan pemerintahan. Untuk memastikan transformasi menuju sistem konsumsi-produksi berkelanjutan Kota Makassar perlu mengarahkan kebijakan pada upaya strategis untuk menekan timbulan sampah, meningkatkan pengelolaan limbah, serta mendorong peran aktif sektor swasta dan masyarakat.

1. **Mengurangi timbulan sampah pangan melalui edukasi dan manajemen rantai pasok:** Persentase sisa makanan yang masih tinggi menuntut kebijakan edukasi konsumsi pangan rumah tangga, optimalisasi distribusi bahan pangan, serta pengembangan program pemanfaatan kembali makanan berlebih.
2. **Memperluas pengelolaan limbah B3 dan meningkatkan penanganan yang aman:** Dengan limbah B3 per kapita yang masih cukup tinggi dan target penurunan bertahap, kota perlu memperkuat fasilitas pengelolaan limbah B3, memperluas pengawasan industri kecil, menengah, serta mendorong kepatuhan terhadap standar penanganan limbah berbahaya.
3. **Mendorong peningkatan kapasitas daur ulang dan ekonomi sirkular:** Target kenaikan jumlah sampah yang didaur ulang mengharuskan penguatan ekosistem daur ulang, seperti perluasan bank sampah, fasilitas pengolahan material properti, dan kemitraan dengan sektor swasta dalam skema *waste-to-product*.
4. **Meningkatkan adopsi standar keberlanjutan oleh dunia usaha:** Jumlah perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutan serta yang tersertifikasi ISO 14001 terus ditargetkan meningkat hingga 2030. Pemerintah Kota Makassar perlu memperkuat insentif, pendampingan, dan kolaborasi dengan pelaku usaha agar standar produksi ramah lingkungan dapat diterapkan secara lebih luas.
5. **Memperluas pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan:** Peningkatan jumlah sekolah dan komunitas peduli lingkungan dari 95 menjadi 135 pada 2030 perlu dipercepat melalui integrasi materi lingkungan dalam pendidikan, kegiatan aksi lingkungan di sekolah, dan gerakan masyarakat peduli sampah sebagai bagian dari budaya urban Makassar.

Penguatan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab merupakan

salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan Kota Makassar tidak menghasilkan tekanan lingkungan yang berlebihan. Melalui pengurangan timbulan sampah, peningkatan pengelolaan limbah, adopsi standar keberlanjutan oleh dunia usaha, serta peningkatan kesadaran masyarakat, Makassar dapat beralih menuju ekonomi yang lebih efisien dan berketahanan.

Tabel VI.17
Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global per kapita pada tingkat retail dan konsumen serta mengurangi kerugian makananan sepanjang produksi dan rantai makanan, termasuk kerugian paska panen.										
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK	%	48	45,6	44,4	45,6	44,4	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Lingkungan Hidup
12.4 : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	Kemen LHK	%							Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
12.4.2	(a) Jumlah limbah B3 per kapita;	Kemen LHK	Kg	4,4	4,18	4,08	4,18	4,08	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Lingkungan Hidup
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	Kemen LHK	%	60	68,3	72,5	68,3	72,5	Belum ada capaian karena merupaka n indikator baru	Dinas Lingkungan Hidup
12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Kemen LHK: SIPSN	Ton	130688	153092	164294	153092	164294	340,74	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										
12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutan (Sustainability Report)	Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah	18	22	24	22	24	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Lingkungan Hidup
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Kemen LHK	Jumlah	28	32	35	32	35	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.										
12.8.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga / komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Kemen LHK	Jumlah	95	107	113	107	113	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Lingkungan Hidup
12.b : Mengembangan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal										
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development)	Kementerian Pariwisata	Jumlah	19	21	22	21	22	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Pariwisata

6.6.13. Tujuan 13, Penanganan Perubahan Iklim

Kota Makassar merupakan wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir rob, curah hujan ekstrem, angin kencang, dan gelombang tinggi. Baseline 2024 menunjukkan jumlah korban terdampak bencana hidrometeorologi masih berada pada angka tinggi. Meskipun ditargetkan menurun, tantangan adaptasi iklim di Makassar tetap besar karena kerentanan wilayah pesisir, urbanisasi padat, dan masih terbatasnya infrastruktur mitigasi yang terintegrasi. Untuk memastikan Kota Makassar mampu beradaptasi terhadap risiko iklim yang meningkat, kebijakan yang diambil perlu diarahkan pada penguatan ketahanan wilayah, peningkatan kapasitas sistem peringatan dini, serta pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

1. **Penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan perlindungan kawasan pesisir:** Normalisasi kanal, peningkatan kapasitas drainase, serta penguatan tanggul dan sabuk hijau pesisir diperlukan untuk mengurangi potensi banjir dan dampak rob yang menjadi penyebab utama tingginya jumlah penduduk terdampak.
2. **Optimalisasi sistem peringatan dini dan respons cepat kebencanaan:** Pemanfaatan teknologi informasi untuk peringatan dini, disertai peningkatan koordinasi antarlembaga dan kapasitas respons kelurahan, akan membantu meminimalkan korban terdampak saat kejadian ekstrem.
3. **Penguatan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan:** Edukasi risiko, latihan evakuasi, dan pembentukan komunitas siaga bencana membantu mempercepat reaksi masyarakat ketika terjadi bencana hidrometeorologi.

Dengan fokus pada penguatan infrastruktur adaptif, sistem peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat, Kota Makassar dapat menurunkan dampak bencana secara signifikan menuju 2030. Upaya ini akan meningkatkan ketahanan kota sekaligus memastikan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Tabel VI.18
Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara										
13.1.1.(a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	BNPB: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI)	Jumlah	165	140	129	140	129	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6.6.14. Tujuan 16, Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh

Sebagai kota metropolitan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan mobilitas penduduk di kawasan timur Indonesia, Makassar membutuhkan sistem keamanan dan kelembagaan yang kuat untuk memastikan stabilitas sosial serta perlindungan bagi seluruh warganya. Berbagai isu seperti tindak kekerasan, kejahatan yang melibatkan kelompok rentan, akses yang belum merata terhadap bantuan hukum, serta kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan responsif, menuntut perhatian serius. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan publik menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjamin terciptanya lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi keadilan. Dalam rangka memperkuat fondasi perdamaian, keamanan, dan tata kelola yang efektif, Kota Makassar perlu memfokuskan arah kebijakan pada upaya yang paling relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat:

1. **Penguatan sistem pencegahan dan penanganan kejahatan kekerasan**: Makassar perlu meningkatkan kualitas pengawasan lingkungan melalui patroli terpadu, pemanfaatan teknologi seperti CCTV berbasis *smart city*, dan pelibatan masyarakat dalam forum keamanan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.
2. **Memperluas perlindungan terhadap perempuan dan anak dari TPPO dan kekerasan**: Peningkatan layanan perlindungan, penyediaan fasilitas aman seperti *shelter*, layanan psikososial, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku menjadi kunci untuk menurunkan risiko bagi kelompok rentan.
3. **Memperkuat akses masyarakat miskin terhadap layanan bantuan hukum**: Kemudahan akses, sosialisasi yang lebih aktif, serta kemitraan dengan lembaga bantuan hukum dan perguruan tinggi diperlukan untuk memastikan kelompok rentan memperoleh dukungan hukum yang memadai.
4. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif**: Digitalisasi layanan, penguatan kapasitas aparatur, dan monitoring berbasis data dibutuhkan untuk menjaga kualitas layanan publik serta memastikan lembaga pemerintah tetap transparan dan dapat dipercaya.
5. **Mendorong inklusivitas dalam pengambilan keputusan publik**: Kebijakan afirmatif, peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan, serta penyediaan ruang partisipasi publik yang lebih luas dapat memperkuat representasi kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan memperkuat keamanan, akses terhadap keadilan, dan tata kelola pemerintahan, Kota Makassar dapat menciptakan ekosistem sosial-politik yang lebih stabil dan inklusif. Implementasi arah kebijakan ini menjadi landasan penting untuk

memastikan tercapainya Tujuan 16, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan yang adil, aman, dan berpihak pada seluruh warga hingga 2030.

Tabel VI.19
Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
16.1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun										
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kepolisian Daerah Republik Indonesia (Polda)	Jumlah	14	13	12	13	12	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Satpol PP
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Polda, BPS	Jumlah							Satpol PP
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	BPS: Susenas Modul KOR	%	0,04	0,036	0,034	0,036	0,034	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Satpol PP

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.										
16.2.2.	Angka korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan jenis eksploitasi	Kemen PPPA: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI)	Jumlah	14	12	11	12	11	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.3 : Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua										
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	BPS: Susenas Modul KOR	%	63	67	69	67	69	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Satpol PP
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Kemenkumham, Badan Pembinaan Hukum	%	0,16	0,20	0,22	0,20	0,22	Belum ada capaian	Dinas Sosial

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
		Nasional (BPHN): Sistem Informasi Database Bantuan Hukum							karena merupakan indikator baru	
16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK	%	100	100	100	100	100	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	BPKAD, Inspektorat Daerah
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Kemenpan RB	%	100	100	100	100	100	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Bagian Ortala

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Kemenpan RB	%	100	100	100	100	100	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Bagian Ortala
16.6.2.(a)	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Ombudsman RI	Jumlah	1	1	1	1	1	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Sekretariat Daerah (SETDA)
16.7 : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	KPU	%	16	16	16	16	16	Belum ada capaian karena merupakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
									indikator baru	Sekretariat DPRD, BKPSDM
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	%	22	22	22	22	22	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan, BKPSDM
16.9 : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil	BPS: Susenas Modul KOR	%	92	94	95	94	95	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	BPS: Susenas Modul KOR	%	93,7	95,2	95,8	95,2	95,8	96,67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	BPS: Susenas Modul KOR	%	94,8	95,7	96,10	95,7	96,10	98,92	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.10 : Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif	Komisi Informasi Pusat: Monev Keterbukan	Jumlah							Sekretariat Daerah (SETDA)

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
		Informasi Badan Publik								
16.b : Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.										
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah	0	0	0	0	0	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat DPRD, Kesbangpol

6.6.15. Tujuan 17, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar membutuhkan dukungan kemitraan yang kuat, baik melalui optimalisasi mobilisasi sumber daya domestik, peningkatan kapasitas fiskal, kolaborasi pemerintah–swasta, maupun pemanfaatan teknologi dan inovasi. Sebagai kota besar yang berperan dalam konektivitas ekonomi kawasan timur Indonesia, Makassar dihadapkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pendapatan daerah, memperluas kerja sama strategis lintas sektor, dan mempercepat adopsi teknologi digital yang mendukung layanan publik serta produktivitas masyarakat. Dengan memperkuat kolaborasi pada semua tingkatan, Makassar dapat menciptakan fondasi yang lebih solid untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk memastikan kemitraan yang efektif dan peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan, kebijakan perlu difokuskan pada penguatan sistem fiskal, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi multipihak yang lebih produktif.

1. **Memperkuat mobilisasi pendapatan daerah dan kapasitas fiskal**: Peningkatan efektivitas penerimaan pajak daerah dan optimalisasi sumber pendapatan lain perlu dilakukan untuk memperbesar ruang fiskal, termasuk melalui modernisasi sistem perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan integrasi data keuangan daerah.
2. **Mendorong pemanfaatan teknologi dan perluasan infrastruktur digital**: Cakupan jaringan serat optik yang sudah sangat luas perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong transformasi digital layanan publik, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan berbasis internet.
3. **Meningkatkan literasi dan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat**: Dengan tren peningkatan pengguna internet tiap tahun, pemerintah perlu memperkuat edukasi digital, mengembangkan pusat layanan teknologi di tingkat kecamatan/kelurahan, serta mendorong pemanfaatan teknologi untuk pendidikan, ekonomi kreatif, dan UMKM.
4. **Mendorong kemitraan pemerintah–swasta melalui skema KPBU**: Agar pembangunan infrastruktur berjalan lebih cepat dan efisien, Kota Makassar dapat memperluas penawaran proyek KPBU yang strategis, termasuk di bidang

transportasi, air bersih, energi, dan layanan digital. Hal ini mendukung peningkatan jumlah proyek KPBU yang ditargetkan dalam RAD.

5. **Memperkuat kerja sama regional, nasional, dan internasional**: Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah daerah lain, serta organisasi internasional perlu ditingkatkan untuk memperluas pertukaran pengetahuan, inovasi, dan pendampingan teknis pada sektor-sektor prioritas pembangunan daerah.

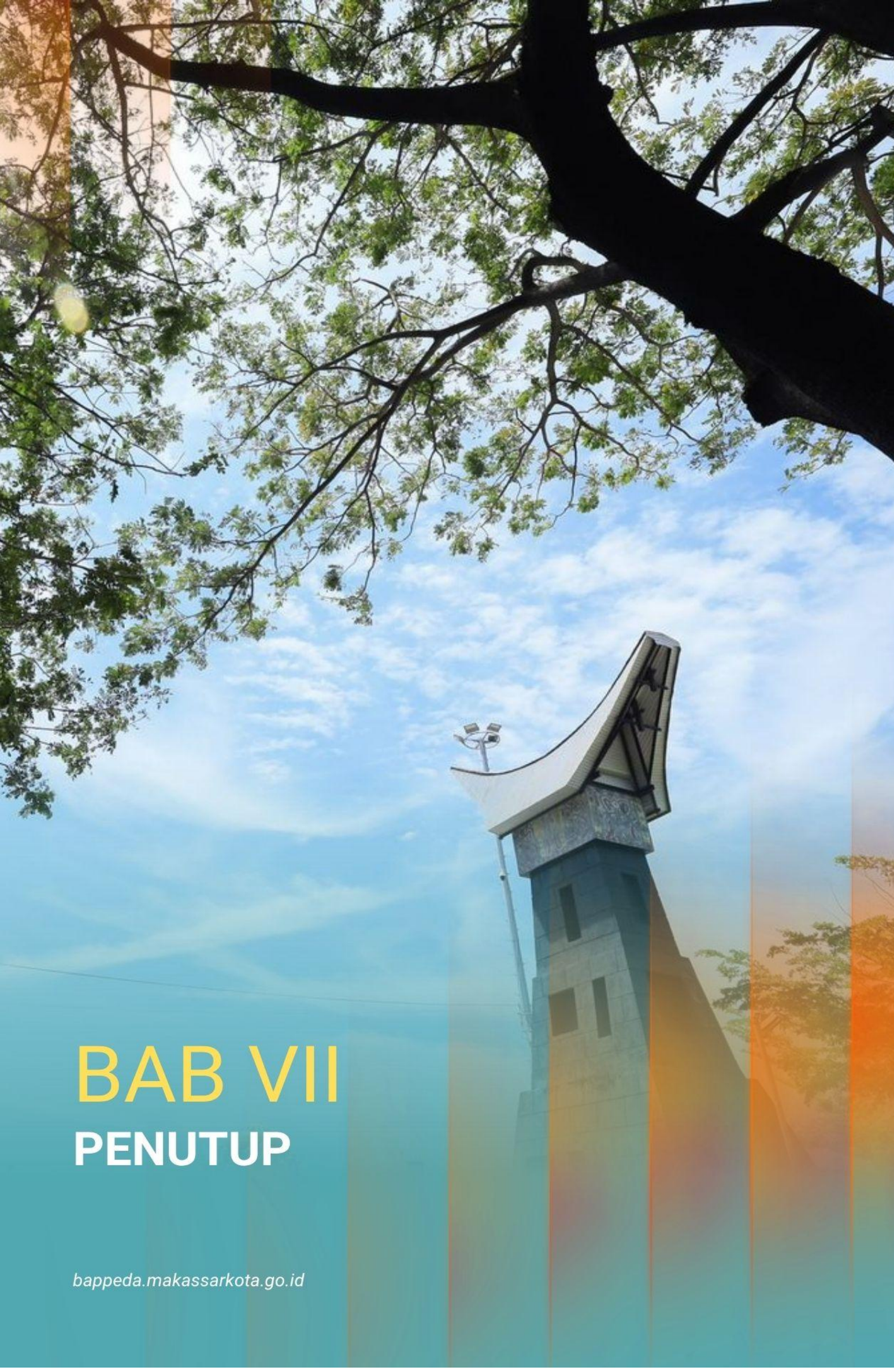
Dengan memperkuat kapasitas fiskal, memanfaatkan teknologi secara lebih luas, serta membangun ekosistem kemitraan yang solid antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan mitra internasional, Kota Makassar dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan dan mempercepat pencapaian target SDGs. Arah kebijakan ini menjadi pondasi penting untuk menggerakkan pembangunan yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan hingga tahun 2030.

Tabel VI.20
Target Pencapaian Indikator SDGS Tujuan 17, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1	Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	Badan Pendapatan Daerah, Badan Pusat Statistik	%	2,83	2,93	2,98	2,93	2,98	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Bapenda
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Badan Pendapatan Daerah, Badan Pusat Statistik	%	0,58	0,63	0,66	0,63	0,66	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Bapenda
17.1.2	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD)	%	37,48	38,30	38,70	38,30	38,70	Belum ada capaian Karena merupakan indikator baru	BPKAD

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	Kementrian Komunikasi dan Informatika	%	100	100	100	100	100	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Komunikasi dan Inofrmatika
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi										
17.8.1	Persentase pengguna internet	Badan Pusat Statisik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	84,0	86,9	88,2	86,9	88,2	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Komunikasi dan Inofrmatika

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (*Baseline*) Tahun 2024	Target RPJMD		Target Pencapaian		Realisasi Target	SKPD Terkait
					2026	2027	2026	2027	2025	
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.										
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementrian Keuangan, Kementrian PPN/Bappenas, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM, Kominfo, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemda	Jumlah	2	2	3	2	3	Belum ada capaian karena merupakan indikator baru	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Penataan Ruang



BAB VII
PENUTUP

BAB VII
P E N U T U P

Bab Penutup Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Makassar Tahun 2026 terdiri atas dua subbab, yaitu Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan. Kedua subbab tersebut memuat ketentuan umum mengenai pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 serta penegasan terhadap komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Makassar Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kaidah pelaksanaan ini menegaskan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD harus dilaksanakan secara konsisten dengan tetap memperhatikan hasil penyesuaian terhadap RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, serta Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Dengan demikian, pelaksanaan Perubahan RKPD diharapkan mampu menjaga kesinambungan, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kota Makassar guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Makassar dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada semester akhir Tahun 2026. Penyusunan Perubahan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD, serta memperhatikan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, penyusunannya juga mengedepankan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Dalam pelaksanaannya, penyusunan dokumen ini juga memperhatikan pendekatan pembangunan yang bersifat holistik-tematik, integratif, dan spasial guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Selain itu, dokumen ini merupakan instrumen strategis bagi seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui penguatan tata kelola

pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Selanjutnya, P-RKPD Kota Makassar Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2026 dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini juga memberikan kepastian arah kebijakan, sasaran, serta program prioritas pembangunan yang menjadi komitmen Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Penerapan manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026. Seluruh perangkat daerah agar mengintegrasikan proses manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program, kegiatan, serta subkegiatan guna mengantisipasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat tata kelola yang baik, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara akuntabel.

Dengan tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Makassar Tahun 2026, diharapkan dokumen ini menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Melalui implementasi yang konsisten, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan diharapkan dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran, target, dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

Secara substansial, memuat arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, prioritas pembangunan, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi pelaksanaan, prakiraan maju, serta Perangkat Daerah penanggung jawab yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dalam Tahun Anggaran 2026.

Secara normatif, menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), yang selanjutnya disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

Secara operasional, menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) serta melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara fungsional, menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran, target, serta indikator kinerja pembangunan, sekaligus sebagai dasar dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

7.2. Kesimpulan

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Makassar Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD, perkembangan kondisi dan dinamika pembangunan daerah, perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, serta kebutuhan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan, target kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, dan alokasi anggaran. Perubahan RKPD juga dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan pendanaan yang belum terakomodasi dalam RKPD Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran daerah.
3. Untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar Tahun 2026, diperlukan pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan, percepatan pelaksanaan pembangunan, serta penyempurnaan proses perencanaan dan penganggaran daerah.
4. Dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs), Pemerintah Kota Makassar perlu mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta sumber pendanaan sah lainnya yang dapat disinergikan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
5. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan target pembangunan daerah memerlukan komitmen, integritas, kerja sama, partisipasi aktif, konsistensi, dan disiplin yang tinggi dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan serta pemangku kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.
6. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2026 sangat ditentukan oleh kuatnya koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antarperangkat daerah, didukung dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang efektif, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar perlu terus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan secara konsisten agar pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung terwujudnya "Makassar Mulia Kotanya, Mulia Warganya."

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Lampiran

Formulir Evaluasi Hasil Renja
Kota Makassar Periode
Pelaksanaan Tahun 2026

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA
KOTA MAKASSAR
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2026

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.828.579.344.000,0	2.792.269.503.359,0		445.131.214.811,0		428.838.664.833,0		873.969.879.644,0		31,30		873.969.879.644,0		5,80		
	1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.227.015.573.000,0	1.261.947.737.961,0		313.496.867.990,0		193.497.632.214,0		506.994.500.204,0		40,18		506.994.500.204,0		7,71		
	1	01		Dinas Pendidikan				1.227.015.573.000,0	1.261.947.737.961,0		313.496.867.990,0		193.497.632.214,0		506.994.500.204,0		40,18		506.994.500.204,0				
	1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	946.570.341.473,0	933.693.745.851,0	29,17	279.993.357.990,0	4,16	186.580.173.917,0	33,33	466.573.531.907,0	33,33	49,97	33,33	466.573.531.907,0	33,33	9,85	Dinas Pendidikan	
	1	01	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												42,15	49,97			42,15	9,85		
	1	01	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)	%	72,19	280.112.708.127,0	328.007.918.710,0	0,0	33.503.510.000,0	0,0	6.917.458.297,0	0,0	40.420.968.297,0	0,0	12,32	0,0	40.420.968.297,0	0,0	2,20	Dinas	
	1	01	02	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												69,61	12,32			63,19	2,20		
	1	01	02	PREDIKAT KINERJA												SEDANG	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang Mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	100,0	111.195.400,0	118.245.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		Dinas Pendidikan	
	1	01	03	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	0,0			0,0	0,0		
	1	01	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	%	77,22	123.015.000,0	18.015.000,0	0,0	0,0	65,82	0,0	65,82	0,0	85,24		65,82	0,0	83,09		Dinas Pendidikan	
	1	01	04	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												76,75	0,0			75,67	0,0		
	1	01	04	PREDIKAT KINERJA												TINGGI	SANGAT RENDAH			SEDANG	SANGAT RENDAH		
	1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	%	38,38	98.313.000,0	109.813.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		Dinas Pendidikan	
	1	01	05	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	0,0			0,0	0,0		
	1	01	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				653.064.509.000,0	631.790.065.029,0		89.899.701.032,0		136.947.159.304,0		226.846.860.336,0		35,91		226.846.860.336,0		6,85		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	1	02		Dinas Kesehatan				653.064.509.000,0	631.790.065.029,0		89.899.701.032,0		136.947.159.304,0		226.846.860.336,0		35,91		226.846.860.336,0				
	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	448.056.814.983,0	426.385.448.340,0	15,0	66.731.871.598,0	23,46	96.469.444.120,0	38,46	163.201.315.718,0	38,46	38,28	38,46	163.201.315.718,0	38,46	7,87	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												38,08	38,28			38,08	7,87		
	1	02	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,0	192.872.820.257,0	190.055.108.184,0	23,42	23.159.292.200,0	21,75	37.380.103.873,0	45,17	60.539.396.073,0	45,17	31,85	45,17	60.539.396.073,0	45,17	5,15	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												48,87	31,85			48,87	5,15		
	1	02	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	90,0	344.365.500,0	1.305.533.960,0	0,0	0,0	15,44	166.113.857,0	15,44	166.113.857,0	17,16	12,72	15,44	166.113.857,0	15,44	6,69	Dinas Kesehatan	
	1	02	03	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												17,16	12,72			15,44	6,69		
	1	02	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	100,0	517.110.080,0	919.060.100,0	0,0	8.537.234,0	56,10	201.878.254,0	56,10	210.415.488,0	56,10	22,89	56,10	210.415.488,0	56,10	7,58	Dinas Kesehatan	
	1	02	04	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												56,10	22,89			56,10	7,58		
	1	02	04	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	25,0	11.273.398.180,0	13.124.914.445,0	0,0	0,0	16,69	2.729.619.200,0	16,69	2.729.619.200,0	66,76	20,80	16,69	2.729.619.200,0	16,69	5,02	Dinas Kesehatan	
	1	02	05	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												66,76	20,80			16,69	5,02		
	1	02	05	PREDIKAT KINERJA												SEDANG	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				762.360.437.000,004	682.007.426.299,0		15.494.640.584,0		58.684.128.158,0		74.178.768.742,0		10,88		74.178.768.742,0		1,77		
	1	03		Dinas Pekerjaan Umum				735.351.098.000,004	645.284.770.379,0		12.660.529.729,0		54.585.305.407,0		67.245.835.136,0		10,42		67.245.835.136,0				
	1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	57.457.252.345,23	51.366.678.536,0	5,13	7.537.206.891,0	3,85	14.833.109.560,0	8,98	22.370.316.451,0	8,98	43,55	8,98	22.370.316.451,0	8,98	7,62	Dinas Pekerjaan Umum	
	1	03	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												51,07	43,55			51,07	7,62		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	1	0 3	0 1	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	0 3	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kota Makassar	%	54,85	16.755.034.000,0	7.310.356.582,0	0,0	23.190.700,0	100,0	1.873.692.431,0	100,0	1.896.883.131,0	182,32	25,95	100,0	1.896.883.131,0	155,40	0,81	Dinas Pekerjaan Umum	
	1	0 3	0 2	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												141,16	25,95			127,70	0,81		
	1	0 3	0 2	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	1	0 3	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan	%	4,12	29.938.498.440,0	18.778.645.938,0	0,0	2.400.000,0	5,24	385.586.450,0	5,24	387.986.450,0	127,18	2,07	5,24	387.986.450,0	109,85	0,27	Dinas Pekerjaan Umum	
	1	0 3	0 3	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												168,86	2,07			104,93	0,27		
	1	0 3	0 3	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	1	0 3	0 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) akses aman	%	10,28	46.076.421.650,796	24.981.109.053,0	0,0	716.393.152,0	9,99	2.648.511.411,0	9,99	3.364.904.563,0	97,18	13,47	9,99	3.364.904.563,0	57,48	1,61	Dinas Pekerjaan Umum	
	1	0 3	0 5	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												70,16	13,47			35,80	1,61		
	1	0 3	0 5	PREDIKAT KINERJA												SEDANG	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	0 3	0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Persentase drainase dalam kondisi baik	%	57,81	80.545.042.787,978	53.594.215.197,0	0,0	2.834.587.556,0	92,90	8.412.829.869,0	92,90	11.247.417.425,0	160,70	20,99	92,90	11.247.417.425,0	138,26	2,77	Dinas Pekerjaan Umum	
	1	0 3	0 6	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												160,70	20,99			138,26	2,77		
	1	0 3	0 6	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	1	0 3	0 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	49,65	293.222.389.350,0	283.882.923.538,0	0,0	638.055.656,0	22,60	9.226.405.294,0	22,60	9.864.460.950,0	45,52	3,47	22,60	9.864.460.950,0	37,45	0,65	Dinas Pekerjaan Umum	
	1	0 3	0 8	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												45,52	3,47			37,45	0,65		
	1	0 3	0 8	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	0 3	0 9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	4,06	1.290.769.500,0	18.319.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		Dinas Pekerjaan Umum	
	1	0 3	0 9	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	0,0			0,0	0,0		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	1	03	09	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	%	88,74	204.380.997.746,0	204.177.476.835,0	0,0	803.970.774,0	57,82	16.837.022.072,0	57,82	17.640.992.846,0	65,16	8,64	57,82	17.640.992.846,0	59,58	1,46	Dinas Pekerjaan Umum	
	1	03	10	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												65,16	8,64			59,58	1,46		
	1	03	10	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	37,44	5.684.692.180,0	1.175.045.200,0	0,0	104.725.000,0	14,55	368.148.320,0	14,55	472.873.320,0	38,86	40,24	14,55	472.873.320,0	27,23	1,93	Dinas Pekerjaan Umum	
	1	03	11	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												38,86	40,24			27,23	1,93		
	1	03	11	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	03		Dinas Penataan Ruang				27.009.339.000,0	36.722.655.920,0		2.834.110.855,0		4.098.822.751,0		6.932.933.606,0		18,88		6.932.933.606,0				
	1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	20.367.049.700,0	19.678.726.520,0	25,0	2.417.501.673,0	0,0	3.258.982.806,0	25,0	5.676.484.479,0	25,0	28,85	25,0	5.676.484.479,0	25,0	5,63	Dinas Penataan Ruang	
	1	03	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												24,81	28,85			24,81	5,63		
	1	03	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pengendalian penyelenggaraan perizinan bangunan gedung	%	100,0	1.777.287.620,0	3.730.935.600,0	25,0	35.875.000,0	0,0	337.035.362,0	25,0	372.910.362,0	25,0	10,0	25,0	372.910.362,0	25,0	3,0	Dinas Penataan Ruang	
	1	03	08	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												25,0	10,0			25,0	3,0		
	1	03	08	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	%	100,0	4.865.001.680,0	13.312.993.800,0	25,0	380.734.182,0	0,0	502.804.583,0	25,0	883.538.765,0	25,0	6,64	25,0	883.538.765,0	25,0	2,87	Dinas Penataan Ruang	
	1	03	12	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												25,0	6,64			25,0	2,87		
	1	03	12	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				45.348.554.000,0	58.569.871.095,0		2.343.042.223,0		6.838.815.589,0		9.181.857.812,0		15,68		9.181.857.812,0		3,68		
	1	04		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman				45.348.554.000,0	58.569.871.095,0		2.343.042.223,0		6.838.815.589,0		9.181.857.812,0		15,68		9.181.857.812,0				
	1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	90,0	19.790.132.385,0	22.664.654.787,0	10,0	1.951.074.301,0	23,0	5.001.901.056,0	33,0	6.952.975.357,0	36,67	30,68	33,0	6.952.975.357,0	36,67	7,18	Dinas Perumahan	

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	1	04	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												42,22	30,68			42,22	7,18		
	1	04	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,0	3.905.394.100,0	7.551.820.180,0	0,0	203.405.827,0	20,0	396.124.154,0	20,0	599.529.981,0	20,0	7,94	20,0	599.529.981,0	20,0	2,71	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
	1	04	02	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												10,0	7,94			10,0	2,71		
	1	04	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh < 10 Ha yang ditangani	%	15,0	10.779.803.615,0	14.128.302.128,0	5,0	20.629.464,0	11,0	106.536.732,0	16,0	127.166.196,0	106,67	0,90	16,0	127.166.196,0	106,67	0,20	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
	1	04	03	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												106,67	0,90			106,67	0,20		
	1	04	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni pada wilayah pencegahan kumuh	%	3,69	3.055.410.500,0	12.618.175.700,0	1,0	148.925.265,0	2,0	1.125.923.040,0	3,0	1.274.848.305,0	81,30	10,10	3,0	1.274.848.305,0	71,77	9,67	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
	1	04	04	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												81,30	10,10			71,77	9,67		
	1	04	04	PREDIKAT KINERJA												TINGGI	SANGAT RENDAH			SEDANG	SANGAT RENDAH		
	1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum	%	100,0	7.817.813.400,0	1.606.918.300,0	20,0	19.007.366,0	25,0	208.330.607,0	45,0	227.337.973,0	45,0	14,15	45,0	227.337.973,0	45,0	0,42	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
	1	04	05	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												45,0	14,15			45,0	0,42		
	1	04	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				116.139.291.000,0	133.505.255.095,0		20.603.136.180,0		28.218.281.878,0		48.821.418.058,0		36,57		48.821.418.058,0		7,82		
	1	05		Satuan Polisi Pamong Praja				41.388.278.000,0	42.865.711.340,0		8.037.679.917,0		10.066.266.474,0		18.103.946.391,0		42,23		18.103.946.391,0				
	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	16.152.377.800,0	30.780.589.840,0	0,0	6.206.679.917,0	0,0	7.096.017.084,0	0,0	13.302.697.001,0	0,0	43,22	0,0	13.302.697.001,0	0,0	17,04	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	05	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												31,34	43,22			31,34	17,04		
	1	05	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	%	100,0	25.235.900.200,0	12.085.121.500,0	5,93	1.831.000.000,0	23,0	2.970.249.390,0	28,93	4.801.249.390,0	28,93	39,73	28,93	4.801.249.390,0	28,93	3,71	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	05	02	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												28,93	39,73			28,93	3,71		
	1	05	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	05		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				51.693.138.000,0	52.688.311.500,0		8.331.745.341,0		10.873.563.855,0		19.205.309.196,0		36,45		19.205.309.196,0				
	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	33.017.529.760,0	34.957.124.780,0	0,0	5.034.692.971,0	100,0	6.482.059.920,0	100,0	11.516.752.891,0	100,0	32,95	100,0	11.516.752.891,0	100,0	6,39	Dinas Pemadam Kebakaran	
	1	05	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100,0	32,95			100,0	6,39		
	1	05	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,0	18.675.608.240,0	17.731.186.720,0	0,0	3.297.052.370,0	100,0	4.391.503.935,0	100,0	7.688.556.305,0	100,0	43,36	100,0	7.688.556.305,0	100,0	7,49	Dinas Pemadam Kebakaran	
	1	05	04	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100,0	43,36			100,0	7,49		
	1	05	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	1	05		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				23.057.875.000,0	37.951.232.255,0		4.233.710.922,0		7.278.451.549,0		11.512.162.471,0		30,33		11.512.162.471,0				
	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	15.242.703.040,0	19.073.886.845,0	25,0	2.667.664.805,0	25,0	3.018.240.771,0	50,0	5.685.905.576,0	50,0	29,81	50,0	5.685.905.576,0	50,0	6,50	Badan Penanggulangan Bencana	
	1	05	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												51,85	29,81			51,85	6,50		
	1	05	01	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,0	7.815.171.960,0	18.877.345.410,0	10,0	1.566.046.117,0	25,0	4.260.210.778,0	35,0	5.826.256.895,0	35,0	30,86	35,0	5.826.256.895,0	35,0	12,58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												37,67	30,86			37,67	12,58		
	1	05	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				24.650.979.999,998	24.449.147.880,0		3.293.826.802,0		4.652.647.690,0		7.946.474.492,0		32,50		7.946.474.492,0		6,35		
	1	06		Dinas Sosial				24.650.979.999,998	24.449.147.880,0		3.293.826.802,0		4.652.647.690,0		7.946.474.492,0		32,50		7.946.474.492,0				
	1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	%	100,0	14.027.739.713,998	16.015.779.374,0	25,0	2.819.912.882,0	25,0	3.956.426.645,0	50,0	6.776.339.527,0	50,0	42,31	50,0	6.776.339.527,0	50,0	9,72	Dinas Sosial	

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	1	06	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												39,30	42,31			39,30	9,72		
	1	06	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	%	50,0	1.281.764.400,0	1.041.146.300,0	12,50	14.000.000,0	12,50	143.896.000,0	25,0	157.896.000,0	50,0	15,17	25,0	157.896.000,0	35,71	2,35	Dinas Sosial	
	1	06	02	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	15,17			35,71	2,35		
	1	06	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,0	4.474.269.706,0	3.070.754.006,0	7,06	178.996.670,0	2,35	288.293.815,0	9,41	467.290.485,0	9,41	15,22	9,41	467.290.485,0	9,41	2,05	Dinas Sosial	
	1	06	04	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												34,57	15,22			34,57	2,05		
	1	06	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100,0	2.382.505.700,0	2.118.744.600,0	0,0	251.725.250,0	100,0	0,0	100,0	251.725.250,0	100,0	11,88	100,0	251.725.250,0	100,0	1,95	Dinas Sosial	
	1	06	05	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	11,88			50,0	1,95		
	1	06	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100,0	2.353.160.480,0	2.202.723.600,0	61,54	29.192.000,0	4,30	264.031.230,0	65,84	293.223.230,0	65,84	13,31	65,84	293.223.230,0	65,84	2,47	Dinas Sosial	
	1	06	06	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												65,84	13,31			65,84	2,47		
	1	06	06	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	%	100,0	131.540.000,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		Dinas Sosial	
	1	06	07	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0				0,0			
	1	06	07	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH			
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				708.705.111.699,997	800.884.788.067,0		74.944.871.644,0		144.868.518.152,0		219.813.389.796,0		27,45		219.813.389.796,0		6,43		
	2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				45.300.538.000,0	44.977.286.540,0		6.988.708.615,0		13.173.723.580,0		20.162.432.195,0		44,83		20.162.432.195,0		9,15		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	2	07		Dinas Ketenagakerjaan				45.300.538.000,0	44.977.286.540,0		6.988.708.615,0		13.173.723.580,0		20.162.432.195,0		44,83		20.162.432.195,0				
	2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	13.447.520.520,0	13.039.887.740,0	10,0	2.344.576.015,0	11,43	3.327.385.155,0	21,43	5.671.961.170,0	21,43	43,50	21,43	5.671.961.170,0	21,43	8,50	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	07	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												56,54	43,50			56,54	8,50		
	2	07	01	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	97,50	121.615.100,0	122.886.000,0	0,0	0,0	0,0	52.495.000,0	0,0	52.495.000,0	0,0	42,72	0,0	52.495.000,0	0,0	9,03	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	07	02	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	42,72			0,0	9,03		
	2	07	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitas-nya	%	21,21	1.725.506.000,0	1.972.391.600,0	0,0	34.375.000,0	0,0	443.471.715,0	0,0	477.846.715,0	0,0	24,23	0,0	477.846.715,0	0,0	4,75	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	07	03	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	24,23			0,0	4,75		
	2	07	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar	%	61,0	1.620.504.300,0	1.467.157.800,0	35,49	15.375.000,0	48,40	32.252.138,0	83,89	47.627.138,0	137,52	3,25	83,89	47.627.138,0	129,06	0,63	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	07	04	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												137,52	3,25			129,06	0,63		
	2	07	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerja-an)	%	41,0	28.385.392.080,0	28.374.963.400,0	0,0	4.594.382.600,0	0,0	9.318.119.572,0	0,0	13.912.502.172,0	0,0	49,03	0,0	13.912.502.172,0	0,0	10,27	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	07	05	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	49,03			0,0	10,27		
	2	07	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				21.081.710.000,0	24.231.048.600,0		3.623.368.359,0		5.232.038.242,0		8.855.406.601,0		36,55		8.855.406.601,0		9,64		
	2	08		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				21.081.710.000,0	24.231.048.600,0		3.623.368.359,0		5.232.038.242,0		8.855.406.601,0		36,55		8.855.406.601,0				
	2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	11.172.517.808,0	11.279.217.108,0	15,0	1.722.013.663,0	30,0	2.797.135.155,0	45,0	4.519.148.818,0	45,0	40,07	45,0	4.519.148.818,0	45,0	8,21	Dinas Pemberdayaan	

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
									I		II													
						K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	2	08	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												46,67	40,07			46,67	8,21		
	2	08	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	75,0	5.521.945.100,0	5.589.545.100,0	10,0	533.930.000,0	20,0	1.616.015.500,0	30,0	2.149.945.500,0	40,0	38,46	30,0	2.149.945.500,0	31,58	16,41	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
	2	08	02	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												40,0	38,46			31,58	16,41		
	2	08	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	%	1,0	2.186.910.844,0	3.011.564.444,0	0,25	670.295.810,0	0,10	210.776.960,0	0,35	881.072.770,0	35,0	29,26	0,35	881.072.770,0	58,33	7,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
	2	08	03	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												35,0	29,26			58,33	7,70		
	2	08	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar		293,0	470.002.300,0	749.586.300,0	30,96	172.112.220,0	100,0	87.662.260,0	130,96	259.774.480,0	44,70	34,66	423,96	259.774.480,0	41,84	10,42	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
	2	08	04	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												44,70	34,66			41,84	10,42		
	2	08	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	65,0	89.540.700,0	83.940.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
	2	08	05	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	0,0			0,0	0,0		
	2	08	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	65,55	396.841.200,0	1.179.021.600,0	9,50	95.477.000,0	10,0	176.760.000,0	19,50	272.237.000,0	29,75	23,09	19,50	272.237.000,0	27,25	12,48	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
	2	08	06	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												29,75	23,09			27,25	12,48		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II													
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16		
	2	08	06	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
	2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar	%	100,0	1.243.952.048,0	2.338.173.348,0	22,0	429.539.666,0	15,0	343.688.367,0	37,0	773.228.033,0	37,0	33,07	37,0	773.228.033,0	37,0	10,69	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan			
	2	08	07	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												37,0	33,07			37,0	10,69				
	2	08	07	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
	2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				17.002.874.000,0	20.590.125.093,0		2.182.921.380,0		3.681.771.230,0		5.864.692.610,0		28,48		5.864.692.610,0		6,85				
	2	09		Dinas Ketahanan Pangan				17.002.874.000,0	20.590.125.093,0		2.182.921.380,0		3.681.771.230,0		5.864.692.610,0		28,48		5.864.692.610,0						
	2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	11.149.980.200,0	11.112.933.078,0	47,42	2.029.682.236,0	2,45	2.423.744.694,0	49,87	4.453.426.930,0	49,87	40,07	49,87	4.453.426.930,0	49,87	8,01	Dinas Ketahanan Pangan			
	2	09	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												43,16	40,07			43,16	8,01				
	2	09	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
	2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat konsumsi energi berdasarkan Angka Kecukupan Energi	kkal/kapita	2.043,0	4.295.230.500,0	6.071.207.495,0	0,0	32.959.144,0	0,0	491.431.775,0	0,0	524.390.919,0	0,0	8,64	0,0	524.390.919,0	0,0	2,38	Dinas Ketahanan			
	2	09	03	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												26,86	8,64			25,10	2,38				
	2	09	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
	2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	1,30	544.825.300,0	1.184.809.900,0	0,0	0,0	0,0	442.750.342,0	0,0	442.750.342,0	0,0	37,37	0,0	442.750.342,0	0,0	16,81	Dinas Ketahanan Pangan			
	2	09	04	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	37,37			0,0	16,81				
	2	09	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
	2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar	%	80,0	1.012.838.000,0	2.221.174.620,0	0,0	120.280.000,0	72,55	323.844.419,0	72,55	444.124.419,0	90,69	20,0	72,55	444.124.419,0	90,69	8,27	Dinas Ketahanan Pangan			
	2	09	05	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												90,69	20,0			90,69	8,27				
	2	09	05	PREDIKAT KINERJA												TINGGI	SANGAT RENDAH			TINGGI	SANGAT RENDAH				
	2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				17.052.128.000,0	19.686.283.983,0		1.272.885.284,0		2.465.220.072,0		3.738.105.356,0		18,99		3.738.105.356,0		4,47				
	2	10		Dinas Pertanahan				17.052.128.000,0	19.686.283.983,0		1.272.885.284,0		2.465.220.072,0		3.738.105.356,0		18,99		3.738.105.356,0						

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	2	10	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	7.611.725.168,0	8.291.322.333,0	25,0	1.028.606.484,0	25,0	1.626.065.126,0	50,0	2.654.671.610,0	50,0	32,02	50,0	2.654.671.610,0	50,0	7,38	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												48,15	32,02			48,15	7,38		
	2	10	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah	%	100,0	190.693.040,0	936.735.900,0	20,0	116.180.000,0	30,0	368.979.523,0	50,0	485.159.523,0	50,0	51,79	50,0	485.159.523,0	50,0	38,46	Dinas Pertanahan	
	2	10	04	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	51,79			50,0	38,46		
	2	10	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	RENDAH			SANGAT RENDAH	TINGGI		
	2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunann	%	100,0	5.689.697.192,0	5.950.619.800,0	20,0	72.760.000,0	30,0	295.542.100,0	50,0	368.302.100,0	50,0	6,19	50,0	368.302.100,0	50,0	1,25	Dinas Pertanahan	
	2	10	05	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	6,19			50,0	1,25		
	2	10	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah aset pemerintah kota yang diamankan melalui pengamanan fisik	%	46,0	3.560.012.600,0	4.507.605.950,0	10,0	55.338.800,0	20,0	174.633.323,0	30,0	229.972.123,0	65,22	5,10	30,0	229.972.123,0	36,14	1,35	Dinas Pertanahan	
	2	10	10	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												57,48	5,10			31,96	1,35		
	2	10	10	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				123.934.597.000,0	152.018.056.170,0		8.896.630.179,0		19.205.770.684,0		28.102.400.863,0		18,49		28.102.400.863,0		4,69		
	2	11		Dinas Lingkungan Hidup				123.934.597.000,0	152.018.056.170,0		8.896.630.179,0		19.205.770.684,0		28.102.400.863,0		18,49		28.102.400.863,0				
	2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	32.763.472.181,0	35.715.112.106,0	25,0	4.768.556.960,0	25,0	7.886.561.447,0	50,0	12.655.118.407,0	50,0	35,43	50,0	12.655.118.407,0	50,0	7,75	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	35,43			50,0	7,75		
	2	11	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	02	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0				0,0			

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	2	1 1	0 2	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH			
	2	1 1	0 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100,0	2.676.955.080,0	1.592.631.234,0	20,0	76.500.000,0	30,0	98.609.000,0	50,0	175.109.000,0	50,0	10,99	50,0	175.109.000,0	50,0	1,50	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	1 1	0 3	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	10,99			50,0	1,50		
	2	1 1	0 3	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 1	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	%	6,23	26.057.559.260,0	14.560.883.720,0	3,23	1.849.082.440,0	0,41	2.739.242.580,0	3,64	4.588.325.020,0	58,43	31,51	3,64	4.588.325.020,0	49,46	3,55	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	1 1	0 4	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												58,43	31,51			49,46	3,55		
	2	1 1	0 4	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 1	0 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	100,0	601.597.500,0	293.813.700,0	0,0	0,0	96,32	0,0	96,32	0,0	96,32		96,32	0,0	96,32		Dinas Lingkungan Hidup	
	2	1 1	0 5	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												96,32	0,0			96,32	0,0		
	2	1 1	0 5	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	2	1 1	0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	61,50	605.570.400,0	1.234.390.400,0	0,0	4.650.000,0	31,0	6.850.000,0	31,0	11.500.000,0	50,41	0,93	31,0	11.500.000,0	100,75	0,38	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	1 1	0 6	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,41	0,93			100,75	0,38		
	2	1 1	0 6	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	2	1 1	0 8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang diselenggarakan	%	100,0	1.413.344.100,0	4.415.514.000,0	0,0	0,0	0,0	65.178.983,0	0,0	65.178.983,0	0,0	1,48	0,0	65.178.983,0	0,0	0,78	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	1	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	1,48			0,0	0,78		
	2	1 1	0 8	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 1	1 0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	100,0	388.362.260,0	299.782.300,0	0,0	27.303.015,0	100,0	34.145.967,0	100,0	61.448.982,0	100,0	20,50	100,0	61.448.982,0	100,0	2,93	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	1 1	1 0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100,0	20,50			100,0	2,93		
	2	1 1	1 0	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	2	1 1	1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	10,0	59.427.736.219,0	93.905.928.710,0	0,0	2.170.537.764,0	13,11	8.375.182.707,0	13,11	10.545.720.471,0	131,10	11,23	13,11	10.545.720.471,0	37,46	3,80	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	1 1	1 1	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												131,10	11,23			37,46	3,80		
	2	1 1	1 1	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				20.552.872.000,0	25.457.725.857,0		3.155.169.602,0		5.860.886.390,0		9.016.055.992,0		35,42		9.016.055.992,0		8,06		
	2	1 2		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				20.552.872.000,0	25.457.725.857,0		3.155.169.602,0		5.860.886.390,0		9.016.055.992,0		35,42		9.016.055.992,0				
	2	1 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	90,0	15.978.077.020,0	22.126.793.215,0	20,0	2.873.669.602,0	20,0	5.455.136.590,0	40,0	8.328.806.192,0	44,44	37,64	40,0	8.328.806.192,0	44,44	9,37	Dinas Kependudukan dan	
	2	1 2	0 1	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												48,15	37,64			48,15	9,37		
	2	1 2	0 1	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 2	0 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	13,70	3.632.709.460,0	2.521.766.742,0	3,0	168.750.000,0	3,0	245.298.900,0	6,0	414.048.900,0	43,80	16,42	6,0	414.048.900,0	26,20	2,27	Dinas Kependuduk	
	2	1 2	0 2	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												42,09	16,42			31,06	2,27		
	2	1 2	0 2	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 2	0 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100,0	530.296.780,0	499.994.200,0	25,0	92.250.000,0	25,0	117.356.800,0	50,0	209.606.800,0	50,0	41,92	50,0	209.606.800,0	50,0	7,64	Dinas Kependudukan dan	
	2	1 2	0 3	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	41,92			50,0	7,64		
	2	1 2	0 3	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 2	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	20,0	257.693.380,0	241.665.300,0	5,0	15.375.000,0	5,0	34.142.800,0	10,0	49.517.800,0	50,0	20,49	10,0	49.517.800,0	10,0	4,0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	1 2	0 4	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	20,49			10,0	4,0		
	2	1 2	0 4	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 2	0 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudkan	%	100,0	154.095.360,0	67.506.400,0	10,0	5.125.000,0	10,0	8.951.300,0	20,0	14.076.300,0	20,0	20,85	20,0	14.076.300,0	20,0	1,90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	1 2	0 5	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												20,0	20,85			20,0	1,90		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	2	12	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				13.053.148.700,0	15.838.253.900,0		8.677.375.000,0		1.669.324.118,0		10.346.699.118,0		65,33		10.346.699.118,0		14,92		
	2	1	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	Persentase PKK aktif	%	100,0	13.053.148.700,0	15.838.253.900,0	100,0	8.677.375.000,0	0,0	1.669.324.118,0	100,0	10.346.699.118,0	100,0	65,33	100,0	10.346.699.118,0	100,0	14,92	Sekretariat	
	2	13	05	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												62,50	65,33			62,50	14,92		
	2	13	05	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				27.134.951.000,0	35.855.756.090,0		3.246.420.247,0		6.181.057.841,0		9.427.478.088,0		26,29		9.427.478.088,0		6,47		
	2	14		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				27.134.951.000,0	35.855.756.090,0		3.246.420.247,0		6.181.057.841,0		9.427.478.088,0		26,29		9.427.478.088,0				
	2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	17.067.975.140,0	19.619.330.380,0	25,0	2.288.334.117,0	25,0	3.999.556.721,0	50,0	6.287.890.838,0	50,0	32,05	50,0	6.287.890.838,0	50,0	7,36	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
	2	14	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												46,30	32,05			46,30	7,36		
	2	14	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	%	2,008	662.742.740,0	807.431.100,0	2,01	10.250.000,0	2,01	162.925.933,0	4,02	173.175.933,0	200,20	21,45	4,02	173.175.933,0	201,0	4,95	Dinas Pengendalian	
	2	14	02	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												248,40	21,45			263,63	4,95		
	2	14	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	61,60	8.946.335.780,0	9.863.443.010,0	66,20	932.461.130,0	69,21	935.218.998,0	135,41	1.867.680.128,0	219,82	18,94	135,41	1.867.680.128,0	199,13	3,87	Dinas Pengendalian Penduduk	
	2	14	03	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												146,41	18,94			156,92	3,87		
	2	14	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	76,0	457.897.340,0	5.565.551.600,0	18,18	15.375.000,0	20,79	1.083.356.189,0	38,97	1.098.731.189,0	51,28	19,74	38,97	1.098.731.189,0	48,71	13,08	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	14	04	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												51,28	19,74			48,71	13,08		
	2	14	04	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				142.137.181.000,0	167.632.678.546,0		17.737.660.157,0		31.912.006.847,0		49.649.667.004,0		29,62		49.649.667.004,0		6,53		
	2	15		Dinas Perhubungan				142.137.181.000,0	167.632.678.546,0		17.737.660.157,0		31.912.006.847,0		49.649.667.004,0		29,62		49.649.667.004,0				

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	2	1 5	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	45.617.403.929,0	50.711.901.952,0	25,0	6.086.402.731,0	25,0	8.325.910.288,0	50,0	14.412.313.019,0	50,0	28,42	50,0	14.412.313.019,0	50,0	7,57	Dinas Perhubungan	
	2	1 5	0 1	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												48,15	28,42			48,15	7,57		
	2	1 5	0 1	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	Kinerja lalu lintas Kabupaten/ Kota	%	0,46	92.803.401.091,0	110.397.911.194,0	0,0	11.589.757.426,0	0,0	23.483.447.509,0	0,0	35.073.204.935,0	0,0	31,77	0,0	35.073.204.935,0	0,0	7,51	Dinas	
	2	1 5	0 2	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	31,77			0,0	7,51		
	2	1 5	0 2	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 5	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Penyeberangan	%	0,76	3.716.375.980,0	6.522.865.400,0	0,0	61.500.000,0	0,0	102.649.050,0	0,0	164.149.050,0	0,0	2,52	0,0	164.149.050,0	0,0	0,16	Dinas Perhubungan	
	2	1 5	0 3	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	2,52			0,0	0,16		
	2	1 5	0 3	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				80.583.666.000,0	76.876.998.730,0		3.028.291.496,0		12.539.503.651,0		15.567.795.147,0		20,25		15.567.795.147,0		3,97		
	2	1 6		Dinas Komunikasi dan Informatika				80.583.666.000,0	76.876.998.730,0		3.028.291.496,0		12.539.503.651,0		15.567.795.147,0		20,25		15.567.795.147,0				
	2	1 6	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	14.149.796.134,0	15.342.110.327,0	40,0	2.454.437.829,0	10,0	3.564.193.706,0	50,0	6.018.631.535,0	50,0	39,23	50,0	6.018.631.535,0	50,0	8,81	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	1 6	0 1	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												57,10	39,23			57,10	8,81		
	2	1 6	0 1	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 6	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah	%	75,0	16.250.865.380,0	17.238.007.771,0	0,0	257.200.465,0	0,0	2.563.445.115,0	0,0	2.820.645.580,0	0,0	16,36	0,0	2.820.645.580,0	0,0	3,56	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	1 6	0 2	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	16,36			0,0	3,56		
	2	1 6	0 2	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 6	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	100,0	50.183.004.486,0	44.296.880.632,0	100,0	316.653.202,0	0,0	6.411.864.830,0	100,0	6.728.518.032,0	100,0	15,19	100,0	6.728.518.032,0	100,0	2,75	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	1 6	0 3	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100,0	15,19			100,0	2,75		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	2	16	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				19.922.929.000,0	22.487.802.890,0		2.903.274.912,0		4.449.714.962,0		7.352.989.874,0		32,70		7.352.989.874,0		7,35		
	2	17		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				19.922.929.000,0	22.487.802.890,0		2.903.274.912,0		4.449.714.962,0		7.352.989.874,0		32,70		7.352.989.874,0				
	2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	9.935.963.120,0	10.595.357.410,0	25,0	1.683.893.311,0	25,0	3.214.857.592,0	50,0	4.898.750.903,0	50,0	46,23	50,0	4.898.750.903,0	50,0	9,86	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	
	2	17	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												44,44	46,23			44,44	9,86		
	2	17	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	15,63	552.073.800,0	375.597.500,0	0,0	0,0	0,0	328.950.990,0	0,0	328.950.990,0	0,0	87,58	0,0	328.950.990,0	0,0	14,40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	02	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	87,58			0,0	14,40		
	2	17	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	27,0	994.391.980,0	722.207.100,0	20,26	71.636.400,0	44,83	183.996.010,0	65,09	255.632.410,0	241,07	35,40	65,09	255.632.410,0	232,46	5,78	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	03	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												241,07	35,40			232,46	5,78		
	2	17	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	%	44,50	563.932.480,0	490.193.000,0	0,0	0,0	41,83	7.288.610,0	41,83	7.288.610,0	94,0	1,49	41,83	7.288.610,0	90,93	0,20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	04	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												94,0	1,49			90,93	0,20		
	2	17	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			TINGGI	SANGAT RENDAH		
	2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	20,55	437.358.100,0	354.252.100,0	0,0	0,0	0,0	7.536.600,0	0,0	7.536.600,0	0,0	2,13	0,0	7.536.600,0	0,0	0,42	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	05	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	2,13			0,0	0,42		
	2	17	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	27,50	1.264.618.200,0	2.538.133.800,0	9,71	132.877.293,0	8,84	180.024.310,0	18,55	312.901.603,0	67,45	12,33	18,55	312.901.603,0	63,97	5,12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	06	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												67,45	12,33			63,97	5,12		
	2	17	06	PREDIKAT KINERJA												SEDANG	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	15,0	2.539.227.300,0	2.001.329.500,0	0,0	0,0	10,83	45.684.850,0	10,83	45.684.850,0	72,20	2,28	10,83	45.684.850,0	27,08	0,33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil	
	2	17	07	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												79,86	2,28			45,26	0,33		
	2	17	07	PREDIKAT KINERJA												TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	1,0	3.635.364.020,0	5.410.732.480,0	0,55	1.014.867.908,0	0,10	481.376.000,0	0,65	1.496.243.908,0	65,0	27,65	0,65	1.496.243.908,0	86,67	8,35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	08	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												65,0	27,65			86,67	8,35		
	2	17	08	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			TINGGI	SANGAT RENDAH		
	2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				22.548.655.000,0	21.934.399.391,0		2.956.535.110,0		5.048.925.284,0		8.005.460.394,0		36,50		8.005.460.394,0		7,13		
	2	18		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				22.548.655.000,0	21.934.399.391,0		2.956.535.110,0		5.048.925.284,0		8.005.460.394,0		36,50		8.005.460.394,0				
	2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	17.122.462.700,0	18.260.146.091,0	15,0	2.716.532.962,0	20,0	4.566.060.790,0	35,0	7.282.593.752,0	35,0	39,88	35,0	7.282.593.752,0	35,0	8,42	Dinas Penanaman Modal dan	
	2	18	01	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												30,0	39,88			30,0	8,42		
	2	18	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi		########## ########	805.948.240,0	529.681.200,0	####### ####### ##	35.978.922,0	0,0	48.055.034,0	####### ####### ##	84.033.956,0	41,16	15,87	6.528.754.118.315,0	84.033.956,0	29,21	2,24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	18	02	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												41,16	15,87			29,21	2,24		
	2	18	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan kebutuhan promosi penanaman modal	%	90,0	1.974.583.700,0	1.018.606.600,0	0,0	0,0	10,0	179.295.078,0	10,0	179.295.078,0	11,11	17,60	10,0	179.295.078,0	10,0	2,04	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
									I		II													
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	2	1 8	0 3	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												11,11	17,60			10,0	2,04		
	2	1 8	0 3	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 8	0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	90,0	1.227.850.640,0	928.264.000,0	23,0	118.216.458,0	25,0	134.119.896,0	48,0	252.336.354,0	53,33	27,18	48,0	252.336.354,0	48,0	3,98	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	1 8	0 4	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												53,33	27,18			48,0	3,98		
	2	1 8	0 4	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 8	0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	90,0	302.456.200,0	330.978.000,0	0,0	0,0	10,0	33.020.000,0	10,0	33.020.000,0	11,11	9,98	10,0	33.020.000,0	10,0	2,0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	1 8	0 5	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												11,11	9,98			10,0	2,0		
	2	1 8	0 5	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 8	0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	90,0	1.115.353.520,0	866.723.500,0	22,0	85.806.768,0	25,0	88.374.486,0	47,0	174.181.254,0	52,22	20,10	47,0	174.181.254,0	47,0	3,25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	1 8	0 6	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												52,22	20,10			47,0	3,25		
	2	1 8	0 6	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				111.257.177.999,997	119.926.703.280,0		4.493.957.367,0		23.059.567.031,0		27.553.524.398,0		22,98		27.553.524.398,0		6,58		
	2	1 9		Dinas Pemuda dan Olahraga				111.257.177.999,997	119.926.703.280,0		4.493.957.367,0		23.059.567.031,0		27.553.524.398,0		22,98		27.553.524.398,0				
	2	1 9	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	11.303.027.700,02	11.598.378.620,0	25,0	1.875.894.082,0	25,0	2.580.230.544,0	50,0	4.456.124.626,0	50,0	38,42	50,0	4.456.124.626,0	50,0	8,03	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	1 9	0 1	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												48,15	38,42			48,15	8,03		
	2	1 9	0 1	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 9	0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	%	17,75	7.028.412.999,978	12.641.186.400,0	1,13	150.479.200,0	1,13	2.510.971.270,0	2,26	2.661.450.470,0	12,73	21,05	2,26	2.661.450.470,0	11,61	7,22	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	1 9	0 2	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												12,73	21,05			11,61	7,22		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II													
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16		
	2	1 9	0 2	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
	2	1 9	0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%	100,0	92.925.737.300,0	95.687.138.260,0	3,0	2.467.584.085,0	18,0	17.968.365.217,0	21,0	20.435.949.302,0	21,0	21,36	21,0	20.435.949.302,0	21,0	6,36	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	1 9	0 3	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												21,0	21,36			21,0	6,36				
	2	1 9	0 3	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
	2	1 9	0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	2,20	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	1 9	0 4	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0				0,0					
	2	1 9	0 4	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH					
	2	2 0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.594.818.880,0	1.328.249.857,0		0,0		52.208.428,0		52.208.428,0		3,93		52.208.428,0		0,67			
	2	2 0		Dinas Komunikasi dan Informatika				1.594.818.880,0	1.328.249.857,0		0,0		52.208.428,0		52.208.428,0		3,93		52.208.428,0					
	2	2 0	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	89,0	1.594.818.880,0	1.328.249.857,0	0,0	0,0	0,0	52.208.428,0	0,0	52.208.428,0	0,0	3,93	0,0	52.208.428,0	0,0	0,67	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	2 0	0 2	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	3,93			0,0	0,67				
	2	2 0	0 2	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
	2	2 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				3.444.285.120,0	1.408.873.100,0		0,0		35.706.040,0		35.706.040,0		2,53		35.706.040,0		0,24			
	2	2 1		Dinas Komunikasi dan Informatika				3.444.285.120,0	1.408.873.100,0		0,0		35.706.040,0		35.706.040,0		2,53		35.706.040,0					
	2	2 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	49,0	3.444.285.120,0	1.408.873.100,0	0,0	0,0	0,0	35.706.040,0	0,0	35.706.040,0	0,0	2,53	0,0	35.706.040,0	0,0	0,24	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	2 1	0 2	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	2,53			0,0	0,24				
	2	2 1	0 2	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
	2	2 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				16.521.066.000,0	26.650.866.525,0		2.456.024.488,0		5.691.749.397,0		8.147.773.885,0		30,57		8.147.773.885,0		8,72			
	2	2 2		Dinas Kebudayaan				16.521.066.000,0	26.650.866.525,0		2.456.024.488,0		5.691.749.397,0		8.147.773.885,0		30,57		8.147.773.885,0					
	2	2 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	11.257.571.880,0	11.986.829.025,0	9,74	2.196.265.248,0	14,85	2.895.281.418,0	24,59	5.091.546.666,0	24,59	42,48	24,59	5.091.546.666,0	24,59	8,97	Dinas Kebudayaan	
	2	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												32,45	42,48			32,45	8,97				

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	2	2 2	0 1	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	2 2	0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	100,0	1.641.976.780,0	3.513.829.200,0	5,88	45.336.400,0	28,50	1.233.312.989,0	34,38	1.278.649.389,0	34,38	36,39	34,38	1.278.649.389,0	34,38	9,99	Dinas Kebudayaan	
	2	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												34,38	36,39			34,38	9,99		
	2	2 2	0 2	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	2 2	0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	20,0	1.655.232.220,0	6.599.206.300,0	0,30	142.068.040,0	6,0	1.220.965.495,0	6,30	1.363.033.535,0	31,50	20,65	6,30	1.363.033.535,0	31,50	12,56	Dinas Kebudayaan	
	2	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												31,50	20,65			31,50	12,56		
	2	2 2	0 3	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	2 2	0 4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	100,0	579.450.460,0	847.036.300,0	6,20	25.841.000,0	118,40	42.044.000,0	124,60	67.885.000,0	124,60	8,01	124,60	67.885.000,0	124,60	2,48	Dinas Kebudayaan	
	2	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												124,60	8,01			124,60	2,48		
	2	2 2	0 4	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	2	2 2	0 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	%	20,0	733.285.560,0	1.768.278.100,0	1,0	15.504.600,0	1,0	251.210.395,0	2,0	266.714.995,0	10,0	15,08	2,0	266.714.995,0	10,0	5,62	Dinas Kebudayaan	
	2	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												10,0	15,08			10,0	5,62		
	2	2 2	0 5	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	2 2	0 6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	%	1,08	653.549.100,0	1.935.687.600,0	0,09	31.009.200,0	0,35	48.935.100,0	0,44	79.944.300,0	40,74	4,13	0,44	79.944.300,0	7,89	1,45	Dinas Kebudayaan	
	2	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												40,74	4,13			7,89	1,45		
	2	2 2	0 6	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	2 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				13.415.122.000,0	10.020.525.007,0		1.497.291.533,0		2.109.691.488,0		3.606.983.021,0		36,0		3.606.983.021,0		6,10		
	2	2		Dinas Perpustakaan				13.415.122.000,0	10.020.525.007,0		1.497.291.533,0		2.109.691.488,0		3.606.983.021,0		36,0		3.606.983.021,0				
	2	2 3	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	8.545.940.100,0	8.428.710.607,0	25,0	1.494.291.533,0	25,0	2.024.519.484,0	50,0	3.518.811.017,0	50,0	41,75	50,0	3.518.811.017,0	50,0	7,71	Dinas Perpustakaan	
	2	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												51,85	41,75			51,85	7,71		
	2	2 3	0 1	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	2 3	0 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	84,60	4.567.555.200,0	1.225.114.500,0	0,0	3.000.000,0	0,0	73.766.088,0	0,0	76.766.088,0	0,0	6,27	0,0	76.766.088,0	0,0	0,63	Dinas Perpustakaan	
	2	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	6,27			0,0	0,63		
	2	2 3	0 2	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	2 3	0 3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	0,14	301.626.700,0	366.699.900,0	0,0	0,0	0,0	11.405.916,0	0,0	11.405.916,0	0,0	3,11	0,0	11.405.916,0	0,0	0,90	Dinas Perpustakaan	
	2	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	3,11			0,0	0,90		
	2	2 3	0 3	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	2 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				12.167.392.000,0	13.963.154.508,0		1.828.357.915,0		2.499.652.867,0		4.328.010.782,0		31,0		4.328.010.782,0		7,88		
	2	2		Dinas Kearsipan				12.167.392.000,0	13.963.154.508,0		1.828.357.915,0		2.499.652.867,0		4.328.010.782,0		31,0		4.328.010.782,0				
	2	2 4	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	11.104.106.460,0	10.780.990.608,0	19,72	1.760.731.729,0	36,36	2.312.645.120,0	56,08	4.073.376.849,0	56,08	37,78	56,08	4.073.376.849,0	56,08	8,32	Dinas Kearsipan	
	2	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												52,62	37,78			52,62	8,32		
	2	2 4	0 1	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	2 4	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Ketersediaan Arsip	%	25,76	478.011.500,0	1.260.995.200,0	12,13	62.140.532,0	9,40	89.152.500,0	21,53	151.293.032,0	83,58	12,0	21,53	151.293.032,0	21,53	6,06	Dinas Kearsipan	
	2	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												83,58	12,0			21,53	6,06		
	2	2 4	0 2	PREDIKAT KINERJA												TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	2 4	0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	27,60	529.221.340,0	1.915.119.900,0	11,11	5.485.654,0	6,41	94.208.447,0	17,52	99.694.101,0	63,48	5,21	17,52	99.694.101,0	17,52	3,21	Dinas Kearsipan	
	2	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												63,48	5,21			17,52	3,21		
	2	2 4	0 3	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	2 4	0 4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	100,0	56.052.700,0	6.048.800,0	0,0	0,0	0,0	3.646.800,0	0,0	3.646.800,0	0,0	60,29	0,0	3.646.800,0	0,0	1,11	Dinas Kearsipan	
	2	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	60,29			0,0	1,11		
	2	2 4	0 4	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				102.523.982.000,0	138.234.771.520,0		12.015.709.333,0		21.296.890.610,0		33.312.599.943,0		24,10		33.312.599.943,0		6,57		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				40.648.075.900,0	41.611.020.787,0		3.838.149.458,0		5.610.552.029,0		9.448.701.487,0		22,71		9.448.701.487,0		5,22		
	3	2		Dinas Perikanan dan Pertanian				40.648.075.900,0	41.611.020.787,0		3.838.149.458,0		5.610.552.029,0		9.448.701.487,0		22,71		9.448.701.487,0				
	3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	36.283.411.800,0	31.406.438.437,0	25,0	3.607.091.960,0	25,0	4.580.575.929,0	50,0	8.187.667.889,0	50,0	26,07	50,0	8.187.667.889,0	50,0	5,12	Dinas Perikanan dan	
	3	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	26,07			50,0	5,12		
	3	25	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	21.722,0	2.467.155.780,0	2.792.795.280,0	3.507,70	100.500.000,0	4.177,20	754.923.390,0	7.684,90	855.423.390,0	35,38	30,63	28.602,20	855.423.390,0	32,90	7,76	Dinas Perikanan dan	
	3	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												35,38	30,63			32,90	7,76		
	3	25	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.568,35	1.337.593.720,0	5.767.236.170,0	298,71	130.557.498,0	319,87	267.570.110,0	618,58	398.127.608,0	39,44	6,90	2.177,66	398.127.608,0	38,51	5,84	Dinas Perikanan dan	
	3	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												39,44	6,90			38,51	5,84		
	3	25	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Sumber Daya Perikanan Yang Diawasi	%	100,0	29.918.700,0	12.325.900,0	24,0	0,0	28,94	4.666.800,0	52,94	4.666.800,0	52,94	37,86	52,94	4.666.800,0	52,94	3,26	Dinas Perikanan dan	
	3	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												52,94	37,86			52,94	3,26		
	3	25	05	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita /	48,94	529.995.900,0	1.632.225.000,0	0,0	0,0	0,0	2.815.800,0	0,0	2.815.800,0	0,0	0,17	0,0	2.815.800,0	0,0	0,09	Dinas Perikanan dan	
	3	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	0,17			0,0	0,09		
	3	25	06	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				32.848.622.000,0	52.824.785.124,0		5.145.720.932,0		9.993.515.146,0		15.139.236.078,0		28,66		15.139.236.078,0		8,79		
	3	2		Dinas Pariwisata				32.848.622.000,0	52.824.785.124,0		5.145.720.932,0		9.993.515.146,0		15.139.236.078,0		28,66		15.139.236.078,0				
	3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	15.793.372.147,0	15.729.414.412,0	25,0	2.709.748.938,0	25,0	4.340.651.359,0	50,0	7.050.400.297,0	50,0	44,82	50,0	7.050.400.297,0	50,0	9,08	Dinas Pariwisata	
	3	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												48,15	44,82			48,15	9,08		
	3	26	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	7,0	4.735.612.600,0	12.942.001.200,0	0,0	1.085.593.320,0	0,0	1.591.368.620,0	0,0	2.676.961.940,0	0,0	20,68	0,0	2.676.961.940,0	0,0	10,62	Dinas Pariwisata	
	3	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	20,68			0,0	10,62		
	3	26	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	5,88	3.895.274.400,0	6.685.907.864,0	0,0	559.531.162,0	0,0	1.580.352.236,0	0,0	2.139.883.398,0	0,0	32,01	0,0	2.139.883.398,0	0,0	10,04	Dinas Pariwisata	
	3	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	32,01			0,0	10,04		
	3	26	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	3,03	5.673.751.003,0	15.175.806.610,0	0,0	617.301.631,0	0,0	1.781.162.881,0	0,0	2.398.464.512,0	0,0	15,80	0,0	2.398.464.512,0	0,0	6,98	Dinas Pariwisata	
	3	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	15,80			0,0	6,98		
	3	26	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	12,92	2.750.611.850,0	2.291.655.038,0	0,0	173.545.881,0	0,0	699.980.050,0	0,0	873.525.931,0	0,0	38,12	0,0	873.525.931,0	0,0	6,36	Dinas Pariwisata	
	3	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	38,12			0,0	6,36		
	3	26	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				6.658.318.100,0	14.870.768.476,0		113.075.000,0		740.705.480,0		853.780.480,0		5,74		853.780.480,0		2,46		
	3	2		Dinas Perikanan dan Pertanian				6.658.318.100,0	14.870.768.476,0		113.075.000,0		740.705.480,0		853.780.480,0		5,74		853.780.480,0				
	3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Ton	15.616,0	5.008.335.760,0	13.284.295.136,0	1.672,0	62.825.000,0	5.661,0	152.122.100,0	7.333,0	214.947.100,0	46,96	1,62	21.770,0	214.947.100,0	46,95	0,83	Dinas Perikanan dan	
	3	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												51,02	1,62			41,40	0,83		
	3	27	02	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	40,0	148.437.200,0	50.837.800,0	0,0	0,0	0,0	3.931.800,0	0,0	3.931.800,0	0,0	7,73	0,0	3.931.800,0	0,0	0,63	Dinas Perikanan dan	
	3	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	7,73			0,0	0,63		
	3	27	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	80,0	1.163.627.640,0	1.309.023.140,0	20,0	50.250.000,0	55,50	575.352.580,0	75,50	625.602.580,0	94,38	47,79	75,50	625.602.580,0	83,89	9,76	Dinas Perikanan dan	
	3	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												49,58	47,79			43,69	9,76		
	3	27	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	80,0	98.733.300,0	57.619.300,0	0,0	0,0	0,0	4.848.000,0	0,0	4.848.000,0	0,0	8,41	0,0	4.848.000,0	0,0	0,86	Dinas Perikanan dan	
	3	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	8,41			0,0	0,86		
	3	27	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	%	100,0	7.241.600,0	7.288.600,0	10,71	0,0	66,60	4.451.000,0	77,31	4.451.000,0	77,31	61,07	77,31	4.451.000,0	77,31	13,10	Dinas Perikanan dan	
	3	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												77,31	61,07			77,31	13,10		
	3	27	06	PREDIKAT KINERJA												TINGGI	RENDAH			TINGGI	SANGAT RENDAH		
	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang aktif	%	100,0	231.942.600,0	161.704.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		Dinas Perikanan dan	
	3	2	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	0,0			0,0	0,0		
	3	27	07	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				20.237.177.580,0	25.263.611.193,0		2.905.953.943,0		4.553.251.805,0		7.459.205.748,0		29,53		7.459.205.748,0		7,63		
	3	3		Dinas Perdagangan dan Perindustrian				20.237.177.580,0	25.263.611.193,0		2.905.953.943,0		4.553.251.805,0		7.459.205.748,0		29,53		7.459.205.748,0				
	3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	16.023.563.940,0	17.125.313.973,0	25,0	2.568.372.131,0	25,0	3.932.482.981,0	50,0	6.500.855.112,0	50,0	37,96	50,0	6.500.855.112,0	50,0	8,38	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3	3	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												51,54	37,96			51,54	8,38		
	3	30	01	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	100,0	199.320.860,0	975.680.300,0	25,0	33.630.000,0	25,0	35.048.400,0	50,0	68.678.400,0	50,0	7,04	50,0	68.678.400,0	50,0	6,68	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3	3	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	7,04			50,0	6,68		
	3	30	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	100,0	54.362.000,0	61.976.700,0	0,0	0,0	19,56	0,0	19,56	0,0	19,56		19,56	0,0	19,56		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3	3	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												19,56	0,0			19,56	0,0		
	3	30	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%	100,0	748.728.080,0	1.081.118.300,0	25,0	25.326.400,0	25,0	29.807.400,0	50,0	55.133.800,0	50,0	5,10	50,0	55.133.800,0	50,0	1,40	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3	3	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	5,10			50,0	1,40		
	3	30	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor barang Kota Makassar	%	12,10	1.606.565.580,0	4.125.061.600,0	0,0	243.927.876,0	0,0	374.890.116,0	0,0	618.817.992,0	0,0	15,0	0,0	618.817.992,0	0,0	8,04	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3	3	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	15,0			0,0	8,04		
	3	30	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Kemetrologian	%	90,0	1.310.692.320,0	1.126.028.120,0	23,0	34.697.536,0	24,0	181.022.908,0	47,0	215.720.444,0	52,22	19,16	47,0	215.720.444,0	52,22	3,99	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3	3	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												52,22	19,16			52,22	3,99		
	3	30	06	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	3	3 0	0 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	70,0	293.944.800,0	768.432.200,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	28,57		20,0	0,0	22,22		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3	3	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												28,57	0,0			22,22	0,0		
	3	3 0	0 7	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	3 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.131.788.420,0	3.664.585.940,0		12.810.000,0		398.866.150,0		411.676.150,0		11,23		411.676.150,0		1,93		
	3	3		Dinas Perdagangan dan Perindustrian				2.131.788.420,0	3.664.585.940,0		12.810.000,0		398.866.150,0		411.676.150,0		11,23		411.676.150,0				
	3	3 1	0 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	4,80	1.975.441.820,0	3.356.069.240,0	0,0	11.210.000,0	0,0	339.206.150,0	0,0	350.416.150,0	0,0	10,44	0,0	350.416.150,0	0,0	1,72	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3	3	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	10,44			0,0	1,72		
	3	3 1	0 2	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	3 1	0 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	0,41	39.410.400,0	37.708.800,0	0,0	1.600.000,0	0,20	2.400.000,0	0,20	4.000.000,0	48,78	10,61	0,20	4.000.000,0	48,78	1,33	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3	3	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												48,78	10,61			48,78	1,33		
	3	3 1	0 3	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	3 1	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	100,0	116.936.200,0	270.807.900,0	25,0	0,0	25,0	57.260.000,0	50,0	57.260.000,0	50,0	21,14	50,0	57.260.000,0	50,0	8,96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3	3	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	21,14			50,0	8,96		
	3	3 1	0 4	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				436.207.371.300,0	426.807.098.175,0		46.282.802.558,0		89.577.167.359,0		135.859.969.917,0		31,83		135.859.969.917,0		5,96		
	4	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	195.641.231.856,0	190.889.534.851,0	25,0	16.948.213.265,0	25,0	39.186.090.130,0	50,0	56.134.303.395,0	50,0	29,41	50,0	56.134.303.395,0	50,0	5,53	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												44,08	29,41			44,08	5,53		
	4	0 1	0 1	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	4	0 1	0 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	%	100,0	43.439.409.440,0	47.850.441.390,0	23,33	3.596.543.428,0	25,0	8.879.416.806,0	48,33	12.475.960.234,0	48,33	26,07	48,33	12.475.960.234,0	48,33	5,59	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												48,58	26,07			48,58	5,59		
	4	0 1	0 2	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	4	0 1	0 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	%	100,0	5.598.960.004,0	5.752.499.434,0	12,50	295.813.198,0	20,26	1.096.157.644,0	32,76	1.391.970.842,0	32,76	24,20	32,76	1.391.970.842,0	32,76	4,75	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												66,87	24,20			66,87	4,75		
	4	0 1	0 3	PREDIKAT KINERJA												SEDANG	SANGAT RENDAH			SEDANG	SANGAT RENDAH		
	4	0		SEKRETARIAT DPRD				191.527.770.000,0	182.314.622.500,0		25.442.232.667,0		40.415.502.779,0		65.857.735.446,0		36,12		65.857.735.446,0		6,51		
	4	0		Sekretariat DPRD				191.527.770.000,0	182.314.622.500,0		25.442.232.667,0		40.415.502.779,0		65.857.735.446,0		36,12		65.857.735.446,0				
	4	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	107.009.817.520,0	105.015.391.800,0	0,0	13.525.312.043,0	0,0	22.628.308.810,0	0,0	36.153.620.853,0	0,0	34,43	0,0	36.153.620.853,0	0,0	6,27	Sekretariat DPRD	
	4	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												13,33	34,43			13,33	6,27		
	4	0 2	0 1	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	4	0 2	0 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penetapan Ranperda tahun N	%	100,0	84.517.952.480,0	77.299.230.700,0	0,0	11.916.920.624,0	0,0	17.787.193.969,0	0,0	29.704.114.593,0	0,0	38,43	0,0	29.704.114.593,0	0,0	6,82	Sekretariat DPRD	
	4	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												8,33	38,43			8,33	6,82		
	4	0 2	0 2	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				299.687.106.999,997	275.629.956.028,0		30.414.562.914,0		50.081.067.008,0		80.495.629.922,0		29,20		80.495.629.922,0		5,55		
	5	0		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				38.576.589.999,999	33.512.050.613,0		4.340.917.727,0		8.511.095.184,0		12.852.012.911,0		38,35		12.852.012.911,0				
	5	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	27.812.750.475,999	26.023.951.854,0	25,0	3.751.354.324,0	25,0	6.684.948.813,0	50,0	10.436.303.137,0	50,0	40,10	50,0	10.436.303.137,0	50,0	7,51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												51,85	40,10			51,85	7,51		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	5	01	01	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100,0	3.060.051.644,0	2.014.661.600,0	0,0	405.946.310,0	100,0	538.866.745,0	100,0	944.813.055,0	100,0	46,90	100,0	944.813.055,0	100,0	5,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100,0	46,90			100,0	5,53		
	5	01	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100,0	7.703.787.880,0	5.473.437.159,0	0,0	183.617.093,0	0,0	1.287.279.626,0	0,0	1.470.896.719,0	0,0	26,87	0,0	1.470.896.719,0	0,0	3,50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	26,87			0,0	3,50		
	5	01	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	5	02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				92.337.242.000,0	66.314.704.936,0		5.839.381.821,0		9.123.378.003,0		14.962.759.824,0		22,56		14.962.759.824,0				
	5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	37.863.929.780,0	30.437.414.836,0	50,0	3.855.489.722,0	0,0	6.545.666.866,0	50,0	10.401.156.588,0	50,0	34,17	50,0	10.401.156.588,0	50,0	5,85	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	
	5	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												47,36	34,17			47,36	5,85		
	5	02	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	30,0	47.017.935.500,0	29.310.280.600,0	31,72	1.280.779.331,0	0,0	1.746.376.370,0	31,72	3.027.155.701,0	105,73	10,33	31,72	3.027.155.701,0	105,73	1,46	Badan Pengelolaan Keuangan	
	5	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												66,08	10,33			65,68	1,46		
	5	02	02	PREDIKAT KINERJA												SEDANG	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	4,0	7.455.376.720,0	6.567.009.500,0	0,0	703.112.768,0	2,08	831.334.767,0	2,08	1.534.447.535,0	52,0	23,37	2,08	1.534.447.535,0	52,0	3,91	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	
	5	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												52,0	23,37			52,0	3,91		
	5	02	03	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	5	0		Badan Pendapatan Daerah				131.281.504.000,0	125.463.228.025,0		13.826.721.988,0		22.731.306.335,0		36.558.028.323,0		29,14		36.558.028.323,0				
	5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	100.628.646.774,0	96.353.099.065,0	33,46	11.906.316.703,0	23,63	18.434.680.975,0	57,09	30.340.997.678,0	57,09	31,49	57,09	30.340.997.678,0	57,09	6,31	Badan Pendapatan Daerah	
	5	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												44,77	31,49			44,77	6,31		
	5	02	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	45,01	30.652.857.226,0	29.110.128.960,0	0,0	1.920.405.285,0	42,84	4.296.625.360,0	42,84	6.217.030.645,0	95,18	21,36	42,84	6.217.030.645,0	91,03	4,07	Badan Pendapatan Daerah	
	5	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												95,18	21,36			91,03	4,07		
	5	02	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	5	03		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				20.654.078.899,999	30.898.803.025,0		4.419.491.858,0		4.674.847.828,0		9.094.339.686,0		29,43		9.094.339.686,0				
	5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	16.366.735.099,999	20.632.225.700,0	35,70	3.605.634.458,0	28,60	4.404.920.154,0	64,30	8.010.554.612,0	64,30	38,83	64,30	8.010.554.612,0	64,30	9,63	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												54,63	38,83			54,63	9,63		
	5	03	01	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	71,0	4.287.343.800,0	10.266.577.325,0	88,30	813.857.400,0	80,65	269.927.674,0	168,95	1.083.785.074,0	237,96	10,56	168,95	1.083.785.074,0	225,27	5,20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												150,31	10,56			142,33	5,20		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	5	03	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	5	04		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				4.883.692.100,0	4.484.449.900,0		0,0		1.651.689.210,0		1.651.689.210,0		36,83		1.651.689.210,0				
	5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN Yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	41,0	4.883.692.100,0	4.484.449.900,0	0,26	0,0	23,32	1.651.689.210,0	23,58	1.651.689.210,0	57,51	36,83	23,58	1.651.689.210,0	54,84	5,35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												213,26	36,83			185,56	5,35		
	5	04	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	5	0		Badan Riset dan Inovasi Daerah				11.954.000.000,0	14.956.719.529,0		1.988.049.520,0		3.388.750.448,0		5.376.799.968,0		35,95		5.376.799.968,0				
	5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	90,0	8.791.954.200,0	10.014.832.429,0	22,15	1.341.129.818,0	12,10	2.390.776.316,0	34,25	3.731.906.134,0	38,06	37,26	34,25	3.731.906.134,0	38,06	8,60	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												36,99	37,26			36,99	8,60		
	5	05	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase SKPD Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0				0,0			
	5	05	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH			
	5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	%	100,0	3.162.045.800,0	4.941.887.100,0	15,0	646.919.702,0	18,49	997.974.132,0	33,49	1.644.893.834,0	33,49	33,28	33,49	1.644.893.834,0	33,49	13,65	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	5	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												33,49	33,28			33,49	13,65		
	5	05	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				50.428.400.000,0	37.214.725.740,0		4.535.475.796,0		7.543.993.219,0		12.079.469.015,0		32,46		12.079.469.015,0		4,96		
	6	0		INSPEKTORAT DAERAH				50.428.400.000,0	37.214.725.740,0		4.535.475.796,0		7.543.993.219,0		12.079.469.015,0		32,46		12.079.469.015,0		4,96		
	6	0		Inspektorat Daerah				50.428.400.000,0	37.214.725.740,0		4.535.475.796,0		7.543.993.219,0		12.079.469.015,0		32,46		12.079.469.015,0				
	6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	46.613.620.580,0	34.883.764.840,0	25,0	4.530.350.796,0	25,0	7.100.472.562,0	50,0	11.630.823.358,0	50,0	33,34	50,0	11.630.823.358,0	50,0	5,16	Inspektorat Daerah	
	6	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												46,30	33,34			46,30	5,16		
	6	01	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	%	78,21	2.960.628.020,0	1.674.099.700,0	0,0	5.125.000,0	0,0	375.075.296,0	0,0	380.200.296,0	0,0	22,71	0,0	380.200.296,0	0,0	2,77	Inspektorat Daerah	
	6	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	22,71			0,0	2,77		
	6	01	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3,0	854.151.400,0	656.861.200,0	0,0	0,0	0,0	68.445.361,0	0,0	68.445.361,0	0,0	10,42	0,0	68.445.361,0	0,0	1,50	Inspektorat Daerah	
	6	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	10,42			0,0	1,50		
	6	01	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7			UNSUR KEWILAYAHAN				649.881.425.999,991	677.262.747.151,0		95.106.540.340,0		122.831.337.426,0		217.937.877.766,0		32,18		217.937.877.766,0		6,49		
	7	0		Kecamatan Biringkanaya				54.038.985.000,0	54.206.314.676,0		8.537.446.206,0		11.247.408.414,0		19.784.854.620,0		36,50		19.784.854.620,0				
	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	18.692.856.488,0	19.853.727.898,0	13,92	3.289.612.314,0	54,55	4.169.351.914,0	68,47	7.458.964.228,0	68,47	37,57	68,47	7.458.964.228,0	68,47	7,41	Kecamatan Biringkanaya	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												44,60	37,57			44,60	7,41		
	7	01	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	%	90,0	18.807.906.600,0	16.015.004.580,0	0,0	2.961.289.085,0	0,0	3.672.230.655,0	0,0	6.633.519.740,0	0,0	41,42	0,0	6.633.519.740,0	0,0	7,17	Kecamatan Biringkanaya	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	41,42			0,0	7,17		
	7	01	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	%	90,0	5.682.777.000,0	5.606.113.066,0	0,0	175.547.176,0	0,0	0,0	0,0	175.547.176,0	0,0	3,13	0,0	175.547.176,0	0,0	0,63	Kecamatan Biringkanaya	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												6,94	3,13			6,94	0,63		
	7	01	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	90,0	580.414.000,0	512.538.300,0	0,0	93.600.000,0	0,0	123.000.000,0	0,0	216.600.000,0	0,0	42,26	0,0	216.600.000,0	0,0	2,79	Kecamatan Biringkanaya	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	42,26			0,0	2,79		
	7	01	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	%	100,0	10.275.030.912,0	12.218.930.832,0	25,0	2.017.397.631,0	25,0	3.282.825.845,0	50,0	5.300.223.476,0	50,0	43,38	50,0	5.300.223.476,0	50,0	9,75	Kecamatan Biringkanaya	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	43,38			50,0	9,75		
	7	01	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0		Kecamatan Bontoala				38.316.416.000,0	41.255.829.085,0		5.361.848.174,0		6.712.904.553,0		12.074.752.727,0		29,27		12.074.752.727,0				
	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	16.755.598.320,0	18.594.938.508,0	25,0	2.456.769.783,0	25,0	3.550.215.580,0	50,0	6.006.985.363,0	50,0	32,30	50,0	6.006.985.363,0	50,0	7,02	Kecamatan Bontoala	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	32,30			50,0	7,02		
	7	01	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	%	90,0	7.992.524.600,0	9.310.465.985,0	20,0	1.707.019.315,0	22,50	2.030.632.235,0	42,50	3.737.651.550,0	47,22	40,14	42,50	3.737.651.550,0	47,22	8,96	Kecamatan Bontoala	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												47,22	40,14			47,22	8,96		
	7	01	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	%	90,0	6.279.564.700,0	6.279.456.212,0	0,0	145.879.250,0	0,0	0,0	0,0	145.879.250,0	0,0	2,32	0,0	145.879.250,0	0,0	0,48	Kecamatan Bontoala	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												25,0	2,32			25,0	0,48		
	7	01	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	90,0	612.800.000,0	699.200.000,0	25,0	93.600.000,0	25,0	164.400.000,0	50,0	258.000.000,0	55,56	36,90	50,0	258.000.000,0	55,56	8,18	Kecamatan Bontoala	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												55,56	36,90			55,56	8,18		
	7	01	04	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	%	100,0	6.675.928.380,0	6.371.768.380,0	25,0	958.579.826,0	25,0	967.656.738,0	50,0	1.926.236.564,0	50,0	30,23	50,0	1.926.236.564,0	50,0	5,75	Kecamatan Bontoala	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	30,23			50,0	5,75		
	7	01	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0		Kecamatan Makassar				51.216.041.000,0	51.891.302.250,0		7.429.504.411,0		9.331.052.419,0		16.760.556.830,0		32,30		16.760.556.830,0				
	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	20.372.772.621,0	21.744.885.621,0	25,0	3.502.822.115,0	25,0	4.376.848.472,0	50,0	7.879.670.587,0	50,0	36,24	50,0	7.879.670.587,0	50,0	7,58	Kecamatan Makassar	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	36,24			50,0	7,58		
	7	01	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	%	90,0	12.927.398.459,0	12.830.858.309,0	12,0	2.206.863.150,0	23,0	2.942.911.325,0	35,0	5.149.774.475,0	38,89	40,14	35,0	5.149.774.475,0	38,89	7,67	Kecamatan Makassar	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												38,89	40,14			38,89	7,67		
	7	01	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	%	90,0	7.148.675.800,0	7.150.449.800,0	2,0	147.618.500,0	0,0	0,0	2,0	147.618.500,0	2,22	2,06	2,0	147.618.500,0	2,22	0,41	Kecamatan Makassar	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												1,11	2,06			1,11	0,41		
	7	01	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	90,0	398.598.800,0	573.826.400,0	25,0	121.600.000,0	25,0	121.600.000,0	50,0	243.200.000,0	55,56	42,38	50,0	243.200.000,0	55,56	11,25	Kecamatan Makassar	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												55,56	42,38			55,56	11,25		
	7	01	04	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	%	100,0	10.368.595.320,0	9.591.282.120,0	25,0	1.450.600.646,0	25,0	1.889.692.622,0	50,0	3.340.293.268,0	50,0	34,83	50,0	3.340.293.268,0	50,0	6,58	Kecamatan Makassar	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	34,83			50,0	6,58		
	7	01	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0		Kecamatan Mamajang				45.198.217.000,0	46.914.346.296,0		6.374.130.457,0		7.742.657.620,0		14.116.788.077,0		30,09		14.116.788.077,0				

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	20.256.357.414,0	21.367.994.024,0	25,0	3.335.952.258,0	25,0	4.338.730.565,0	50,0	7.674.682.823,0	50,0	35,92	50,0	7.674.682.823,0	50,0	7,38	Kecamatan Mamajang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												38,89	35,92			38,89	7,38		
	7	01	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	%	90,0	10.054.890.000,0	10.557.737.015,0	15,74	1.604.011.090,0	19,0	2.083.588.575,0	34,74	3.687.599.665,0	38,60	34,93	34,74	3.687.599.665,0	38,60	7,44	Kecamatan Mamajang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												38,60	34,93			38,60	7,44		
	7	01	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	%	90,0	6.673.635.000,0	6.696.628.911,0	6,06	196.876.908,0	0,0	0,0	6,06	196.876.908,0	6,73	2,94	6,06	196.876.908,0	6,73	0,60	Kecamatan Mamajang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												3,37	2,94			3,37	0,60		
	7	01	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	90,0	866.104.500,0	637.751.600,0	22,0	145.600.000,0	0,0	151.790.000,0	22,0	297.390.000,0	24,44	46,63	22,0	297.390.000,0	24,44	7,0	Kecamatan Mamajang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												24,44	46,63			24,44	7,0		
	7	01	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	%	100,0	7.347.230.086,0	7.654.234.746,0	25,0	1.091.690.201,0	25,0	1.168.548.480,0	50,0	2.260.238.681,0	50,0	29,53	50,0	2.260.238.681,0	50,0	5,97	Kecamatan Mamajang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	29,53			50,0	5,97		
	7	01	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0		Kecamatan Manggala				44.369.278.000,0	46.417.220.902,0		7.302.954.631,0		8.453.794.191,0		15.756.748.822,0		33,95		15.756.748.822,0				
	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	16.816.625.040,0	20.452.900.034,0	23,08	3.009.023.019,0	13,28	3.888.659.534,0	36,36	6.897.682.553,0	36,36	33,72	36,36	6.897.682.553,0	36,36	6,76	Kecamatan Manggala	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												28,79	33,72			28,79	6,76		
	7	01	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	%	90,0	13.125.407.860,0	12.142.211.300,0	0,0	2.473.706.565,0	0,0	3.266.764.836,0	0,0	5.740.471.401,0	0,0	47,28	0,0	5.740.471.401,0	0,0	8,65	Kecamatan Manggala	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	47,28			0,0	8,65		
	7	01	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	%	90,0	4.193.675.900,0	4.163.033.808,0	0,0	162.008.350,0	0,0	0,0	0,0	162.008.350,0	0,0	3,89	0,0	162.008.350,0	0,0	0,78	Kecamatan Manggala	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												9,52	3,89			9,52	0,78		
	7	01	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	90,0	96.000.000,0	96.000.000,0	0,0	24.000.000,0	90,18	24.000.000,0	90,18	48.000.000,0	100,20	50,0	90,18	48.000.000,0	100,20	10,0	Kecamatan Manggala	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100,20	50,0			100,20	10,0		
	7	01	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	%	100,0	10.137.569.200,0	9.563.075.760,0	25,0	1.634.216.697,0	25,0	1.274.369.821,0	50,0	2.908.586.518,0	50,0	30,41	50,0	2.908.586.518,0	50,0	5,81	Kecamatan Manggala	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	30,41			50,0	5,81		
	7	01	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0		Kecamatan Mariso				34.301.058.000,0	35.122.097.660,0		4.858.955.912,0		5.989.808.350,0		10.848.764.262,0		30,89		10.848.764.262,0				
	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	14.802.766.648,0	14.953.400.508,0	25,0	2.115.912.145,0	25,0	2.754.378.367,0	50,0	4.870.290.512,0	50,0	32,57	50,0	4.870.290.512,0	50,0	6,22	Kecamatan Mariso	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												48,15	32,57			48,15	6,22		
	7	01	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	%	90,0	8.380.802.700,0	8.621.726.120,0	20,0	1.497.751.520,0	21,31	1.837.374.784,0	41,31	3.335.126.304,0	45,90	38,68	41,31	3.335.126.304,0	45,90	7,90	Kecamatan Mariso	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												45,90	38,68			45,90	7,90		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II										
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	7	01	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	%	90,0	4.651.594.020,0	4.648.894.020,0	20,0	142.059.500,0	0,0	0,0	20,0	142.059.500,0	22,22	3,06	20,0	142.059.500,0	22,22	0,62	Kecamatan Mariso	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												22,22	3,06			22,22	0,62		
	7	01	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	90,0	483.309.000,0	483.309.000,0	17,0	120.600.000,0	24,62	110.400.000,0	41,62	231.000.000,0	46,24	47,80	41,62	231.000.000,0	46,24	9,56	Kecamatan Mariso	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												46,24	47,80			46,24	9,56		
	7	01	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	%	100,0	5.982.585.632,0	6.414.768.012,0	30,0	982.632.747,0	20,07	1.287.655.199,0	50,07	2.270.287.946,0	50,07	35,39	50,07	2.270.287.946,0	50,07	7,21	Kecamatan Mariso	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,07	35,39			50,07	7,21		
	7	01	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0		Kecamatan Panakkukang				54.542.258.000,0	57.026.241.805,0		7.957.842.400,0		12.111.480.698,0		20.069.323.098,0		35,19		20.069.323.098,0				
	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	%	100,0	18.803.509.659,0	19.602.212.698,0	25,0	3.549.261.835,0	25,0	4.591.073.562,0	50,0	8.140.335.397,0	50,0	41,53	50,0	8.140.335.397,0	50,0	7,99	Kecamatan Panakkukang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												47,81	41,53			47,81	7,99		
	7	01	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	%	90,0	17.901.040.280,0	19.046.377.545,0	22,50	2.508.059.359,0	22,50	4.896.290.160,0	45,0	7.404.349.519,0	50,0	38,88	45,0	7.404.349.519,0	50,0	8,17	Kecamatan Panakkukang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	38,88			50,0	8,17		
	7	01	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	%	90,0	5.684.766.019,0	5.694.524.400,0	0,0	178.134.593,0	0,0	1.000.000,0	0,0	179.134.593,0	0,0	3,15	0,0	179.134.593,0	0,0	0,64	Kecamatan Panakkukang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												7,69	3,15			7,69	0,64		
	7	01	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	90,0	583.968.000,0	510.852.600,0	22,50	101.000.000,0	22,50	140.000.000,0	45,0	241.000.000,0	50,0	47,18	45,0	241.000.000,0	50,0	8,32	Kecamatan Panakkukang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	47,18			50,0	8,32		
	7	01	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	%	100,0	11.568.974.042,0	12.172.274.562,0	25,0	1.621.386.613,0	25,0	2.483.116.976,0	50,0	4.104.503.589,0	50,0	33,72	50,0	4.104.503.589,0	50,0	6,97	Kecamatan Panakkukang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	33,72			50,0	6,97		
	7	01	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0		Kecamatan Rappocini				53.819.314.000,0	55.473.168.940,0		8.374.609.080,0		9.819.644.138,0		18.194.253.218,0		32,80		18.194.253.218,0				
	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	20.250.955.560,0	21.879.577.955,0	20,0	3.664.871.003,0	50,0	4.523.117.905,0	70,0	8.187.988.908,0	70,0	37,42	70,0	8.187.988.908,0	70,0	7,75	Kecamatan Rappocini	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												52,50	37,42			52,50	7,75		
	7	01	01	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	%	90,0	14.622.640.400,0	15.101.044.340,0	0,0	2.499.409.360,0	21,22	3.204.002.777,0	21,22	5.703.412.137,0	23,58	37,77	21,22	5.703.412.137,0	23,58	7,81	Kecamatan Rappocini	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												23,58	37,77			23,58	7,81		
	7	01	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	%	90,0	5.637.059.000,0	5.132.524.065,0	0,0	168.912.254,0	0,0	9.849.950,0	0,0	178.762.204,0	0,0	3,48	0,0	178.762.204,0	0,0	0,64	Kecamatan Rappocini	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												1,93	3,48			1,93	0,64		
	7	01	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	90,0	584.378.260,0	570.740.960,0	23,21	132.475.000,0	23,49	134.098.840,0	46,70	266.573.840,0	51,89	46,71	46,70	266.573.840,0	51,89	9,06	Kecamatan Rappocini	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												51,89	46,71			51,89	9,06		
	7	01	04	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	%	100,0	12.724.280.780,0	12.789.281.620,0	14,93	1.908.941.463,0	15,24	1.948.574.666,0	30,17	3.857.516.129,0	30,17	30,16	30,17	3.857.516.129,0	30,17	5,96	Kecamatan Rappocini	

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												30,17	30,16			30,17	5,96		
	7	0	0	PREDIKAT KINERJA												SANGAT	SANGAT			SANGAT	SANGAT		
		1	5													RENDAH	RENDAH			RENDAH	RENDAH		
	7	0		Kecamatan Tallo				52.821.435.000,0	55.615.932.276,0		6.914.498.795,0		9.445.552.382,0		16.360.051.177,0		29,42		16.360.051.177,0				
	7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase ketersedian dokumen	%	100,0	20.065.590.029,0	22.984.594.230,0	25,0	3.181.136.178,0	25,0	4.768.517.757,0	50,0	7.949.653.935,0	50,0	34,59	50,0	7.949.653.935,0	50,0	7,70	Kecamatan	
		1	1	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah																	Tallo	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	34,59			50,0	7,70		
	7	0	0	PREDIKAT KINERJA												SANGAT	SANGAT			SANGAT	SANGAT		
		1	1													RENDAH	RENDAH			RENDAH	RENDAH		
	7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap	%	90,0	11.938.041.332,0	12.738.791.950,0	22,50	1.818.825.000,0	35,0	2.055.172.755,0	57,50	3.873.997.755,0	63,89	30,41	57,50	3.873.997.755,0	63,89	6,52	Kecamatan	
		1	2	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan																	Tallo	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												63,89	30,41			63,89	6,52		
	7	0	0	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT			RENDAH	SANGAT		
		1	2														RENDAH				RENDAH		
	7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan prasarana	%	90,0	7.754.070.200,0	7.762.663.596,0	20,0	234.375.033,0	25,0	12.400.000,0	45,0	246.775.033,0	50,0	3,18	45,0	246.775.033,0	50,0	0,64	Kecamatan	
		1	3	DESA DAN KELURAHAN	lingkup Kelurahan dalam kondisi baik																	Tallo	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	3,18			50,0	0,64		
	7	0	0	PREDIKAT KINERJA												SANGAT	SANGAT			SANGAT	SANGAT		
		1	3													RENDAH	RENDAH			RENDAH	RENDAH		
	7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Persentase gangguan ketentraman dan	%	90,0	852.080.400,0	775.218.200,0	20,0	122.975.000,0	20,0	195.374.745,0	40,0	318.349.745,0	44,44	41,07	40,0	318.349.745,0	44,44	7,44	Kecamatan	
		1	4	DAN KETERTIBAN UMUM	ketertiban umum yang diselesaikan																	Tallo	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												44,44	41,07			44,44	7,44		
	7	0	0	PREDIKAT KINERJA												SANGAT	SANGAT			SANGAT	SANGAT		
		1	4													RENDAH	RENDAH			RENDAH	RENDAH		
	7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase penyelenggaraan urusan	%	100,0	12.211.653.039,0	11.354.664.300,0	25,0	1.557.187.584,0	25,0	2.414.087.125,0	50,0	3.971.274.709,0	50,0	34,97	50,0	3.971.274.709,0	50,0	6,46	Kecamatan	
		1	5	PEMERINTAHAN UMUM	pemerintahan umum di tingkat Kecamatan																	Tallo	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	34,97			50,0	6,46		
	7	0	0	PREDIKAT KINERJA												SANGAT	SANGAT			SANGAT	SANGAT		
		1	5													RENDAH	RENDAH			RENDAH	RENDAH		
	7	0		Kecamatan Tamalanrea				44.322.948.000,0	45.942.610.818,0		6.584.465.657,0		8.938.922.122,0		15.523.387.779,0		33,79		15.523.387.779,0				
	7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase ketersedian dokumen	%	100,0	15.236.534.094,0	15.721.184.674,0	30,0	2.644.089.584,0	10,0	3.429.987.888,0	40,0	6.074.077.472,0	40,0	38,64	40,0	6.074.077.472,0	40,0	7,34	Kecamatan	
		1	1	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah																	Tamalanrea	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												39,45	38,64			39,45	7,34		
	7	0	0	PREDIKAT KINERJA												SANGAT	SANGAT			SANGAT	SANGAT		
		1	1													RENDAH	RENDAH			RENDAH	RENDAH		
	7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap	%	90,0	15.394.438.642,0	17.188.193.600,0	0,0	2.381.656.935,0	0,0	3.466.072.155,0	0,0	5.847.729.090,0	0,0	34,02	0,0	5.847.729.090,0	0,0	7,61	Kecamatan	
		1	2	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan																	Tamalanrea	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	34,02			0,0	7,61		
	7	0	0	PREDIKAT KINERJA												SANGAT	SANGAT			SANGAT	SANGAT		
		1	2													RENDAH	RENDAH			RENDAH	RENDAH		
	7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan prasarana	%	90,0	4.215.677.160,0	4.202.045.000,0	0,0	194.769.165,0	0,0	0,0	0,0	194.769.165,0	0,0	4,64	0,0	194.769.165,0	0,0	0,94	Kecamatan	
		1	3	DESA DAN KELURAHAN	lingkup Kelurahan dalam kondisi baik																	Tamalanrea	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												18,89	4,64			18,89	0,94		
	7	0	0	PREDIKAT KINERJA												SANGAT	SANGAT			SANGAT	SANGAT		
		1	3													RENDAH	RENDAH			RENDAH	RENDAH		
	7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Persentase gangguan ketentraman dan	%	90,0	688.703.000,0	698.630.200,0	0,0	116.400.000,0	0,0	118.800.000,0	0,0	235.200.000,0	0,0	33,67	0,0	235.200.000,0	0,0	6,83	Kecamatan	
		1	4	DAN KETERTIBAN UMUM	ketertiban umum yang diselesaikan																	Tamalanrea	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	33,67			0,0	6,83		
	7	0	0	PREDIKAT KINERJA												SANGAT	SANGAT			SANGAT	SANGAT		
		1	4													RENDAH	RENDAH			RENDAH	RENDAH		
	7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase penyelenggaraan urusan	%	100,0	8.787.595.104,0	8.132.557.344,0	25,0	1.247.549.973,0	25,0	1.924.062.079,0	50,0	3.171.612.052,0	50,0	39,0	50,0	3.171.612.052,0	50,0	7,07	Kecamatan	
		1	5	PEMERINTAHAN UMUM	pemerintahan umum di tingkat Kecamatan																	Tamalanrea	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	39,0			50,0	7,07		
	7	0	0	PREDIKAT KINERJA												SANGAT	SANGAT			SANGAT	SANGAT		
		1	5													RENDAH	RENDAH			RENDAH	RENDAH		
	7	0		Kecamatan Tamalate				56.678.540.000,0	59.551.986.222,0		8.769.271.691,0		10.169.028.065,0		18.938.299.756,0		31,80		18.938.299.756,0				
	7	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase ketersedian dokumen	%	100,0	19.972.442.137,0	22.133.150.864,0	25,0	3.569.563.224,0	25,0	4.291.032.932,0	50,0	7.860.596.156,0	50,0	35,52	50,0	7.860.596.156,0	50,0	7,45	Kecamatan	
		1	1	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah																	Tamalate	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												42,59	35,52			42,59	7,45		
	7	0	0	PREDIKAT KINERJA												SANGAT	SANGAT			SANGAT	SANGAT		
		1	1													RENDAH	RENDAH			RENDAH	RENDAH		
	7	0	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap	%	90,0	16.698.807.700,0	17.358.233.760,0	25,0	2.672.690.880,0	25,0	3.437.623.361,0	50,0	6.110.314.241,0	55,56	35,20	50,0	6.110.314.241,0	55,56	7,44	Kecamatan	
		1	2	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan																	Tamalate	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												55,56	35,20			55,56	7,44		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	7	01	02	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	%	90,0	5.688.436.055,0	5.530.486.190,0	0,0	182.683.700,0	0,0	0,0	0,0	182.683.700,0	0,0	3,30	0,0	182.683.700,0	0,0	0,65	Kecamatan Tamalate	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												13,89	3,30			13,89	0,65		
	7	01	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	90,0	687.871.200,0	687.871.200,0	25,0	118.900.000,0	25,0	118.900.000,0	50,0	237.800.000,0	55,56	34,57	50,0	237.800.000,0	55,56	6,91	Kecamatan Tamalate	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												55,56	34,57			55,56	6,91		
	7	01	04	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	%	100,0	13.630.982.908,0	13.842.244.208,0	25,0	2.225.433.887,0	25,0	2.321.471.772,0	50,0	4.546.905.659,0	50,0	32,85	50,0	4.546.905.659,0	50,0	6,72	Kecamatan Tamalate	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	32,85			50,0	6,72		
	7	01	05	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0		Kecamatan Ujung Pandang				42.079.261.999,995	42.267.451.720,0		6.461.823.401,0		7.984.505.915,0		14.446.329.316,0		34,18		14.446.329.316,0				
	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	15.463.395.516,0	15.266.407.592,0	20,0	2.421.814.183,0	20,0	3.103.356.341,0	40,0	5.525.170.524,0	40,0	36,19	40,0	5.525.170.524,0	40,0	6,41	Kecamatan Ujung Pandang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												66,91	36,19			66,91	6,41		
	7	01	01	PREDIKAT KINERJA												SEDANG	SANGAT RENDAH			SEDANG	SANGAT RENDAH		
	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	%	90,0	16.190.709.700,0	16.815.936.560,0	22,50	3.068.116.440,0	45,0	3.828.277.801,0	67,50	6.896.394.241,0	75,0	41,01	67,50	6.896.394.241,0	75,0	8,58	Kecamatan Ujung Pandang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												75,0	41,01			75,0	8,58		
	7	01	02	PREDIKAT KINERJA												SEDANG	SANGAT RENDAH			SEDANG	SANGAT RENDAH		
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	%	90,0	5.164.058.403,995	5.192.078.404,0	0,0	173.980.179,0	0,0	0,0	0,0	173.980.179,0	0,0	3,35	0,0	173.980.179,0	0,0	0,69	Kecamatan Ujung Pandang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												27,78	3,35			27,78	0,69		
	7	01	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	90,0	655.205.000,0	590.400.000,0	22,50	123.600.000,0	45,0	129.400.000,0	67,50	253.000.000,0	75,0	42,85	67,50	253.000.000,0	75,0	7,87	Kecamatan Ujung Pandang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												75,0	42,85			75,0	7,87		
	7	01	04	PREDIKAT KINERJA												SEDANG	SANGAT RENDAH			SEDANG	SANGAT RENDAH		
	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	%	100,0	4.605.893.380,0	4.402.629.164,0	25,0	674.312.599,0	50,0	923.471.773,0	75,0	1.597.784.372,0	75,0	36,29	75,0	1.597.784.372,0	75,0	6,76	Kecamatan Ujung Pandang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												75,0	36,29			75,0	6,76		
	7	01	05	PREDIKAT KINERJA												SEDANG	SANGAT RENDAH			SEDANG	SANGAT RENDAH		
	7	0		Kecamatan Ujung Tanah				32.358.162.999,998	35.094.256.301,0		4.600.395.420,0		5.787.584.047,0		10.387.979.467,0		29,60		10.387.979.467,0				
	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	13.092.504.124,0	13.979.584.068,0	12,50	2.082.758.115,0	37,50	2.634.731.260,0	50,0	4.717.489.375,0	50,0	33,75	50,0	4.717.489.375,0	50,0	7,27	Kecamatan Ujung Tanah	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												33,33	33,75			33,33	7,27		
	7	01	01	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	%	90,0	8.974.107.460,0	11.303.980.190,0	0,0	1.567.744.775,0	0,0	2.011.485.470,0	0,0	3.579.230.245,0	0,0	31,66	0,0	3.579.230.245,0	0,0	7,67	Kecamatan Ujung Tanah	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	31,66			0,0	7,67		
	7	01	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	%	90,0	4.905.406.199,998	4.837.901.159,0	0,0	147.454.820,0	0,0	21.122.715,0	0,0	168.577.535,0	0,0	3,48	0,0	168.577.535,0	0,0	0,72	Kecamatan Ujung Tanah	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												27,78	3,48			27,78	0,72		
	7	01	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	90,0	723.577.660,0	585.819.700,0	0,0	93.600.000,0	0,0	100.825.710,0	0,0	194.425.710,0	0,0	33,19	0,0	194.425.710,0	0,0	5,37	Kecamatan Ujung Tanah	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	33,19			0,0	5,37		
	7	01	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	%	100,0	4.662.567.556,0	4.386.971.184,0	25,0	708.837.710,0	25,0	1.019.418.892,0	50,0	1.728.256.602,0	50,0	39,40	50,0	1.728.256.602,0	50,0	7,41	Kecamatan Ujung Tanah	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	39,40			50,0	7,41		
	7	0 1	0 5	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0		Kecamatan Wajo				31.153.757.999,998	34.459.058.000,0		3.724.180.859,0		5.933.838.690,0		9.658.019.549,0		28,03		9.658.019.549,0				
	7	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	13.721.716.364,0	16.410.251.160,0	22,0	1.902.215.069,0	25,0	3.237.836.810,0	47,0	5.140.051.879,0	47,0	31,32	47,0	5.140.051.879,0	47,0	7,23	Kecamatan Wajo	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												40,92	31,32			40,92	7,23		
	7	0 1	0 1	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	%	90,0	8.195.200.000,0	9.142.432.200,0	10,63	972.010.590,0	21,35	1.952.203.090,0	31,98	2.924.213.680,0	35,53	31,99	31,98	2.924.213.680,0	35,53	6,80	Kecamatan Wajo	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												35,53	31,99			35,53	6,80		
	7	0 1	0 2	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	%	90,0	4.188.799.999,998	4.135.513.100,0	3,04	125.979.510,0	0,0	0,0	3,04	125.979.510,0	3,38	3,05	3,04	125.979.510,0	3,38	0,61	Kecamatan Wajo	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												1,69	3,05			1,69	0,61		
	7	0 1	0 3	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	90,0	472.342.600,0	472.342.600,0	22,50	117.600.000,0	22,50	117.600.000,0	45,0	235.200.000,0	50,0	49,79	45,0	235.200.000,0	50,0	9,71	Kecamatan Wajo	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,0	49,79			50,0	9,71		
	7	0 1	0 4	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	%	100,0	4.575.699.036,0	4.298.518.940,0	14,10	606.375.690,0	14,56	626.198.790,0	28,66	1.232.574.480,0	28,66	28,67	28,66	1.232.574.480,0	28,66	5,38	Kecamatan Wajo	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												28,66	28,67			28,66	5,38		
	7	0 1	0 5	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0		Kecamatan Kepulauan Sangkarrang				14.665.753.000,0	16.024.930.200,0		1.854.613.246,0		3.163.155.822,0		5.017.769.068,0		31,31		5.017.769.068,0				
	7	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	9.509.707.232,0	8.723.744.572,0	15,0	1.183.939.116,0	15,0	1.461.108.457,0	30,0	2.645.047.573,0	30,0	30,32	30,0	2.645.047.573,0	30,0	4,09	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												31,11	30,32			31,11	4,09		
	7	0 1	0 1	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	%	90,0	1.509.578.400,0	4.374.422.100,0	5,95	260.510.430,0	10,0	1.236.086.165,0	15,95	1.496.596.595,0	17,72	34,21	15,95	1.496.596.595,0	17,72	18,71	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												17,72	34,21			17,72	18,71		
	7	0 1	0 2	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	%	90,0	1.605.204.300,0	1.003.140.300,0	9,40	94.904.300,0	15,0	9.600.000,0	24,40	104.504.300,0	27,11	10,42	24,40	104.504.300,0	27,11	1,33	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												27,11	10,42			27,11	1,33		
	7	0 1	0 3	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	90,0	37.577.500,0	37.577.500,0	23,95	9.000.000,0	45,0	9.000.000,0	68,95	18.000.000,0	76,61	47,90	68,95	18.000.000,0	76,61	9,52	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												76,61	47,90			76,61	9,52		
	7	0 1	0 4	PREDIKAT KINERJA												TINGGI	SANGAT RENDAH			TINGGI	SANGAT RENDAH		
	7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	%	100,0	2.003.685.568,0	1.886.045.728,0	16,23	306.259.400,0	20,0	447.361.200,0	36,23	753.620.600,0	36,23	39,96	36,23	753.620.600,0	36,23	5,82	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	
	7	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												36,23	39,96			36,23	5,82		
	7	0 1	0 5	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				30.448.870.000,0	36.209.438.960,0		1.602.510.271,0		11.651.172.629,0		13.253.682.900,0		36,60		13.253.682.900,0		3,96		
	8	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				30.448.870.000,0	36.209.438.960,0		1.602.510.271,0		11.651.172.629,0		13.253.682.900,0		36,60		13.253.682.900,0				
	8	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0	9.276.888.760,0	8.975.384.610,0	25,0	1.417.535.099,0	25,0	1.840.103.562,0	50,0	3.257.638.661,0	50,0	36,30	50,0	3.257.638.661,0	50,0	7,12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												60,74	36,30			60,74	7,12		

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
										I		II											
							K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2			3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	8	01	01	PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	80,0	3.004.829.360,0	2.516.951.400,0	0,0	36.825.000,0	20,0	248.460.920,0	20,0	285.285.920,0	25,0	11,33	20,0	285.285.920,0	21,05	1,65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												25,0	11,33			21,05	1,65		
	8	01	02	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	85,0	3.790.853.200,0	3.667.664.600,0	0,0	10.250.000,0	2,70	144.112.749,0	2,70	154.362.749,0	3,18	4,21	2,70	154.362.749,0	2,84	0,08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												3,18	4,21			2,84	0,08		
	8	01	03	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	85,0	210.231.060,0	221.331.900,0	0,0	35.875.000,0	25,0	112.955.688,0	25,0	148.830.688,0	29,41	67,24	25,0	148.830.688,0	26,32	6,57	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												29,41	67,24			26,32	6,57		
	8	01	04	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SEDANG			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	85,0	1.502.342.600,0	1.410.125.650,0	0,0	0,0	75,0	1.016.400.000,0	75,0	1.016.400.000,0	88,24	72,08	75,0	1.016.400.000,0	78,95	11,92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												88,24	72,08			78,95	11,92		
	8	01	05	PREDIKAT KINERJA												TINGGI	SEDANG			TINGGI	SANGAT RENDAH		
	8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	85,0	12.663.725.020,0	19.417.980.800,0	0,0	102.025.172,0	43,0	8.289.139.710,0	43,0	8.391.164.882,0	50,59	43,21	43,0	8.391.164.882,0	45,26	11,63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	0	0	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												50,59	43,21			45,26	11,63		
	8	01	06	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		